



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029**

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR
2025



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis PD, rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja PD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2029.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi PD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi PD.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.

16. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR

Pasal 2

- (1) RPJMD Semesta Berencana menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Walikota yang memuat Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program PD yang disertai dengan target dan kebutuhan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. pedoman dalam penyusunan Renstra sesuai periode RPJMD Semesta Berencana;
 - c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai dengan periode RPJMD Semesta Berencana;
 - d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD Semesta Berencana; dan
 - e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD Semesta Berencana.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR

Pasal 3

- (1) RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN;
BAB II	:	GAMBARAN UMUM DAERAH;
BAB III	:	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB IV	:	PROGRAM PD DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
BAB V	:	PENUTUP.
- (2) Isi dan uraian RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan dalam RPJMD Semesta Berencana;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD Semesta Berencana.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

RKPD tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALIKOTA DENPASAR,

IGUSTENGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IDA BACUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :
(3,41/2025)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, program prioritas, serta kerangka pendanaan pembangunan yang bersifat indikatif. RPJMD disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar, serta memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan bagian pertama dari keempat tahapan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025–2029 harus mengacu pada dokumen RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025–2045.

RPJMD menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Dengan ditetapkannya RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025–2029 dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat Kota Denpasar memiliki acuan bersama dalam melaksanakan pembangunan daerah, sehingga terwujud Kota Denpasar yang maju, berdaya saing, inklusif, serta berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Secara garis Besar Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2026 terdiri dari 6 (enam) BAB dan 7 (tujuh) Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
- BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB IV : PROGRAM PD DAN KINERJA
PENYELENGGARAAAN PEMERINTAH
DAERAH
- BAB V : PENUTUP

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

RPJMD Semesta Berencana ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Denpasar terpilih untuk periode 2025–2029. Dokumen ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengatur secara komprehensif keterkaitan antara perencanaan pusat dan daerah.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini berisi arah kebijakan, strategi, prioritas pembangunan, program prioritas, serta target kinerja pembangunan daerah yang diselaraskan dengan RPJPD Kota Denpasar, RPJMN, dan kebijakan pembangunan Provinsi Bali.

Penyusunan RPJMD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui proses partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Denpasar ke depan, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, maupun tata kelola pemerintahan.

Melalui dokumen RPJMD ini, Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk mewujudkan Visi **“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”** melalui 5 (lima) Misi utama yaitu: 1).Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan; 2)Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana; 3)Mewujudkan Kejujuran dan *Spirit Sewakadarma* sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) ; 4)Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana; serta 5)Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran perangkat daerah, DPRD Kota Denpasar, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan RPJMD ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan Kota Denpasar yang Maju, Kreatif, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

Denpasar, 20 Agustus 2025
Walikota Denpasar



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1-1

1.1 LATAR BELAKANG.....1-1

1.2 LANDASAN HUKUM.....1-3

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....1-5

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN1-7

1.4.1 Maksud1-7

1.4.2 Tujuan.....1-7

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....1-8

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH2-1

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....2-1

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....2-1

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah.....2-1

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam2-13

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
.....2-16

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
.....2-32

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas2-36

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. 2-
38

2.1.1.7 Demografi2-40

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....2-54

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi2-54

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua.....2-62

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata.....2-67

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif.....2-71

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju....2-71

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan
Masyarakat Inklusif2-72

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH2-76

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia2-76

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi2-77

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru2-82

2.1.3.4	Transformasi Digital	2-82
2.1.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.....	2-82
2.1.3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.....	2-85
2.1.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro	2-88
2.1.4	ASPEK PELAYANAN UMUM	2-92
2.1.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif.....	2-92
2.1.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.....	2-94
2.1.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	2-96
2.1.4.4	Kinerja setiap Urusan Pemerintah Daerah	2-98
2.1.5	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	2-259
2.1.6	KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR 2- 266	
2.1.7	RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA DENPASAR.....	2-271
2.1.7.1	Struktur Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	2-271
2.1.7.2	Arah Pembangunan Infrastruktur Kota Denpasar dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029	2-274
2.1.8	BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KOTA DENPASAR. 2- 276	
2.2	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	2-278
2.2.1	Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir.....	2-279
2.2.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	2-279
2.2.1.2	Analisis Neraca Daerah.....	2-286
2.2.2	Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan	2-292
2.2.3	Pendanaan Inovatif dalam Pembangunan Daerah	2-295
2.2.3.1	Konsep dan Prinsip Creative Financing	2-295
2.2.3.2	Peluang dan Tantangan Implementasi Skema Creative Financing	2-298
2.2.3.3	Arah Kebijakan dalam RPJMD: Rekomendasi Strategis terkait Creative Financing	2-302

2.2.4	Kebijakan Pengelolaan Keuangan.....	2-305
2.2.4.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	2-305
2.2.4.2	Analisis Pembiayaan	2-307
2.3	Permasalahan dan Isu Strategis.....	2-308
2.3.1	Permasalahan.....	2-308
2.3.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	2-309
2.3.1.2	Aspek dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	2-309
2.3.1.3	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	2-317
2.3.1.4	Aspek Daya Saing	2-318
2.3.1.5	Aspek Pelayanan Umum	2-318
2.3.2	Isu Strategis	2-333
2.3.2.1	Isu Strategis Global dan Nasional	2-333
2.3.2.2	Arah Pembangunan Tahun 2025 – 2029	2-344
2.3.2.3	Isu Strategis Regional	2-357
2.3.2.4	Isu Strategis Daerah	2-358
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH3-1		
3.1	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	3-1
3.1.1	VISI DAN MISI	3-1
3.1.1.1	VISI	3-1
3.1.1.2	MISI.....	3-3
3.1.2	TUJUAN DAN SASARAN	3-7
3.2	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	3-11
3.2.1	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH	3-11
3.2.2	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	3-21
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH4-1		
4.1	PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	4-1
4.2	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	4-39
4.2.1	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	4-40
4.2.2	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	4-51

BAB V PENUTUP	5-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	5-1
5.2 Pedoman Transisi	5-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya1-6

Gambar 2. 1 Peta Administrasi dan Batas Wilayah Kota Denpasar2-3

Gambar 2. 2 Peta Topografi Wilayah Kota Denpasar2-5

Gambar 2. 3 Peta Kemiringan lereng wilayah Kota Denpasar2-5

Gambar 2. 4 Peta Geologi wilayah Kota Denpasar2-6

Gambar 2. 5 Peta Jenis Tanah wilayah Kota Denpasar2-7

Gambar 2. 6 Peta Peta akuifer air tanah di Kota Denpasar2-10

Gambar 2. 7 Peta Curah Hujan di Kota Denpasar2-11

Gambar 2. 8 Peta Penggunaan Lahan Kota Denpasar2-15

Gambar 2. 9 Peta Rencana Pola Ruang Kota Denpasar2-15

Gambar 2. 10 Peta Status Daya Dukung Lahan Permukiman Kota Denpasar 2025 (atas) dan Tahun 2029 (bawah)2-18

Gambar 2. 11 Peta Status DDLH Penyedia Bahan Pangan di Provinsi Bali Tahun 20182-19

Gambar 2. 12 Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Kota Denpasar2-20

Gambar 2. 13 Peta Jasa Penyediaan Pangan2-22

Gambar 2. 14 Peta Jasa Penyediaan Air Bersih2-23

Gambar 2. 15 Peta Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik2-24

Gambar 2. 16 Peta Jasa Pengaturan Iklim2-25

Gambar 2. 17 Peta Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara2-26

Gambar 2. 18 Peta Jasa Pengaturan Tata Aliran Air2-27

Gambar 2. 19 Peta Jasa Pengaturan Pencegahan Dan Perlindungan Bencana Alam2-28

Gambar 2. 20 Peta Jasa Pengaturan Pemurnian Kualitas Air2-29

Gambar 2. 21 Peta Jasa Pengaturan Penguraian dan Pengolahan Limbah2-30

Gambar 2. 22 Peta Jasa Ekowisata2-31

Gambar 2. 23 Peta Jasa Pendukung Biodiversitas2-32

Gambar 2. 24 Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kota Denpasar 2020-20242-33

Gambar 2. 25 Grafik Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Denpasar 2020-20242-33

Gambar 2. 26 Grafik Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Denpasar Tahun 2020-20222-34

Gambar 2. 27 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Denpasar 2020-20242-34

Gambar 2. 28 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kota Denpasar2-36

Gambar 2. 29 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Denpasar Tahun 2020-20242-37

Gambar 2. 30	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kota Denpasar2-37
Gambar 2. 31	Persentase Timbunan Sampah yang Tertangani di Kota Denpasar Tahun 2020-20242-38
Gambar 2. 32	Grafik Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024.....2-39
Gambar 2. 33	Jumlah Penduduk di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024.....2-41
Gambar 2. 34	Grafik Persebaran Penduduk Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 20242-42
Gambar 2. 35	Grafik Dinamika Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2019-2024.....2-42
Gambar 2. 36	Grafik Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Per Tahun Kota Denpasar Tahun 2020-20242-43
Gambar 2. 37	Piramida Penduduk Kota Denpasar Tahun 2020-2024 .2-45
Gambar 2. 38	Rasio Jenis Kelamin Kota Denpasar Tahun 2020-2024 2-46
Gambar 2. 39	Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut SMA/SLTA Sederajat yang Ditamatkan di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2020-20232-47
Gambar 2. 40	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Kota Denpasar Tahun 2019-20222-48
Gambar 2. 41	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Tahun 2025 – 20302-48
Gambar 2. 42	Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kota Denpasar Tahun 2025 – 20302-50
Gambar 2. 43	Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kota Denpasar Tahun 2025 – 2030.....2-51
Gambar 2. 44	Grafik Perbandingan PDRB ADHB dengan ADHK Kota Denpasar Tahun 2020-20242-54
Gambar 2. 45	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-20242-55
Gambar 2. 46	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2020-20242-55
Gambar 2. 47	Grafik Garis Kemiskinan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2020-20242-56
Gambar 2. 48	Grafik Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-20242-57
Gambar 2. 49	Grafik PDRB Per Kapita ADHB Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional.....2-57
Gambar 2. 50	Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024 2-58
Gambar 2. 51	Grafik Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Denpasar Tahun 2020-20242-59

Gambar 2. 52	Grafik Indeks Gini Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-20242-59
Gambar 2. 53	Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-20242-60
Gambar 2. 54	Grafik IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-20242-61
Gambar 2. 55	IPM Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-20242-61
Gambar 2. 56	Grafik Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2020-20242-62
Gambar 2. 57	Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional pada tahun 2020 – 2024....2-63
Gambar 2. 58	Indeks Keluarga Sehat Kota Denpasar Tahun 2021-20242-63
Gambar 2. 59	Grafik Prevalensi Stunting (Pendek/Sangat Pendek) Anak ≤ 2 Tahun dan Balita Stunting Kota Denpasar Tahun 2020-20232-64
Gambar 2. 60	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024.....2-64
Gambar 2. 61	Perbandingan Proporsi Balita Gizi Buruk Kota Denpasar 20232-65
Gambar 2. 62	Persentase Balita Gizi Kurang di Provinsi Bali tahun 2020 – 20242-65
Gambar 2. 63	Perbandingan Persentase Balita Gizi Kurang Kota Denpasar 20242-66
Gambar 2. 64	Persentase Desa Siaga Aktif Berdasarkan Strata di Kota Denpasar 20232-66
Gambar 2. 65	Diagram Angka Melek Huruf Kota Denpasar Tahun 2020–20242-68
Gambar 2. 66	Grafik Perbandingan Persentase Angka Melek Huruf Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020 – 20242-68
Gambar 2. 67	Grafik Perbandingan Tahun Harapan Sekolah Kota Denpasar dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-20242-69
Gambar 2. 68	Grafik Perbandingan Angka Harapan Sekolah Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-20242-70
Gambar 2. 69	Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali.. 2-72
Gambar 2. 70	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar 2022-20242-72

Gambar 2. 71	Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IDG) Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2019-20242-73
Gambar 2. 72	Grafik Indeks Pembangunan Gender Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-20242-74
Gambar 2. 73	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Denpasar 2020-20242-75
Gambar 2. 74	Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2019-20242-76
Gambar 2. 75	Grafik Angka Ketergantungan Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan Indonesia Tahun 2020-20242-77
Gambar 2. 76	Persentase Kontribusi PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2020-20242-78
Gambar 2. 77	Grafik Kontribusi Sektor Akomodasi Makan Minum terhadap PDRB Kota Denpasar Tahun 2020-20242-79
Gambar 2. 78	Grafik Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Denpasar Tahun 2020-20242-79
Gambar 2. 79	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-20242-80
Gambar 2. 80	Grafik Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-20242-81
Gambar 2. 81	Skor Indeks Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-20242-81
Gambar 2. 82	Grafik Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Denpasar2-83
Gambar 2. 83	Grafik Kontribusi Sektor Pengeluaran Terhadap PDRB Kota Denpasar Tahun 2020-20242-84
Gambar 2. 84	Perkembangan Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB Kota Denpasar, PDRB Provinsi Bali, dan PDB Tahun 2019-20222-85
Gambar 2. 85	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar Tahun 2022-20242-85
Gambar 2. 86	Rasio Rumah Layak Huni Kota Denpasar Tahun 2020-20242-86
Gambar 2. 87	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Denpasar Tahun 2020-20242-86
Gambar 2. 88	Nilai Tukar Petani Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-20242-87
Gambar 2. 89	Grafik Laju Inflasi Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2020-20242-88
Gambar 2. 90	Rasio Produktivitas Sektor di Kota Denpasar Tahun 2023-20242-89

Gambar 2. 91	Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Sebulan (Rupiah) 2020-2023.....	2-90
Gambar 2. 92	Grafik Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-91
Gambar 2. 93	Grafik Jumlah Industri di Kota Denpasar Tahun 2020-2022	2-92
Gambar 2. 94	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-93
Gambar 2. 95	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Denpasar 2021-2024	2-93
Gambar 2. 96	Grafik Persentase Penegakan PERDA Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-94
Gambar 2. 97	Indeks Demokrasi Provinsi Bali Tahun 2020-2023	2-95
Gambar 2. 98	Grafik Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Kota Denpasar 2020-2023	2-95
Gambar 2. 99	Grafik Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (Crime Total) pada Tahun 2020-2023.....	2-96
Gambar 2. 100	Grafik Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan (Clearance Rate) pada Tahun 2020-2023.....	2-96
Gambar 2. 101	Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Bali 2024	2-97
Gambar 2. 102	Indeks Daya Saing Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024	2-98
Gambar 2. 103	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024.....	2-98
Gambar 2. 104	Grafik Perbandingan Angka Harapan Sekolah Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2024	2-99
Gambar 2. 105	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-100
Gambar 2. 106	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-101
Gambar 2. 107	Grafik Perbandingan Persentase Angka Melek Huruf Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020 – 2023	2-101
Gambar 2. 108	Rasio Ketersediaan Sekolah Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-103
Gambar 2. 109	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Jenjang Pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat Tahun 2020-2024	2-104
Gambar 2. 110	Grafik Angka Pendidikan yang ditamatkan Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024.....	2-104
Gambar 2. 111	Angka Putus Sekolah Kota Denpasar Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024.....	2-105

Gambar 2. 112	Grafik Kondisi Bangunan Baik Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024	2-106
Gambar 2. 113	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Jumlah Penduduk Usia Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-106
Gambar 2. 114	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-107
Gambar 2. 115	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Denpasar 2020–2024	2-109
Gambar 2. 116	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-109
Gambar 2. 117	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-110
Gambar 2. 118	Rasio Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk (100.000 penduduk) pada tahun 2020–2024 Kota Denpasar.....	2-110
Gambar 2. 119	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-111
Gambar 2. 120	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Denpasar 2020–2024	2-113
Gambar 2. 121	Persentase Balita 12–23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	2-114
Gambar 2. 122	Grafik Persentase Bayi yang Diimunisasi Campak Tahun 2020–2024	2-115
Gambar 2. 123	Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis (CNR) Per 100.000 Penduduk.....	2-117
Gambar 2. 124	Cakupan Pengobatan Semua Kasus TBC (Case Detection Rate/CDR) Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-117
Gambar 2. 125	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Kota Denpasar Tahun 2019–2020	2-118
Gambar 2. 126	Tingkat Kematian karena Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk	2-118
Gambar 2. 127	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Denpasar Tahun 2014–2018	2-119
Gambar 2. 128	Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk	2-120
Gambar 2. 129	Case Fatality Rate DBD Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-120
Gambar 2. 130	Penyakit Diare yang Ditangani Kota Denpasar Tahun 2020–2023	2-121
Gambar 2. 131	Persentase Penyakit Diare yang Ditangani Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-121

Gambar 2. 132	Angka Kejadian Malaria Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-122
Gambar 2. 133	Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-122
Gambar 2. 134	Cakupan Kunjungan Bayi Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-123
Gambar 2. 135	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-124
Gambar 2. 136	Cakupan pelayanan Nifas Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-124
Gambar 2. 137	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang ditangani Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-125
Gambar 2. 138	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024.....	2-125
Gambar 2. 139	Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada Anak Usia <6 Bulan	2-126
Gambar 2. 140	Cakupan penjangkaran Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/Sederajat Kota Denpasar Tahun 2020–2023	2-127
Gambar 2. 141	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2020–2024..	2-127
Gambar 2. 142	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-128
Gambar 2. 143	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2019–2023	2-128
Gambar 2. 144	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2018–2020	2-129
Gambar 2. 145	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi IPA DSDP dan Komunal Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-129
Gambar 2. 146	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air Tidak Tersumbat Kota Denpasar Tahun 2020–2024 ...	2-130
Gambar 2. 147	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-130
Gambar 2. 148	Rasio Jaringan Irigasi Kota Denpasar Tahun 2020–2024. 2-131	
Gambar 2. 149	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan (SDGs) Kota Denpasar Tahun 2020–2024.....	2-131
Gambar 2. 150	Persentase Areal Kawasan Kumuh Kota Denpasar Tahun 2019–2024.....	2-132
Gambar 2. 151	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kota Denpasar Tahun 2017–2019.....	2-133
Gambar 2. 152	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan 2020–2024.....	2-133

Gambar 2. 153	Jumlah Bangunan Ber-IMB Kota Denpasar Tahun 2018–2020	2-134
Gambar 2. 154	Ketaatan Terhadap RTRW Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-134
Gambar 2. 155	Rasio Rumah Layak Huni Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-135
Gambar 2. 156	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-135
Gambar 2. 157	Rasio Permukiman Layak Huni Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-136
Gambar 2. 158	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau Kota Denpasar	2-136
Gambar 2. 159	Persentase Luasan permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Denpasar.....	2-137
Gambar 2. 160	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-137
Gambar 2. 161	Grafik Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-138
Gambar 2. 162	Grafik Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-139
Gambar 2. 163	Grafik Angka Kriminalitas yang Tertangani Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-139
Gambar 2. 164	Grafik Persentase Menurunnya Konflik Sosial Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-140
Gambar 2. 165	Grafik Persentase Menurunnya Kasus SARA Kota Denpasar Tahun 2016-2019	2-140
Gambar 2. 166	Grafik Persentase Menurunnya Kerugian Material dan Jiwa Kota Denpasar Tahun 2018-2020	2-141
Gambar 2. 167	Grafik Persentase Desa Mandiri Dan Desa Tangguh Bencana Kota Denpasar Tahun 2015-2019	2-142
Gambar 2. 168	Grafik Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Politik Kota Denpasar Tahun 2018-2020 ..	2-143
Gambar 2. 169	Grafik Persentase Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Sosial Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-144
Gambar 2. 170	Grafik Persentase Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Sosial Terkait Kebencanaan Kota Denpasar Tahun 2020-2024 ..	2-144
Gambar 2. 171	Grafik Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-147
Gambar 2. 172	Grafik Upah Minimum Regional Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2020-2025	2-148

Gambar 2. 173	Grafik Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2025	2-148
Gambar 2. 174	Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024	2-149
Gambar 2. 175	Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024	2-150
Gambar 2. 176	Grafik Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-152
Gambar 2. 177	Grafik Rasio APM perempuan/laki-laki di Kota Denpasar Tahun 2012-2018	2-154
Gambar 2. 178	Grafik Ketersediaan Pangan Utama Kota Denpasar 2020-2024	2-155
Gambar 2. 179	Grafik Ketersediaan Energi Kota Denpasar 2020-2024	2-155
Gambar 2. 180	Ketersediaan Protein Kota Denpasar Tahun 2020-2024...	2-156
Gambar 2. 181	Grafik Aksesibilitas/Keterjangkauan Kota Denpasar terhadap Pangan Tahun 2020-2022	2-157
Gambar 2. 182	Grafik Persentase Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kota Denpasar Tahun 2020-2023..	2-157
Gambar 2. 183	Grafik Persentase Pemanfaatan Pangan Kota Denpasar Tahun 2020-2022	2-158
Gambar 2. 184	Grafik Ketersediaan Protein dan Energi per Kapita Kota Denpasar 2020-2024	2-158
Gambar 2. 185	Grafik Persentase Ketersediaan RPPLH Kota Denpasar Tahun 2021-2023	2-160
Gambar 2. 186	Indeks Kualitas Air Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-161
Gambar 2. 187	Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-161
Gambar 2. 188	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-162
Gambar 2. 189	Jumlah Limbah B3 yang Dikelola Kota Denpasar Tahun 2020-2022	2-163
Gambar 2. 190	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Izinnya Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-163
Gambar 2. 191	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat terkait Persetujuan Lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Kota Tahun 2021-2024	2-164

Gambar 2. 192	Persentase Timbunan Sampah yang Tertangani di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-165
Gambar 2. 193	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-165
Gambar 2. 194	Rasio kepemilikan KTP dan NIK 2020-2024.....	2-167
Gambar 2. 195	Persentase Balita (0-4 tahun) Berakta Kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-167
Gambar 2. 196	Persentase Anak (0-17 tahun) Berakta Kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-168
Gambar 2. 197	Persentase Pasangan Berakta Nikah Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-168
Gambar 2. 198	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-169
Gambar 2. 199	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kota Denpasar 2020-2024	2-169
Gambar 2. 200	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-170
Gambar 2. 201	Grafik Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-173
Gambar 2. 202	Indeks Desa Membangun di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-175
Gambar 2. 203	Rasio Akseptor KB di Kota Denpasar Tahun 2020-2024 ..	2-178
Gambar 2. 204	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-179
Gambar 2. 205	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-180
Gambar 2. 206	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-181
Gambar 2. 207	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Denpasar Tahun 2020-2024.....	2-181
Gambar 2. 208	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-182
Gambar 2. 209	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-183
Gambar 2. 210	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-183
Gambar 2. 211	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-184

Gambar 2. 212	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri di Kota Denpasar Tahun 2020-2024.....	2-186
Gambar 2. 213	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-188
Gambar 2. 214	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-192
Gambar 2. 215	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-193
Gambar 2. 216	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-194
Gambar 2. 217	Rasio Izin Trayek di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-196
Gambar 2. 218	Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-196
Gambar 2. 219	Jumlah Sepeda Motor di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-197
Gambar 2. 220	Jumlah Uji KIR Kendaraan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-198
Gambar 2. 221	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-198
Gambar 2. 222	Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-200
Gambar 2. 223	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-200
Gambar 2. 224	Jumlah Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.....	2-201
Gambar 2. 225	Persentase Pelanggan Telepon di Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-203
Gambar 2. 226	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Telepon Seluler di Kota Denpasar Tahun 2020-2023.....	2-204
Gambar 2. 227	Persentase Pengguna Internet di Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-204
Gambar 2. 228	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Komputer di Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-205
Gambar 2. 229	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-206
Gambar 2. 230	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-207
Gambar 2. 231	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-207

Gambar 2. 232	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Denpasar Tahun 2019-2024	2-208
Gambar 2. 233	Persentase Wirausaha Muda di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-209
Gambar 2. 234	Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-209
Gambar 2. 235	Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-210
Gambar 2. 236	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-211
Gambar 2. 237	Jumlah Atlet Berprestasi di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-211
Gambar 2. 238	Jumlah Prestasi Olahraga di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-212
Gambar 2. 239	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-214
Gambar 2. 240	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Denpasar Tahun 2019-2024	2-214
Gambar 2. 241	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-215
Gambar 2. 242	Jumlah Kegiatan Keagamaan di Kota Denpasar Tahun 2020-2022	2-216
Gambar 2. 243	Jumlah Promosi Kebudayaan yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-216
Gambar 2. 244	Persentase Pemustaka per Tahun di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-217
Gambar 2. 245	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-218
Gambar 2. 246	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Kota Denpasar Tahun 2020-2023 ..	2-219
Gambar 2. 247	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-219
Gambar 2. 248	Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Denpasar Tahun 2020-2024.....	2-220
Gambar 2. 249	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-220
Gambar 2. 250	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-222
Gambar 2. 251	Nilai Rata-Rata Evaluasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-222

Gambar 2. 252	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-223
Gambar 2. 253	Grafik Jumlah Kunjungan Wisata Asing dan Domestik Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-224
Gambar 2. 254	Grafik Total Kunjungan Wisata Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-225
Gambar 2. 255	Grafik Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Asing dan Domestik (Hari) Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-226
Gambar 2. 256	Jumlah Sarana Kepariwisata Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-226
Gambar 2. 257	Grafik Luas Lahan Pertanian Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-227
Gambar 2. 258	Grafik Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-228
Gambar 2. 259	Grafik Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Kota Denpasar tahun 2020-2023	2-228
Gambar 2. 260	Grafik Cakupan Bina Kelompok Tani Kota Denpasar Tahun 2019-2023	2-229
Gambar 2. 261	Grafik Cakupan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024	2-230
Gambar 2. 262	Grafik Luas Lahan Irigasi Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-230
Gambar 2. 263	Grafik Penyuluh Lapangan dan Pembagian Kerjanya di Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-231
Gambar 2. 264	Grafik Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-233
Gambar 2. 265	Grafik Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-233
Gambar 2. 266	Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-234
Gambar 2. 267	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2019-2024	2-235
Gambar 2. 268	Grafik Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-235
Gambar 2. 269	Persentase Kontribusi PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024	2-236
Gambar 2. 270	Laju PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ...	2-237
Gambar 2. 271	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kota Denpasar Tahun 2020-2022	2-237
Gambar 2. 272	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-238

Gambar 2. 273	Capaian Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-239
Gambar 2. 274	Capaian Konsumsi Ikan Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-240
Gambar 2. 275	Cakupan Bantuan Kelompok Nelayan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-241
Gambar 2. 276	Capaian Bantuan Kelompok Pembudidaya Ikan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-243
Gambar 2. 277	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-244
Gambar 2. 278	Jumlah Kapal di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-245
Gambar 2. 279	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar 2020-2024	2-250
Gambar 2. 280	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Denpasar 2020-2024	2-251
Gambar 2. 281	Grafik Persentase SILPA Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-253
Gambar 2. 282	Grafik Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-253
Gambar 2. 283	Grafik Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-254
Gambar 2. 284	Grafik Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kota Denpasar Tahun 2020--2024	2-255
Gambar 2. 285	Grafik Jabatan Kepegawaian di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-256
Gambar 2. 286	Grafik Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-257
Gambar 2. 287	Grafik Persentase Hasil Temuan Bidang Pengawasan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-258
Gambar 2. 288	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Denpasar	2-273
Gambar 2. 289	Peta Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Bali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029	2-274
Gambar 2. 290	Gambar Kegiatan Revitalisasi Pasar Suci Denpasar	2-276
Gambar 2. 291	Penataan Parkir oleh Juru Parkir BPS di Titik Parkir Kota Denpasar	2-277
Gambar 2. 292	Pengairan PDAM Sewakadherma	2-278
Gambar 2. 293	Jumlah Pendapatan dan Laju Pendapatan Daerah Denpasar Tahun 2020-2024	2-282
Gambar 2. 294	Komponen Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-282

Gambar 2. 295	Realisasi PAD Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-283
Gambar 2. 296	Proporsi Komponen Pembentuk PAD Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-283
Gambar 2. 297	Proporsi Komponen Pembentuk Pendapatan Transfer Kota Denpasar	2-284
Gambar 2. 298	Kemandirian Keuangan Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-285
Gambar 2. 299	Realisasi Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-285
Gambar 2. 300	Proporsi Realisasi belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2020–2024	2-286
Gambar 2. 301	Peta Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Bali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029	2-347
Gambar 3. 1	Penyelarasan Visi RPJMD Kota Denpasar dengan Visi RPJMN, dan RPJPD Kota Denpasar.....	3-3
Gambar 3. 2	Penyelarasan Misi RPJMD Kota Denpasar dengan Misi RPJMN, dan RPJPD	3-5
Gambar 3. 3	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar	3-17

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Letak Geografis Kecamatan di Kota Denpasar2-1

Tabel 2. 2 Luas Daerah Menurut Kecamatan pada Tahun 20242-2

Tabel 2. 3 Desa/Kelurahan per Kecamatan2-2

Tabel 2. 4 Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian dan
Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya2-4

Tabel 2. 5 Kondisi Muka Air Tanah pada Sumur Bor PDAM Denpasar 2-
10

Tabel 2. 6 Kondisi Klimatologi Kota Denpasar Tahun 2010-20242-11

Tabel 2. 7 Luas Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Denpasar.....2-12

Tabel 2. 8 Status Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Denpasar 2-
16

Tabel 2. 9 Selisih antara Produksi dengan Konsumsi Energi Bahan
Pangan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018
.....2-18

Tabel 2. 10 Proyeksi Defisit antara Produksi dan Konsumsi Energi Bahan
Pangan di Kota Denpasar Tahun 2025-20292-19

Tabel 2. 11 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di
Provinsi Bali2-20

Tabel 2. 12 Proyeksi Defisit Air di Kota Denpasar Tahun 2025-2029 ..2-21

Tabel 2. 13 Distribusi Kelas Jasa Penyediaan Pangan menurut Kecamatan
Kota Denpasar2-21

Tabel 2. 14 Distribusi Kelas Jasa Penyediaan Air Bersih Menurut
Kecamatan Kota Denpasar2-22

Tabel 2. 15 Distribusi Kelas Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik
Menurut Kecamatan Kota Denpasar2-23

Tabel 2. 16 Distribusi Kelas Jasa Pengaturan Iklim Menurut Kecamatan
Kota Denpasar2-24

Tabel 2. 17 Distribusi Kelas Jasa Pengaturan Iklim Menurut Kecamatan
Kota Denpasar2-25

Tabel 2. 18 Distribusi Kelas Jasa Pengaturan Tata Aliran Air Menurut
Kecamatan Kota Denpasar2-26

Tabel 2. 19 Distribusi Kelas Jasa Pencegahan dan Pengendalian
Kebencanaan2-27

Tabel 2. 20 Distribusi Kelas Jasa Pemurnian Air Menurut Kecamatan Kota
Denpasar2-28

Tabel 2. 21 Distribusi Kelas Jasa Penguraian dan Pengolahan Limbah
Menurut Kecamatan Kota Denpasar2-29

Tabel 2. 22 Distribusi Kelas Jasa Rekreasi/Ekowisata Menurut
Kecamatan Kota Denpasar2-30

Tabel 2. 23 Distribusi Kelas Jasa Pendukung Biodiversitas menurut
Kecamatan Kota Denpasar2-31

Tabel 2. 24	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik di Kota Denpasar.....	2-35
Tabel 2. 25	Target Penurunan Intensitas Emisi GRK Indonesia 2025 dan 2029.....	2-38
Tabel 2. 26	Wilayah Rawan Bencana Kota Denpasar.....	2-39
Tabel 2. 27	Indeks Ketahanan Daerah Kota Denpasar 2023-2024	2-40
Tabel 2. 28	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024.....	2-41
Tabel 2. 29	Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024.....	2-42
Tabel 2. 30	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	2-44
Tabel 2. 31	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Denpasar Tahun 2020-2024.....	2-44
Tabel 2. 32	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi.....	2-47
Tabel 2. 33	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Denpasar Tahun 2025-2030.....	2-49
Tabel 2. 34	Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kota Denpasar Tahun 2025-2030.....	2-49
Tabel 2. 35	Proyeksi Angka Ketergantungan Kota Denpasar Tahun 2025-2030.....	2-50
Tabel 2. 36	Kelompok Target Penerima Layanan Perkotaan Berdasarkan Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2020-2024	2-52
Tabel 2. 37	Persentase Posyandu Aktif di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-67
Tabel 2. 38	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD SMP Kota Denpasar Tahun 2022	2-70
Tabel 2. 39	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Kota Denpasar Tahun 2022-2024	2-71
Tabel 2. 40	Indeks Pembangunan Pemuda Kota Denpasar Tahun 2020-2022.....	2-76
Tabel 2. 41	Skor Indeks Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024	2-81
Tabel 2. 42	Capaian dan Target Indikator Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru Indonesia 2025-2029	2-82
Tabel 2. 43	Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB dan PDB di Daerah Kota Denpasar Tahun 2019-2022	2-84
Tabel 2. 44	Cakupan Desa Mandiri di Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024.....	2-87
Tabel 2. 45	Produktivitas Total Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 ...	2-88
Tabel 2. 46	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Denpasar Tahun 2020-2023	2-90

Tabel 2. 47	Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2024	2-97
Tabel 2. 48	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Umur Kota Denpasar	2-101
Tabel 2. 49	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD SMP Kota Denpasar Tahun 2022	2-102
Tabel 2. 50	Rasio Guru/Murid sekolah Jenjang Pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat Tahun 2020–2024	2-103
Tabel 2. 51	Persentase Angka Kelulusan dan Melanjutkan Kota Denpasar Tahun 2020–2024.....	2-105
Tabel 2. 52	Data Kondisi Bangunan Ruang Kelas dalam Kondisi Baik dan Rusak Ringan setiap Jenjang Pendidikan.....	2-106
Tabel 2. 53	Jumlah Guru (Jiwa) yang Tersertifikasi Kota Denpasar Tahun 2020–2022.....	2-107
Tabel 2. 54	Jumlah Warga Negara Usia 7–15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTS) (Jiwa)	2-108
Tabel 2. 55	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Jiwa)	2-108
Tabel 2. 56	Rasio Tenaga Dokter per Jumlah Penduduk di Kota Denpasar 2020–2024.....	2-111
Tabel 2. 57	Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk di Kota Denpasar 2020–2024.....	2-111
Tabel 2. 58	Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 2-112	
Tabel 2. 59	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Usia <15 Tahun Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-115
Tabel 2. 60	Persentase Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Sosial Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-145
Tabel 2. 61	Rincian Bidang Kesejahteraan dan Kompetensi Tenaga Kerja Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-146
Tabel 2. 62	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Denpasar Tahun 2018-2019	2-146
Tabel 2. 63	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-151
Tabel 2. 64	Partisipasi Perempuan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024 2-151	
Tabel 2. 65	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-153
Tabel 2. 66	Penghargaan Adipura Kota Denpasar Tahun 2013-2022 2-166	
Tabel 2. 67	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-170

Tabel 2. 68	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Denpasar Tahun 2020-2024..2-171
Tabel 2. 69	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Denpasar Tahun 2020-2024.....2-172
Tabel 2. 70	Persentase PKK Aktif di Kota Denpasar Tahun 2020-2024 .. 2-172
Tabel 2. 71	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024 2-173
Tabel 2. 72	Cakupan BUMDesa Aktif di Kota Denpasar Tahun 2020-20242-174
Tabel 2. 73	Total Fertility Rate (TFR) di Kota Denpasar Tahun 2020-20242-175
Tabel 2. 74	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kota Denpasar Tahun 2020-20242-178
Tabel 2. 75	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Denpasar Tahun 2020-2024 .2-178
Tabel 2. 76	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan di Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024 2-184
Tabel 2. 77	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa di Daerah Kota Denpasar Tahun 2019-2024.....2-185
Tabel 2. 78	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2020-2024.....2-186
Tabel 2. 79	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/ Kelurahan di Daerah Kota Denpasar Tahun 2019-20232-187
Tabel 2. 80	Persentase Faskes dan Jejaringnya (di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan di Kota Denpasar Tahun 2020-20242-189
Tabel 2. 81	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kota Denpasar Tahun 2020-20242-190
Tabel 2. 82	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kota Denpasar Tahun 2020-20242-191
Tabel 2. 83	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Denpasar Tahun 2020-2024.....2-192

Tabel 2. 84	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-194
Tabel 2. 85	Jumlah Terminal Bis di Kota Denpasar Tahun 2020-2024 ..	2-195
Tabel 2. 86	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024.....	2-202
Tabel 2. 87	Cakupan Layanan Komunikasi di Kota Denpasar Tahun 2020-2022	2-203
Tabel 2. 88	Subsidi Pupuk di Kota Denpasar Tahun 2020-2023.....	2-231
Tabel 2. 89	Jumlah dan Luasan Pengelolaan Kehutanan di Kota Denpasar Tahun 2011-2015.....	2-232
Tabel 2. 90	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota Denpasar Tahun 2020-2024.....	2-238
Tabel 2. 91	Capaian Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-239
Tabel 2. 92	Konsumsi Ikan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-239
Tabel 2. 93	Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Pembinaan Pemerintah Daerah di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-240
Tabel 2. 94	Kelompok Pembudidaya Ikan yang Dibina Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-241
Tabel 2. 95	Kelompok Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024 ...	2-242
Tabel 2. 96	Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-243
Tabel 2. 97	Jumlah Kapal di Kota Denpasar Tahun 2019-2024.....	2-244
Tabel 2. 98	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-246
Tabel 2. 99	Capaian SAKIP Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-250
Tabel 2. 100	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-252
Tabel 2. 101	Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-256
Tabel 2. 102	Persentase Hasil Temuan Bidang Pengawasan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-257
Tabel 2. 103	Kegiatan Sekretariat Dewan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024.....	2-259
Tabel 2. 104	Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019-2023	2-260
Tabel 2. 105	Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023	2-261
Tabel 2. 106	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2023 ..	2-262
Tabel 2. 107	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2019-2023	2-263

Tabel 2. 108	Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023	2-263
Tabel 2. 109	Capaian SPM Bidang Sosial	2-264
Tabel 2. 110	Daftar Kerja Sama Pemerintah Kota Denpasar	2-266
Tabel 2. 111	Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Bali (khususnya Kota Denpasar) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.....	2-275
Tabel 2. 112	Rata-Rata Pertumbuhan (%) Realisasi APBD Kota Denpasar Tahun 2020–2024.....	2-281
Tabel 2. 113	Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Denpasar	2-284
Tabel 2. 114	Pembiayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024 ..	2-286
Tabel 2. 115	Neraca Daerah Tahun 2020-2024	2-288
Tabel 2. 116	Analisis Rasio Keuangan Kota Denpasar 2020-2024	2-291
Tabel 2. 117	Proyeksi Keuangan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025–2030	2-294
Tabel 2. 118	Analisis Perbandingan Pemanfaatan Creative Financing.	2-297
Tabel 2. 119	Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-307
Tabel 2. 120	Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Denpasar Tahun 2020-2024	2-307
Tabel 2. 121	Permasalahan Pelaksanaan dan Pencapaian Indikator TPB di Kota Denpasar	2-310
Tabel 2. 122	Permasalahan Pelayanan Umum Kota Denpasar	2-319
Tabel 2. 123	Prioritas Nasional dan Isu Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029	2-344
Tabel 2. 124	Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Bali (khususnya terkait Kota Denpasar) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.....	2-347
Tabel 2. 125	Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029.	2-350
Tabel 2. 126	Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 dan 2030	2-351
Tabel 2. 127	Daftar Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali Tahun 2025-2030	2-353
Tabel 2. 128	Penyelarasan permasalahan, isu strategis daerah, dan Misi RPJMD Kota Denpasar 2025 – 2029	2-370
Tabel 2. 129	Penyusunan Isu Strategis Daerah Kota Denpasar 2025 – 2029	2-375
Tabel 3. 1	Penjelasan Misi RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029	3-4
Tabel 3. 2	Penyelarasan Misi RPJMD Kota Denpasar 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Bali 2025-2029	3-5

Tabel 3. 3 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2026 – 20303-9

Tabel 3. 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kota Denpasar Tahun 2025 – 20293-12

Tabel 3. 5 Penahapan Pembangunan Periode Pertama RPJPD Kota Denpasar3-17

Tabel 3. 6 Penahapan Pembangunan RPJMD Kota Denpasar3-19

Tabel 3. 7 Program Prioritas Pembangunan Kota Denpasar3-25

Tabel 4. 1 Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Denpasar Tahun 2026-20304-2

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar Tahun 2025 – 20304-42

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 – 20304-53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan bagian pertama dari keempat tahapan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2025-2045. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih harus mengacu pada dokumen RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai perodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), selanjutnya dioperasikan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja Perangkat Daerah).

Sementara itu, pendekatan perencanaan pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi 1) pendekatan teknokratis, 2) pendekatan partisipatif, 3) pendekatan politis, serta 4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas (*top down* dan *bottom up*). Selain itu, dalam penyusunan dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 ini juga menerapkan prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu pendekatan perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan wilayah. Pendekatan **tematik** merupakan penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Yang dimaksud dengan **holistik** adalah penjabaran tematik program kepala daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Yang dimaksud dengan **integratif** adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program kepala daerah yang dilihat dari peran berbagai pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Yang dimaksud dengan **spasial** adalah penjabaran program kepala daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Selain itu secara spasial, diketahui bahwa Kota Denpasar ditetapkan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2021-2041, dimana fungsi tersebut mengemban sebagai fungsi pelayanan bagi masyarakat kotanya yaitu fungsi fisik, sosial, ekonomi, budaya dan perlu ditopang dengan kualitas infrastruktur yang handal dan memadai. Kota-kota di Indonesia kini menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam menyediakan layanan infrastruktur, begitu pula dengan Kota Denpasar. Dalam hal ini, keterbatasan sumber daya kota untuk membangun, mengoperasikan, dan merawat infrastruktur publik menjadi persoalan yang paling krusial. Sementara itu, kebutuhan infrastruktur terus meningkat secara eksponensial seiring dengan tingkat urbanisasi yang begitu pesat. Dalam upaya membantu pemerintah daerah maka program *National Urban Development Project* (NUDP) membuat suatu pendekatan yaitu *Capital Investment Planning* (CIP) atau Perencanaan Investasi Modal (PIM) adalah alat bantu pengambil keputusan (*decision-making support system*), untuk penentuan prioritas investasi infrastruktur berbasis spasial (*spatially influenced*) yang dikaitkan dengan perencanaan dan pendanaan yang berlaku selama lima tahun (dan tahunan), mengikuti periode berlakunya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana-rencana investasi infrastruktur yang telah dihasilkan melalui proses CIP akan dikompilasi menjadi dokumen Rencana Investasi Infrastruktur Prioritas. Manfaat dari dokumen tersebut adalah

untuk menunjukkan paket-paket kebutuhan investasi infrastruktur yang bersifat mendesak dan prioritas, serta sebagai acuan bagi pengalokasian dana dan sumbernya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025–2029. Ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Pelaksanaan penyusunan secara terpadu ini dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, serta kesinambungan arah pembangunan daerah sehingga mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi

- Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

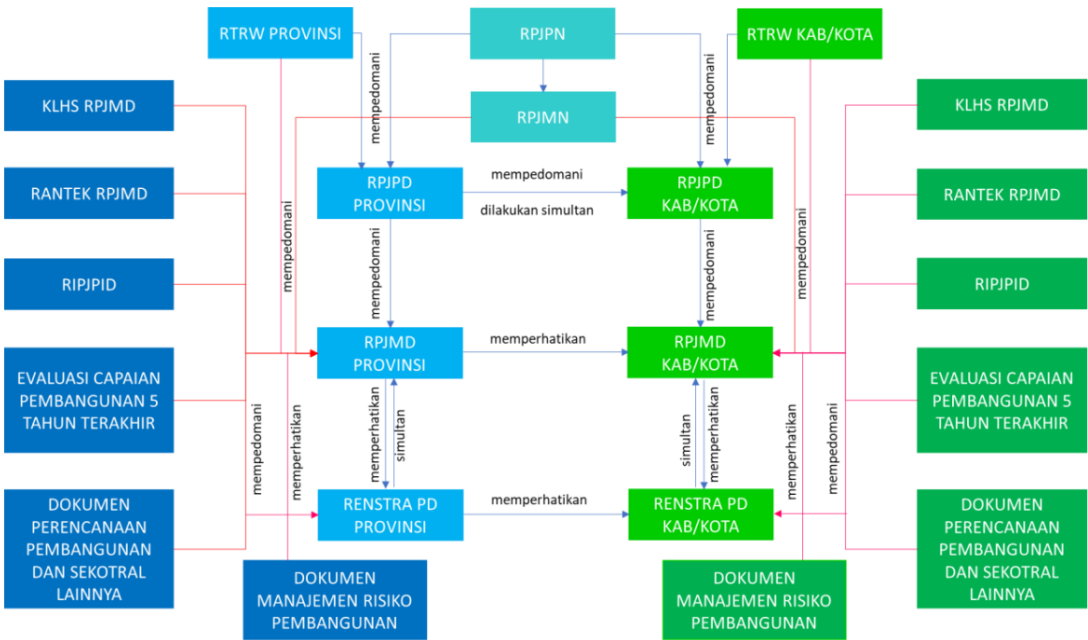
Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, di mana dalam proses penyusunannya perlu memerhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Bali, serta dokumen RPJPD Kota Denpasar. Perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten lainnya di Bali, sehingga dalam sasaran strategis pembangunan Kota Denpasar disusun dengan memerhatikan prioritas dan sasaran program RPJMD Provinsi Bali. Selain itu, dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar juga merupakan implementasi dari sasaran strategis nasional yang menyesuaikan dengan target nasional. Target sasaran pembangunan Kota Denpasar juga disusun bersinergi dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu dan tantangan pembangunan nasional yang termuat dalam dokumen RPJM Nasional.

RPJMD Kota Denpasar juga harus selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Bali (Perda Nomor 7 Tahun 2024) dan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan (Perda Nomor 4 Tahun 2023). Ini berarti bahwa program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD Kota Denpasar harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Bali dan Haluan Pembangunan Bali Masa

Depan. Dengan kata lain, RPJMD Kota Denpasar adalah "bagian" dari rencana pembangunan yang lebih besar di tingkat provinsi. RPJMD Denpasar harus berkontribusi pada pencapaian visi Bali Era Baru 100 tahun dan tujuan pembangunan jangka panjang 20 tahun yang ditetapkan oleh Provinsi Bali.

Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selain itu, RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Gambaran hubungan antardokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya
Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025–2029 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Wali Kota terpilih;
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kota Denpasar;
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.4.2 Tujuan

Berdasarkan maksud tersebut, tujuan dari penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Denpasar dengan daerah sekitar, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat;
4. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui

sinergitas koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan;

7. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab ini memuat 3 (tiga) Subbab yang menjabarkan kondisi dan isu strategis pembangunan daerah, yaitu (1) Gambaran Umum Kondisi Daerah, menjelaskan kondisi daerah terkait aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, serta aspek pelayanan umum; (2) Gambaran Keuangan Daerah, menjelaskan kondisi keuangan daerah, yaitu gambaran ringkas kondisi keuangan daerah lima tahun terakhir dan proyeksi keuangan daerah lima tahun ke depan; dan (3) Permasalahan dan Isu Strategis, menjelaskan permasalahan pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta rumusan isu strategis daerah dengan memperhatikan isu di tingkat global, nasional, dan regional.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini memuat 2 (dua) Subbab yang menjabarkan arahan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, yaitu (1) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, menjelaskan visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai; dan (2) Strategi Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, menjelaskan rumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat 2 (dua) Subbab yang terdiri dari: (1) Program Perangkat Daerah, memuat rangkaian program perangkat daerah serta indikator program menurut bidang urusan; dan (2) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat penjelasan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai ukuran dan/atau indikator keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari aspek kesejahteraan, aspek layanan, dan aspek daya saing.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Denpasar. Informasi kondisi umum daerah mencakup gambaran kondisi geografi, demografi, serta indikator sesuai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum. Fakta dan permasalahan dari aspek tersebut dianalisis dengan cara perbandingan antar waktu; perbandingan dengan standar yang berlaku; perbandingan dengan daerah lainnya; maupun target Kota Denpasar yang sudah ditetapkan.

Dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029 ini disusun menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Beberapa indikator pembangunan daerah belum dapat mencapai target rencana pembangunan yang sudah ditetapkan sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan ke depan. Berikut ini gambaran kondisi Kota Denpasar selama lima tahun terakhir.

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

1) Letak dan Kondisi Geografis

Kota Denpasar dibentuk pada tanggal 15 Januari 1992 sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar. Adapun letak geografis Kota Denpasar di antara 08°35'31" sampai 08°44'49" Lintang Selatan dan 115°10'23" sampai 115°16'27" Bujur Timur. Kota Denpasar merupakan Ibukota Provinsi Bali yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dengan letak geografis sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Letak Geografis Kecamatan di Kota Denpasar

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1.	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja	080035'31"-	1150012'09"-
2.	Denpasar Barat	Kelurahan	080036'24"-	1150010'23"-
3.	Denpasar Timur	Kelurahan Kesiman	080035'31"-	1150012'29"-
4.	Denpasar	Kelurahan Sesetan	080040'00"-	1150011'23"-

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

Secara geografis, Kota Denpasar berbatasan langsung dengan beberapa daerah, yaitu

- Batas Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Mengwi dan Abiansemal Kabupaten Badung.
- Batas Timur berbatasan dengan Selat Badung dan Wilayah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar.

- Batas Selatan berbatasan dengan Selat Badung, Teluk Benoa dan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
- Batas Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Kabupaten Badung.

Kota Denpasar terletak pada bagian selatan condong ke timur Pulau Bali sehingga bagian selatan dan timur berbatasan langsung dengan laut. Bagian utara dan barat merupakan daratan sedangkan bagian selatan dan timur merupakan kawasan pesisir. Pada bagian selatan terdapat satu pulau kecil yang sedikit terpisah yaitu Pulau Serangan. Kota Denpasar juga memiliki pelabuhan di bagian selatan yaitu Pelabuhan Benoa.

2) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar tahun 2021 – 2041 Wilayah Kota Denpasar memiliki luas daratan ± 12.598, 10 Ha, secara administrasi terbagi menjadi empat Wilayah Kecamatan, 27 Desa dan 16 Kelurahan. Perincian luas administrasi per kecamatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2. 2
Luas Daerah Menurut Kecamatan pada Tahun 2024

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa/Kelurahan
			(km ²)	(%)	
1	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja	26,69	21,19	11
2	Denpasar Barat	Kelurahan Padangsambilan	23,46	18,62	11
3	Denpasar Timur	Kelurahan Kesiman	25,93	20,58	11
4	Denpasar Selatan	Kelurahan Sesetan	49,89	39,60	10
Total			12,57		43

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

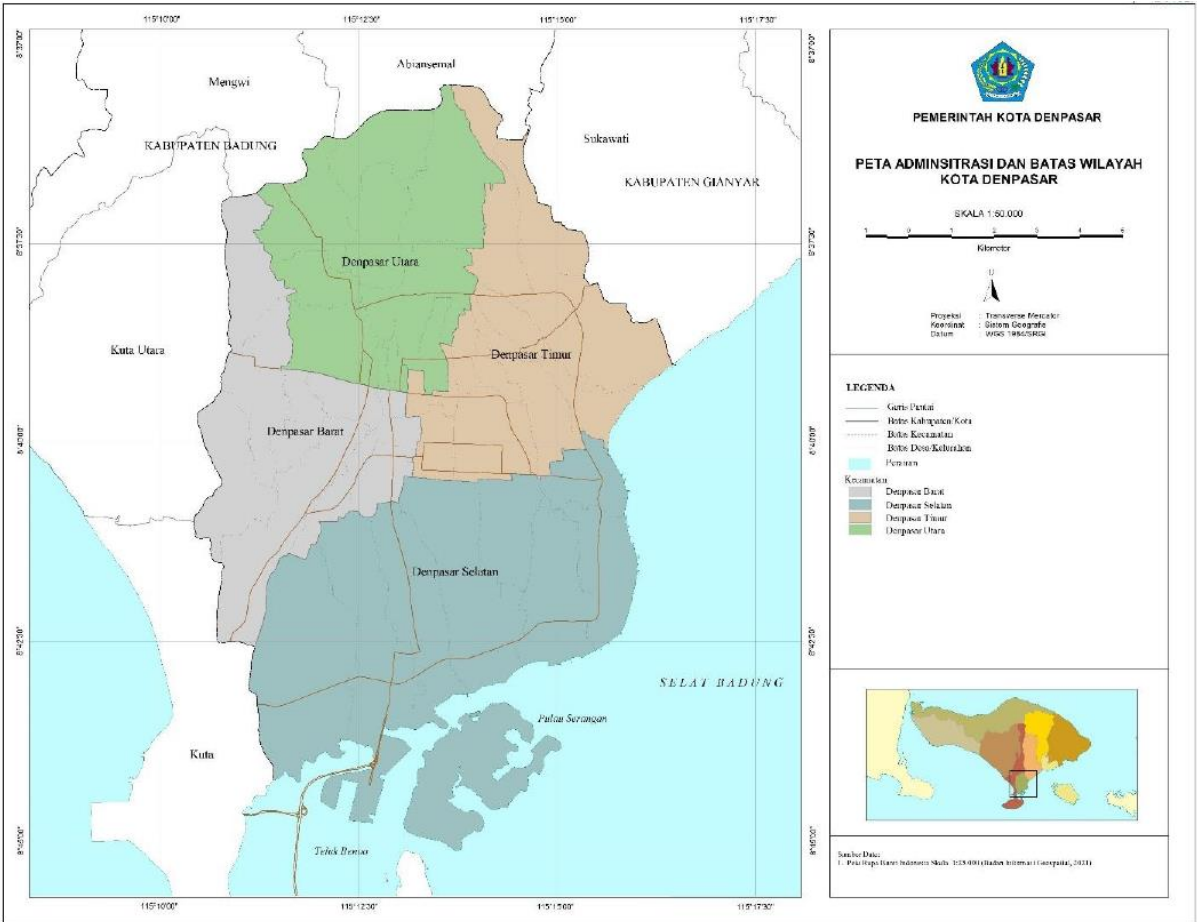
Berdasarkan administrasinya, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Barat, dan Denpasar Timur memiliki 11 desa/kelurahan, sedangkan Kecamatan Denpasar Selatan memiliki 10 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas 4.989 hektare atau 49,89 kilometer persegi (sekitar 39,60 persen dari total luas wilayah Kota Denpasar), sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Denpasar Barat dengan luas 2.346 hektare atau 23,46 kilometer persegi (sekitar 18,62 persen dari total luas wilayah Kota Denpasar).

Tabel 2. 3
Desa/Kelurahan per Kecamatan

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	
			(km ²)	(%)
1	Denpasar Utara	1. Desa Dangin Puri Kaja 2. Desa Dangin Puri Kangin 3. Desa Dangin Puri Kauh 4. Desa Dauh Puri Kaja 5. Desa Peguyangan Kaja 6. Desa Peguyangan Kangin 7. Desa Pemecutan Kaja 8. Desa Ubung Kaja	26,69	21,19

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	
			(km ²)	(%)
		9. Kelurahan Peguyangan 10. Kelurahan Tonja 11. Kelurahan Ubung		
2	Denpasar Timur	1. Desa Dangin Puri Kelod 2. Desa Kesiman Kertalangu 3. Desa Kesiman Petilan 4. Desa Penatih Dangin Puri 5. Desa Sumerta Kelod 6. Desa Sumerta Kaja 7. Desa Sumerta Kauh 8. Kelurahan Dangin Puri 9. Kelurahan Kesiman 10. Kelurahan Penatih 11. Kelurahan Sumerta	25,93	20,58
3	Denpasar Selatan	1. Desa Pemogan 2. Desa Sanur Kaja 3. Desa Sanur Kauh 4. Desa Sidakarya 5. Kelurahan Panjer 6. Kelurahan Pedungan 7. Kelurahan Renon 8. Kelurahan Sanur 9. Kelurahan Serangan 10. Kelurahan Sesetan	49,89	39,60
4	Denpasar Barat	1. Desa Dauh Puri Kangin 2. Desa Dauh Puri Kauh 3. Desa dauh Puri Kelod 4. Desa Pemecutan Kelod 5. Desa Tegal Harum 6. Desa Tegal Kertha 7. Kelurahan Dauh Puri 8. Kelurahan Padangsambian 9. Kelurahan Pemecutan	23,46	18,62
Kota Denpasar			125,57	100

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025



Gambar 2. 1
Peta Administrasi dan Batas Wilayah Kota Denpasar
 Sumber: Badan Informasi Geospasial (diolah), 2023

3) Topografi

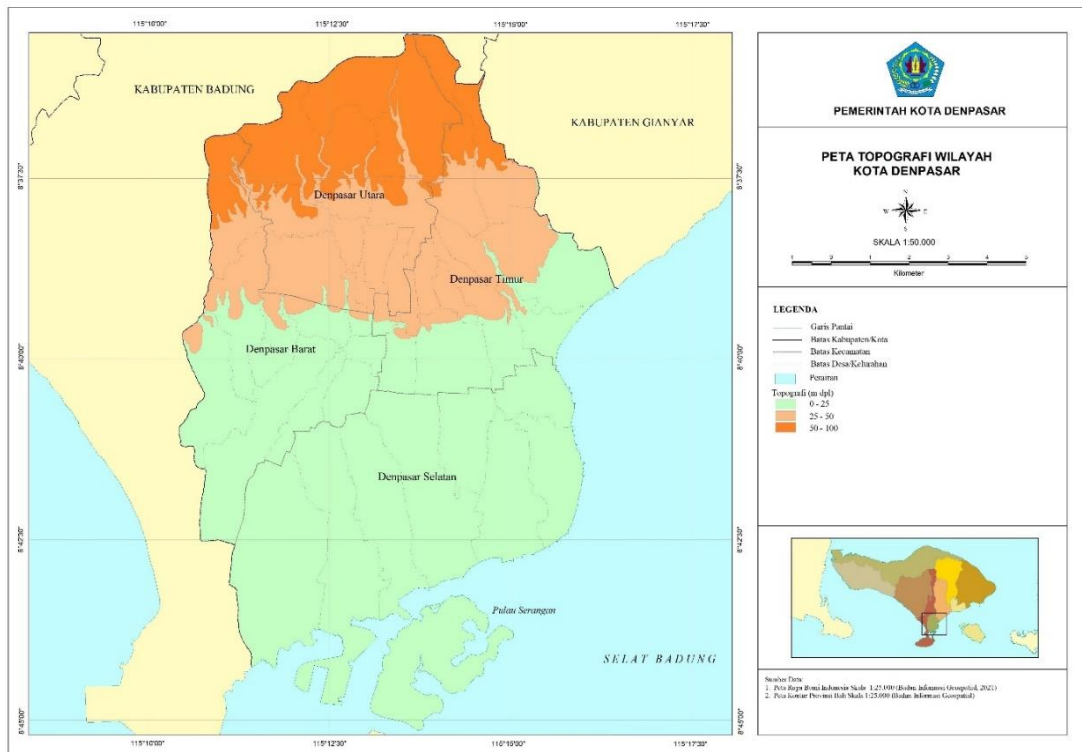
Kota Denpasar terletak di tengah Pulau Bali dan berbatasan dengan Selat Lombok sehingga terdapat kawasan pesisir dan bentang lahan yang relatif datar. Sebanyak 82,2% Kota Denpasar berupa dataran dengan kemiringan lereng berkisar 0-2% (datar) ke arah selatan. Sebagian memiliki kemiringan lereng antara 2-8% (landai). Sedangkan kemiringan lereng di beberapa tempat terutama tebing sungai mencapai 2-15% (landai). Lebih dari setengah, yaitu sebesar 59,1% dari luas wilayah Kota Denpasar berada pada ketinggian antara 0-25 mdpl, sedangkan sisanya mencapai 75 mdpl. Beragam kemiringan dan ketinggian tersebut memberikan manfaat positif bagi perkembangan sektor ekonomi dan pariwisata yang menjadi sektor utama pertumbuhan Kota Denpasar. Kondisi tersebut juga meminimalisir risiko letusan gunung berapi, sementara potensi bahaya erosi juga tergolong rendah karena wilayahnya yang cenderung datar dan jauh dari pegunungan.

Kondisi topografi wilayah dilihat dari dua jenis, yaitu ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Berdasarkan ketinggian lahan, Kota Denpasar merupakan dataran rendah karena semua wilayahnya berada pada ketinggian di bawah 200 mdpl. Berdasarkan gambar peta di atas, bagian selatan Kota Denpasar berada di ketinggian 0-20 mdpl, bagian tengah berada pada ketinggian 21-60 mdpl, dan bagian utara berada di ketinggian >60 mdpl. Selain ketinggiannya, data kemiringan lahan juga menunjukkan bahwa Kota Denpasar merupakan suatu dataran di mana seluruh bagian wilayah Kota Denpasar memiliki kemiringan lahan 0-8%.

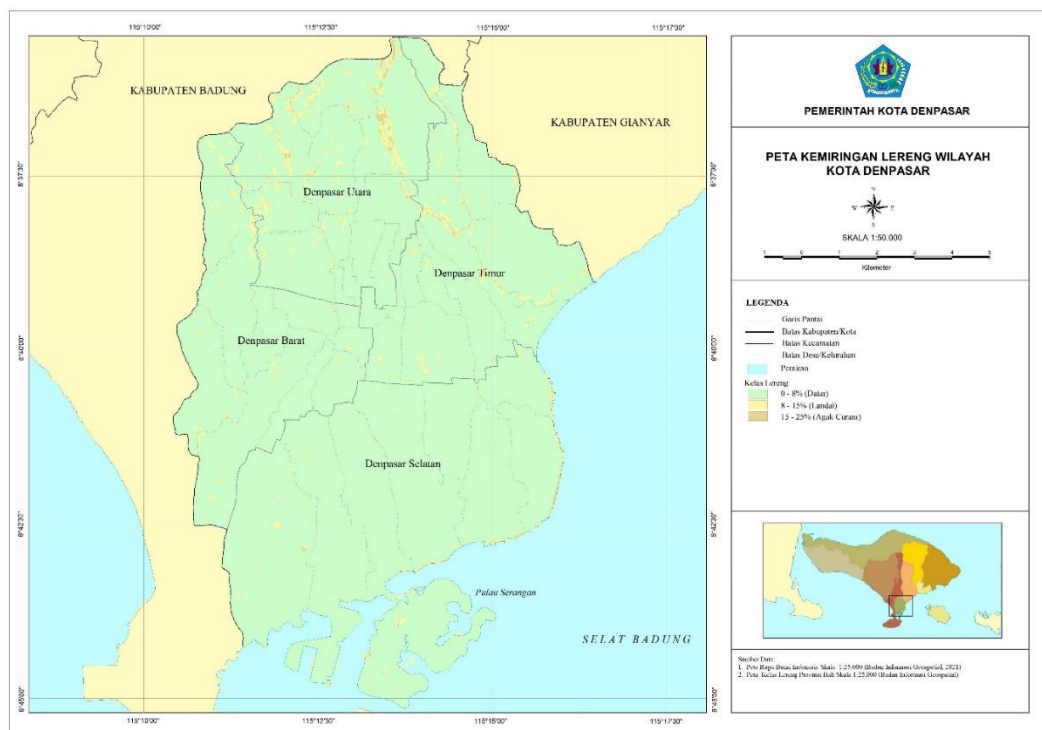
Tabel 2. 4
Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian dan Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya

Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Klasifikasi Ketinggian dari Permukaan Laut (m)	Persentase Luas terhadap Kota Denpasar (%)
Denpasar Selatan	4.989	00 – 12	39.58
Denpasar Timur	2.593	00 – 75	20.61
Denpasar Barat	2.346	00 – 75	18.63
Denpasar Utara	2.669	00 – 75	21.18
Jumlah	12.598		100

Sumber : RTRW Kota Denpasar 2021-2041 (diolah), 2025



Gambar 2. 2
Peta Topografi Wilayah Kota Denpasar
 Sumber: Badan Informasi Geospasial (diolah), 2023



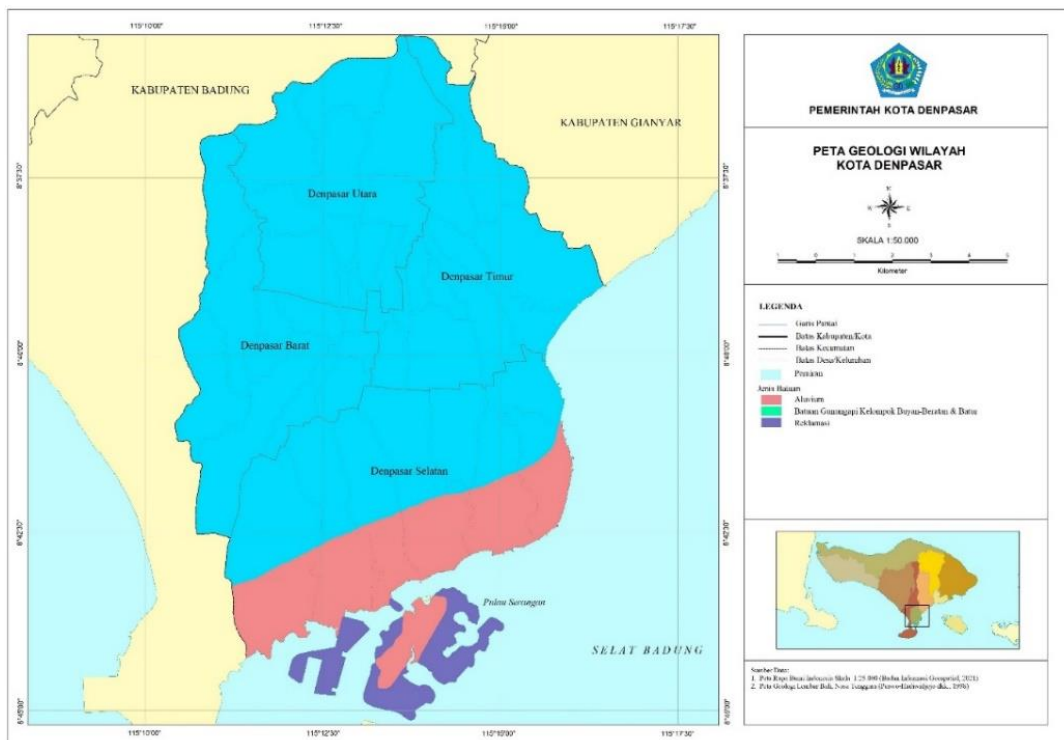
Gambar 2. 3
Peta Kemiringan lereng wilayah Kota Denpasar
 Sumber: Badan Informasi Geospasial (diolah), 2023

4) Geologi

Berdasarkan Peta Geologi lembar Provinsi Bali skala 1:25.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Geologi pada tahun 1971, ditemukan bahwa dataran Pulau Bali terbentuk pada rentang zaman geologi kuartar, termasuk kuartar bawah, tersier, pliosen, dan meosin. Di wilayah Kota Denpasar, terdapat sejumlah jenis batuan yang membentuk formasi geologinya. Secara khusus, formasi batuan ini terdiri dari:

- a. Sekitar 70% wilayah Kota Denpasar ditutupi oleh batuan vulkanik kuartar. Batuan ini terbentuk akibat aktivitas gunung api yang sebagian besar berasal dari gunung api Buyan-Bratan dan gunung api Batur. Batuan vulkanik Buyan-Bratan terdiri dari material tufa dan lahar serta batuan ini merupakan yang terkuno. Selain itu, terdapat jenis batuan lain seperti breksi, lava, pasir, kerikil, dan debu vulkanik. Ketebalannya bervariasi, bagian utara relatif lebih besar (200 meter) dan semakin menipis ke arah selatan.
- b. Wilayah sepanjang Pantai Sanur tertutup endapan alluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil. Sementara itu, area sepanjang Pantai Suwung ditutup oleh endapan alluvial yang lebih dominan berupa material liat dan lempung. Endapan alluvial yang lebih dominan berupa material liat dan lempung. Endapan alluvial terbentuk melalui proses pengendapan material yang dibawa oleh arus air, seperti sungai atau aliran air lainnya.

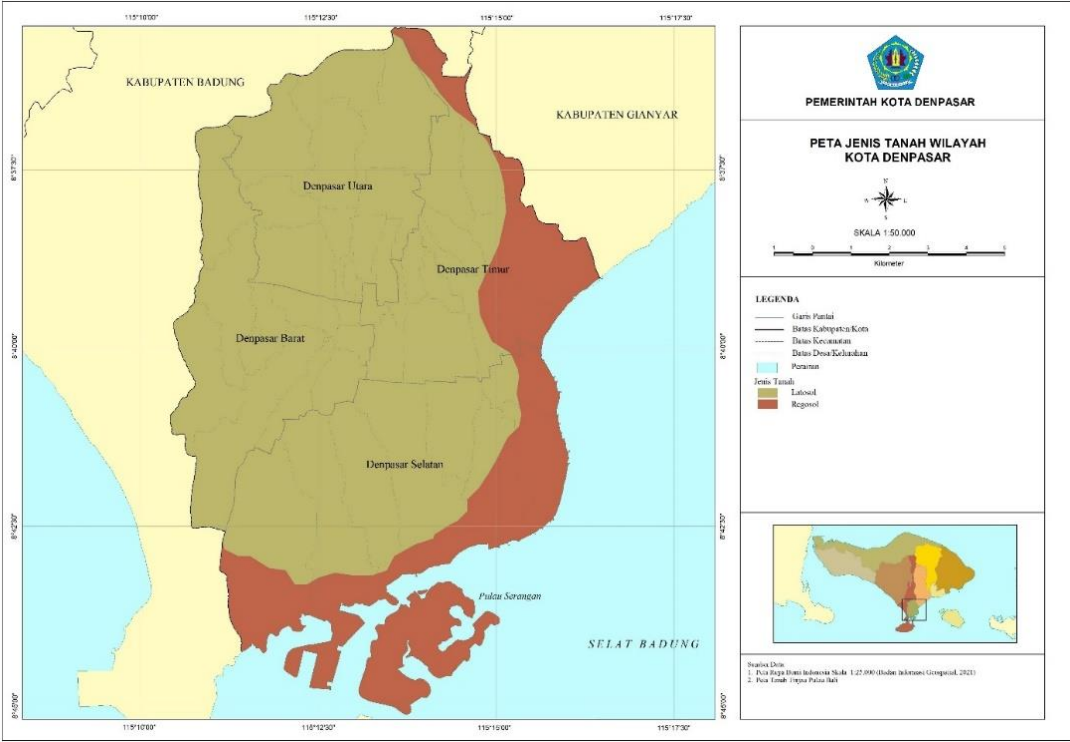
Jika dilihat dari aspek geologi, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana, seperti gunung api. Maka relatif kecil ancaman dari bahaya erosi karena wilayahnya yang relatif datar dan jauh dari pegunungan. Jenis tanah di Kota Denpasar adalah latosol coklat kekuningan di mana penyebarannya hampir menempati seluruh wilayah, kecuali daerah dekat pantai yang merupakan tanah aluvial.



Gambar 2. 4
Peta Geologi wilayah Kota Denpasar
Sumber: KLHS RPJMD 2023

Berdasarkan Peta Tanah Tinjau Bali (1970), jenis tanah di Kota Denpasar terdiri atas jenis Regosol dan Latosol. Jenis tanah Regosol terdiri atas Regosol Coklat Kelabu, Regosol Kelabu, Regosol Coklat dan Regosol

Berhumus. Jenis tanah ini tersebar di daerah pesisir dekat pantai Denpasar Selatan dan Denpasar Timur. Jenis tanah Latosol, terdiri atas Latosol Coklat Kekuningan, Latosol Coklat, Latosol Coklat Kemerahan dan Litosol. Jenis tanah ini mendominasi sebagian besar wilayah Kota Denpasar.



Gambar 2. 5
Peta Jenis Tanah wilayah Kota Denpasar
Sumber: Badan Informasi Geospasial (diolah), 2023

5) Hidrologi

Potensi sumber daya air di Kota Denpasar merupakan hasil dari berbagai sumber, termasuk air hujan, air permukaan, air tanah, dan air laut. Dalam konteks hidrologi, terdapat beberapa sumber daya air yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Denpasar. Sumber-sumber tersebut meliputi:

1) Sungai

Di wilayah Kota Denpasar mengalir dan bermuara beberapa buah sungai yang tergolong dalam sungai utama dan sungai yang berasal dari alur rawa-rawa. Sungai-sungai utama yaitu:

- Tukad Ayung, merupakan sungai lintas kabupaten, mengalir di bagian timur Kota Denpasar bermuara di pantai Padanggalak, hulunya di Kabupaten Bangli dan melewati Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Panjang Tukad Ayung adalah 62,5 km dan lebar rata-rata di daerah hilir 25 m. Sungai ini memiliki beberapa anak sungai, dimana anak sungai yang mengalir di wilayah Kota Denpasar meliputi Tukad Pengengeh, Tukad Anggabaya, Tukad Titis dan Tukad Kedua. Aliran air sungai ini berpengaruh terhadap karakter ekosistem pesisir di Kota Denpasar bagian utara terutama inputnya terhadap sedimen dan

penurunan salinitas serta salah satu sumber sampah dan pencemaran.

- Tukad Badung, panjang 17,15 km, merupakan sungai yang mengalir di tengah-tengah Kota Denpasar yang sistem DAS-nya menempati wilayah Kota Denpasar di bagian hulu dan tengahnya, sedangkan bagian hilir menjadi batas antara wilayah Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung. Bagian hilir Tukad Badung dibendung menjadi sebuah waduk (*estuary dam*) yang bernama Waduk Muara Nusa Dua. Anak-anak sungainya seluruhnya ada di Kota Denpasar yaitu Tukad Jurang, Tukad Langon, Tukad Medih, Tukad Urang dan Tukad Rarangan. Dengan adanya waduk muara maka sungai ini tidak merupakan sumber pengaliran sampah ke perairan pesisir di sekitarnya.
- Tukad Mati, panjangnya 12,25 km, mengalir di bagian barat Kota Denpasar dan bermuara di pantai selatan di wilayah Kuta Kabupaten Badung. Anak sungai Tukad Mati terdiri dari Tukad Tebe, Pangkung Kedampang, Pangkung Lebak Muding dan Pangkung Danu. Sungai ini merupakan salah satu mengalirkan beban pencemaran ke perairan pesisir termasuk sampah yang mencemari lingkungan mangrove.

Sementara itu, sungai-sungai yang berasal dari alur rawa-rawa di wilayah Kota Denpasar yaitu:

- Tukad Loloan dengan panjang 3,75 km, mengalir sekitar Belanjong Sanur atau Suwung Kangin, bermuara di pantai perbatasan antara Sanur Kauh dan Sidakarya. Sungai ini berkontribusi besar terhadap input sampah dan beban pencemaran berasal dari sumber tidak tetap (*non-point sources*) ke perairan pesisir.
- Tukad Ngenjung dengan panjang 2,15 km, mengalir di sebelah barat Tukad Loloan di Suwung Kangin (yaitu kompleks perumahan Kerta Petasikan) dan bermuara di pantai selatan.
- Tukad Punggawa dengan panjang 6,55 km, mengalir sekitar Suwung Kangin (antara Kerta Petasikan dengan Sidakarya) dan bermuara di pantai perbatasan antara Sidakarya dan Sesetan.
- Tukad Buaji, mengalir di daerah perbatasan antara Sidakarya dan Sesetan dan bermuara di Tukad Punggawa sekitar jalan by pass Ngurah Rai
- Tukad Nyali, mengalir di berbatasan Sanur Kaja dan Kesiman Petilan, dan bermuara di selatan pantai Padanggalak

2) Waduk/Embung

Kota Denpasar memiliki dua buah waduk/embung yaitu Waduk Muara Nusa Dua dan Embung Sanur. Waduk Muara Nusa Dua merupakan

pembendungan Tukad Badung yang berfungsi sebagai tampungan air untuk diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber pasokan air baku pada daerah pelayanannya. Waduk Muara Nusa Dua memiliki luas 35 ha dengan volume tampungan bruto 510.000 m³ dan volume tampungan efektif 420.000 m³. Sedangkan kapasitas terpasang air bersih yang dapat dihasilkan adalah 300 liter/detik.

Embung Sanur terletak di Desa Sanur Kauh, dibangun di atas lahan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dengan kurang lebih 2,3 hektar dengan luas kolam Embung sebesar 0,96 hektar. Kapasitas tampungan Embung Sanur sebesar 34.500 meter kubik dan tinggi tanggul dari dasar tampungan sepanjang 5,18 meter. Embung ini berfungsi sebagai konservasi air yang akan menampung serta mereduksi air banjir yang bermuara di Tukad Loloan dan Tukad Ngenjung.

3) Mata Air

Keterdapatan mata air di Kota Denpasar ditemukan di daerah aliran sungai pada bagian hulu dan tengah Tukad Badung, bagian hulu Tukad Mati, serta bagian hilir Tukad Ayung dengan debit yang relatif kecil namun mempunyai kontribusi yang nyata terhadap kontinuitas aliran sungai yang mewadahi. Kemanfaatan mata air tersebut terutama adalah untuk fungsi sebagai pebejian, dan pemasok air minum yang langsung dimanfaatkan oleh lingkungan pemukiman.

4) Air Tanah

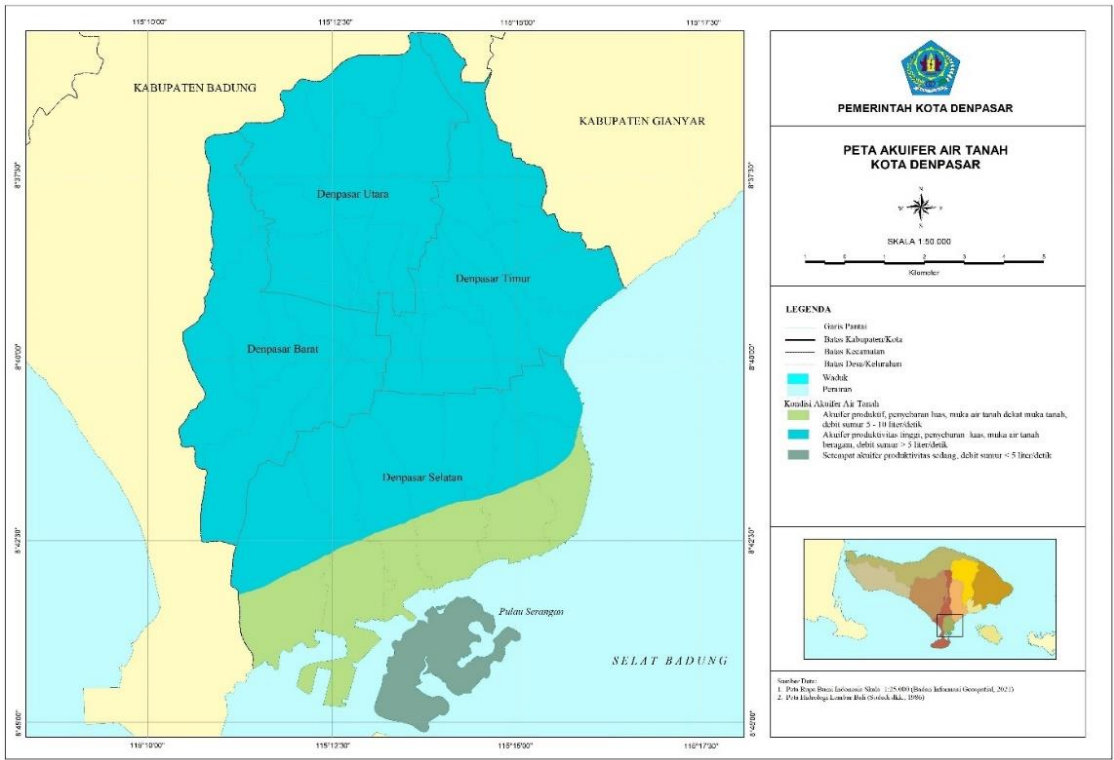
Kondisi Kota Denpasar secara umum merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian mulai 0 - 75 m di atas permukaan laut. Sumber pengisian air tanah di Kota Denpasar berasal dari daerah recharge di wilayah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Badung, ditambah dengan proses infiltrasi air hujan setempat yang diperkirakan mencapai 10%.

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi dkk, 1986), kondisi akuifer dan air tanah di wilayah Kota Denpasar sebagai berikut:

- Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya > 10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kota Denpasar bagian tengah (Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Selatan dan Denpasar Timur).
- Akuifer produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di bawah muka tanah, debit sumur umumnya 5 - 10 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir selatan dekat pantai Kecamatan Denpasar Selatan
- Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah beragam, debit sumur umumnya >5

- liter/detik. Terdapat di Kota Denpasar bagian utara (Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Timur bagian utara)
- Setempat akuifer dengan produktivitas sedang, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di Pulau Serangan.

Kedudukan muka air tanah akuifer bebas pada wilayah pesisir Denpasar bagian Selatan mencapai 2 hingga 4 meter dari permukaan tanah, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai sumur dangkal oleh rumahtangga masyarakat. Konstruksi sumur bor di daerah Denpasar kedalamannya berkisar 150- 200 m. Litologi batuan umumnya berupa material vulkanik dengan ukuran pasir halus sampai kasar, breksi vulkanik.



Gambar 2. 6
Peta Peta akuifer air tanah di Kota Denpasar
Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029, 2025

Data keadaan muka air tanah pada sumur bor yang dimanfaatkan PDAM Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Kondisi Muka Air Tanah pada Sumur Bor PDAM Denpasar

No	Lokasi Sumur	Kedalaman (mdpl)
1	E-1	17.3
2	E-2	10.3
3	E-4	48.7
4	SB-2	47.1
5	SB-3	66.5
6	SB-4	9.5
7	TPW-4	26.0
8	SB-6	10.0
9	SB-Tonja	41.0
10	SB – Ubung	41.0
11	SB – Sedap Malam I	18.5
12	SB – Sedap Malam II	38.4
13	SB – Penatih	44.6
14	SB – Badak Agung	28.5

Sumber : KLHS & PDAM Kota Denpasar, 2025

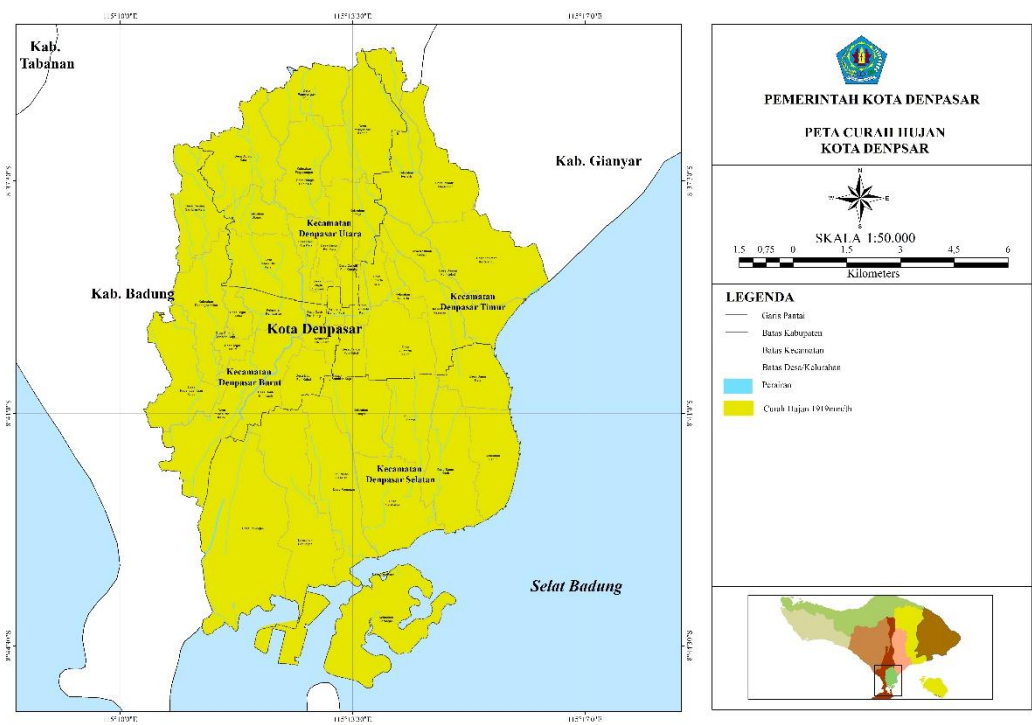
6) Klimatologi

Kota Denpasar beriklim tropis laut yang dipengaruhi oleh arah angin musim yaitu musim kemarau dengan angin timur (Juni-September) dan musim hujan dengan angin barat (September-Maret) serta diselingi musim pancaroba. Curah hujan tertinggi mencapai 856,9 milimeter pada tahun 2021 dan kecepatan angin berhembus maksimal sebesar 12,1 knot. (Terlampir gambar 2.7 Peta Curah Hujan Kota Denpasar)

Tabel 2. 6
Kondisi Klimatologi Kota Denpasar Tahun 2010-2024

Tahun	Temperatur (Celcius)	Kecepatan Angin (knot)	Kelembaban Udara (persen)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
2010	27,4 – 29,4	4 – 6	71 – 84	190	103,2 – 417,7
2011	26 – 27,6	4 – 6	76 – 83	169	0 – 412
2012	20 – 36,8	6 – 8	71 – 87	130	0,2 – 730,5
2013	18,6 – 36,6	6 – 8	71 – 79	156	0,4 – 516,2
2014	22,5 – 34,8	4,5 – 7,8	68 – 79	120	0 – 406,6
2015	22,8 -32,8	6 – 8	68 – 78	111	0 – 406,6
2016	23,4 – 35,5	4,6 – 7,1	68 - 79	160	0 – 416,2
2017	22,8 – 34,2	4,6 – 7,1	71 – 80	-	7,4 – 620,1
2018	24,4 – 32,7	4 – 7,9	69 – 79	-	0,9 – 515,6
2019	24,3 – 32,7	4 – 7,9	59,8 – 93,7	-	0 – 354,5
2020	25 – 32,8	5,1 – 7,9	72 – 78	-	1,5 – 388,5
2021	22,9 – 33,8	4,8 – 7,4	53,3 – 95,6	-	0,5 – 856,9
2022	22,4 – 34,4	0,8 – 12,1	52,4 – 97,3	176	14,1 – 615,9
2023	20,6 – 35,2	10 – 26	46 – 100	113	1,7 – 423,5
2024	21,4 – 35,4	5,7 – 6,7	46 – 100	265	1,9 – 730,9

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025



Gambar 2. 7
Peta Curah Hujan di Kota Denpasar
Sumber: RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041

7) Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Berdasarkan potensi kesesuaian lahan, penggunaan lahan di Kota Denpasar terbagi menjadi dua, yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian

lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan peruntukan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan peruntukan lindung dikelompokkan secara rinci menjadi badan air, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan konservasi, dan kawasan ekosistem *mangrove*. Sedangkan kawasan peruntukan budidaya terdiri dari badan jalan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, serta kawasan pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan Materi Teknis RTRW Kota Denpasar 2021 – 2041, rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kota Denpasar meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Ukuran atau luasan fungsi lindung dan fungsi budidaya ditentukan berdasarkan kebutuhan ruang untuk berbagai kegiatan serta target proporsi pemanfaatan ruang terbangun yang diharapkan.

Tabel 2. 7
Luas Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Denpasar

No	Peruntukan Ruang	Kecamatan (Ha)				Kota Denpasar (Ha)	% terhadap Luas Kota Denpasar
		Denpasar Barat	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Utara		
I	Kawasan Peruntukan Lindung	36,56	895,36	63,45	28,73	1.024,10	8,13
1	Badan Air	9,39	23,26	9,90	8,01	50,57	0,40
2	Kawasan Perlindungan Setempat	0,69	106,93	15,48	4,84	127,93	1,02
3	Ruang Terbuka Hijau	26,48	118,57	38,07	15,89	199,01	1,58
4	Kawasan Konservasi	-	565,90	-	-	565,90	4,49
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	-	80,69	-	-	80,69	0,0065
II	Kawasan Peruntukan Budi Daya	2.309,84	4.093,66	2.529,93	2.640,57	11.574,00	91,87
1	Badan Jalan	22,35	74,84	13,99	13,89	125,07	0,99
2	Kawasan Pertanian	22,48	428,97	560,02	448,18	1.459,65	11,59
	Kawasan Tanaman Pangan	22,48	413,45	494,43	448,18	1.378,54	10,94
	Kawasan Hortikultura	-	15,52	65,58	-	81,10	0,64
3	Kawasan Pertambangan dan Energi	0,00	7,88	0,00	0,00	7,88	0,06
	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	-	7,88	-	-	7,88	0,06
4	Kawasan Pariwisata	19,47	546,80	76,15	-	642,42	5,10
5	Kawasan Permukiman	1.591,63	2.178,90	1.489,32	1.606,20	6.866,05	54,50
	Kawasan Perumahan	1.566,49	2.087,58	1.463,87	1.568,62	6.686,55	53,08
	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	24,82	76,97	21,62	35,68	159,09	1,26
	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	0,33	14,35	3,84	1,90	20,41	0,16
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa	611,50	708,85	283,13	542,02	2.145,50	17,03
7	Kawasan Perkantoran	6,88	22,71	93,83	22,94	146,37	1,16
8	Kawasan Transportasi	-	102,47	-	-	102,47	0,81
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	35,52	22,24	13,48	7,35	78,59	0,62
JUMLAH		2,346,40	4.989,02	2.593,38	2.669,31	12.598,10	100,00

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041

8) Peran Strategis Daerah

Kota Denpasar memiliki peran strategis sebagai Ibu Kota Provinsi Bali yang merupakan pusat pemerintahan dan administrasi regional. Keberadaan

kelembagaan provinsi menjadikan Kota Denpasar menjadi simpul utama penyelenggaraan pembangunan wilayah di Provinsi Bali. Selain itu, dengan letak geografis yang strategis menjadikan Kota Denpasar sebagai pusat perdagangan dan jasa yang menopang perekonomian Bali sehingga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan berbagai kegiatan bisnis dan usaha dalam berbagai skala, baik mikro maupun makro. Kota Denpasar juga berperan sebagai pusat pendidikan dan pusat kesehatan dengan keberadaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang unggul dan berkualitas.

Kota Denpasar memiliki peran penting sebagai gerbang utama pariwisata Bali. Hal tersebut menjadikan Kota Denpasar memiliki peran strategis dalam pemajuan pariwisata. Sesuai dengan arah pembangunan kepariwisataan Kota Denpasar yang tertuang dalam dokumen Rencana Induk Kepariwisata Daerah Kota Denpasar Tahun 2018-2029 dengan visi terwujudnya daerah sebagai destinasi pariwisata budaya yang kreatif, berdaya saing global, dan berlandaskan Tri Hita Karana. Pengembangan destinasi pariwisata Denpasar diarahkan pada keunggulan daya tarik wisata pusaka (*heritage*), wisata pantai dan bahari, ekowisata *mangrove*, wisata perkotaan (*city tour*), agrowisata, wisata pedesaan, wisata kuliner, dan industri kreatif.

Kemudian, Kota Denpasar juga turut terintegrasi dalam Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan dalam sistem perkotaan nasional ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan juga sekaligus ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari pertimbangan sudut kepentingan ekonomi nasional, dengan nama Kawasan Perkotaan Sarbagita. Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kawasan Perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Sukawati, dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar, dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan sebagai Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Pengembangan wilayah Kota Denpasar sesuai dengan fungsi peruntukan wilayah diatur dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2021 – 2041. Dalam RTRW tersebut dijabarkan penggunaan lahan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung yang memiliki potensi pengembangan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung. Pada rencana kawasan budidaya dan kawasan lindung dijabarkan sebagai berikut:

1. Kawasan Budidaya

Pengembangan kawasan yang ditujukan untuk kegiatan budidaya mencakup luas 11.574 hektar yang terbagi menjadi:

- a. Kawasan pertanian dengan luas kurang lebih 1.460 hektare, yang terdiri atas kawasan tanaman pangan (tanaman pangan lahan basah dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)) dan kawasan hortikultura.
- b. Kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pembangkitan listrik seluas kurang lebih 8 hektare yang terletak di Kelurahan Pedungan.
- c. Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 642 hektare yang terdiri atas Kawasan pesisir kota dan sekitarnya terletak di Desa Kesiman Petilan, Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kauh dan Kelurahan Serangan dan Kawasan Pariwisata Kecamatan Denpasar Barat yang terletak di Desa Padangsambian Kelod.
- d. Kawasan permukiman seluas kurang lebih 6.866 hektare yang terdiri atas kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta kawasan infrastruktur perkotaan.
- e. Kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 2.145 hektare yang tersebar di seluruh wilayah kota.
- f. Kawasan perkantoran yang terdiri atas kawasan perkantoran swasta dan kantor pemerintahan, dengan luas kurang lebih 146 hektare.
- g. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 102 hektare yang terdiri atas Pelabuhan Benoa di Kelurahan Pedungan.
- h. Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 78 hektare yang terletak di Desa Dangin Puri Kangin, Desa Dangin Puri Kelod, Desa Dauh Puri Kangin, Desa Dauh Puri Kelod, Desa Kesiman Kertalangu, Desa Kesiman Petilan, Desa Pemogan, Desa Sumerta Kauh, Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kelurahan Dauh Puri, Kelurahan Padangsambian, Kelurahan Sesetan.

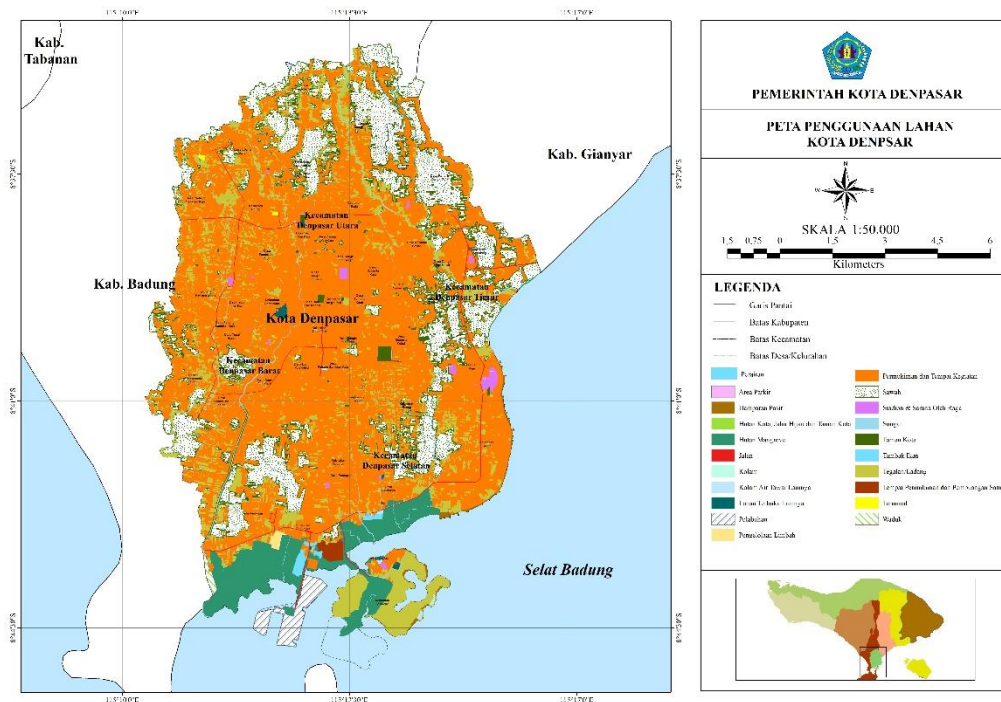
2. Kawasan Lindung

Rencana pengembangan kawasan lindung di Kota Denpasar seluas 1.024 hektar terdiri atas:

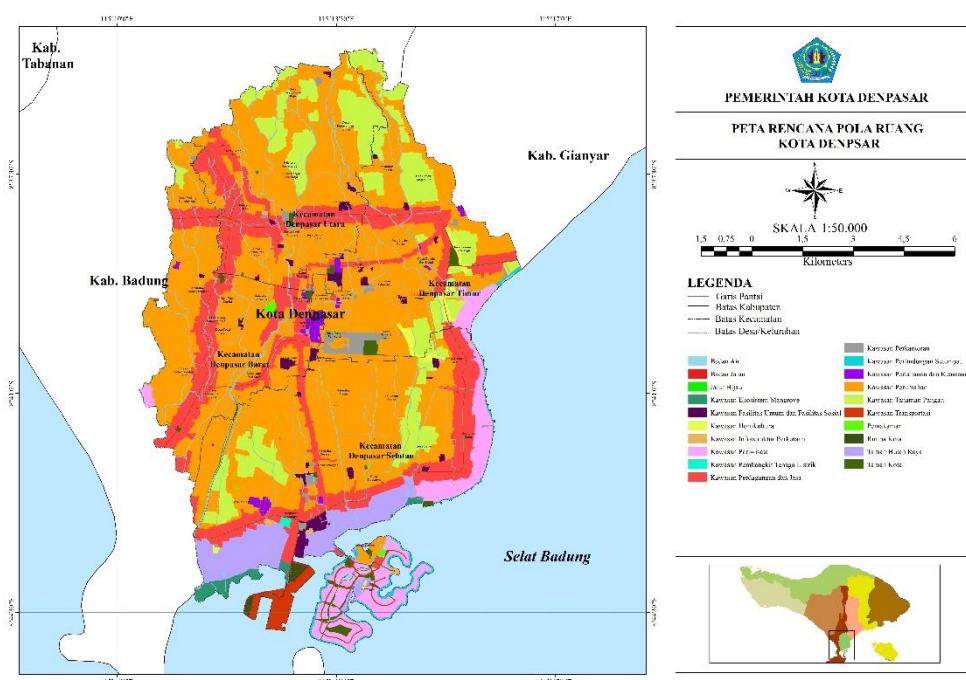
- a. Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 128 hektare yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar Tempat Suci yang terletak di Kelurahan Serangan.
- b. Ruang terbuka hijau dengan luas kurang lebih 199 hektare yang terdiri dari rimba kota yang tersebar di Kecamatan Denpasar Selatan, taman kota, pemakaman, dan jalur hijau yang ketiganya tersebar di seluruh wilayah kota.
- c. Kawasan konservasi berupa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dalam bentuk Kawasan Taman Hutan Raya. Kawasan ini merupakan bagian dari Tahura Ngurah Rai seluas kurang lebih 566 hektare yang terletak di Desa Pemogan, Desa Sanur Kauh, Desa Sidakarya, Kelurahan Pedungan, Kelurahan Serangan, dan Kelurahan Sesetan.

- d. Kawasan ekosistem *mangrove* dengan luas kurang lebih 81 hektare yang berlokasi di Desa Pemogan, Desa Sanur Kauh, Desa Sidakarya dan Desa Pemogan.

Secara lebih jelas, pola penggunaan lahan Kota Denpasar serta Rencana Pola Ruang tahun 2021-2041 dapat dilihat pada gambar 2.8 dan 2.9.



Gambar 2. 8
Peta Penggunaan Lahan Kota Denpasar
Sumber: RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041



Gambar 2. 9
Peta Rencana Pola Ruang Kota Denpasar
Sumber: RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Daya Dukung dan Daya Tampung

A. Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman

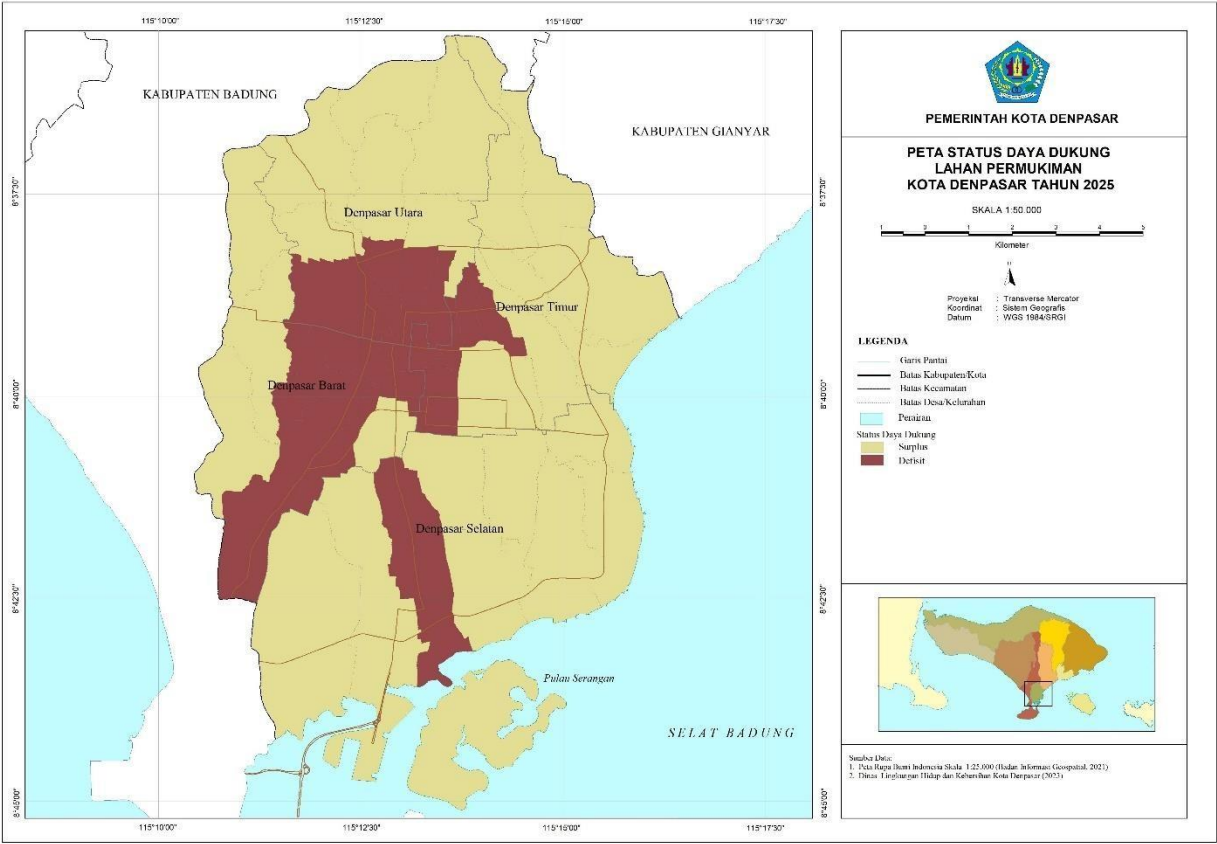
Ketersediaan lahan permukiman di Kota Denpasar diproyeksikan untuk kebutuhan tahun 2025-2029 dengan asumsi bahwa setiap penduduk harus memiliki ruang untuk melakukan aktivitasnya sebesar 100 m²/jiwa atau 0,01 Ha/jiwa dan untuk perumahan diasumsikan setiap rumah dihuni oleh 5 jiwa. Berdasarkan analisis daya dukung dan daya tampung lahan permukiman, status daya dukung permukiman tahun 2029 masih surplus dengan catatan terdapat 20 desa memiliki status daya dukung lahan permukiman defisit yang didominasi pada desa di Kecamatan Denpasar Barat. Kondisi defisit yang bertambah dari proyeksi kebutuhan tahun 2025 menuju tahun 2029 menunjukkan bahwa semakin banyaknya wilayah dengan kebutuhan ruang untuk permukiman yang telah melebihi kapasitas lahan tersedia/sesuai.

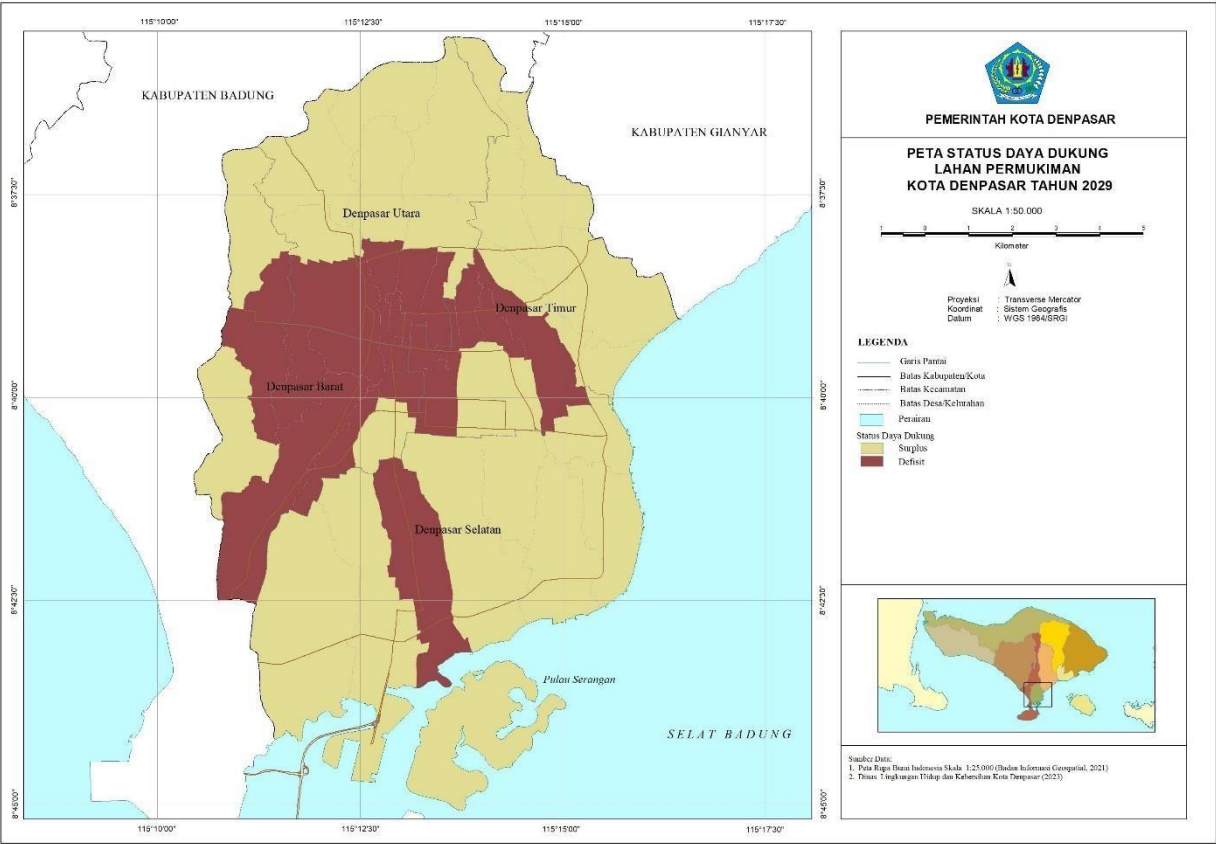
Tabel 2. 8
Status Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Denpasar

No	Kecamatan/Desa dan Kelurahan	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk 2022 (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)		Selisih Daya Tampung Penduduk (Jiwa)			Status Daya Dukung Lahan Permukiman		
					2025	2029	2022	2025	2029	2022	2025	2029
A	Kec. Denpasar Timur	1717,98	171.798	120.029	139.426	144.025	51.769	32.372	27.773	Surplus	Surplus	Surplus
1	Dangin Puri Klod	116,54	11.654	13.564	5.756	16.276	-1.910	-4.102	-4.622	Defisit	Defisit	Defisit
2	Sumerta Klod	310,20	31.020	12.766	14.829	15.318	18.254	16.191	15.702	Surplus	Surplus	Surplus
3	Kesiman	162,16	16.216	13.437	15.608	16.123	2.779	607	92	Surplus	Surplus	Defisit
4	Kesiman Petilan	212,32	21.232	10.653	12.375	12.783	10.579	8.857	8.449	Surplus	Surplus	Surplus
5	Kesiman Kertalangu	333,16	33.316	19.090	22.175	22.906	14.226	11.141	10.410	Surplus	Surplus	Surplus
6	Sumerta	69,50	6.950	7.811	9.073	9.373	-861	-2.123	-2.422	Defisit	Defisit	Defisit
7	Sumerta Kaja	88,21	8.821	8.134	9.448	9.760	687	-627	-939	Surplus	Defisit	Defisit
8	Sumerta Kauh	49,20	4.920	7.004	8.136	8.404	-2.084	-3.216	-3.484	Defisit	Defisit	Defisit
9	Dangin Puri	51,74	5.174	9.183	10.667	11.019	-4.009	-5.493	-5.844	Defisit	Defisit	Defisit
10	Penatih	208,07	20.807	10.486	12.181	12.582	10.321	8.627	8.225	Surplus	Surplus	Surplus
11	Penatih Dangin Puri	116,87	11.687	7.901	9.178	9.481	3.786	2.510	2.207	Surplus	Surplus	Surplus
B	Kec. Denpasar Utara	2.041,16	204.116	167.595	194.678	201.100	36.521	9.438	3.016	Surplus	Surplus	Defisit
1	Pemecutan Kaja	314,48	31.448	28.554	33.168	34.262	2.894	-1.721	-2.815	Surplus	Defisit	Defisit
2	Dauh Puri Kaja	111,86	11.186	18.821	21.862	22.584	-7.635	-10.677	-11.398	Defisit	Defisit	Defisit
3	Dangin Puri Kauh	34,63	3.463	7.026	8.161	8.431	-3.563	-4.698	-4.967	Defisit	Defisit	Defisit
4	Dangin Puri Kaja	96,70	9.670	13.778	16.005	16.532	-4.108	-6.335	-6.863	Defisit	Defisit	Defisit
5	Dangin Puri Kangin	102,85	10.285	9.415	10.936	11.297	870	-651	-1.012	Surplus	Defisit	Defisit
6	Tonja	225,77	22.577	14.996	17.419	17.994	7.581	5.157	4.583	Surplus	Surplus	Surplus
7	Peguyangan	194,36	19.436	14.624	16.987	17.548	4.812	2.449	1.889	Surplus	Surplus	Surplus
8	Ubung	153,25	15.325	9.791	11.373	11.748	5.534	3.951	3.576	Surplus	Surplus	Surplus
9	Ubung Kaja	358,29	35.829	22.645	26.304	27.172	13.184	9.524	8.657	Surplus	Surplus	Surplus
10	Peguyangan Kaja	185,95	18.595	9.066	10.531	10.878	9.529	8.064	7.716	Surplus	Surplus	Surplus
11	Peguyangan Kangin	263,04	26.304	18.879	21.930	22.653	7.425	4.374	3.650	Surplus	Surplus	Surplus
C	Kec. Denpasar Barat	2024,35	202.435	188.068	218.460	225.666	14.367	-16.025	-23.231	Surplus	Defisit	Defisit
1	Padangsambian Klod	320,46	32.046	20.105	23.354	24.124	11.941	8.692	7.921	Surplus	Surplus	Surplus
2	Pemecutan Klod	369,85	36.985	32.455	37.700	38.943	4.530	-714	-1.958	Surplus	Defisit	Defisit
3	Dauh Puri Kauh	138,36	13.836	13.592	15.788	16.309	244	-1.952	-2.473	Surplus	Defisit	Defisit
4	Dauh Puri Klod	153,29	15.329	11.881	13.801	14.256	3.448	1.528	1.073	Surplus	Surplus	Surplus
5	Dauh Puri	73,56	7.356	9.045	10.507	10.853	-1.689	-3.150	-3.497	Defisit	Defisit	Defisit
6	Dauh Puri Kangin	31,75	3.175	4.284	4.976	5.140	-1.109	-1.802	-1.966	Defisit	Defisit	Defisit
7	Pemecutan	157,08	15.708	20.928	24.310	25.112	-5.220	-8.602	-9.404	Defisit	Defisit	Defisit

No	Kecamatan/Desa dan Kelurahan	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk 2022 (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)		Selisih Daya Tampung Penduduk (Jiwa)			Status Daya Dukung Lahan Permukiman		
					2025	2029	2022	2025	2029	2022	2025	2029
8	Tegal Harum	68,68	6.868	12.743	14.802	15.291	-5.875	-7.934	-8.423	Defisit	Defisit	Defisit
9	Tegal Kerta	74,76	7.476	16.708	19.408	20.048	-9.232	-11.932	-12.572	Defisit	Defisit	Defisit
10	Padangsambian	357,97	35.797	29.098	33.800	34.915	6.699	1.996	881	Surplus	Surplus	Defisit
11	Padangsambian Kaja	278,60	27.860	17.229	20.013	20.673	10.631	7.846	7.186	Surplus	Surplus	Surplus
D	Kec. Denpasar Selatan	3192,64	319.264	180.713	209.916	216.840	138.551	109.348	102.424	Surplus	Surplus	Surplus
1	Pemogan	493,26	49.326	30.858	35.845	37.027	18.468	13.482	12.299	Surplus	Surplus	Surplus
2	Pedungan	379,26	37.926	24.885	28.906	29.860	13.041	9.020	8.066	Surplus	Surplus	Surplus
3	Sesetan	416,32	41.632	39.523	45.910	47.424	2.109	-4.277	-5.792	Surplus	Defisit	Defisit
4	Serangan	313,85	31.385	4.030	4.681	4.836	27.355	26.704	26.549	Surplus	Surplus	Surplus
5	Sidakarya	254,39	25.439	17.457	20.278	20.947	7.982	5.161	4.492	Surplus	Surplus	Surplus
6	Panjer	300,74	30.074	23.507	27.306	28.206	6.567	2.768	1.867	Surplus	Surplus	Surplus
7	Renon	235,18	23.518	11.764	13.665	14.116	11.754	9.852	9.402	Surplus	Surplus	Surplus
8	Sanur Kauh	312,14	31.214	11.428	13.275	13.713	19.786	17.939	17.502	Surplus	Surplus	Surplus
9	Sanur	315,28	31.528	9.567	11.113	11.480	21.961	20.415	20.049	Surplus	Surplus	Surplus
10	Sanur Kaja	172,22	17.222	7.694	8.937	9.232	9.528	8.284	7.990	Surplus	Surplus	Surplus
	TOTAL	8976,13	897.613	656.405	762.480	787.630	241.208	135.133	109.982	Surplus	Surplus	Surplus

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029





Gambar 2. 10
Peta Status Daya Dukung Lahan Permukiman Kota Denpasar 2025 (atas) dan Tahun 2029 (bawah)
Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

B. Daya Dukung Daya Tampung Penyediaan Pangan

Daya dukung lingkungan hidup untuk penyediaan pangan menggambarkan informasi status dan persebaran daya dukung penyediaan pangan melalui pemodelan produksi dan konsumsi pangan. Pada data produksi energi bahan pangan di Provinsi Bali pada tahun 2018 yang terdiri dari tanaman pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, dan perikanan laut dan diakumulasikan memiliki total produksi energi bahan pangan sebesar 3.412.596.680.191,09 kkal.

Kondisi ketersediaan pangan dalam memenuhi konsumsi kebutuhan fisik minimum harian sesuai dengan jumlah penduduk di Provinsi Bali yaitu 2.407,40 kkal/kapita/hari. Berdasarkan analisis perhitungan selisih produksi dan konsumsi pangan pada tabel dibawah, Kota Denpasar berada pada status defisit di tahun tersebut yang menunjukkan bahwa jumlah ketersediaan pangan lokal tidak mencukupi untuk kebutuhan konsumsi penduduknya secara mandiri.

Tabel 2. 9
Selisih antara Produksi dengan Konsumsi Energi Bahan Pangan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Energi Bahan Pangan (kkal)	Jumlah Konsumsi Energi Bahan Pangan (kkal)	Jumlah Selisih Produksi dan Konsumsi (kkal)	Keterangan
1	Jembrana	296.962.079.841,95	243.053.090.105,00	53.908.989.736,95	Surplus
2	Tabanan	602.464.304.341,50	389.677.532.470,00	212.786.771.871,50	Surplus
3	Badung	426.429.261.783,38	577.223.080.405,00	-150.793.818.621,62	Defisit
4	Gianyar	543.177.895.400,63	446.458.312.389,00	96.719.583.011,63	Surplus
5	Klungkung	163.498.832.956,50	156.667.116.094,00	6.831.716.862,50	Surplus

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Energi Bahan Pangan (kkal)	Jumlah Konsumsi Energi Bahan Pangan (kkal)	Jumlah Selisah Produksi dan Konsumsi (kkal)	Keterangan
6	Bangli	173.948.322.824,13	198.761.287.499,00	-24.812.964.674,87	Defisit
7	Karangasem	391.943.599.563,00	364.471.994.285,00	27.471.605.278,00	Surplus
8	Buleleng	579.626.477.760,00	577.484.933.303,00	2.141.544.457,00	Surplus
9	Kota Denpasar	234.545.905.720,00	817.716.514.497,00	-583.170.608.777,00	Defisit
	Provinsi Bali	3.412.596.680.191,09	3.771.513.861.047,00	-358.917.180.855,91	Defisit

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

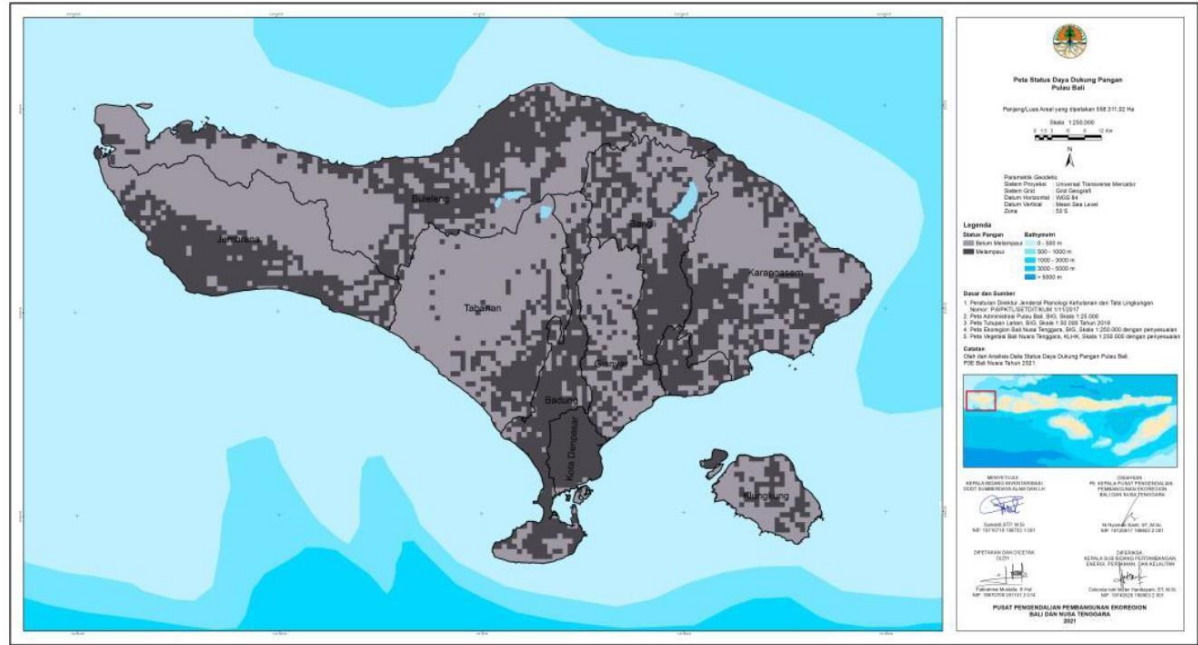
Berdasarkan analisis diatas, dilakukan perhitungan proyeksi defisit di Kota Denpasar pada tabel dibawah. Pada tahun 2025 sebesar -400.407.473.271,90 kkal atau defisit 170,72 persen dari jumlah produksi dan nilai tersebut meningkat menjadi -448.395.900.773,31 kkal atau defisit 191,18 persen dari produksi pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan persentase defisit pangan untuk tahun 2025-2029 semakin meningkat di setiap tahunnya.

Tabel 2. 10
Proyeksi Defisit antara Produksi dan Konsumsi Energi Bahan Pangan di Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Tahun	Konsumsi Energi Bahan Pangan (Kkal)	Jumlah Selisah Produksi dan Konsumsi (kkal)	Persentase Defisit Pangan (%)
2025	634.953.378.991,90	-400.407.473.271,90	-170,72
2026	666.124.452.963,33	-431.578.547.243,33	-184,01
2027	671.960.293.045,42	-437.414.387.325,42	-186,49
2028	677.560.253.363,72	-443.014.347.643,72	-188,88
2029	682.941.806.493,31	-448.395.900.773,31	-191,18

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

Peta status DDLH penyediaan pangan untuk Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar di bawah. Berdasarkan perhitungan dalam KLHS, Kota Denpasar memiliki luas terbesar dengan status DDLH telah melampaui yaitu sebesar 92,84 persen. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Kota Denpasar menunjukkan tingginya tekanan terhadap penyediaan pangan lokal.



Gambar 2. 11
Peta Status DDLH Penyedia Bahan Pangan di Provinsi Bali Tahun 2018
 Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

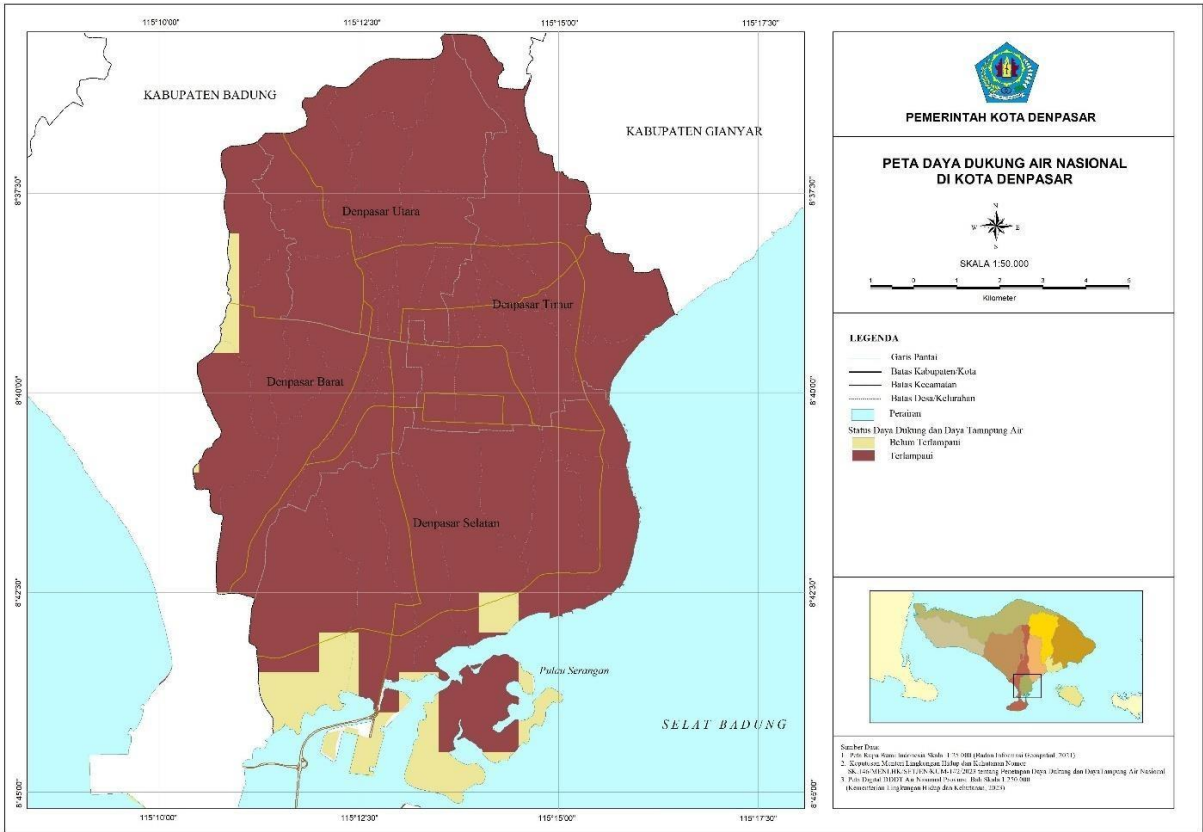
C. Daya Dukung Daya Tampung Air

Berdasarkan perhitungan jumlah ketersediaan air dibandingkan dengan jumlah kebutuhan air yang dilakukan pada tabel dibawah, indikasi status daya dukung dan daya tampung air di Kota Denpasar sebagian besar wilayahnya memiliki status “Terlampau” yang mencapai 94,23 persen dari total luas wilayah sedangkan wilayah yang “Belum Terlampau” sebesar 5,77 persen. Peta terkait status daya dukung air di Kota Denpasar ditunjukan pada gambar dibawah.

Tabel 2. 11
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Provinsi Bali

No	Kabupaten/ Kota	Sediaan Air (M3/Thn)	Kebutuhan Air (M3/Thn)			Status	Luas Menurut Status (Ha)	
			Domestik	Lahan	Jumlah		Terlampau	Belum Terlampau
1	Jembrana	324.464.970,07	27.396.230,40	405.193.489,70	432.589.720,10	Terlampau	49.194,72	35.841,97
2	Tabanan	391.015.984,65	39.881.203,20	794.742.638,38	834.623.841,58	Terlampau	72.916,14	11.845,07
3	Badung	126.316.503,59	47.361.369,60	334.868.008,35	382.229.377,95	Terlampau	37.715,98	2.797,44
4	Gianyar	124.233.000,84	44.525.203,20	427.216.531,65	471.741.734,85	Terlampau	36.628,03	5,34
5	Klungkung	142.389.489,81	17.880.566,40	211.093.343,57	228.973.909,97	Terlampau	24.824,61	6.397,42
6	Bangli	165.502.462,10	22.351.852,80	314.739.002,03	337.090.854,83	Terlampau	44.504,46	8.292,81
7	Karangasen	279.034.775,64	42.544.828,80	482.221.332,80	524.766.161,60	Terlampau	69.120,74	14.649,47
8	Buleleng	491.070.463,68	68.427.331,20	677.739.353,97	746.166.685,17	Terlampau	86.403,83	45.674,55
9	Denpasar	34.779.742,42	62.666.870,40	40.475.146,27	103.142.016,67	Terlampau	11.650,43	713,36
	Bali	2.078.807.392,80	373.035.456,00	3.688.288.846,72	4.061.324.302,72	Terlampau	432.958,95	126.217,43

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029



Gambar 2. 12
Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Kota Denpasar
Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

Kemudian dilakukan proyeksi terkait defisit air di Kota Denpasar untuk tahun 2025-2029 pada tabel dibawah. Dari perhitungan tersebut, menunjukan bahwa kondisi defisit semakin meningkat dengan asumsi ketersediaan air tetap. Pada tahun 2025 persentase defisit air sebesar -

205,40 persen dari ketersediaan air dan kemudian meningkat menjadi - 211,64 persen di tahun 2029.

Tabel 2. 12
Proyeksi Defisit Air di Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Tahun	Kebutuhan Air (M3/Tahun)	Jumlah Defisit Air (M3/Tahun)	Persentase Defisit Air (%)
2025	106.218.453,02	-71.438.710,60	-205,40
2026	106.794.422,60	-72.014.680,18	-207,06
2027	107.347.111,98	-72.567.369,56	-208,65
2028	107.878.245,61	-73.098.503,19	-210,18
2029	108.386.961,26	-73.607.218,84	-211,64

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

2. Jasa Ekosistem Lingkungan Hidup

Penilaian jasa ekosistem lingkungan hidup dilakukan untuk mengevaluasi suatu wilayah dalam memberikan manfaat ekologi dan menjadi dasar dalam menentukan suatu rencana pembangunan. Penilaian tersebut dilakukan dengan nilai Koefisien Jasa Ekosistem (KJE).

Rentang KJE dinormasilasi dalam proses *scalling* dengan rentang nilai 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, menunjukkan kapasitas ekosistem yang semakin tinggi dalam menyediakan layanan lingkungan, begitupula sebaliknya. Berdasarkan sebaran data nilai KJE dapat diklasifikasikan dalam 5 tingkat yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

A. Jasa Penyediaan Pangan

Tingkat jasa penyediaan pangan ditentukan oleh besarnya proporsi lahan pertanian sebagai produksi pangan. Dari keseluruhan luas wilayah Kota Denpasar, area yang memiliki jasa ekosistem sebagai penyedia pangan kategori rendah sebesar 89,28%, sisanya kategori tinggi sebesar 8,94%, dan kategori sedang sebesar 1,78%.

Tabel 2. 13
Distribusi Kelas Jasa Penyediaan Pangan menurut Kecamatan Kota Denpasar

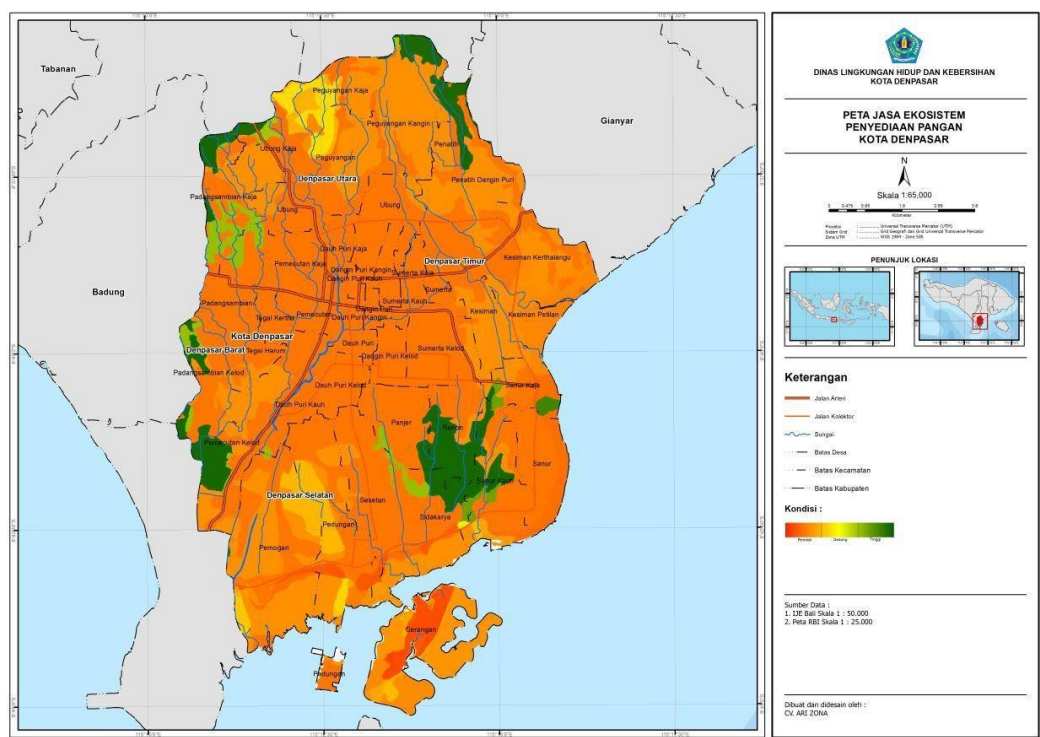
No	Kecamatan	Distribusi Kelas menurut Kecamatan (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Denpasar Selatan	0	88,03	1,69	10,28	0
2	Denpasar Timur	0	83,57	0	16,43	0
3	Denpasar Barat	0	94,17	0	5,83	0
4	Denpasar Utara	0	92,02	5,30	2,68	0
	Denpasar	0	89,28	1,78	8,94	0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

Ditinjau dari kelas jasa penyediaan pangan masing-masing kecamatan, Denpasar Timur memiliki proporsi lahan tertinggi yang berkategori tinggi dalam penyediaan pangan yaitu 16,43% dari luas wilayahnya dan disusul Denpasar Selatan yaitu 10,28% dari luas wilayah.

Hal tersebut menunjukkan kedua kecamatan tersebut masih memiliki fungsi ekosistem yang relatif baik dalam mendukung produksi pangan lokal yang umumnya berasal dari lahan sawah. Selain itu, Denpasar Selatan dan

Denpasar Timur merupakan wilayah yang memiliki lahan sawah terluas di Denpasar.



Gambar 2. 13
Peta Jasa Penyediaan Pangan
Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

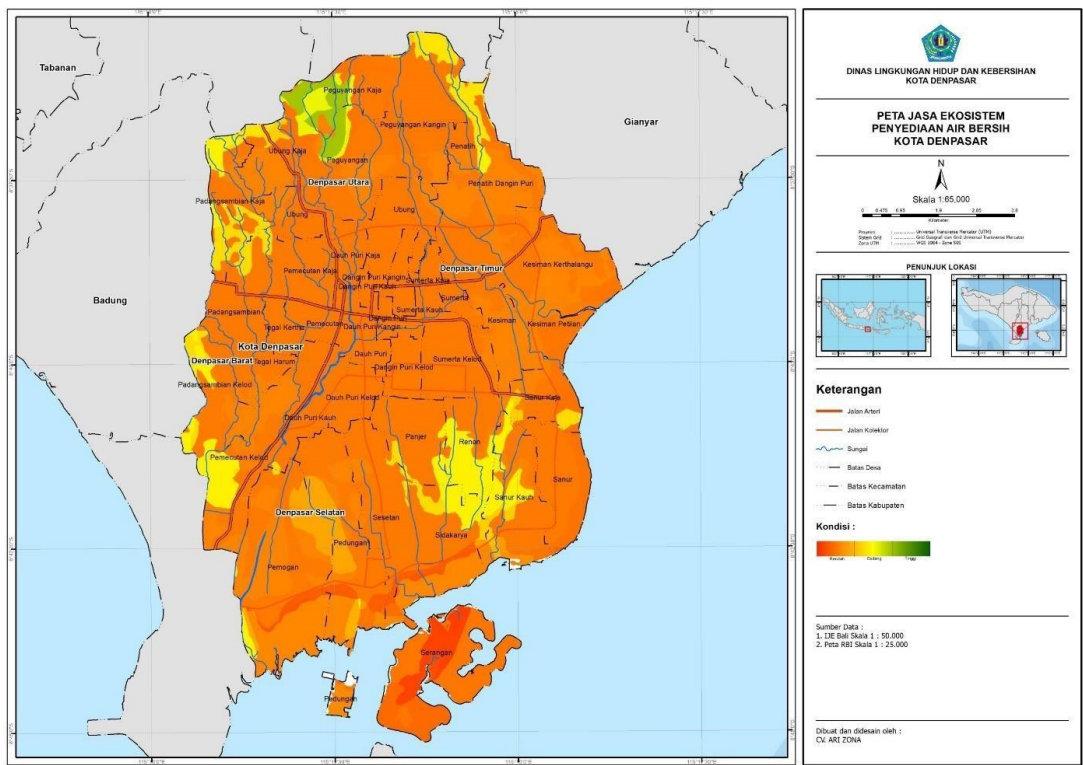
B. Jasa Penyediaan Air Bersih

Tingkat jasa penyediaan air bersih wilayah Kota Denpasar sebagian besar termasuk kategori sangat rendah mencapai 89,08%, sisanya kategori sedang 9,80%, dan kategori tinggi hanya 1,13%. Semua kecamatan wilayahnya didominasi oleh jasa penyediaan air bersih kategori sedang. Kondisi ini menyebabkan Kota Denpasar termasuk rentan dalam penyediaan air bersih jika dikaitkan dengan pesatnya perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi seiring perkembangan jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan yang tinggi.

Tabel 2. 14
Distribusi Kelas Jasa Penyediaan Air Bersih Menurut Kecamatan Kota Denpasar

No	Kecamatan	Distribusi Kelas menurut Kecamatan (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Denpasar Selatan	0	89,24	10,76	0	0
2	Denpasar Timur	0	83,57	16,43	0	0
3	Denpasar Barat	0	94,17	5,83	0	0
4	Denpasar Utara	0	88,86	5,84	5,30	0
	Denpasar	0	89,08	9,80	1,13	0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029



Gambar 2. 14
Peta Jasa Penyediaan Air Bersih
Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

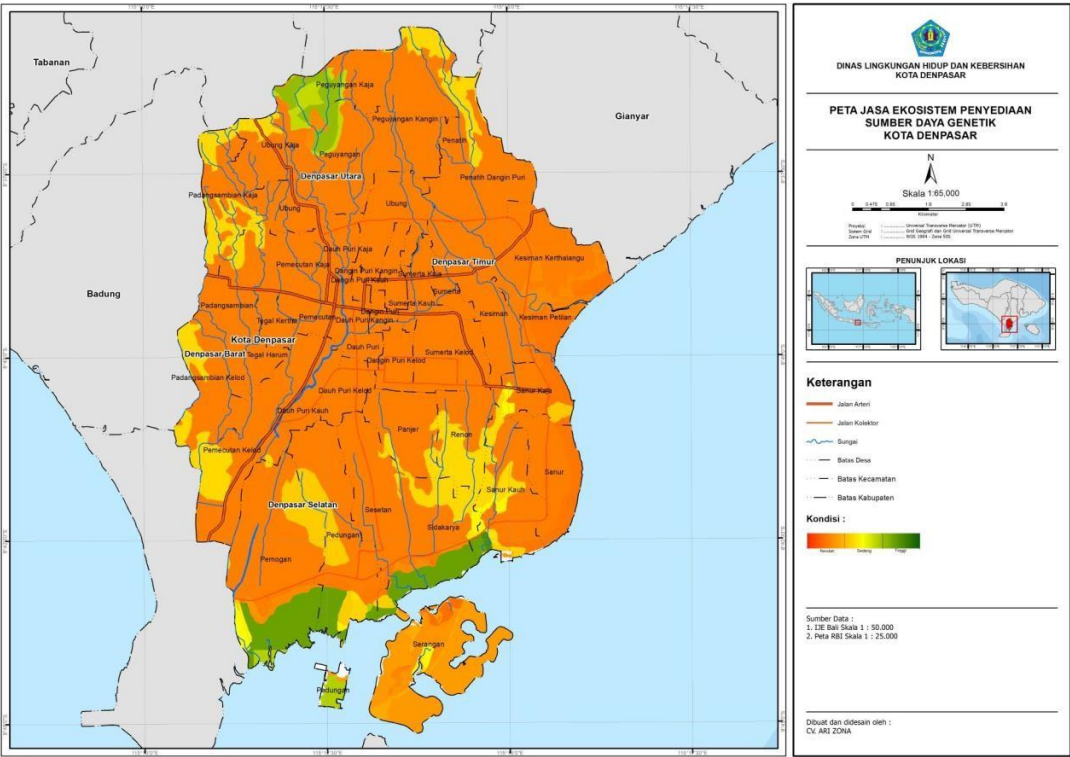
C. Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik

Secara umum lahan di wilayah Kota Denpasar yang berpotensi tinggi dalam menyediakan sumber daya genetik luasan hanya sebesar 4,63% dari keseluruhan lahan. Sebagian besar lahannya memiliki potensi rendah dalam penyediaan sumberdaya genetik yaitu mencapai luasan sebesar 82,57%. Semua kecamatan didominasi oleh tingkat jasa rendah dalam penyediaan sumber daya genetik. Sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah sebesar 12,80% dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kota Denpasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan di Kota Denpasar mempunyai kapasitas yang rendah sebagai penyedia sumber daya genetik.

Tabel 2. 15
Distribusi Kelas Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik Menurut Kecamatan Kota Denpasar

No	Kecamatan	Distribusi Kelas menurut Kecamatan (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Denpasar Selatan	0	72,36	18,54	9,10	0
2	Denpasar Timur	0	83,57	16,43	0	0
3	Denpasar Barat	0	94,17	5,83	0	0
4	Denpasar Utara	0	88,86	5,84	5,30	0
	Denpasar	0	82,57	12,80	4,63	0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029



Gambar 2. 15
Peta Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik
Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

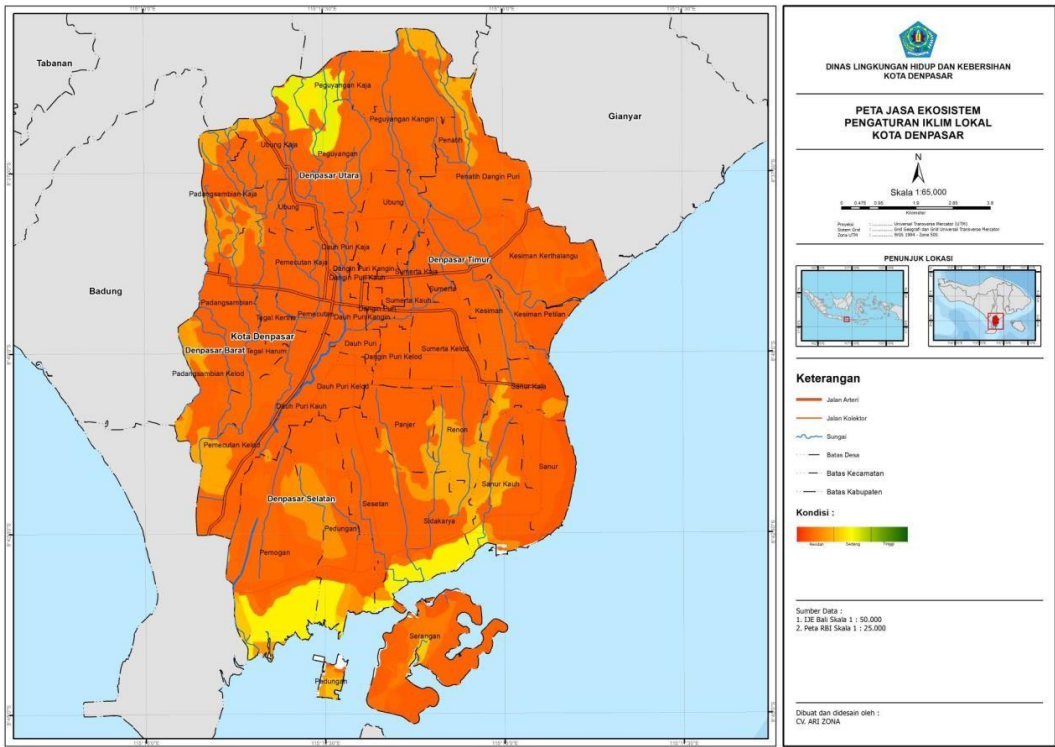
D. Jasa Pengaturan Iklim

Pengaturan iklim merupakan salah satu jasa ekosistem penting yang berfungsi dalam menstabilkan suhu udara, mengatur kelembaban, serta menyerap dan menyimpan karbon dari atmosfer. Secara umum, wilayah Kota Denpasar memiliki tingkat jasa ekosistem pengaturan iklim dalam kategori “rendah” yang mendominasi sebesar 94,11% dari total luas wilayah, sementara sisanya sebesar 5,89% tergolong dalam kategori “sedang”. Tidak terdapat area yang masuk dalam kategori “tinggi” maupun “sangat tinggi”, yang mengindikasikan bahwa kapasitas alami Kota Denpasar dalam menyerap emisi karbon dan mengatur suhu mikroklimat masih sangat terbatas.

Tabel 2. 16
Distribusi Kelas Jasa Pengaturan Iklim Menurut Kecamatan Kota Denpasar

No	Kecamatan	Distribusi Kelas menurut Kecamatan (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Denpasar Selatan	0	89,37	10,63	0	0
2	Denpasar Timur	0	100	0	0	0
3	Denpasar Barat	0	100	0	0	0
4	Denpasar Utara	0	91,54	8,46	0	0
	Denpasar	0	94,11	5,89	0	0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029



Gambar 2. 16
Peta Jasa Pengaturan Iklim
Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

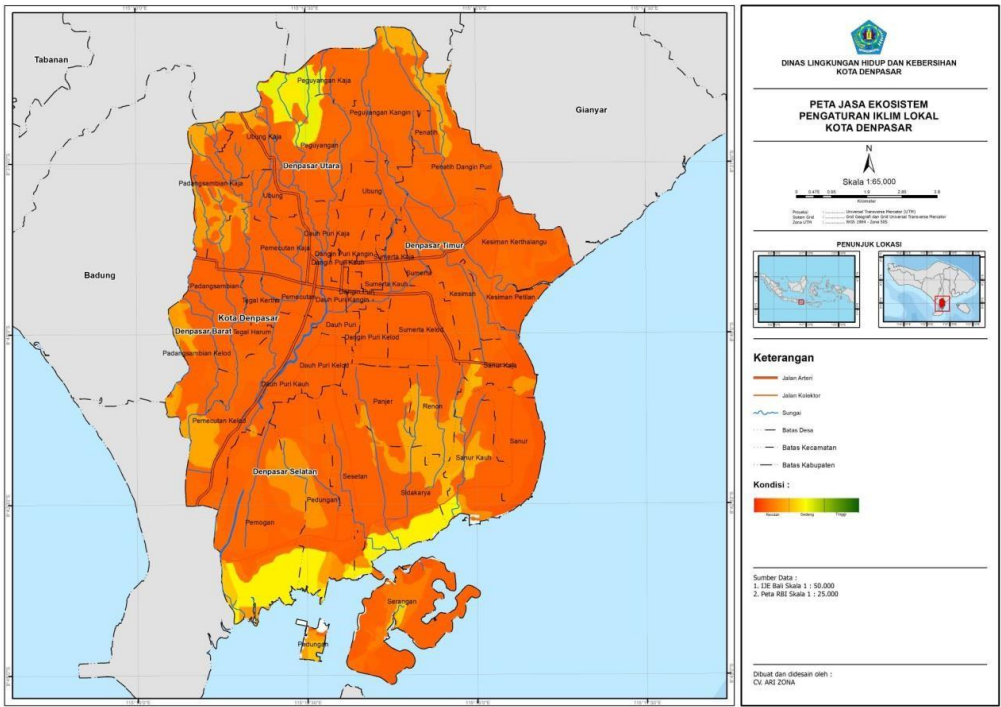
E. Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara

Sebagian besar wilayah Kota Denpasar mempunyai tingkat jasa pemeliharaan kualitas udara kategori rendah yaitu 85,04% dari luas wilayah, sisanya 14,06% memiliki tingkat jasa kategori sedang. Semua kecamatan wilayahnya didominasi oleh tingkat jasa pemeliharaan kualitas udara kategori rendah. Kondisi ini mengindikasikan kurang optimalnya fungsi ekologis dalam menjaga kualitas udara di Kota Denpasar.

Tabel 2. 17
Distribusi Kelas Jasa Pengaturan Iklim Menurut Kecamatan Kota Denpasar

No	Kecamatan	Distribusi Kelas menurut Kecamatan (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Denpasar Selatan	0	78,77	21,23	0	0
2	Denpasar Timur	0	83,57	16,43	0	0
3	Denpasar Barat	0	94,17	5,83	0	0
4	Denpasar Utara	0	88,86	11,14	0	0
	Denpasar	0	85,04	14,96	0	0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029



Gambar 2. 17
Peta Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara
Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

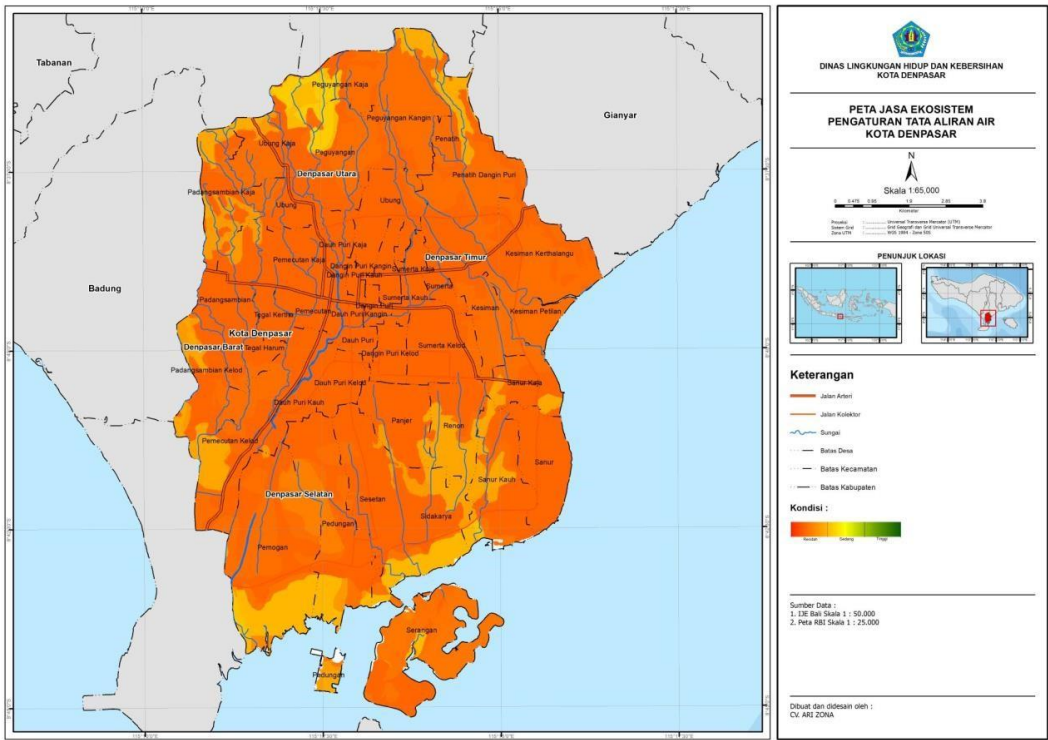
F. Jasa Pengaturan Tata Aliran Air

Secara umum wilayah Kota Denpasar memiliki tingkat jasa ekosistem pengaturan tata aliran air kategori rendah. Wilayah dengan tingkat jasa pengaturan tata aliran air kategori rendah mencapai 85,04%. Sisanya termasuk kategori sedang sebesar 14,96%. Semua wilayah kecamatan didominasi oleh tingkat jasa kategori rendah.

Tabel 2. 18
Distribusi Kelas Jasa Pengaturan Tata Aliran Air Menurut Kecamatan Kota Denpasar

No	Kecamatan	Distribusi Kelas menurut Kecamatan (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Denpasar Selatan	0	98,79	1,21	0	0
2	Denpasar Timur	0	100	0	0	0
3	Denpasar Barat	0	100	0	0	0
4	Denpasar Utara	0	91,67	8,33	0	0
	Denpasar	0	97,76	2,24	0	0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029



Gambar 2. 18
Peta Jasa Pengaturan Tata Aliran Air
Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

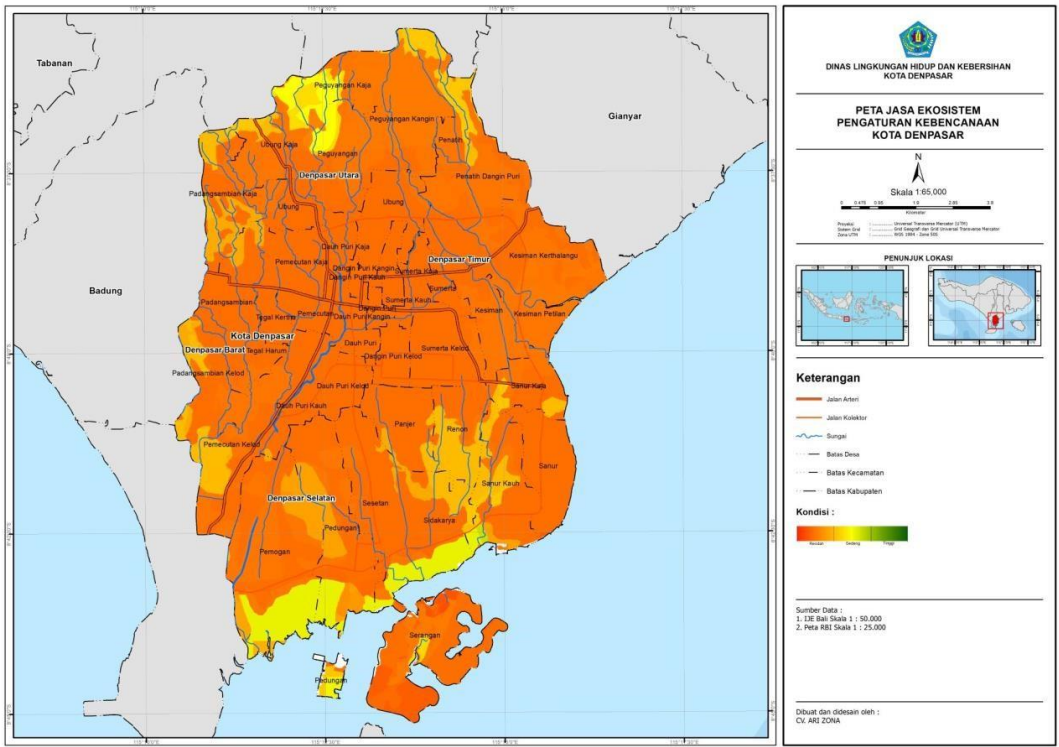
G. Jasa Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan

Secara umum wilayah Kota Denpasar didominasi oleh tingkat jasa pengaturan pencegahan dan pengendalian kebencanaan kategori rendah, yaitu mencapai 87,44% dan terdapat wilayah dengan kategori sedang sebesar 12,56%. Semua wilayah kecamatan didominasi oleh tingkat jasa kategori rendah.

Tabel 2. 19
Distribusi Kelas Jasa Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan

No	Kecamatan	Distribusi Kelas menurut Kecamatan (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Denpasar Selatan	0	80,57	19,43	0	0
2	Denpasar Timur	0	90,91	9,09	0	0
3	Denpasar Barat	0	94,17	5,83	0	0
4	Denpasar Utara	0	90,15	9,85	0	0
	Denpasar	0	87,44	12,56	0	0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029



Gambar 2. 19
Peta Jasa Pengaturan Pencegahan Dan Perlindungan Bencana Alam
Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

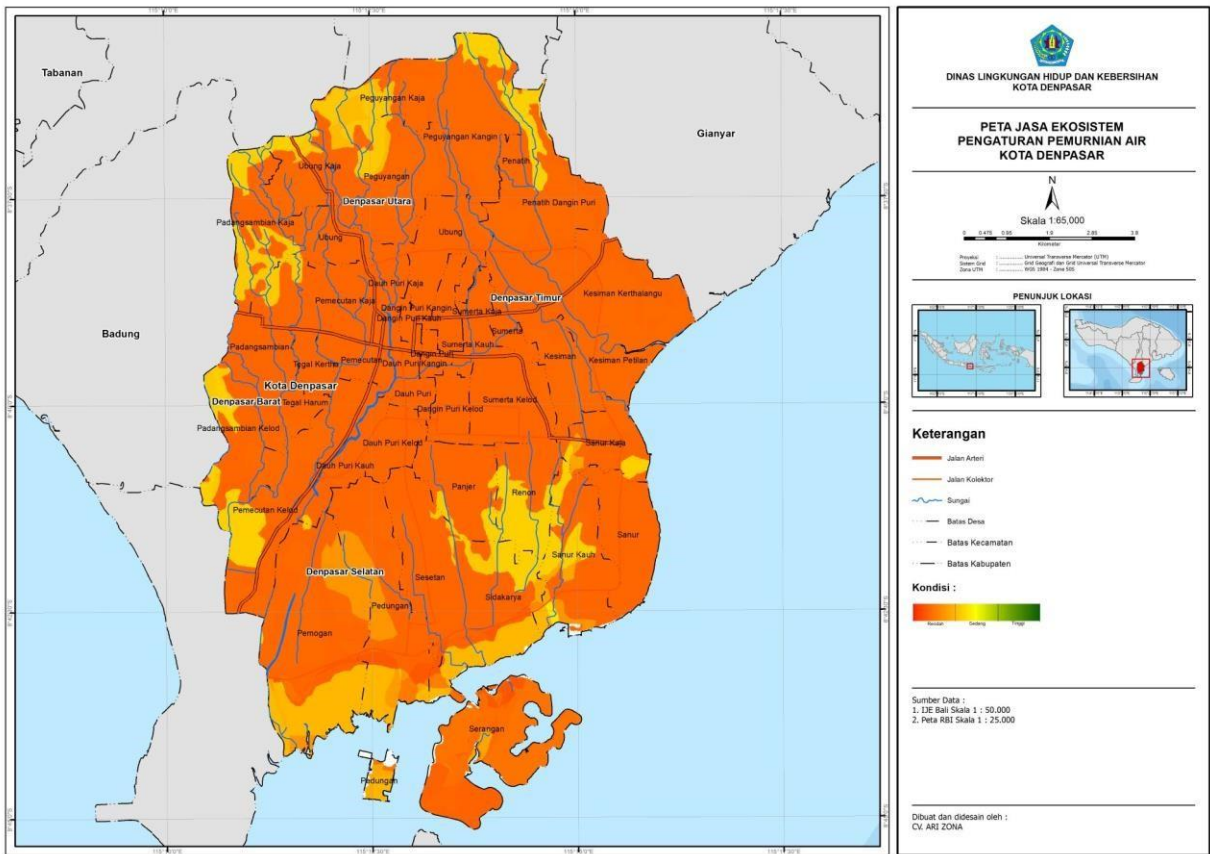
H. Jasa Pengaturan Pemurnian Air

Secara umum, sebagian besar wilayah Kota Denpasar mempunyai jasa pengaturan pemurnian air kategori rendah, yaitu mencapai 89,44% dari luas wilayah. Sisanya wilayah dengan kategori sedang sebesar 10,56%. Semua wilayah kecamatan didominasi oleh tingkat jasa kategori rendah. Dengan tingkat jasa pemurnian air ini maka jika beban pencemaran relatif tinggi masuk ke lingkungan alam yang berasal dari kegiatan domestik terutama limbah kegiatan pariwisata, sistem alam tidak dapat secara optimal melakukan purifikasi melalui proses oksidasi fisik, kimia maupun biologis.

Tabel 2. 20
Distribusi Kelas Jasa Pemurnian Air Menurut Kecamatan Kota Denpasar

No	Kecamatan	Distribusi Kelas menurut Kecamatan (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Denpasar Selatan	0	90,18	9,82	0	0
2	Denpasar Timur	0	83,57	16,43	0	0
3	Denpasar Barat	0	94,17	5,83	0	0
4	Denpasar Utara	0	88,86	11,14	0	0
	Denpasar	0	89,44	10,56	0	0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029



Gambar 2. 20
Peta Jasa Pengaturan Pemurnian Kualitas Air
Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

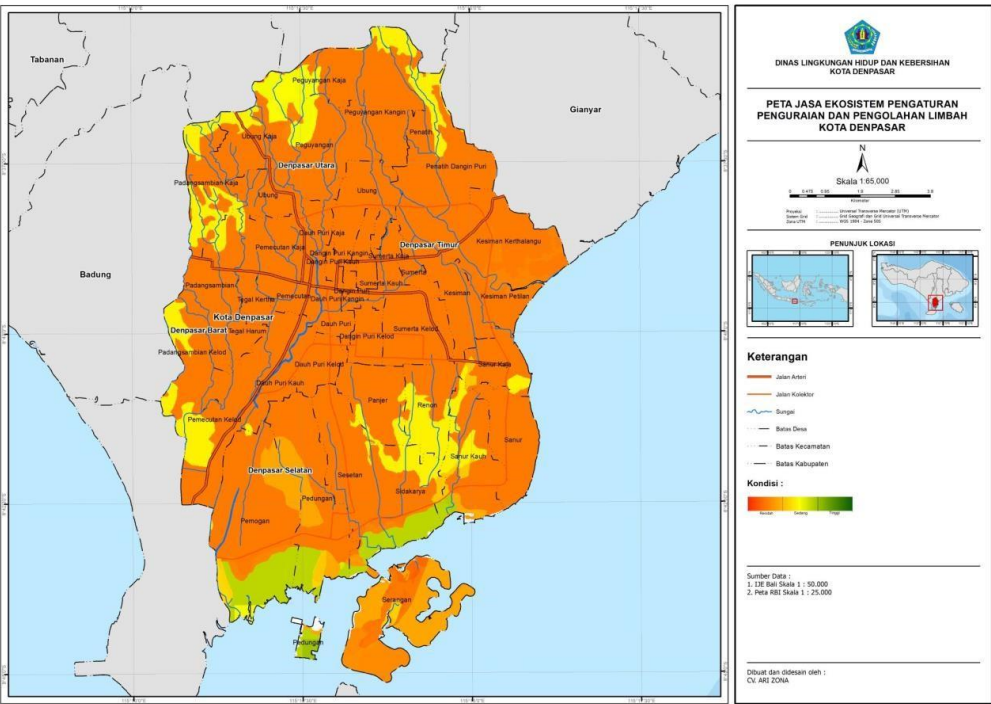
I. Jasa Pengaturan Penguraian dan Pengolahan Limbah

Secara umum wilayah Kota Denpasar didominasi oleh tingkat jasa pengaturan penguraian dan pengolahan limbah kategori rendah yaitu mencapai 84,69% luas wilayah. Sisanya terdapat 15,15% wilayah dengan tingkat jasa sedang dan 0,16% dengan tingkat jasa tinggi. Semua kecamatan wilayahnya didominasi oleh jasa ekosistem penguraian limbah kategori rendah. Wilayah dengan tingkat jasa penguraian limbah yang rendah biasanya memiliki tutupan lahan yang kurang memadai untuk dapat membantu dalam mengurai limbah gas seperti CO₂, karena CO₂ digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis.

Tabel 2. 21
Distribusi Kelas Jasa Penguraian dan Pengolahan Limbah Menurut Kecamatan Kota Denpasar

No	Kecamatan	Distribusi Kelas menurut Kecamatan (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Denpasar Selatan	0	77,85	21,73	0,42	0
2	Denpasar Timur	0	83,57	16,43	0	0
3	Denpasar Barat	0	94,17	5,83	0	0
4	Denpasar Utara	0	88,86	11,14	0	0
	Denpasar	0	84,69	15,15	0,16	0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029



Gambar 2. 21
Peta Jasa Pengaturan Penguraian dan Pengolahan Limbah
Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

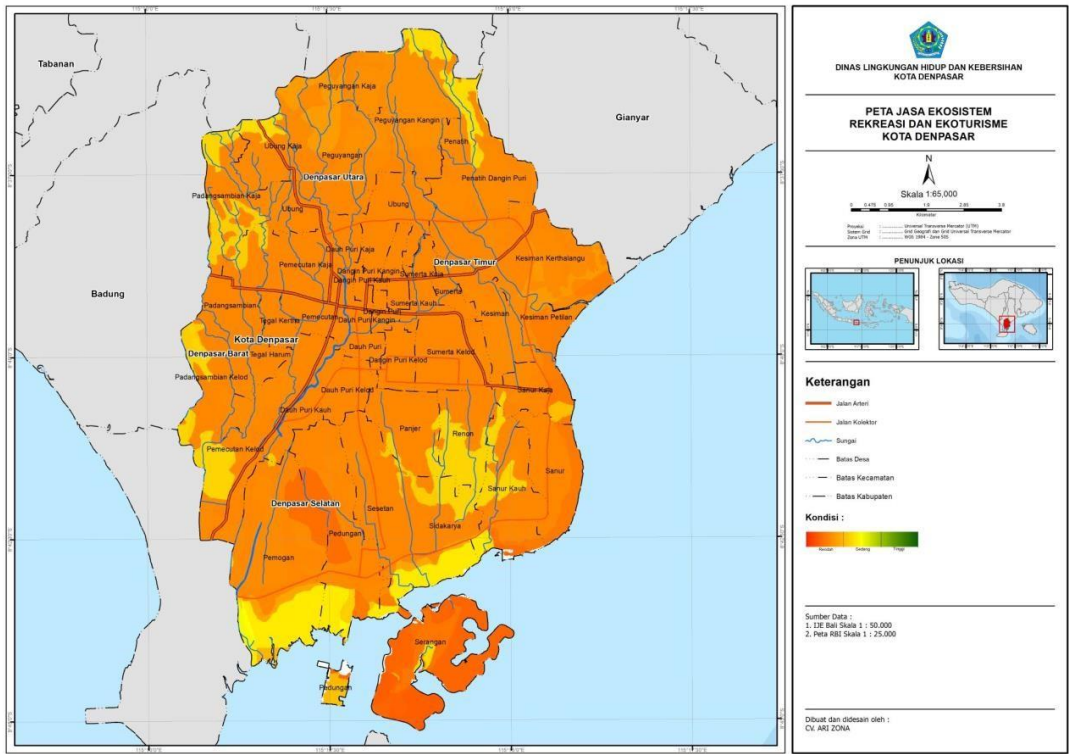
J. Jasa Rekreasi/Ekowisata

Sebagian besar wilayah Kota Denpasar memiliki jasa rekreasi/ekowisata kategori rendah, yaitu mencapai 87,19%. Sisanya sebesar 12,81% wilayahnya mempunyai tingkat jasa rekreasi/ekowisata kategori sedang. Semua kecamatan wilayahnya didominasi oleh tingkat jasa rekreasi/ekowisata kategori rendah.

Tabel 2. 22
Distribusi Kelas Jasa Rekreasi/Ekowisata Menurut Kecamatan Kota Denpasar

No	Kecamatan	Distribusi Kelas menurut Kecamatan (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Denpasar Selatan	0	79,70	20,30	0	0
2	Denpasar Timur	0	83,57	16,43	0	0
3	Denpasar Barat	0	94,17	5,83	0	0
4	Denpasar Utara	0	97,32	2,68	0	0
	Denpasar	0	87,19	12,81	0	0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029



Gambar 2. 22
Peta Jasa Ekowisata
Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

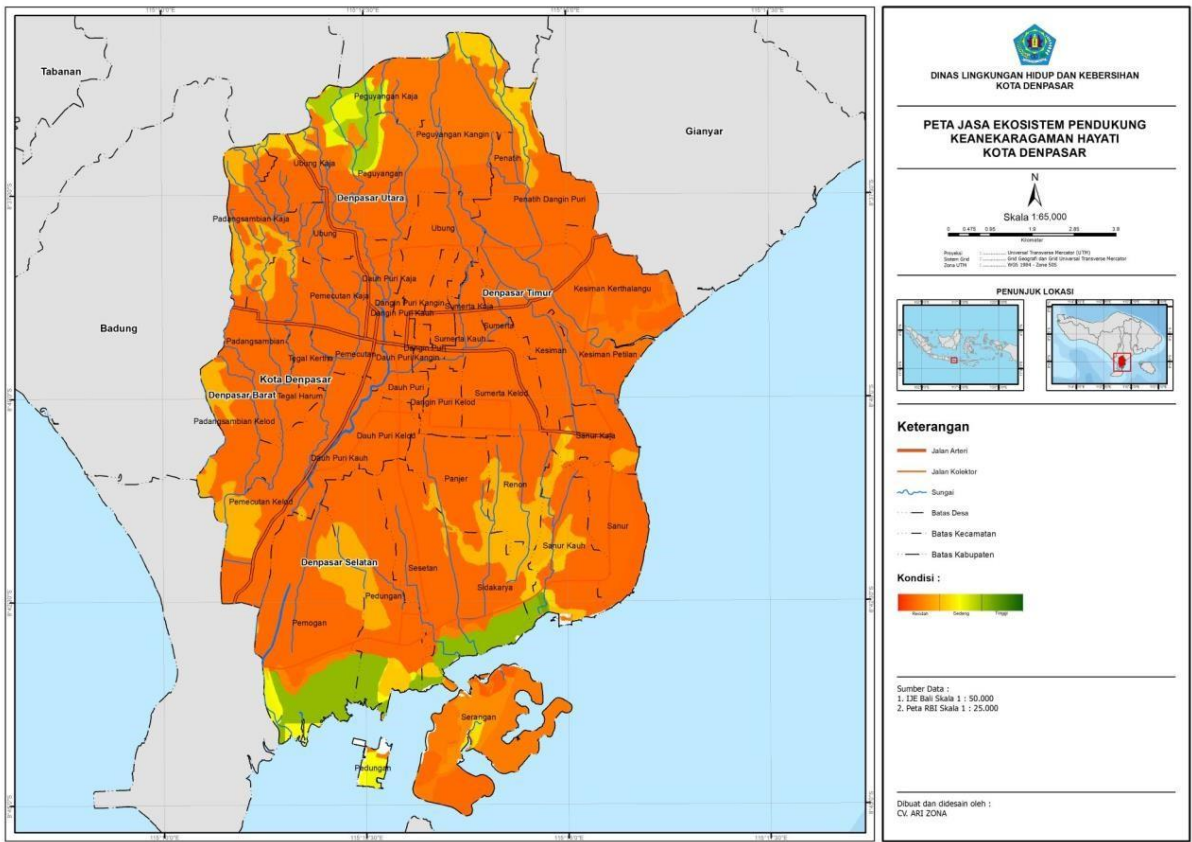
K. Jasa Pendukung Biodiversitas

Sebagian besar wilayah Kota Denpasar menyediakan dukungan biodiversitas yang berkategori rendah, yaitu mencapai 91,16% dari keseluruhan luas wilayah. Sisanya sebesar 5,34% kategori sedang dan hanya 3,51% mempunyai jasa pendukung biodiversitas kategori tinggi. Semua wilayah kecamatan didominasi oleh tingkat jasa pendukung biodiversitas kategori rendah. Wilayah yang mempunyai jasa pendukung biodiversitas kategori tinggi yaitu Denpasar Selatan. Di wilayah ini terdapat kawasan hutan mangrove yang merupakan habitat keanekaragaman hayati.

Tabel 2. 23
Distribusi Kelas Jasa Pendukung Biodiversitas menurut Kecamatan Kota Denpasar

No	Kecamatan	Distribusi Kelas menurut Kecamatan (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Denpasar Selatan	0	85,89	5,01	9,10	0
2	Denpasar Timur	0	99,85	0,15	0	0
3	Denpasar Barat	0	94,85	5,15	0	0
4	Denpasar Utara	0	89,14	10,86	0	0
	Denpasar	0	91,16	5,34	3,51	0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029



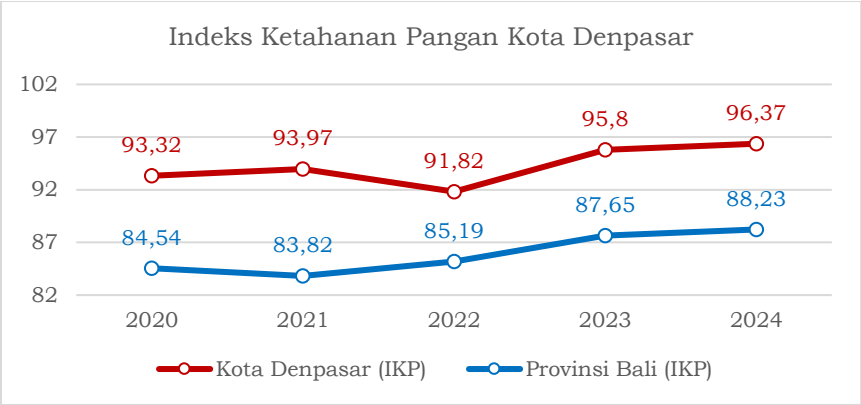
Gambar 2. 23
Peta Jasa Pendukung Biodiversitas
 Sumber: KLHS RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Menurut UU No.7 Tahun 1996, ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan bersifat multidimensi sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan beberapa indikator yang nantinya digabung untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, kemudian selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

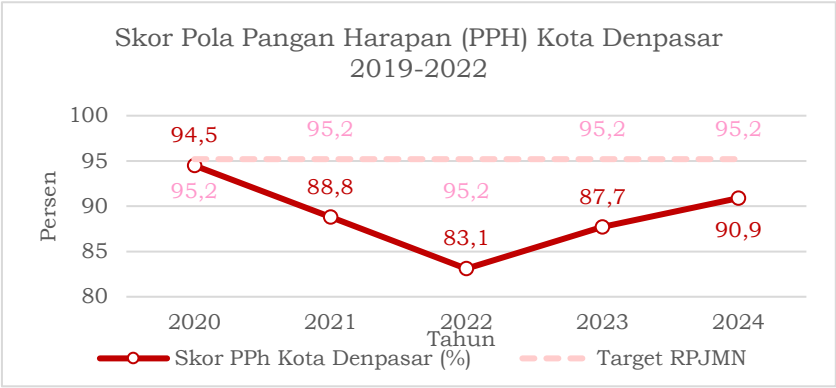
Menurut data dalam kurun waktu 2020-2024, Indeks Ketahanan Pangan Kota Denpasar bersifat tidak stabil atau terdapat fluktuasi dengan kecenderungan tren meningkat. Namun, IKP Kota Denpasar lebih tinggi dari nilai provinsi. Kota Denpasar termasuk ke dalam 5 kota dengan skor IKP terbaik di Indonesia selain Balikpapan, Salatiga, Semarang, dan Bekasi. Penjelasan yang dimaksud dirincikan sebagai berikut.



Gambar 2. 24
Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kota Denpasar 2020-2024
Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

2. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pencapaian skor pola pangan harapan Kota Denpasar dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Angka tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 94,5%. Angka ini merupakan angka yang sudah berada di segitiga emas capaian skor PPH. Hal ini menunjukkan pola konsumsi masyarakat Kota Denpasar yang sudah tinggi. Akan tetapi nilai ini mulai mengalami penurunan pada tahun 2020-2022 dengan capaian pada tahun terakhir hanya mencapai 83,1%. Pada tahun 2024, angka ini kembali mengalami peningkatan dan mencapai 90,9%. Meskipun demikian, angka ini masih berada di bawah target PPH konsumsi nasional yang tercantum pada Peraturan Presiden RI Nomor 18/2020 tentang RPJMN dengan nilai 95,2%. Hal tersebut disebabkan karena konsumsi masyarakat belum memenuhi standar B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Data tersebut dirincikan pada grafik di bawah ini.

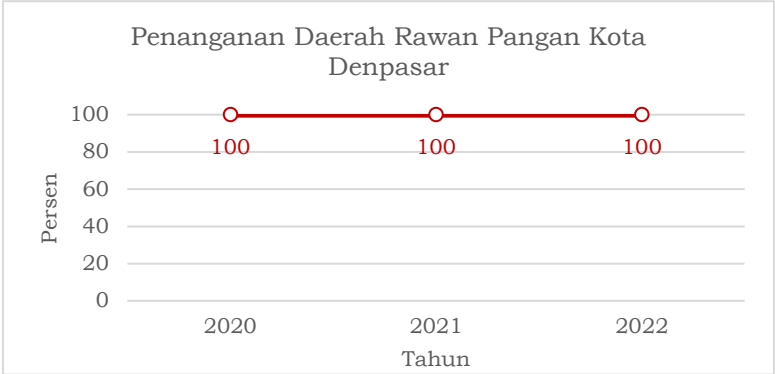


Gambar 2. 25
Grafik Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Denpasar 2020-2024
Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Badan Pangan Nasional, 2025

3. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan, tidak ada akses secara fisik bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang

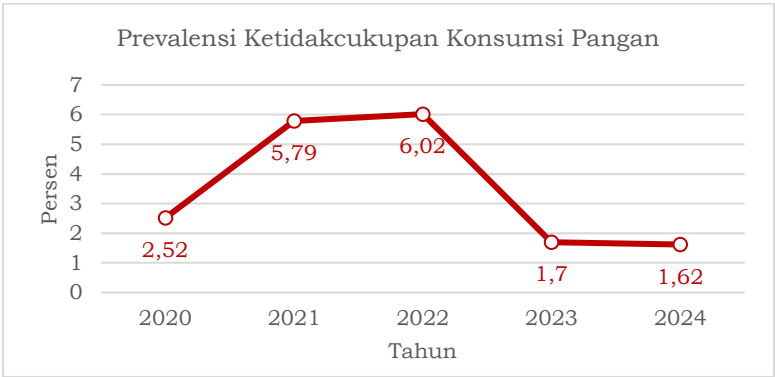
produktif individu/rumah tangga, serta tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan, serta keterjangkauan harga. Persentase penanganan daerah rawan pangan mulai konstan dari tahun 2020 hingga 2022 yaitu sudah mencapai angka 100%. Penjelasan ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 26
Grafik Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Denpasar Tahun 2020-2022
Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2023

4. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan mengukur persentase penduduk yang asupan energinya di bawah kebutuhan minimum. Hal ini mencerminkan tingkat kerentanan pangan dan gizi di suatu daerah. Penguatan ketahanan pangan menjadi penting untuk menurunkan prevalensi ini melalui peningkatan akses, distribusi, dan produksi pangan yang berkelanjutan.



Gambar 2. 27
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Denpasar 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan grafik diatas, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kota Denpasar menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2024. Setelah mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 hingga mencapai puncak sebesar 6,02% pada 2022, prevalensi ini menurun tajam menjadi 1,62% pada 2024. Penurunan tersebut mencerminkan perlunya perbaikan akses pangan dan efektivitas intervensi ketahanan pangan daerah.

5. Indeks Ketahanan Energi

Indeks Ketahanan Energi merupakan pengukuran terkait kesediaan, kemudahan, hingga penerimaan masyarakat terhadap penggunaan energi ramah lingkungan. Sebagai upaya dalam menjamin ketahanan ini, perlu

dipastikan bahwa kabupaten/kota dapat menyediakan energi dari berbagai sumber alternatif. Sumber alternatif penyedia energi dapat berupa tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin, panas bumi, bio massa minyak, hingga berbagai macam kayu dan tumbuhan.

Berdasarkan Hasil Analisis P3E Bali dan Nusa pada tahun 2015 yang menganalisis terkait distribusi luas dan peran jasa ekosistem penyediaan energi, Kota Denpasar menyokong energi Provinsi Bali sebesar 2,19% dengan rincian luasan dan persentase peran jasa ekosistem penyediannya adalah, peran sangat rendah 318, 82 Ha (0,06%), peran rendah 9,697,84 Ha (1,75%), peran sedang 495,51 Ha (0.09%), peran tinggi 236,34 Ha (0,04%), dan peran sangat tinggi 1.369,28 Ha (0,25%).

6. **Konsumsi Energi Listrik**

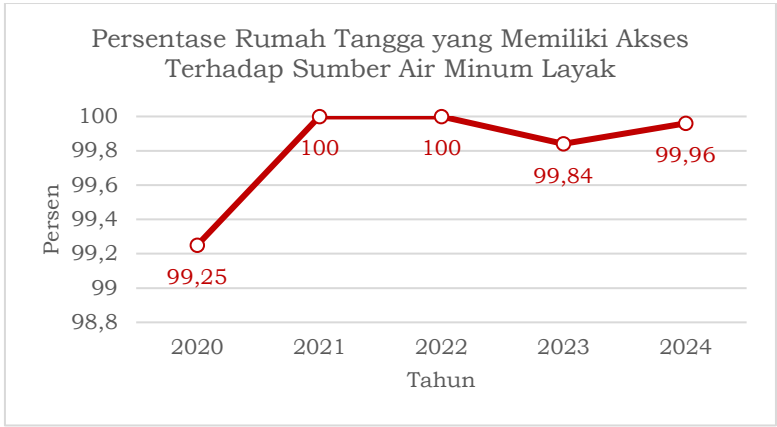
Energi listrik sangat dibutuhkan dalam mendukung kebutuhan primer hingga tersier masyarakat Kota Denpasar. Selain itu dalam menunjang kebutuhan aktivitas masyarakat secara umum, listrik juga merupakan salah satu penunjang sektor perekonomian andalan Kota Denpasar yakni kepariwisataan adapun berdasarkan Badan Pusat Statistik Bali 2024, daya terpasang, produksi, distribusi listrik Kota Denpasar disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 24					
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik di Kota Denpasar					
Kelistrikan	2020	2021	2022	2023	2024
Daya Terpasang (MW)	1.033	1.066	1.108	1.174	1.271
Produksi Listrik (MWh)	1.532.048	1.440.852	1.558.243	1.741.088	2.013.606
Listrik terjual (MWh)	1.469.841	1.384.627	1.497.213	1.668.200	1.925.414
Dipakai Sendiri (MWh)	2.321	3.504	5.245	6.369	7.421
Susut/Hilang (MWh)	41.760	52.720	55.785	66.519	80.772

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2025

7. **Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum**

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum mengukur persentase rumah tangga yang memperoleh air minum dari sumber yang layak dan aman. Akses ini mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan air. Indikator ini mencerminkan pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini digambarkan dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak.



Gambar 2. 28
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kota Denpasar
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

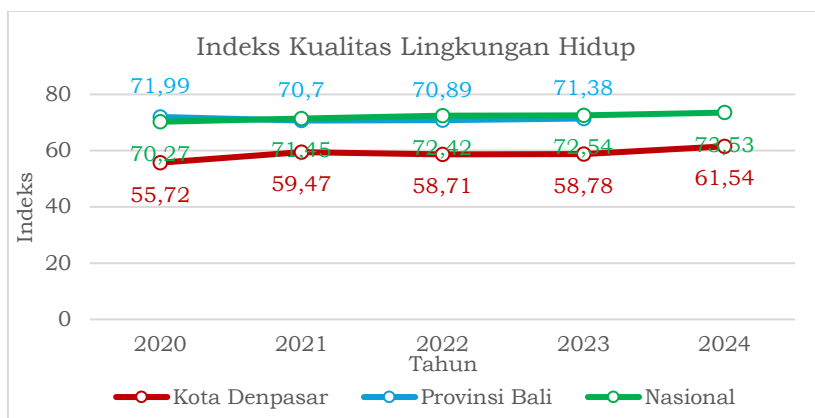
Berdasarkan data diatas, akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum di Kota Denpasar menunjukkan tren yang sangat tinggi dan stabil selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, capaian akses tercatat sebesar 99,25%, kemudian kembali mencapai 100% di tahun 2021 dan 2022. Meski terjadi sedikit fluktuasi di tahun 2023 (99,84%) dan 2024 (99,96%), capaian ini tetap berada dalam kisaran yang tidak jauh. Namun, hal ini tetap perlu menjadi perhatian agar seluruh rumah tangga dapat memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan dalam kualitas lingkungan, membandingkan performa lingkungan antar wilayah, mengukur dampak kebijakan lingkungan, dan memberikan panduan untuk upaya perbaikan lingkungan. Penilaian IKLH yang baik dapat membantu pemerintah, K/L terkait, dan masyarakat untuk mengambil tindakan yang lebih berkelanjutan dan melindungi lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

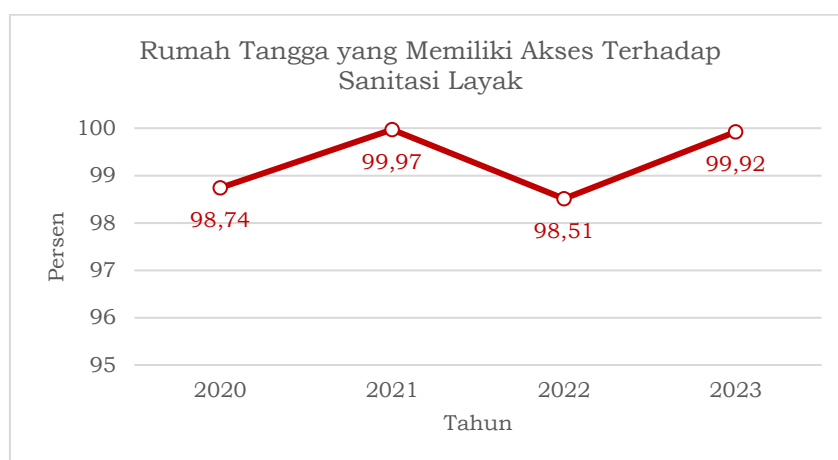
Tren IKLH Kota Denpasar cenderung meningkat, di mana IKLH memiliki nilai 55,72 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 61,54 pada tahun 2024. Berdasarkan hasil tersebut, kualitas lingkungan hidup di Denpasar berada pada predikat Kurang Baik ($50 < \text{IKLH} \leq 60$). Jika dibandingkan dengan IKLH nasional, capaian Denpasar juga masih berada di bawah level nasional yang berada pada predikat Cukup Baik dan Baik dalam 5 tahun terakhir. IKA, IKU, dan IKTL Denpasar perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup.



Gambar 2. 29
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2025

2. Rumah Tangga dan Akses Sanitasi Layak

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman merupakan indikator yang mengukur persentase keluarga yang memiliki fasilitas sanitasi layak dan terkelola dengan aman. Indikator ini mencerminkan upaya pemenuhan hak atas lingkungan sehat serta pencegahan penyakit berbasis air dan sanitasi.

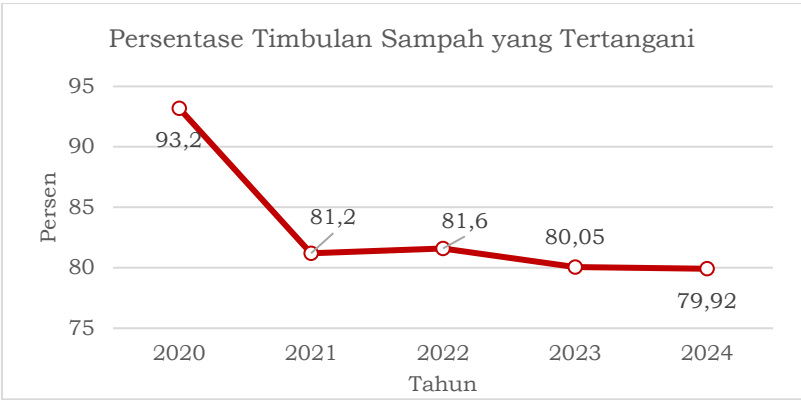


Gambar 2. 30
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kota Denpasar
 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Berdasarkan grafik diatas, capaian akses sanitasi aman di Kota Denpasar tergolong sangat tinggi sepanjang 2020–2023, dengan nilai berkisar antara 98,51% hingga 99,97%. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi antar tahun, secara umum akses sanitasi telah merata dan menunjukkan keberhasilan layanan dasar di sektor lingkungan sehat.

3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Persentase timbulan sampah yang tertangani dinyatakan sebagai perbandingan antara jumlah sampah yang berhasil dikelola (seperti didaur ulang, dibuang ke tempat pembuangan akhir yang sesuai, atau diolah dengan metode yang ramah lingkungan) dengan total jumlah sampah yang dihasilkan. Persentase ini mencerminkan efisiensi sistem pengelolaan sampah dalam mengumpulkan, mengangkut, dan memproses sampah sehingga tidak menciptakan masalah lingkungan.



Gambar 2. 31
Persentase Timbunan Sampah yang Tertangani di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2025

Persentase timbunan sampah yang tertangani di Kota Denpasar pada tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari 93,2 persen menjadi 79,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase timbunan sampah yang tertangani perlu menjadi perhatian khusus terutama dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan, serta mempromosikan praktik daur ulang dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Penurunan Intesintas Emisi GRK

Penurunan intensitas emisi GRK mengindikasikan efisiensi pertumbuhan ekonomi dalam menekan emisi gas rumah kaca. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan rendah karbon yang sejalan dengan komitmen penurunan emisi nasional. Saat ini, indikator tersebut belum dilakukan perhitungan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Oleh karena itu, capaian dan target nasional dalam RPJMN 2025-2029 dapat menjadi acuan bagi Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Berdasarkan indikator sasaran pada RPJMN 2025-2029, Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara nasional ditargetkan sebagaimana pada tabel berikut.

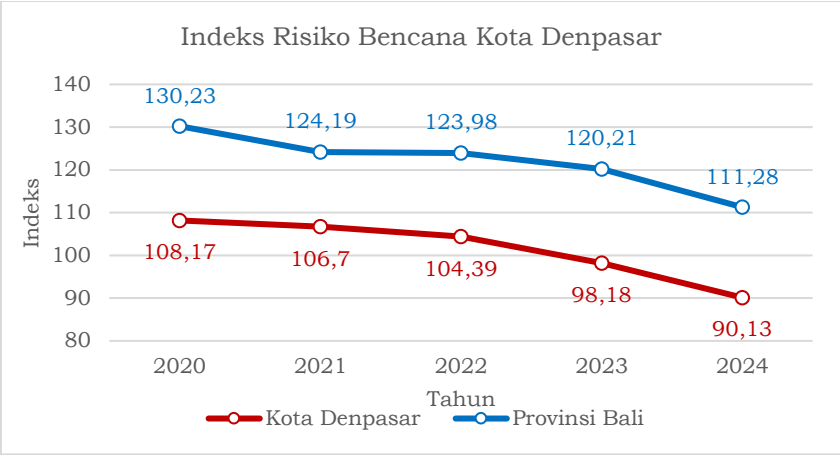
Tabel 2. 25
Target Penurunan Intensitas Emisi GRK Indonesia 2025 dan 2029

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	34,09	35,53	45,17

Sumber: RPJMN 2025-2029

2. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kota Denpasar memiliki tren yang menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana di Kota Denpasar sangat baik. Pada tahun 2024, angka IRB berada di bawah kategori tinggi (90,13) dan di bawah Provinsi Bali dengan angka 111,28. Kota Denpasar merupakan awasan rawan bencana banjir, tsunami, gelombang ekstrem dan abrasi pantai, intrusi air laut, kebakaran, gempa bumi, serta cuaca ekstrem.



Gambar 2. 32
Grafik Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024
Sumber: InaRISK BNPB (diolah), 2025

Potensi bencana banjir menjadi tantangan yang krusial dalam pembangunan Kota Denpasar kedepan. Banjir yang terjadi disebabkan oleh kondisi drainase yang kurang terpelihara dan sedikitnya resapan air hujan yang mengakibatkan genangan yang akan timbul. Selain itu kondisi sungai dan drainase yang terhambat oleh timbunan sampah juga menyebabkan air dari aliran tersebut meluap. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041, wilayah rawan bencana di Kota Denpasar antara lain meliputi:

Tabel 2. 26
Wilayah Rawan Bencana Kota Denpasar

No.	Potensi Bencana	Lokasi
1	Banjir	<p>Banjir di Kota Denpasar utamanya disebabkan oleh sedikitnya daerah resapan air hujan, belum optimalnya pengelolaan DAS, dan kurang terpeliharanya drainase. Sebaran lokasi kawasan rawan banjir di Kota Denpasar, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sistem jaringan drainase I meliputi Jalan Teuku Umar, Jalan Ratna, Jalan Suli, Jalan Kamboja, dan Jalan Kaliasem;b. sistem jaringan drainase II meliputi Jalan Siulan;c. sistem jaringan drainase III meliputi Jalan Cargo, Jalan Buluh Indah, Jalan Pidada, Jalan Gunung Agung, Jalan Gunung Batur, Jalan Gunung Payung, Jalan Gunung Rinjani, Jalan Gunung Merapi, Jalan Tangkuban Perahu, Jalan Gunung Atena, Lingkungan Perum Asri, Lingkungan Perum Purnawira, Lingkungan Perumnas, Lingkungan Pura Demak, Lingkungan Uma, Lingkungan Lebak Moding, Lingkungan Padang Asri dan Abian Timbul;d. sistem jaringan drainase IV meliputi Jalan Waturenggong, Jalan Tukad Yeh Penet, Jalan Bedugul, Jalan Dewata, Jalan Tukad Batanghari, Jalan Buton, Jalan Flores, Jalan Serangan, Jalan Tukad Yeh Aya, Jalan Tukad Pakerisan, Jalan

No.	Potensi Bencana	Lokasi
		Sekuta, Jalan Tukad Bilok, Jalan Danau Tempe, dan Jalan Pulau Serangan; dan e. sistem jaringan drainase V meliputi Jalan Griya Anyar dan Pemogan.
2	Gempa bumi	Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kota Denpasar dengan kategori potensi tinggi seluas 3,752,19 hektar yang hampir 74% berada di Kecamatan Denpasar Selatan, kategori potensi sedang seluas 7.994,24 hektar yang sekitar 28% berada di Kecamatan Denpasar Timur, dan kategori rendah seluas 853,12 hektar dengan sekitar 57% berada di Kecamatan Denpasar Utara.
3	Abrasi pantai	Lokasi rawan abrasi pantai meliputi seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar di luar kawasan yang ditanami hutan bakau (Tahura)
4	Intrusi air laut	Lokasi yang rawan terhadap intrusi air laut yaitu seluruh kawasan di sepanjang pesisir pantai menuju arah barat.
5	Tsunami	Potensi rawan bencana tsunami di Kota Denpasar dengan kategori potensi tinggi seluas 3.210,41 hektar yang sekitar 89% berada di Kecamatan Denpasar Selatan, kategori sedang seluas 2,435,92 hektar dengan 78% berada di Kecamatan Denpasar Selatan, dan kategori rendah seluas 1.232,83 hektar yang hampir 54% berada di Kecamatan Denpasar Barat. Lokasi rawan tsunami meliputi 13 desa/kelurahan yang berada di kawasan pesisir Kota Denpasar.

Sumber: RTRW Kota Denpasar 2021-2041

3. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Indikator ini menjadi acuan dalam memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana.

Tabel 2. 27
Indeks Ketahanan Daerah Kota Denpasar 2023-2024

Indikator	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	0,64	0,76

Sumber: Bali Satu Data, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, Indeks Ketahanan Daerah Kota Denpasar mengalami peningkatan dari 0,64 pada tahun 2023 menjadi 0,76 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan adaptasi bencana.

2.1.1.7 Demografi

1) Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi,

sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

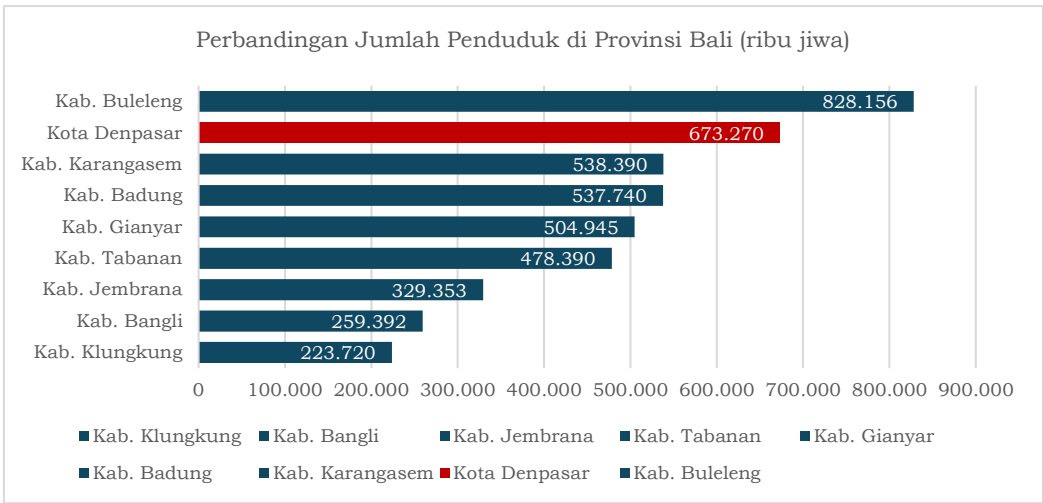
Kota Denpasar pada tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sebesar 673.270 jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Kecamatan Denpasar Barat memiliki jumlah penduduk terbesar diantara kecamatan lainnya yaitu 191.337 jiwa atau berjumlah sebesar 28,42% dari keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan sebaran pada masing-masing kecamatan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 28
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Kecamatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Denpasar Selatan	217.100	217.485	217.500	189.000	187.111
Denpasar Timur	128.276	128.503	128.500	182.400	122.679
Denpasar Barat	206.958	207.325	207.400	120.800	191.337
Denpasar Utara	172.980	173.286	173.300	168.700	172.143
Kota Denpasar	725.314	726.599	726.800	661.000	673.270

Sumber: RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 (data tahun 2019-2020) dan BPS Kota Denpasar (data tahun 2021-2024), 2025

Kota Denpasar memiliki komposisi jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kabupaten Buleleng dan dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bali pada tahun 2024. Kota Denpasar memiliki komposisi 17,04% dari keseluruhan penduduk di Provinsi Bali. Urutan selanjutnya adalah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Tabanan. Perbandingan ini ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

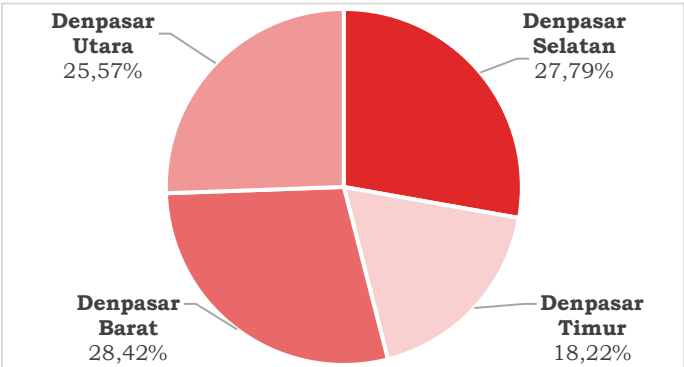


Gambar 2. 33
Jumlah Penduduk di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024
Sumber: BPS, 2025

2) Kepadatan dan Distribusi Penduduk

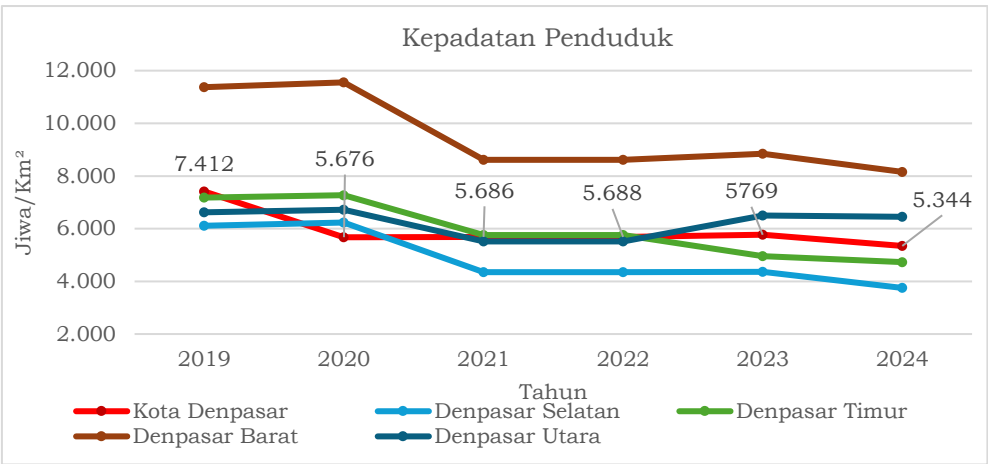
Distribusi penduduk mengacu pada pola konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Distribusi penduduk juga disebut sebagai persebaran penduduk ini dinyatakan dalam proporsi populasi penduduk yang dapat terbagi ke dalam masing-masing kecamatan. Dalam hal Kota Denpasar,

distribusi penduduk terbagi ke dalam empat kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Denpasar Barat dengan populasi sebesar 28,42%.



Gambar 2. 34
Grafik Persebaran Penduduk Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2024
Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka 2025

Persebaran penduduk berkaitan erat dengan kepadatan penduduk atau jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah. Selama tahun 2019-2024, Kota Denpasar memiliki dinamika kepadatan penduduk memiliki kecenderungan menurun. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2024, Kota Denpasar memiliki kepadatan penduduk sebesar 5.344 jiwa/km² yang memiliki selisih cukup jauh dibandingkan dengan kepadatan provinsi Bali pada tahun yang sama, yaitu 793/km².



Gambar 2. 35
Grafik Dinamika Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2019-2024
Sumber: Hasil Olahan Berdasarkan Data Kota Denpasar dalam Angka, 2025

Secara umum, Kecamatan Denpasar Barat memiliki kepadatan tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya dan hampir selalu memiliki kepadatan penduduk lebih dari 8.000 jiwa/km², bahkan selalu lebih tinggi dari 10.000 jiwa/km² pada tahun 2020. Secara lebih detail, data kepadatan penduduk selama lima tahun terakhir dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 29
Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024

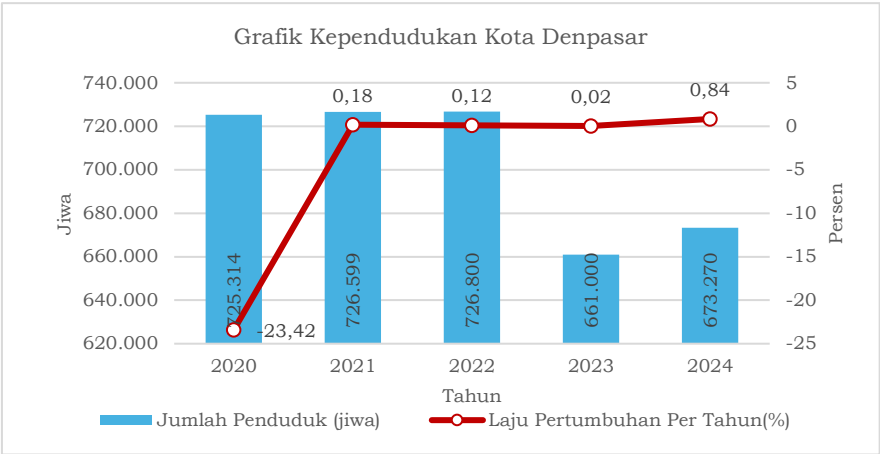
Kecamatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Denpasar Selatan	6.233	4.351	4.351	4.361	3.750
Denpasar Timur	7.271	5.760	5.760	4.957	4.731

Kecamatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Denpasar Barat	11.555	8.617	8.620	8.840	8.156
Denpasar Utara	6.718	5.515	5.516	6.494	6.450
Kota Denpasar	5.676	5.686	5.688	5.769	5.344

Sumber: Hasil Olahan Berdasarkan Data Kota Denpasar dalam Angka, 2025

3) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan jumlah penduduk yang menurun setiap tahunnya, selaras dengan perubahan laju pertumbuhan penduduk yang juga menurun setiap tahun. Kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk yang menurun cukup drastis tercatat pada tahun 2019-2020 dengan laju -23,42 dan jumlah penduduk menjadi 725.314 jiwa pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena data yang digunakan pada 2020 mengacu pada data sensus penduduk tahun 2020 sedangkan pada tahun 2019 mengacu pada data proyeksi penduduk berdasarkan BPS. Sementara itu, laju pertumbuhan menurun drastis pada tahun 2020 dan mencapai angka negatif akibat jumlah penduduk yang berkurang secara signifikan dari perhitungan sensus tersebut. Pada tahun 2021-2022, laju pertumbuhan kembali pada nilai positif atau menandakan adanya penambahan penduduk dibandingkan tahun sebelumnya meskipun laju pertumbuhannya tergolong rendah.



Gambar 2. 36
Grafik Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Per Tahun Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Denpasar dan Kota Denpasar Dalam Angka (diolah), 2025

4) Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Dalam analisis demografi, bagian komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan distribusi antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* menjadi alat ukur penting sebagai ukuran perbandingan kedua jenis kelamin yang menggambarkan dinamika dan identifikasi perbedaan sosial dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perbandingan gender dalam suatu populasi. Daftar jumlah penduduk menurut jenis kelamin dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 2. 30
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2020	366.301	359.013	725.314
2021	366.908	359.691	726.599
2022	366.900	359.900	726.800
2023	378.100	370.300	748.400
2024	381.680	373.880	755.570

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2020-2025

5) Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk atau perincian populasi pada suatu wilayah salah satunya digambarkan berdasarkan karakter usia. Analisis komposisi penduduk menurut kelompok umum ini memiliki fungsi utama sebagai dasar dalam penentuan berbagai perencanaan fasilitas dan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud salah satunya adalah perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan pekerjaan, pengembangan sosial, pengendalian penduduk, proyeksi demografi penduduk, dan sebagai dasar pengambilan kebijakan serta keputusan publik terhadap bidang sosial maupun ekonomi. Dinamika komposisi penduduk menurut kelompok umur Kota Denpasar selama delapan tahun terakhir dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 31
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Denpasar Tahun 2020-2024

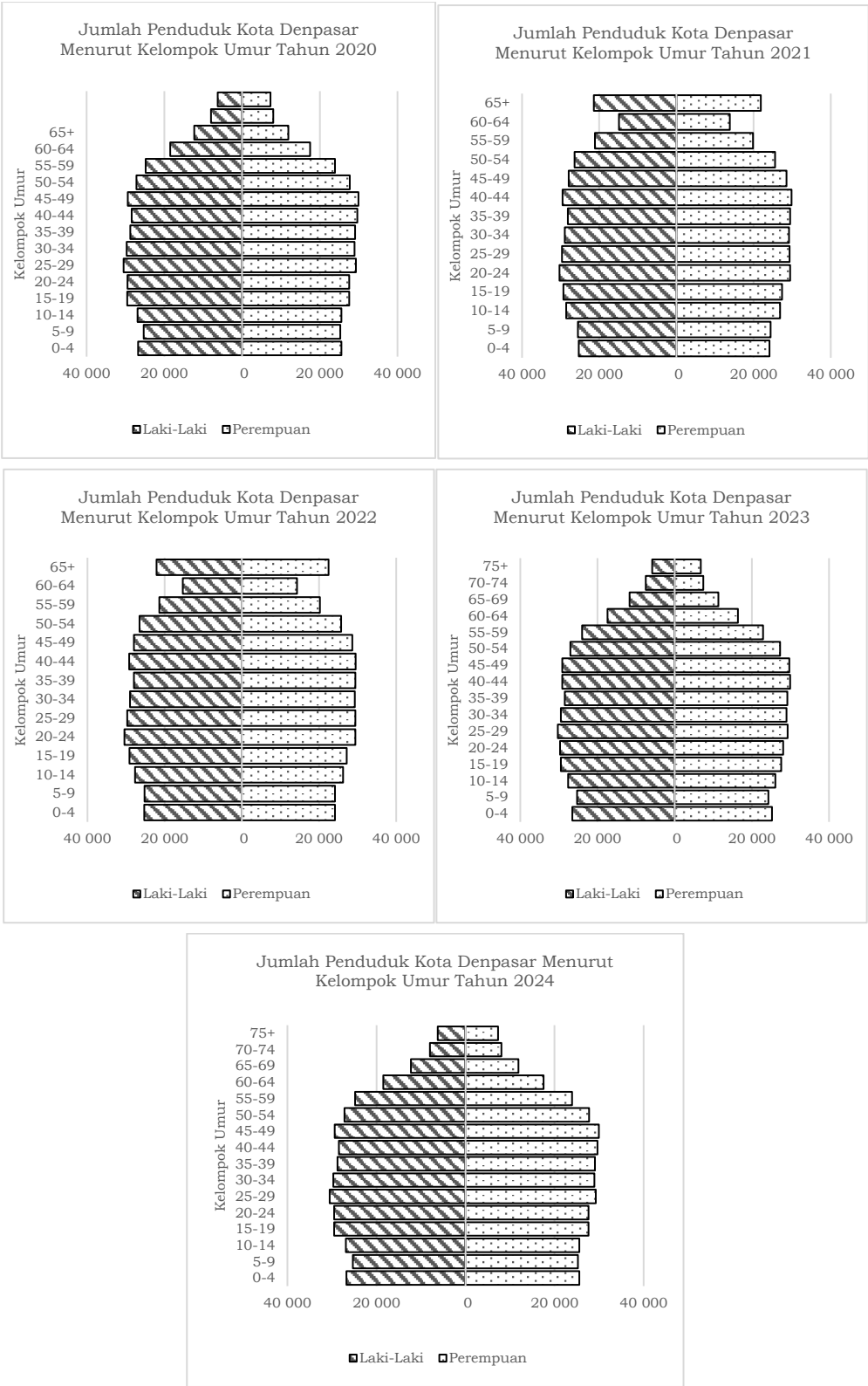
Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	49.461	49.438	49.400	51.700	52.260
5-9	50.801	49.939	49.300	49.600	49.570
10-14	56.696	55.441	53.900	53.700	52.440
15-19	56.909	56.667	56.300	57.100	57.130
20-24	59.501	59.743	59.800	57.800	57.100
25-29	58.703	58.935	59.100	59.700	59.780
30-34	57.989	58.093	58.300	58.500	58.670
35-39	57.887	57.607	57.400	57.700	57.790
40-44	59.285	59.383	58.700	58.700	58.080
45-49	56.182	56.432	56.600	54.300	59.310
50-54	51.506	51.938	52.200	46.800	54.920
55-59	40.082	40.993	41.600	33.800	48.710
60-64	27.904	28.780	29.600	33.800	36.010
65+	41.868	43.260	44.600	55.500	53.800

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2020-2025 (Hasil Proyeksi Penduduk LF SP2020) dan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026

Komposisi penduduk ini dapat menjadi satu bagian dalam memperlihatkan struktur kependudukan Kota Denpasar yang ditampilkan dalam grafik piramida penduduk. Visualisasi piramida penduduk ini memberikan penjelasan yang mudah dipahami dalam gambar yang sederhana dan memiliki pengertian visual yang analitik. Penjabaran ini dapat memberikan berbagai kemudahan, seperti penggabungan informasi, memudahkan perbandingan langsung, pengenalan pola, dan penentuan kesimpulan yang lebih terstruktur.

Jika dilihat dari piramida penduduk yang tergambar selama empat tahun terakhir di Kota Denpasar ini memiliki komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur dengan karakter jumlah penduduk yang cenderung sama. Secara lebih detail, ditemukan bahwa ada kecenderungan piramida

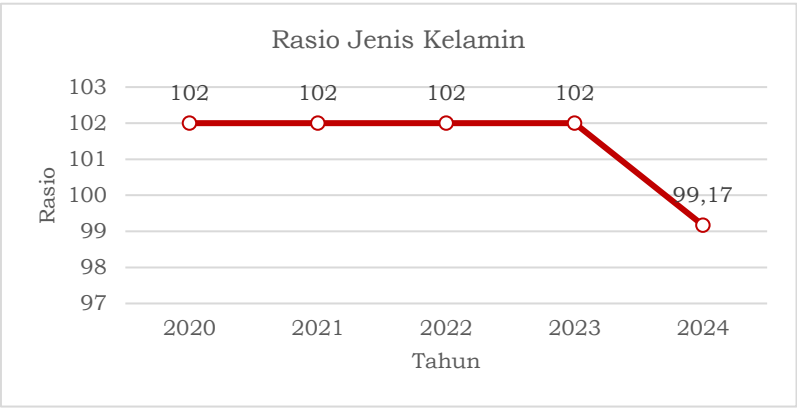
lebih menggembung di tengah atau memiliki arti usia produktif yang lebih banyak dibandingkan usia non produktif (anak-anak dan lansia). Gambaran piramida ini dapat termasuk ke dalam piramida penduduk stasioner yang memiliki ciri-ciri pertumbuhan penduduk yang stabil dan angka ketergantungan yang rendah. Piramida penduduk Kota Denpasar selama empat tahun terakhir ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 37
Piramida Penduduk Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olahan Berdasarkan Data Kota Denpasar dalam Angka 2020-2025 dan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026

Rasio jenis kelamin di Kota Denpasar memiliki tren nilai yang cenderung menurun. Rasio jenis kelamin pada tahun 2020-2023 memiliki nilai rasio yang stabil pada 102. Pada tahun 2022 dengan rasio jenis kelamin 102 memiliki arti bahwa setiap terdapat 100 penduduk perempuan, maka terdapat 102 penduduk laki-laki. Angka rasio penduduk laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan dapat disebabkan oleh adanya arus pekerja pendatang laki-laki pada suatu daerah. Sementara itu, rasio jenis kelamin Kota Denpasar tahun 2024 menurun menjadi 99,17.



Gambar 2. 38
Rasio Jenis Kelamin Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Olahan Berdasarkan Data Kota Denpasar dalam Angka 2020-2025

6) Penduduk Menurut Pendidikan

Data mengenai tingkat pendidikan penduduk Kota Denpasar menunjukkan tren bahwa dominasi penduduk berusia 15 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMA/SLTA atau setara, dengan sekitar 41,02% pada tahun 2023. Pada periode tahun 2020-2023 terlihat bahwa pencapaian pendidikan pada tingkat SMA/SLTA sederajat memiliki proporsi terbesar dibandingkan tingkat lainnya, artinya dalam periode ini penduduk telah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar setidaknya selama 12 tahun. Kelompok kedua terbesar adalah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMP/SLTP sederajat, mencapai sekitar 21,03% pada tahun yang sama.

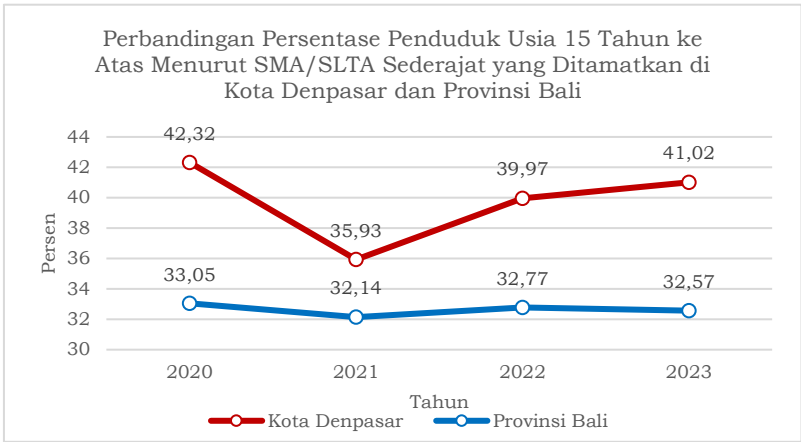
Selain itu, terdapat penurunan yang terjadi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti diploma IV/S1/S2/S3, yang turun menjadi 16,88% mulai tahun 2021 dan diploma I/II/III, yang juga turun dari tahun 2022 menjadi 4,46% di tahun 2023. Di sisi lain, kelompok penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD sederajat mengalami penurunan. Begitu juga dengan mereka yang tidak memiliki pendidikan formal atau tidak tamat sekolah, yang mencapai 2,47% pada tahun 2023. Data ini mencerminkan perubahan positif dalam struktur pendidikan penduduk kota ini, dengan peningkatan jumlah individu yang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Data ini diperjelas dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 32
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Denpasar Tahun 2020-2023

Tingkat Pendidikan	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Diploma IV/ S1/ S2/ S3	%	16,58	18,09	17,72	16,88
Diploma I/ II/ III	%	6,83	5,32	5,36	4,46
SMA/SLTA Sederajat	%	42,32	35,93	39,97	41,02
SMP/SLTP Sederajat	%	17,97	25,32	18,57	21,03
SD Sederajat	%	12,87	11,72	15,81	14,14
Tidak Punya	%	3,42	3,62	2,58	2,47

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2023

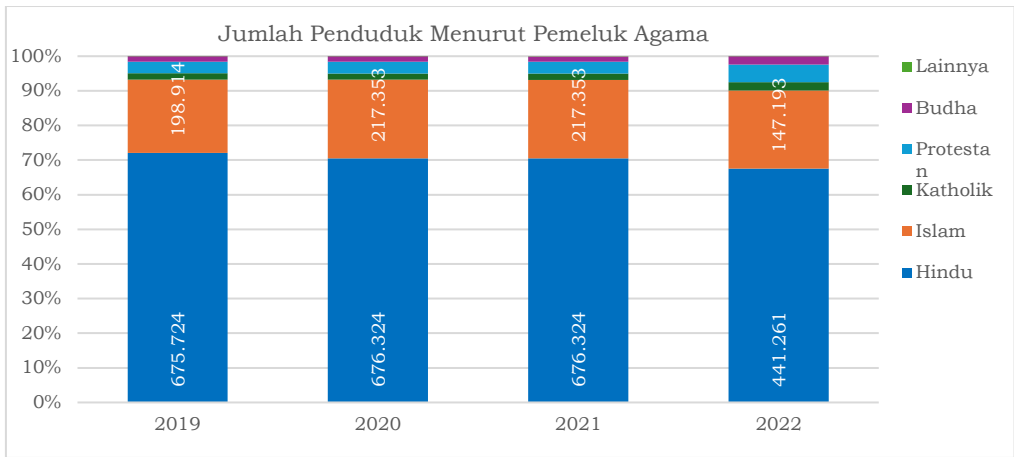
Dibandingkan dengan skala yang lebih luas, atau dalam hal ini adalah Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki persentase penduduk yang tamat SMA/SLTA lebih besar. Pada tahun 2023, Kota Denpasar memiliki persentase mencapai 41,02% sedangkan Provinsi Bali berada di angka 32,57%. Angka ini terpaut jarak setidaknya 8,45% dari populasi. Data yang dimaksud adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 39
Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut SMA/SLTA Sederajat yang Ditamatkan di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2020-2023
 Sumber: BPS Kota Denpasar dan BPS Provinsi Bali, 2023

7) Penduduk Menurut Agama

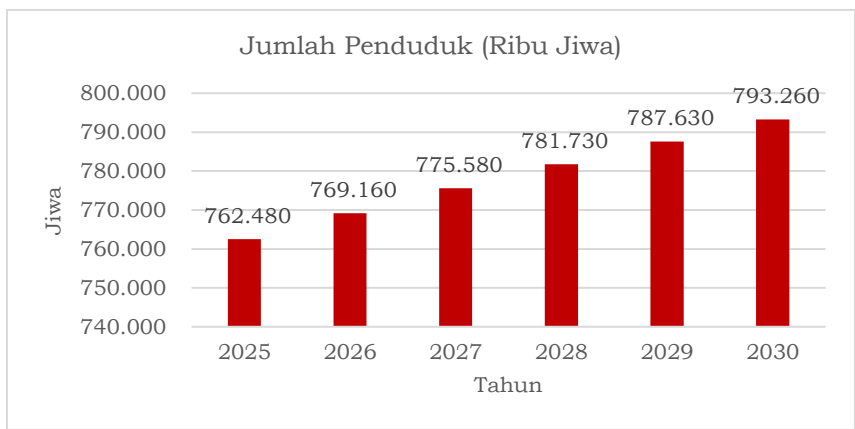
Data mengenai distribusi penduduk Kota Denpasar berdasarkan pemeluk agama menunjukkan bahwa dua agama, yaitu Hindu dan Islam, mendominasi selama periode 2019 hingga 2022. Pada tahun 2022, tercatat 676.324 penduduk memeluk agama Hindu, sementara jumlah penganut Islam mencapai 217.353 jiwa. Kedua agama ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat Kota Denpasar, mencerminkan keberagaman agama yang ada di kota ini. Selain Hindu dan Islam, terdapat penganut agama lainnya seperti Katolik, Protestan, Budha, dan lain-lain. Data ini mencerminkan keanekaragaman agama yang ada di Kota Denpasar, yang menjadi salah satu ciri khas budaya dan sosial dari kota ini.



Gambar 2. 40
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Kota Denpasar Tahun 2019-2022
Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka, 2025

8) Proyeksi Penduduk
A) Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk digunakan untuk melihat tren pertumbuhan penduduk berdasarkan komponen laju pertumbuhan penduduk. Informasi proyeksi ini sebagai perkiraan sebagai perubahan jumlah penduduk dalam menentukan alokasi sumber daya. Proyeksi jumlah penduduk yang digunakan untuk menganalisis jumlah penduduk Kota Denpasar dihitung berdasarkan data dalam buku proyeksi penduduk Provinsi Bali pada tahun 2020–2035. Pada tahun 2023, tercatat bahwa jumlah penduduk di Kota Denpasar sebanyak 748.400 jiwa. Berdasarkan Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020 – 2035, jumlah penduduk Kota Denpasar mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah penduduk pada tahun 2030 mencapai 793.260 jiwa.



Gambar 2. 41
Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Tahun 2025 – 2030
Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Bali 2020–2035 dan Hasil Analisis, 2024

B) Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Hasil proyeksi jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Denpasar menunjukkan pertumbuhan yang berbeda. Pada tahun 2023, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kota Denpasar sejumlah 378.070 jiwa, sementara jumlah penduduk perempuan sebanyak 370.330 jiwa. Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk laki-laki di Kota Denpasar

meningkat menjadi 400.290 jiwa pada tahun 2030, sementara jumlah penduduk perempuan pada tahun 2030 berdasarkan proyeksi adalah 392.260 jiwa.

Tabel 2. 33
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Denpasar Tahun 2025-2030

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	378.070	385.150	388.470	391.650	394.680	397.560	400.290
Perempuan	370.330	377.340	380.690	383.930	387.050	390.070	392.970
Total	748.400	762.490	769.160	775.580	781.730	787.630	793.260

Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020–2035 dan Hasil Analisis, 2024

C) Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Usia

Proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2025 – 2029 menurut kelompok usia dilakukan berdasarkan tren jumlah penduduk yang tersaji dalam Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020 – 2035 dengan penyesuaian. Secara umum, proyeksi penduduk menurut kelompok usia di Kota Denpasar menunjukkan besaran yang fluktuatif, dengan kecenderungan menurun pada usia 0 – 4 tahun dan 9 – 49 tahun. Sementara itu, pada kelompok usia 5 – 9 tahun dan 50 – 75+ tahun menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, jumlah penduduk Kota Denpasar tahun 2023 sebanyak 748.400 jiwa diproyeksikan akan bertambah menjadi 793.260 jiwa pada tahun 2030.

Tabel 2. 34
Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kota Denpasar Tahun 2025-2030

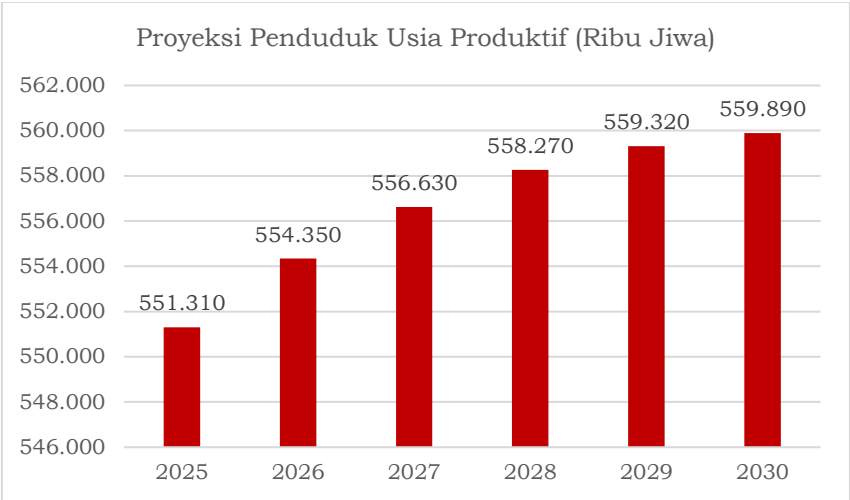
Kelompok Usia	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	51.690	52.730	52.400	52.070	51.730	51.400	51.060
5-9	49.590	49.650	50.470	51.220	51.870	52.450	52.920
9-14	53.660	51.450	50.760	50.360	50.190	50.180	50.260
15-19	57.090	56.840	56.110	55.030	53.770	52.550	51.560
20-24	57.760	56.630	56.480	56.600	56.820	56.860	56.580
25-29	59.670	59.650	59.240	58.600	57.860	57.210	56.750
30-34	58.460	58.940	59.260	59.590	59.840	59.940	59.800
35-39	57.660	57.920	58.050	58.190	58.350	58.550	58.820
40-44	58.670	57.640	57.410	57.340	57.400	57.530	57.660
45-49	58.720	59.570	59.440	59.010	58.420	57.830	57.410
50-54	54.300	55.610	56.440	57.310	58.130	58.730	58.980
55-59	46.810	50.290	51.500	52.370	53.040	53.660	54.350
60-64	33.800	38.220	40.420	42.590	44.640	46.460	47.980
65-69	23.020	25.560	27.190	29.030	31.010	33.060	35.110
70-74	14.870	17.170	18.130	19.010	19.910	20.940	22.170
75+	12.630	14.640	15.880	17.270	18.760	20.290	21.860
Jumlah	748.400	762.480	769.160	775.570	781.730	787.630	793.260

Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020–2035 dan Hasil Analisis, 2024

1) Proyeksi Penduduk Usia Produktif

Proyeksi penduduk usia produktif Kota Denpasar dihitung berdasarkan data jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun yang tercantum

dalam Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020 – 2035. Penduduk usia produktif di Kota Denpasar diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi 551.310 jiwa pada tahun 2025 hingga 559.890 jiwa pada tahun 2030. Adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif dapat memberikan pengaruh pada kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan di Kota Denpasar.



Gambar 2. 42
Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kota Denpasar Tahun 2025 – 2030
Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020–2035 dan Hasil Analisis, 2024

2) Proyeksi Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan penilaian yang membandingkan rasio jumlah penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan umur 65 tahun ke atas) dengan usia penduduk produktif (15-64 tahun). Angka ketergantungan di Kota Denpasar dalam kurun waktu 2019-2023 memiliki tren yang fluktuatif. Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2023, angka ketergantungan Kota Denpasar mencapai 40,62 yang memiliki arti bahwa di setiap 100 penduduk produktif menanggung 40 hingga 41 penduduk tidak produktif. Sementara itu, proyeksi angka ketergantungan Kota Denpasar dihitung berdasarkan acuan jumlah penduduk produktif dan non produktif dalam Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020 – 2035 yang belum mempertimbangkan terjadinya penurunan jumlah penduduk akibat pandemi Covid-19 dan faktor lainnya.

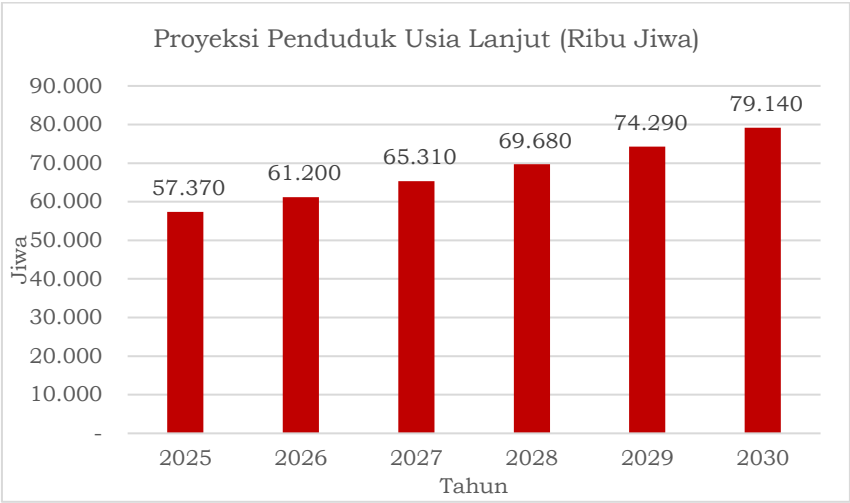
Tabel 2. 35 Proyeksi Angka Ketergantungan Kota Denpasar Tahun 2025-2030						
Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penduduk Non produktif	211.200	214.830	218.960	223.470	228.320	233.380
Penduduk Produktif	551.310	554.350	556.630	558.270	559.320	559.890
Angka Ketergantungan	38,31%	38,75%	39,34%	40,03%	40,82%	41,68%

Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020–2035 dan Hasil Analisis, 2024

3) Proyeksi Penduduk Usia Lanjut

Proyeksi penduduk usia lanjut di Kota Denpasar dihitung berdasarkan data jumlah penduduk usia 65 – 75+ tahun yang tercantum dalam Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020 – 2035. Penduduk

usia lanjut di Kota Denpasar diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 57.370 jiwa pada tahun 2025 hingga 79.140 jiwa pada tahun 2030.



Gambar 2. 43
Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kota Denpasar Tahun 2025 – 2030
Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Bali 2020–2035 dan Hasil Analisis, 2024

9) Identifikasi Kelompok Target Penerima Layanan Perkotaan berdasarkan RP2P

Identifikasi kelompok target penerima layanan perkotaan untuk Kota Denpasar dilakukan untuk mewujudkan perkotaan yang mengakomodir kebutuhan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok masyarakat rentan. Kelompok ini antara lain mencakup anak-anak, lansia, perempuan rentan, disabilitas, kelompok miskin, orang dengan gangguan jiwa, dan pengungsi. Berdasarkan RP2P, identifikasi tersebut dijabarkan berdasarkan target penerima layanan per wilayah kecamatan/desa di Kota Denpasar sebagaimana berikut:

Tabel 2. 36
Kelompok Target Penerima Layanan Perkotaan Berdasarkan Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2020-2024

Variabel	Kode Sub Variabel	Sub Variabel	Keterangan Sub Variabel	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Penduduk	A.1.1	Jumlah Penduduk	Desa Pemecutan Kaja	0	28.215	28.554	29.004	29.361
			Desa Dauh Puri Kaja	0	18.672	18.822	19.012	19.122
			Desa Dangin Puri Kauh	0	7.087	7.026	7.048	7.085
			Desa Dangin Puri Kaja	0	13.721	13.778	13.831	13.936
			Desa Dangin Puri Kangin	0	9.334	9.415	9.493	9.599
			Kelurahan Tonja	0	14.965	14.996	15.204	15.330
			Kelurahan Peguyangan	0	14.483	14.624	14.919	15.064
			Kelurahan Ubung	0	9.992	9.791	9.817	9.758
			Desa Ubung Kaja	0	22.590	22.645	22.876	23.181
			Desa Peguyangan Kaja	0	8.841	9.066	9.333	9.651
			Desa Peguyangan Kangin	0	18.433	18.879	19.487	20.056
			Kecamatan Denpasar Utara	0	166.333	167.596	170.024	172.143
Jumlah Penduduk	A.1.1	Jumlah Penduduk	Desa Dangin Puri Kelod	14.167	13.790	13.564	13.563	13.531
			Desa Sumerta Kelod	15.262	12.754	12.766	12.995	13.078
			Kelurahan Kesiman	15.682	13.307	13.437	13.661	13.851
			Desa Kesiman Petilan	10.252	10.710	10.653	10.802	10.940
			Desa Kesiman Kertalangu	21.362	18.775	19.090	19.555	19.977
			Kelurahan Sumerta	8.772	7.807	7.811	7.842	7.874
			Desa Sumerta Kaja	8.962	8.099	8.134	8.183	8.219
			Desa Sumerta Kauh	6.157	7.027	7.004	7.063	7.117
			Kelurahan Dangin Puri	7.798	9.206	9.183	9.169	9.047
			Kelurahan Penatih	10.820	10.254	10.486	10.601	10.807
			Desa Penatih Dangin Puri	9.042	7.637	7.901	8.058	8.238
			Kecamatan Denpasar Timur	128.276	119.366	120.029	121.492	122.679
Jumlah Penduduk	A.1.1	Jumlah Penduduk	Desa Padangsambian Klod	21.048	20.118	20.105	20.338	20.566
			Desa Pemecutan Klod	0	34.325	34.197	34.146	34.146

Variabel	Kode Sub Variabel	Sub Variabel	Keterangan Sub Variabel	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Desa Dauh Puri Kauh	0	13.894	13.592	13.616	13.551
			Desa Dauh Puri Klod	0	11.837	11.881	11.983	12.070
			Kelurahan Dauh Puri	0	9.117	9.045	9.066	9.034
			Desa Dauh Puri Kangin	0	4.330	4.284	4.289	4.301
			Kelurahan Pemecutan	0	20.952	20.928	21.002	21.095
			Desa Tegal Harum	0	12.684	12.743	12.849	12.984
			Desa Tegal Kertha	0	16.839	16.708	16.777	15.114
			Kelurahan Padangsambian	0	28.634	29.098	29.521	30.077
			Desa Padangsambian Kaja	0	16.985	17.229	17.564	17.802
			Kecamatan Denpasar Barat	21.048	189.715	189.810	191.151	190.740
Jumlah Penduduk	A.1.1	Jumlah Penduduk	Desa Pemogan	50.695	30.491	30.858	31.394	32.178
			Kelurahan Pedungan	28.826	24.682	24.885	25.368	25.784
			Kelurahan Sesetan	43.380	39.452	39.523	39.988	40.515
			Kelurahan Serangan	3.976	4.053	4.030	4.080	4.109
			Desa Sidakarya	18.775	17.089	17.457	17.937	18.222
			Kelurahan Panjer	27.059	23.301	23.507	23.969	24.409
			Kelurahan Renon	14.372	11.531	11.764	12.032	12.291
			Desa Sanur Kauh	12.305	11.290	11.428	11.712	11.946
			Kelurahan Sanur	8.992	9.542	9.567	9.660	9.742
			Desa Sanur Kaja	8.720	7.691	7.694	7.829	7.915
Kecamatan Denpasar Selatan			217.100	179.122	180.713	183.969	187.111	
Total			366.424	654.536	658.148	666.636	672.673	

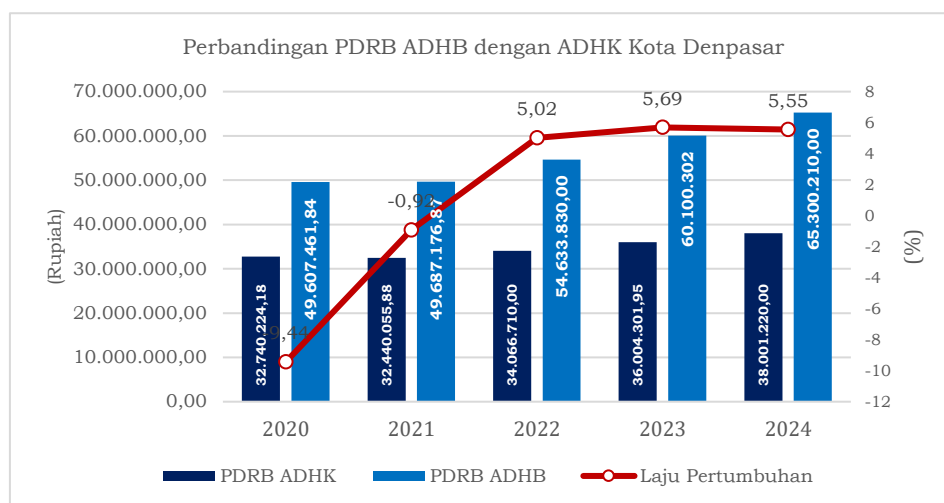
Sumber: RP2P Kota Denpasar Tahun 2025-2029

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. PDRB

Selain menggunakan tinjauan laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB salah satunya dapat dilihat berdasarkan hasil perbandingan nilai PDRB setiap tahunnya. Nilai ini ditinjau berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Tren PDRB Kota Denpasar memiliki kecenderungan yang terus meningkat. Meskipun sempat turun pada tahun 2020, nilai PDRB kembali naik pada 2021 hingga 2024. Nilai PDRB ADHK dan ADHB tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,55 persen.



Gambar 2. 44

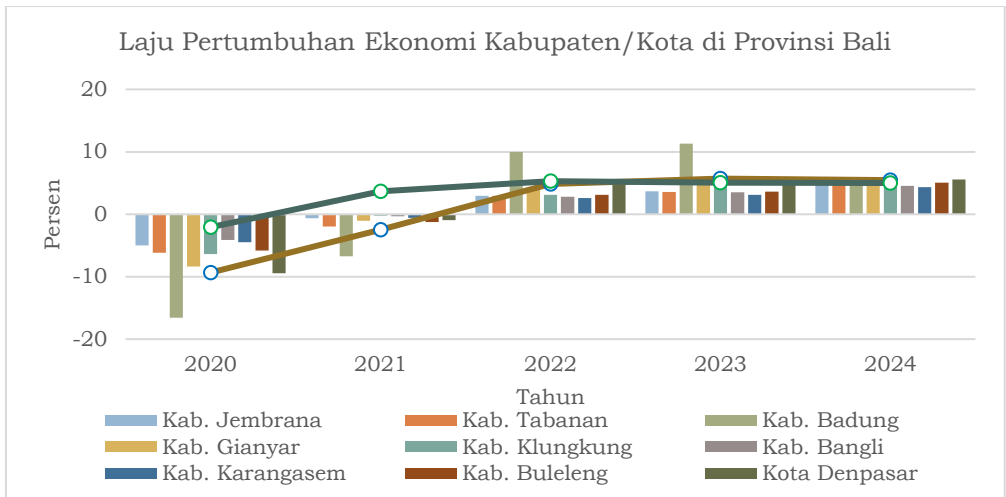
Grafik Perbandingan PDRB ADHB dengan ADHK Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

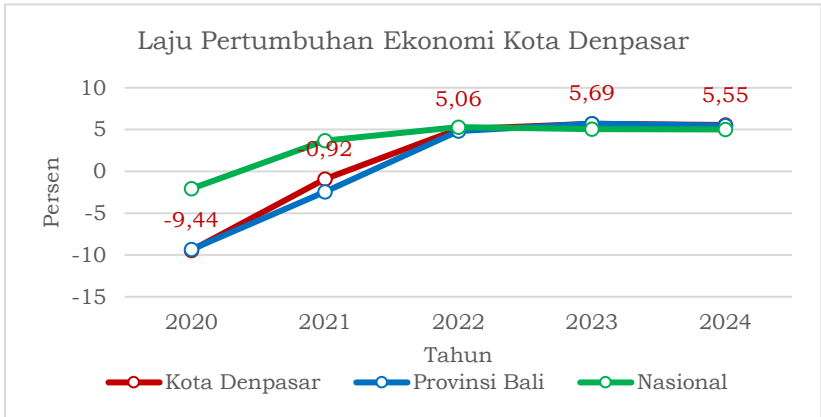
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat ditinjau berdasarkan pertumbuhan nilai PDRB pada setiap tahunnya. Tinjauan ini memiliki peran penting dalam melihat konteks pembangunan ekonomi suatu wilayah seperti kesejahteraan ekonomi, penilaian kinerja ekonomi, berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan pemerintah, dan tinjauan terhadap kemampuan investasi dalam meningkatkan daya saing.

Dalam rentang waktu tahun 2020-2024, Kota Denpasar memiliki pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali. Kota Denpasar memiliki peringkat kedua dengan pertumbuhan tertinggi setelah Kabupaten Badung pada tahun 2024. Akan tetapi, pada tahun 2020, Kota Denpasar memiliki penurunan pertumbuhan ekonomi yang anjlok dan lebih rendah dari angka Provinsi Bali maupun nasional. Hal ini berkaitan dengan Kota Denpasar sebagai kota dengan citra pariwisata yang banyak mengandalkan sumber pengembangan ekonomi dalam sektor pariwisata. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun terkait menyebabkan perlambatan ekonomi yang signifikan dan menurunkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Perbandingan nilai pertumbuhan PDRB yang telah disebutkan digambarkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 45
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024
 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Secara lebih lanjut, Kota Denpasar memiliki dinamika pertumbuhan PDRB dengan jangka waktu yang lebih panjang pada kurun waktu 2020 – 2024. Pada tahun 2024, Kota Denpasar memiliki nilai pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 akibat terjadinya kejadian luar biasa (pandemi Covid-19), menunjukkan adanya kerentanan terhadap ekonomi daerah yang bergantung pada sektor tertentu sehingga terdampak secara signifikan.

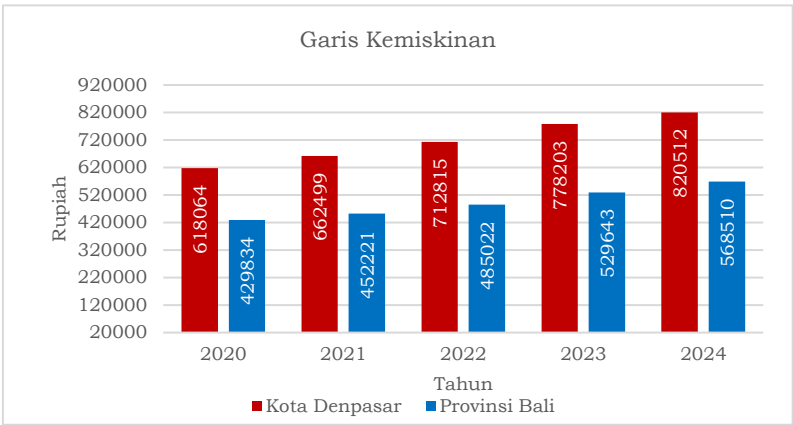


Gambar 2. 46
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: BPS, 2025

3. Persentase Penduduk Miskin

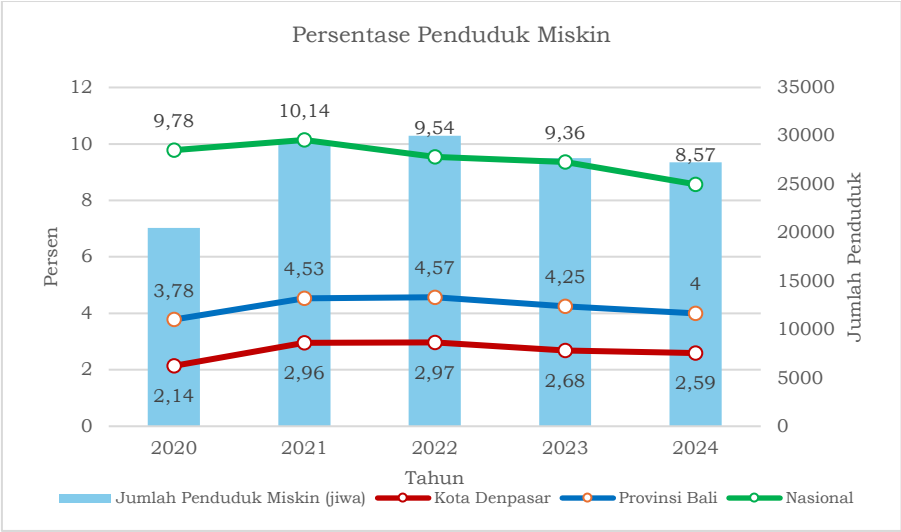
Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) dan sering dikenal sebagai *Head Count Index* (HCI-P0). Perhitungan persentase penduduk miskin melibatkan nilai garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dan jumlah penduduk. Sementara itu, garis kemiskinan merupakan cerminan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, termasuk kebutuhan makanan maupun non-makanan. Secara keseluruhan, Kota Denpasar memiliki tren yang meningkat dengan nilai garis kemiskinan yang lebih tinggi dari Provinsi Bali.

Pada tahun 2024, Kota Denpasar memiliki nilai garis kemiskinan sebesar Rp820.512,00 yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali yaitu Rp568.510,00. Data garis kemiskinan tersebut diperjelas dengan grafik di bawah ini.



Gambar 2. 47
Grafik Garis Kemiskinan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

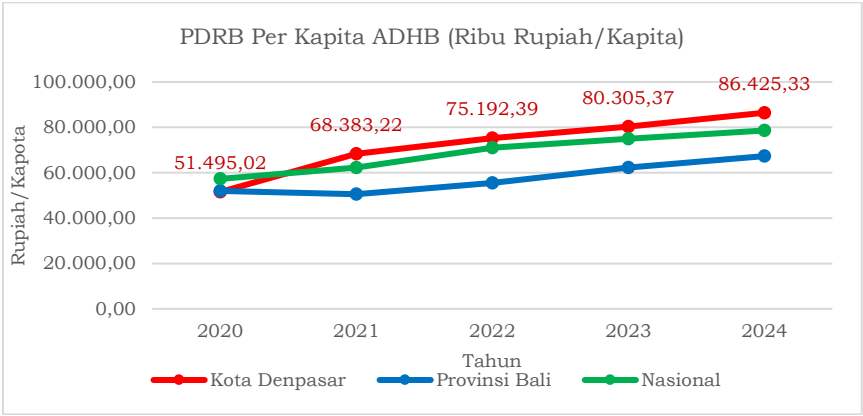
Persentase penduduk miskin merupakan dasar pengukuran tingkat kemiskinan pada suatu wilayah. Persentase ini dapat menentukan ukuran distribusi kemiskinan dalam suatu populasi. Selain itu, dapat juga dapat menjelaskan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. persentase penduduk miskin di Kota Denpasar secara umum berkisar pada rentang 2,1%-2,97% atau jika dibulatkan berkisar antara 2%-3%. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, Kota Denpasar selalu memiliki nilai persentase yang lebih kecil bahkan hanya mencapai setengah dari persentase penduduk miskin di Provinsi Bali. Sementara itu, dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada tingkat nasional, Kota Denpasar memiliki nilai yang jauh lebih rendah. Angka nasional menunjukkan angka pada rentang 8,57% hingga 10,14% atau mencapai lebih dari empat kali lipat nilai Kota Denpasar. Meskipun memiliki nilai yang rendah, selama rentang waktu 2020-2024 angka pada Kota Denpasar bersifat fluktuatif dengan kecenderungan yang terus meningkat.



Gambar 2. 48
Grafik Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, dan BPS Nasional, 2025

4. PDRB per Kapita

PDRB per kapita atau PDRB wilayah dibagi jumlah penduduk wilayah merupakan suatu ukuran analisis ekonomi untuk mengetahui tingkat ekonomi wilayah secara populasi individu. PDRB per kapita Kota Denpasar mengalami fluktuatif dalam kurun tahun 2020 – 2024. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti dampak pada sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19. Meskipun demikian, tren yang meningkat ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Perbandingan menunjukkan bahwa Kota Denpasar memiliki nilai PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional pada tahun 2024.



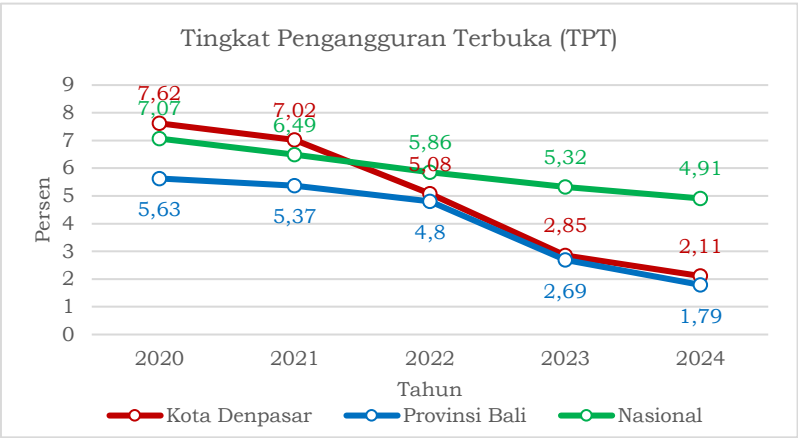
Gambar 2. 49
Grafik PDRB Per Kapita ADHB Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, dan BPS Nasional, 2025

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah istilah yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja. TPT biasanya dihitung sebagai persentase dari angkatan kerja. Data TPT di Kota Denpasar, Bali, dan tingkat nasional selama periode 2020-2024 menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja yang bervariasi. Kota Denpasar

memiliki TPT yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional pada tahun 2020-2021.

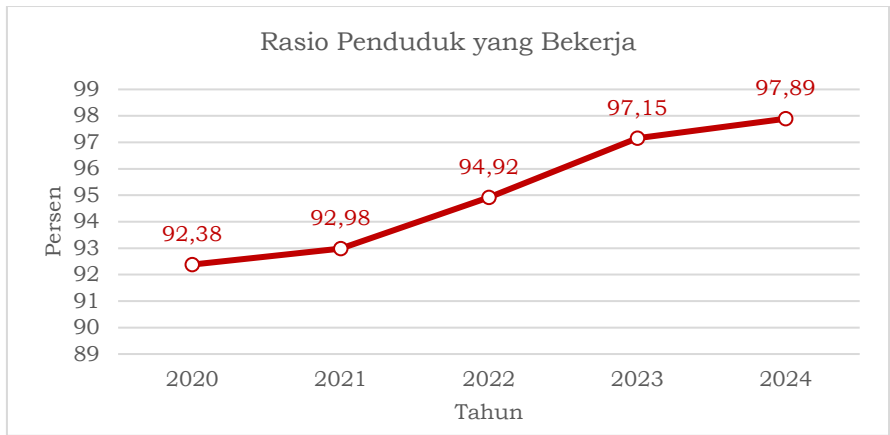
TPT Kota Denpasar mencapai persentase terendah pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 2,11%. Sementara itu, tahun 2020-2021, TPT Pada Kota Denpasar memiliki rentang nilai tertinggi dengan nilai masing-masing mencapai 7,62% dan 7,03% bahkan dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Angka ini berhasil diturunkan pada tahun 2022 hingga 2024. Nilai ini meningkat tajam berkaitan dengan kejadian luar biasa pandemi Covid-19 dengan dampak pada sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penyokong di Kota Denpasar. Pandemi ini menyebabkan penurunan kesempatan pada lapangan usaha sehingga tingkat pengangguran terbuka meningkat. Dalam konteks ini, kondisi pasar tenaga kerja saat ini masih memerlukan perhatian untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Penjelasan TPT ini dirincikan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 2. 50
Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

6. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah indikator yang mengukur persentase penduduk yang aktif bekerja dalam angkatan kerja. Data tahun 2020-2024 memiliki tren meningkat. Pada tahun 2020, rasio ini mencapai 92,38 kemudian meningkat hingga menjadi 97,89% pada tahun 2024. Perubahan yang signifikan dalam rasio penduduk yang bekerja menunjukkan kerentanan pasar tenaga kerja Kota Denpasar terhadap perubahan ekonomi. Pengambilan tindakan yang sesuai perlu diperhatikan untuk mendukung stabilitas pasar tenaga kerja.

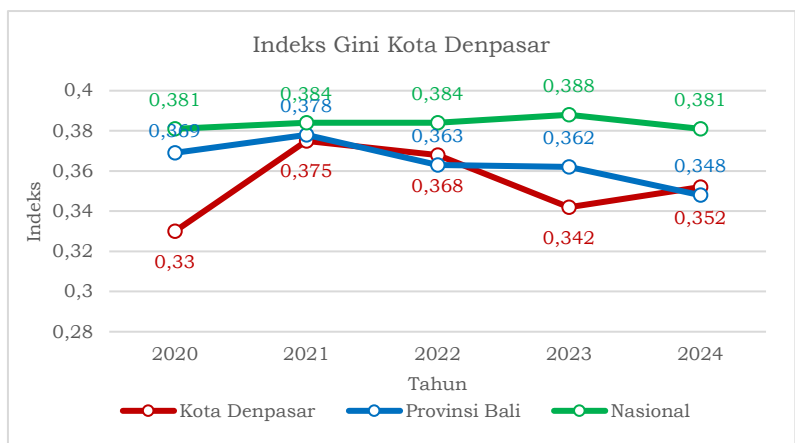


Gambar 2. 51
Grafik Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah), 2025

7. Indeks Gini

Gambaran ukuran ekonomi wilayah sebelumnya telah dijelaskan melalui informasi PDRB yang dilanjutkan dengan penjelasan Indeks Gini yang memberikan gambaran terkait distribusi pendapatan di antara penduduk. Dalam hal ini, Indeks Gini merupakan indikator ekonomi dalam mengukur ketimpangan suatu wilayah berdasarkan pendapatan yang terdistribusi dengan hasil yang berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini memiliki arti ketimpangan di suatu wilayah semakin besar atau pendapatan terdistribusi dengan tidak merata.

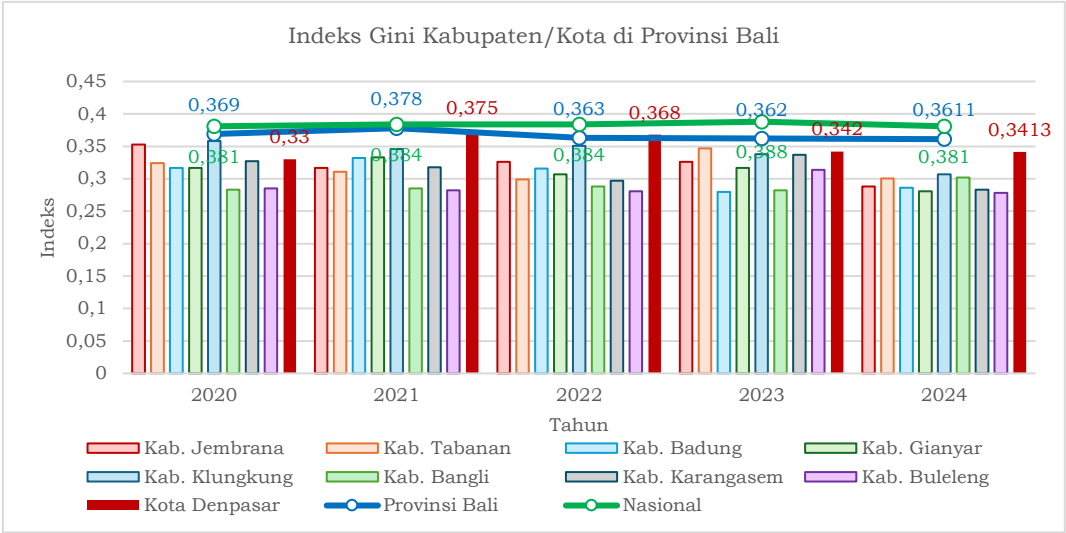
Ditemukan bahwa Kota Denpasar memiliki nilai indeks gini pada rentang sedang hingga rendah dan berada di bawah batas nilai Provinsi Bali maupun Nasional. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Kota Denpasar memiliki ketimpangan terendah pada tahun 2020 dengan nilai 0,33. Sementara itu, nilai Indeks Gini tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 0,375. Pada tahun selanjutnya, indeks gini Kota Denpasar cenderung fluktuatif dengan tren menurun hingga menjadi 0,352 pada tahun 2024.



Gambar 2. 52
Grafik Indeks Gini Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024
 Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, dan BPS Nasional, 2025

Dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bali, Kota Denpasar secara bergantian berada di peringkat teratas bersamaan dengan Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Hal ini menunjukkan nilai ketimpangan di Kota Denpasar termasuk tertinggi dibandingkan dengan

kabupaten lainnya. Terlihat bahwa Indeks Gini Kota Denpasar pada tahun 2024 mencapai nilai 0,3413 yang berada dibawah nilai Provinsi Bali (0,3611) dan dibawah nilai Nasional (0,381). Nilai ketimpangan ini menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena ketimpangan ini dapat memberikan dampak negatif pada stabilitas ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Data Indeks Gini yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.

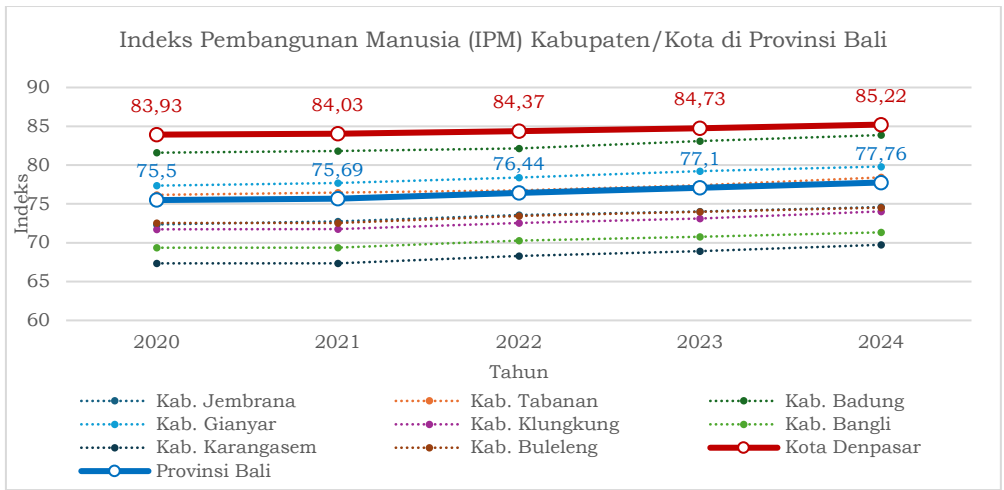


Gambar 2. 53
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024
 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

8. Indeks Pembangunan Manusia

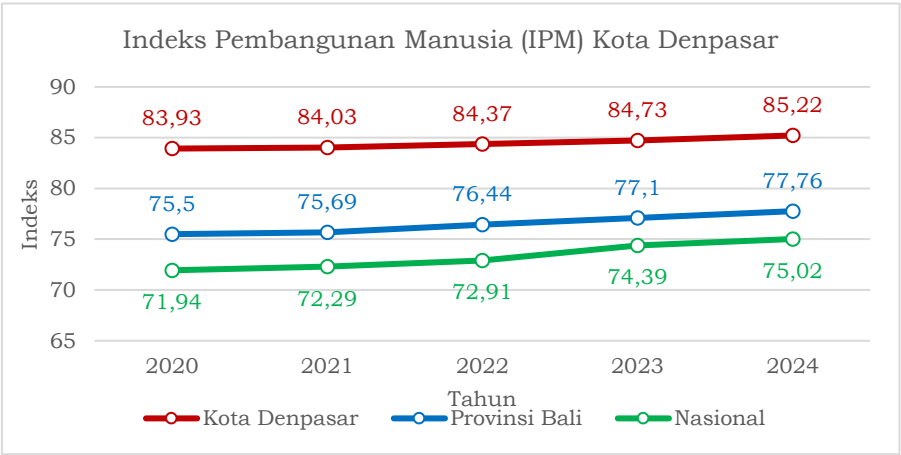
Salah satu ukuran tingkat pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memberikan gambaran melalui dimensi harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi ini saling terkait dan memengaruhi peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, capaian pemerataan pembangunan. Capaian IPM yang tinggi juga menunjukkan nilai kualitas kependudukan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup masyarakat di dalam suatu daerah.

Capaian nilai IPM Kota Denpasar memiliki kecenderungan peningkatan yang stabil. Kota Denpasar memiliki nilai selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian IPM pada tingkat Provinsi Bali. Dalam kurun waktu 2020-2024, Kota Denpasar selalu memimpin dengan nilai terbesar setiap tahunnya dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bali.



Gambar 2. 54
Grafik IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024
 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Secara lebih detail, Kota Denpasar berhasil meningkatkan capaian IPM sebesar 1,54 dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Capaian ini meningkat dari nilai 83,93 menjadi 85,22. Kota Denpasar juga memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan nilai Nasional. Pada tahun 2024, capaian IPM Kota Denpasar mencapai nilai 85,22 yang lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Bali dan Nasional dengan masing-masing nilai adalah 77,76 dan 75,02.



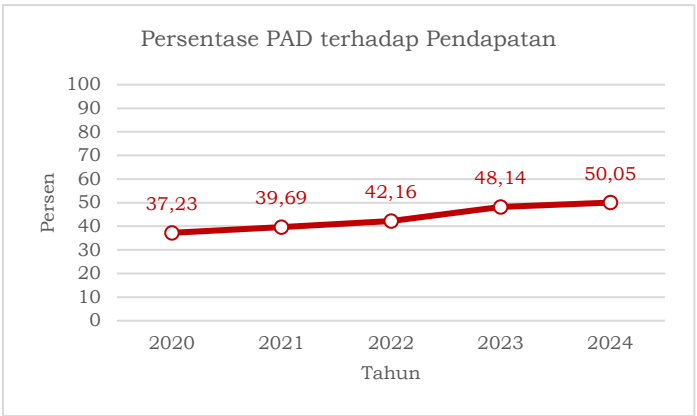
Gambar 2. 55
IPM Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024
 Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, dan BPS Nasional, 2025

9. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam suatu periode tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas beberapa unsur, yang meliputi PAD, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Persentase PAD terhadap pendapatan merepresentasikan nilai ketergantungan daerah terhadap pusat. Semakin besar nilainya, maka ketergantungan daerah semakin kecil.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan indikator penting dalam menilai kemandirian keuangan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan lokalnya. DDF dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Dalam konteks Kota Denpasar, data menunjukkan variasi DDF dari tahun

2020 hingga 2024, dengan persentase berfluktuasi dengan rentang nilai yang tidak jauh dari angka 40%. Nilai DDF tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 50,05%. Hal ini menggambarkan sejauh mana Kota Denpasar bergantung pada PAD, sumber pendapatan yang dihasilkan secara lokal, dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari sumber-sumber lain, seperti dana transfer dari pemerintah pusat. DDF yang tinggi menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang lebih baik, sementara DDF yang rendah dapat menandakan ketergantungan yang lebih besar pada dana dari pemerintah pusat. Data DDF Kota Denpasar pada periode ini menunjukkan nilai yang masih di bawah nilai 50% atau sebagian besar sumber pendapatan masih berasal dari pendapatan di luar sumber lokal. Data yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.

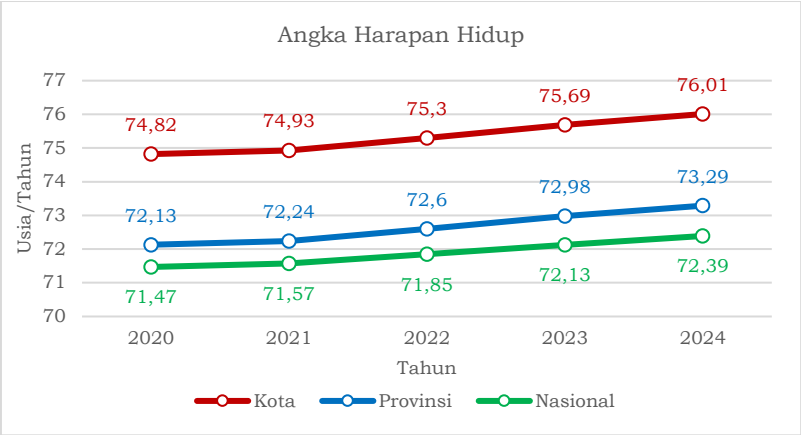


Gambar 2. 56
Grafik Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019-2024

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

1. Angka Harapan Hidup

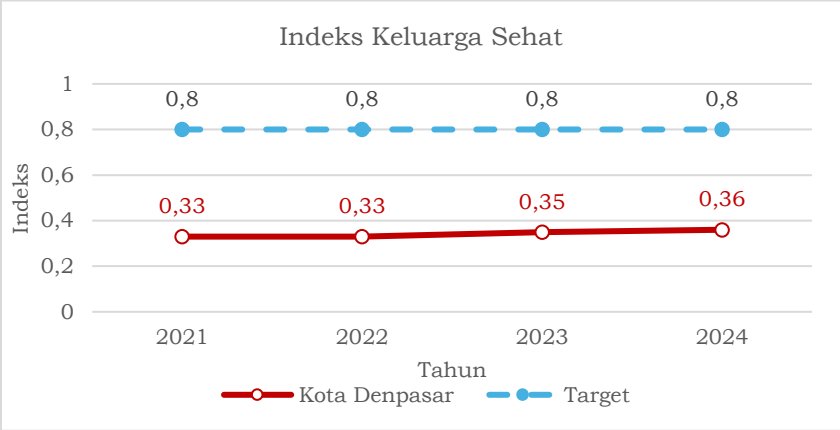
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata usia yang dapat ditempuh oleh penduduk di suatu wilayah. AHH dapat digunakan sebagai indikator evaluasi dalam menilai kesejahteraan berdasarkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi AHH, maka semakin tinggi kualitas kesejahteraan masyarakat. Semakin rendah nilai AHH, maka perlu ada peningkatan kualitas dalam hal pembangunan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup Kota Denpasar dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 cenderung baik dan menunjukkan nilai yang lebih tinggi di atas provinsi dan juga nasional. Pada tahun 2024, Nilai AHH Kota Denpasar menunjukkan nilai 76,01 yang artinya penduduk di Kota ini memiliki harapan hidup hingga 76 tahun.



Gambar 2. 57
Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional pada tahun 2020 – 2024
Sumber: BPS-RI dan BPS Kota Denpasar, 2025

2. Indeks Keluarga Sehat

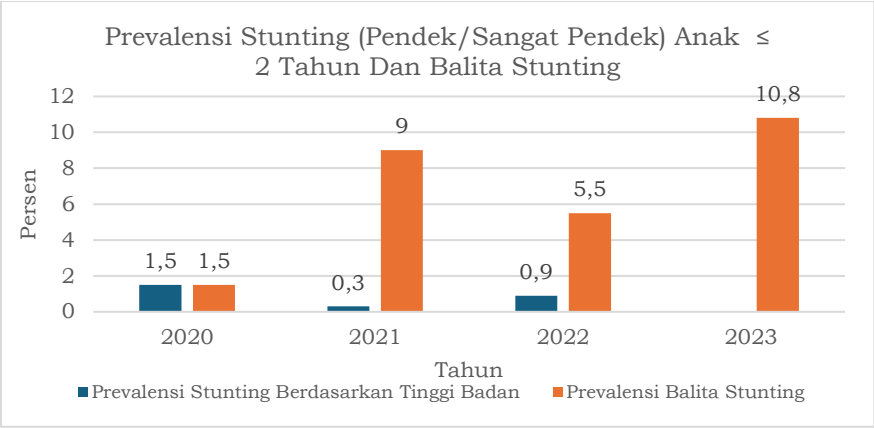
Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator untuk menilai kesehatan masyarakat. Indikator ini terdiri dari 12 indikator yang mencakup terkait fisik, psikis sosial, dan lingkungan. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2024, Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Denpasar memiliki nilai yang meningkat dari tahun 2021 dengan tahun 2024 mencapai nilai tertinggi di antara tahun 2021-2024 yaitu 0,36. Namun, nilai ini masih berada jauh dari target kinerja Dinas Kesehatan yaitu sebesar 0,8.



Gambar 2. 58
Indeks Keluarga Sehat Kota Denpasar Tahun 2021-2024
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2024, 2025

3. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan karena kondisi *irreversible* karena kurangnya nutrisi atau terjadi infeksi berulang/kronis pada 1000 HPK. WHO (2020) menjadikan tinggi badan sebagai salah satu indikator sebagai indikasi stunting dimana panjang/tinggi badan menurut usia kurang dari -2 standar deviasi (SD) kurva pertumbuhan WHO.



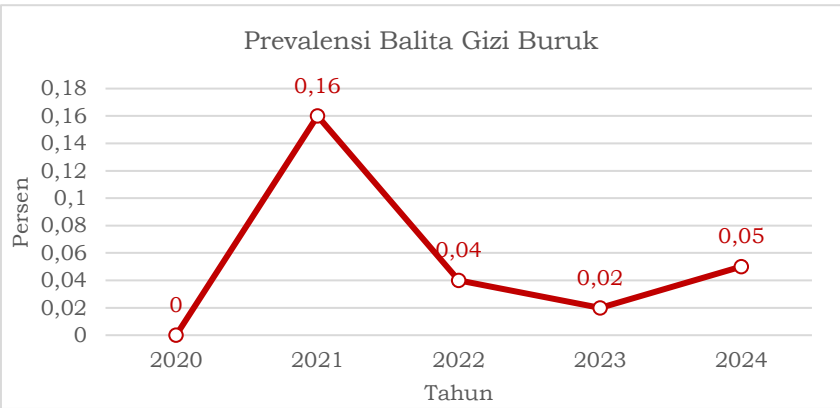
Gambar 2. 59
Grafik Prevalensi Stunting (Pendek/Sangat Pendek) Anak ≤ 2 Tahun dan Balita Stunting Kota Denpasar Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar Kota Denpasar Tahun 2020-2023 (diolah), 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* berdasarkan pendek/sangat pendek anak ≤ 2 tahun di Kota Denpasar terus mengalami penurunan tetapi kembali meningkat pada tahun 2022. Angka ini di bawah di atas target Kota Denpasar yakni maksimal 5%. Sementara itu, dapat dilihat bahwa grafik Prevalensi Balita *Stunting* lebih fluktuatif dan cenderung lebih tinggi dibandingkan penilaian hasil prevalensi anak usia ≤ 2 tahun. Artinya, *stunting* cenderung lebih telat untuk disadari sehingga perlu ada upaya preventif agar kasusnya dapat dikendalikan.

4. Prevalensi Balita Gizi Buruk

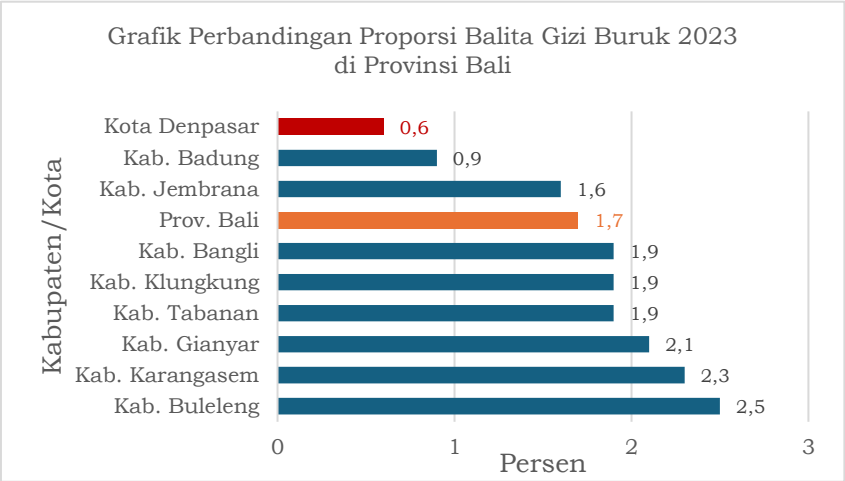
Kementerian Kesehatan mendefinisikan gizi buruk merupakan keadaan di mana balita ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang atau berat dibandingkan tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi dan/atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 6-59 bulan (balita). Berikut merupakan grafik perbandingan prevalensi balita gizi buruk Kota Denpasar. Prevalensi bayi gizi buruk di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,16 persen.



Gambar 2. 60
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar Tahun 2012-2020, 2024

Sementara itu, proporsi balita gizi buruk Kota Denpasar pada tahun 2023 memiliki kondisi yang paling baik apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali. Meskipun tergolong baik, tetap perlu

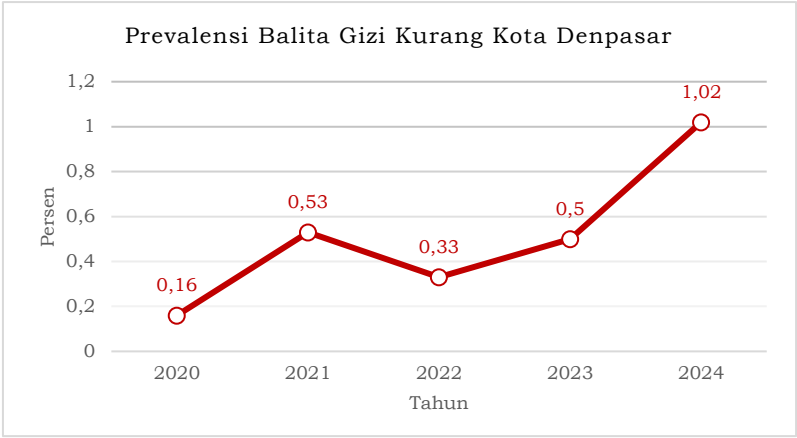
dilakukan upaya preventif agar kasus balita gizi buruk terus ditekan, tidak terjadi peningkatan, dan mencapai angka 0 persen.



Gambar 2. 61
Perbandingan Proporsi Balita Gizi Buruk Kota Denpasar 2023
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali 2023

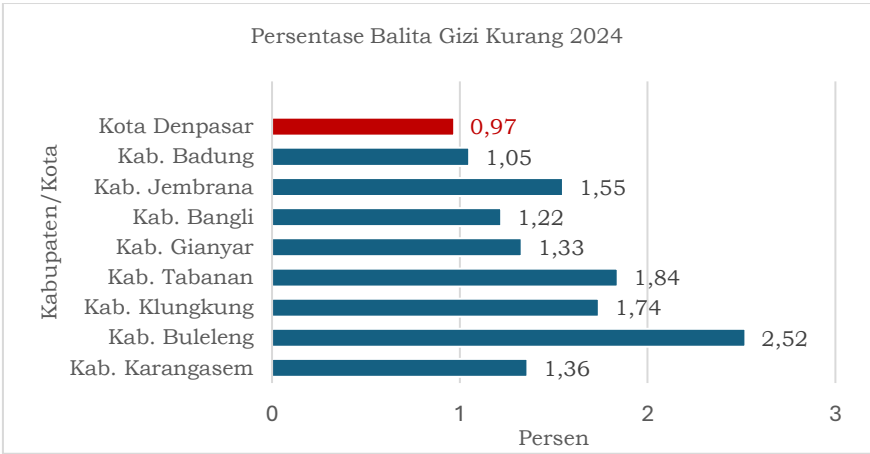
5. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Kementerian Kesehatan memaparkan bahwa balita gizi kurang merupakan kondisi di mana berat badan berdasarkan panjang atau tinggi badan kurang dari -2 sampai -3 standar deviasi, dan/atau lingkaran lengan 11,5–12,5 cm pada anak usia 6–59 bulan (balita) yang ditandai dengan kondisi kurus. Kondisi ini cenderung terjadi karena rendahnya konsumsi energi protein dari makanan sehari-hari dalam jangka waktu yang lama.



Gambar 2. 62
Persentase Balita Gizi Kurang di Provinsi Bali tahun 2020 – 2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

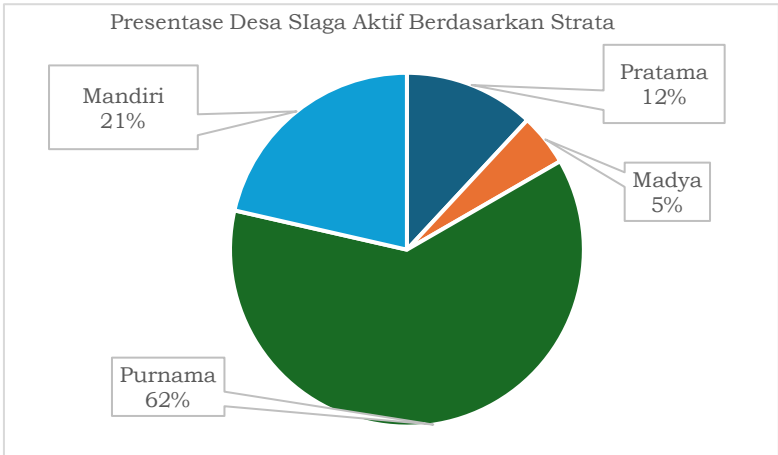
Sementara itu, proporsi balita gizi buruk Kota Denpasar pada tahun 2024 memiliki kondisi yang paling baik apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali. Meskipun tergolong baik, tetap perlu dilakukan upaya preventif agar kasus balita gizi buruk terus ditekan, tidak terjadi peningkatan, dan mencapai angka 0 persen.



Gambar 2. 63
Perbandingan Persentase Balita Gizi Kurang Kota Denpasar 2024
Sumber: Satu Data Indoensia Provinsi Bali, 2025

6. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa/Kelurahan Siaga Aktif merupakan desa/kelurahan yang memiliki sarana prasarana kesehatan memadai sehingga penduduknya dapat mudah mengakses fasilitas kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pusat kesehatan masyarakat pembantu (pustu), dan sarana kesehatan lainnya. Dari 43 desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar, 100% Desa merupakan desa siaga aktif. Berikut merupakan persentase desa siaga aktif berdasarkan strata yang ada di Kota Denpasar.



Gambar 2. 64
Persentase Desa Siaga Aktif Berdasarkan Strata di Kota Denpasar 2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023

7. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah pusat pelayanan kesehatan yang terletak di tingkat desa atau kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya ibu dan anak. Posyandu yang aktif menggambarkan komitmen serta partisipasi aktif dari Posyandu dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Indikator posyandu aktif dilihat dari jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada di wilayah tersebut. Berikut adalah tabel persentase posyandu aktif di Kota Denpasar:

Tabel 2. 37
Persentase Posyandu Aktif di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Posyandu aktif	Kelompok	467	467	459	459	459
Jumlah Posyandu	Kelompok	467	467	459	459	459
Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2025

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, persentase posyandu aktif selalu berhasil mencapai angka 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan Posyandu di Kota Denpasar berlangsung dengan sukses dan tetap aktif. Tingkat keaktifan Posyandu di kota tersebut memberikan dampak positif berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Meski demikian, terjadi penurunan jumlah posyandu dan jumlah posyandu aktif pada tahun 2022 - 2024 menjadi 459 unit.

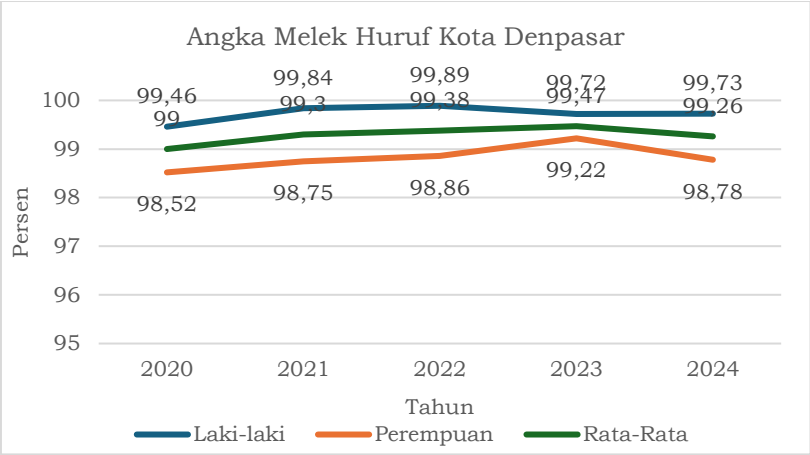
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang merupakan salah komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini merupakan penggabungan antara indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indeks ini diukur dalam bentuk persentase atau skor. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, Indeks Pendidikan Kota Denpasar menyentuh angka 0,776 pada tahun 2023 dan kemudian meningkat menjadi 0,777 pada tahun 2024.

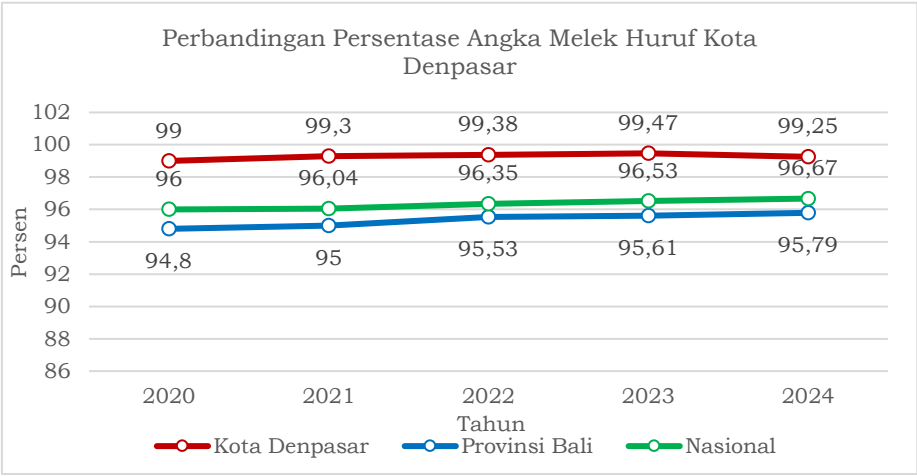
2. Angka Melek Huruf

Badan Pusat Statistik (BPS) mendeskripsikan angka melek huruf adalah jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berusia ≥ 15 tahun yang mampu membaca dan menulis kalimat sederhana seperti huruf latin dan aksara lainnya dibandingkan dengan jumlah total penduduk usia ≥ 15 tahun. Hasil perhitungan penilaian ini merupakan persentase yang menunjukkan efektivitas sistem pendidikan dasar dalam mendorong penduduk mampu mengejar program keaksaraan dan menggunakan kata-kata tertulis di kehidupan masyarakat. Indikator ini dapat menjadi gambaran kondisi penduduk dapat menyerap dan menerima ilmu pengetahuan baru yang disajikan dalam bentuk tulisan. Perkembangan persentase Angka Melek Huruf Kota Denpasar dijelaskan dalam tabel dan grafik di bawah ini.



Gambar 2. 65
Diagram Angka Melek Huruf Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar (diolah), 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa Angka Melek Huruf Kota Denpasar tahun 2020-2024 mengalami pergerakan data fluktuatif yang cenderung naik. Angka rata-rata ini merupakan hasil rata-rata dari nilai AMH menurut jenis kelamin yang berbeda. Jika dilihat dari jenis kelamin, laki-laki cenderung memiliki nilai persentase yang lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di Kota Denpasar memiliki peluang lebih tinggi dalam menerima informasi berbentuk tulisan. Sementara itu, apabila dilakukan perbandingan dengan beberapa Kabupaten Kota di Provinsi Bali dan juga Nasional, grafik di bawah ini menunjukkan bahwa rata-rata AMH di Kota Denpasar telah melampaui rata-rata provinsi dan juga Nasional.



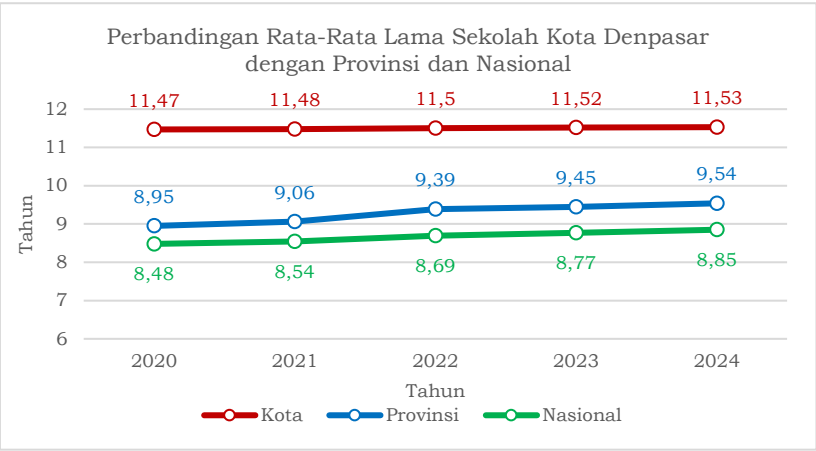
Gambar 2. 66
Grafik Perbandingan Persentase Angka Melek Huruf Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020 – 2024
Sumber: BPS-RI dan BPS Kota Denpasar (diolah), 2025

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun belajar pendidikan formal (bukan termasuk tahun mengulang) penduduk usia 15 tahun ke atas yang diselesaikan. Semakin tinggi angka RLS akan menggambarkan semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan pada suatu wilayah. RLS dapat

digunakan sebagai gambaran kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal.

Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Denpasar pada penduduk usia 15 tahun ke atas sejak tahun 2020–2024 adalah 11,53 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa RLS Kota Denpasar setara dengan lulus Sekolah Menengah Pertama/Sederajat, tetapi masih perlu peningkatan kualitas dari berbagai aspek agar setara Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Meski demikian, angka tersebut telah melampaui RLS Provinsi yang memiliki rata-rata 9,54 tahun dan juga Nasional dengan nilai 8,85 tahun. Berikut merupakan tabel dan grafik perbandingan rata-rata lama sekolah Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020–2024.

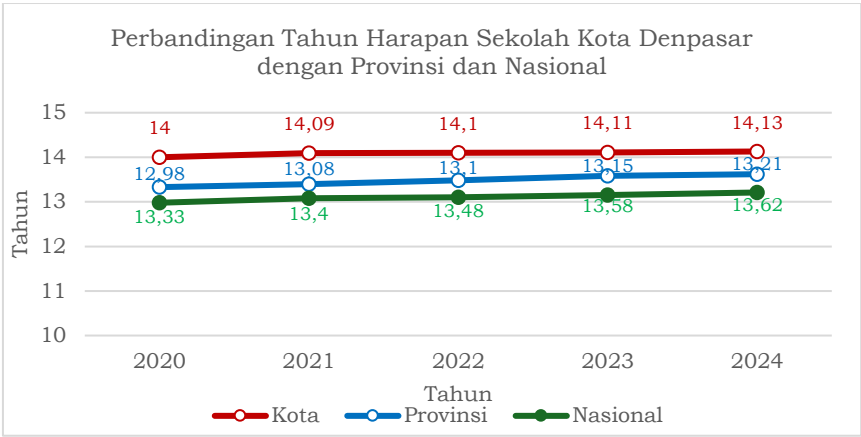


Gambar 2. 67
Grafik Perbandingan Tahun Harapan Sekolah Kota Denpasar dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS-RI dan BPS Kota Denpasar (diolah), 2025

4. Harapan Lama Sekolah

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lama sekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa depan dalam satuan tahun. HLS merupakan gambaran harapan sekolah formal anak-anak berusia tujuh tahun dalam skala tahun tertentu. HLS ini merupakan gambaran relevan untuk melihat bagaimana perubahan pendidikan terjadi di berbagai daerah. Angka harapan lama sekolah di Kota Denpasar bergerak fluktuatif dan cenderung stagnan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Data berikut menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun yang masuk pada tahun-tahun tersebut di Kota Denpasar memiliki harapan lama sekolah di atas 12 tahun atau hingga menamatkan sekolah formal hingga jenjang SMA. Apabila dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Provinsi, AHS Kota Denpasar memiliki nilai yang melampaui Provinsi Bali dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa harapan sekolah di Kota Denpasar cenderung lebih baik.



Gambar 2. 68
Grafik Perbandingan Angka Harapan Sekolah Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS-RI dan BPS Kota Denpasar (diolah), 2025

5. Angka Literasi/Numerasi

Literasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan menulis dan membaca, serta pengetahuan atau keterampilan dalam aktivitas atau bidang tertentu. Pemerintah mengklasifikasikan literasi menjadi enam literasi dasar, yaitu literasi baca-tulis-hitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya, serta literasi kewarganegaraan. Ditinjau dari aktivitas literasinya, Provinsi Bali tergolong ke dalam level aktivitas literasi sedang (angka indeks antara 40,01–60,00) dengan indeks literasi sebesar 44,58. Sementara itu, Kota Denpasar memiliki rata-rata kemampuan literasi dan numerasi untuk tingkat SD – SMP yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bali, dengan detail seperti di tabel berikut.

Tabel 2. 38				
Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD SMP Kota Denpasar Tahun 2022				
Kabupaten/Kota	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional
Denpasar	62,35	44,79	75,61	61,18

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045

6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Membaca (IPLM) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi membaca dalam suatu populasi atau daerah tertentu. IPLM mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keperpustakaan mencakup koleksi, ketenagakerjaan, layanan, kunjungan harian, pembinaan, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan. Indeks ini biasanya diukur dalam bentuk persentase atau skor.

Berdasarkan BPS, Indeks Pembangunan Literasi Membaca di Kota Denpasar mencapai 76,11 persen pada tahun 2024. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 dengan nilai 71,92 persen. Angka tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak mengalami

penurunan. Dengan memantau IPLM, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi terkait dapat merancang program-program untuk meningkatkan literasi membaca dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukung perkembangan pengetahuan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial

Besaran pekerja/buruh yang menggambarkan peserta perlindungan jaminan sosial mengacu pada jumlah pekerja atau buruh yang terdaftar sebagai peserta dalam program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua.

Tabel 2. 39
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Kota Denpasar Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial	Persen	8,30	56	52

Sumber: Satu Data Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2023, tingkat pekerja atau buruh di Kota Denpasar yang telah mengikuti program perlindungan jaminan sosial tercatat sebesar 56 persen dan angka tersebut menurun menjadi 52 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa cakupan perlindungan sosial bagi tenaga kerja masih belum optimal, baik di sektor formal maupun informal.

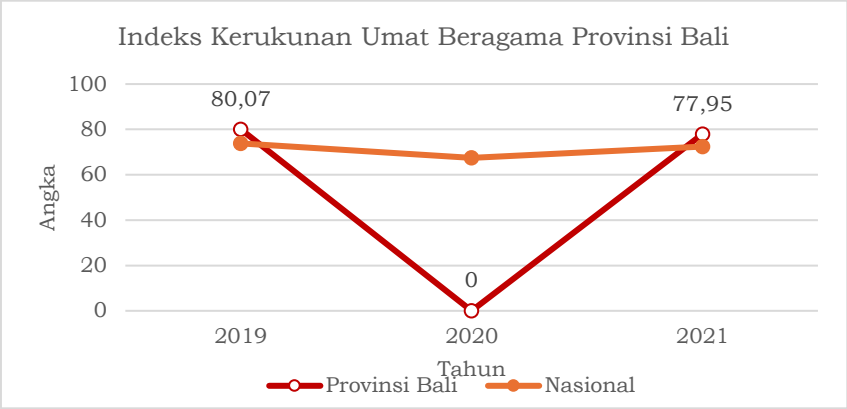
2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB) merupakan indeks yang mengukur hubungan toleransi antarumat beragama dalam menjalankan agama, bekerja sama membangun masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indeks ini digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kerukunan umat beragama seperti intoleransi dan radikalisme. Terdapat tiga faktor penting yang mempengaruhi nilai indeks tersebut, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.

Berdasarkan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bali cenderung berfluktuasi tetapi memiliki nilai di atas nasional. Sebagai salah satu Kota di Provinsi Bali, Kota Denpasar turut serta berkontribusi untuk menciptakan Provinsi Bali dengan provinsi yang memiliki nilai IKUB 77,95 pada tahun 2021. Sebagai kota yang penuh dengan keberagaman umat beragama yang dibawa oleh masyarakat setempat atau pendatang, Kota Denpasar perlu aktif berperan dalam menjaga kearifan lokal budaya bali dan toleransi berlandaskan Tri Hita Karana untuk

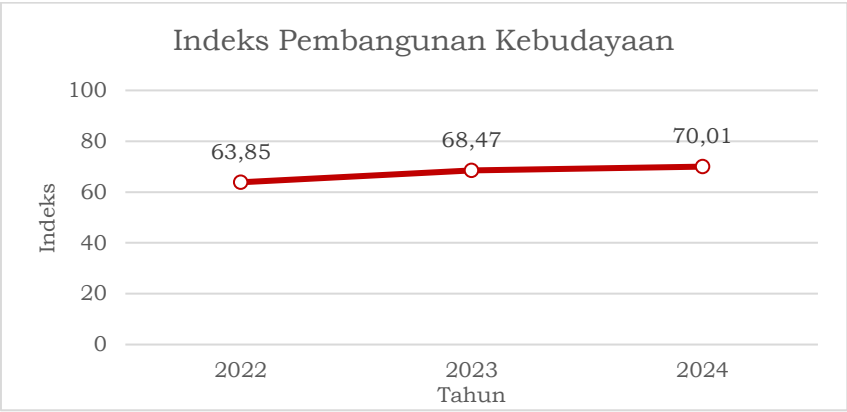
mendorong peningkatan nilai IKUB di Provinsi Bali. Secara lebih rinci, nilai tersebut ditunjukkan sebagaimana pada grafik berikut.



Gambar 2. 69
Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali
Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, 2024

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) mengukur kemajuan pembangunan bidang kebudayaan secara komprehensif. Indikator ini digunakan untuk memastikan kebudayaan menjadi bagian integral dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berakar pada nilai lokal.



Gambar 2. 70
Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar 2022-2024
Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Denpasar tahun 2021-2026

IPK Kota Denpasar menunjukkan tren peningkatan positif dari tahun ke tahun, yaitu dari 63,85 pada 2022 menjadi 68,47 di 2023, dan 70,01 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran kebudayaan melalui pelestarian warisan budaya, penguatan ekspresi budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Perlindungan Anak

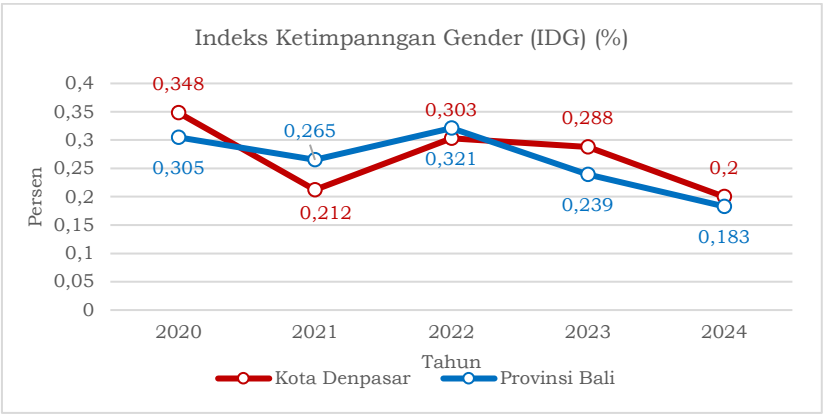
Indeks Perlindungan Anak merupakan indeks pengukuran pencapaian keberhasilan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Badan Pusat Statistik mengembangkan sejak tahun 2019.

IPA dilengkapi dengan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan khusus Anak (IPKA). IPA-IPHA-IPKA disusun dengan tujuan agar program dan kebijakan yang disusun pemerintah efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah terkait perlindungan, pemenuhan hak, dan perlindungan khusus anak.

Berdasarkan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, IPA, IPHA, dan IPKA Kota Denpasar pada tahun 2019 hingga tahun 2021 memiliki nilai rata-rata 69,78; 68,89; dan 80,73. Angka ini disusun berdasarkan 5 klaster penilaian yaitu Klaster I hak sipil dan kebebasan dengan nilai 49,99; Klaster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan nilai 90,03; Klaster III kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan nilai 88,25; Klaster IV pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dengan nilai 45,17; serta Klaster V perlindungan khusus dengan nilai 72,55.

2. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator penilaian kesetaraan antar gender. Nilai IKG berkisar antara 0-1, di mana semakin tinggi nilai IKG menunjukkan semakin kecilnya kesetaraan gender antara penduduk laki-laki dan perempuan. Nilai IKG Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Dibandingkan dengan nilai provinsi, angka IKG Kota Denpasar pada tahun 2024 cenderung lebih tinggi yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Denpasar cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Bali. Namun, secara keseluruhan nilai tersebut memiliki tren menurun dari tahun 2022-2024 menunjukan komitmen Kota Denpasar terhadap kesetaraan gender.



Gambar 2. 71
Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IDG) Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2019-2024

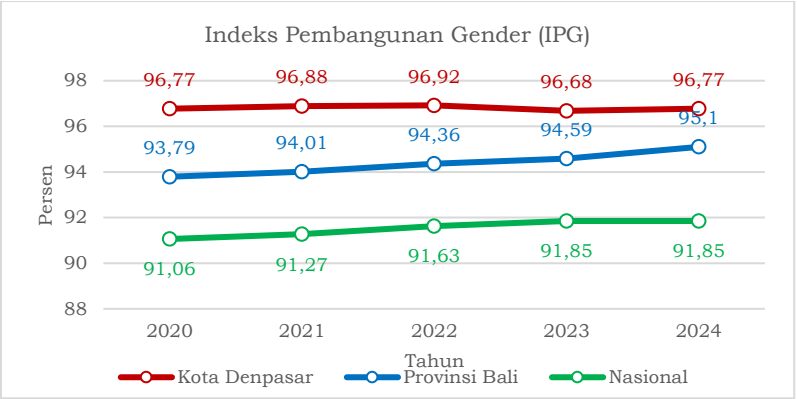
Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, 2025

3. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPG mencerminkan tingkat pencapaian gender dalam suatu wilayah atau negara.

Semakin tinggi IPG, semakin tinggi pula tingkat kesetaraan gender. IPG dihitung berdasarkan dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan layak yang terbagi menjadi laki-laki dan perempuan berdasarkan perhitungan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki . Data IPG Kota Denpasar selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cenderung stagnan. Pada tahun 2024, IPG Kota Denpasar mencapai 96,77 yang mencerminkan komitmen Kota Denpasar dalam mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.

Apabila dibandingkan dengan IPG Provinsi Bali, Kota Denpasar telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam hal kesetaraan gender. IPG Provinsi Bali pada tahun 2024 mencapai 95,1, menunjukkan peningkatan yang stabil selama periode yang sama. Demikian juga dengan IPG Nasional, yang pada tahun 2024 mencapai 91,85, Kota Denpasar berada di atas rata-rata nasional dalam mencapai kesetaraan gender. Data yang menunjukkan peningkatan IPG Kota Denpasar menunjukkan bahwa upaya-upaya dalam menciptakan kesetaraan gender telah menghasilkan hasil yang positif, dan kota ini berkomitmen untuk terus memajukan kesetaraan gender dalam pembangunan wilayah. Data yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.

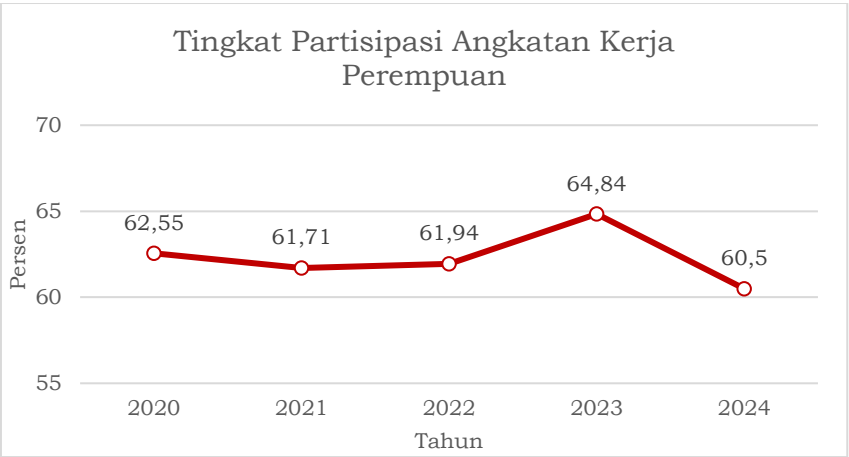


Gambar 2. 72
Grafik Indeks Pembangunan Gender Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, BPS Nasional, 2025

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan mengukur persentase perempuan usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mencerminkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja menjadi strategi penting dalam mendorong kesetaraan gender dan pertumbuhan inklusif.



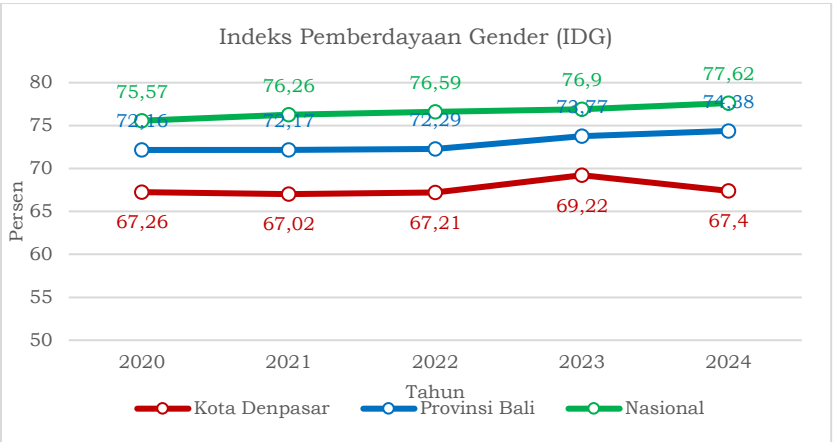
Gambar 2. 73
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Denpasar 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Denpasar mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Setelah mencapai angka tertinggi sebesar 64,84 persen pada tahun 2023, partisipasi ini menurun menjadi 60,5 persen pada 2024. Perubahan ini mencerminkan dinamika kondisi ketenagakerjaan perempuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi.

5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dalam suatu wilayah memiliki akses, peluang, dan kontrol atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. IDG mencerminkan tingkat pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. IDG menunjukkan keaktifan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dengan menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Data IDG Kota Denpasar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2020, IDG Kota Denpasar berada di angka 67,26% dan mengalami peningkatan hingga mencapai 69,22% pada tahun 2023. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan IDG Provinsi Bali, terlihat bahwa Kota Denpasar memiliki IDG yang lebih rendah. Demikian pula perbandingan dengan IDG Nasional menunjukkan bahwa Kota Denpasar masih memiliki nilai yang lebih rendah. Pada tahun 2024, nilai pada nasional memiliki capaian sebesar 77,62% atau memiliki selisih 10,24% di atas capaian Kota Denpasar. Peningkatan IDG Kota Denpasar selama periode tersebut mencerminkan komitmen dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara bagi perempuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka serta memperkuat peran mereka dalam pembangunan wilayah, meskipun masih perlu ditingkatkan kembali. Data yang dimaksud adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 74
Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, BPS Nasional, 2025

6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Indikator ini merupakan panduan penting bagi instansi baik pemerintah, organisasi, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan generasi muda. IPP diukut berdasarkan 5 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusi.

Tabel 2. 40
Indeks Pembangunan Pemuda Kota Denpasar Tahun 2020-2022

Indikator	Satuan	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	61	61,33	62,17

Sumber: Kemenpora, 2025

Indeks Pembangunan Pemuda Kota Denpasar mengalami peningkatan bertahap dari 61,00 pada tahun 2020 menjadi 62,17 pada 2022. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi, dan kesetaraan gender di kalangan pemuda.

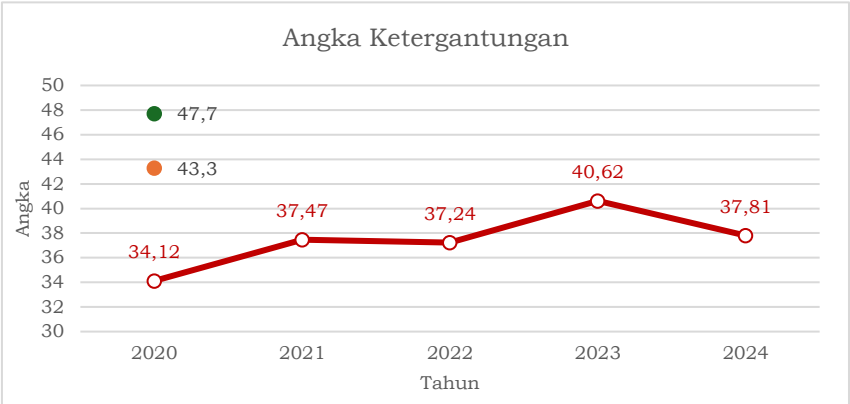
2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Berkaitan dengan struktur kependudukan, komposisi lainnya yang dapat diperhatikan adalah angka ketergantungan atau *dependency ratio*. Angka ketergantungan merupakan penilaian yang membandingkan rasio jumlah penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan umur 65 tahun ke atas) dengan usia penduduk produktif (15-64 tahun). Angka ketergantungan di Kota Denpasar dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2024, angka ketergantungan Kota Denpasar mencapai 37,81 yang memiliki arti bahwa di setiap 100 penduduk produktif menanggung 37 hingga 38 penduduk tidak produktif. Meskipun demikian, nilai ini merupakan nilai ambang batas dengan klasifikasi tinggi. Dibandingkan

dengan Provinsi Bali maupun angka Nasional, Kota Denpasar memiliki angka yang lebih baik. Provinsi Bali memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu tahun 2020 pada angka 43,3. Sementara itu, pada tahun 2020, angka ketergantungan nasional berada pada angka 47,7.



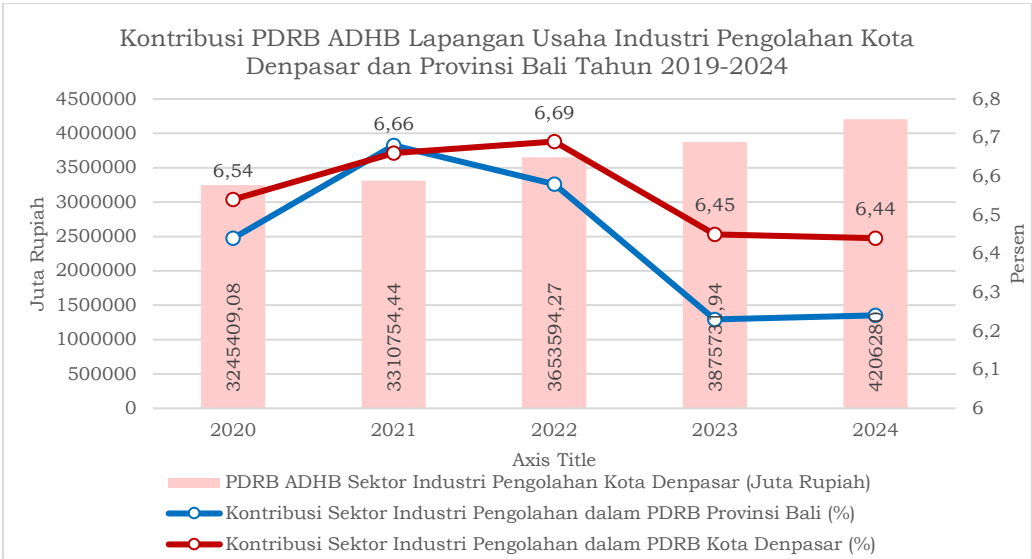
Gambar 2. 75
Grafik Angka Ketergantungan Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olahan Berdasarkan Data Kota Denpasar dalam Angka 2020-2024

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
1. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi sektor industri dilihat berdasarkan kondisi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kontribusi sektor industri di Kota Denpasar mengalami fluktuasi selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sektor industri menyumbang sekitar 6,54% dari PDRB kota dan meningkat hingga mencapai 6,69% pada tahun 2022. Persentase tersebut turun hingga menjadi 6,44% pada tahun 2024. Meski demikian, PDRB ADHB sektor industri tahun 2024 mencapai angka tertinggi yaitu 4.206,28 miliar rupiah.

Secara umum, kontribusi sektor industri di Kota Denpasar tampak lebih besar daripada kontribusi sektor industri di Provinsi Bali dalam periode yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor industri, meskipun mengalami fluktuasi, masih memainkan peran penting dalam struktur ekonomi kota dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi wilayah dengan memfasilitasi kegiatan pengolahan yang membentuk dasar untuk pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

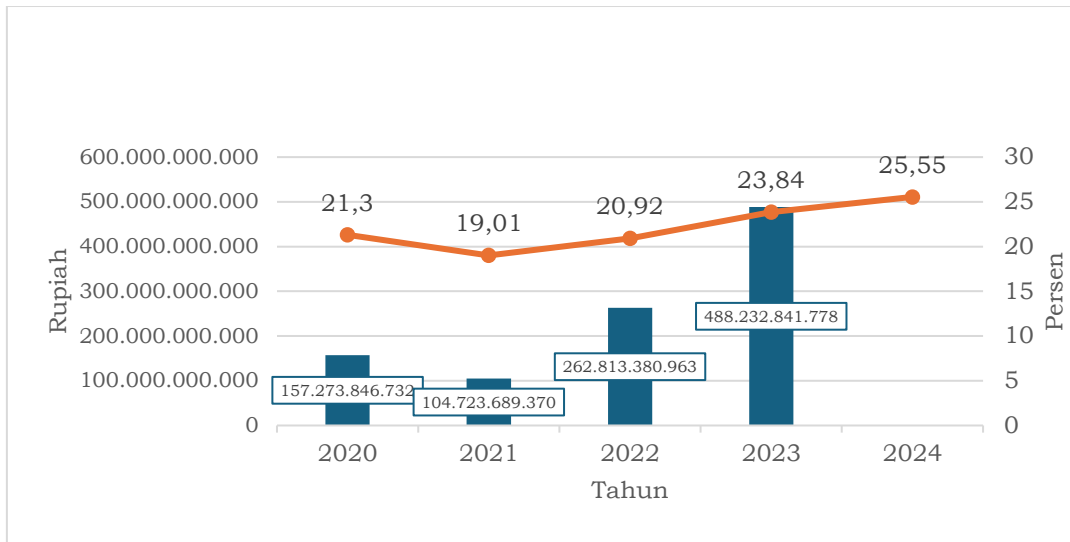


Gambar 2. 76
Persentase Kontribusi PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar dan BPS Provinsi Bali, 2025

2. Kontribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Kontribusi sektor akomodasi makan minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Denpasar merupakan gambaran penting dari pengaruh sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal. Sektor akomodasi makan minum mencakup hotel, restoran, dan usaha sejenisnya yang sangat terkait dengan pariwisata. Di Kota Denpasar, sektor ini telah memainkan peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Tren kontribusi sektor akomodasi makan minum terhadap PDRB di Kota Denpasar menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2023.

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan dampak serius terhadap sektor pariwisata, khususnya sektor akomodasi makan minum. Kontribusi sektor ini turun secara signifikan menjadi Rp104.723.689.370 pada tahun 2021. Kondisi tersebut berangsur membaik hingga akhirnya bisa mencapai nilai Rp488.232.841.778 pada tahun 2023 yang menjadi capaian tertinggi sejauh ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kota Denpasar sudah mulai mengalami proses pemulihan pasca-pandemi.

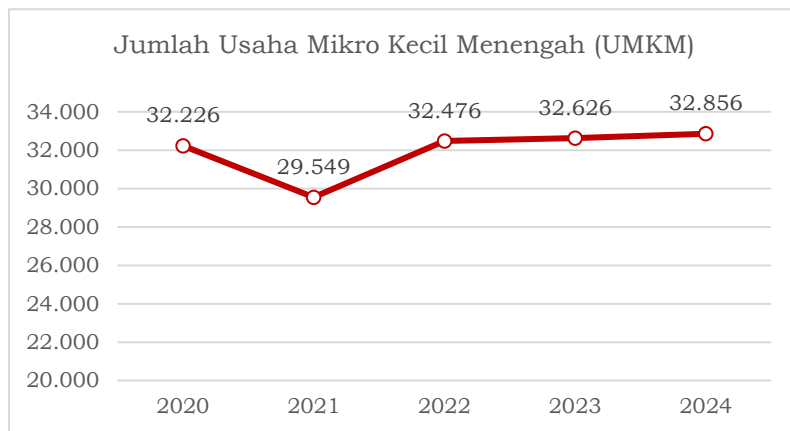


Gambar 2. 77
Grafik Kontribusi Sektor Akomodasi Makan Minum terhadap PDRB Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar (diolah), 2025

3. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan merupakan perbandingan antara wirausaha pemula dengan populasi angkatan kerja. Sementara itu, usaha yang dilakukan wirausahawan beragam termasuk UMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali, data jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Denpasar cenderung mengalami kenaikan. Data tersebut disajikan sebagai berikut.



Gambar 2. 78
Grafik Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

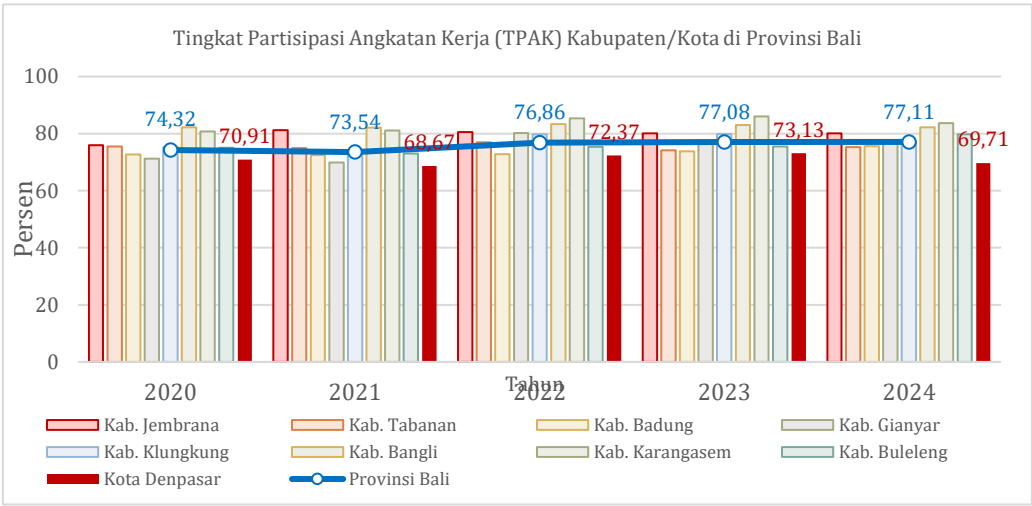
Sumber: Satu Data Denpasar, 2025

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting dalam mengukur keterlibatan penduduk dalam dunia kerja suatu wilayah. Angka partisipasi angkatan kerja merupakan proporsi penduduk umur 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam golongan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan

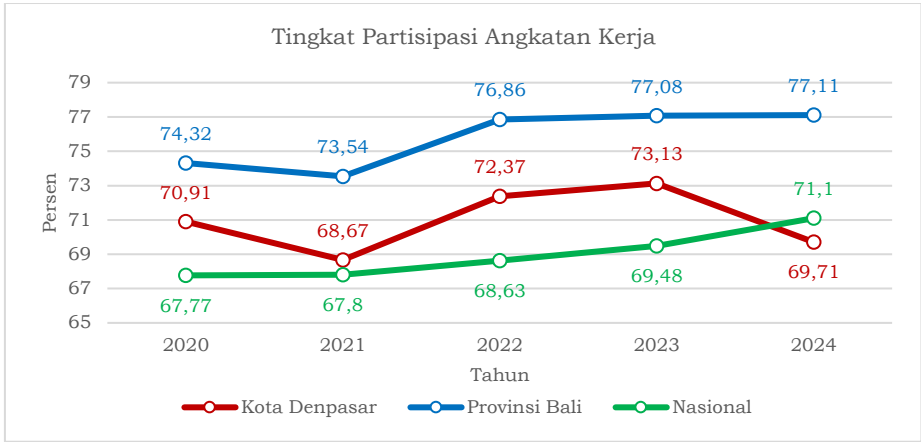
potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Selain angka partisipasi angkatan kerja, TPAK merupakan cara lain dari penulisan angka perbandingan angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar selama periode 2020-2024 adalah salah satu yang perlu diperhatikan. Dalam perbandingan dengan sejumlah kabupaten di Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang sedikit lebih rendah. Data menunjukkan bahwa Kota Denpasar cenderung berada di antara 68,67% hingga 73,13% selama periode tersebut. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki nilai yang cenderung lebih rendah.



Gambar 2. 79
Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

Dalam periode 2020-2024, Kota Denpasar menunjukkan variasi dalam TPAK yang cenderung berfluktuasi. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki TPAK yang cenderung stabil, dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Seiring dengan fluktuasi ekonomi dan faktor-faktor lainnya, TPAK Kota Denpasar berkisar antara 68,67% hingga 73,13%. Dibandingkan dengan TPAK pada tingkat nasional, Kota Denpasar memiliki nilai yang lebih tinggi. Data TPAK Indonesia selama periode 2020-2024 berkisar antara 67,77% hingga 71,1%, Kota Denpasar berada di atas angka tersebut sepanjang periode yang sama meskipun pada tahun 2024 memiliki nilai di bawah nasional. Hal ini dapat mengindikasikan aktivitas ekonomi yang kuat di Kota Denpasar, terutama dalam sektor-sektor seperti pariwisata dan perdagangan. Sementara itu, perbandingan dengan daerah lain di Provinsi Bali menunjukkan tingkat daya saing di Kota Denpasar dalam hal ketenagakerjaan perlu ditingkatkan. Data tingkat partisipasi angkatan kerja yang dimaksud dijelaskan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 2. 80
Grafik Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

5. Indeks Inovasi Daerah

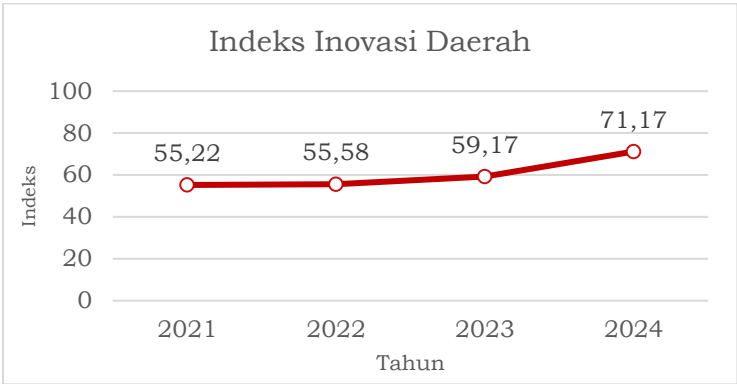
Indeks Inovasi Daerah salah satu indikator penilaian untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai berdasarkan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Indeks ini dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi lainnya sesuai urusan pemerintah dalam kewenangan daerah.

Indeks Inovasi Daerah Kota Denpasar pada tahun 2020-2024 mengalami tren yang fluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2020, Kota Denpasar memiliki predikat “Sangat Inovatif” untuk Indeks Inovasi Daerah. Pada tahun 2021-2023, predikat tersebut menurun menjadi “Inovatif” meskipun secara nilai mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan terhadap metode perhitungan yang mengklasifikasikan daerah dengan kategori skor baru. Kemudian, nilai tersebut meningkat signifikan dari 59,17 di tahun 2023 menjadi 71,17 di tahun 2024 dengan predikat “Sangat Inovatif”.

Tabel 2. 41
Skor Indeks Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	5.121	55,22	55,68	59,17	71,17
Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Open Data Denpasar, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar 2025



Gambar 2. 81
Skor Indeks Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2024
Sumber: Open Data Denpasar, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar 2025

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai sumber pertumbuhan yan baru yang turut memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pencapaiannya diukur melalui Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru Indonesia, dan Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer. Saat ini, indikator tersebut belum dilakukan perhitungan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Oleh karena itu, capaian dan target nasional dalam RPJMN 2025-2029 dapat menjadi acuan bagi Provinsi Bali dan Kota Denpasar dalam Prioritas Nasional 2 RPJMN 2025-2029.

Tabel 2. 42
Capaian dan Target Indikator Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru Indonesia 2025-2029

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	60,08 (2023)	68,34	77,20
Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	34,25 (2023)	38,76	50,73
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	13,2 (2023)	20	23

Sumber: RPJMN 2025-2029

2.1.3.4 Transformasi Digital

1. Indeks Transformasi Digital Nasional

Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) mengukur tingkat kemajuan digitalisasi di Indonesia melalui 5 pilar utama yaitu infrastruktur digital, pemerintahan, ekonomi, masyarakat, dan ekosistem digital. Namun, indikator tersebut belum dilakukan perhitungan di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, sebagaimana Kota Denpasar merupakan bagian dari Provinsi Bali, maka capaian Provinsi Bali dapat mencerminkan kondisi implementasi transformasi digital di Kota Denpasar.

Berdasarkan Kominfo dalam penyusunan Indeks TDN, Provinsi Bali memiliki nilai 56,11 pada tahun 2022 dengan klasifikasi nilai B atau Baik. Nilai ini mengalami tren yang meningkat dari nilai 48,79 di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan adanya komitmen dari pemerintah Provinsi Bali terkait percepatan transformasi digital.

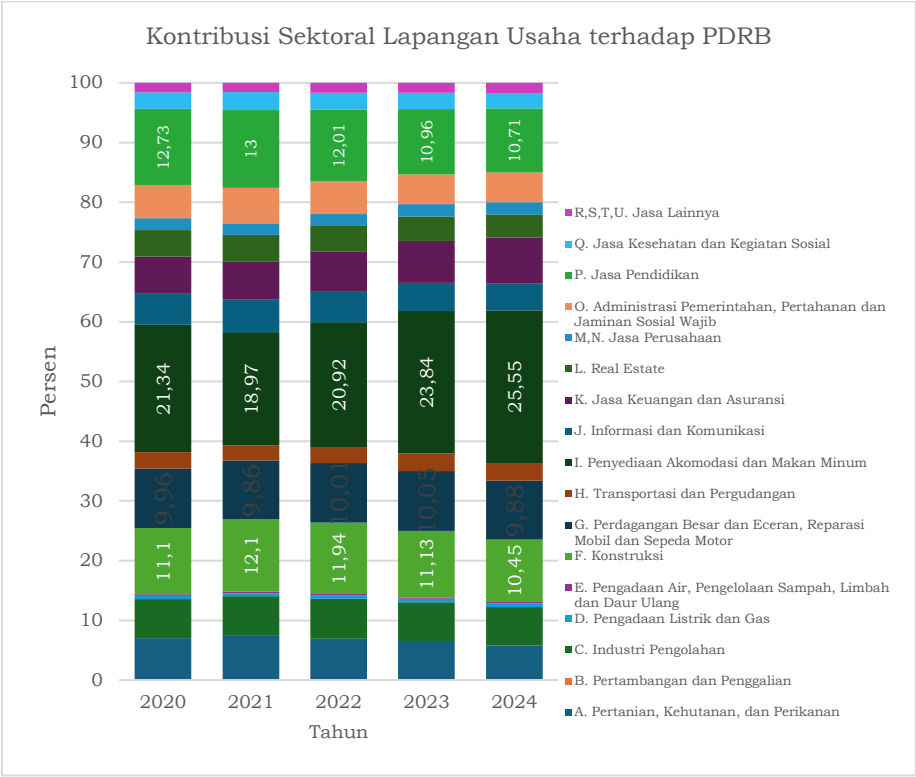
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Kontribusi Sektoral terhadap PDRB

Kontribusi sektor terhadap PDRB dapat dilihat berdasarkan distribusi menurut lapangan usaha maupun pengeluaran. Kontribusi sektor ini memberikan gambaran bagian atau persentase dari PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi. Hal ini dapat menentukan sektor unggulan pada suatu wilayah sebagai pertimbangan prioritas kebijakan perencanaan pembangunan.

Pada tahun 2024, ditemukan bahwa sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB secara berurutan antara lain 1) penyediaan akomodasi dan makan minum (25,55%), 2) Jasa Pendidikan (10,71%), dan 3) Konstruksi

(10,45%). Ketiga sektor ini juga memiliki nilai yang unggul pada rentang waktu 2020-2024. Kontribusi ini memiliki nilai yang terus berubah setiap tahunnya, tetapi didominasi oleh ketiga sektor tersebut. Distribusi ini dijelaskan pada grafik di bawah ini.

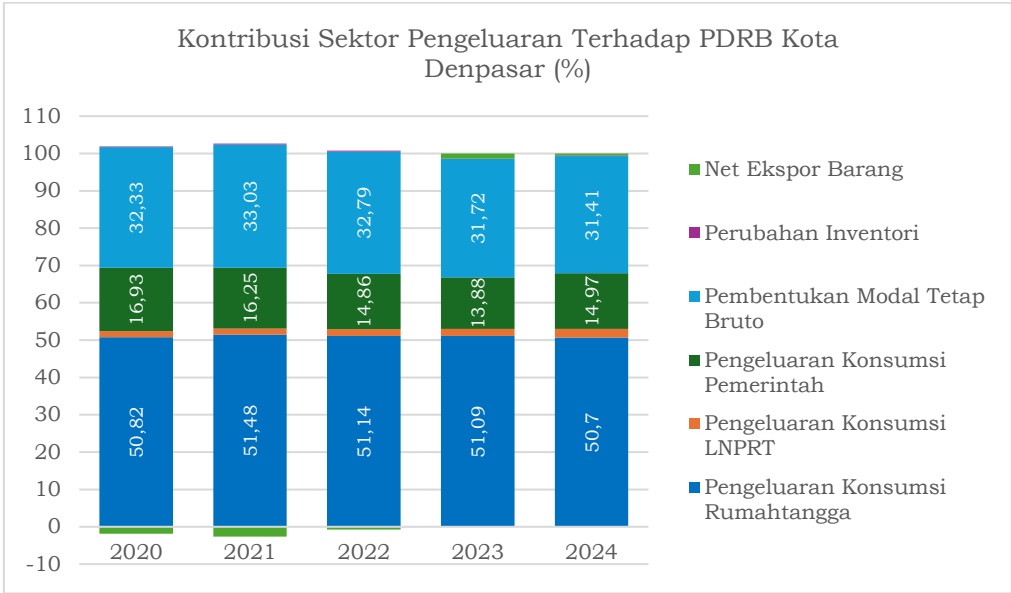


Gambar 2. 82
Grafik Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

Sebagai gerbang utama pariwisata di Provinsi Bali, Kota Denpasar berperan dalam bidang pariwisata yang diperlihatkan berdasarkan kontribusi sektor lapangan usaha ini. Sektor yang berhubungan dengan bidang pariwisata memiliki kontribusi terbesar. Sektor yang dimaksud seperti penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor dengan total kontribusi sebesar 45,88% pada tahun 2023. Sektor tersebut memiliki peran dalam mengembangkan infrastruktur pariwisata, menyokong kebutuhan domestik wisatawan, serta fasilitas pendukung lainnya.

Selanjutnya, kontribusi sektor pada PDRB dikaji menurut jenis pengeluaran oleh pelaku ekonomi. Secara umum, jenis pengeluaran yang mendominasi adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan yang berkisar antara nilai 50,07%-51,48% dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Nilai tersebut memiliki arti bahwa setengah dari PDRB digunakan untuk kebutuhan domestik rumah tangga. Jenis pengeluaran terbesar selanjutnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan distribusi kontribusi dengan rentang 31,41%-34,29% yang menunjukkan besaran kontribusi investasi pada perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi bernilai lebih besar dibandingkan aset investasi atau sifat aktivitas ekonomi jangka pendek lebih

besar dibandingkan kebutuhan jangka panjang. Perbandingan ini perlu diperhatikan dengan investasi yang dapat membentuk modal, membantu produktivitas, dan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Keseimbangan antara konsumsi dan investasi akan meningkatkan efisiensi terhadap rendahnya biaya produksi serta peningkatan penciptaan lapangan kerja dalam meningkatkan daya beli dan konsumsi jangka panjang. Distribusi kontribusi sektor menurut jenis pengeluaran dijelaskan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 2. 83
Grafik Kontribusi Sektor Pengeluaran Terhadap PDRB Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

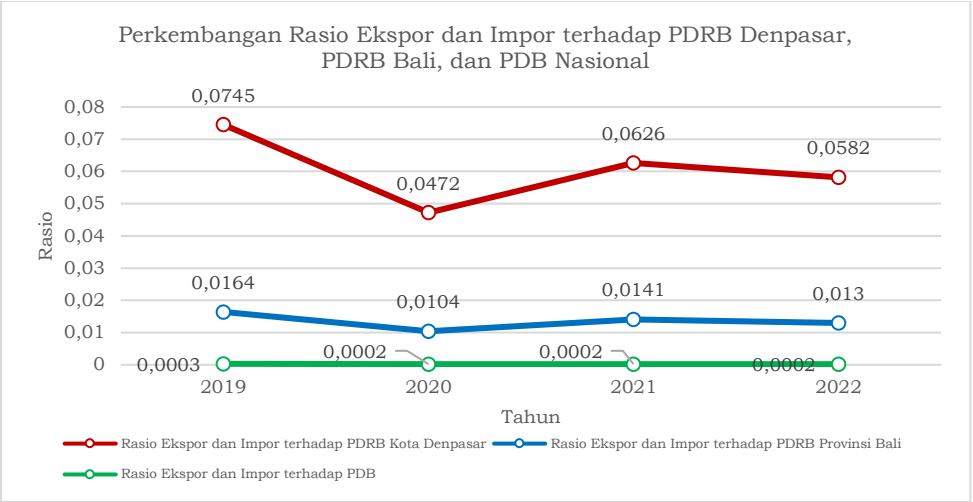
2. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB dan PDB

Rasio ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perdagangan, baik dalam cakupan nasional maupun internasional memengaruhi keterbukaan ekonomi suatu wilayah. Rasio keterbukaan ekonomi merupakan total perdagangan (ekspor dan impor) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Tabel 2. 43
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB dan PDB di Daerah Kota Denpasar Tahun 2019-2022

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ekspor	Juta Rp	3.740.772,51	2.291.036,83	2.984.327	2.965.845
Jumlah Impor	Juta Rp	392.194,39	50.482,73	127.961	215.530
Jumlah Ekspor dan Impor	Juta Rp	4.132.966,90	2.341.519,56	3.112.288	3.181.375
PDRB Kota Denpasar	Milyar Rp	55.456,04	49.607,46	49.687,18	54.650,43
PDRB Provinsi Bali	Milyar Rp	251.934,10	224.225,72	220.467,45	245.233,24
PDB	Milyar Rp	5.832.657,20	5.443.353,20	6.976.690,80	9.588.445,60
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB Kota Denpasar	Nilai	0,0745	0,0472	0,0626	0,0582
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB Provinsi Bali	Nilai	0,0164	0,0104	0,0141	0,0130
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB	Persen	0,0003	0,0003	-2,55	-0,51

Sumber: BPS Kota Denpasar 2020-2023



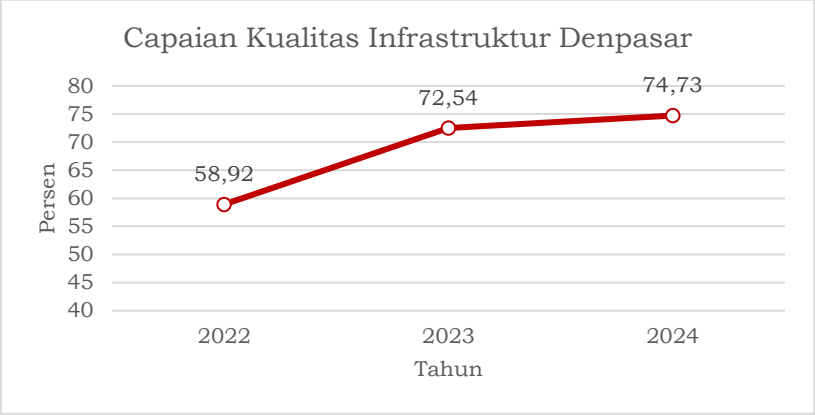
Gambar 2. 84
Perkembangan Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB Kota Denpasar, PDRB Provinsi Bali, dan PDB Tahun 2019-2022
Sumber: BPS Kota Denpasar 2016-2020 dan BPS Provinsi Bali 2016-2020 (diolah), 2025

Dalam rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2020, rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kota Denpasar masih berada pada angka 0,04-0,12. Jika dibandingkan dengan PDRB Provinsi Bali, rasio ekspor dan impor Kota Denpasar berada pada angka 0,01-0,025. Jika dibandingkan dengan PDB, rasionya berada pada angka 0,0002-0,0004. Meskipun ketiga rasio mengalami tren penurunan dalam 3 tahun terakhir, tingginya rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kota Denpasar dibandingkan dengan PDRB Provinsi Bali dan PDB menandakan bahwa kegiatan perdagangan yang ada di Denpasar didominasi oleh kegiatan perdagangan dalam wilayah, sedangkan perdagangan dengan wilayah lain, baik dalam cakupan nasional maupun internasional sudah terjadi meskipun belum banyak berkontribusi.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar

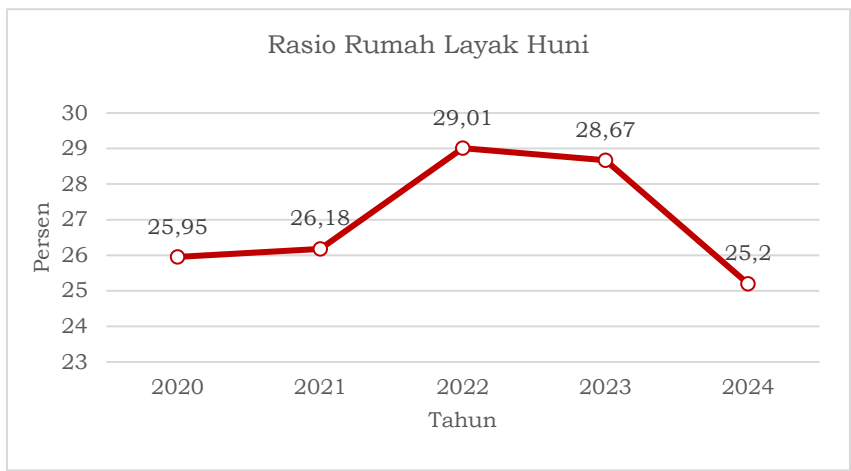
Capaian kualitas infrastruktur menggambarkan kondisi kualitas infrastruktur Kota Denpasar. Berdasarkan grafik dibawah, kondisi capaian menunjukan tren yang meningkat dari tahun 2022 dengan nilai 58,92 persen menjadi 74,73 persen di tahun 2024 Hal ini menunjukan adanya kemajuan dalam pembangunan dan kualitas infrastruktur di Kota Denpasar.



Gambar 2. 85
Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar Tahun 2022-2024
Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Denpasar 2021-2026

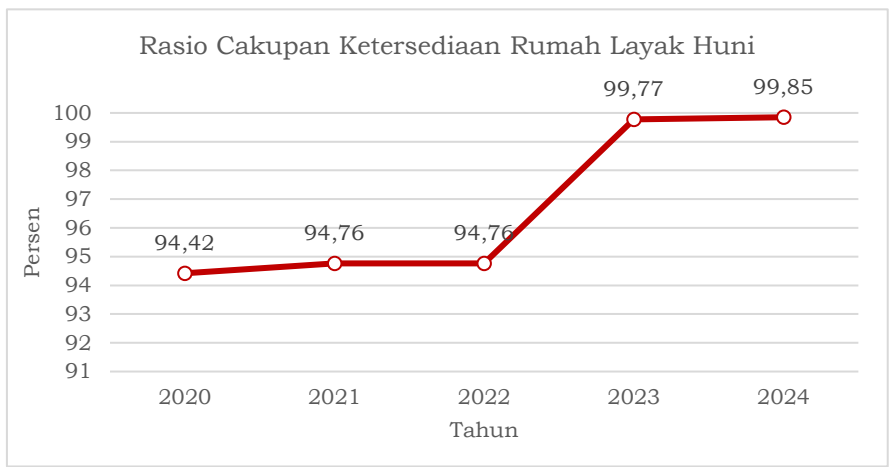
2. Rasio Rumah Layak Huni

Persentase rumah layak huni di Kota Denpasar masih berada di angka 25%, angka ini masih di bawah target RPJMD Indonesia yaitu 70% pada tahun 2024. Data rasio rumah layak huni Kota Denpasar sejak 2020 hingga 2024 menunjukkan data fluktuatif, tetapi cenderung mengalami penurunan.



Gambar 2. 86
Rasio Rumah Layak Huni Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

Sementara itu, cakupan kesediaan rumah layak huni di Kota Denpasar masih berada di kisaran 90 hingga 100 persen, tetapi cenderung mengalami kenaikan untuk tahun 2020-2024.



Gambar 2. 87
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

3. Cakupan Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah konsep yang menekankan kemampuan desa untuk mengelola sumber daya dan pembangunan secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar. Desa mandiri adalah bentuk hasil penilaian yang dilakukan per tahun oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui regulasi yang dikeluarkan yakni Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Terdapat tiga dimensi pembentuk IDM, yakni dimensi lingkungan, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi.

Tabel 2. 44
Cakupan Desa Mandiri di Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

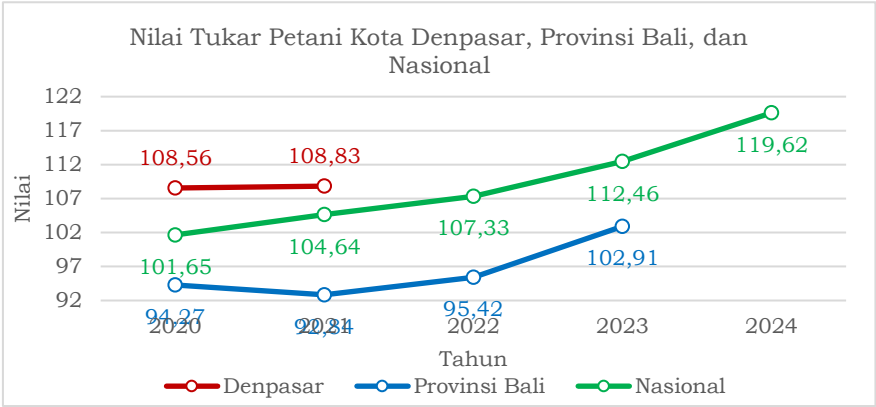
Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Mandiri	Desa	24	27	27	27	27
Jumlah seluruh desa	Desa	27	27	27	27	27
Cakupan Desa Mandiri	Persen	89	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2025

Kota Denpasar memiliki 27 desa secara administratif. Mulai tahun 2020, terdapat 19 desa yang menjadi desa mandiri. Dalam kurun waktu setahun kemudian, jumlah desa mandiri bertambah menjadi 24 desa. Pada tahun 2021 terdapat 3 desa lagi yang menjadi desa mandiri, sehingga saat ini seluruh desa di Kota Denpasar telah menjadi desa mandiri.

4. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). NTP memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal.



Gambar 2. 88
Nilai Tukar Petani Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar 2010-2022 dan BPS Provinsi Bali 2020-2022 (diolah), 2023

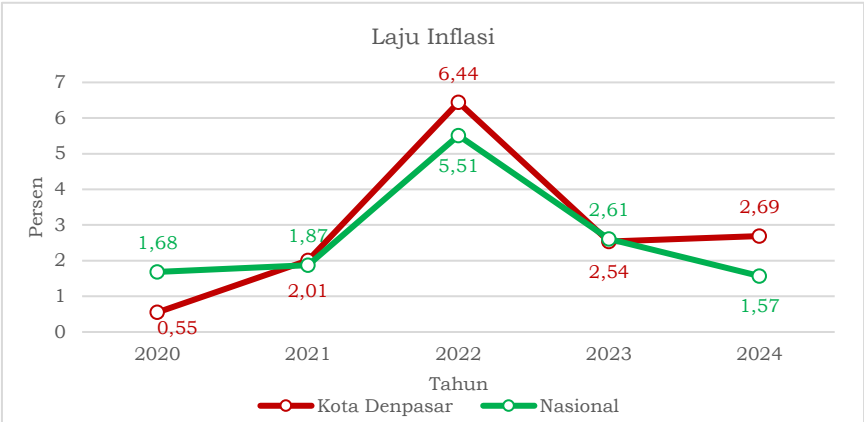
Berdasarkan diagram di atas, NTP Denpasar dalam kurun waktu 2020-2021 cenderung mengalami peningkatan, di mana kondisi ini berbanding terbalik dengan NTP Provinsi Bali dan NTP Nasional yang cenderung fluktuatif, terutama NTP Provinsi Bali yang cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir (<100). Dalam kurun waktu tersebut, NTP Denpasar berada di atas angka 100 yang berarti petani di Denpasar telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian. Namun perencanaan dan manajemen yang baik perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan usaha pertanian di Denpasar, termasuk penurunan NTP Provinsi Bali yang dapat memengaruhi peningkatan kesejahteraan petani di Denpasar.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

1. Laju Inflasi

Laju inflasi mengacu pada tingkat perubahan harga yang menggambarkan penurunan maupun kenaikan harga bagi sekelompok barang dan jasa pada periode tertentu yang berhubungan dengan kemampuan atau daya beli masyarakat. Utamanya, laju inflasi dapat menentukan stabilitas ekonomi suatu daerah. Selain itu terdapat beberapa poin penting terhadap kajian laju inflasi, seperti peningkatan harga, daya beli, kebijakan moneter, harga konsumen, serta stabilitas harga.

Laju inflasi di Kota Denpasar memiliki tren yang fluktuatif dan dinamis pada setiap tahun. Jika dibandingkan dengan nilai inflasi nasional, pada sebagian besar tahun, Kota Denpasar memiliki nilai laju inflasi yang lebih rendah dalam kurun waktu 2020-2024. Sementara itu, Kota Denpasar memiliki nilai laju inflasi yang lebih tinggi pada tahun 2022 yang kemudian menurun pada tahun 2023 dan naik kembali pada tahun 2024. Pada tahun 2021, kelompok inflasi terbesar merupakan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan nilai 10,39% dan pada tahun 2022 kelompok inflasi terbesar berasal dari kelompok transportasi dengan nilai 15,15%. Laju inflasi Kota Denpasar yang dimaksud dijelaskan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 2. 89
Grafik Laju Inflasi Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar, Hasil Evaluasi dan BPS Nasional, 2025

2. Produktivitas Total Daerah

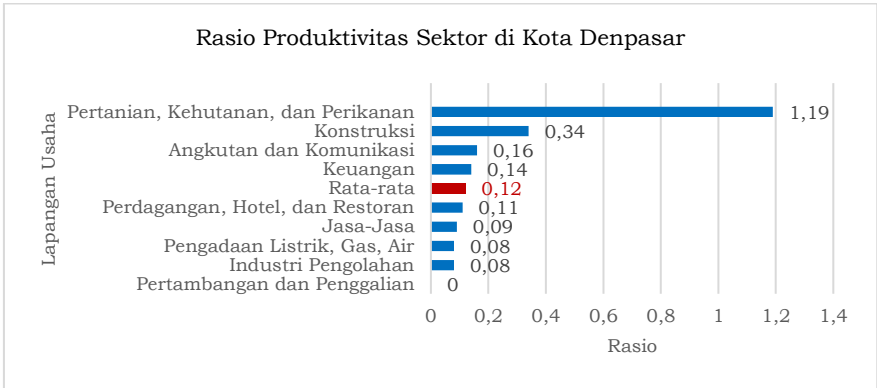
Produktivitas total daerah merupakan perbandingan antara nilai tambah sektor terhadap jumlah angkatan kerja sektor. Tabel di bawah ini merupakan hasil perhitungan rasio produktivitas sektor/lapangan usaha di Kota Denpasar tahun 2023.

Tabel 2. 45
Produktivitas Total Daerah Kota Denpasar Tahun 2023

Lapangan Usaha	Nilai Tambah Bruto (dalam Miliar Rupiah)	Angkatan Kerja Sektor (2023)	Rasio Produktivitas Sektor (miliar rupiah per orang)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.949,63	3.321	1,19
Pertambangan dan Penggalian	0	325	0,00
Industri Pengolahan	3.875,73	50.811	0,08

Lapangan Usaha	Nilai Tambah Bruto (dalam Miliar Rupiah)	Angkatan Kerja Sektor (2023)	Rasio Produktivitas Sektor (miliar rupiah per orang)
Pengadaan Listrik, Gas, Air	484,16	5.978	0,08
Konstruksi	6.689,57	19.756	0,34
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	20.369,99	182.768	0,11
Angkutan dan Komunikasi	4.618,27	29.697	0,16
Keuangan	4.210,39	29.697	0,14
Jasa-Jasa	10.448,1	113.343	0,09
JUMLAH/RATA-RATA	50.696,21	422.382	0,12

Sumber: BPS Kota Denpasar 2025 (diolah)



Gambar 2. 90
Rasio Produktivitas Sektor di Kota Denpasar Tahun 2023

Sumber: BPS Kota Denpasar 2023 (diolah), 2025

Berdasarkan diagram di atas, rasio produktivitas terbesar adalah sektor atau lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,19 yang diikuti oleh lapangan konstruksi sebesar 0,34 serta lapangan usaha angkutan dan komunikasi sebesar 0,16. Sementara itu ketiga lapangan usaha yang menyumbang kontribusi terbesar dalam PDRB Kota Denpasar pada tahun 2021 terdiri dari 1) penyediaan akomodasi dan makan minum; 2) konstruksi, dan 3) jasa pendidikan.

Sebagai perbandingan dapat dilihat bahwa lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang menyumbang kontribusi terbesar justru hanya memiliki rasio produktivitas sebesar 0,11. Berdasarkan Statistik Ketenagakerjaan Kota Denpasar 2021, komposisi lapangan usaha dari pekerja yang tinggal di Denpasar masih didominasi tiga kategori lapangan usaha seperti 1) perdagangan, hotel, dan restoran; 2) jasa-jasa; dan 3) industri, terutama perhotelan/akomodasi yang merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar di Provinsi Bali karena keunggulan sektor pariwisata.

3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

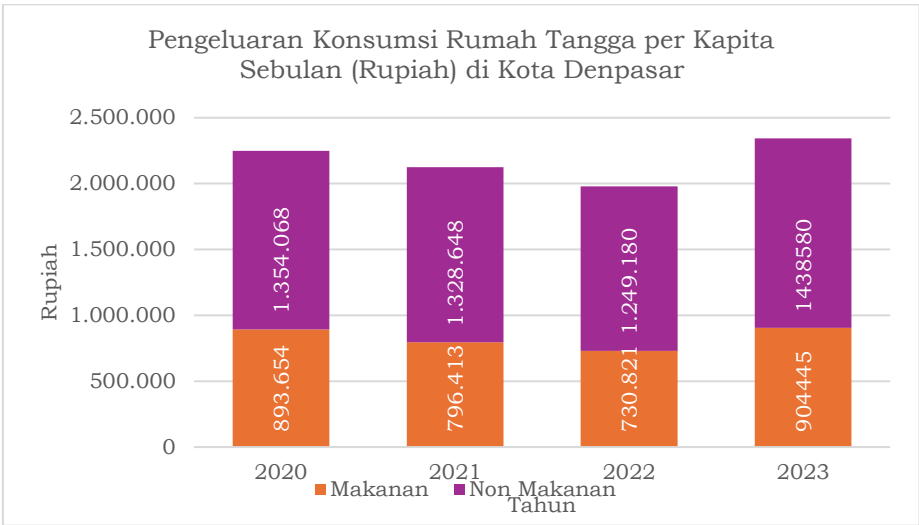
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terbagi menjadi dua kategori utama yang terdiri dari pengeluaran untuk kebutuhan makanan dan bukan makanan. Pengeluaran makanan mencakup semua jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sementara itu, pengeluaran bukan makanan mencakup pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, sandang, biaya kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Analisis pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Perhitungan analisis ini melibatkan pembagian antara total pengeluaran rumah tangga dalam satu tahun dengan jumlah rumah tangga pada tahun tersebut.

Tabel 2. 46
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Denpasar Tahun 2020-2023

Uraian	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	Rupiah	2.247.722	2.125.061	1.980.001	2.343.025
Makanan	Rupiah	893.654	796.413	730.821	904.446
Bukan Makanan	Rupiah	1.354.068	1.328.648	1.249.180	1.438.580

Sumber: BPS Kota Denpasar 2019-2024 (diolah), 2025



Gambar 2. 91
Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Sebulan (Rupiah) 2020-2023

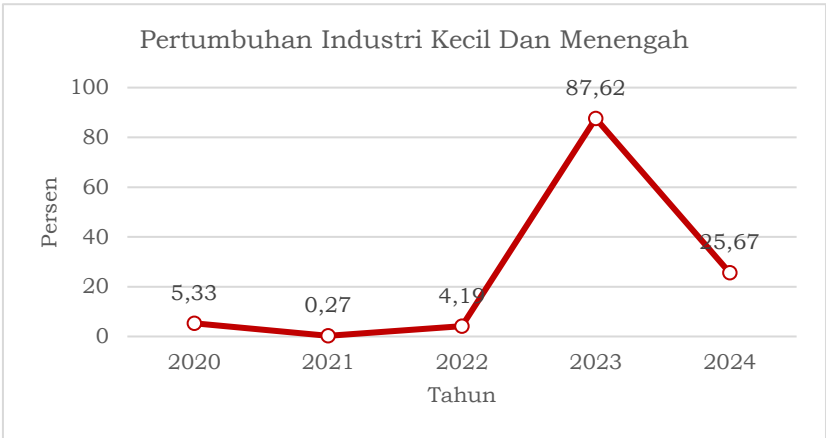
Sumber: BPS Kota Denpasar 2019-2023 (diolah), 2025

Berdasarkan diagram di atas, rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga di Denpasar cenderung mengalami kenaikan tiap tahun. Meskipun pada tahun 2020 pandemi covid-19 masih terjadi, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Denpasar menyentuh angka tertinggi dengan pengeluaran kategori makanan sebesar Rp 893.654 dan kategori bukan makanan mencapai sebesar Rp 1.354.068. Berdasarkan data tersebut, rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun tersebut menyentuh angka Rp 2.247.722. Kemudian 3 tahun terakhir, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Denpasar mengalami kondisi fluktuatif yang cenderung meningkat di tahun 2023 seiring dengan dilalukannya berbagai program pemulihan ekonomi oleh pemerintah.

4. Pertumbuhan Industri

Sektor ekonomi yang dominan di Kota Denpasar adalah sektor jasa, khususnya terkait dengan industri pariwisata, perdagangan, dan layanan lainnya yang mendukung industri pariwisata seperti restoran, hotel, dan agen perjalanan atau bukan merupakan industri besar. Selama periode 2020-2023, Kota Denpasar mengalami pertumbuhan yang cenderung

fluktuatif dengan tren meningkat dalam sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM). Data menunjukkan bahwa pertumbuhan IKM mengalami penurunan, mulai dari 5,33 persen pada tahun 2020 hingga menjadi 4,19% pada 2022 dan kemudian naik menjadi 87,62 persen di tahun 2023 dan turun secara signifikan di tahun 2024 menjadi 25,67 persen.

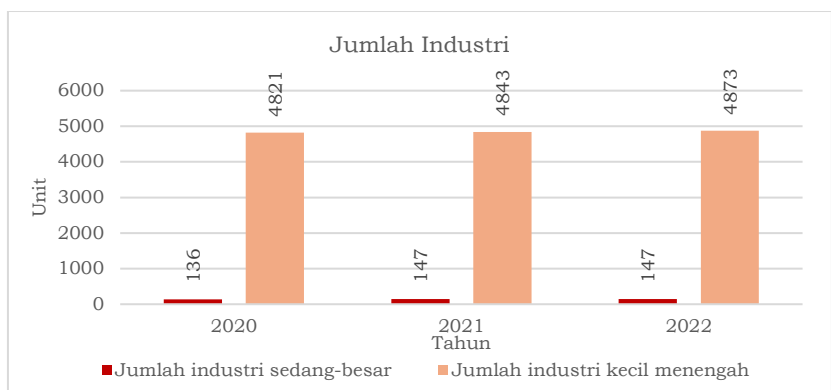


Gambar 2. 92
Grafik Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Penting untuk dicatat bahwa sektor IKM memiliki peran vital dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan mendukung perkembangan ekonomi daerah. Meskipun ada fluktuasi dalam angka pertumbuhan, peningkatan pertumbuhan sektor IKM selama periode ini mencerminkan upaya positif dalam mendukung industri kecil dan menengah di Kota Denpasar.

Selain hal tersebut, dalam beberapa tahun terakhir, Kota Denpasar memiliki pertumbuhan yang positif dalam sektor industri, mencakup industri kecil, menengah, dan besar. Data menunjukkan bahwa selama periode 2020-2022, terjadi peningkatan jumlah unit industri kecil menengah dari 4821 unit pada tahun 2020 menjadi 4873 pada tahun 2022. Sementara itu, sektor industri besar juga menunjukkan perkembangan yang stabil, dengan jumlah unit industri sedang-besar mencapai 147 unit pada tahun 2022.

Dengan adanya peningkatan jumlah unit industri kecil, menengah, dan besar, Kota Denpasar memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Sektor industri memainkan peran penting dalam memajukan ekonomi kota ini, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Perbandingan data antara industri kecil, menengah, dan besar juga memberikan gambaran bahwa upaya pengembangan sektor industri terus berlanjut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Melalui dukungan bagi sektor IKM ini, Kota Denpasar terus memperkuat fondasi ekonominya dengan potensi pertumbuhan lebih lanjut di masa depan. Data yang dimaksud dijelaskan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 93
Grafik Jumlah Industri di Kota Denpasar Tahun 2020-2022
 Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2022

2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum adalah sistem penilaian untuk mengukur sejauh mana reformasi hukum telah berjalan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan regulasi, melakukan regulasi dan deregulasi, serta memperkuat sistem regulasi nasional. Indeks ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025.

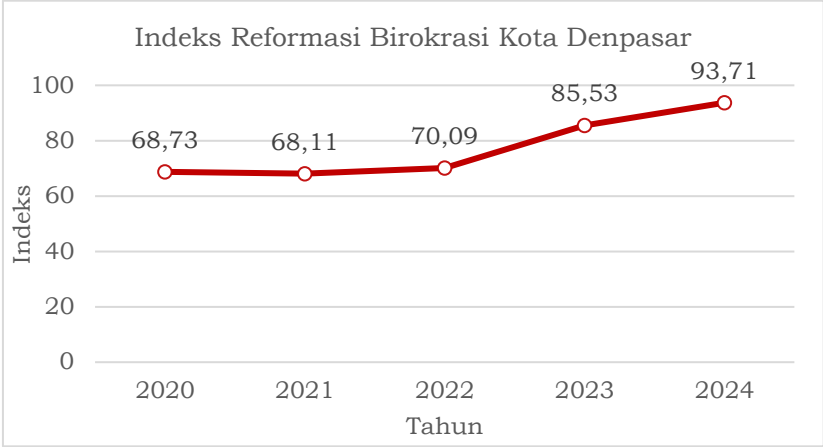
Pada tahun 2023, Kota Denpasar meraih nilai 96,52 dengan predikat Istimewa atau AA dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum. Kemudian pada tahun 2024, nilai tersebut meningkat menjadi 98,9 dengan predikat Istimewa atau AA.

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks birokrasi atau indeks reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* menuju *clean governance*. Sistem penyelenggaraan pemerintahan ditata melalui reformasi birokrasi dengan mengutamakan efektivitas, efisiensi, *equity*, dan ekonomis. Pengukuran indeks reformasi birokrasi melibatkan dua komponen, yaitu komponen pengungkit (pengukuran seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan) dan komponen hasil (pengukuran terhadap akuntabilitas, integritas, dan kepuasan pengguna layanan).

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, Indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan dokumen RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045, indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar Tahun 2022 memperoleh predikat B (baik) dengan nilai indeks sebesar 70,09. Angka tersebut kemudian meningkat dengan cukup signifikan menjadi 93,71 pada tahun 2024. Tingginya nilai indeks reformasi daerah menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan dijalankan dengan profesional, terintegrasi, netral, mampu melayani publik dengan baik,

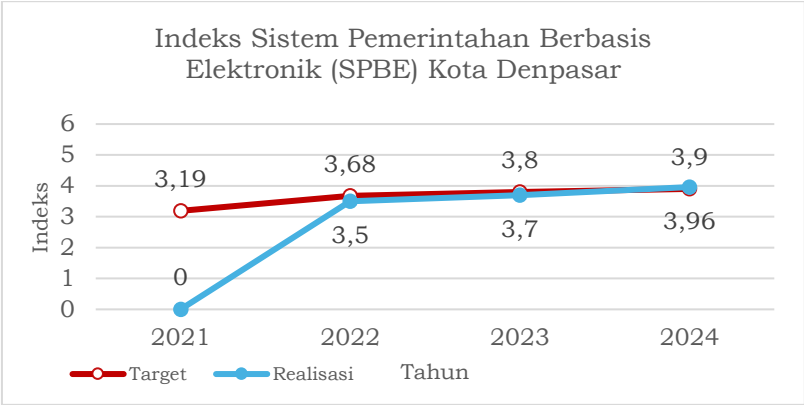
dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.



Gambar 2. 94
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Satu Data Indonesia Kota Denpasar, 2025

3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan layanan kepada pengguna SPBE melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. SPBE digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.



Gambar 2. 95
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Denpasar 2021-2024
Sumber: Satu Data Indonesia Kota Denpasar, 2024

Menurut dokumen RPJPD Provinsi Bali tahun 2025-2045, SPBE di Kota Denpasar pada tahun 2024 mendapatkan predikat sangat baik. Apabila ditinjau dari trennya, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, indeks SPBE Kota Denpasar menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan indeks SPBE pada tahun 2024 sebesar 3,9.

4. Indeks Pelayanan Publik

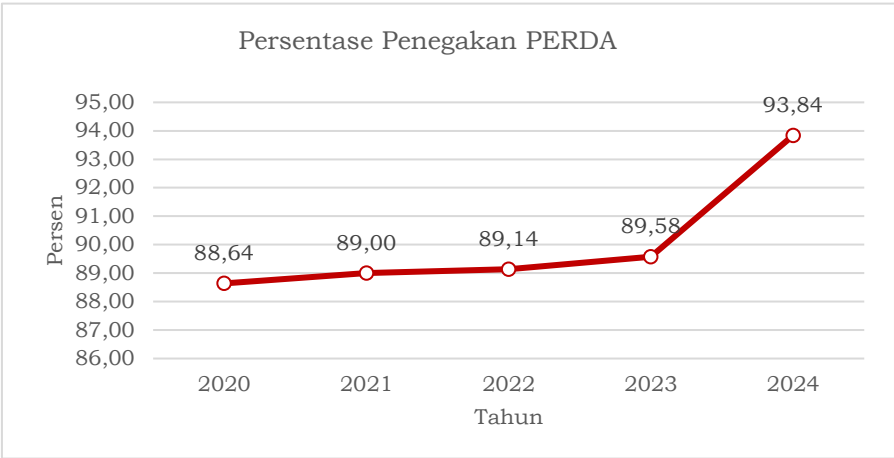
Indeks pelayanan publik merupakan indeks yang mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pusat maupun berdasarkan 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme, SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Indeks ini bertujuan untuk memastikan pemerintah dalam

penyediaan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pada tahun 2024, Indeks Pelayanan Publik Kota Denpasar berada pada predikat A dengan skor 97,93.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1. Persentase Penegakan Perda

Dalam kurun waktu 2020-2024, Kota Denpasar mencatat pencapaian yang baik dalam penegakan Peraturan Daerah (PERDA), dengan persentase penegakan PERDA yang terus meningkat secara konsisten. Dari tahun 2020 hingga 2024, persentase penegakan PERDA Kota Denpasar naik dari 88,64% menjadi 93,84%. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan dan mengawasi implementasi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Data tersebut dirincikan dalam grafik berikut.

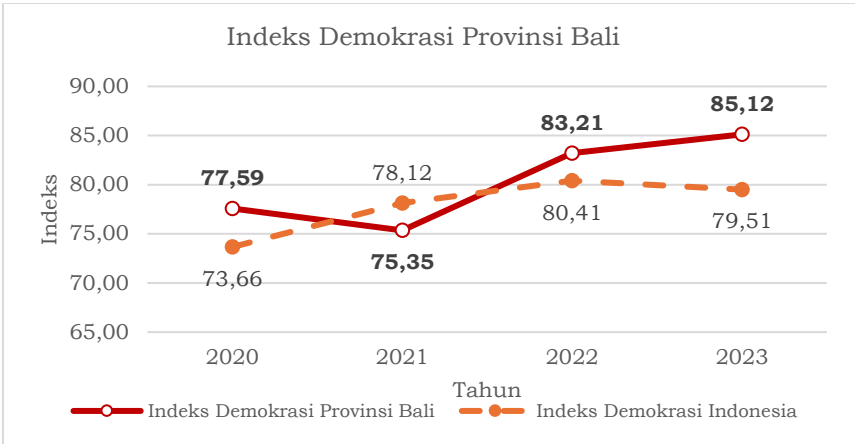


Gambar 2. 96
Grafik Persentase Penegakan PERDA Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, 2025

2. Indeks Demokrasi

Indeks demokrasi merupakan indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indeks ini meliputi perhitungan terhadap aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi di Indonesia.

Metode perhitungan dalam indeks demokrasi mengalami perubahan mulai tahun 2020. Perhitungan indeks demokrasi dilakukan untuk setiap provinsi di Indonesia sehingga Kota Denpasar tidak secara spesifik memiliki nilai untuk indeks tersebut. Namun, kondisi indeks demokrasi di Kota Denpasar dapat dicerminkan dalam nilai indeks Provinsi Bali.

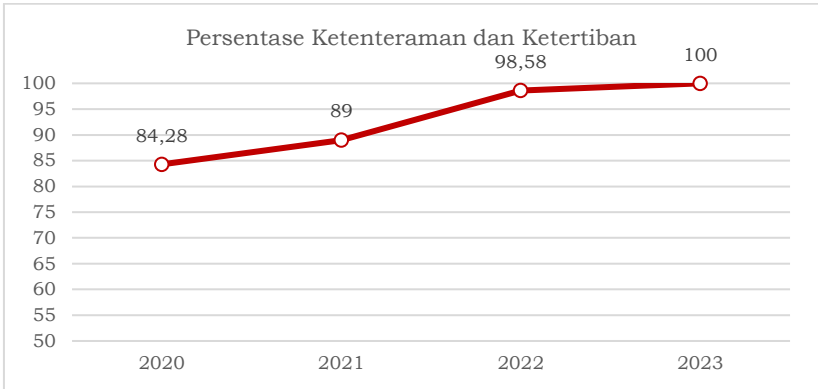


Gambar 2. 97
Indeks Demokrasi Provinsi Bali Tahun 2020-2023
Sumber: BPS Indonesia, 2025

Berdasarkan grafik diatas, indeks demokrasi Provinsi Bali menunjukan kondisi fluktuatif dengan tren meningkat untuk perhitungan metode baru tahun 2021-2023. Selain itu, indeks demokrasi di Provinsi Bali berada diatas angka nasional pada tahun 5 tahun terakhir, kecuali pada tahun 2021.

3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Rasa aman dan nyaman karena tingginya ketenteraman dan ketertiban di suatu kota merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong aktivitas baik di masyarakat. Ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) dapat dinilai melalui situasi dan kondisi di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur sesuai dengan wewenang dalam penegakan peraturan. Mutu ketenteraman dan ketertiban ini dapat dinilai melalui standar operasional prosedur Satpol PP, standar sarana prasarana Satpol PP, standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda atau Perkada. Ketenteraman dan ketertiban di Kota Denpasar dinilai berdasarkan data dari Satpol PP yang disajikan sebagai berikut.

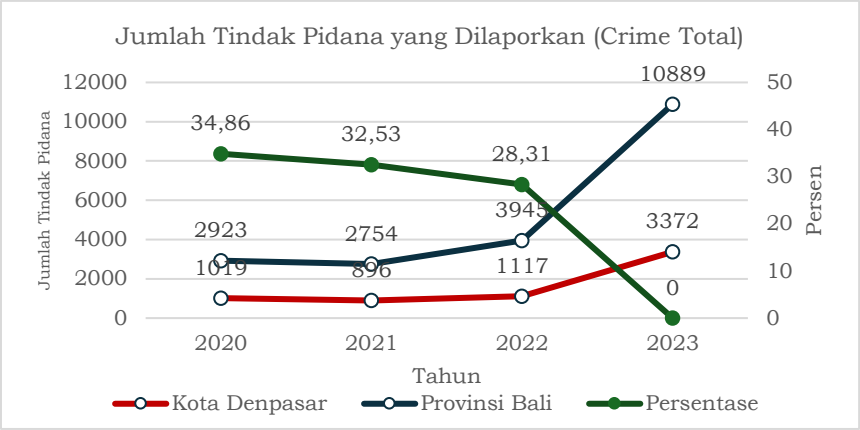


Gambar 2. 98
Grafik Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Kota Denpasar 2020-2023
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2023, persentase ketenteraman dan ketertiban di Kota Denpasar cenderung meningkat dan

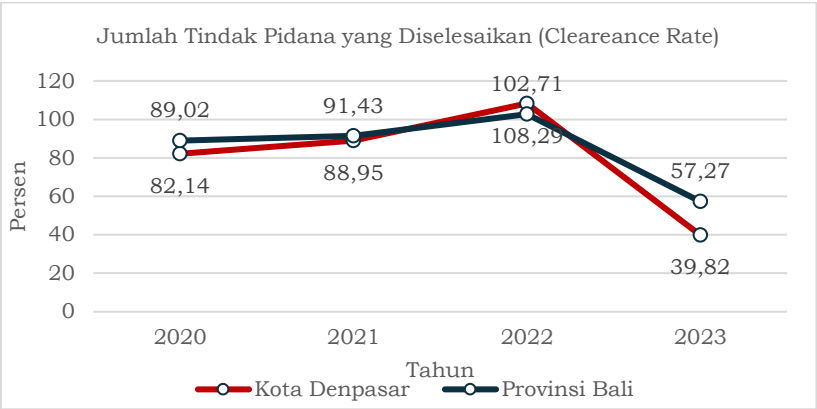
mencapai 100% pada tahun 2023. Angka ini perlu terus dipertahankan agar rasa aman dan nyaman terus terbentuk di masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan Statistik Kriminal Provinsi Bali, jumlah tindak pidana yang dilaporkan (*Crime Total*) pada tahun 2020-2023, Kota Denpasar menjadi kota dengan jumlah tindak pidana dengan persentase yang paling tinggi di Provinsi Bali. Grafik jumlah tindak Pidana tersebut disajikan sebagai berikut.



Gambar 2. 99
Grafik Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) pada Tahun 2020-2023
Sumber: Statistik kriminal Provinsi Bali 2022, 2024

Sementara itu, berdasarkan jumlah tindak pidana yang dilaporkan tersebut, persentase tindak pidana yang diselesaikan (*Cleareance Rate*) adalah sebagai berikut.



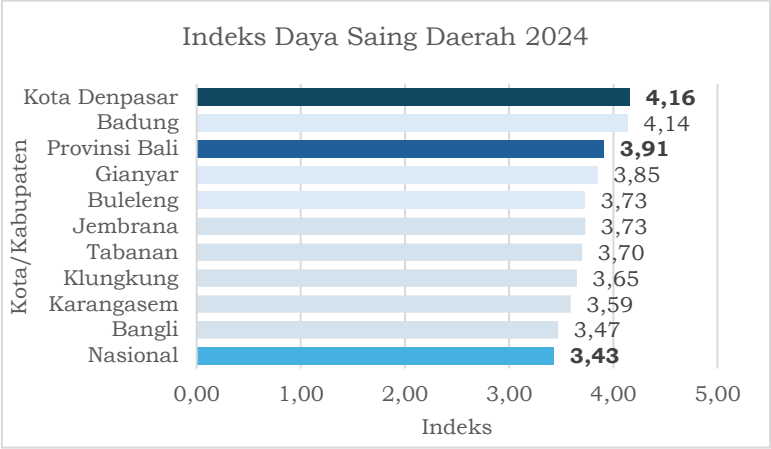
Gambar 2. 100
Grafik Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Clearance Rate*) pada Tahun 2020-2023
Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Bali 2022, 2024

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah salah satunya dapat ditinjau berdasarkan indeks daya saing daerah terhadap daerah lainnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 yang perhitungannya didasarkan pada 4 komponen, yaitu lingkungan pendukung, SDM, pasar, dan ekosistem inovasi. IDSD Kota Denpasar pada tahun 2024 sebesar 4,16 yang berada di atas IDSD Provinsi Bali (3,91) dan IDSD Nasional

(3,43) dengan peringkat ke-1 tertinggi. Perbandingan IDSD yang dimaksud ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 101
Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Bali 2024

Sumber: Dokumen Indeks Daya Saing Daerah 2024 (diolah)

Indeks Daya Saing Daerah ini terbagi ke dalam dua belas pilar yang dirincikan Pilar 1: Institusi; Pilar 2: Infrastruktur; Pilar 3: Adopsi TIK; Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro; Pilar 5: Kesehatan; Pilar 6: Keterampilan; Pilar 7: Pasar produk; Pilar 8: Pasar tenaga kerja; Pilar 9: Sistem keuangan; Pilar 10: Ukuran pasar; Pilar 11: Dinamisme bisnis; dan Pilar 12: Kapabilitas inovasi. Pilar daya saing Kota Denpasar yang paling unggul dibandingkan dengan kabupaten lainnya dan juga skor nasional adalah pilar institusi, pasar produk, sistem keuangan, dan dinamisme bisnis. Pada pilar adopsi TIK, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar Kota Denpasar memiliki nilai paling unggul dibandingkan kabupaten lainnya. Sementara itu, pilar daya saing yang memiliki nilai lebih rendah. Data perbandingan ini diperjelas pada tabel di bawah ini.

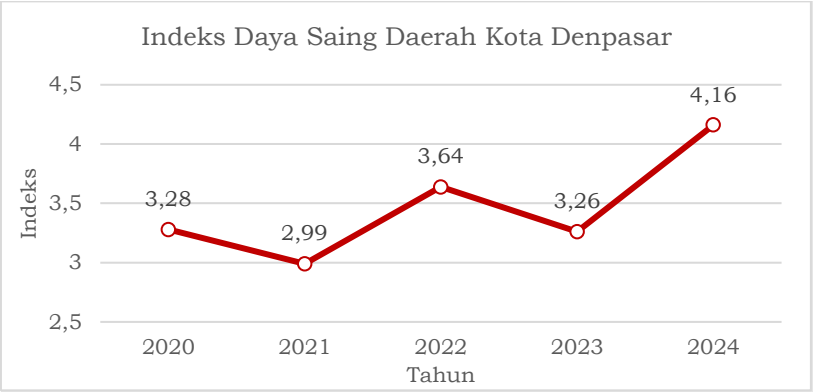
Tabel 2. 47
Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2024

Kabupaten /Kota	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	IDSD
Jembrana	4,79	3,81	4,45	3,54	4,02	4,29	3,20	3,77	3,03	4,08	3,60	2,23	3,73
Tabanan	4,77	3,85	4,68	3,07	4,13	4,30	3,13	3,37	3,00	4,30	3,44	2,42	3,70
Badung	4,85	3,73	4,90	3,36	4,24	4,27	4,21	4,01	3,52	4,67	3,66	4,30	4,14
Gianyar	4,73	3,45	4,68	3,75	4,13	4,30	3,21	3,50	3,22	4,39	4,36	2,53	3,85
Klungkung	4,82	3,70	4,36	3,67	3,94	4,47	2,88	2,74	3,63	3,88	3,57	2,08	3,65
Bangli	4,77	3,53	4,44	3,69	3,87	4,24	2,78	2,41	2,85	3,76	2,97	2,32	3,47
Karangase m	4,81	3,77	4,31	3,27	3,86	4,12	3,08	2,46	2,47	4,15	5,00	1,79	3,59
Buleleng	4,82	3,81	4,45	3,25	3,98	3,96	3,24	2,87	2,27	4,48	4,04	3,61	3,73
Kota Denpasar	4,57	3,78	4,98	3,28	4,23	4,24	3,08	4,16	4,60	4,68	3,35	4,18	4,16
Provinsi Bali	4,74	3,39	4,63	3,48	4,00	4,23	3,22	3,82	3,28	4,38	3,68	4,06	3,91
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43

Sumber: Dokumen Indeks Daya Saing Daerah 2024 (diolah)

Pada tahun 2020 hingga 2024, skor IDSD Kota Denpasar mengalami kondisi fluktuatif dengan kecenderungan tren meningkat. Skor terendah IDSD terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 2,99 dan tertinggi pada tahun 2024 dengan nilai 4,16. Kenaikan ini menunjukkan kondisi faktor-faktor

pendorong produktivitas di Kota Denpasar memiliki potensi pertumbuhan yang baik untuk meningkatkan daya saing suatu daerah. Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kota Denpasar pada setiap tahunnya diperjelas pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 102
Indeks Daya Saing Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024
Sumber: Satu Data Denpasar, 2025

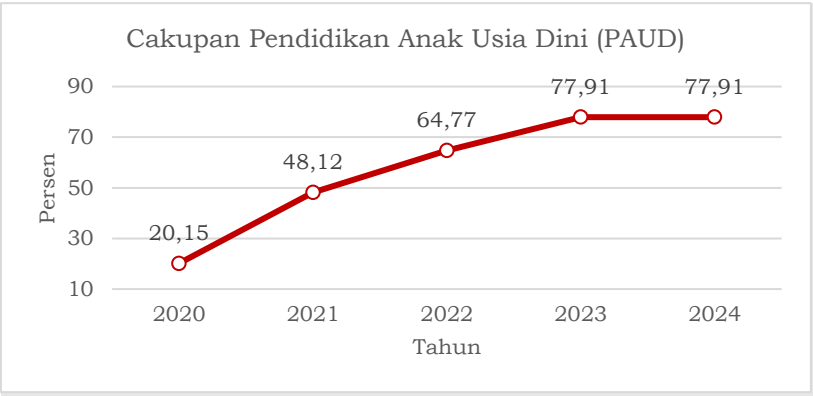
2.1.4.4 Kinerja setiap Urusan Pemerintah Daerah

1) Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A) Pendidikan

1. Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini

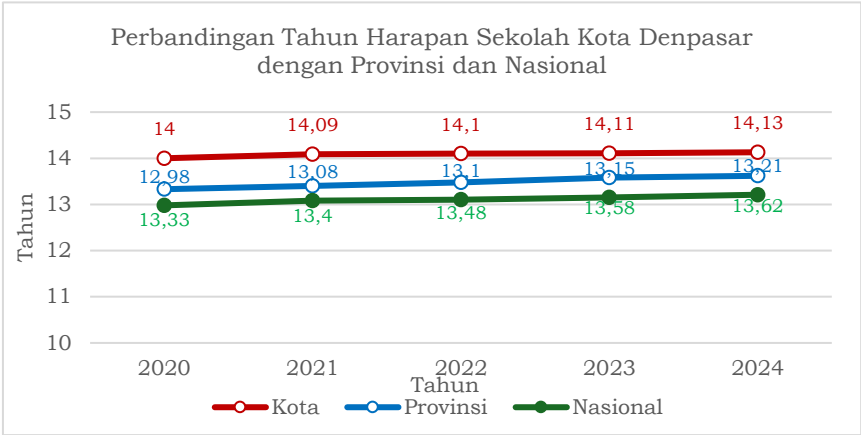
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pembinaan yang ditujukan bagi anak usia 3–6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Berikut merupakan persentase cakupan pelayanan PAUD di Kota Denpasar. Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Denpasar mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2020-2024. Namun, kenaikan yang terjadi masih tergolong rendah. Cakupan yang cukup rendah ini karena kurangnya aksesibilitas, kemampuan ekonomi, hingga keengganan orang tua.



Gambar 2. 103
Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024, 2025

2. **Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**

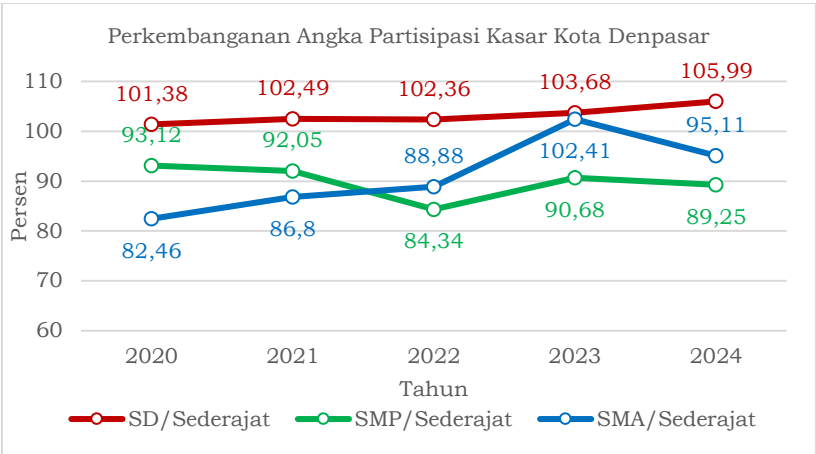
Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lama sekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa depan dalam satuan tahun. HLS merupakan gambaran harapan sekolah formal anak-anak berusia tujuh tahun dalam skala tahun tertentu. HLS ini merupakan gambaran relevan untuk melihat bagaimana perubahan pendidikan terjadi di berbagai daerah. Angka harapan lama sekolah di Kota Denpasar bergerak fluktuatif dan cenderung stagnan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Data berikut menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun yang masuk pada tahun-tahun tersebut di Kota Denpasar memiliki harapan lama sekolah di atas 12 tahun atau hingga menamatkan sekolah formal hingga jenjang SMA. Apabila dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Provinsi, AHS Kota Denpasar memiliki nilai yang melampaui Provinsi Bali dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa harapan sekolah di Kota Denpasar cenderung lebih baik.



Gambar 2. 104
Grafik Perbandingan Angka Harapan Sekolah Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS-RI dan BPS Kota Denpasar (diolah), 2025

3. **Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai rasio jumlah siswa yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibanding dengan jumlah penduduk yang berusia sesuai jenjang pendidikan yang sama. Jumlah siswa yang sedang bersekolah termasuk ke dalam penduduk yang bersekolah di luar usia jenjang pendidikan tersebut. APK dapat menjadi indikator penilaian dalam sektor pendidikan karena dapat menunjukkan seberapa besar partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

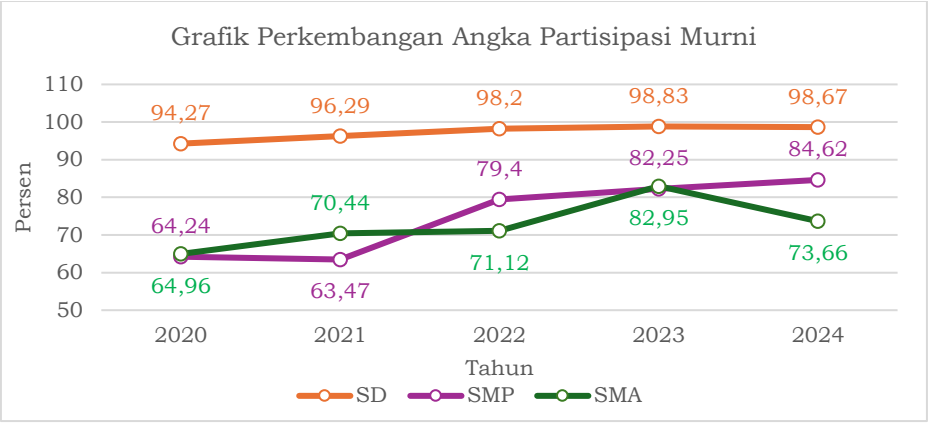


Gambar 2. 105
Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar 2024

Berdasarkan grafik di atas, APK Kota Denpasar cenderung fluktuatif bahkan mencapai hingga lebih dari 100. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat penduduk yang berada pada usia di luar jenjang pendidikan terkait, tetapi sedang sekolah pada jenjang tersebut. Kondisi ini diasumsikan terjadi karena berbagai faktor seperti tinggal kelas atau pun pendidikan non formal seperti paket A, B, dan C yang turut diperhitungkan. Pada tahun 2020 hingga 2024, nilai APK SD cenderung melebihi nilai 100 yang mana hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat dapat mengenyam bangku sekolah dasar. Sementara itu, nilai APK SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat menunjukkan nilai di bawah 100 yang artinya daya serap sistem pendidikan perlu dinaikkan karena masih ada penduduk yang tidak berhasil mengenyam bangku sekolah SMP/ sederajat atau SMA/ sederajat.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

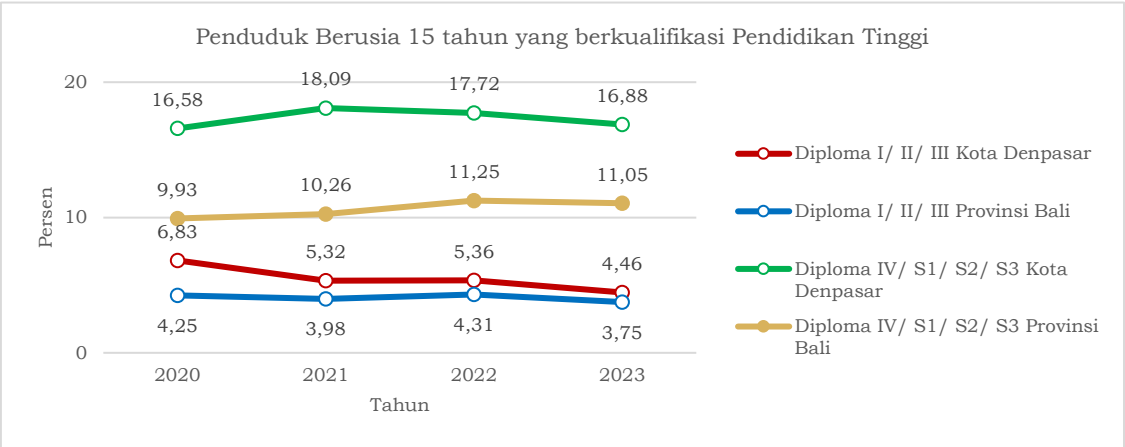
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan rasio jumlah siswa berusia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak 2020, APM Kota Denpasar belum menyentuh 100 di semua jenjang pendidikan baik SD/ Sederajat, SMP/ Sederajat, atau SMA/ Sederajat. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat penduduk yang berada pada usia jenjang pendidikan terkait tidak mengenyam pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, daya serap pendidikan Kota Denpasar perlu dinaikkan melalui berbagai pendekatan dan upaya agar seluruh masyarakat dapat mengenyam bangku pendidikan.



Gambar 2. 106
Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar (diolah), 2025

5. Penduduk Berusia 15 Tahun yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi atau ditamatkan dari perguruan tinggi menggambarkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan berencana suatu daerah. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, rata-rata persentase penduduk berkualifikasi pendidikan Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Data tersebut disajikan ke dalam grafik berikut.



Gambar 2. 107
Grafik Perbandingan Persentase Angka Melek Huruf Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020 – 2023
Sumber: BPS-RI dan BPS Kota Denpasar (diolah), 2025

6. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi semua anak yang berada pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur sesuai. Angka ini menunjukkan seberapa banyak partisipasi penduduk untuk bersekolah berdasarkan umur. Kota Denpasar memiliki angka nilai partisipasi yang cukup beragam dengan partisipasi terencah pada kelompok usia 19-24 tahun. Data tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 48 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Umur Kota Denpasar								
Tahun	7-12 Tahun Kota Denpasar	7-12 Tahun Provinsi Bali	13-14 Tahun Kota Denpasar	13-14 Tahun Provinsi Bali	16-18 Tahun Kota Denpasar	16-18 Tahun Provinsi Bali	19-24 Tahun Kota Denpasar	19-24 Tahun Provinsi Bali
2021	99,84	99,7	98,98	98,22	80,4	83,96	39,53	28,95

Tahun	7-12 Tahun Kota Denpasar	7-12 Tahun Provinsi Bali	13-14 Tahun Kota Denpasar	13-14 Tahun Provinsi Bali	16-18 Tahun Kota Denpasar	16-18 Tahun Provinsi Bali	19-24 Tahun Kota Denpasar	19-24 Tahun Provinsi Bali
2022	99,37	99,55	98,84	97,85	80,8	83,84	39,92	30,18
2023	99,12	99,61	98,5	97,95	83,63	84,73	41,06	34,31
2024	99,18	99,65	98,79	98,79	82,29	85,17	41,24	35,39

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045

7. Angka Literasi/Numerasi

Literasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan menulis dan membaca, serta pengetahuan atau keterampilan dalam aktivitas atau bidang tertentu. Pemerintah mengklasifikasikan literasi menjadi enam literasi dasar, yaitu literasi baca-tulis-hitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya, serta literasi kewarganegaraan. Ditinjau dari aktivitas literasinya, Provinsi Bali tergolong ke dalam level aktivitas literasi sedang (angka indeks antara 40,01–60,00) dengan indeks literasi sebesar 44,58. Sementara itu, Kota Denpasar memiliki rata-rata kemampuan literasi dan numerasi untuk tingkat SD – SMP yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bali, dengan detail seperti di tabel berikut.

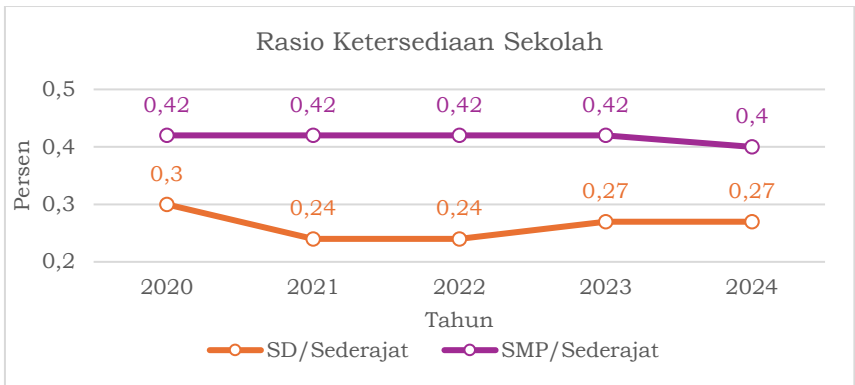
Tabel 2. 49
Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD SMP Kota Denpasar Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional
Denpasar	62,35	44,79	75,61	61,18

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045

8. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah merupakan perbandingan jumlah sekolah dengan 10.000 penduduk usia sekolah yang mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung penduduk usia sekolah pada jenjang yang berkaitan. Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang Sekolah Dasar/Sederajat dihitung berdasarkan jumlah penduduk berusia 7–12 tahun, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat diperhitungkan berdasarkan penduduk berusia 13–15 tahun. Berikut merupakan grafik rasio ketersediaan sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Denpasar.



Gambar 2. 108
Rasio Ketersediaan Sekolah Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, rasio ketersediaan sekolah di Kota Denpasar cenderung statis (semakin tinggi angka rasio semakin baik). Pada tahun 2024, rasio ketersediaan sekolah Kota Denpasar untuk jenjang SD/Sederajat adalah 0,27, SMP/Sederajat adalah 0,4. Rasio ketersediaan sekolah untuk SD/Sederajat mengalami penurunan tahun 2020-2024. Namun nilai ini belum dapat menggambarkan bagaimana ketersediaan sekolah dapat tercukupi karena belum diperhitungkan secara spesifik berdasarkan jumlah kelas.

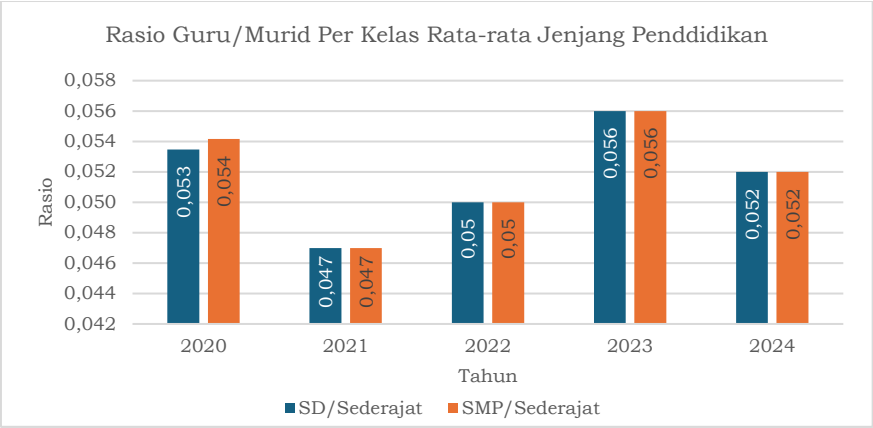
9. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru per jumlah murid di suatu sekolah atau jenjang pendidikan. Semakin banyak murid dibanding dengan 1 orang guru, maka semakin rendah efektivitas proses belajar karena tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid semakin berkurang sehingga mutu pengajaran akan menurun. Berikut merupakan rasio guru terhadap murid untuk setiap jenjang pendidikan di Kota Denpasar.

Tabel 2. 50
Rasio Guru/Murid sekolah Jenjang Pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar SD/MI	1:20	1:18	1:20	1:18	1:19
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar SMP/MTs	1:20	1:18	1:20	1:18	1:19

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

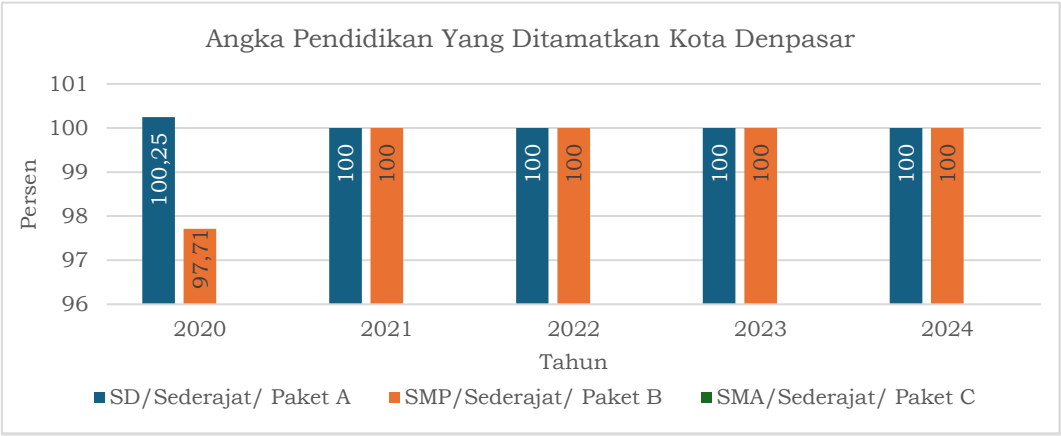


Gambar 2. 109
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Jenjang Pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat Tahun 2020–2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

10. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang ditandai oleh adanya sertifikat/ijazah. Jenjang Pendidikan yang dimaksud adalah SD/Sederajat dan SMP/Sederajat. Berikut merupakan angka pendidikan yang ditamatkan Kota Denpasar. Berdasarkan grafik di atas, angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Denpasar cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun, untuk SD/Sederajat/Paket A dan juga SMP/Sederajat/Paket B, nilai tersebut masih melampaui target Disdikpora Kota Denpasar yakni senilai 100%.

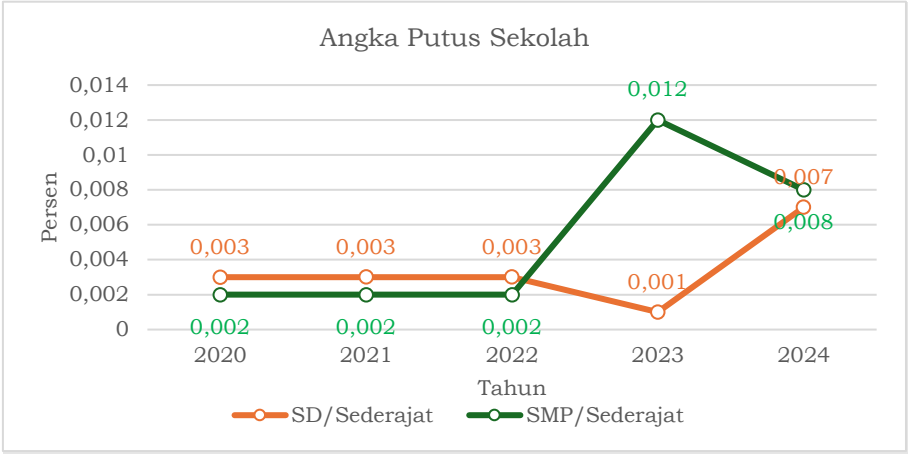


Gambar 2. 110
Grafik Angka Pendidikan yang ditamatkan Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2023

11. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) merupakan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. Angka putus sekolah di Kota Denpasar cenderung fluktuatif setiap tahunnya. APS pada jenjang SD/Sederajat di Kota Denpasar pada tahun 2020 menunjukkan nilai 0,03 kemudian turun menjadi 0,001 di tahun 2023. Angka ini di atas target Disdikpora Kota Denpasar yakni di atas 0,001 meskipun kemudian juga mengalami kenaikan di tahun 2024 menjadi 0,007. APS pada jenjang SMP/Sederajat di Kota Denpasar menunjukkan nilai

0,008 pada tahun 2024. Angka putus sekolah setiap jenjang pendidikan di Kota Denpasar disajikan dalam grafik berikut ini.



Gambar 2. 111
Angka Putus Sekolah Kota Denpasar Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2025

12. Angka Kelulusan dan Melanjutkan

Angka Kelulusan (AK) merupakan jumlah lulusan siswa pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun sebelumnya. Angka kelulusan Kota Denpasar pada setiap jenjang pendidikan sejak tahun 2020 cenderung tetap.

Sementara itu, angka melanjutkan merupakan angka yang menggambarkan banyaknya siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka ini dihitung dengan membandingkan siswa baru di kelas 7 atau kelas 10 dengan jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya dan dinyatakan dengan persentase. Angka Melanjutkan (AM) Kota Denpasar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan nilai 100% baik untuk melanjutkan ke jenjang SMP/Sederajat atau pun SMA/Sederajat. Persentase angka kelulusan dan melanjutkan Kota Denpasar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 51					
Persentase Angka Kelulusan dan Melanjutkan Kota Denpasar Tahun 2020–2024					
Angka Kelulusan (AL) dan Melanjutkan (AM)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(AL) SD/Sederajat	100	100	100	100	100
(AL) SMP/MTS	100	100	100	100	100
AM dari SD/Sederajat ke SMP Sederajat	100	100	100	100	100
AM dari SMP/Sederajat ke SMA Sederajat	100	100	100	100	-

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

13. Fasilitas Pendidikan

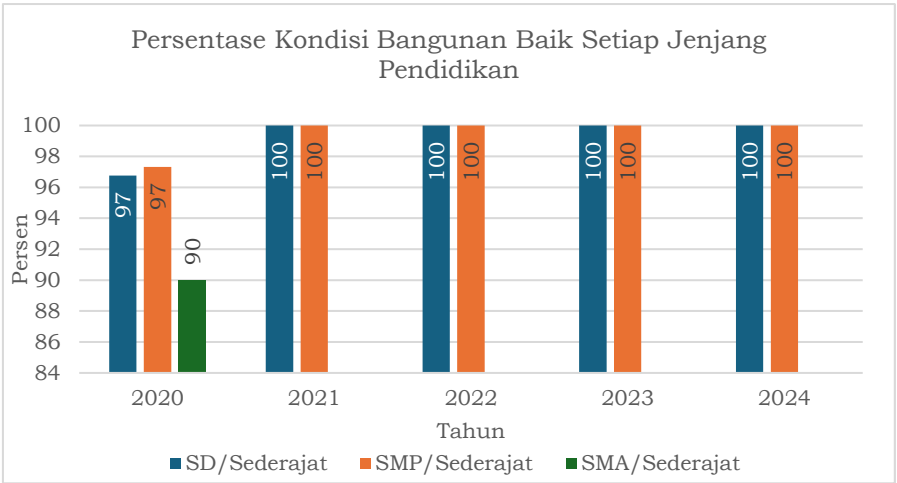
Kondisi fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas pendidikan yang mendukung dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 52
Data Kondisi Bangunan Ruang Kelas dalam Kondisi Baik dan Rusak Ringan setiap Jenjang Pendidikan

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
SD/MI	2408	2408	2520
SMP/MT	1093	1093	1109
SMA/SMK/ MA	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

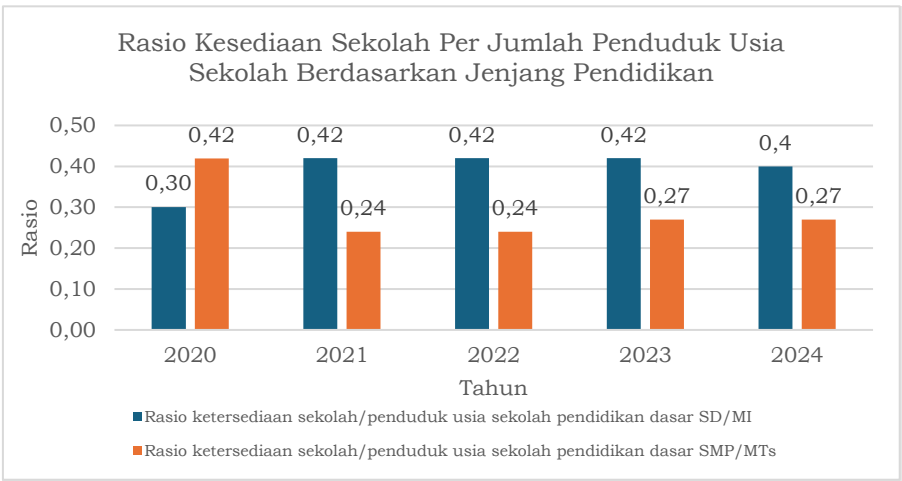
Jumlah tersebut merupakan 90 hingga 100 persen dari total semua bangunan pada setiap jenjang pendidikan. Secara rinci, data tersebut disajikan dalam grafik berikut ini.



Gambar 2. 112
Grafik Kondisi Bangunan Baik Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Bangunan-bangunan tersebut digunakan untuk memwadah seluruh penduduk dengan usia sekolah sesuai pendidikan. Rasio kesediaan sekolah per jumlah penduduk usia sekolah berdasarkan jenjang pendidikan disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2. 113
Rasio Ketersediaan Sekolah Per Jumlah Penduduk Usia Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2020–2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

14. Guru yang Tersertifikasi

Guru yang tersertifikasi merupakan guru yang telah memenuhi standar kelayakan profesi melalui proses sertifikasi. Sertifikasi guru

merupakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berdasarkan data yang tersedia dan paparan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Denpasar, jumlah guru yang tersertifikasi cenderung fluktuatif tetapi relatif berkurang. Kondisi ini disebabkan karena beberapa perubahan sistem dalam penerimaan kepegawaian. Berikut merupakan tabel jumlah guru yang tersertifikasi.

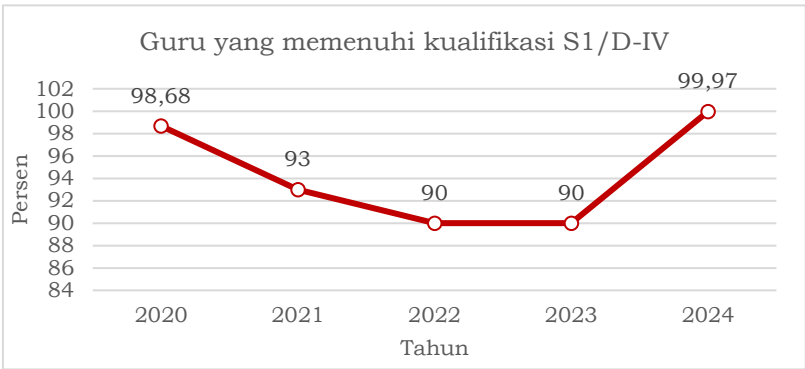
Tabel 2. 53
Jumlah Guru (Jiwa) yang Tersertifikasi Kota Denpasar Tahun 2020-2022

Tingkat Pendidikan	Tahun		
	2020	2021	2022
PAUD	N/A	N/A	N/A
SD/Sederajat	1537	1594	1681
SMP/Sederajat	637	598	630
SMA	N/A	N/A	N/A
SMK	N/A	N/A	N/A
SLB	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

15. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 adalah guru yang telah menyelesaikan pendidikan formal pada tingkat sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4). Dengan kualifikasi S1/D4, guru dipercaya dapat memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa serta memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke pendidikan yang baik dan merata. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV disajikan dalam grafik berikut ini.



Gambar 2. 114
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Secara keseluruhan, guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Denpasar bergerak secara fluktuatif. Namun pada tahun 2024, sekitar 99,97% guru yang mengajar merupakan guru yang memenuhi kualifikasi.

16. Pendidikan Dasar

Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) merupakan jumlah warga negara yang mendapat pendidikan pada usia wajib belajar. Jumlah ini menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu dan bervariasi tergantung wilayah dan tahun terukur. Di Kota Denpasar, angka ini juga menunjukkan nilai yang fluktuatif.

Tabel 2. 54
Jumlah Warga Negara Usia 7–15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTS) (Jiwa)

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jiwa	127.960	124.712	120.388	117.836

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Denpasar, 2023

17. Pendidikan Kesetaraan

Jumlah warga negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan menunjukkan jumlah warga negara yang belum mendapat pendidikan yang sesuai. Tingkat pendidikan yang rendah atau kurangnya akses terhadap pendidikan dapat menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat. Beberapa dampak kurangnya pendidikan antara lain adalah meningkatnya tingkat kriminalitas, kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Maka dari itu, perlu adanya kemudahan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan juga penyetaraan bagi masyarakat yang telah tertinggal dalam hal pendidikan. Jumlah warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kota Denpasar ditunjukkan dalam grafik berikut.

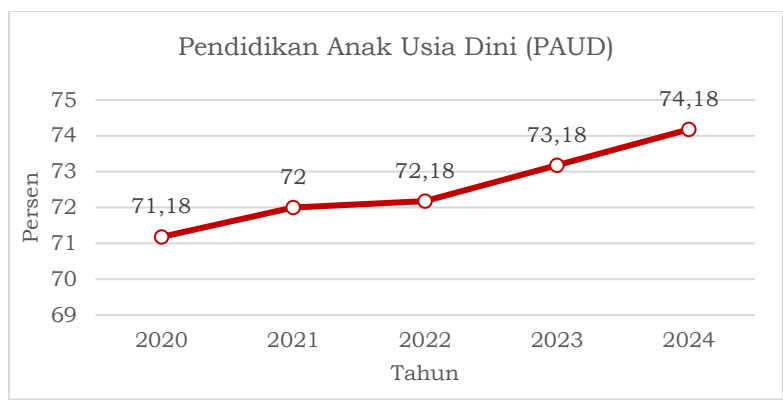
Tabel 2. 55
Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Jiwa)

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jiwa	30	21	27	1.641

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Denpasar, 2024

18. Pendidikan Anak Usia Dini

Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena dapat meningkatkan karakter dan kemampuan anak, keterampilan sosial, hingga kemampuan kognitif anak agar memiliki dasar yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Partisipasi pendidikan PAUD perlu ditingkatkan di seluruh wilayah termasuk di Kota Denpasar.



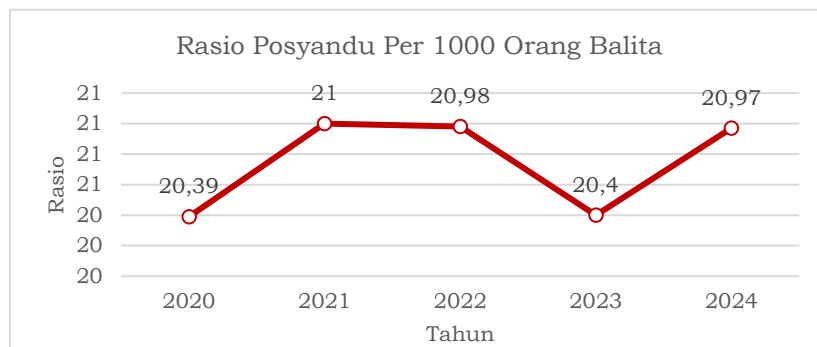
Gambar 2. 115
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Denpasar 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

B) Kesehatan

1. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

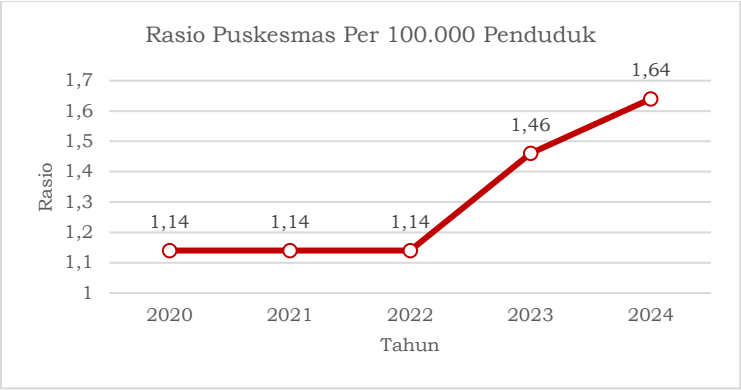
Rasio posyandu per satuan balita merupakan perbandingan jumlah posyandu untuk 1000 orang balita di suatu layanan posyandu. Berdasarkan Departemen Kesehatan RI (2016), satu posyandu idealnya melayani sekitar 100 orang balita. Pada tahun 2024, rasio tersebut memiliki nilai 20,97. Angka ini merupakan kondisi yang ideal. Selain kuantitas, kualitas pelayanan posyandu di Kota Denpasar perlu dipastikan diberikan secara optimal. Berikut merupakan grafik rasio posyandu per satuan balita di Kota Denpasar.



Gambar 2. 116
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

2. Rasio Puskesmas Per Satuan penduduk

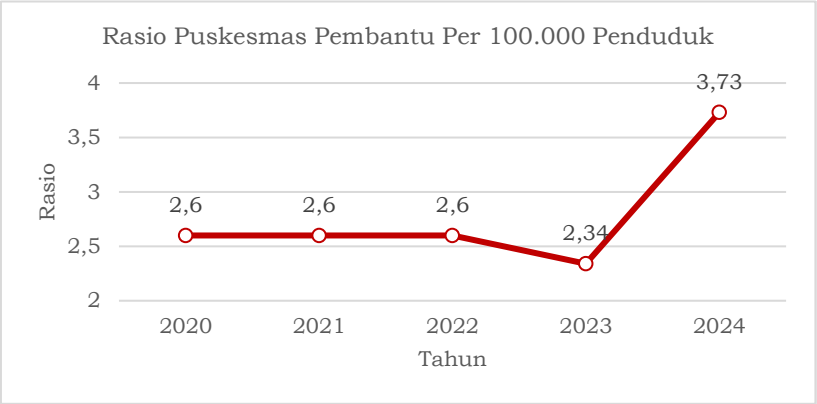
Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat di tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif. Rasio puskesmas per satuan penduduk merupakan kesediaan layanan kesehatan untuk setiap 100.000 orang penduduk. Berdasarkan tren yang terjadi sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, rasio puskesmas per 100.000 penduduk cenderung mengalami kenaikan. Rasio puskesmas per satuan penduduk disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2. 117
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024

3. Rasio Puskesmas Pembantu Per 100.000 Penduduk

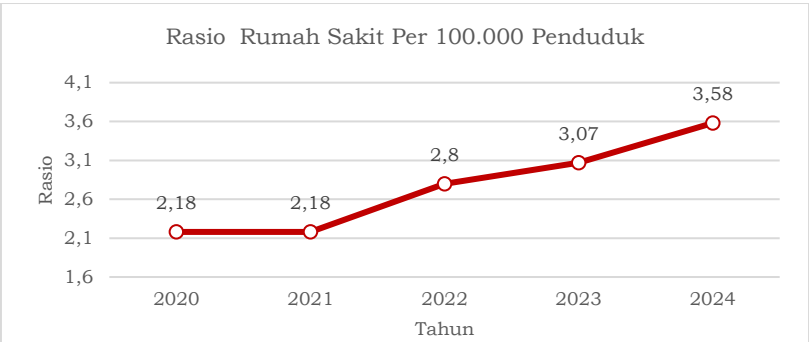
Puskesmas Pembantu (Pustu) berperan penting dalam peningkatan pelayanan kesehatan suatu wilayah kerja puskesmas. Rasio Pustu per satuan penduduk di Kota Denpasar dihitung berdasarkan jumlah total puskesmas per 100.000 penduduk. Berdasarkan data yang ada, tren yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2024, rasio puskesmas pembantu menurun setiap tahunnya. Rasio ini meningkat kembali hingga tahun 2024 mencapai nilai 3,72. Rasio posyandu pembantu per 100.000 penduduk disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2. 118
Rasio Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk (100.000 penduduk) pada tahun 2020-2024 Kota Denpasar
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2024, 2025

4. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah kesediaan rumah sakit untuk setiap 1000 penduduk. Berdasarkan data yang tersedia, rasio RS per satuan penduduk cukup fluktuatif meskipun cenderung mengalami kenaikan hingga tahun 2020 yang kemudian menurun hingga tahun 2021 dan kemudian mengalami kenaikan hingga tahun 2024.



Gambar 2. 119

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar 2020-2024, 2025

5. Rasio Dokter Per Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan jumlah kesediaan dokter untuk setiap 100.000 orang penduduk. Berikut merupakan rasio dokter di Kota Denpasar. Pada Tahun 2024, Kota Denpasar memiliki rasio dokter umum sejumlah 68,82 per 100.000 penduduk dan dokter spesialis sejumlah 151 per 100.000 penduduk. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui keputusan menteri menetapkan rasio dokter per 100.000 penduduk pada tahun 2025 adalah sebanyak 50 orang atau 1 dokter melayani 2000 orang. Berdasarkan target tersebut, kondisi rasio dokter di Kota Denpasar menunjukkan bahwa jumlah dokter umum di Kota Denpasar berada pada perbandingan yang ideal.

Tabel 2. 56

Rasio Tenaga Dokter per Jumlah Penduduk di Kota Denpasar 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Dokter Umum per Jumlah Penduduk	41	41	41,08	42,04	68,82
Rasio Dokter Spesialis per Jumlah Penduduk	139,1	-	-	151	151

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024 dan Profil Kesehatan Kota Denpasar 2020-2024, 2025

6. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk menunjukkan jumlah kesediaan tenaga kesediaan untuk setiap 1000 orang penduduk. Berikut merupakan rasio tenaga kesehatan di Kota Denpasar per 100.000 penduduk di Kota Denpasar. Berdasarkan sasaran strategis yang diuraikan dalam Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 pada tahun 2004, tahun 2019 diharapkan kesediaan perawat adalah sejumlah 158 perawat per 100.000 penduduk dan 75 bidan per 100.000 penduduk. Hal tersebut menunjukan rasio tersebut mencukupi standar yang diharapkan tersebut.

Tabel 2. 57

Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk di Kota Denpasar 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Tenaga Kesehatan per Jumlah Penduduk	-	537	537	561	1004

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

7. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani merupakan cakupan penanganan pada kasus-kasus komplikasi seperti kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan bayi atau kegawatdaruratan dalam kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Cakupan ini dihitung dengan membagi jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali dengan 100%.

Tabel 2. 58
Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	88,50	85,90	93,15	97,85	112,91

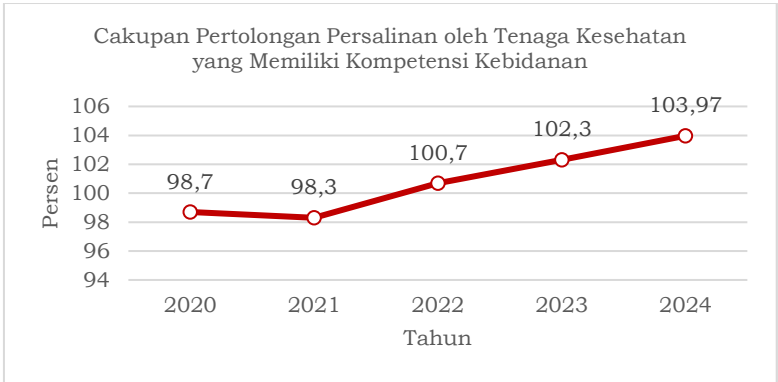
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar 2020-2024, 2025

Berdasarkan data Dinas Kesehatan pada tahun 2020-2024, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Denpasar pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan dan mencapai angka lebih dari 100 persen di tahun 2024. Artinya, seluruh ibu dengan komplikasi kebidanan di Kota Denpasar telah berhasil ditangani dengan definitif.

8. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan merupakan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan merujuk pada jumlah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dalam suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dihitung dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali dengan 100%.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan pada tahun 2024, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Denpasar pada tahun 2022-2024 menunjukkan nilai 100%. Artinya, seluruh sasaran ibu bersalin berhasil ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Angka ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan nilai 98,7% dan 2021 dengan nilai 88,25%. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tersebut disajikan ke dalam grafik berikut.



Gambar 2. 120
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Denpasar 2020–2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar 2021-2024, 2025

9. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* merupakan indikator yang menunjukkan persentase bayi berusia 0–11 bulan di suatu desa atau kelurahan yang telah menerima imunisasi dasar secara lengkap. Target cakupan desa/kelurahan UCI adalah minimal mencapai 80% imunisasi dasar lengkap bayi. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* dihitung dengan membagi Jumlah desa/kelurahan UCI dengan jumlah seluruh desa/kelurahan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2020–2024, cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Denpasar mencakup 100%. Angka ini meunjukkan bahwa seluruh desa/kelurahan di Kota Denpasar telah mendapat *Universal Child Immunization (UCI)*.

10. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dibagi dengan 100%.

Berdasarkan Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2020–2024, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kota Denpasar mencakup 100%. Angka ini menunjukkan bahwa seluruh balita gizi buruk di Kota Denpasar mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan.

11. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

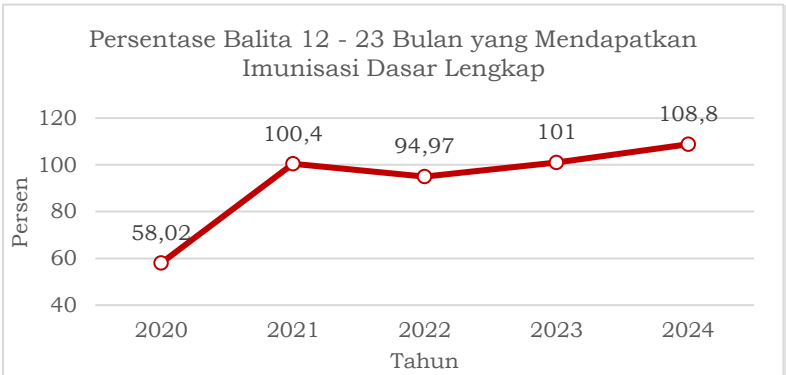
Demam berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus *Dengue* dan ditularkan melalui gigitan nyamuk khususnya nyamuk *aedes aegypti*. Penyakit ini dapat menyerang anak-anak dan orang dewasa dan banyak ditemukan di daerah beriklim tropis. Penting bagi pemerintah untuk mengendalikan dan menangani penderita penyakit ini di kalangan masyarakat. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD dapat dihitung dengan membagi jumlah penderita DBD yang ditangani

sesuai SOP dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan. Indikator yang digunakan dalam memantau dan mengendalikan penyakit DBD adalah *incident rate* atau angka kesakitan dan *case fatality rate* atau proporsi kematian akibat kasus DBD.

Berdasarkan Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2020–2024 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Denpasar telah mencapai 100% sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa seluruh penderita DBD telah ditangani sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

12. Persentase Balita 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi dasar lengkap adalah rangkaian imunisasi yang diberikan pada bayi sejak lahir hingga 11 bulan. Imunisasi dasar lengkap sangat penting bagi anak karena memberikan perlindungan terhadap penyakit menular yang berbahaya, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit dan komplikasi, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup, dan menjaga kesehatan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data 4 tahun terakhir, persentase jumlah balita berusia 12–23 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap mengalami kenaikan. Meskipun demikian, angka ini baru mencapai nilai tertinggi 79,17% pada tahun 2022 dan masih berada di bawah target 100% imunisasi dasar lengkap balita 12–13 bulan.



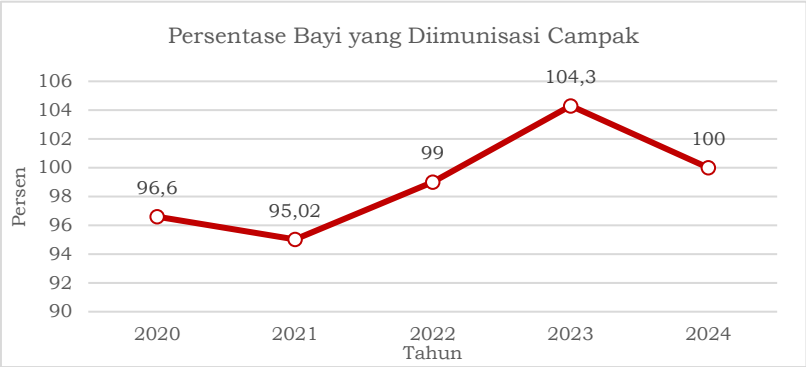
Gambar 2. 121
Persentase Balita 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap Kota Denpasar 2020–2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar 2020-2024, 2025

13. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

World Health Organization (WHO) mendefinisikan cakupan vaksinasi campak sebagai persentase anak usia 1 tahun yang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin yang telah mengandung campak dalam suatu populasi. Imunisasi campak merupakan program imunisasi yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Imunisasi ini diberikan kepada bayi sejak lahir hingga usia 11 bulan. Berdasarkan data tersebut, persentase anak 1 tahun yang diimunisasi campak cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023, persentase bayi yang diimunisasi campak menyentuh 104,3% di mana nilai ini berada di atas target nasional 95%. Kemudian pada

tahun 2024, nilai tersebut turun menjadi 100%. Meskipun terjadi penurunan, nilai persentase bayi tersebut tetap berada pada nilai 100%.



Gambar 2. 122
Grafik Persentase Bayi yang Diimunisasi Campak Tahun 2020–2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar 2020-2024, 2025

14. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Usia <15 Tahun

Acute Flaccid Paralysis (AFP) adalah sindrom klinis yang ditandai dengan kelemahan atau kelumpuhan mendadak pada satu atau lebih anggota badan yang disebabkan oleh berbagai agen infeksius dan non-infeksius, bukan disebabkan karena ruda paksa. Penyebab paling umum dari AFP adalah infeksi virus polio. Kementerian Kesehatan Non Polio AFP per 100.000 penduduk usia <15 tahun adalah indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kasus *Acute Flaccid Paralysis (AFP)* yang bukan disebabkan oleh virus polio pada populasi usia di bawah 15 tahun. Sejak tahun 2006, negara-negara di regional asia tenggara (SEARO) menyepakati agar setiap negara bisa mencapai non polio AFP *rate* maksimal 2/100.000 anak usia <15 tahun.

Non polio *Acute Flaccid Paralysis (AFP)* penduduk usia <15 tahun di Kota Denpasar bergerak fluktuatif setiap tahunnya. Nilai ini sudah di atas target indikator kinerja Kementerian Kesehatan 2/100.000 per tahun. Hal tersebut disebabkan karena kasus AFP measih menemukan kesulitan dalam penemuan kasus di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, RSBM, RSUD, WANGAYA, BROS, ataupun Puri Bunda sesuai dengan definisi operasional kasus.

Tabel 2. 59
Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Usia <15 Tahun Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Per 100.000 penduduk < 15 tahun	0,45	2,7	>= 2	>= 2	>= 2

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar 2020-2024, 2025

15. Cakupan Balita Penderita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia merupakan peradangan atau infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan jamur. Faktor risiko penyebab pneumonia adalah tidak terpenuhinya ASI eksklusif, berat badan lahir rendah, belum imunisasi lengkap, hingga polusi udara di ruang tertutup dan

rumah padat. Menurut Kementerian Kesehatan Negara Republik Indonesia, pneumonia menempati peringkat kedua penyebab kematian balita di Indonesia setelah persalinan preterm (prematur) dengan prevalensi 15,5% (Kemenkes RI, 2020).

Berdasarkan data yang tersedia, cakupan penanganan pneumonia yang ditangan di Kota Denpasar telah mencapai 100% sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa seluruh balita penderita Pneumonia telah ditangani sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

16. Persentase Balita Diberikan Tatalaksana Standar

Tatalaksana standar adalah suatu prosedur pengobatan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para ahli kesehatan untuk mengatasi suatu kondisi kesehatan tertentu. Dalam hal pneumonia pada balita, tatalaksana standar adalah pengobatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan mengidentifikasi keluhan batuk dan atau kesulitan bernafas yang berkunjung ke sarana kesehatan.

Berdasarkan data dinas kesehatan tahun 2023, persentase balita yang diberikan tatalaksana standar Kota Denpasar pada tahun 2019 hingga tahun 2023 telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan kesehatan di Kota Denpasar telah optimal dalam hal penerapan tatalaksana standar.

17. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis

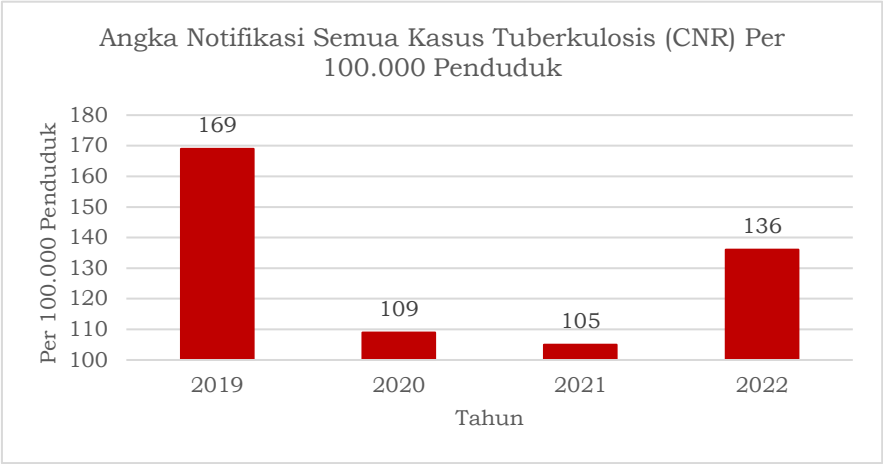
a. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB *Mycobacterium Tuberculosis*. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Tuberkulosis (TBC) dengan pemeriksaan Bakteri Tahan Asam Positif (BTA+) merupakan persentase jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai dengan standar kesehatan. Berdasarkan Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kota Denpasar pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mencapai 100%. Angka ini stabil dan berhasil mencapai target SPM 100% dan juga target pemerintah Kota Denpasar.

b. Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis (CNR)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/755/2019, angka notifikasi semua kasus tuberkulosis di Indonesia dihitung sebagai jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu per 100.000 penduduk. Angka ini ditargetkan mengalami penurunan dalam hal jumlah kasus tapi ditargetkan agar seluruh kasus dapat dilaporkan dan ditangani. Semakin rendah jumlah kasus tetapi semakin tinggi pelaporan dan pengobatan, maka kualitas kesehatan masyarakat dapat dinyatakan semakin baik. Angka notifikasi semua kasus

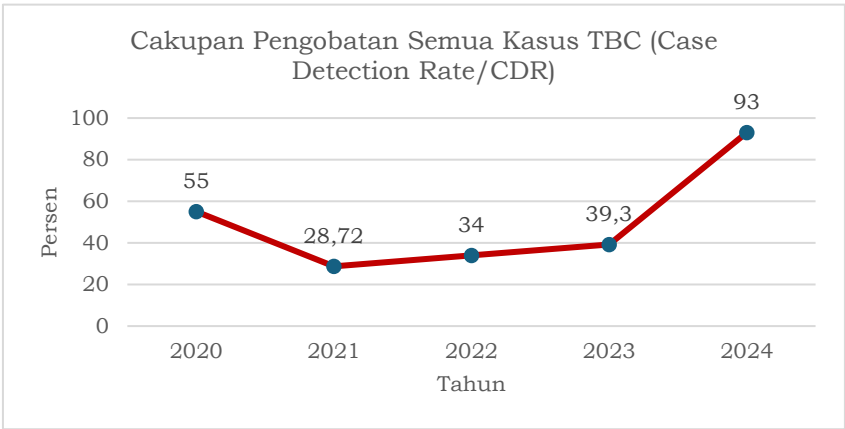
tuberkulosis di Kota Denpasar bergerak secara fluktuatif pada tahun 2019-2022 dan disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2. 123
Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis (CNR) Per 100.000 Penduduk Kota Denpasar 2019–2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023

c. Cakupan Pengobatan Semua Kasus TBC (*Case Detection Rate/CDR*)

Cakupan pengobatan semua kasus tuberkulosis (*Case Detector Rate/CDR*) adalah persentase jumlah kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis (insiden) per 100.000 penduduk yang ada. Cakupan pengobatan semua kasus TBC (CDR) di Kota Denpasar diinformasikan dalam grafik berikut. Hal ini menunjukkan capaian pada tahun 2021-2023 masih berada dibawah target pembangunan Kota Denpasar, yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut disebabkan karena belum maksimalnya pelaksanaan skrining TBC, investigasi kontak, serta masih kurangnya keterlibatan faskes dalam penemuan kasus TBC terutama pada faskes swasta. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus terutama dalam penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan dalam mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif.

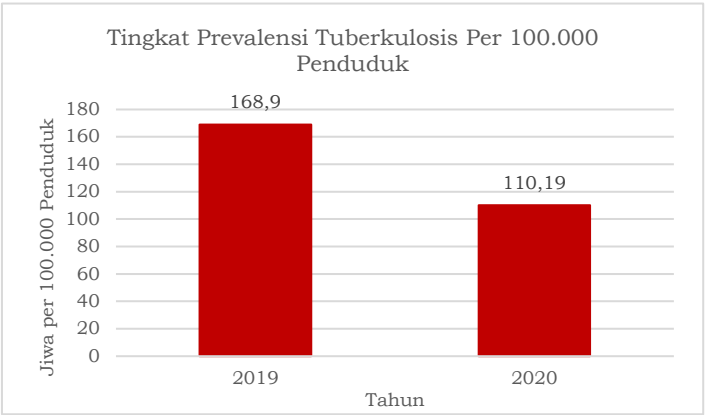


Gambar 2. 124
Cakupan Pengobatan Semua Kasus TBC (Case Detection Rate/CDR) Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar 2020-2024, 2025

d. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis

Tingkat Prevalensi Tuberkulosis merupakan tingkat penderita pada kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk. Tingkat prevalensi tuberkulosis

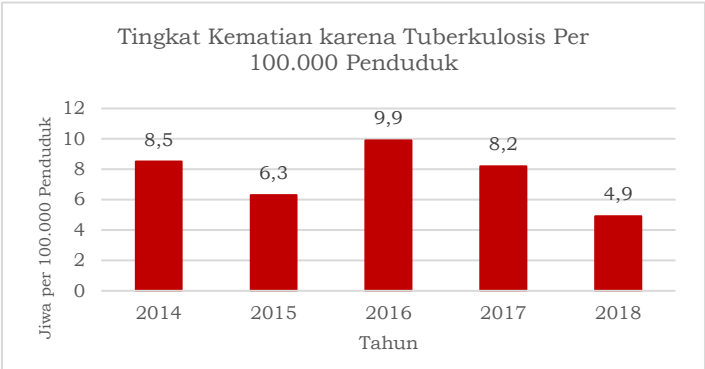
di Kota Denpasar pada tahun 2014 hingga tahun 2020 cenderung fluktuatif. Nilai terendah adalah pada tahun 2020 dengan nilai 110,19, angka ini berada di bawah 245 yang merupakan target RPJMN 2019.



Gambar 2. 125
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Kota Denpasar Tahun 2019–2020
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2023

e. Tingkat Kematian karena Tuberkulosis

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (TBC) adalah jumlah kasus kematian yang disebabkan oleh TBC dalam suatu populasi dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan laporan Tuberkulosis (TBC) Global dan Indonesia 2022 yang diterbitkan oleh Yayasan KNCV Indonesia, tingkat kematian akibat TBC di Indonesia mencapai 150.000 kasus pada tahun 2021, atau setidaknya 1 orang meninggal setiap 4 menit (WHO, 2022). Tingkat kematian karena tuberkulosis di Kota Denpasar pada tahun 2014 hingga tahun 2018 cenderung fluktuatif, tetapi angka ini menjadi angka terendah dengan nilai 4,8 per 100.000 penduduk. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, pemerintah menargetkan untuk bisa mengeliminasi TBC pada tahun 2030 dengan mencapai rata-rata maksimal 6 per 100.000 penduduk. Meskipun Kota Denpasar telah mencapai target tersebut, Kota Denpasar perlu mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kesehatan agar eliminasi TBC pada tahun 2030 dapat terlaksana.



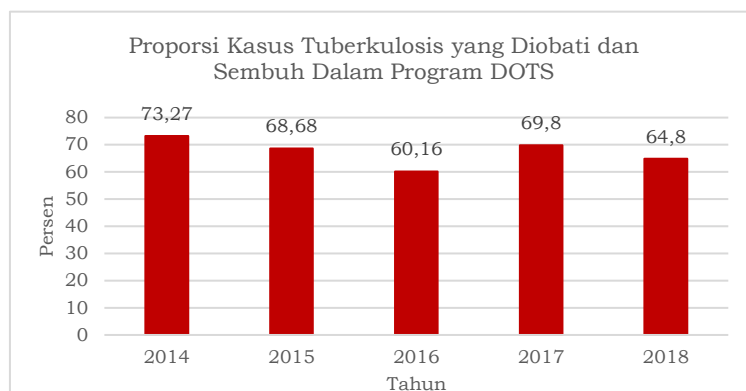
Gambar 2. 126
Tingkat Kematian karena Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2023

f. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Program DOTS (*Directly Observed Treatment Short-Course*) adalah program pengobatan tuberkulosis yang disarankan oleh WHO. Program ini mencakup pengobatan selama enam bulan dan pengawasan langsung oleh tenaga kesehatan selama dua bulan pertama. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS 100% adalah persentase kasus tuberkulosis yang terdeteksi melalui program DOTS dibandingkan jumlah kasus tuberkulosis yang sebenarnya. Berdasarkan Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar tahun 2014 hingga tahun 2020, proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kota Denpasar berhasil mencapai 100% dan sesuai dengan target Kota Denpasar.

g. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS adalah persentase kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh melalui program DOTS dibandingkan dengan jumlah kasus tuberkulosis yang diobati melalui program DOTS. Keberhasilan program DOTS dipengaruhi berbagai faktor, Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa kepatuhan pasien, kesediaan obat, kesediaan fasilitas kesehatan, dan juga pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berpengaruh pada kesuksesan DOTS. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kota Denpasar cenderung fluktuatif, tetapi presentasi ini cenderung menurun setiap tahunnya sejak tahun 2014.



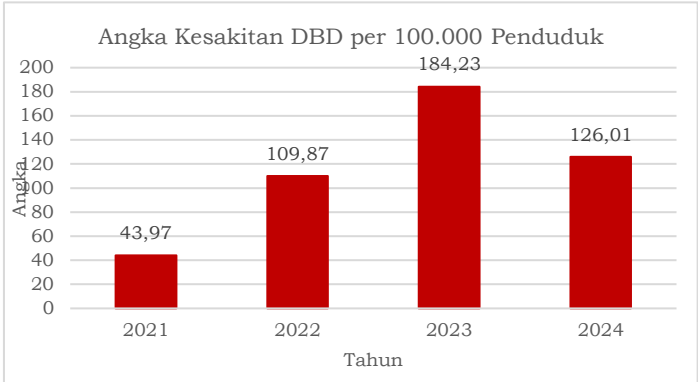
Gambar 2. 127
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Denpasar Tahun 2014–2018

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2023

18. Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah

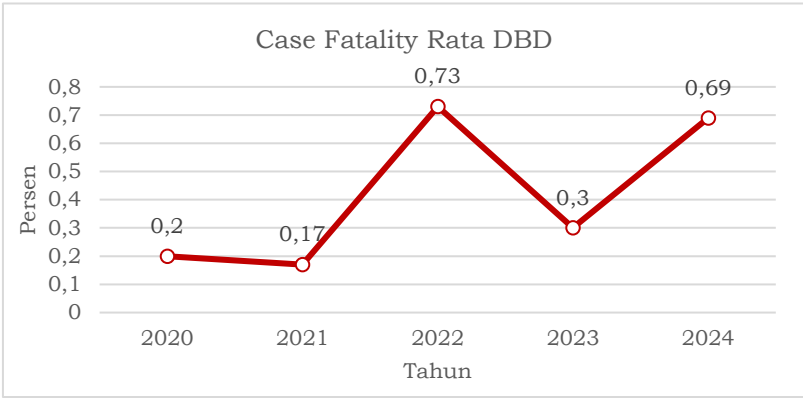
Badan Pusat Statistik mendeskripsikan angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk dengan jumlah kasus baru DBD pada kurun waktu tertentu per 100.000 penduduk pada kurun waktu yang sama. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk di Kota Denpasar menunjukkan nilai yang fluktuatif tapi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024,

angka kesakitan DBD Kota Denpasar menunjukkan nilai 167,66%, angka ini bukan angka terendah dalam periode 5 tahun sehingga Kota Denpasar perlu meningkatkan upaya pengendalian angka kesakitan DBD agar angka itu semakin menurun.



Gambar 2. 128
Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Selain jumlah kasus, hal lain yang perlu diwaspadai adalah *Case Fatality Rate (CFR)*. *Case Fatality Rate DBD* merupakan angka kematian yang disebabkan oleh DBD. Perhitungan *CFR DBD* dihitung dengan membagi jumlah kematian akibat DBD dibagi total kasus yang ada pada wilayah dan kurun waktu yang sama. Di Kota Denpasar, *Case Fatality Rate DBD* menunjukkan angka yang fluktuatif dan pada periode 5 tahun terakhir sempat mencapai titik tertinggi dengan 0,73% pada tahun 2022. Pada tahun 2024, *CFR* Kota Denpasar menunjukkan angka 0,69%. Angka ini menunjukkan perlunya upaya preventif agar *CFR DBD* di Kota Denpasar dapat menyentuh 0%.



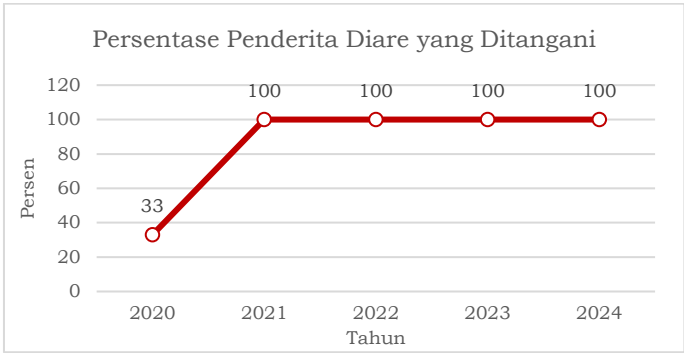
Gambar 2. 129
Case Fatality Rate DBD Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Denpasar (diolah), 2025

19. Penderita Diare yang Ditangani

Penderita diare yang ditangani dihitung dari persentase jumlah penderita diare yang datang dan dilayani dan di sarana kesehatan dan kader suatu wilayah dalam waktu tertentu dibandingkan jumlah perkiraan penderita diare pada wilayah dan waktu yang sama. Berikut merupakan data penderita diare yang ditangani di kota Denpasar pada tahun 2020 hingga tahun 2023.



Gambar 2. 130
Penyakit Diare yang Ditangani Kota Denpasar Tahun 2020–2023
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Denpasar (diolah), 2023

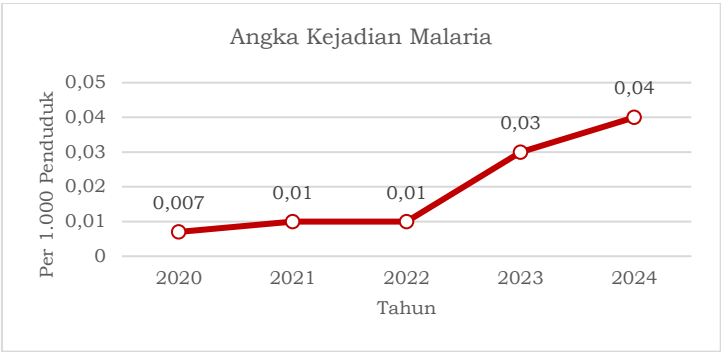


Gambar 2. 131
Persentase Penyakit Diare yang Ditangani Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Denpasar (diolah), 2025

Berdasarkan data tersebut, penderita diare yang ditangani pada tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 hanya 33% dari keseluruhan jumlah perkiraan penderita diare di Kota Denpasar. Namun, kondisi tersebut mulai menunjukkan kenaikan pada tahun 2021-2024 dengan nilai 100%. Sehingga, nilai tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

20. Angka Kejadian Malaria

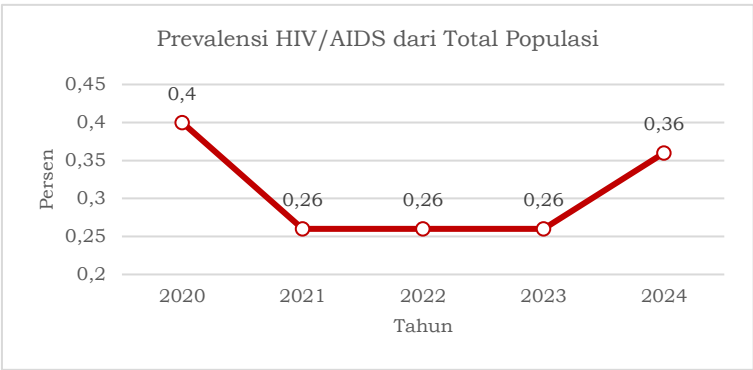
Penyakit malaria adalah suatu jenis infeksi menular yang tersebar melalui gigitan nyamuk. Angka kejadian malaria dihitung berdasarkan jumlah kasus per 1000 penduduk. Berdasarkan informasi yang tergambar dalam grafik di bawah ini, dalam jumlah kasus kejadian malaria meningkat pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Angka pada tahun 2024 dengan nilai 0,04 merupakan angka terbesar dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 hingga perlu ada pengawasan yang ketat pada hal kebersihan dan kesehatan masyarakat untuk mencegah kejadian malaria semakin meningkat. Berdasarkan data yang disajikan, angka pada tahun 2020 merupakan angka paling tinggi, angka ini melampaui target Kota Denpasar yakni maksimal 5 dari 1000 kasus dan juga nasional yang menargetkan bebas malaria pada tahun 2030.



Gambar 2. 132
Angka Kejadian Malaria Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

21. Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS merupakan persentase jumlah pasien HIV/AIDS terhadap jumlah Penduduk dalam kurun waktu tertentu. Kementerian Kesehatan menetapkan target Indonesia adalah *three zero* HIV/AIDS 2030 yaitu nol kasus infeksi baru HIV/AIDS, nol kasus kematian akibat AIDS, dan nol stigma diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Berikut merupakan Prevalensi HIV/AIDS di Kota Denpasar dari total populasi.



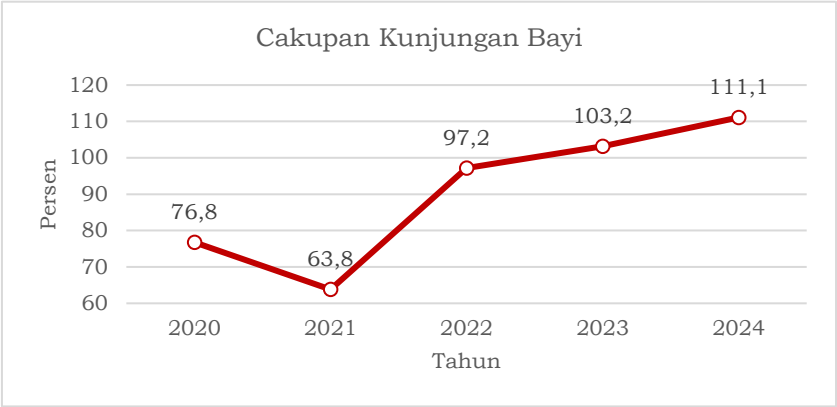
Gambar 2. 133
Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2025

Berdasarkan grafik tersebut, prevalensi HIV/AIDS dari total populasi di Kota Denpasar cenderung menurun. Nilai terbaru pada tahun 2024 menunjukkan pada angka 0,36% atau sekitar 36 kasus per 10.000 penduduk. Meskipun angka ini berada di bawah target Kota Denpasar <0,5%, angka ini cenderung tinggi mengingat target nasional adalah 0% atau Indonesia Tanpa HIV/AIDS pada tahun 2030.

22. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dan kurun waktu yang sama. Jumlah kunjungan bayi di Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi penurunan kunjungan akibat pandemi Covid-19, angka ini kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan persentase 97,2%. Meskipun

demikian, persentase kunjungan pada tahun 2024 telah berada diatas 100% dengan nilai 111,10%.



Gambar 2. 134
Cakupan Kunjungan Bayi Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2025

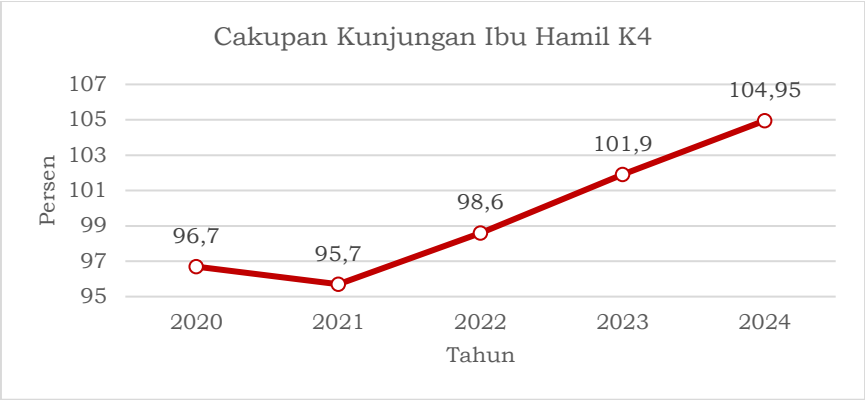
23. Cakupan Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Cakupan pelayanan puskesmas adalah jumlah puskesmas dibagi jumlah seluruh kecamatan yang ada di suatu wilayah. Kota Denpasar memiliki 11 puskesmas dengan 4 Kecamatan. Sejak tahun 2020 hingga 2024, jumlah ini tidak mengalami perubahan sehingga persentase cakupan pelayanan puskesmas berdasarkan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Denpasar adalah sekitar 275%. Angka ini menunjukkan bahwa 2 sampai 3 puskesmas dapat melayani 1 kecamatan.

Sementara itu, cakupan pelayanan puskesmas pembantu adalah jumlah seluruh puskesmas pembantu dibagi jumlah seluruh desa dan kelurahan yang ada di suatu wilayah. Kota Denpasar memiliki 25 puskesmas pembantu dengan 27 desa dan 16 Kelurahan. Berdasarkan jumlah tersebut, cakupan pelayanan puskesmas pembantu Kota Denpasar sejak tahun 2020 tidak mengalami perubahan yaitu 58,14% atau sekitar 1 puskesmas pembantu melayani 2 kelurahan.

24. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

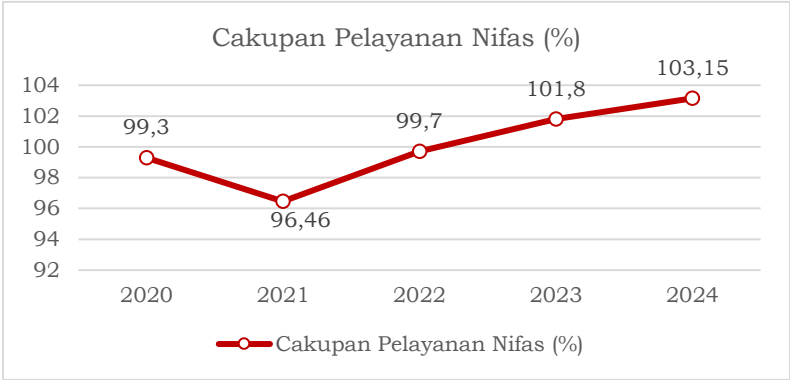
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 merupakan jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Cakupan kunjungan ibu hamil di Kota Denpasar menunjukkan angka yang fluktuatif antara 96 hingga 102%. Pada tahun 2024, cakupan kunjungan menyentuh 104,29% dan menjadi nilai tertinggi selama 13 tahun terakhir.



Gambar 2. 135
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2025

25. Cakupan Pelayanan Nifas

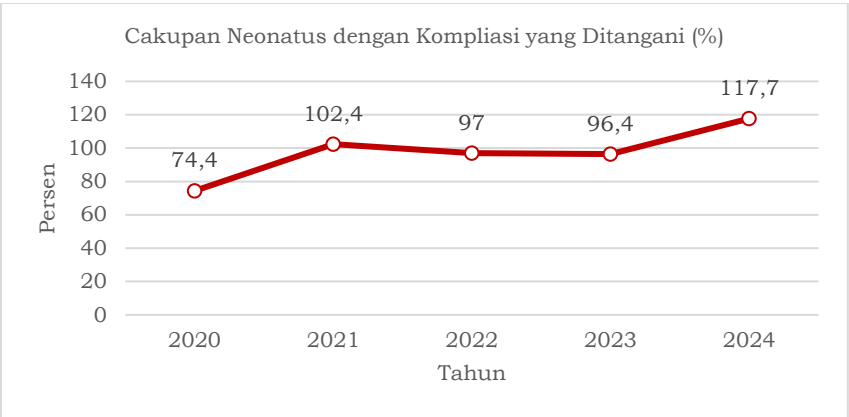
Cakupan pelayanan nifas merupakan jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai dengan standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dan kurun waktu yang sama. Pelayanan ini diberikan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan standar kesehatan. Kunjungan nifas terbagi menjadi 3 kunjungan itu pertama (KF1) 6 jam sampai 3 hari setelah persalinan; kedua, (K2) kunjungan nifas kedua pada minggu kedua setelah persalinan; dan ketiga (KF3) pada minggu keenam setelah persalinan. Cakupan pelayanan nifas di Kota Denpasar sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 bergerak secara fluktuatif. Akan tetapi, angka ini menunjukkan adanya kenaikan cakupan pelayanan nifas.



Gambar 2. 136
Cakupan pelayanan Nifas Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2025

26. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus (kelahiran) dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecatatan, dan kematian. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dibagi dengan jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada. Di Kota Denpasar, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan 117,70%. Sementara itu, pada tahun 2021 hingga 2023, angka ini menurun hingga 96,4%.

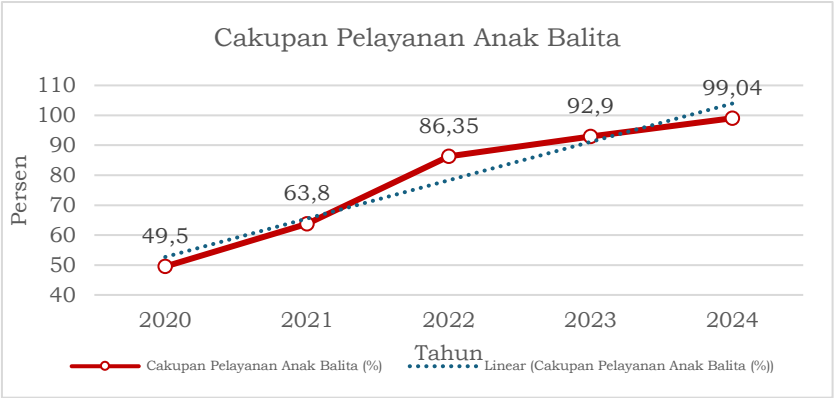


Gambar 2. 137
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang ditangani Kota Denpasar Tahun 2020–2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2025

27. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Balita merupakan anak yang berusia 12 hingga 59 bulan. Setiap balita harus mendapat pelayanan pemantauan pertumbuhan oleh bidan, perawat, dokter/DPL, atau dokter spesialis anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) yang diberikan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Pemantauan pertumbuhan anak balita dilakukan minimal 8 kali dalam setahun dan dicatat dalam Kohor Anal Balita dan Pra Sekolah, buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Maksud dari pemantauan pertumbuhan ini adalah untuk memastikan bahwa balita tumbuh tanpa masalah kesehatan. Cakupan pelayanan anak balita adalah jumlah anak balita yang memperoleh pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja atau waktu tertentu dibagi dengan kumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama. Cakupan pelayanan anak balita di Kota Denpasar pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan persentase yang fluktuatif. Angka ini sempat mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Cakupan ini menurun karena pandemi Covid 19 (Unicef Indonesia, 2021). Angka ini berhasil mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan berhasil menyentuh angka tertinggi dengan persentase 86,35% kemudian mengalami peningkatan menerus hingga tahun 2024 menjadi 99,04%.



Gambar 2. 138
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2025

28. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif Pada Anak Usia <6 Bulan

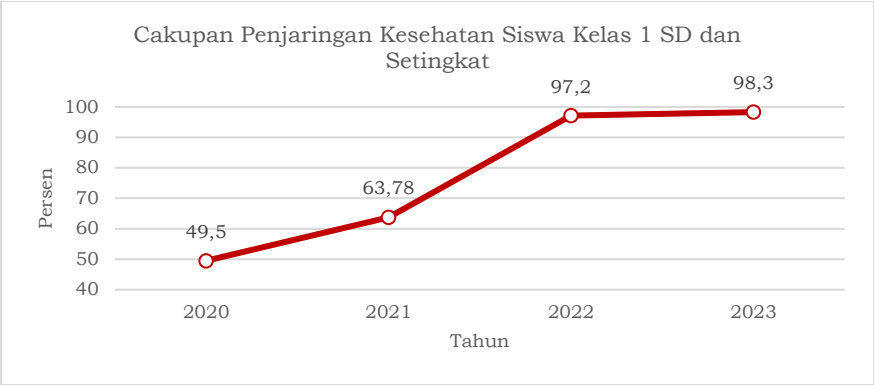
ASI eksklusif adalah pemberian ASI pada bayi usia 0–6 bulan tanpa tambahan makanan dan minuman lain kecuali obat atau vitamin. ASI eksklusif dapat memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan ketahanan tubuh bayi, membantu perkembangan otak dan fisik bayi, meningkatkan kecerdasan bayi, melindungi bayi dari alergi, memperkuat tulang bayi, dan mengurangi risiko sindrom kematian bayi secara mendadak (SIDS). Berdasarkan BPS, cakupan pemberian ASI eksklusif pada anak usia <6 bulan dihitung dengan jumlah bayi usia 0-5 bulan 29 hari yang mendapat ASI eksklusif di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi usia 0-5 bulan 29 hari di suatu wilayah pada periode dan waktu yang sama dan dinyatakan dalam persen. Cakupan pemberian ASI eksklusif pada anak usia <6 bulan Kota Denpasar menunjukkan nilai tertinggi 70,2% pada tahun 2023. Meski demikian, cakupan pemberian ASI eksklusif di Kota Denpasar belum sepenuhnya optimal karena belum 100% bayi 0–6 bulan mendapatkan ASI eksklusif.



Gambar 2. 139
Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada Anak Usia <6 Bulan
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Denpasar Tahun, 2024

29. Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa Kelas 1 SD dan Setingkat

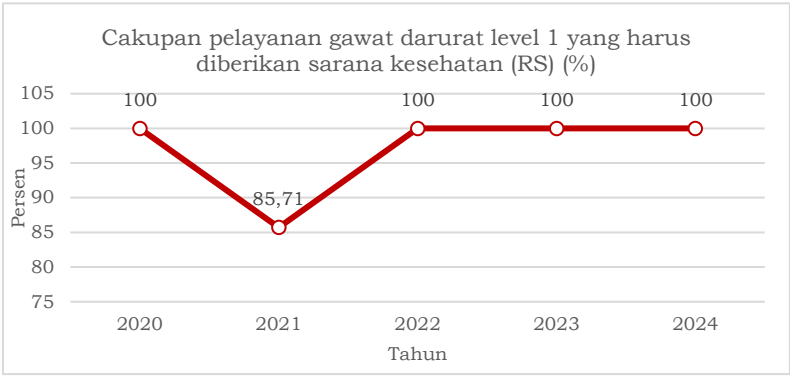
Cakupan penjangkaran siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD, dan setingkat melalui penjangkaran kesehatan terhadap murid kelas 1 SD/ sederajat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga kesehatan terlatih lainnya (guru dan dokter kecil). Cakupan penjangkaran kesehatan di Kota Denpasar pada tahun 2020 hingga 2023 berada pada angka 50–100 persen, tapi sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dengan nilai 49.5%. Pada tahun 2023, persentase cakupan menunjukkan nilai 98,3%, angka ini perlu terus ditingkatkan hingga 100%.



Gambar 2. 140
Cakupan penjangkaran Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/Sederajat Kota Denpasar Tahun 2020–2023
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Denpasar Tahun (diolah), 2024

30. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Pelayanan gawat darurat level 1 merupakan klasifikasi pelayanan gawat darurat yang diberikan oleh sarana kesehatan (RD) sebagai standar minimal untuk rumah sakit kelas D. pada level ini, pasien memerlukan tindakan penyelamatan nuama segera karena mengalami masalah *airway-breathing-circulation-disability (ABCD)*. Cakupan pelayanan gawat darurat lebel 1 yang harus diberikan saranan kesehatan (RS) dihitung dengan jumlah pelayanan gawat darurat level 1 dibagi dengan jumlah RS. Cakupan pelayanan di Kota Denpasar konsisten 100% dari tahun 2019 hingga tahun 2023, meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 85,71%.



Gambar 2. 141
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2025

31. Cakupan KLB Di Desa/Kelurahan yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

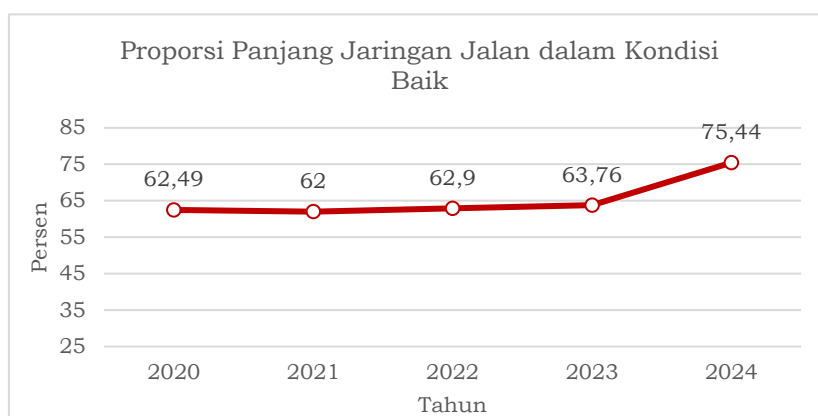
Cakupan KLB di desa/kelurahan yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam dihitung dengan jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu dibagi jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama. Berdasarkan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, cakupan KLB di desa/kelurahan yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam di Kota Denpasar cenderung stabil/tetap sejak tahun 2010–2023 dengan persentase 100%.

C) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Tingkat kualitas jalan menjadi indikator yang menunjukkan panjang jalan kondisi baik dari keseluruhan panjang jalan. Nilai ini menunjukkan kesiapan sarana prasarana mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.

Statistik menunjukkan bahwa persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kota Denpasar fluktuatif tetapi mengalami cenderung mengalami peningkatan. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kota Denpasar ditargetkan 64,62% dan telah tercapai pada tahun 2024. Meskipun demikian, nilai ini masih jauh dari 100%.



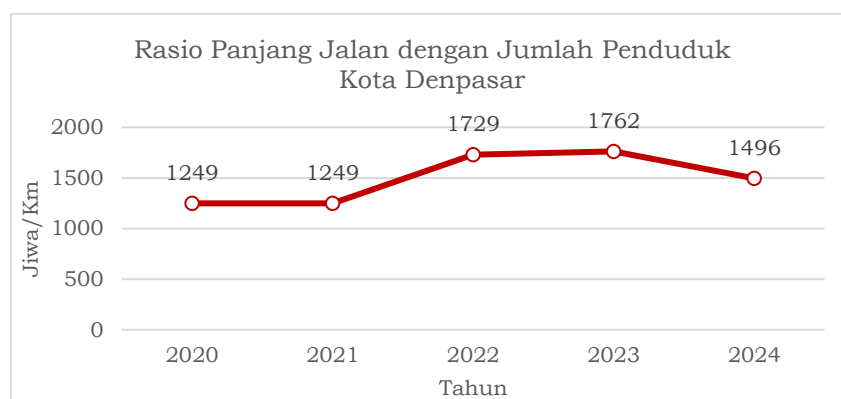
Gambar 2. 142

Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kota Denpasar Tahun 2020–2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2025

2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menunjukkan nilai perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah penduduk. Semakin besar kapasitas jalan, maka semakin tinggi jumlah pergerakan masyarakat yang dapat dilayani. Rasio ini menunjukkan perbandingan 1 Km jalan berbanding dengan sejumlah penduduk. Nilai rasio di Kota Denpasar mengalami penurunan pada tahun 2020.



Gambar 2. 143

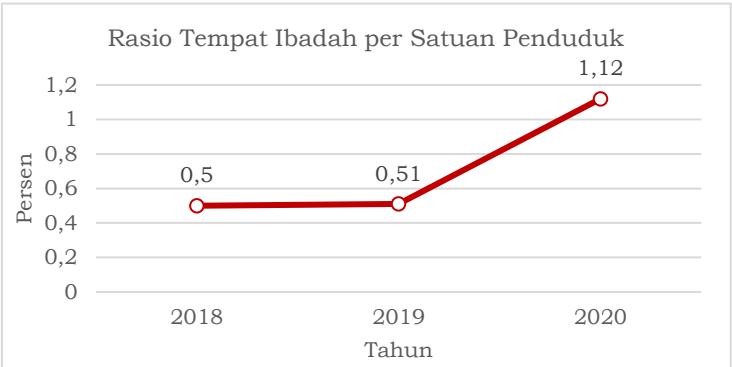
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2019–2023

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2025

3. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah merupakan perbandingan jumlah kesediaan tempat ibadah per 1.000 penduduk. Kesediaan rumah ibadah merupakan salah satu standar penilaian bagaimana sarana dan prasarana umum dapat

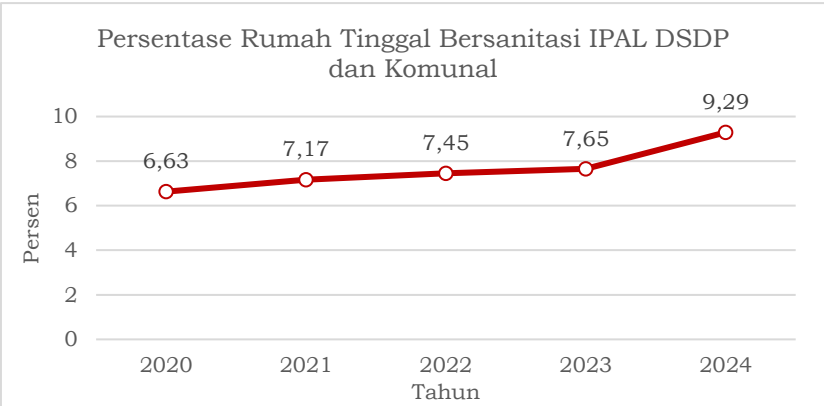
mewadahi persembayangan peribadatan masyarakat menurut ajaran masing-masing. Berikut merupakan data rasio tempat ibadah per satuan penduduk.



Gambar 2. 144
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2018–2020
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2012–2022 (diolah) , 2023

4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi IPAL DSDP dan komunal

Pada umumnya, penilaian persentase rumah tinggal bersanitasi dinilai berdasarkan keberadaan kloset dan pembuangan akhir tinja berupa *septiktank* atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Di Kota Denpasar, selain dari keberadaan IPAL komunal, persentase ini juga dinilai berdasarkan keberadaan IPAL DSDP atau IPAL *Denpasar Sewerage Development Project* yang merupakan sistem pembuangan limbah yang merupakan program provinsi. Sistem ini membantu menghubungkan rumah tangga ke sistem pembuangan limbah utama milik pemerintah untuk menghindari kontaminasi pasokan air. Berdasarkan data di bawah ini, dapat terlihat bahwa persentase rumah tinggal bersanitasi masih sangat rendah. Angka ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dalam aspek kesehatan masih belum sepenuhnya diperhatikan.

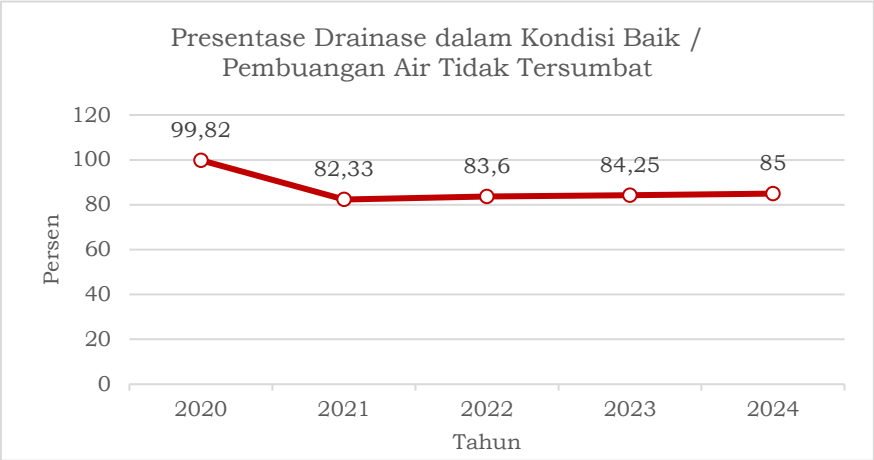


Gambar 2. 145
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi IPA DSDP dan Komunal Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2025

5. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat dapat dihitung dengan panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) dibagi panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km).

Berdasarkan data di bawah ini, persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat Kota Denpasar belum mencapai target Kota Denpasar dengan capaian 100%.

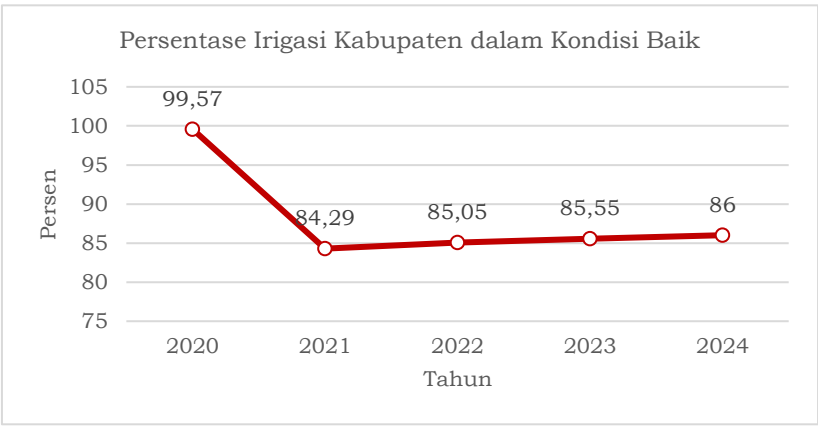


Gambar 2. 146
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air Tidak Tersumbat Kota Denpasar Tahun 2020–2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2025

6. Persentase Irigasi Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi kabupaten/kota dalam kondisi baik dihitung berdasarkan jumlah luas irigasi kabupaten/kota dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten. Keberadaan jaringan irigasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Persentase irigasi Kota Denpasar mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, angka ini belum mencapai angka 100% sesuai target Kota Denpasar.

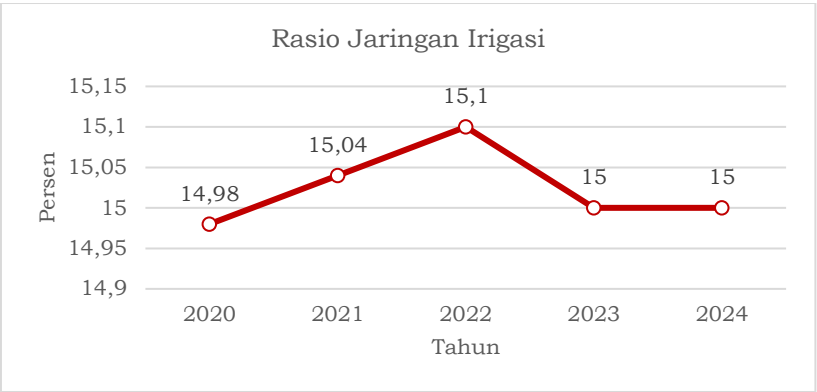


Gambar 2. 147
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik Kota Denpasar Tahun 2020–2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2025

7. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi dihitung berdasarkan panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budidaya pertanian. Keberadaan jaringan irigasi dapat membantu meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Pada tahun 2023, rasio jaringan irigasi Kota Denpasar belum mencapai target Bappeda senilai 23,56% pada tahun 2026.



Gambar 2. 148
Rasio Jaringan Irigasi Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2025

8. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan (SDGs)

Akses berkelanjutan terhadap air minum layak merupakan salah satu indikator penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) air minum yang layak terdiri dari air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan air limbah, dan pembuangan sampah. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum ini dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Indikator ini digunakan untuk melihat apakah air minum yang dikonsumsi masyarakat berkualitas dan tidak menjadi sumber berbagai penyakit.

Berdasarkan data yang dimiliki, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kota Denpasar, proporsi masih jauh dari target Pemerintah yaitu 100% rumah tangga di Indonesia mendapat akses air minum layak pada tahun 2024.

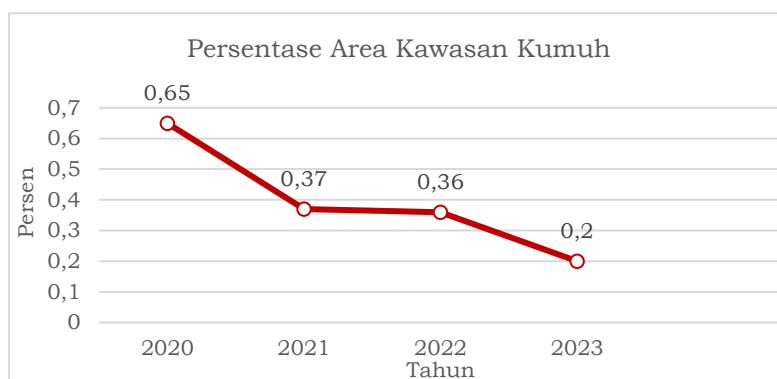


Gambar 2. 149
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan (SDGs) Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Denpasar (diolah), 2025

9. Persentase Area Kawasan Kumuh [Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh]

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Pada tahun 2020 hingga 2024, terjadi penurunan areal kawasan kumuh di Kota Denpasar hingga di bawah 1%. Angka ini belum mencapai target Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) periode 2020 – 2024 dengan persentase 0%.



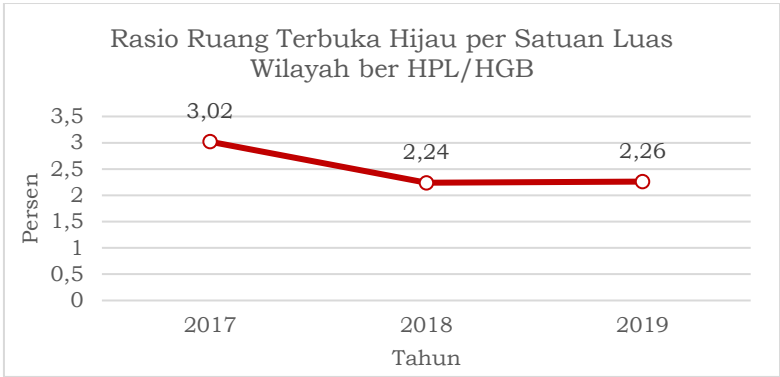
Gambar 2. 150

Persentase Areal Kawasan Kumuh Kota Denpasar Tahun 2019–2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020–2024 (diolah), 2025

10. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

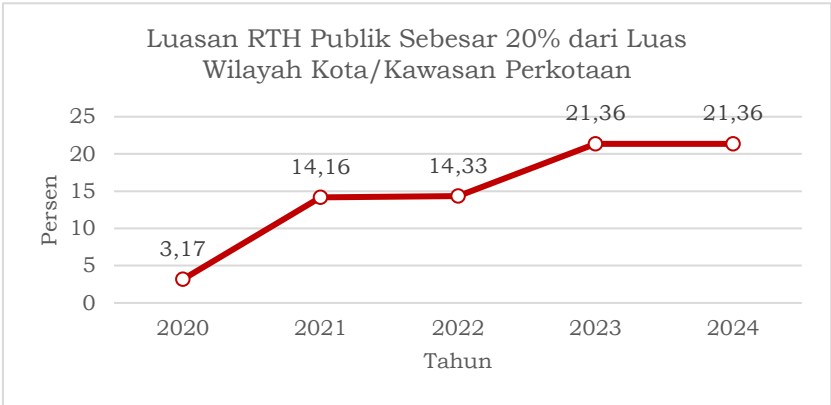
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB adalah ukuran yang menggambarkan proporsi antara luas ruang terbuka hijau dengan luas wilayah yang memiliki Hak Penggunaan Lahan (HPL) atau Hak Guna Bangunan (HGB). Rasio ini biasanya dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luasan RTH adalah minimal 30% dari luas wilayah yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH berperan penting dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam suatu wilayah.



Gambar 2. 151
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kota Denpasar Tahun 2017-2019

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2012-2022 (diolah), 2023

Sementara itu, berdasarkan hasil pengukuran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, target ruang terbuka hijau publik Kota Denpasar sudah memenuhi minimal RTH publik yaitu 20% per luasan perkotaan.

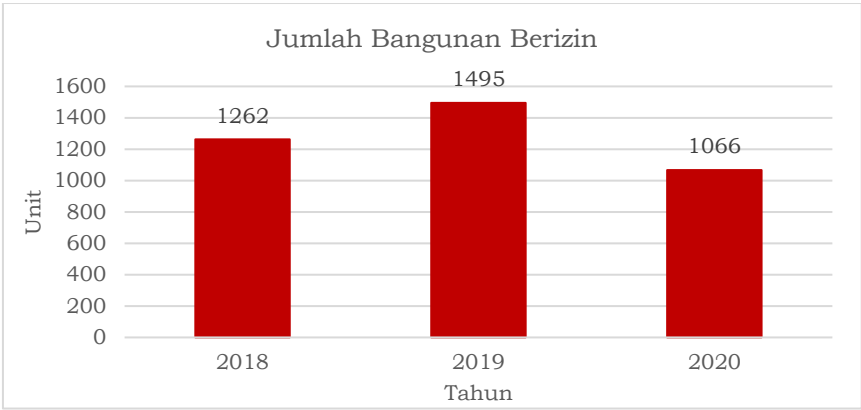


Gambar 2. 152
Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan 2020-2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024 (diolah), 2025

11. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan perizinan yang harus dilakukan oleh pemilik resmi bangunan untuk mendirikan dan mengelola bangunan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Jumlah bangunan yang memiliki IMB di Kota Denpasar pada tahun 2020 adalah sekitar 1066 unit dan cenderung fluktuatif sejak 2018.



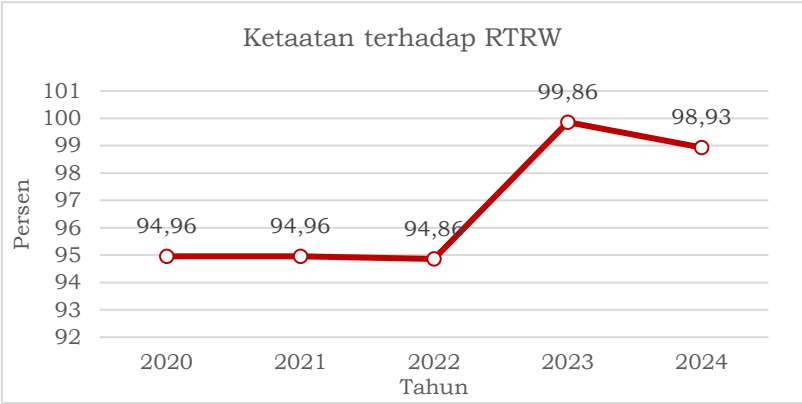
Gambar 2. 153

Jumlah Bangunan Ber-IMB Kota Denpasar Tahun 2018–2020

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2012–2022 (diolah), 2023

12. Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan gambaran realisasi RTRW yang dibandingkan dengan rencana peruntukan lahan. Berdasarkan Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019–2024, nilai ketaatan terhadap dokumen RTRW mencapai 94–99%. Nilai ini memperlihatkan bahwa ketaatan pembangunan dengan apa yang sudah direncanakan cukup tinggi. Namun, pemerintah daerah perlu menegakkan peraturan agar ketaatan terhadap RTRW dapat terus ditingkatkan sehingga dapat mencapai 100%.



Gambar 2. 154

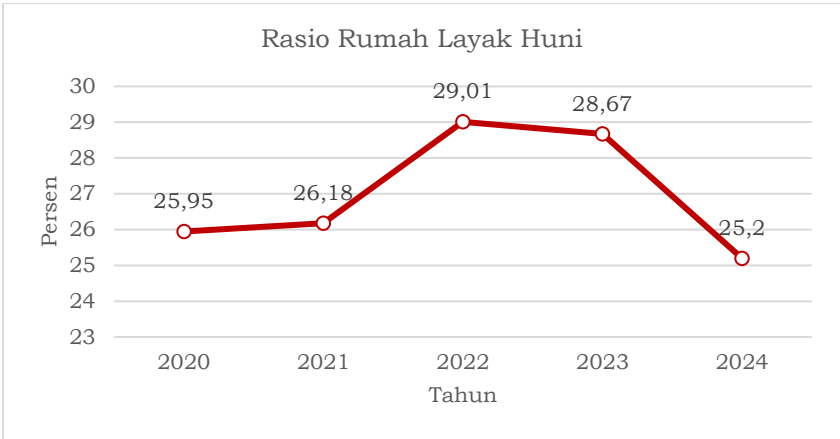
Ketaatan Terhadap RTRW Kota Denpasar Tahun 2020–2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020–2024 (diolah), 2025

D) Perumahan dan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Persentase rumah layak huni di Kota Denpasar masih berada di angka 25%, angka ini masih di bawah target RPJMD Indonesia yaitu 70% pada tahun 2024. Data rasio rumah layak huni Kota Denpasar sejak 2020 hingga 2024 menunjukkan data fluktuatif, tetapi cenderung mengalami penurunan.



Gambar 2. 155
Rasio Rumah Layak Huni Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020–2024 (diolah), 2025

Sementara itu, cakupan kesediaan rumah layak huni di Kota Denpasar masih berada di kisaran 90 hingga 100 persen, tetapi cenderung mengalami penurunan.



Gambar 2. 156
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020–2024 (diolah), 2025

2. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni merupakan luas permukiman layak huni dibagi dengan luas permukiman wilayah. Rasio ini merupakan indikator penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Nilai rasio permukiman layak huni Kota Denpasar sudah mencapai 99,7 pada tahun 2024 dengan tren yang meningkat setiap tahunnya. Angka ini mengasumsikan bahwa Kota Denpasar dapat memiliki 100 persen permukiman layak huni apabila pemerintah setempat terus melakukan upaya penanganan permukiman tidak layak yang ada.



Gambar 2. 157
Rasio Permukiman Layak Huni Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020–2024 (diolah), 2025

3. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau merupakan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan angka yang ditunjukkan dari tahun ke tahun hingga 2024, Kota Denpasar belum memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya, masih ada masyarakat yang belum dapat menjangkau rumah layak huni karena keterbatasan daya beli sehingga perlu ada dukungan dari pemerintahan untuk memperoleh rumah layak huni.



Gambar 2. 158
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020–2024 (diolah), 2025

4. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

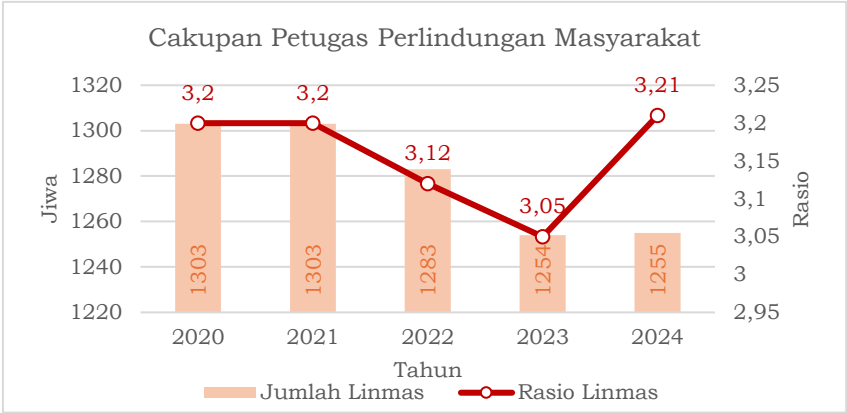
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan merupakan luasan permukiman kumuh yang tertangani dibagi luasan permukiman kumuh. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan di Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023, angka ini mengalami peningkatan yang signifikan. Apabila tren ini tidak diatasi, persentase luasan permukiman kumuh ini akan semakin jauh dari target 0% kawasan kumuh.



Gambar 2. 159
Persentase Luasan permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Denpasar Tahun 2020–2023
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2024

E) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Dalam rentang tahun 2019 hingga 2024, rasio linmas mengalami fluktuasi dengan tren menurun pada tahun 2019-2023 kemudian kembali mengalami kenaikan. Namun, jumlah linmas di Kota Denpasar mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 1309 orang menjadi 1255 orang di tahun 2024. Fluktuasi yang signifikan dalam rasio linmas bisa menunjukkan kesenjangan yang mungkin dalam perlindungan masyarakat di berbagai tahun sementara penurunan jumlah petugas linmas menunjukkan tantangan dalam rekrutmen dan retensi petugas. Meskipun memiliki penurunan pada fluktuasi tersebut, jumlah petugas linmas ini telah memenuhi target. Data yang dimaksud adalah sebagai berikut.

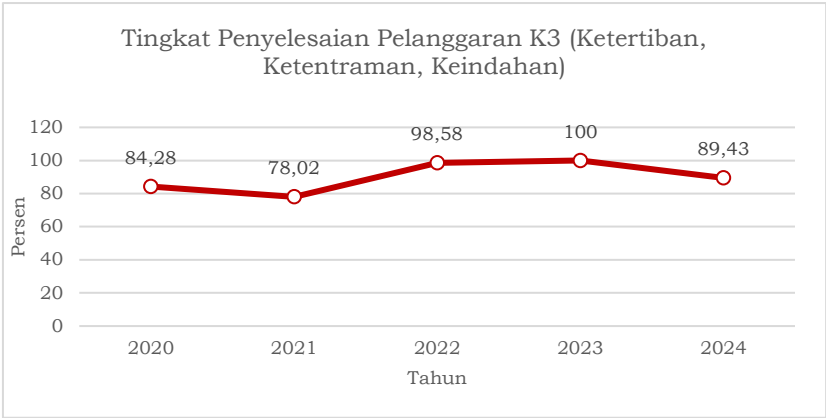


Gambar 2. 160
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020–2024 (diolah), 2025

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

Penyelesaian pelanggaran terkait dengan ketertiban, ketenteraman, dan keindahan (K3) di Kota Denpasar selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pelanggaran K3 memiliki nilai sebesar 84,28% pada tahun 2020. Angka ini kembali naik mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 dengan capaian 98,58%. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, peningkatan

keseluruhan dalam penyelesaian pelanggaran K3 selama periode tersebut mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam meningkatkan ketertiban, ketenteraman, dan keindahan kota. Hal ini juga menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat. Penjelasan tersebut digambarkan pada grafik di bawah ini.



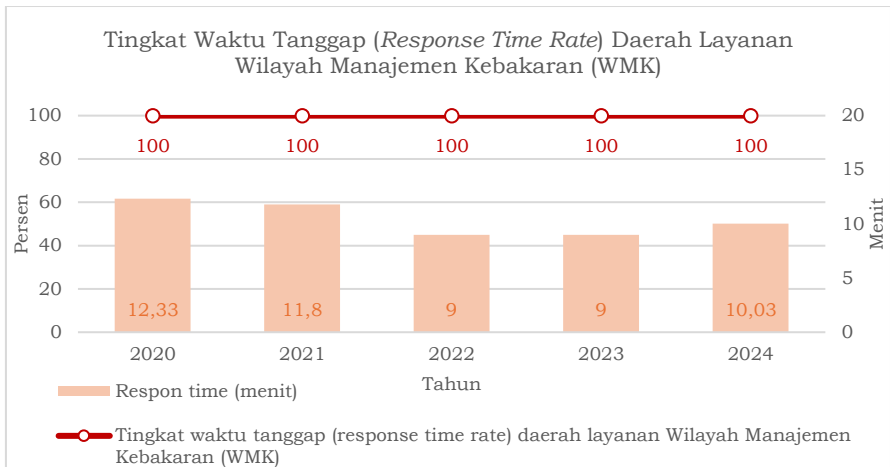
Gambar 2. 161
Grafik Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020--2024 (diolah), 2025

3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Cakupan pelayanan dalam penanganan bencana kebakaran Kota Denpasar selama periode 2020 hingga 2023 mencapai tingkat yang optimal dengan tingkat pelayanan yang stabil pada 100%. Hal ini mencerminkan kesiapan dan kapabilitas pihak berwenang serta penanggulangan yang efektif terhadap ancaman kebakaran di wilayah tersebut.

4. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

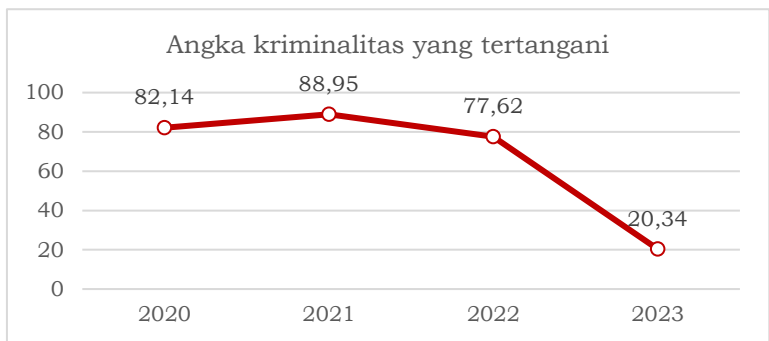
Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Denpasar selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan performa yang sangat baik dengan tingkat kinerja yang tetap pada 100%. Selain itu, adanya penurunan nilai rentang tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK pada tahun 2020-2024 menunjukkan kecepatan respons yang semakin membaik. Namun pada tahun 2024, *respon time* kembali menurun menjadi 10,03 menit. Tren tingkat waktu tanggap yang dimaksud dijelaskan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 162
Grafik Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020–2024 (diolah), 2025

5. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, capaian Kota Denpasar cenderung fluktuatif dalam menangani angka kriminalitas. Data menunjukkan bahwa angka kriminalitas yang berhasil ditangani oleh pihak berwenang mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat pada tahun 2020-2021, angka kriminalitas tertangani sebesar 88,95 persen di tahun 2021, kemudian menurun drastis hingga mencapai angka yang rendah pada tahun 2023 dengan persentase 20,34 persen. Penurunan ini menunjukkan efektivitas upaya penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan instansi terkait di Kota Denpasar masih perlu menjadi perhatian khusus. Angka yang rendah dapat mencerminkan penanganan kriminalitas yang masih belum optimal.

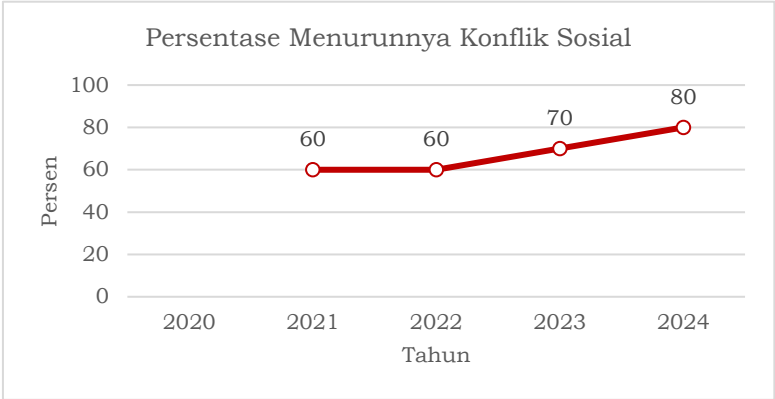


Gambar 2. 163
Grafik Angka Kriminalitas yang Tertangani Kota Denpasar Tahun 2020-2023
Sumber: BPS Provinsi Bali 2025

6. Persentase Menurunnya Konflik Sosial

Persentase penurunan konflik sosial di Kota Denpasar selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif. Data ini mengindikasikan bahwa persentase penurunan konflik sosial mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, persentase penurunan konflik sosial sebesar 60 persen, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 70 persen pada tahun 2023 dan mencapai nilai 80 persen pada tahun 2024. Hasil ini mencerminkan perlunya upaya yang kuat dalam mitigasi konflik sosial dan mempromosikan perdamaian di dalam masyarakat

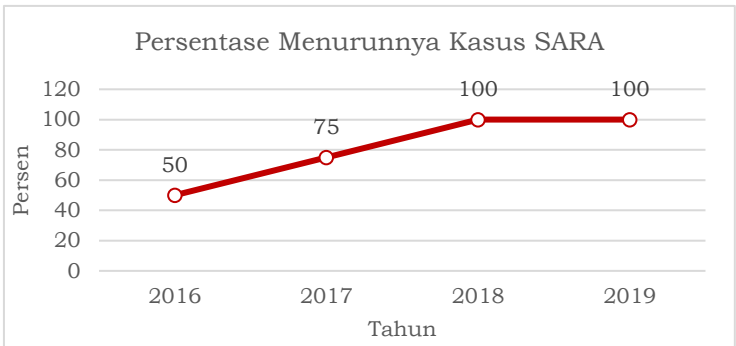
Kota Denpasar mengingat angka tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Konflik sosial yang dimaksud dirincikan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 164
Grafik Persentase Menurunnya Konflik Sosial Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024 (diolah), 2025

7. Persentase Menurunnya Kasus SARA

Persentase penurunan kasus SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) di Kota Denpasar selama periode 2016 hingga 2019 menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam mengatasi konflik berbasis identitas tersebut. Data ini menggambarkan tren penurunan kasus SARA yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, tercatat 50% penurunan kasus SARA, yang kemudian meningkat menjadi 75% pada tahun 2017, dan mencapai 100% pada tahun 2018 dan 2019. Hasil ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam mempromosikan keragaman, toleransi, dan perdamaian antara berbagai kelompok sosial dan budaya. Penurunan kasus SARA yang konstan ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan aman bagi semua penduduk kota, dan merupakan pencapaian positif dalam membangun masyarakat yang inklusif dan saling menghormati. Nilai ini juga menunjukkan tingkat toleransi yang baik pada Kota Denpasar. Penurunan kasus SARA yang dimaksud diperjelas menggunakan grafik di bawah ini.

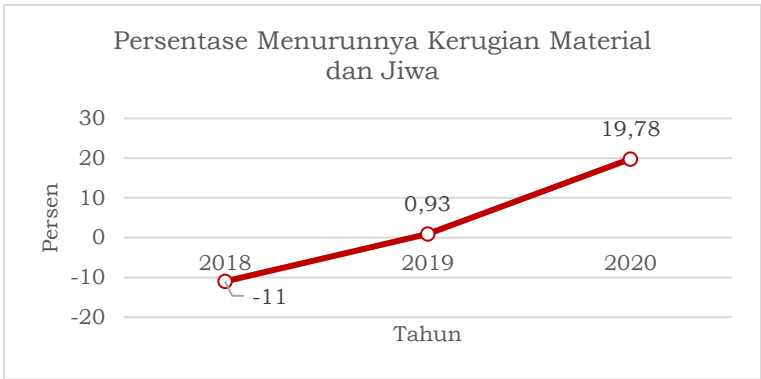


Gambar 2. 165
Grafik Persentase Menurunnya Kasus SARA Kota Denpasar Tahun 2016-2019
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, 2023

8. Persentase Menurunnya Kerugian Material dan Jiwa

Persentase penurunan kerugian material dan jiwa di Kota Denpasar selama periode 2018 hingga 2020 menggambarkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan keamanan dan mitigasi risiko bencana. Data

menunjukkan tren positif dengan penurunan kerugian material yang bermakna. Pada tahun 2018, terdapat penurunan sebesar -11,00% dan selalu meningkat hingga tahun 2020 dengan penurunan kerugian material mencapai 19,78%. Hasil ini menunjukkan efektivitas langkah-langkah mitigasi bencana, peringatan dini, dan respons cepat yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam melindungi aset dan jiwa penduduk. Data fluktuasi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

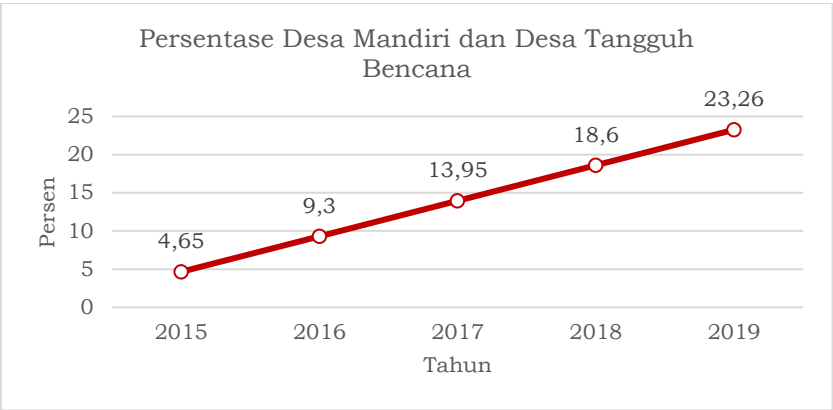


Gambar 2. 166
Grafik Persentase Menurunnya Kerugian Material dan Jiwa Kota Denpasar Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, 2023

9. Persentase Desa Mandiri Dan Desa Tangguh Bencana

Kota Denpasar menunjukkan peningkatan yang positif dalam upaya mengembangkan desa mandiri dan desa tangguh bencana selama periode 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, persentasenya mencapai 4,65%, lalu terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 23,26% pada tahun 2019. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam membangun kapasitas desa-desa untuk menghadapi potensi bencana. Pencapaian ini penting dalam meminimalkan kerugian dan melindungi penduduk serta aset-aset penting dari dampak bencana alam yang dapat terjadi di wilayah ini. Meskipun demikian, pencapaian ini masih perlu ditingkatkan untuk menghasilkan seluruh desa/kelurahan di Kota Denpasar menjadi tanggap dan tangguh bencana, termasuk dalam mendorong kesadaran masyarakat dalam adaptasi serta mitigasi bencana. Data ini dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2. 167
Grafik Persentase Desa Mandiri Dan Desa Tangguh Bencana Kota Denpasar Tahun 2015-2019

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, 2023

10. Persentase Terpenuhi Kebutuhan Tanggap Darurat

Kota Denpasar telah berhasil menjaga tingkat keberhasilan yang konsisten dalam terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat selama periode 2019 hingga 2023. Dalam rentang waktu tersebut, persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat tetap berada pada tingkat yang optimal, mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kesiapan dan efektivitas respons darurat dalam mengatasi situasi-situasi kritis yang dapat terjadi di wilayah ini. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dari pihak berwenang, organisasi kemanusiaan, dan komunitas yang bekerja sama untuk memastikan bahwa warga Kota Denpasar dapat mengatasi berbagai tantangan darurat dengan baik, sehingga menjadikan wilayah ini sebagai lingkungan yang aman dan siap menghadapi segala situasi darurat.

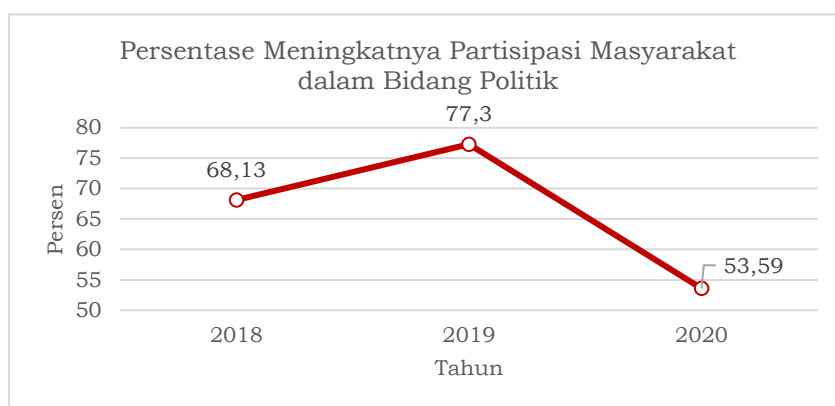
11. Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan di Kota Denpasar memiliki tingkat partisipasi mencapai 100% selama beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dari berbagai organisasi masyarakat dalam mendukung dan memperkuat identitas nasional serta meningkatkan pemahaman warga terkait nilai-nilai kebangsaan. Ketertarikan dan keterlibatan yang tinggi ini memberikan kontribusi yang positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat Kota Denpasar serta mempromosikan semangat kebangsaan yang kokoh. Dengan demikian, upaya-upaya ini dapat terus ditingkatkan dan diperluas untuk memperkuat kesadaran warga terhadap pentingnya persatuan dan kebangsaan.

12. Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Politik

Partisipasi aktif masyarakat dalam ranah politik di Kota Denpasar menunjukkan tren yang bervariasi selama beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa ada peningkatan signifikan dalam partisipasi politik

warga selama periode tertentu, dengan persentase mencapai 77,3% pada tahun 2019. Hal ini mencerminkan semangat masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, seperti pemilihan umum dan kegiatan terkait lainnya. Meskipun demikian, terdapat periode dengan partisipasi politik menurun, mencapai sekitar 53,59% pada tahun 2020. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti isu-isu politik saat itu, tingkat kesadaran politik, atau faktor-faktor lain yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Partisipasi politik yang positif dengan dukungan pendidikan yang lebih baik perlu terus didorong untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

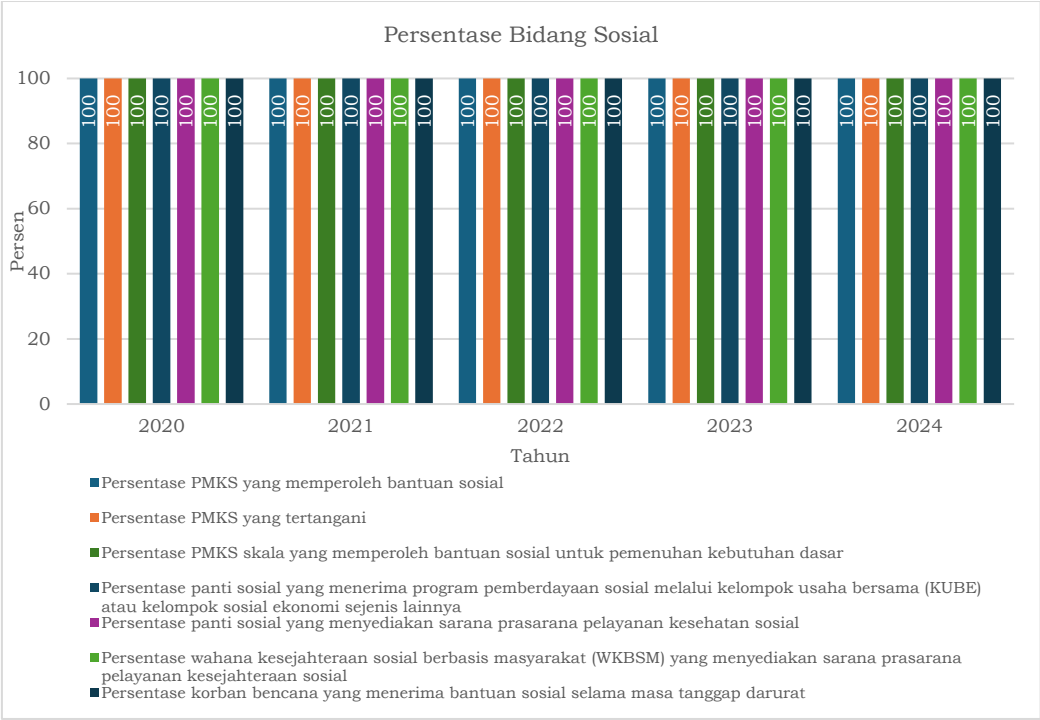


Gambar 2. 168
Grafik Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Politik Kota
Denpasar Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

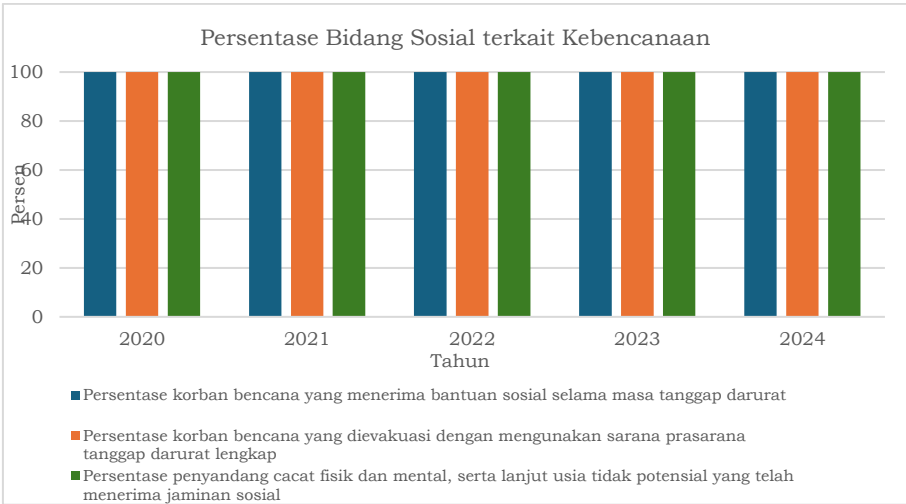
F) Sosial

Bidang sosial di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan adanya nilai pencapaian yang stagnan dalam indikator sosial terkait PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Data menunjukkan pada tahun 2020-2024, nilai indikator telah mencapai target 100 persen. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial telah berjalan baik. Capaian yang dimaksud dijelaskan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 2. 169
Grafik Persentase Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Sosial Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024



Gambar 2. 170
Grafik Persentase Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Sosial Terkait Kebencanaan Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Kota Denpasar juga memiliki sistem tanggap darurat yang efisien, terlihat dari persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap yang telah mencapai 100% pada tahun 2020-2024. Hal ini mencerminkan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana alam. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan komitmen Kota Denpasar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya dan memberikan dukungan dalam situasi darurat. Penjelasan yang dimaksud dirincikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 60
Persentase Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Sosial Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100
Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	100	100	100	100
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024, 2025

2) Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A) Tenaga Kerja

1. Kesejahteraan dan Kompetensi Tenaga Kerja

Kesejahteraan dan kompetensi tenaga kerja berkaitan dengan penerimaan fasilitas seperti pelatihan, peningkatan kompetensi, perlindungan sosial kepada tenaga kerja, maupun kegiatan lainnya yang dapat mendukung peluang pekerjaan yang lebih baik. Dalam hal ini, indikator terbagi menjadi besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB), besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, dan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat.

Pada periode 2020 hingga 2024, Kota Denpasar telah mengalami sejumlah perubahan dalam hal kesejahteraan dan kompetensi tenaga kerja. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) menunjukkan tren yang cukup fluktuatif selama tahun-tahun tersebut. Pada tahun 2020, sekitar 56,25% kasus diselesaikan dengan PB, tetapi kemudian pada tahun 2021 angka ini mulai mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan angka terakhir mencapai 39%. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (program jaminan sosial ketenagakerjaan) juga mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 2020, sebanyak 82,24% pekerja/buruh menjadi peserta program Jamsostek, dan angka ini menurun drastis menjadi 8,33% pada tahun 2022.

Pada kondisi lain, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mengalami penurunan sepanjang periode 2020 hingga 2024. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

masyarakat juga tinggi, tetapi mengalami fluktuasi selama tahun-tahun tersebut. Pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan dari 75% menjadi 14,21%. Namun, angka ini mulai menunjukkan tren positif menjadi 95% pada tahun 2024. Perubahan-perubahan dalam data ini mencerminkan upaya Kota Denpasar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi tenaga kerja di wilayah tersebut selama beberapa tahun terakhir. Penjelasan ini dirincikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 61
Rincian Bidang Kesejahteraan dan Kompetensi Tenaga Kerja Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	56,25	38	36	39	-
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	82,24	N/A	8,33	56	52
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	N/A	67	55	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	75,11	14,21	63	77	95

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

2. Angka Tenaga Kerja

a) Rasio lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Denpasar menunjukkan peningkatan signifikan dari 18,51% pada tahun 2018 menjadi 40,27% pada tahun 2019. Data ini mencerminkan pertumbuhan jumlah lulusan tingkat sarjana dan pascasarjana di kota tersebut, yang pada gilirannya berdampak positif pada kualitas tenaga kerja di wilayah tersebut terutama dalam memberikan pandangan maupun keahlian yang mendalam. Pentingnya rasio lulusan S1/S2/S3 ini terletak pada peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja. Lulusan tingkat sarjana dan pascasarjana biasanya memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidangnya, serta keterampilan dan kemampuan yang lebih baik. Hal ini meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam pasar kerja yang semakin kompetitif. Dengan rasio lulusan S1/S2/S3 yang lebih tinggi, hal ini dapat menciptakan peluang bagi inovasi dan peningkatan produktivitas dalam berbagai sektor ekonomi. Penjelasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 62
Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Denpasar Tahun 2018-2019

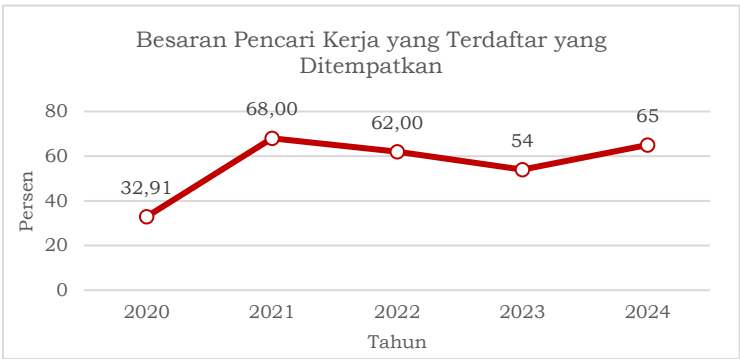
Uraian	Satuan	Tahun	
		2018	2019
Angka Tenaga Kerja dalam Rasio Lulusan S1/S2/S3	%	18,51	40,27

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2023

b) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Pencarian pekerjaan dan penempatan tenaga kerja merupakan elemen penting dalam menggerakkan ekonomi Kota Denpasar. Data menunjukkan besaran pencari kerja yang terdaftar yang berhasil ditempatkan dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat fluktuasi

dalam persentase ini dengan kecenderungan yang terus naik. Meskipun demikian, nilainya kembali turun pada tahun 2023 dengan angka 54% tetapi kemudian naik dengan cukup signifikan menjadi 65% pada 2024. Fluktuasi ini bisa mencerminkan dinamika dalam pasar kerja dan perubahan dalam permintaan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Perlu adanya perhatian yang konsisten dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat penempatan tenaga kerja dalam menunjang perekonomian Kota Denpasar. Data yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.

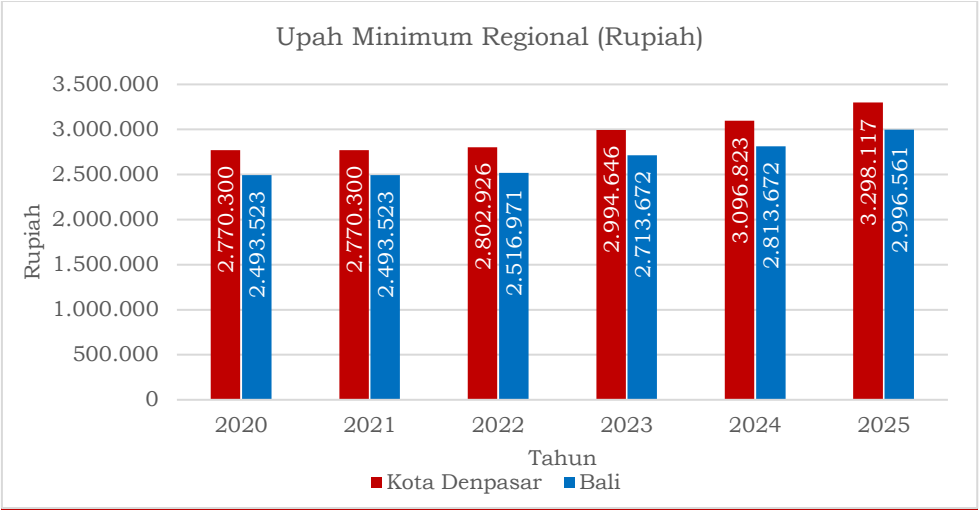


Gambar 2. 171
Grafik Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024, 2025

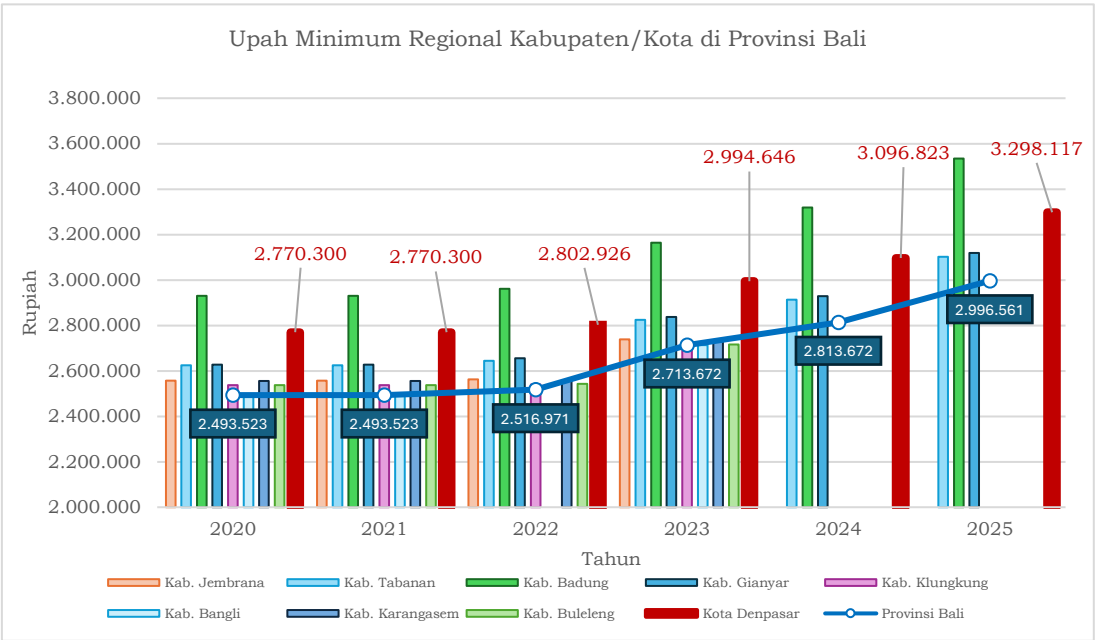
3. Upah Minimum Kota

Upah Minimum Regional (UMR) adalah salah satu aspek penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja di suatu wilayah. UMR di Kota Denpasar, bersama dengan UMR di Provinsi Bali, telah mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, UMR Kota Denpasar berada di level 2.770.300 Rupiah, sementara UMR Provinsi Bali sedikit lebih rendah, yaitu 2.493.523 Rupiah. Namun, dari tahun ke tahun, UMR Kota Denpasar terus mengalami kenaikan yang signifikan, mencapai 3.298.117 Rupiah pada tahun 2025. Di sisi lain, UMR Provinsi Bali juga mengalami peningkatan yang cukup besar, mencapai 2.996.561 Rupiah pada tahun yang sama. Dengan demikian, UMR di Kota Denpasar secara konsisten lebih tinggi daripada UMR di tingkat provinsi, mencerminkan tingkat biaya hidup yang lebih tinggi di kota ini. Peningkatan UMR adalah langkah positif dalam meningkatkan taraf hidup pekerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Denpasar dan sekitarnya. Perbandingan data UMR yang dimaksud dirincikan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 172
Grafik Upah Minimum Regional Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2020-2025
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Pada tahun 2023, Kota Denpasar mempertahankan posisinya sebagai salah satu kota dengan UMR tertinggi di Bali setelah Kabupaten Badung. Data menunjukkan bahwa UMR Denpasar mencapai 2.994.646 Rupiah, berada di bawah Kabupaten Badung yang mencatatkan UMR tertinggi di Bali dengan 3.163.837 Rupiah. Sementara itu, UMR Provinsi Bali secara keseluruhan tercatat pada angka 2.713.672 Rupiah pada tahun yang sama. Peningkatan UMR di Denpasar sepanjang tahun 2020 hingga 2025 mencerminkan komitmen kota ini dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta menggambarkan dinamika ekonomi yang kuat pada wilayah ini. Kesadaran akan pentingnya upah yang layak menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Denpasar, dan posisi Denpasar sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Provinsi Bali memberikan dampak signifikan dalam menentukan tingkat UMR yang kompetitif. Data perbandingan dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2. 173
Grafik Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2025
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

B) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

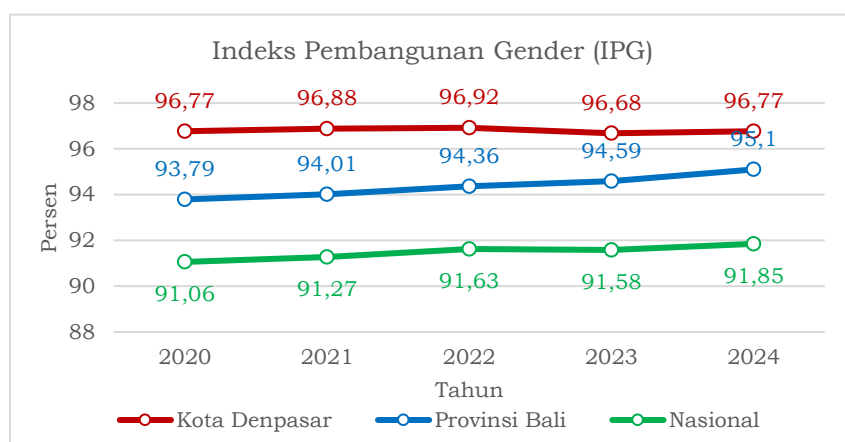
1. Indikator Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan

a) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPG mencerminkan tingkat pencapaian gender dalam suatu wilayah atau negara, dan semakin tinggi IPG, semakin tinggi pula tingkat kesetaraan gender. IPG dihitung berdasarkan dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan layak yang terbagi menjadi laki-laki dan perempuan berdasarkan perhitungan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki.

Data IPG Kota Denpasar selama periode tahun 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif dengan tren yang menurun dari 96,77 di tahun 2020 menjadi 96,77 di tahun 2024. Namun nilai ini cenderung lebih tinggi dari Provinsi Bali dan Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen Kota Denpasar dalam mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.

Data yang menunjukkan peningkatan IPG Kota Denpasar menunjukkan bahwa upaya-upaya dalam menciptakan kesetaraan gender telah menghasilkan hasil yang positif, dan kota ini berkomitmen untuk terus memajukan kesetaraan gender dalam pembangunan wilayah. Data yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2. 174

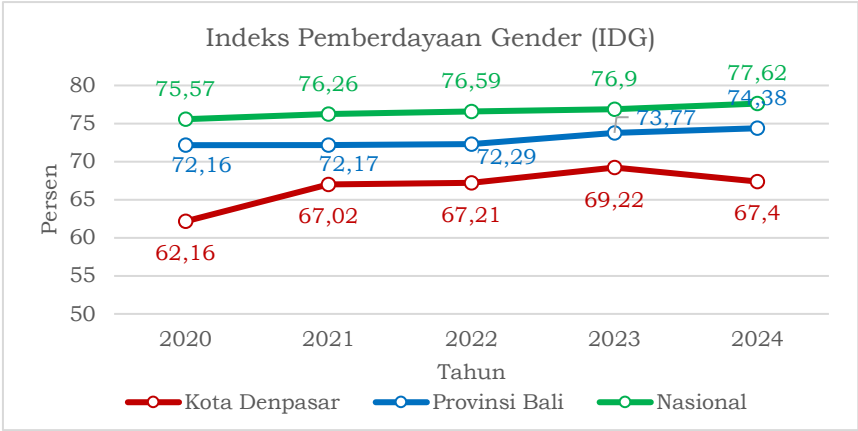
Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, BPS Nasional, 2025

b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dalam suatu wilayah memiliki akses, peluang, dan kontrol atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. IDG mencerminkan tingkat pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. IDG menunjukkan keaktifan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dengan menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Data IDG Kota Denpasar dari tahun 2020 hingga menunjukkan perkembangan yang positif. IDG mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan nilai 62,16 di tahun 2020 menjadi 67,4 di tahun 2024. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan IDG Provinsi Bali, terlihat bahwa Kota Denpasar memiliki IDG yang lebih rendah. Demikian pula, perbandingan dengan IDG Nasional menunjukkan bahwa Kota Denpasar masih memiliki nilai yang lebih rendah. Peningkatan IDG Kota Denpasar selama periode tersebut mencerminkan komitmen dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara bagi perempuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka serta memperkuat peran mereka dalam pembangunan wilayah, meskipun masih perlu ditingkatkan kembali. Data yang dimaksud adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 175
Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, BPS Nasional, 2025

c) Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)
Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah suatu tolok ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas kehidupan anak-anak di suatu wilayah. Penghargaan KLA mencakup berbagai indikator yang mencerminkan kondisi anak-anak, termasuk akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, lingkungan yang aman, dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Skor Indikator KLA diurutkan menjadi peringkat pertama, madya, nindya, utama, dan, layak anak.

Data Skor KLA Kota Denpasar selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kondisi yang stabil dengan skor Utama dalam KLA. Hal ini mengindikasikan tingkat kualitas dan komitmen pemerintah yang kuat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak-anak di Kota Denpasar. Peningkatan skor pada Kota Denpasar ini dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 63

Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	Peringkat	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019-2023 dan RPJMD Kota Denpasar 2021-2026

2. Partisipasi Perempuan

Partisipasi aktif perempuan dalam berbagai aspek pembangunan sebuah daerah merupakan faktor yang sangat penting. Hal ini tidak hanya menguntungkan individu perempuan itu sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan dan perkembangan daerah tersebut secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Denpasar telah menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam partisipasi perempuan di berbagai sektor. Dalam periode 2021 hingga 2024, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mencerminkan upaya daerah dalam mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Selain itu, dalam lingkup politik, indikator proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPR Kota Denpasar juga cenderung stabil. Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, terlihat bahwa proporsi perempuan yang menjadi anggota DPR mengalami peningkatan yang positif. Hal ini merupakan langkah penting menuju perwakilan gender yang lebih seimbang dalam kebijakan publik.

Dalam konteks sosial, penurunan angka KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan persentase tenaga kerja di bawah umur cenderung fluktuatif dengan kondisi indikator negatif. Ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak di Kota Denpasar perlu menjadi perhatian. Selain itu, partisipasi angkatan kerja perempuan yang semakin meningkat adalah cerminan dari kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam dunia kerja. Penjelasan tersebut dirincikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 64

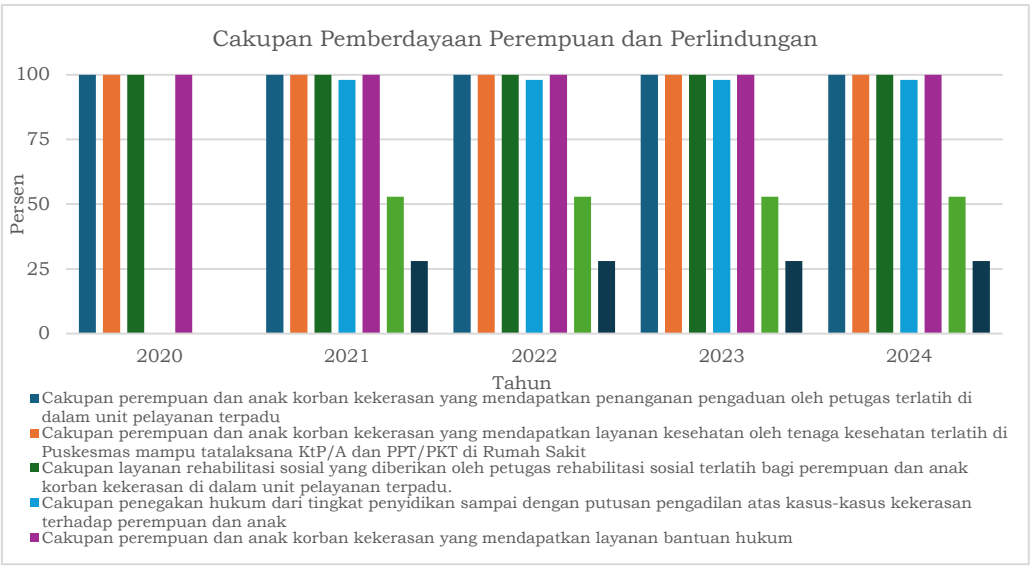
Partisipasi Perempuan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	N/A	45,90	54,10	54,10	65
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	8,89	8,89	8,89	8,89	8,90
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	N/A	48	48	47	35
Rasio KDRT	%	N/A	0,05	0,05	0,05	0,25
Persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur	%	N/A	0,002	0,02	0,002	0,002
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	N/A	61,771	61,94	64,84	59

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

3. Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan

Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak adalah pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan berbudaya hak asasi manusia. Cakupan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Kota Denpasar menjadi fokus penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Salah satu indikator penting adalah cakupan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Data menunjukkan bahwa cakupan pelayanan ini mencapai 100%, yang menggambarkan bahwa setiap kasus kekerasan yang dilaporkan mendapatkan respons yang cepat dan komprehensif. Penjelasan yang dimaksud digambarkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 176
Grafik Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2025

Selain uraian yang telah disebutkan, cakupan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas dan rumah sakit juga mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan perawatan medis yang sesuai dan profesional. Cakupan rehabilitasi sosial oleh petugas terlatih juga mencapai 100%, menandakan upaya untuk memulihkan korban kekerasan secara sosial dan psikologis. Akan tetapi, ditemukan beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan lebih lanjut, seperti cakupan penegakan hukum. Meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani secara efektif oleh sistem peradilan. Selain hal itu, cakupan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa korban kekerasan dapat kembali ke masyarakat dengan dukungan yang memadai. Penjelasan ini dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 65
Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	N/A	98	98	98	98
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100
Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	N/A	52,94	52,94	52,94	52,94
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	N/A	28,05	28,05	28,05	28,05

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

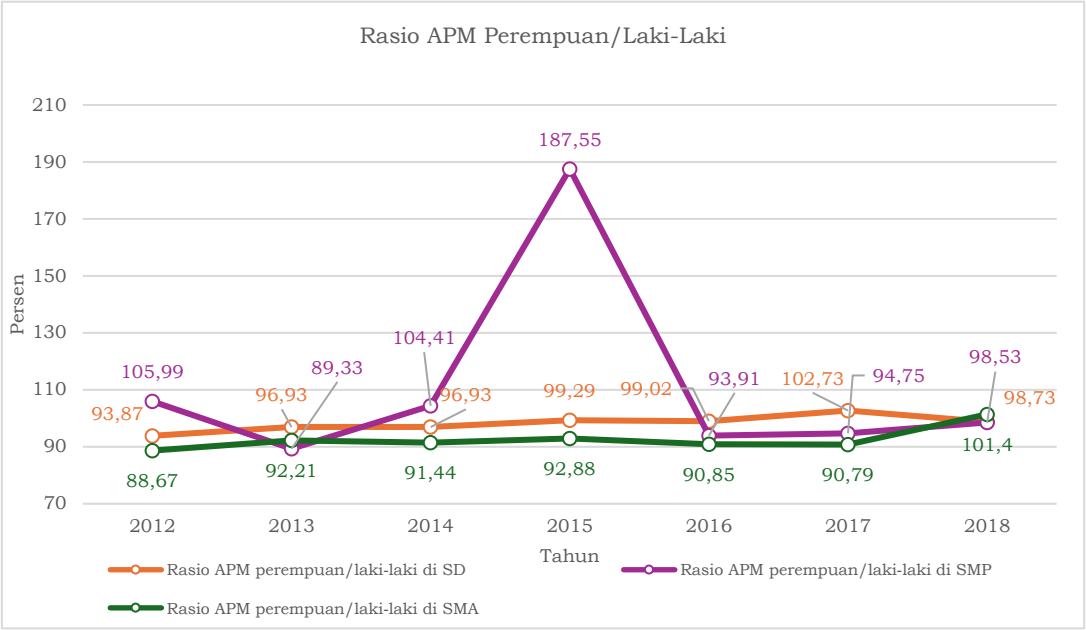
4. Kontribusi Perempuan pada Pendidikan

Kontribusi perempuan merupakan hal penting yang berdampak dalam menggerakkan perkembangan ekonomi dan sosial dalam suatu masyarakat. Salah satunya adalah pada bidang pendidikan yang berpengaruh pada partisipasi politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, hingga kontribusi dalam kemajuan daerah. Rasio APM (Angka Partisipasi Murni) perempuan/laki-laki di pendidikan adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki dalam suatu tingkat pendidikan tertentu. Rasio ini penting untuk memahami sejauh mana kesetaraan gender tercapai dalam akses dan partisipasi dalam pendidikan.

Data Rasio APM perempuan/laki-laki di Kota Denpasar selama periode 2012 hingga 2018 menunjukkan gambaran yang cukup positif. Di tingkat Sekolah Dasar (SD), rasio APM perempuan/laki-laki berkisar antara 93,87% hingga 102,73%. Ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar sangat mendekati atau bahkan melampaui partisipasi laki-laki. Namun, di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), terdapat fluktuasi yang lebih besar dalam rasio APM. Pada beberapa tahun, rasio ini lebih tinggi dari 100%, yang mungkin menunjukkan adanya ketidakseimbangan partisipasi gender di tingkat ini. Hal ini perlu dicermati lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua siswa, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki akses yang setara ke pendidikan menengah.

Di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), rasio APM perempuan/laki-laki berkisar antara 88,67% hingga 101,4%. Meskipun ada fluktuasi, rasio ini tetap mendekati tingkat kesetaraan gender yang baik. Secara keseluruhan, data Rasio APM menunjukkan komitmen Kota Denpasar untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan dasar dan menengah. Meskipun terdapat beberapa fluktuasi, masih ada potensi untuk terus memperbaiki

akses dan partisipasi perempuan di semua tingkatan pendidikan. Data yang dimaksud digambarkan pada grafik di bawah ini.



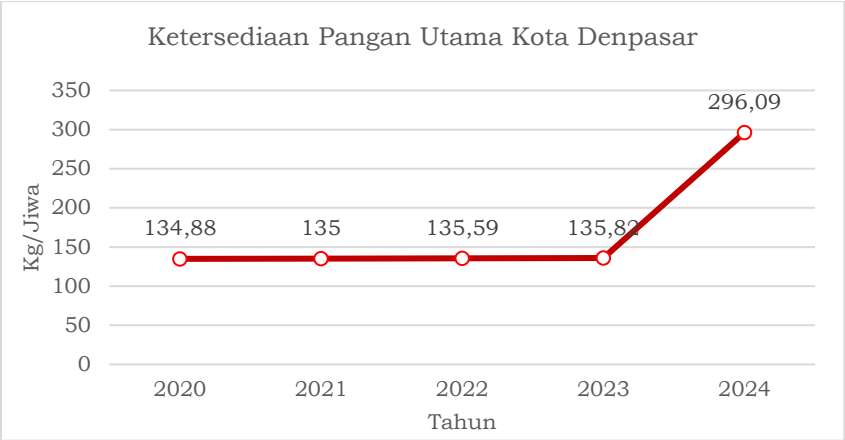
Gambar 2. 177
Grafik Rasio APM perempuan/laki-laki di Kota Denpasar Tahun 2012-2018
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2012-2018

C) Pangan

Salah satu indikator keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah optimalisasi status gizi masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Status gizi seseorang atau kelompok masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Berdasarkan Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2017, terdapat lima pilar utama yang menjadi fokus dalam upaya perbaikan status gizi masyarakat, yaitu 1) peningkatan gizi masyarakat; 2) mutu dan keamanan pangan; 3) perilaku hidup bersih dan sehat; 4) koordinasi pembangunan pangan dan gizi; dan 5) peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam.

1. Ketersediaan Pangan Utama

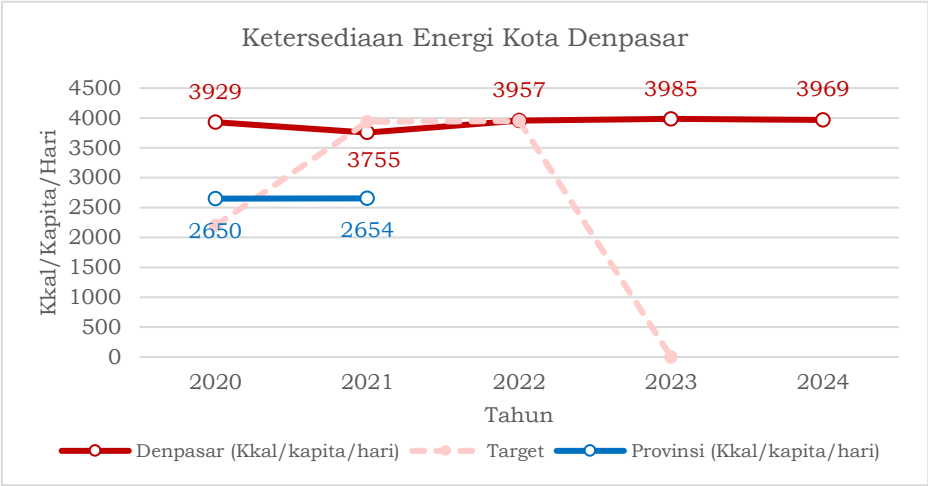
Ketersediaan pangan adalah kondisi ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak mampu memenuhi kebutuhan. Nilai ketersediaan pangan utama diketahui dari perbandingan antara rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun dengan jumlah penduduk. Kecukupan ketersediaan pangan di Kota Denpasar memiliki tren yang meningkat dari kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020, ketersediaan pangan utama di Kota Denpasar berkisar pada angka 134,88 kg/jiwa dan angka ini memiliki tren yang cenderung stabil hingga tahun 2023 dan kemudian mengalami kenaikan drastis pada tahun 2024 dengan angka 296,09 kg/jiwa. Penjelasan yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2. 178
Grafik Ketersediaan Pangan Utama Kota Denpasar 2020-2024
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024 , 2025

2. Ketersediaan Energi Masyarakat

Ketersediaan energi masyarakat di Kota Denpasar ini memiliki tren positif yang terus meningkat. Nilai yang tersedia pada tahun 2023 sudah memenuhi dari angka kebutuhan gizi per orang jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi, yaitu sekitar 2.100–2.750 kkal untuk AKE bagi usia produktif. Ketersediaan energi di Kota Denpasar mulai dapat memenuhi target pada tahun 2020-2024. Ketersediaan energi di Kota Denpasar ini menunjukkan peningkatan yang signifikan ada tahun 2020-2023 dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Bali. Penjelasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

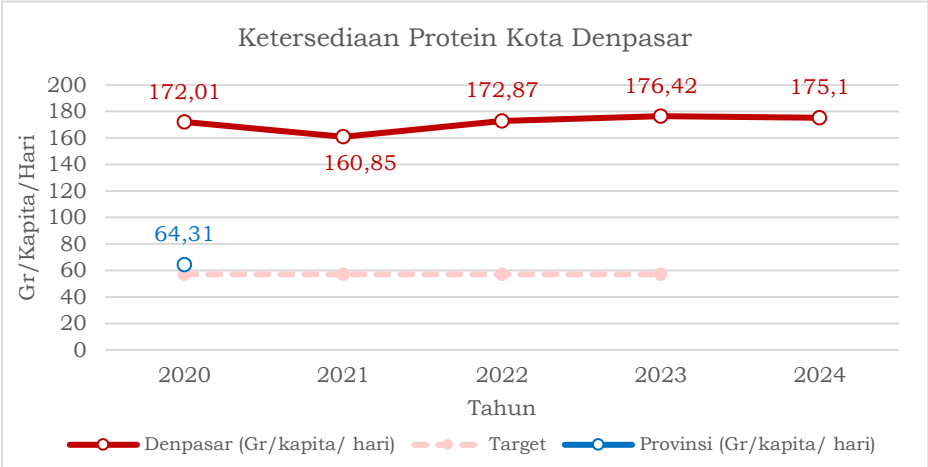


Gambar 2. 179
Grafik Ketersediaan Energi Kota Denpasar 2020-2024
Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

3. Ketersediaan Protein

Ketersediaan protein di Kota Denpasar memiliki tren yang cenderung meningkat dengan capaian pada tahun 2020-2024 berada di atas nilai Provinsi Bali. Ketersediaan protein ini telah mencapai target pada tahun 2020 dengan capai 172,01 Gr/kapita/hari yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali dengan capaian pada 64,31 Gr/kapita/hari. Nilai yang tersedia pada tahun 2024 sudah memenuhi dari angka kebutuhan gizi per orang jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Protein (AKP) berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi, yaitu sekitar 56–65 gr untuk AKP bagi usia produktif. Penjelasan yang dimaksud dirincikan sebagai berikut.

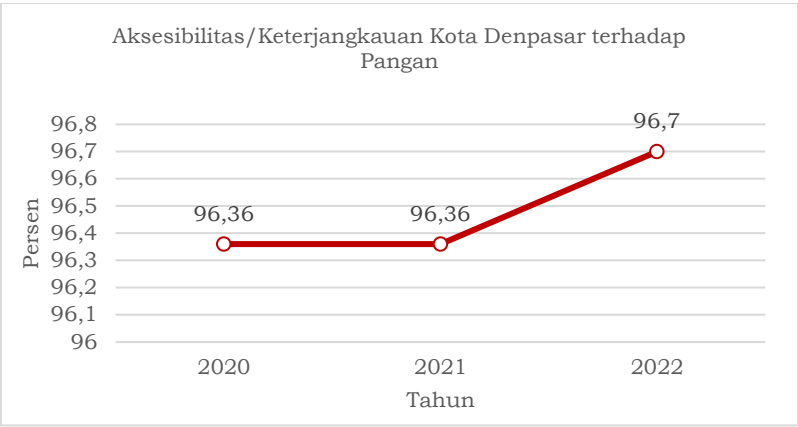


Gambar 2. 180
Ketersediaan Protein Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

4. Aksesibilitas/Keterjangkauan terhadap Pangan

Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan yang cukup, berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, maupun bantuan pangan. Walaupun di suatu wilayah sudah tersedia pangan yang cukup, sebagian orang bisa menderita kelaparan dikarenakan tidak memiliki akses terhadap pangan (*hunger paradox*). Beberapa faktor yang menyebabkan pangan tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu, antara lain: 1) Akses sosial yaitu modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapat dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman, dan program jaring pengaman sosial; 2) akses fisik yaitu keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan, berkaitan dengan tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi); dan 3) akses ekonomi yaitu kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi, tergantung pada pendapatan, harga, dan kesempatan kerja.

Capaian keterjangkauan/akses pangan di Kota Denpasar dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan tren meningkat setelah sempat menurun dengan nilai 96,36% pada tahun 2020. Capaian indikator akses pangan pada tahun 2022 sebesar 96,7%. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain, akses jalan/transportasi di wilayah pedesaan yang belum merata, terjadi inflasi pada beberapa komoditas pangan utama, dan menurunnya daya beli masyarakat. Data yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.

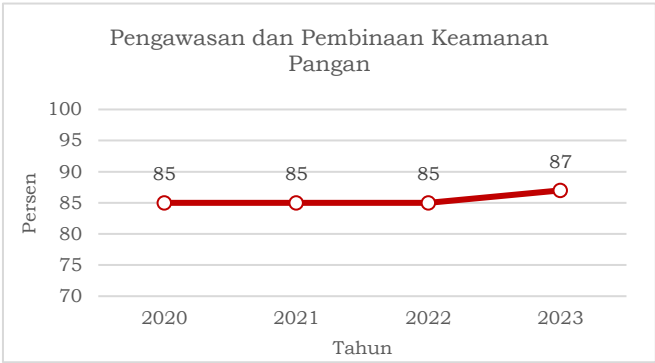


Gambar 2. 181
Grafik Aksesibilitas/Keterjangkauan Kota Denpasar terhadap Pangan Tahun 2020-2022

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan serangkaian tindakan terkoordinasi yang bertujuan memastikan ketersediaan makanan segar yang aman untuk dikonsumsi masyarakat, tanpa menghadapi potensi risiko dari kontaminasi bahan kimia atau mikroba. Dengan adanya pengawasan dan pemantauan keselamatan pangan, kita dapat mengurangi potensi gangguan dan dampak negatif terhadap kesehatan, serta mendukung konsumsi pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya untuk mendukung kesehatan dan perkembangan intelektual masyarakat. Kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami tren peningkatan. Sejak tahun 2020 persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mulai konsisten di angka 85%. Angka ini kembali meningkat hingga 87% pada tahun 2023. Data yang dimaksud dijelaskan dalam grafik di bawah ini.



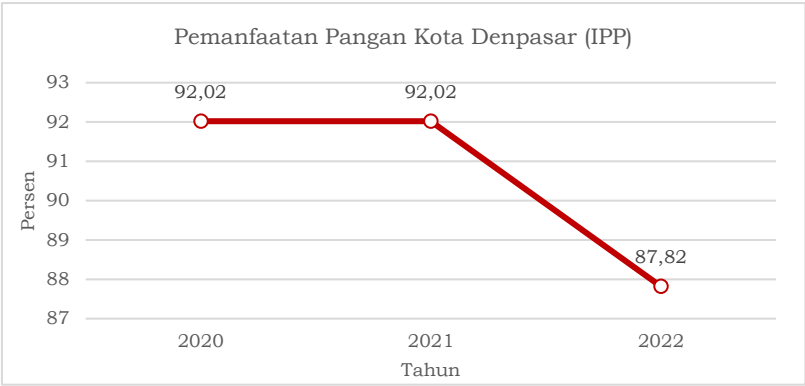
Gambar 2. 182
Grafik Persentase Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kota Denpasar Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

6. Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan merupakan penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan meliputi cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahan serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama

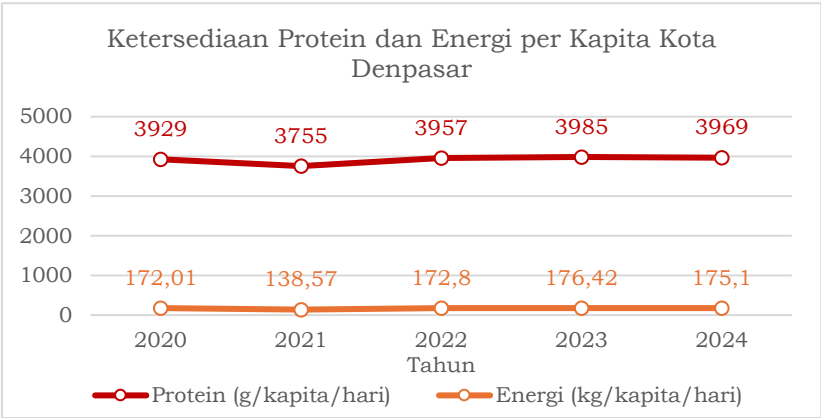
pada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai kebutuhan masing-masing individu (masa pertumbuhan, ibu menyusui, kehamilan, dll) atau status kesehatannya. Grafik menunjukkan adanya kekonsistenan persentase pada tahun 2020 dan 2021 yaitu mencapai angka 92,02%, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 87,82%, dengan rincian pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 183
Grafik Persentase Pemanfaatan Pangan Kota Denpasar Tahun 2020-2022
Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2023

7. Ketersediaan Protein dan Energi per Kapita

Ketersediaan energi dan protein per kapita merupakan jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk protein per g/kapita/hari, energi per kg/kapita/hari, dan lemak per g/kapita/hari. Grafik di atas menunjukkan ketersediaan protein dan energi per kapita mengalami tren yang terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 mencapai 3.969 gram/kapita/hari untuk protein dan 175,1 kg/kapita/hari untuk energi. Penjelasan ini dirincikan sebagai berikut.



Gambar 2. 184
Grafik Ketersediaan Protein dan Energi per Kapita Kota Denpasar 2020-2024
Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

8. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan di Daerah

Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah bertujuan untuk memastikan agar pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pasokan harga dan akses pangan untuk dapat digunakan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait masalah distribusi pangan. Persentase ketersediaan informasi

pasokan, harga, dan akses pangan di daerah mulai mencapai kekonsistennannya pada tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan nilai 100%.

9. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Stabilitas harga dan pasokan pangan bertujuan melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok. Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan pada grafik menunjukkan tren yang terus meningkat mulai dari tahun 2020 hingga 2024 selalu konsisten mencapai angka 100 persen.

10. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan, tidak ada akses secara fisik bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga, serta tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan, serta keterjangkauan harga. Persentase penanganan daerah rawan pangan di Kota Denpasar cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir dan mulai konstan dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu sudah mencapai angka 100 persen.

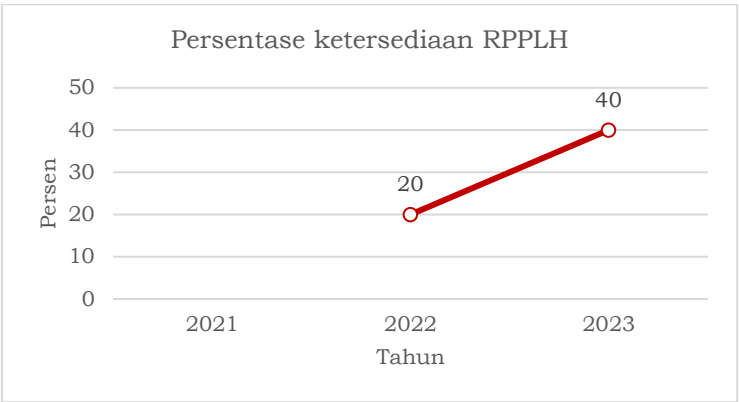
D) Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan langkah sadar dan terencana untuk memanfaatkan serta mengelola sumber daya secara bijaksana, dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup. Tanpa disadari, kegiatan fisik pembangunan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dapat memicu perubahan dalam ekosistem lingkungan. Maka dari itu, pertimbangan terhadap aspek lingkungan seharusnya menjadi landasan dalam setiap tahap pembangunan.

1. Ketersediaan dan Integrasi RPPLH Kota

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan inisiatif pemerintah yang berfokus pada isu lingkungan, diarahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini mewajibkan setiap wilayah untuk menyusun RPPLH yang mencakup analisis potensi, permasalahan, dan upaya dalam menjaga serta mengelola lingkungan hidup dalam periode tertentu. Proses perencanaan RPPLH melibatkan pemerintah mulai dari level nasional hingga kabupaten/kota, dengan integrasi dan keterkaitan antar

tingkatan. Saat ini, capaian ketersediaan RPPLH Kota Denpasar mengalami kenaikan dari tahun 2022 dari 20 persen menjadi 40 persen di tahun 2023. Ketersediaan ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Denpasar yang semakin baik dalam pembangunan yang memperhatikan lingkungan.



Gambar 2. 185
Grafik Persentase Ketersediaan RPPLH Kota Denpasar Tahun 2021-2023
Sumber: [kertas kerja evaluasi RPJMD], 2025

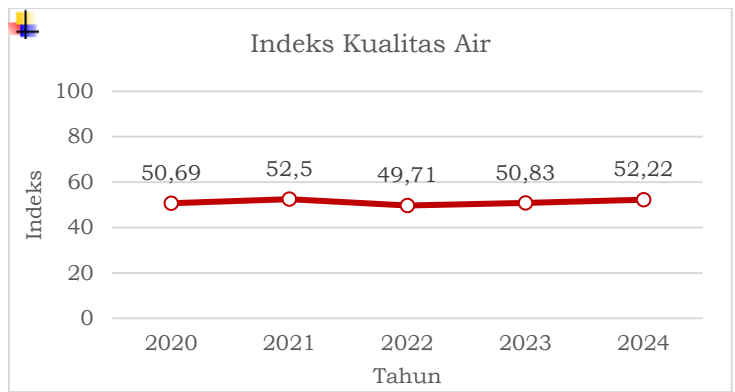
2. Penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan komponen penting dalam penyusunan RPPLH, yang ditetapkan sebagai persyaratan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS mengulas berbagai analisis secara sistematis, menyeluruh, dan melibatkan partisipasi, dengan tujuan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi secara mendasar dalam perkembangan wilayah maupun kebijakan daerah. Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, Kota Denpasar mulai memiliki Dokumen KLHS untuk K/R/P tingkat kota pada tahun 2023 sebanyak 1 dokumen.

3. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Panduan Penetapan Status Mutu Air, yang diukur melalui metode Indeks Pencemaran Air Sungai (PI). Indeks ini tidak hanya memberikan informasi tentang pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan, tetapi juga menjadi alat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya air.

Berdasarkan data DLHK Kota Denpasar, data IKA baru tersedia mulai tahun 2018, karena adanya perubahan struktur organisasi. Indeks Kualitas Air di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 dari 50,69 menjadi 52,5 dan pada tahun 2022 turun menjadi 49,7, di mana hal ini menggambarkan bahwa kualitas air di Kota Denpasar tergolong pada kategori “Kurang Baik” ($40 < IKA \leq 50$). Pada tahun 2024, angka ini kembali mengalami kenaikan menjadi 52,22. Meskipun demikian, angka ini masih mendekati ambang batas indeks kualitas air kurang baik. Maka dari itu, dalam perbaikan IKA diperlukan peningkatan mutu air dan optimalisasi pengelolaan air limbah, baik domestik maupun non domestik.

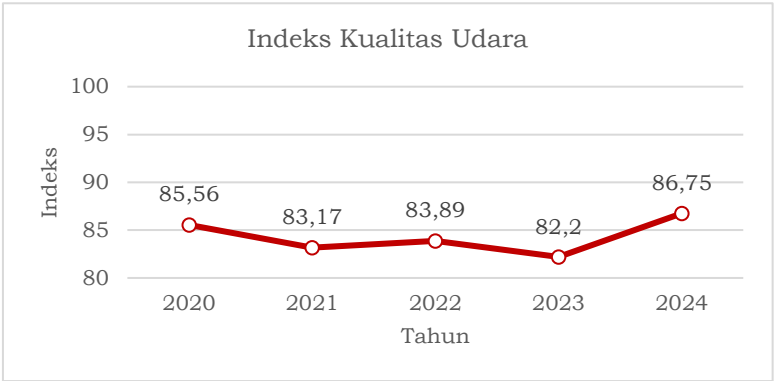


Gambar 2. 186
Indeks Kualitas Air Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2025

4. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Semakin tinggi nilai IKU, semakin buruk kualitas udara, dan dapat membahayakan kesehatan serta ekosistem. IKU digunakan oleh pemerintah dan lembaga lingkungan untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengurangi pencemaran udara dan menjaga kualitas udara yang sehat.

Berdasarkan data DLHK Kota Denpasar, data IKU baru tersedia mulai tahun 2018, karena adanya perubahan struktur organisasi. Tren IKU di Kota Denpasar mengalami penurunan, karena IKU menyentuh angka 85,56 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 86,75 pada tahun 2024. Berdasarkan hasil tersebut, kualitas udara di Denpasar termasuk dalam predikat Baik ($81 < \text{IKU} \leq 91$). Dalam hal ini, Denpasar perlu mempertahankan dan meningkatkan IKU yang telah dicapai.



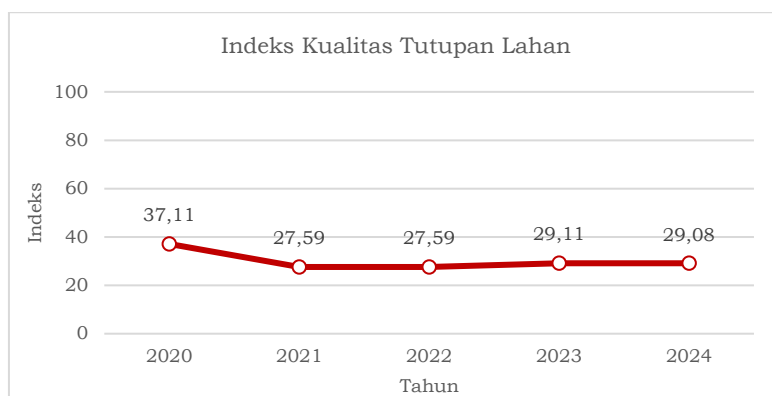
Gambar 2. 187
Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2025

5. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Indeks ini dapat digunakan untuk perencanaan tata ruang, pemantauan perubahan lahan, serta mengidentifikasi masalah

lingkungan seperti deforestasi, urbanisasi berlebihan, atau degradasi lahan. Dengan memahami IKTL, pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan lahan untuk menjaga lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

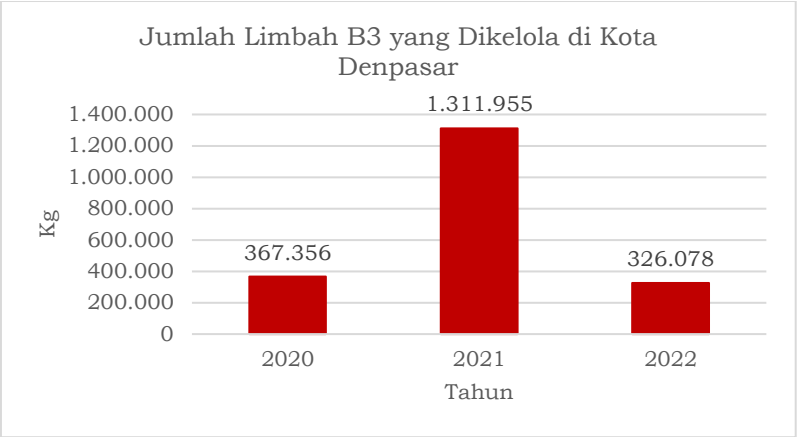
Berdasarkan data DLHK, IKTL Denpasar baru tersedia mulai tahun 2018, karena adanya perubahan struktur organisasi. IKTL mencapai angka 37,11 pada tahun 2020 tetapi turun menjadi 29,08 pada tahun 2024. Berdasarkan hasil tersebut, kualitas tutupan lahan di Denpasar berada pada predikat waspada ($IKTL \leq 40$). Pesatnya pembangunan di Denpasar mengurangi kualitas tutupan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan konservasi dan rehabilitasi.



Gambar 2. 188
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2025

6. Jumlah Limbah B3 yang Dikelola

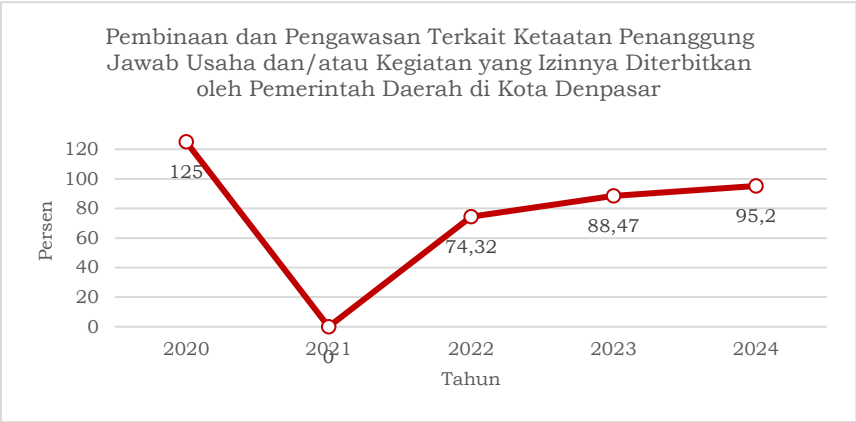
Jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikelola mengacu pada seberapa banyak limbah B3 yang dikelola dan ditangani dengan aman. Indikator ini membantu dalam mengukur keberhasilan pengelolaan limbah berpotensi berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Berdasarkan data DLHK, data jumlah limbah B3 yang dikelola baru tersedia mulai tahun 2018, karena adanya perubahan struktur organisasi. Jumlah limbah B3 yang dikelola Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dengan jumlah terendah sebanyak 326.078 kg pada tahun 2022 dan jumlah tertinggi sebanyak 1.311.955 kg pada tahun 2021. Tingginya jumlah limbah B3 diharapkan diatasi dengan upaya pengelolaan berkelanjutan, seperti dengan mengurangi, mendaur ulang, atau mengganti B3 dengan bahan yang lebih aman untuk menghindari pencemaran lingkungan yang serius. Oleh karena itu, peraturan dan standar yang berlaku terhadap pengelolaan limbah B3 dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pengelolaan limbah.



Gambar 2. 189
Jumlah Limbah B3 yang Dikelola Kota Denpasar Tahun 2020-2022
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2023

7. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Izinnya Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan pengawasan izin terkait lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengatur izin yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Proses ini melibatkan proses pemberian, pemantauan, dan penegakan persyaratan izin terkait dengan dampak lingkungan dari kegiatan atau proyek tertentu.

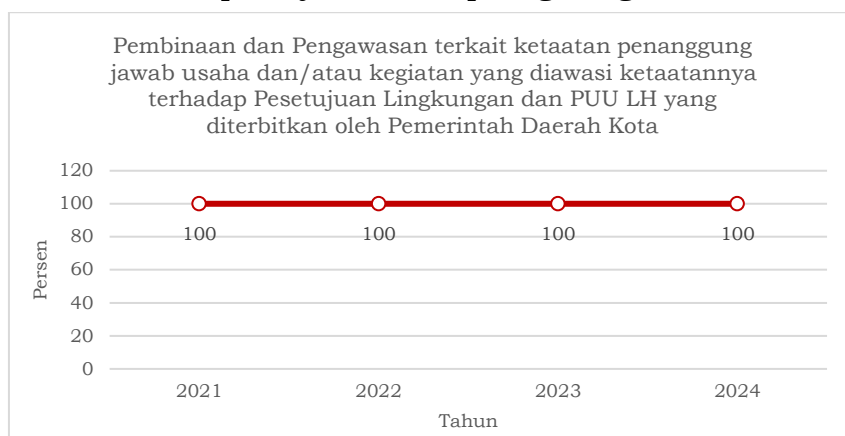


Gambar 2. 190
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Izinnya Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2025

Persentase ketaatan terhadap izin terkait lingkungan di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penurunan dari 125 persen pada tahun 2020 tetapi turun menjadi 74,32 persen pada tahun 2022 kemudian kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 95,20 persen. Hal ini menandakan bahwa pemantauan terhadap penanggung jawab usaha dan kegiatan atau proyek yang memiliki potensi dampak lingkungan dinilai telah konsisten dalam pemenuhan persyaratan izin, memastikan perusahaan atau individu yang menerima izin mematuhi ketentuan yang berlaku, dan memberikan sanksi atau tindakan korektif ketika ditemukan pelanggaran terhadap izin terkait lingkungan.

8. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Lokasi Usaha, dan Dampaknya

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, lokasi usaha, dan dampaknya adalah proses di mana masyarakat atau pihak terkait memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau pengaduan terkait penerbitan izin lingkungan, izin PPLH (Penilaian Pemantauan Lingkungan Hidup), dan PUU LH (Penilaian Usaha dan Upaya Lingkungan Hidup) oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Pengaduan ini berfokus pada izin-izin yang berkaitan dengan aktivitas usaha dan dampaknya terhadap lingkungan.



Gambar 2. 191
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat terkait Persetujuan Lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Kota Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2025

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Denpasar, lokasi usaha, dan dampaknya selama kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami kondisi yang stagnan. Hal ini menandakan bahwa dalam pengambilan keputusan terkait izin lingkungan dan dampaknya telah ada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, seperti kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, potensi pencemaran, ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan, hingga dampak sosial atau ekonomi yang mungkin timbul.

9. Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani

Persentase timbulan sampah yang tertangani dinyatakan sebagai perbandingan antara jumlah sampah yang berhasil dikelola (seperti didaur ulang, dibuang ke tempat pembuangan akhir yang sesuai, atau diolah dengan metode yang ramah lingkungan) dengan total jumlah sampah yang dihasilkan. Persentase ini mencerminkan efisiensi sistem pengelolaan sampah dalam mengumpulkan, mengangkut, dan memproses sampah sehingga tidak menciptakan masalah lingkungan.

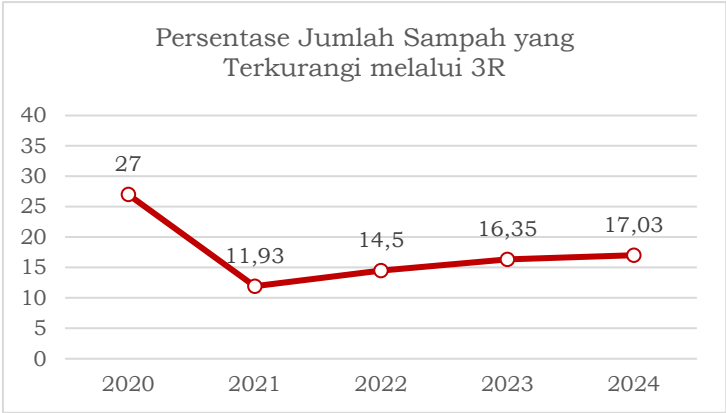


Gambar 2. 192
Persentase Timbunan Sampah yang Tertangani di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2025

Persentase timbunan sampah yang tertangani di Kota Denpasar pada tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari 93,2 persen menjadi 79,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase timbunan sampah yang tertangani perlu menjadi perhatian khusus terutama dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan, serta mempromosikan praktik daur ulang dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

10. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Pengurangan sampah melalui 3R melibatkan berbagai upaya, seperti pengurangan konsumsi barang yang tidak diperlukan, praktik penggunaan kembali benda atau material, dan proses daur ulang sampah. Persentase ini dihitung dengan membandingkan total volume sampah yang berhasil dikurangi melalui praktik 3R dengan total volume sampah yang dihasilkan. Indikator ini mengukur seberapa efektif suatu wilayah dalam mengurangi volume sampah yang dihasilkan dengan menerapkan konsep 3R.



Gambar 2. 193
Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2025

Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R mencapai persentase tertinggi pada tahun 2020 sebesar 27 persen, sementara persentase terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 11,93 persen kemudian

mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan nilai 17,03. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan prinsip-prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang dalam pengelolaan sampah belum efektif atau belum diterapkan secara maksimal. Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya praktik 3R, infrastruktur atau fasilitas daur ulang, dan kebijakan serta edukasi terkait manajemen sampah yang berkelanjutan.

11. Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan

Persentase cakupan area pelayanan persampahan adalah indikator yang mengukur sejauh mana wilayah atau area tertentu didukung oleh layanan pengelolaan sampah. Indikator ini mencakup jangkauan layanan seperti pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan sampah.

Persentase cakupan area pelayanan di Kota Denpasar selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu konsisten berada pada angka 100 persen. Hal ini menandakan cakupan area pelayanan sudah pada kondisi yang baik dan merata, sehingga lebih banyak area atau masyarakat yang telah terlayani oleh infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah di Kota Denpasar.

12. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Denpasar

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA bertujuan untuk mengelola sampah kota secara efisien dan mengurangi dampak negatif dari pembuangan sampah pada lingkungan. Hal ini juga merupakan indikator nilai pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2. 66
Penghargaan Adipura Kota Denpasar Tahun 2013-2022

Uraian	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penghargaan Adipura	Sertifikat Adipura	Adipura Kirana	Adipura Kirana	Adipura Kirana	Adipura Kirana	-	-	-	-	-

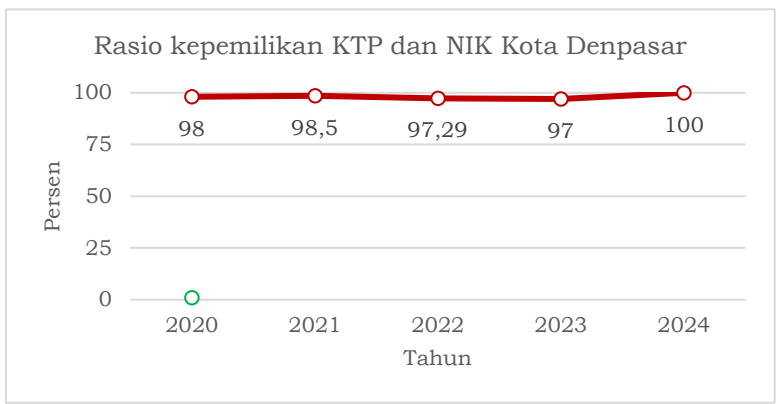
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2023

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2022 ditunjukkan dengan penghargaan adipura. Berdasarkan data DLHK, Kota Denpasar mendapatkan sertifikat adipura pada tahun 2013 dan penghargaan Adipura Kirana pada tahun 2014 hingga tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 hingga tahun 2022, Kota Denpasar belum berhasil mendapatkan penghargaan Adipura Kirana kembali. Hal ini menunjukkan belum adanya upaya baru untuk meningkatkan peluang mendapatkan penghargaan Adipura kembali, seperti melalui optimalisasi operasional TPA/TPST/SPA, promosi praktik 3R, kampanye dan edukasi publik mengenai konservasi lingkungan, kemitraan dengan swasta dan LSM, pengembangan kenyamanan dan keindahan ruang publik, peningkatan sarana dan prasarana umum terkait kebersihan kota, dan pemantauan rutin terhadap kebersihan kota, sistem pengelolaan sampah, dan kualitas lingkungan.

E) **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1. **Rasio Kepemilikan KTP dan NIK**

Rasio penduduk dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) per unit penduduk merupakan perbandingan antara jumlah individu yang memiliki KTP dan NIK dengan jumlah total penduduk dalam suatu area tertentu. Rasio ini berfungsi sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana KTP dan NIK telah menyebar di wilayah tersebut. Tingkat penyebaran yang tinggi mencerminkan kesuksesan pemerintah dalam menyelenggarakan penerbitan KTP dan NIK serta memastikan kepemilikan KTP dan NIK oleh masyarakat.

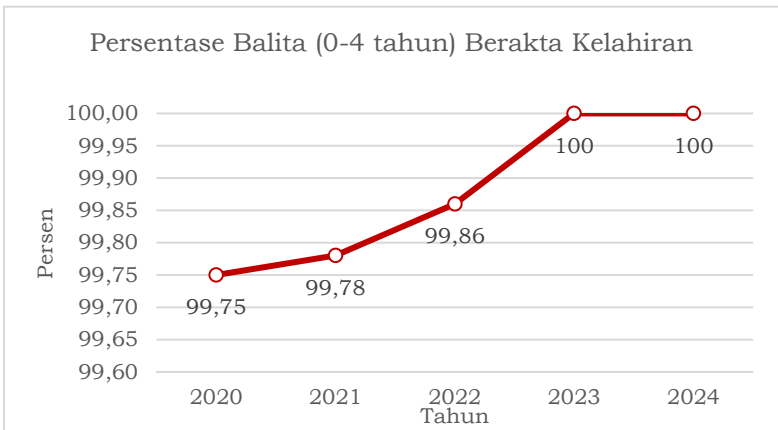


Gambar 2. 194
Rasio kepemilikan KTP dan NIK 2020-2024
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2025

Grafik di atas mencerminkan tingkat kepemilikan KTP dan NIK di Kota Denpasar. Rasio penduduk yang ber-KTP dan NIK di Kota Denpasar memiliki tren yang naik mulai tahun 2020 sampai 2024, angka tersebut sudah nilai yang tinggi yaitu 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada perbaikan fasilitasi penerbitan KTP dan NIK bagi penduduk.

2. **Persentase Balita (0-4 tahun) Berakta Kelahiran**

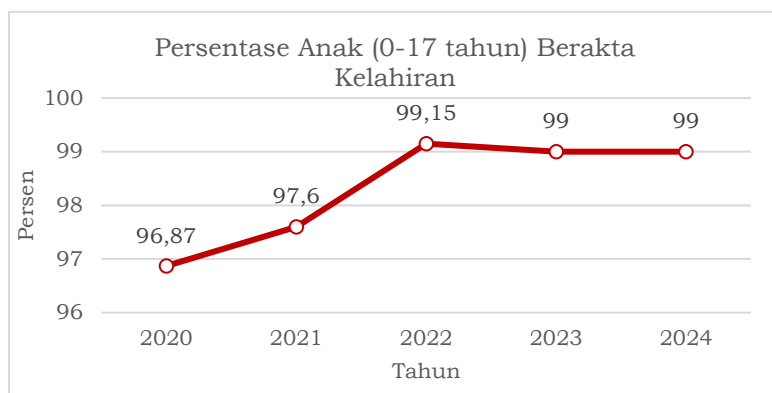
Persentase balita (0-4 tahun) berakta kelahiran di Kota Denpasar pada tahun 2020-2024 mengalami perkembangan cenderung meningkat. Pada kurun waktu tersebut persentase balita berakte kelahiran penduduk telah mencapai 100 persen di tahun 2023-2024.



Gambar 2. 195
Persentase Balita (0-4 tahun) Berakta Kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2025

3. Persentase anak (0-17 tahun) berakta kelahiran

Persentase anak (0-17 tahun) berakta kelahiran di Kota Denpasar pada tahun 2020-2024 terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 mencapai angka 99,15 persen dan mengalami sedikit penurunan menjadi 99 persen di tahun 2023-2024. Meskipun sudah dapat terbilang cukup tinggi persentasenya, akan tetapi belum mencapai 100%, yang berarti belum semua anak terdaftar akta kelahirannya.



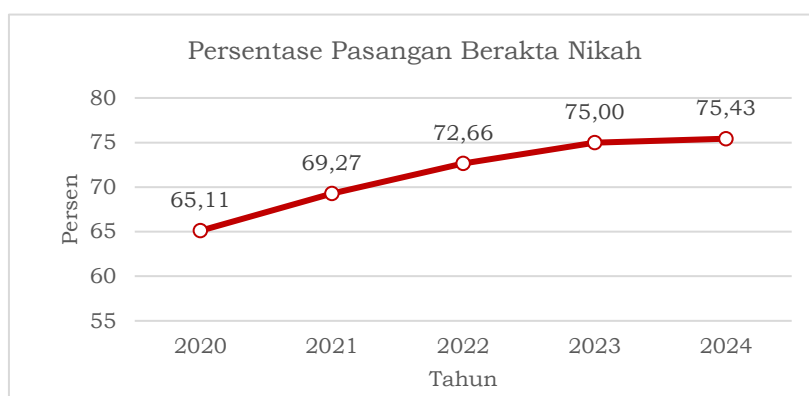
Gambar 2. 196

Persentase Anak (0-17 tahun) Berakta Kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2025

4. Persentase Pasangan Berakta Nikah

Persentase pasangan berakta nikah di Kota Denpasar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi belum dapat mencapai angka maksimal yaitu 100%, hal tersebut menandakan bahwa masih banyak pasangan suami istri yang belum mendaftarkan akta nikahnya.



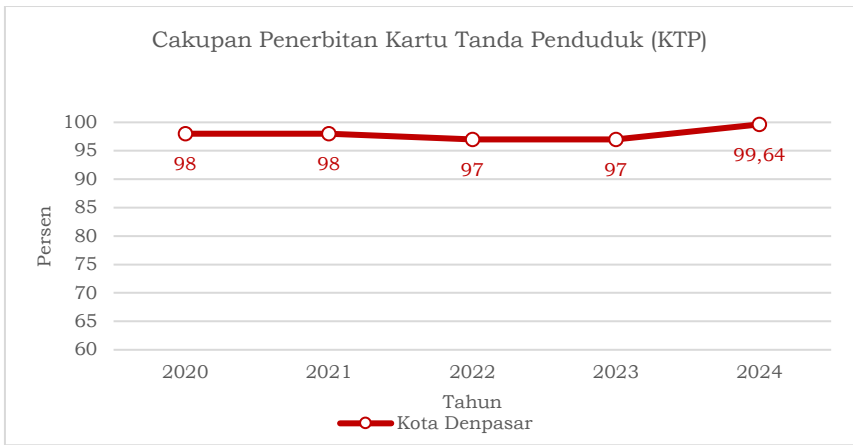
Gambar 2. 197

Persentase Pasangan Berakta Nikah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2025

5. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

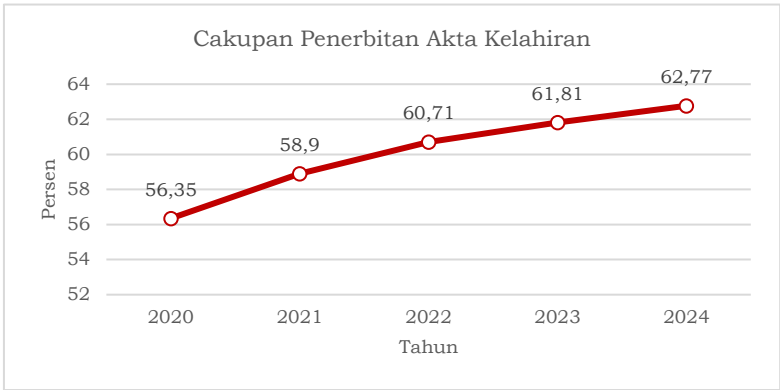
Pada kurun waktu tersebut cakupan penerbitan KTP belum mencapai 100%. Angka ini belum mencapai angka yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dengan nilai cakupan penerbitan KTP sebesar 100%.



Gambar 2. 198
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2025

6. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

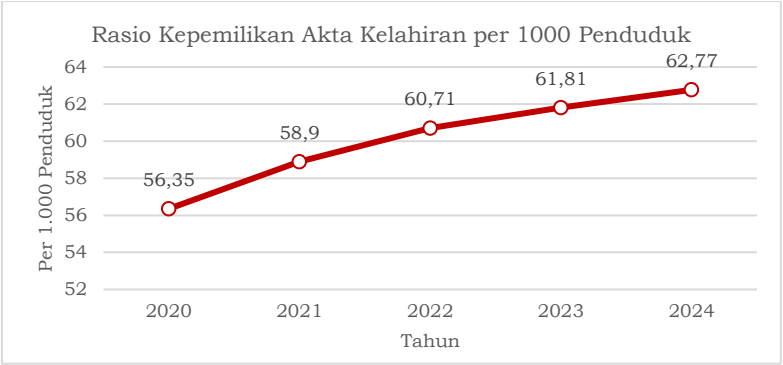
Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kota Denpasar dalam periode 2020-2024 menunjukkan tren yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 angka tersebut mencapai 56,35 persen dan di tahun 2024 meningkat menjadi 62,77 persen. Akan tetapi, angka ini belum mencapai angka yang telah disebutkan dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan di mana cakupan penerbitan akta kelahiran sebesar 100 persen.



Gambar 2. 199
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kota Denpasar 2020-2024
 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2025

7. Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk merupakan angka yang menunjukkan banyaknya penduduk yang memiliki akta kelahiran per 1000 jumlah penduduk.



Gambar 2. 200
Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan menunjukkan peningkatan hingga pada tahun 2024 mencapai angka 62,77 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum semua penduduk memiliki akta kelahiran.

F) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib terkait pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal ini mencerminkan semangat otonomi daerah yang semakin ditekankan dalam konsep desentralisasi pemerintahan. Berikut diuraikan kinerja pembangunan Kota Denpasar dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa:

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Sarana dan prasarana perkantoran yang baik dalam konteks pemerintah desa menjadi hal penting dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Sarana perkantoran yang baik mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur fisik hingga sistem administrasi yang efisien. Indikator ini mencerminkan kualitas kantor kelurahan/desa di Kota Denpasar yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa di Kota Denpasar:

Tabel 2. 67
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Unit	27	27	27	27	27
Jumlah seluruh pemerintahan desa	Unit	27	27	27	27	27
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2025

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik cenderung memiliki nilai yang stabil dengan angka 100 persen hingga tahun 2024. Hal ini menandakan sejak tahun 2020 hingga saat ini seluruh kelurahan/desa di Denpasar telah memiliki sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, sehingga diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa secara maksimal. Meski demikian, kualitas pelayanan tidak hanya dicerminkan dari cakupan sarana prasarana, tetapi juga kapabilitas sumber daya aparatur kelurahan/desa dan pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh pada pelaksanaan pelaporan dan administrasi desa.

2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran krusial dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menggerakkan pembangunan di tingkat lokal. Indikator jumlah kelompok binaan LPM bertujuan untuk mengetahui jumlah kelompok binaan yang telah diberdayakan serta melihat sejauh mana upaya pemberdayaan masyarakat dan desa telah berkembang melalui penguatan kapasitas oleh LPM. Berikut merupakan rata-rata kelompok binaan LPM di Kota Denpasar:

Tabel 2. 68
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	43	43	43	43	43
Jumlah LPM	Kelompok	43	43	43	43	43
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, dalam rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2024, jumlah kelompok binaan LPM mengalami peningkatan dan dapat diketahui bahwa setiap LPM membina 1 kelompok binaan. Hal ini mencerminkan bahwa LPM belum mencapai tingkat optimal dalam meningkatkan jumlah kelompok binaan baru.

3. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah program yang menjadi tulang punggung dalam upaya pemberdayaan keluarga di tingkat lokal yang berwujud sebuah wadah kegiatan bagi kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. PKK memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel rata-rata kelompok binaan PKK di Kota Denpasar:

Tabel 2. 69
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	457	457	457	457	457
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2025

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK konsisten dengan 1 kelompok binaan untuk setiap PKK.

4. Persentase LPM Berprestasi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan entitas yang timbul atas inisiatif masyarakat, berfungsi sebagai mitra pemerintah setempat dalam mengakomodasi serta merealisasikan keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam sektor pembangunan. Untuk mendorong semangat kreativitas dan inovasi dalam masyarakat, diperlukan penyelenggaraan kompetisi dan peningkatan daya saing LPM. Dalam mencapai hasil pembangunan yang optimal, perlu ada dorongan kepada kelembagaan sosial masyarakat agar mencapai prestasi yang baik. Memberikan penghargaan kepada LPM yang berhasil mencapai prestasi diharapkan memotivasi seluruh LPM di kota/kabupaten dan menjadi kebijakan strategis untuk meningkatkan keaktifan lembaga masyarakat. Namun dari 2020 hingga 2024, LPM Kota Denpasar belum meraih prestasi di tingkat desa/kelurahan, kota, provinsi, atau nasional karena belum adanya kompetisi di tingkat nasional, provinsi, dan Kota Denpasar untuk mendorong prestasi LPM.

5. Persentase PKK Aktif

Kegiatan PKK aktif merujuk pada upaya aktif dan terus-menerus yang dilakukan oleh organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat desa, kelurahan, atau kota. Kegiatan tersebut melibatkan beragam program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan keterampilan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat. PKK yang aktif juga berfokus pada peran perempuan dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta berusaha menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Berikut tabel persentase PKK aktif di Kota Denpasar:

Tabel 2. 70
Persentase PKK Aktif di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PKK aktif	Kelompok	457	457	457	457	457
Jumlah PKK	Kelompok	457	457	457	457	457

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2025

PKK memiliki peran penting dalam mengimplementasikan visi dan misi pemerintah pada tingkat paling mikro, yaitu keluarga. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, persentase PKK aktif selalu berada pada angka 100 persen. Hal ini menandakan bahwa kegiatan PKK selalu aktif berjalan di Kota Denpasar.

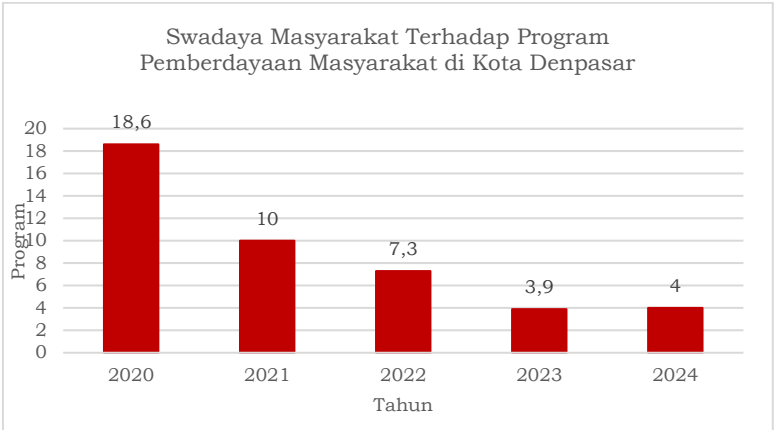
6. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat adalah konsep penting dalam upaya pemberdayaan komunitas lokal. Ini merujuk pada usaha dan kontribusi sukarela dari masyarakat untuk memecahkan masalah dan memajukan keadaan di lingkungan mereka tanpa keterlibatan eksternal atau bantuan finansial yang signifikan. Besaran swadaya masyarakat menunjukkan tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam membangun desa/kelurahannya. Adanya integrasi antara program pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok swadaya masyarakat akan meningkatkan peluang terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat dengan baik.

Tabel 2. 71
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	14.401	12.147	9.933	14.147	13.732
Total Program Pemberdayaan Masyarakat	Program	3	3	3	3	3

Sumber: RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 (diolah), 2025



Gambar 2. 201
Grafik Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2025

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, Kota Denpasar memiliki grafik jumlah program pemberdayaan masyarakat yang fluktuatif dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan 18,6 persen pemberdayaan masyarakat. Kontribusi ini signifikan, melibatkan dana, tenaga, dan pemikiran dari masyarakat sebagai kekuatan dari bawah.

Responsifnya pemerintah terhadap upaya masyarakat dapat meningkatkan semangat mandiri. Dengan demikian, memonitor, membina, dan mendukung kelembagaan sosial menjadi strategis dalam memajukan pembangunan masyarakat.

7. Cakupan BUMDesa Aktif

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah sebuah entitas penting yang berperan dalam menggerakkan ekonomi dan pemberdayaan di tingkat desa. BUMDesa bertujuan untuk memajukan potensi ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. BUMDesa didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola unit usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya.

Tabel 2. 72
Cakupan BUMDesa Aktif di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

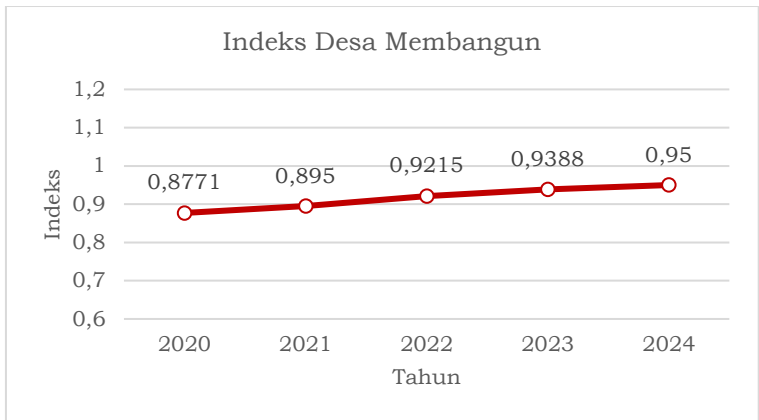
Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah BUMDesa aktif	BUMDesa	26	27	27	27	27
Jumlah BUMDesa seluruhnya	BUMDesa	27	27	27	27	27
Cakupan BUMDesa aktif	Persen	96,3	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 26 persen BUMDesa yang aktif pada tahun 2020 dari total 27 BUMDesa yang ada di Kota Denpasar. Pada tahun 2021 hingga 2024, seluruh desa telah memiliki BUMDesa masing-masing yang aktif berkegiatan untuk melakukan pemberdayaan dan membantu menggerakkan ekonomi desa.

8. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun adalah ukuran untuk menilai tingkat pembangunan di tingkat desa. Indeks ini mencakup beberapa dimensi seperti ekonomi (Indeks Kesehatan Ekonomi), sosial (Indeks Kesehatan Sosial), dan lingkungan (Indeks Kesehatan Lingkungan). Penggunaan Indeks Desa Membangun membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam mengevaluasi dan memetakan kondisi setiap desa untuk merencanakan program pembangunan yang lebih efektif serta mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam proses pembangunan desa.



Gambar 2. 202
Indeks Desa Membangun di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh, Indeks Desa Membangun Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan mengingat saat ini pemerintah Kota Denpasar fokus pada desa yang berkategori desa maju dan desa mandiri, karena tidak ada lagi desa yang berkategori desa tertinggal dan sangat tertinggal. Nilai Indeks Desa Membangun pada tahun 2019 sebesar 0,8407 meningkat menjadi 0,95 pada tahun 2024.

G) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesuburan dalam suatu populasi. TFR menggambarkan jumlah anak yang diharapkan akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa hidupnya. Berikut adalah tabel TFR di Kota Denpasar:

Tabel 2. 73
Total Fertility Rate (TFR) di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,10	1,86	1,83	1,85	1,85

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2024

Jika angka TFR lebih dari angka 2, maka rata-rata wanita melahirkan lebih dari 2 kali. Berdasarkan data, dalam kurun waktu tahun 2020, TFR Kota Denpasar menandakan bahwa rata-rata total kelahiran di Kota Denpasar adalah 2 orang anak. Pada tahun-tahun berikutnya, TFR Kota Denpasar cenderung menurun hingga menjadi 1,85 pada tahun 2024. Oleh karena itu, diharapkan angka ini terus dipertahankan seiring dengan upaya pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk yang berkelanjutan.

2. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) adalah inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan perencanaan keluarga dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal yang programnya dicanangkan pemerintah sejak tahun 2016. Kampung KB mengintegrasikan berbagai program dan

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perencanaan keluarga dan mendukung keluarga dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan jumlah dan jarak kelahiran. Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, seluruh perangkat daerah di Kota Denpasar (45 OPD) telah ikut berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB. Berdasarkan data dari Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2020 hingga tahun 2024 telah mencapai angka 100 persen.

3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Rencana Induk Pengendalian Penduduk adalah strategi dan kerangka kerja yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengelola dan mengatur pertumbuhan populasi suatu negara. Rencana ini biasanya mencakup berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengatasi masalah-masalah terkait kependudukan seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, pada tahun 2021 hingga 2023, terdapat 75 persen Perangkat Daerah Kota Denpasar yang merancang atau memanfaatkan Rencana Induk Pengendalian Penduduk. Meskipun pada tahun 2024 nilai tersebut meningkat menjadi 80 persen, nilai tersebut belum menunjukkan keseluruhan perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk, tetapi nilai tersebut sudah mencapai target tahunan yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan masif mengenai pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian Penduduk, sehingga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman oleh seluruh lembaga pemerintah daerah dalam merancang rencana dan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

4. Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk

Kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mengelola pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan jumlah kelahiran, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta upaya-upaya untuk mengatasi masalah seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, pada tahun 2021 sampai 2024, Kota Denpasar telah memiliki Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.

5. Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2021-2023 telah mencapai target, ditunjukkan pada semua sektor telah memanfaatkan data tersebut. Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Kota Denpasar dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) belum pernah mengembangkan parameter dan proyeksi penduduk, sehingga belum ada yang memanfaatkan data parameter dan proyeksi penduduk. DP3AP2KB menggunakan data statistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini pula yang menunjukkan bahwa upaya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk di Kota Denpasar masih belum mencapai tingkat optimal.

6. Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan adalah kemitraan yang melibatkan berbagai lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan yang fokus pada isu-isu kependudukan. Ini mencakup pendidikan formal (sekolah), nonformal (pelatihan, lokakarya), dan informal (kampanye, penyuluhan) untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang aspek-aspek kependudukan seperti perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan dampak pertumbuhan penduduk. Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan data dari Dinas P3AP2KB, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, belum ada kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan di Kota Denpasar, termasuk Sekehe Teruna Teruni, Karang Taruna, dan masyarakat. Angka tersebut naik menjadi 1 lembaga pada tahun 2024.

7. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Indikator ini menggambarkan angka anak yang diharapkan lahir per keluarga. Indikator ini juga merupakan indikator penting dalam analisis demografi dan kebijakan kependudukan, yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, perencanaan keluarga, dan kesejahteraan keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Denpasar dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah 2 anak per keluarga. Berikut adalah tabel rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Denpasar:

Tabel 2. 74

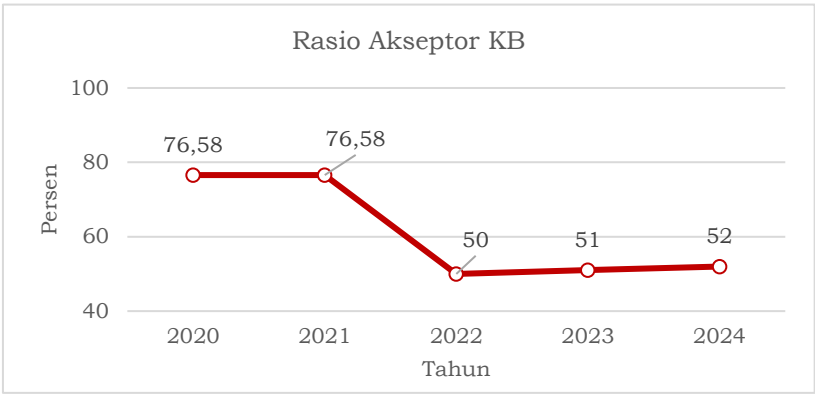
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	2	2	2 (1,02*)	2	2

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

8. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah individu atau pasangan yang aktif menggunakan metode kontrasepsi atau alat keluarga berencana (KB) untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. Rasio akseptor KB adalah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB di Kota Denpasar dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 203

Rasio Akseptor KB di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024, 2025

Rasio akseptor KB menurun drastis dari 76,58 persen pada tahun 2020 ke angka 52 persen pada tahun 2024. Untuk meningkatkan rasio akseptor KB diperlukan beragam upaya melalui pendidikan, layanan yang lebih mudah diakses, dan pengurangan stigma terhadap perencanaan keluarga.

9. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif adalah mereka yang aktif dan sadar dalam mengatur kelahiran anak melalui berbagai metode kontrasepsi atau alat keluarga berencana (KB). Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program keluarga berencana dan berkontribusi pada pengendalian pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 75

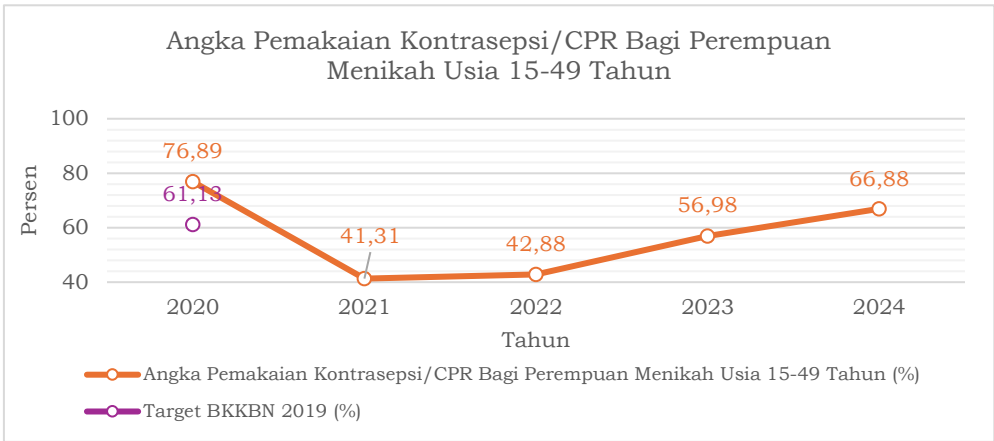
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah peserta KB aktif	Pasangan	62.491	29.362	28.181	45.337	58.191
Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	81.270	71.075	65.724	79.573	87.012
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi	Persen	76,89	41,31	42,88	56,98	66,88

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun						

Sumber: RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 dan DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Tabel di atas menunjukkan data angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun atau yang sering disebut dengan indikator cakupan peserta KB aktif dalam rentang lima tahun. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR mengalami fluktuasi dari tahun menurun hingga tahun 2024. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR cenderung menurun dari 76,89% pada tahun 2020 sekaligus menjadi capaian tertinggi. Kemudian, angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 41,31%. Angka tersebut kembali meningkat hingga menjadi 66,88% pada tahun 2024.



Gambar 2. 204
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 dan DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Pada waktu 2020, penggunaan kontrasepsi di Kota Denpasar secara konsisten melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar, dengan harapan bahwa ini akan mencegah peningkatan populasi yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Tingginya angka partisipasi dalam program KB juga mengindikasikan suksesnya upaya pengendalian jumlah penduduk.

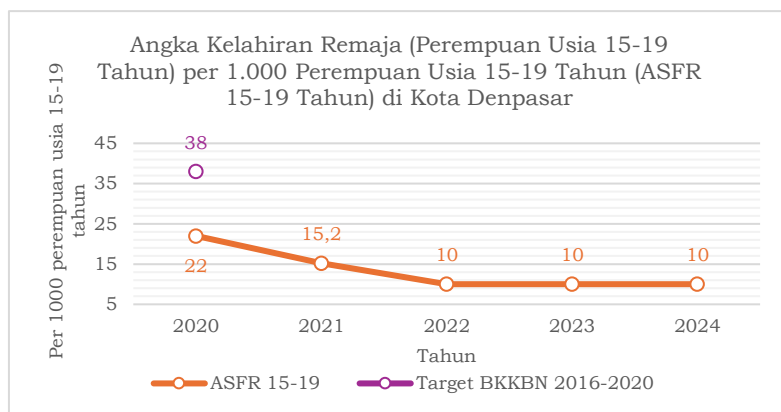
10. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun yang kemudian dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu di bawah 20 tahun, 20-35 tahun, dan di atas 35 tahun. Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya di bawah 20 tahun dapat berisiko tinggi bagi ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Usia terbaik untuk melahirkan adalah 20-35 tahun berdasarkan pertimbangan fisik dan mental. Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan program pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai usia kawin pertama. Kota Denpasar tidak

memiliki PUS dengan usia istri di bawah 20 tahun berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2021-2026. Sementara itu, data dari DP3AP2KB menunjukkan bahwa cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun pada tahun 2021 sebesar 0,11%; tahun 2022 sebesar 0,09%; dan tahun 2023-2024 sebesar 0,04%.

11. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)

ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) adalah indikator dalam analisis demografi yang mengukur tingkat kelahiran pada kelompok umur tertentu, biasanya dinyatakan per 1.000 wanita dalam kelompok usia 15-19 tahun. ASFR 15-19 tahun memberikan informasi penting tentang pola kelahiran dalam suatu populasi, menunjukkan seberapa sering kelahiran terjadi pada kelompok usia 15-19 tahun, kependudukan, dan proyeksi pertumbuhan penduduk.



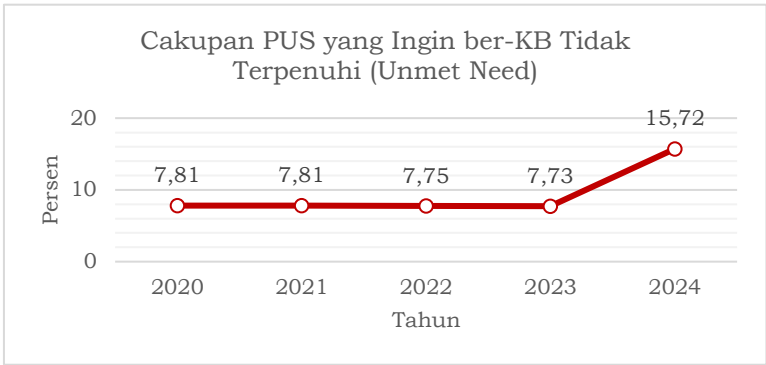
Gambar 2. 205
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 dan DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Secara keseluruhan, selama rentang tahun 2020-2024, angka kelahiran perempuan remaja di Kota Denpasar per jumlah perempuan usia 15-19 tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2022, angka ini turun menjadi 10 kelahiran per 1.000 remaja dalam kelompok usia yang sama. Jika dibandingkan dengan target ASFR BKKBN untuk tahun 2019, yang adalah 38 kelahiran per 1.000 remaja, Kota Denpasar bahkan telah melampaui target BKKBN pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa Kota Denpasar berhasil mengurangi angka kelahiran pada usia remaja 15-19 tahun.

12. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Unmet Need KB mengacu pada situasi ketika pasangan usia subur, terutama wanita, yang tidak ingin hamil atau ingin menunda kehamilan, ingin berhenti melahirkan, atau ingin menggunakan KB, tetapi belum terlayani, sehingga besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. *Unmet Need KB* menggambarkan kesenjangan antara kebutuhan individu terhadap perencanaan keluarga dan akses terhadap layanan kontrasepsi, termasuk akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan

kualitas pelayanan KB, sehingga cakupan ini digunakan untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah.



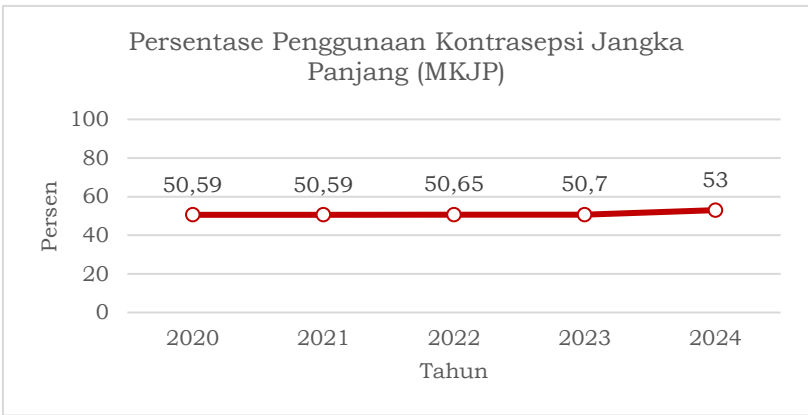
Gambar 2. 206
Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024, 2025

Adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menggunakan KB, tetapi tidak terpenuhi, menyebabkan upaya pengendalian penduduk terhambat. Pelayanan KB yang bertujuan untuk menekan angka kelahiran maupun pengendalian penduduk dinilai belum optimal. Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, angka *unmet need* KB di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dengan cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu 15,72 persen dan cakupan terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu 7,73 persen.

13. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah metode kontrasepsi yang dirancang untuk memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan. Metode ini mencakup penggunaan alat kontrasepsi seperti IUD (*Intrauterine Device*), implan atau susuk, tubektomi, atau vasektomi. MKJP memiliki keunggulan dalam efektivitas dan ketidakbutuhan untuk pemakaian sehari-hari, sehingga menjadi pilihan yang baik bagi pasangan yang ingin mengatur kelahiran anak dalam jangka panjang.



Gambar 2. 207
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

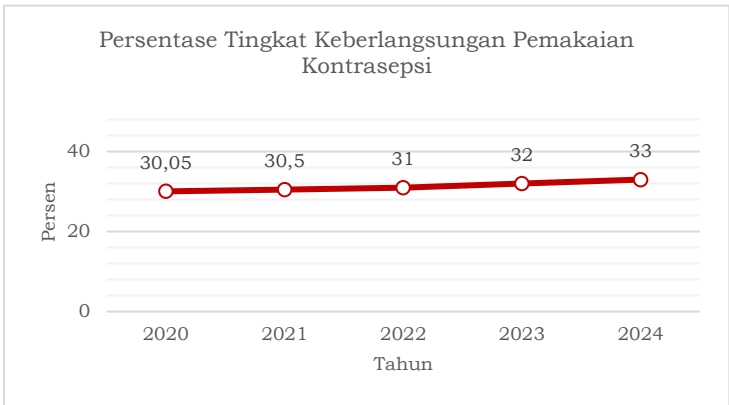
Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, persentase penggunaan MKJP di Kota Denpasar cenderung stagnan dengan cakupan

tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu 53 persen. Angka ini cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan rasio akseptor KB, pembinaan dan pelayanan dalam penyediaan kontrasepsi jangka panjang (MJKP) perlu ditingkatkan untuk mengendalikan jumlah kelahiran sebagai salah satu upaya pengendalian pertumbuhan penduduk.

14. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase keberlangsungan pemakaian, atau tingkat putus pakai kontrasepsi, mengukur sejauh mana pasangan yang mulai menggunakan metode kontrasepsi tertentu tetap menggunakan metode tersebut dalam jangka waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan seberapa stabil dan berkelanjutan pemakaian kontrasepsi dalam populasi. Jika tingkat putus pakai tinggi dapat menunjukkan bahwa metode kontrasepsi mungkin tidak cocok atau tidak efektif bagi sebagian besar pasangan, seperti mengalami kegagalan atau efek samping. Angka ini juga bisa disebut dengan kejadian *drop out* KB.



Gambar 2. 208
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

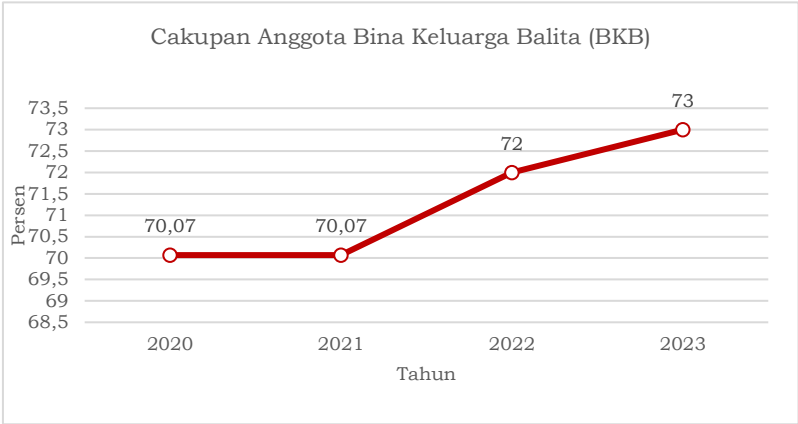
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024, 2025

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dari 30,04% pada 2020 menjadi 33% pada 2024. Dari data tersebut, kejadian *drop out* KB Kota Denpasar termasuk tinggi yang menandakan bahwa pemakaian alat kontrasepsi mengalami penurunan atau masih ada pasangan usia subur yang tidak lagi memakai kontrasepsi. Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa upaya pengendalian penduduk melalui alat kontrasepsi belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena itu, keberlangsungan pembinaan mengenai penggunaan alat kontrasepsi maupun penyediaan dan distribusi alat kontrasepsi harus ditingkatkan.

15. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota kelompok BKB ber-KB adalah upaya yang melibatkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada keluarga dengan fokus pada pemahaman dan praktik perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, serta peningkatan kesejahteraan anak balita. Kelompok BKB

pada hakikatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan ber-KB bagi para keluarga Balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.



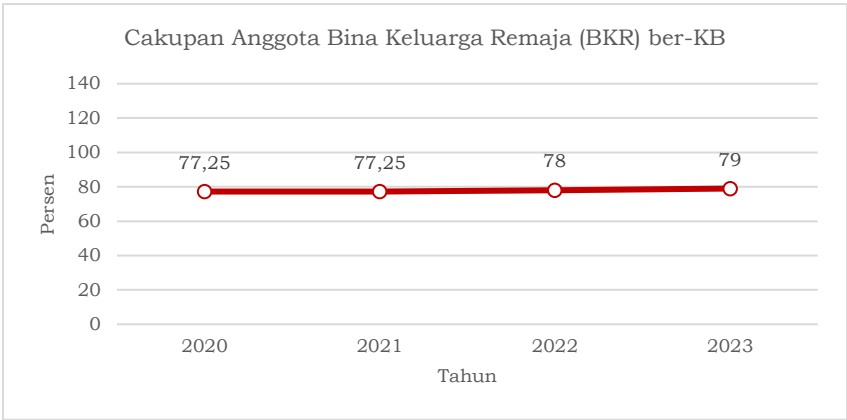
Gambar 2. 209
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Denpasar Tahun 2020-2023

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2023, cakupan anggota BKB ber-KB di Kota Denpasar terus mengalami kenaikan dengan cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu 73%. Hal ini menandakan bahwa keluarga yang memiliki balita telah memiliki perhatian terhadap upaya pengendalian penduduk dan melaksanakan KB, meski belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

16. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Cakupan anggota BKR ber-KB adalah jumlah kelompok dan anggota BKR yang merupakan PUS dan ber-KB dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota BKR. Kondisi cakupan anggota BKR ber-KB di Kota Denpasar dapat diamati pada gambar berikut:



Gambar 2. 210
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kota Denpasar Tahun 2020-2023

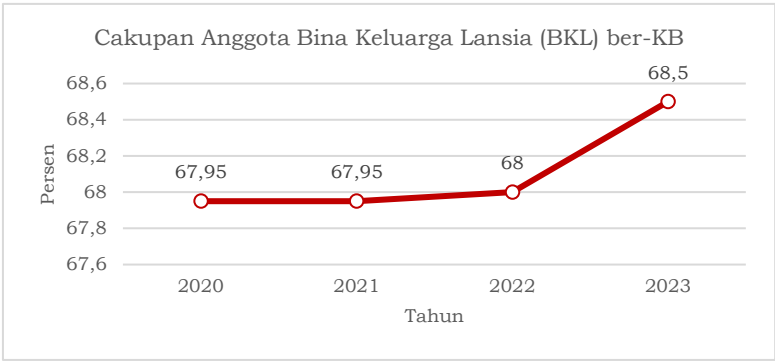
Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2023, cakupan anggota BKR ber-KB di Kota Denpasar mengalami kenaikan dari 77,25 persen pada tahun 2020 menjadi 79 persen pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa keluarga yang memiliki anak usia remaja telah memiliki

perhatian terhadap upaya pengendalian penduduk dan melaksanakan KB, meski belum sepenuhnya.

17. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Cakupan anggota BKL ber-KB adalah jumlah kelompok dan anggota BKL yang merupakan PUS dan ber-KB dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota BKL. Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2023, cakupan anggota BKL ber-KB di Kota Denpasar mengalami kenaikan dengan cakupan pada tahun 2020 yaitu 67,95% dan cenderung meningkat hingga mencapai 68,5% pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa keluarga yang terdiri dari lansia telah memiliki perhatian terhadap upaya pengendalian penduduk dan melaksanakan KB, meski belum sepenuhnya.



Gambar 2. 211
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kota Denpasar Tahun 2020-2023

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

18. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah fasilitas yang menyediakan berbagai layanan kesehatan, sosial, dan pendidikan kepada keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. Pelayanan yang ditawarkan mencakup pelayanan informasi tentang kependudukan dan KB, pelayanan konseling keluarga balita dan balita, pelayanan konseling bagi keluarga remaja dan remaja, pelayanan konseling keluarga lansia dan lansia, pelayanan konseling pranikah, pelayanan konseling KB dan kesehatan reproduksi, pelayanan khusus bagi keluarga (*married counseling*), dan pelayanan usaha ekonomi produktif bagi keluarga.

Tabel 2. 76
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan di Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2023	2024
Jumlah PPKS	Unit	1	1	1	1	1	1
Jumlah Kecamatan	Kecamatan	4	4	4	4	4	4
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	Persen	25	25	25	25	25	25

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2024

Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, pengembangan PPKS di Kota Denpasar dinilai belum optimal, ditandai dengan PPKS baru tersedia 1 unit, kurangnya dukungan aparat untuk mengaktifkan PPKS, sarana dan prasarana kurang memadai selama tahun 2020-2024. Persentase PPKS

selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2023 hanya 25 persen. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya peran kelembagaan dalam peningkatan kualitas keluarga dan anak, serta kapasitas peserta KB.

19. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa

Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa adalah fasilitas yang menyediakan layanan informasi dan konseling khusus untuk remaja dan mahasiswa, yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja/mahasiswa tentang pendewasaan usia pernikahan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV/AIDS, dan Napza), keterampilan hidup (*life skills*), gender dan keterampilan advokasi dan KIE.

PIK remaja/mahasiswa sebagai wadah kegiatan program GenRe (generasi berencana), remaja dapat memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku sebagai remaja yang mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga- sehingga dapat tumbuh generasi yang sehat.

Tabel 2. 77
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa di Daerah Kota Denpasar Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PIK R/M	Unit	27	19	20	21	22
Jumlah Kecamatan	Kecamatan	4	4	4	4	4
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa	Persen	630	475	500	525	-

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

20. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) adalah individu yang dilatih untuk memberikan informasi, edukasi, dan konseling terkait perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. PKB biasanya berfokus pada penyuluhan kepada keluarga atau individu, sedangkan PLKB sering kali bekerja di lapangan untuk memberikan dukungan teknis kepada PKB dan memantau pelaksanaan program KB. Berikut adalah tabel cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kota Denpasar:

Tabel 2. 78
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PKB dan PKLB yang didayagunakan	Orang	43	43	43	43	38
Jumlah PKB/PLKB	Orang	43	43	43	43	38
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah konsisten mencapai angka 100 persen tiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa 38 orang PKB dan PLKB yang didayagunakan dapat menjadi pendukung untuk meningkatkan efektivitas dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kota Denpasar.

21. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah program atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, terutama keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rendah, beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB. Dalam menjaga kelangsungan kesertaan ber-KB, dilakukan upaya pembinaan KPS dan KS I untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB, serta bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan KB swasta.



Gambar 2. 212
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024, 2025

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri mengalami fluktuasi. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 56,5 persen dan cakupan

terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 55,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah KS yang diarahkan ke pelayanan KB swasta semakin menurun. Dengan kata lain, UPPKS masih belum optimal dalam peningkatan kemampuan KS untuk melakukan KB dengan pelayanan yang lebih baik.

22. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/ Kelurahan

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah individu atau beberapa orang kader yang secara sukarela bertugas di tingkat desa atau kelurahan untuk memberikan bimbingan, informasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait Program Keluarga Berencana Nasional. PPKBD juga sebagai mitra PKB/PLKB yang bekerja dalam kerangka program KB dan perencanaan keluarga, membantu masyarakat memahami berbagai metode kontrasepsi, memberikan dukungan dalam perencanaan keluarga, dan memastikan layanan kesehatan reproduksi tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Setiap 1 kampung/kelurahan minimal tersedia 1 PPKBD. Berikut adalah tabel rasio PPKBD setiap desa/kelurahan di Kota Denpasar:

Tabel 2. 79
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/ Kelurahan di Daerah Kota Denpasar Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah petugas pembantu pembina KB desa	Orang	43	43	43	43	43
Jumlah desa	Kecamatan	43	43	43	43	43
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/ Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100

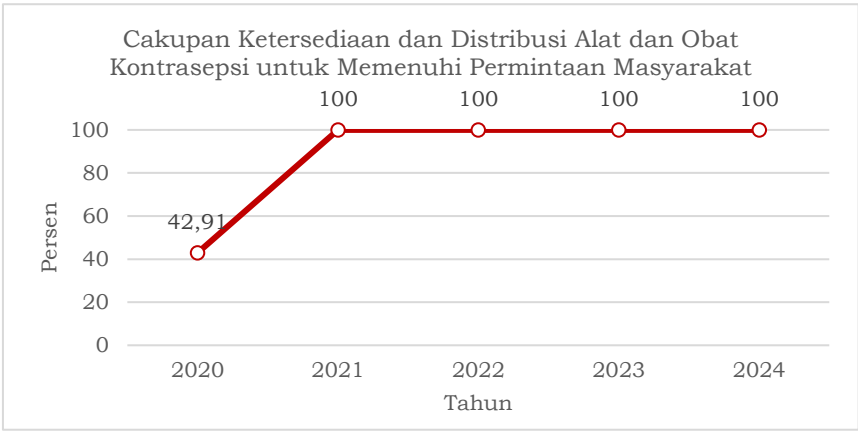
Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2024

Selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2024, jumlah petugas pembantu pembina KB desa bersifat konstan pada 43 orang yang melayani 43 desa/kelurahan. Dengan kata lain, rasio petugas pembantu KB desa untuk setiap desa/kelurahan sudah mencapai angka 100% selama kurun waktu tersebut, di mana sudah tersedia 1 PPKBD untuk tiap desa/kelurahan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan PPKBD akan membantu masyarakat memahami berbagai metode kontrasepsi dan memberikan dukungan dalam perencanaan keluarga.

23. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat melibatkan beberapa langkah, seperti: (a) pemerintah daerah kabupaten/kota harus menyediakan sekitar 30 persen dari pasokan, (b) penyimpanan harus mematuhi standar yang telah ditetapkan, (c) distribusi alat dan obat kontrasepsi dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan di setiap kabupaten/kota, dan (d) pencatatan dan pelaporan penggunaan alat

dan obat kontrasepsi harus dilakukan di semua tingkatan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencapai Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) di kabupaten/kota dengan mematuhi prinsip-prinsip seperti pengadaan yang tepat waktu, produk yang sesuai, jumlah yang sesuai, sasaran yang tepat, harga yang tepat, dan lokasi yang tepat.



Gambar 2. 213
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Peningkatan cakupan yang cukup signifikan dari 42,91% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2021 hingga 2024. Peningkatan cakupan mencapai 100 persen yang menunjukkan bahwa Kota Denpasar telah melebihi target 30 persen pasokan.

24. Persentase Faskes dan Jejaringnya (di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola program-program jaminan sosial di Indonesia dengan salah satu programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang memberikan perlindungan kesehatan bagi peserta yang terdaftar. Program JKN mencakup berbagai jenis layanan kesehatan, termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KBKR). BPJS bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan dan penyedia layanan kesehatan untuk menyediakan layanan KBKR kepada pesertanya, seperti vasektomi & tubektomi, pemasangan alat kontrasepsi dan konsultasi, pemasangan dan pelepasan alat KB spiral, dan KB suntik. Berikut adalah tabel persentase faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.

Tabel 2. 80
Persentase Faskes dan Jejaringnya (di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah faskes dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS	Unit	63	61	80	90	90
Jumlah faskes dan jejaring	Unit	63	92	133	150	150
Persentase Faskes dan Jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS	Persen	100	66,3	60,15	60	60

Sumber: RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 dan DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Selama tahun 2020, persentase faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan konsisten berada di angka 100 persen. Hal ini menandakan bahwa seluruh fasilitas kesehatan dan jejaringnya di seluruh tingkatan wilayah telah terpenuhi dengan BPJS dan telah memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standar pelayanan. Namun, persentase tersebut menurun mulai tahun 2021 menjadi 66,3%, hingga mencapai angka 60% pada tahun 2024. Penurunan tersebut dapat terjadi karena adanya penambahan jumlah faskes dan jejaring yang cukup signifikan belum diimbangi dengan peningkatan jumlah faskes dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS.

25. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Ketersediaan data mikro keluarga di setiap kampung/kelurahan mengacu pada ketersediaan dan penggunaan data mikro keluarga dalam mendukung layanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KS) serta bimbingan keluarga di setiap kampung/kelurahan. Data mikro keluarga mencakup informasi tentang individu dan anggota keluarga, termasuk data demografi, riwayat KB, dan tahapan KS. Data ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan program KB di tingkat kampung/kelurahan.

Penyediaan data mikro keluarga di kampung/kelurahan dilakukan melalui metode pendataan keluarga yang diselenggarakan secara tahunan secara bersamaan. Hasil dari pendataan keluarga tahunan ini dapat digunakan untuk melakukan analisis dalam berbagai aspek, termasuk data demografi, KB, dan tahapan KS, dan hasilnya digunakan untuk merancang program intervensi layanan KB dan KS.

Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 dan data dari DP3AP2KB Kota Denpasar, cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa di Kota Denpasar telah mencapai 100 persen pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 di mana terdapat 95.385 informasi dan data mikro keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh informasi data mikro telah tersedia di setiap desa sebagai data dasar untuk melakukan proses perencanaan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kependudukan.

26. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera perlu upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan 8 fungsi keluarga yang terdiri dari agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Berikut adalah tabel cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kota Denpasar:

Tabel 2. 81
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok	24	424	461	540	540
Jumlah kelompok kegiatan	Kelompok	24	424	461	540	540
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 dan DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga konsisten berada di angka 100 persen tiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa seluruh kelompok kegiatan di Kota Denpasar telah melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga, sehingga diharapkan dapat membantu dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan mendukung perkembangan anggota keluarga yang optimal. Dalam pembinaan keluarga, penting untuk memahami dan memperkuat setiap fungsi ini untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

27. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak menggambarkan besaran keluarga yang telah memahami dan mengimplementasikan pengasuhan, perawatan, dukungan, dan bimbingan yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak. Berikut adalah tabel cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di Kota Denpasar:

Tabel 2. 82
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	Keluarga	9.846	-	-	-	-
Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	Keluarga	9.846	-	-	-	-
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

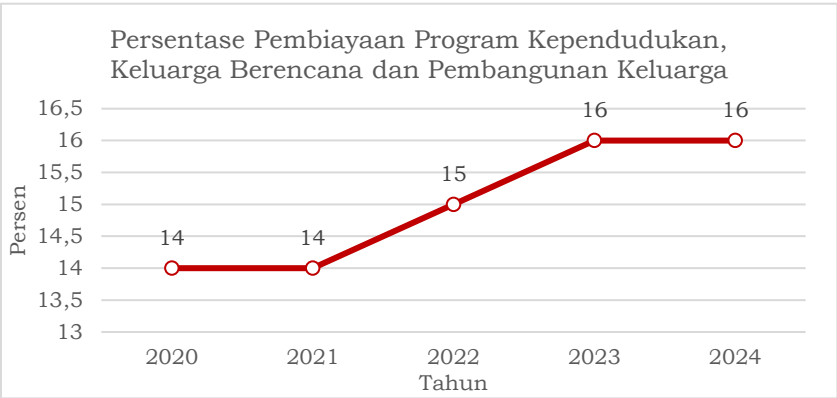
Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak konsisten berada di angka 100 persen tiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pembangunan keluarga telah dilakukan sejak anak berusia dini untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan memastikan bahwa anak-anak memiliki lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional yang sehat.

28. Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

Usia kawin pertama wanita adalah usia ketika seorang wanita menikah untuk pertama kalinya. Usia kawin pertama wanita bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti budaya, agama, hukum, dan kebijakan pemerintah. Penting untuk memahami dan memantau usia kawin pertama wanita karena memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan wanita, kesehatan reproduksi, perkembangan anak-anak, dan demografi populasi. Semakin muda UKP, maka masa reproduksi wanita akan semakin panjang atau semakin banyak kemungkinan anak yang dilahirkan. Kebijakan dan program yang mendukung usia kawin yang lebih tua dan berbasis kesepakatan serta pendidikan dapat memiliki dampak positif pada masyarakat dan keluarga, sehingga UKP digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara pendewasaan usia pernikahan. Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, rata-rata usia kawin pertama wanita di Kota Denpasar adalah usia 23 tahun. Usia ini tergolong usia yang cukup matang bagi wanita untuk menikah dan membangun keluarga. Sementara itu, rata-rata usia kawin pertama wanita menurut DP3AP2KB Kota Denpasar pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 secara berturut-turut adalah 24; 24,1; 23,7 tahun.

29. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana, dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes merujuk pada alokasi dana dan sumber pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka mendukung program-program terkait kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga. Dana ini diperoleh dari APBD dan APBDes di tingkat pemerintah kabupaten/kota dan desa.



Gambar 2. 214
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 terjadi perkembangan jumlah anggaran pada penyelenggaraan urusan PPKB cenderung meningkat, di mana terjadi peningkatan pada tahun 2021-2024. Hal ini menggambarkan bahwa pendanaan pada APBD dan APBDes untuk program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga semakin diprioritaskan, sehingga kedepannya diharapkan urusan pengendalian penduduk dan KB tetap mendapatkan dukungan anggaran untuk meningkatkan efektivitas upaya pengendalian penduduk.

H) Perhubungan

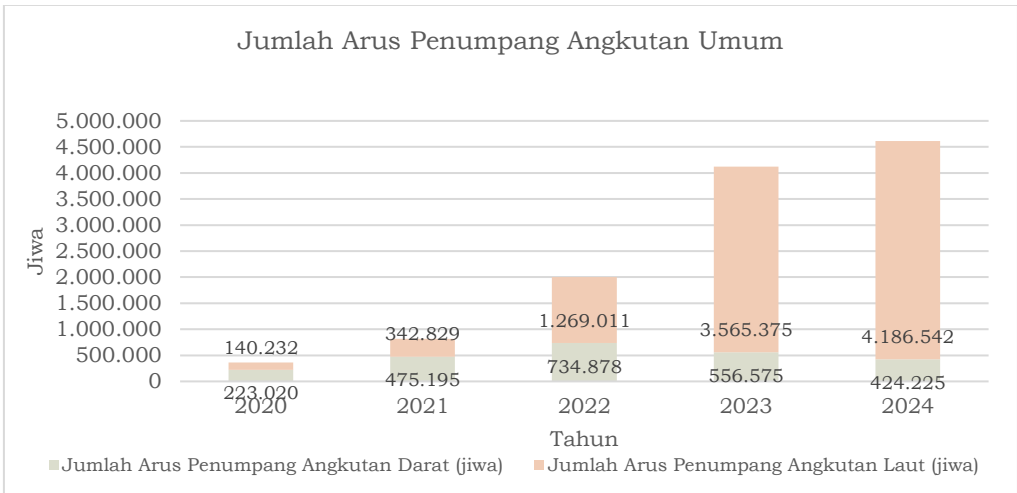
1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum merujuk pada total pengguna yang menggunakan transportasi umum di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat mobilitas masyarakat, tren pergerakan penumpang di jalur transportasi umum, dan memberi wawasan penting bagi perencanaan dan pengembangan sistem transportasi yang lebih efisien. Berikut adalah tabel jumlah arus penumpang angkutan umum darat dan laut di Kota Denpasar:

Tabel 2. 83						
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Denpasar Tahun 2020-2024						
Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Darat	Jiwa	223.020	475.195	734.878	556.575	424.225
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Laut	Jiwa	140.232	342.829	1.269.011	3.565.375	4.186.542
Penumpang Naik Angkutan Darat	Jiwa	145.397	257.180	384.395	296.098	109.809

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penumpang Turun Angkutan Darat	Jiwa	77.623	218.015	350.483	260.477	314.416
Penumpang Naik Angkutan Laut	Jiwa	81.349	206.919	780.450	1.944.732	2.327.876
Penumpang Turun Angkutan Laut	Jiwa	58.883	135.910	488.561	1.620.643	1.858.666
Total	Jiwa	363.252	818.024	2.003.889	4.121.950	379.203

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2024



Gambar 2. 215
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2025

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, jumlah arus penumpang angkutan umum darat dan laut mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari sisi angkutan umum darat dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2022, jumlah arus penumpang mengalami fluktuasi dengan jumlah pada tahun 2024 sebanyak 424.225 jiwa. Beberapa hal yang menyebabkan fluktuasi arus penumpang angkutan darat adalah perubahan kondisi ekonomi masyarakat, peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi, penurunan kualitas layanan angkutan atau transportasi umum, dan dampak pandemi.

Sementara itu, data jumlah arus penumpang laut di Kota Denpasar baru tersedia mulai tahun 2020, dan dapat diketahui bahwa jumlah arus penumpang angkutan laut tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 4.186.542. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dan wisatawan untuk menggunakan kapal menunjukkan peningkatan, apalagi setelah pemulihan dampak pandemi pada tahun 2020 dan 2021. Capaian ini harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui perbaikan dan pemeliharaan kualitas pelayanan angkutan laut untuk masyarakat dan wisatawan, seperti dengan mengevaluasi kapasitas, keandalan, serta kebutuhan perbaikan dalam sistem angkutan umum.

2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

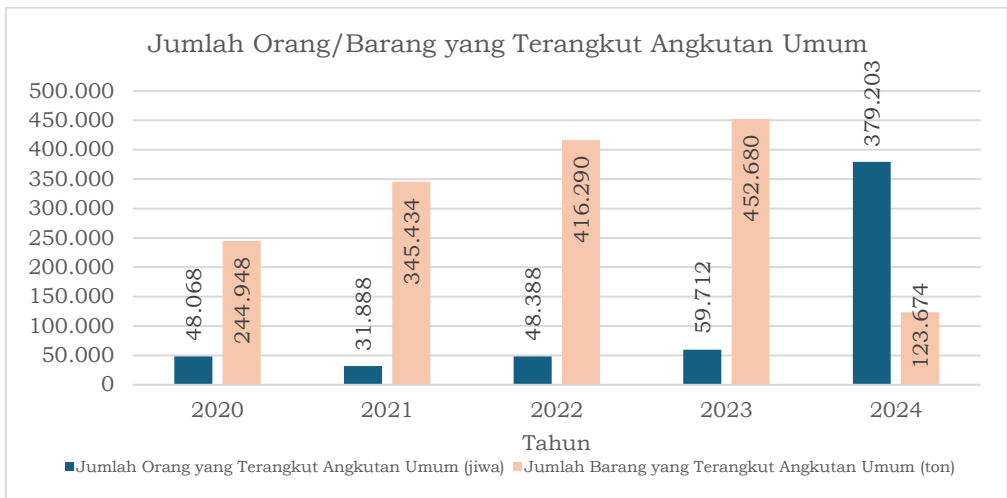
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum merujuk pada total jumlah penumpang atau barang yang diangkut menggunakan transportasi umum dalam suatu periode tertentu. Indikator ini memberikan gambaran terhadap tingkat kepadatan, tren penggunaan layanan

transportasi umum, dan dapat membantu dalam pemahaman terkait mobilitas dan kebutuhan transportasi masyarakat. Berikut adalah tabel jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Denpasar:

Tabel 2. 84
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1) Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	Jiwa	48.068	31.888	48.388	59.712	379.203
a. AKDP Masuk	Jiwa	20.276	13.175	19.841	24.420	190.363
b. AKDP Keluar	Jiwa	27.792	18.713	28.547	35.292	188.840
(2) Jumlah Barang yang Terangkut Arus Angkutan Umum	Ton	244.948	345.434	416.290	452.680	123.674

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2025



Gambar 2. 216
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2025

Jika dilihat dari sisi jumlah orang yang terangkut angkutan umum dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi. Jumlah orang yang terangkut tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 379.203 jiwa dan barang yang terangkut pada tahun 2023 sebanyak 452.680 ton, sementara jumlah orang terangkut terendah pada tahun 2021 sebanyak 31.888 orang dan barang terangkut terendah terjadi pada tahun 2024 sebanyak 123.674 ton. Beberapa hal yang menyebabkan fluktuasi jumlah orang yang terangkut angkutan umum adalah perubahan kondisi ekonomi masyarakat, peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi, penurunan kualitas layanan angkutan atau transportasi umum, dan dampak pandemi. Di sisi lain, penurunan jumlah barang yang terangkut dapat disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi untuk mengangkut barang.

3. Jumlah Terminal Bis dan Pelabuhan

Jumlah terminal bis dan pelabuhan merujuk pada total terminal bis dan pelabuhan yang tersedia dalam suatu wilayah. Indikator ini memberikan gambaran terkait tingkat aksesibilitas, konektivitas, serta kebutuhan dan ketersediaan fasilitas transportasi yang mendukung aktivitas pergerakan

manusia dan barang di suatu wilayah, termasuk perpindahan intra dan/atau antar moda, kedatangan dan keberangkatan kendaraan, serta menaikkan dan menurunkan penumpang. Berikut adalah tabel jumlah terminal bis dan pelabuhan/dermaga di Kota Denpasar:

Tabel 2. 85
Jumlah Terminal Bis di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

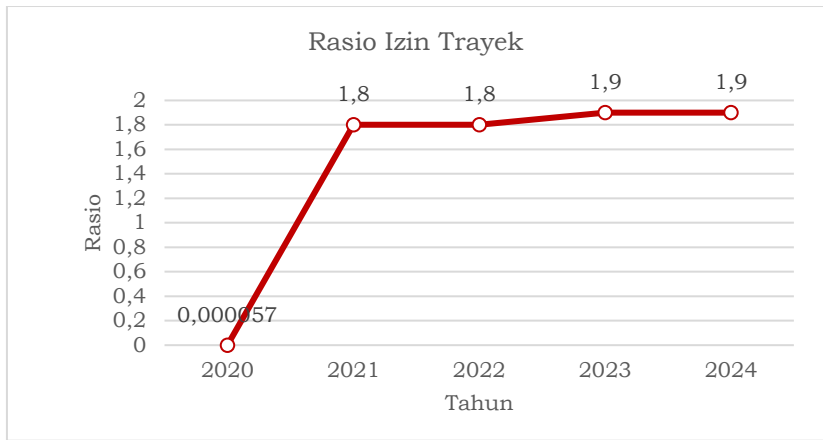
Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Terminal Bis	Terminal	4	4	4	4	4
Jumlah Pelabuhan	Pelabuhan	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2024

Kota Denpasar memiliki 4 terminal bis yang terdapat di Ubung, Tegaal, Wangaya, dan Kreneng. Berdasarkan RTRW Kota Denpasar, Terminal Ubung, Tegal, dan Wangaya merupakan terminal tipe B, sedangkan Terminal Kreneng merupakan terminal tipe C. Namun, berdasarkan RKPD Kota Denpasar tahun 2020, Terminal Ubung berubah menjadi terminal tipe C. Terminal Wangaya beralih fungsi menjadi pasar dan Terminal Ubung menjadi terminal yang paling aktif. Menurut keterangan dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, ditetapkan 2 Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar sesuai Kepmenhub No. 432 Tahun 2017 tentang RIPN yaitu Pelabuhan Sanur dan Pelabuhan Serangan, di mana pada kondisi eksisting memiliki 4 dermaga. Pada tahun 2019, disusun Pra FS yang menetapkan 2 pelabuhan yaitu Pelabuhan Sanur dan Pelabuhan Serangan. Sementara itu, Dermaga Kondang, Dermaga Pemelisan, dan Dermaga Mertasari tergabung dalam penyelenggaraan Pelabuhan Serangan.

4. Rasio Izin Trayek

Rasio izin trayek merujuk pada perbandingan antara jumlah izin trayek yang telah dikeluarkan dengan total jumlah kendaraan yang diizinkan beroperasi di suatu wilayah tertentu. Rasio ini memperlihatkan proporsi atau perbandingan antara izin trayek yang telah diberikan kepada kendaraan angkutan umum, seperti bus atau mikrolet, dibandingkan dengan total kendaraan yang diizinkan beroperasi.

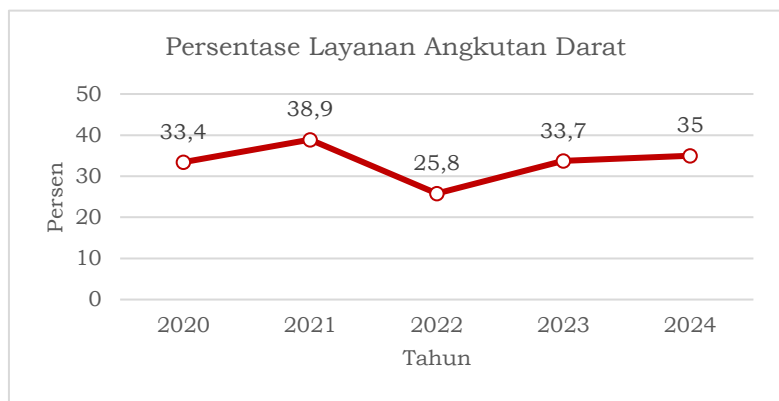


Gambar 2. 217
Rasio Izin Trayek di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2024

Rasio izin trayek di Kota Denpasar meningkat pesat menjadi 0,000057 pada tahun 2020 dan meningkat secara signifikan menjadi 1,9 pada tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, penurunan rasio izin trayek pada 2020 disebabkan oleh menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi, karena banyak sopir angkutan kota/umum beralih profesi akibat menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum di Kota Denpasar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas layanan angkutan umum agar minat masyarakat menggunakan angkutan umum meningkat.

5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat merujuk pada seberapa besar layanan angkutan darat yang tersedia dan digunakan oleh penduduk di suatu wilayah. Indikator ini memungkinkan untuk melihat sejauh mana aksesibilitas transportasi darat bagi masyarakat dan seberapa sering moda transportasi tersebut digunakan, serta mengidentifikasi kebutuhan dan efisiensi layanan transportasi dalam suatu kota atau daerah.



Gambar 2. 218
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2025

Data persentase layanan angkutan darat Kota Denpasar disesuaikan dengan perhitungan RPJMD tahun sebelumnya yaitu jumlah angkutan dibanding jumlah penumpang. Persentase layanan angkutan darat di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat hingga menjadi sebesar 35

persen pada tahun 2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan persentase mencapai 38,9%. Hal ini menunjukkan bahwa layanan angkutan darat di Kota Denpasar cenderung membaik, meskipun pemerintah perlu melakukan peningkatan kualitas layanan angkutan darat, baik dari sisi kenyamanan angkutan, waktu tunggu, hingga tarif penumpang agar minat masyarakat menggunakan angkutan umum meningkat.

6. Jumlah Sepeda Motor

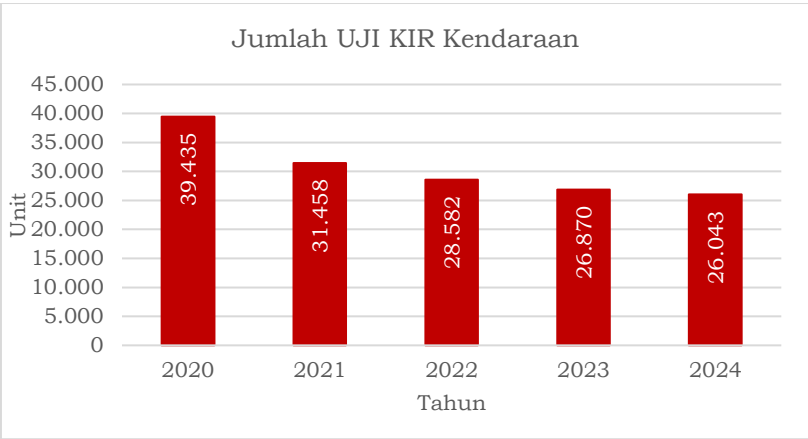
Jumlah sepeda motor mengacu pada total sepeda motor yang terdaftar dan dioperasikan di suatu wilayah. Indikator ini dapat digunakan untuk membantu dalam perencanaan transportasi, pengaturan lalu lintas, serta mengevaluasi kebutuhan infrastruktur jalan dan parkir di suatu wilayah. Jumlah sepeda motor aktif di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi. Jumlah sepeda motor aktif tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 1.485.355 unit, sedangkan jumlah terendah terjadi pada tahun 2022 sebanyak 775.300 unit. Meskipun dalam 3 tahun terakhir, jumlah sepeda motor aktif menunjukkan kecenderungan yang stagnan, minat masyarakat untuk memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi dapat terlihat. Maka dari itu, diperlukan kebijakan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan angkutan umum agar lalu lintas Kota Denpasar tidak semakin didominasi oleh kendaraan pribadi.



Gambar 2. 219
Jumlah Sepeda Motor di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Bapenda Provinsi Bali, 2025

7. Jumlah Uji KIR Kendaraan

Jumlah uji KIR kendaraan mengacu pada total kendaraan yang menjalani pemeriksaan KIR (Keselamatan, Keamanan, dan Perlindungan Lingkungan) dalam suatu periode tertentu. Uji KIR ini penting untuk memastikan bahwa kendaraan mematuhi standar keselamatan, keamanan, dan lingkungan yang ditetapkan oleh otoritas transportasi setempat. Indikator ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kendaraan memenuhi syarat operasional dan dapat berkontribusi pada pengendalian emisi dan keselamatan di jalan.

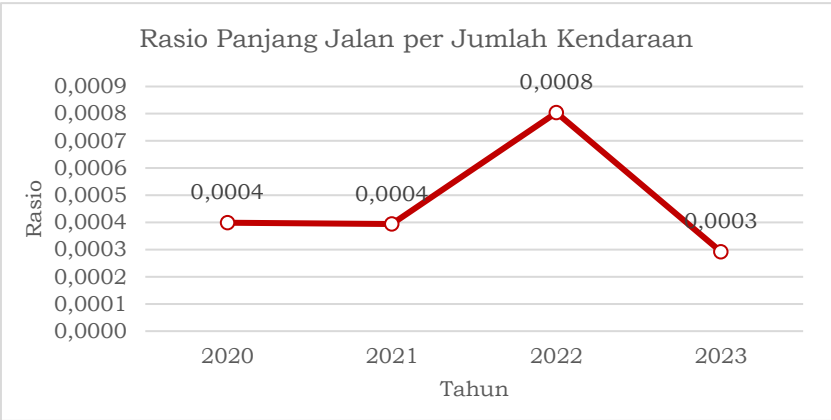


Gambar 2. 220
Jumlah Uji KIR Kendaraan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2025

Jumlah uji KIR kendaraan di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 memiliki kecenderungan menurun. Jumlah uji KIR kendaraan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 39.435 unit, sedangkan jumlah terendah terjadi pada tahun 2024 sebanyak 26.043 unit. Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, salah satu penyebab menurunnya jumlah uji KIR kendaraan karena adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana salah satu muatannya mengenai pengaturan batas usia kendaraan/angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang beroperasi di jalan adalah paling lama 25 tahun. Pembatasan usia kendaraan ini menyebabkan angkutan kota dan AKDP tidak dapat beroperasi kembali setelah mencapai usia 25 tahun, sehingga tidak dapat melakukan uji KIR.

8. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengacu pada perbandingan antara panjang total jalan dalam suatu wilayah dengan jumlah keseluruhan kendaraan yang beroperasi di wilayah tersebut. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien atau padatnya jaringan jalan dalam mendukung jumlah kendaraan yang beroperasi.



Gambar 2. 221
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Denpasar Tahun 2020-2023
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2025

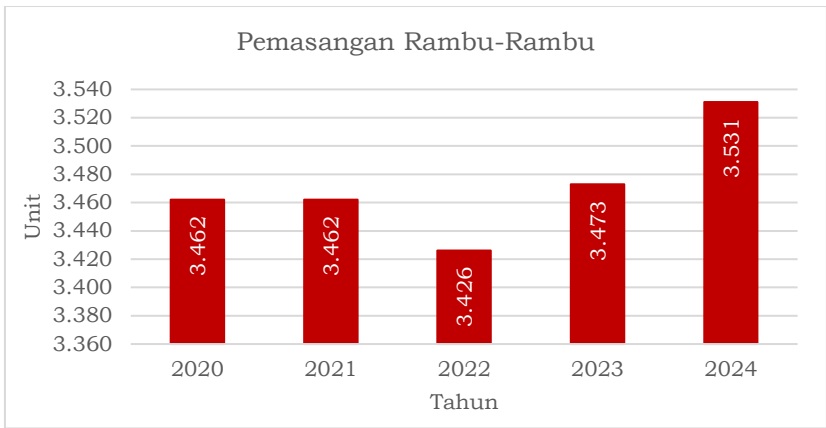
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,0008 dan mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 0,0003. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah jalan yang tersedia kurang memadai untuk mendukung jumlah kendaraan yang ada, yang mungkin mengarah pada kemacetan lalu lintas dan kondisi jalan yang padat.

Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi berupa kegiatan komuter harian dari daerah penyangga seperti Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar serta meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Denpasar dengan menggunakan kendaraan pribadi yang tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan kepadatan arus lalu lintas yang menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan utama yaitu Jalan Gatot Subroto, Jalan Pantai Kuta, Bypass Ngurah Rai, dan Simpang Pesanggaran (Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi rasio ini untuk membantu dalam perencanaan jaringan jalan dan infrastruktur transportasi, sehingga kecukupan akses bagi jumlah kendaraan yang ada menjadi optimal.

9. Pemasangan Rambu-Rambu

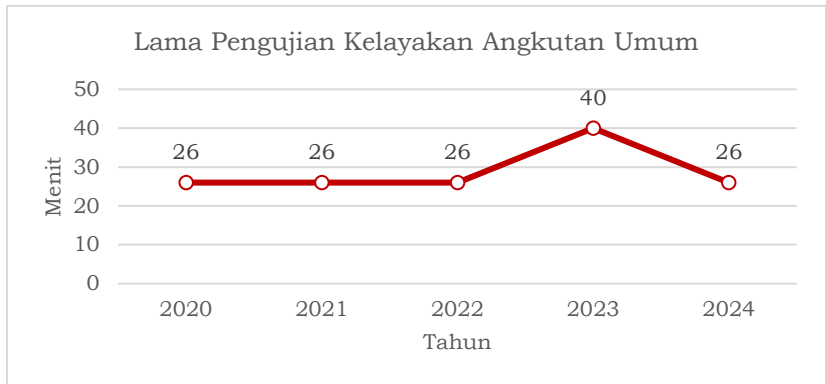
Pemasangan Rambu-rambu merujuk pada proses memasang tanda atau rambu lalu lintas di sepanjang jalan. Rambu lalu lintas berfungsi sebagai penanda, memberikan informasi, petunjuk, peringatan, atau larangan kepada para pengguna jalan. Proses ini melibatkan pemasangan rambu-rambu untuk memastikan keselamatan dan ketertiban dalam lalu lintas. Pemasangan rambu-rambu di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung mengalami fluktuasi hingga menjadi 3.531 unit pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Denpasar telah menunjukkan keseriusan dalam menyediakan informasi yang jelas dari rambu lalu lintas untuk membantu pengemudi dan pejalan kaki dalam memahami aturan jalan, peringatan akan bahaya, dan informasi penting lainnya yang berlaku di jalan. Pemasangan rambu-rambu yang efektif dan tepat akan membantu mengurangi kecelakaan lalu lintas dan mendukung kelancaran arus kendaraan.



Gambar 2. 222
Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2025

10. Lama dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Lama dan biaya pengujian kelayakan angkutan umum merujuk pada waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan uji kelayakan pada kendaraan yang digunakan dalam layanan transportasi publik. Proses pengujian kelayakan ini mencakup berbagai aspek seperti keamanan kendaraan, kondisi teknis, kelaikan operasional, serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulasi. Mengetahui estimasi biaya dan durasi pengujian membantu untuk memperkirakan anggaran dan waktu yang diperlukan sebelum kendaraan diizinkan untuk beroperasi secara komersial dalam layanan angkutan umum.

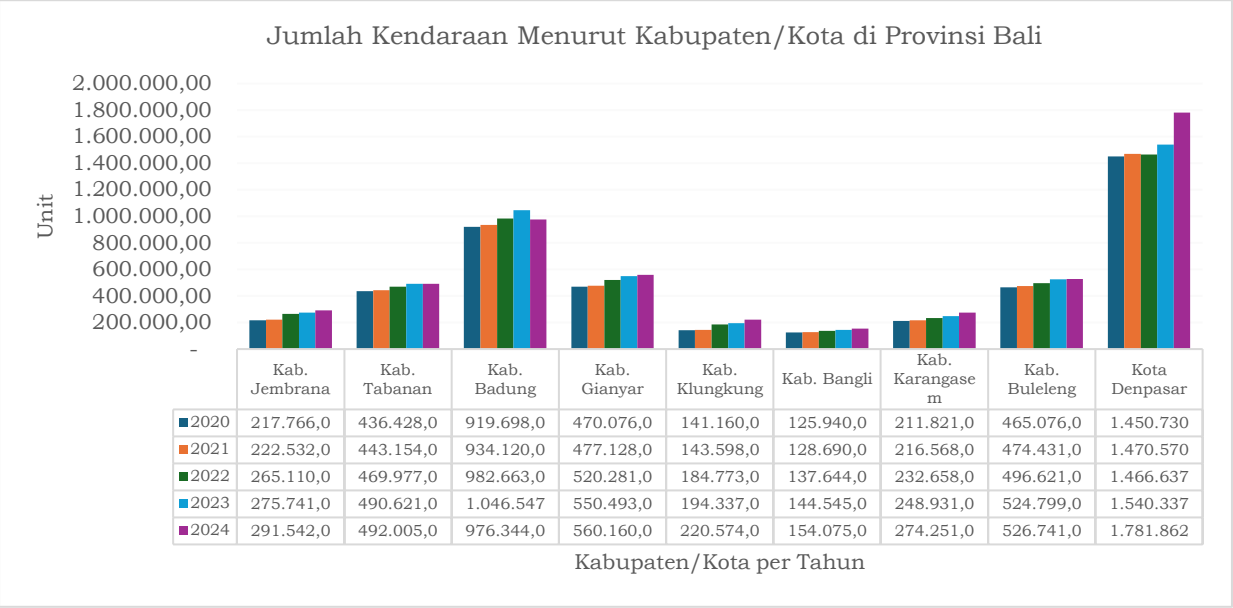


Gambar 2. 223
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2024

Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Denpasar pada tahun 2020 hingga tahun 2022 konstan pada angka 26 menit hingga meningkat menjadi 40 menit pada tahun 2023 dan kembali menjadi 26 menit di tahun 2024. Menurut keterangan dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, pada tahun 2023 terjadi lamanya pelayanan yang disebabkan oleh adanya integrasi sistem dari *BLU-e* ke Sistem *BLUE-e RFID*. Untuk biaya pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Denpasar mengikut kategori, yaitu kategori mobil penumpang sebesar Rp 21.500, kategori mobil barang/bus JBB II sebesar Rp 30.500, dan kategori mobil barang/bus JBB III sebesar Rp 40.500.

11. Jumlah Kepemilikan Kendaraan

Jumlah kepemilikan kendaraan adalah jumlah kendaraan yang dimiliki oleh perorangan. Kepemilikan kendaraan juga dapat menggambarkan pada kondisi preferensi transportasi publik suatu wilayah. Hal tersebut akan mengimplikasikan keadaan ketersediaan dan layanan transportasi publik suatu wilayah. Selain itu, semakin tinggi kepemilikan kendaraan dapat menimbulkan permasalahan berupa kemacetan dan polusi.



Gambar 2. 224 Jumlah Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

Berdasarkan grafik diatas, Kota Denpasar memiliki jumlah kendaraan tertinggi dibanding kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan 34 persen lebih kendaraan berada pada Kota Denpasar. Angka kepemilikan jumlah kendaraan mencapai angka 1.781.862 unit di tahun 2024, meningkat pesat sedari tahun 2020 dengan angka 1.450.730 unit. Selain itu, rasio jumlah penduduk dengan jumlah kendaraan pada tahun 2023 senilai 1:2,3 menunjukkan perbandingan satu orang dapat memiliki 2 kendaraan pribadi. Dengan karakter wilayah yang memiliki jarak relatif pendek dan belum terintegrasinya antar sektor transportasi umum menyebabkan masyarakat lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi.

Saat ini, terdapat 147 titik rawan macet di Kota Denpasar. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani, potensi kemacetan akan semakin meningkat. Selain itu, kondisi kemacetan diperburuk oleh adanya perkembangan Kota Denpasar yang pesat dengan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan baru menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi ke Kota Denpasar. Dengan kondisi ruas jalan yang tidak bertambah, perlunya pengembangan transportasi publik perkotaan yang dapat menampung kebutuhan aktivitas dan mobilitas masyarakat serta menangani kemacetan.

I) **Komunikasi dan Informatika**

1. **Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan**

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk mengakses, menganalisis, dan menyebarkan informasi terkait layanan pemerintah, program sosial, dan informasi penting lainnya. Melalui kelompok-kelompok ini, penduduk di kecamatan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai berbagai isu yang memengaruhi wilayah, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi yang relevan. Pemberdayaan ini sering kali mencakup pelatihan, pendampingan, dan perluasan jaringan informasi untuk mendukung pertumbuhan dan pengaruh positif kelompok-kelompok ini di masyarakat.

Tabel 2. 86
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KIM	Kelompok	4	4	4	4	4
Jumlah kecamatan	Kecamatan	4	4	4	4	
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, sejak tahun 2020 telah terdapat 4 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yaitu Gatra Wirausaha, C-Gen, Komunitas Nuduk Sampah Plastik, dan *digital creative*. Oleh karena itu, cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu konsisten pada angka 100 persen. Namun, berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, jumlah KIM yang ada saat ini belum memenuhi target Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, yaitu 2 KIM di setiap kecamatan atau 8 KIM di seluruh Kota Denpasar. Maka dari itu, diharapkan adanya peningkatan jumlah KIM dengan berbagai fokus kegiatan lainnya, seperti kenyamanan dan keamanan kota.

2. **Cakupan Layanan Telekomunikasi**

Cakupan layanan telekomunikasi merujuk pada ketersediaan dan jangkauan layanan komunikasi seperti telepon, internet, dan layanan seluler di suatu wilayah atau populasi. Hal ini mencakup jaringan, infrastruktur, dan aksesibilitas layanan komunikasi yang tersedia bagi masyarakat, bisnis, dan lembaga di suatu kawasan atau negara. Pengukuran cakupan layanan telekomunikasi melibatkan evaluasi terhadap ketersediaan sinyal, kecepatan akses, aksesibilitas, serta kualitas layanan yang diberikan oleh operator telekomunikasi. Berikut adalah data jumlah izin terbit menara telekomunikasi di Kota Denpasar:

Tabel 2. 87
Cakupan Layanan Komunikasi di Kota Denpasar Tahun 2020-2022

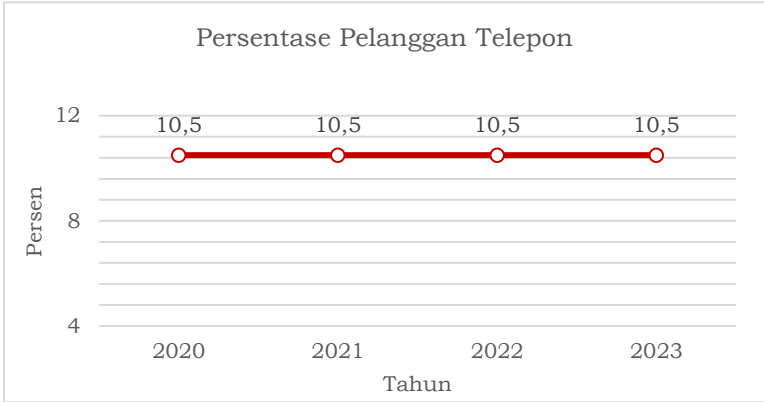
Uraian	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Jumlah izin terbit menara telekomunikasi	Izin	0	0	0

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, 2023

Berdasarkan data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, izin terbit menara telekomunikasi di Kota Denpasar mengalami fluktuasi sejak tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pembangunan menara telekomunikasi dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, seluruh area di Kota Denpasar telah terlayani jaringan telekomunikasi, sehingga tidak ada *blank spot* di Kota Denpasar.

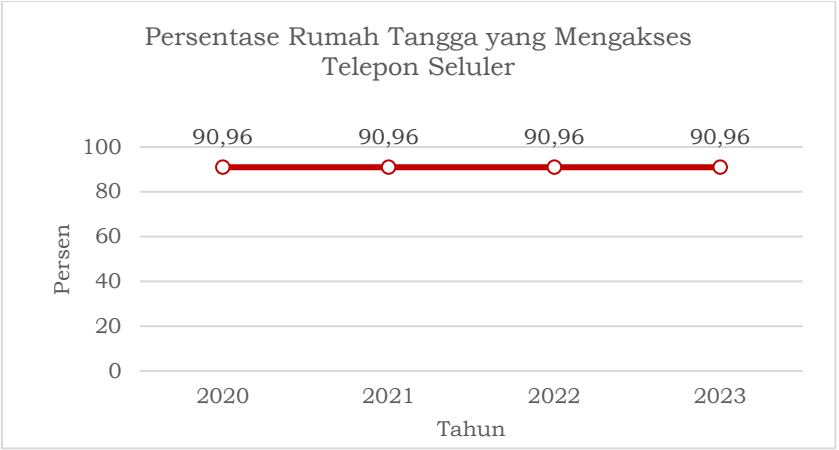
3. Persentase Pelanggan Telepon dan Rumah Tangga yang Mengakses Telepon Seluler

Persentase pelanggan telepon dan rumah tangga yang mengakses telepon seluler mengacu pada persentase pelanggan layanan telepon dan jumlah rumah tangga yang menggunakan atau memiliki akses ke layanan telepon seluler di suatu daerah atau populasi tertentu. Indikator ini digunakan untuk memahami tingkat penetrasi teknologi komunikasi, memberikan gambaran kecanggihan teknologi di suatu wilayah, dan dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan teknologi komunikasi di masyarakat.



Gambar 2. 225
Persentase Pelanggan Telepon di Kota Denpasar Tahun 2020-2023
Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, persentase pelanggan telepon di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2023 konsisten pada angka 10,5 persen. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, persentase rumah tangga yang mengakses telepon seluler di Kota Denpasar selama kurun 2020 hingga tahun 2023 konsisten berada pada angka 90,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kota Denpasar telah memiliki akses terhadap teknologi komunikasi, seperti telepon kabel dan telepon seluler.

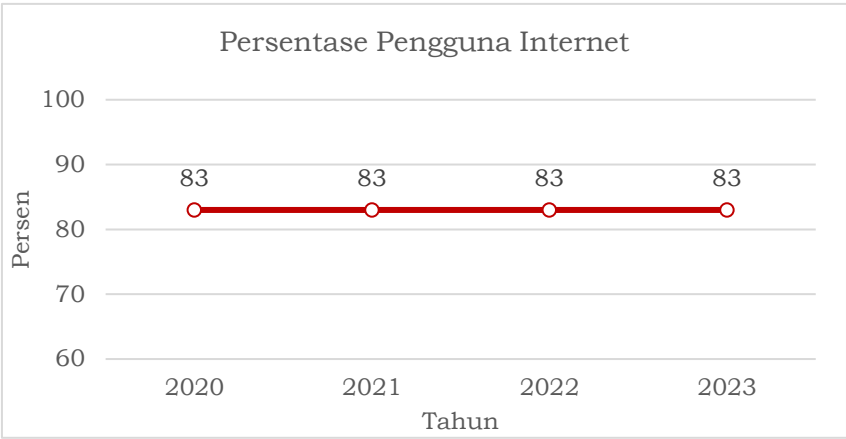


Gambar 2. 226
Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Telepon Seluler di Kota Denpasar Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, 2024

4. Persentase Pengguna Internet

Persentase pengguna internet mengacu pada jumlah atau persentase individu, rumah tangga, atau populasi yang menggunakan layanan internet dalam suatu wilayah atau populasi tertentu. Indikator ini menunjukkan seberapa luasnya akses dan penggunaan internet dalam masyarakat. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang penetrasi teknologi informasi, kecanggihan teknologi, serta kebiasaan dan akses informasi di suatu wilayah. Berdasarkan data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, persentase pengguna internet di Kota Denpasar sebesar 83 persen pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan teknologi dan infrastruktur internet di Kota Denpasar belum menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan.

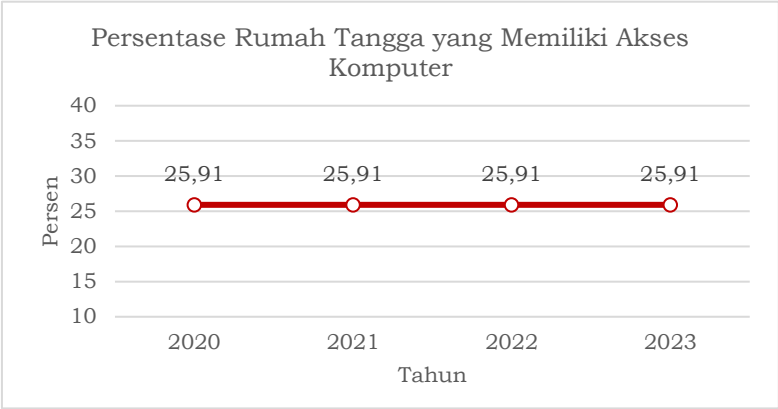


Gambar 2. 227
Persentase Pengguna Internet di Kota Denpasar Tahun 2020-2023
Sumber: Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika Kota Denpasar, 2025

5. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Komputer

Persentase rumah tangga yang memiliki akses komputer mengacu pada jumlah atau persentase rumah tangga dalam suatu populasi atau wilayah yang memiliki akses atau kepemilikan terhadap komputer. Data ini memberikan gambaran tentang seberapa luasnya penetrasi teknologi komputer dalam skala rumah tangga di wilayah tertentu. Indikator ini

menunjukkan kemampuan akses informasi dan keterampilan teknologi dalam level rumah tangga.



Gambar 2. 228
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Komputer di Kota Denpasar Tahun 2020-2023

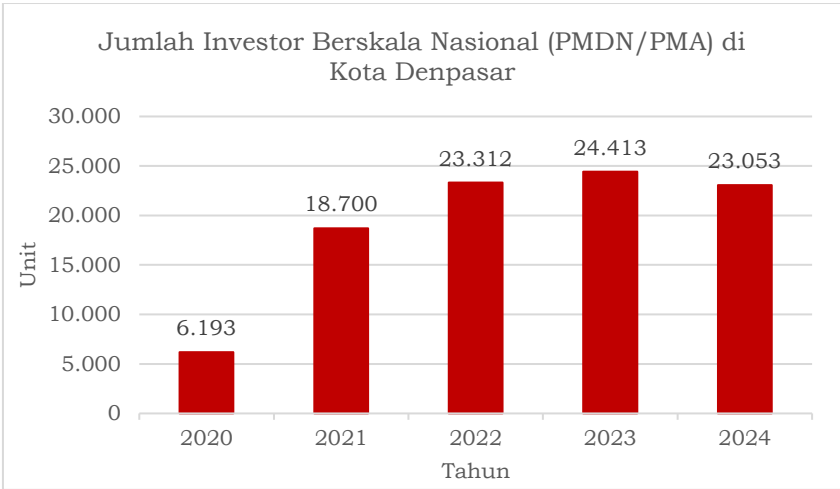
Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, persentase rumah tangga yang memiliki akses komputer di Kota Denpasar cukup rendah dari tahun 2020 hingga tahun 2023 konsisten pada angka 25,91 persen. Padahal, ketersediaan dan keberadaan komputer atau komputer jinjing (laptop) di rumah tangga menunjukkan tingkat keterampilan teknologi, kemampuan akses informasi, dan kecenderungan adopsi teknologi di masyarakat.

J) Penanaman Modal

1. Jumlah Investor dan Nilai Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah indikator yang mencerminkan minat dan partisipasi investor dalam suatu negara atau wilayah. Investor PMDN adalah investor lokal yang menanamkan modalnya dalam negeri, sementara investor PMA adalah investor asing yang menanamkan modalnya di negara tersebut. Keduanya berpotensi menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar. Pemantauan jumlah investor PMDN dan PMA penting karena dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan perkembangan industri. Jumlah investor berskala nasional juga mencerminkan daya tarik suatu wilayah sebagai tujuan investasi, baik bagi pelaku ekonomi lokal maupun investor asing.



Gambar 2. 229
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: DPMTSP, 2025

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, jumlah investor PMDN dan PMA di Kota Denpasar mengalami fluktuasi. Jumlah investor tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebanyak 24.413 investor dan jumlah terendah terjadi pada tahun tahun sebelumnya sebanyak 1.541 investor. Fluktuasi dapat disebabkan oleh masih adanya perusahaan yang belum tertib administrasi perizinan, belum adanya peta/informasi potensi investasi yang diperbarui dan kurangnya insentif untuk investor, serta belum maksimalnya penyederhanaan birokrasi perizinan.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi berskala nasional, termasuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), adalah indikator yang mencerminkan besarnya total modal yang diinvestasikan oleh para investor, baik lokal maupun asing, berdasarkan atas persetujuan dan besaran investasi yang direalisasikan di daerah. Nilai investasi ini mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk industri, infrastruktur, perbankan, dan lainnya. Jumlah persetujuan investasi dihitung dengan menjumlahkan nilai proyek investasi PMDN berskala nasional dan nilai proyek investasi PMA berskala nasional yang telah disetujui oleh Dinas Penanaman Modal.

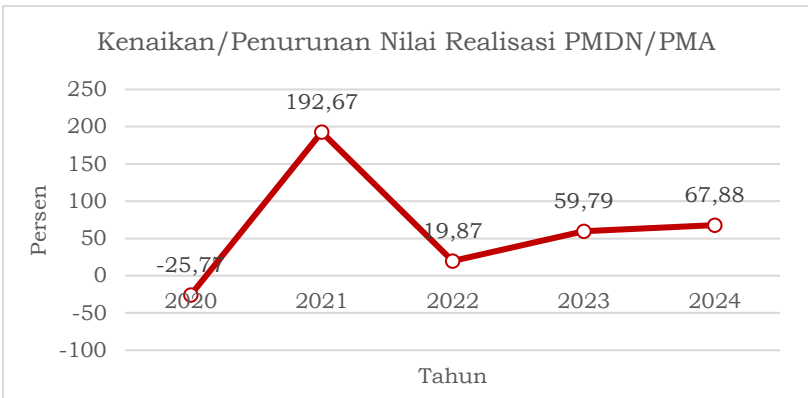
Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, jumlah nilai investasi PMDN dan PMA di Kota Denpasar mengalami kenaikan. Jumlah nilai investasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 menjadi Rp 7.150.702.108.806 Kenaikan pada tahun tersebut menunjukkan upaya pemerintah Kota Denpasar dalam menarik minat investor mulai didorong dalam rangka pemulihan ekonomi Kota Denpasar



Gambar 2. 230
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: DPMTSP, 2025

3. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA

Kenaikan atau penurunan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencerminkan sejauh mana proyek-proyek investasi yang telah direncanakan berhasil diwujudkan dalam bentuk investasi yang sebenarnya. Kenaikan nilai realisasi PMDN dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan ketertarikan investor dalam mengalokasikan modalnya. Di sisi lain, penurunan nilai realisasi bisa mencerminkan tantangan atau perubahan dalam iklim investasi. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2023, kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN/PMA di Kota Denpasar mengalami fluktuasi. Kenaikan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 192,67 persen.



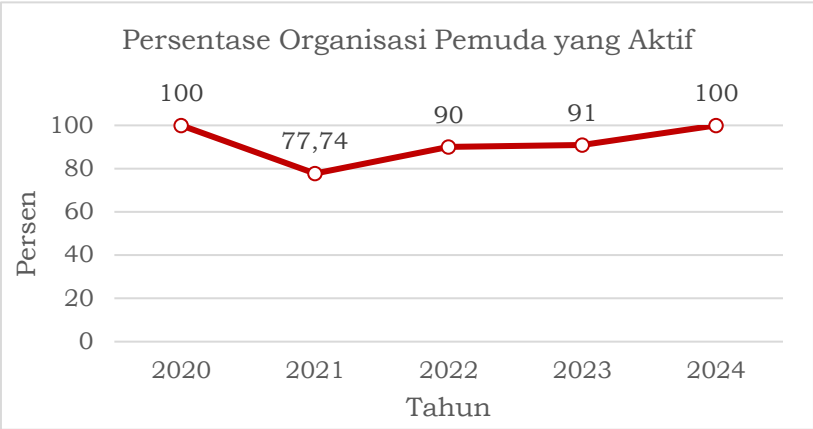
Gambar 2. 231
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu, 2025

K) Kepemudaan dan Olahraga

1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Organisasi pemuda adalah entitas yang terdiri dari para pemuda yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama dengan beragam fokus, mulai dari pemberdayaan pemuda, advokasi isu-isu pemuda, hingga pelayanan masyarakat. Persentase organisasi pemuda yang aktif mencerminkan sejauh mana organisasi pemuda yang ada di suatu wilayah tetap aktif dan berfungsi.

Organisasi pemuda yang aktif sering berperan penting dalam pengembangan pemuda, menciptakan wadah untuk pengembangan kepemimpinan, dan mendukung berbagai inisiatif yang memengaruhi komunitas dan masyarakat secara keseluruhan.

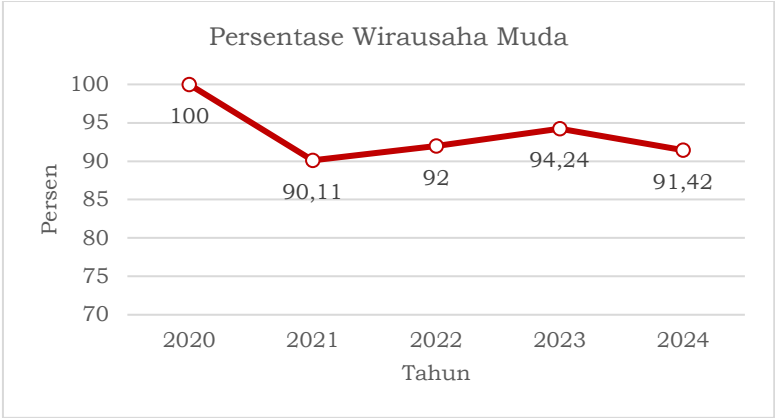


Gambar 2. 232
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Denpasar Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Denpasar cenderung mengalami fluktuasi. Tahun 2022-2024 mulai naik kembali secara perlahan hingga mencapai angka 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa persentase organisasi pemuda Kota Denpasar telah aktif dan berjalan sesuai fungsinya dan telah mencapai target ideal yaitu 100 persen pada tahun 2024. Meski demikian, diharapkan jumlah organisasi pemuda yang aktif dapat ditingkatkan dan berkontribusi dalam pelayanan masyarakat, berperan aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan obat terlarang, serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosial, ekonomi dan politik.

2. Persentase Wirausaha Muda

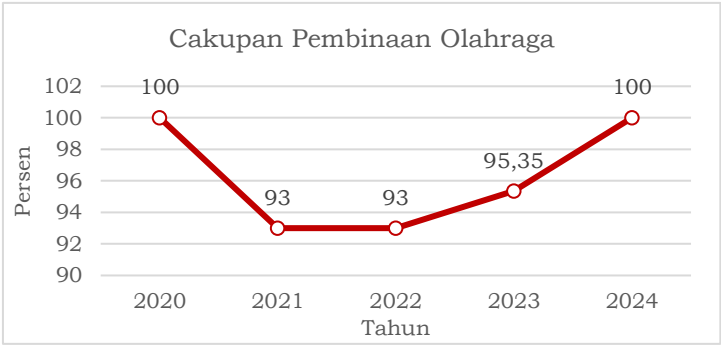
Wirausaha muda adalah individu muda yang memiliki semangat kewirausahaan dan berinisiatif untuk memulai usaha atau bisnis mereka sendiri. Wirausaha muda memiliki peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi positif pada perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Persentase wirausaha muda mencerminkan tingkat keterlibatan dan partisipasi wirausaha muda dalam ekonomi. Berikut adalah grafik persentase wirausaha muda di Kota Denpasar.



Gambar 2. 233
Persentase Wirausaha Muda di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Pembinaan olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan prestasi dalam berbagai cabang olahraga. Ini melibatkan pelatihan, pengajaran, serta pengawasan terhadap atlet atau praktisi olahraga untuk mencapai potensi terbaik mereka. Pembinaan olahraga juga berperan dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Meningkatnya jumlah pembinaan olahraga menunjukkan meningkatnya peran pemerintah, swasta, dan organisasi kepemudaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya bidang olahraga di Kota Denpasar. Berikut adalah grafik persentase cakupan pembinaan olahraga di Kota Denpasar:

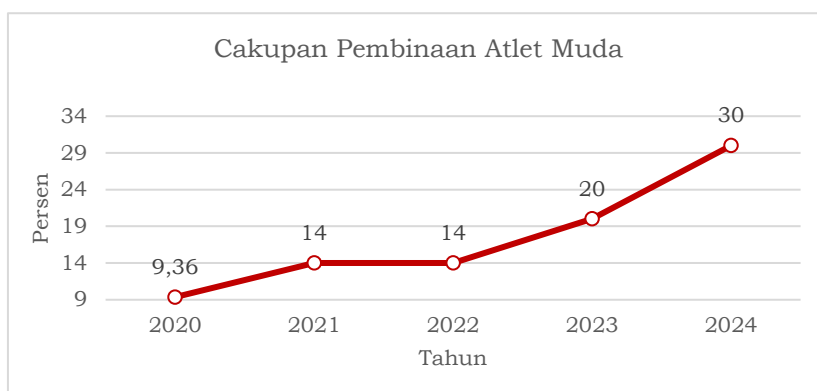


Gambar 2. 234
Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, cakupan pembinaan olahraga di Kota Denpasar mengalami penurunan dengan angka 100 persen pada tahun 2020 menjadi 93,35 di tahun 2023. Penurunan di tahun 2021 dan 2022 disebabkan oleh kondisi Covid-19 yang kemudian angka tersebut meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya untuk meningkatkan pembinaan olahraga bagi atlet agar dapat terus meningkatkan potensi dan prestasi di bidang olahraga.

4. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Pembinaan atlet muda adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi, melatih, dan mendukung potensi atlet muda dalam berbagai cabang olahraga, yang dapat mencakup aspek pendidikan, pelatihan teknis, serta pendampingan pengembangan fisik dan mental. Program ini bertujuan untuk menciptakan panggung yang kondusif bagi para atlet muda untuk mengembangkan bakat olahraga, memperbaiki keterampilan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan di tingkat yang lebih tinggi. Cakupan pembinaan atlet muda mencerminkan sejauh mana program pembinaan atlet muda telah berhasil menjangkau dan melibatkan para atlet muda dalam berbagai usia dan cabang olahraga.



Gambar 2. 235
Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

Cakupan pembinaan atlet muda di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Rendahnya cakupan pembinaan atlet muda disebabkan karena masih kurangnya dukungan kualitas sarana dan prasarana olahraga, serta belum optimalnya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam peningkatan prestasi olahraga.

5. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Pelatih yang bersertifikasi adalah individu yang telah menjalani pelatihan formal dan mengikuti ujian atau evaluasi yang menghasilkan sertifikat resmi dalam bidang pelatihan olahraga atau kegiatan serupa. Sertifikasi ini mencerminkan tingkat kompetensi dan kualifikasi pelatih dalam memberikan bimbingan dan instruksi kepada atlet atau peserta dalam kegiatan olahraga. Cakupan pelatih yang bersertifikasi memberikan gambaran tentang sejauh mana upaya pengembangan pelatihan olahraga telah berhasil menghasilkan pelatih yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang teruji.



Gambar 2. 236
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

Cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 89,65 persen pelatih bersertifikasi, namun cenderung menurun hingga menjadi 95 persen pada tahun 2024. Peningkatan cakupan pelatih yang bersertifikasi harus diupayakan sehingga seluruh pelatih memiliki kompetensi untuk mengoptimalkan pengembangan dan iklim kepelatihan atlet.

6. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi mencerminkan jumlah atlet yang telah mencapai tingkat prestasi yang tinggi dalam berbagai cabang olahraga. Jumlah atlet berprestasi mencerminkan efektivitas program pembinaan olahraga, dukungan infrastruktur olahraga, dan upaya yang dilakukan untuk memajukan olahraga di tingkat yang lebih tinggi. Atlet berprestasi adalah aset berharga dalam dunia olahraga yang sering menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengejar prestasi olahraga yang lebih tinggi.

Jumlah atlet berprestasi di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 1.689 atlet berprestasi. Jumlah atlet berprestasi harus ditingkatkan kedepannya melalui pendidikan dan pembinaan atlet maupun cabang olahraga. Sementara itu, data tahun 2020 tidak tersedia dikarenakan pandemi Covid-19.

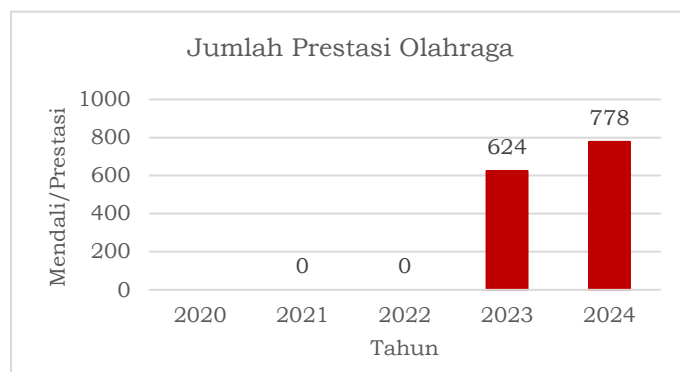


Gambar 2. 237
Jumlah Atlet Berprestasi di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

7. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga mencerminkan sejauh mana para atlet dan tim olahraga sukses mencapai prestasi dalam berbagai kompetisi dan kejuaraan. Prestasi ini dapat mencakup medali, penghargaan, gelar juara, atau pencapaian lainnya dalam berbagai cabang olahraga. Prestasi olahraga mencerminkan tingkat persiapan dan kualitas pelatihan yang diterima para atlet, serta sejauh mana mereka dapat bersaing di tingkat kompetisi yang lebih tinggi.

Jumlah prestasi olahraga di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 778 prestasi olahraga. Prestasi olahraga perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pembinaan atlet maupun cabang olahraga. Sementara itu, data tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak tersedia dikarenakan pandemi Covid-19.



Gambar 2. 238
Jumlah Prestasi Olahraga di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

L) Statistik

1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, saat ini telah ada sistem integrasi data yang tersedia. Namun, belum semua Perangkat Daerah aktif dalam melakukan input data ke dalam sistem tersebut karena masih terdapat kekurangan dalam kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Situasi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat daerah agar data dapat dimasukkan ke dalam sistem dengan baik, sehingga data di Kota Denpasar dapat terintegrasi secara efisien.

2. Buku Kabupaten Dalam Angka

Buku Kota Denpasar dalam Angka adalah terbitan tahunan yang secara berkala diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang perkembangan Kota Denpasar, termasuk aspek geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri dan perdagangan, perhubungan dan komunikasi, serta beberapa data tambahan. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik Kota Denpasar mengumpulkan data dari berbagai

sektor yang kemudian diolah dan dipublikasikan dalam bentuk buku. Buku Kota Denpasar dalam Angka ini berisi data statistik mengenai kondisi Kota Denpasar yang dapat digunakan secara luas untuk berbagai keperluan perencanaan pembangunan daerah.

3. Buku PDRB

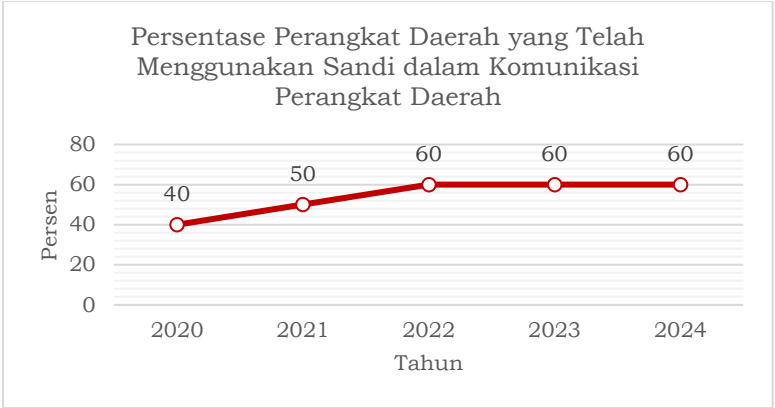
Pemerintah Kota Denpasar secara rutin menyusun berbagai data publikasi, seperti “Kota Denpasar Dalam Angka”, “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)”, “Indeks Harga Konsumen”, “Statistik Ketenagakerjaan”, “Statistik Kesejahteraan Rakyat”, dan data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Buku PDRB adalah publikasi rutin yang disiapkan oleh BPS Kota Denpasar, yang memberikan gambaran perkembangan perekonomian kabupaten/kota secara deskriptif.

Setiap tahun, BPS Kota Denpasar menyusun dan mempublikasikan buku PDRB Kota Denpasar, yang mencakup tabel PDRB dengan harga berlaku dan harga konstan, yang bergantung pada periode tertentu (2000 sebelum 2010, dan 2010 setelahnya). Data statistik yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan, evaluasi pembangunan, dan pengambilan keputusan disediakan oleh Bappeda, yang memiliki peran utama dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan. Bappeda juga memiliki data profil pembangunan kabupaten. Selain itu, Perangkat Daerah yang mengelola urusan strategis seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan juga menyusun data profil masing-masing urusan, seperti profil pendidikan dan profil kesehatan.

M) Persandian

1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

Sistem persandian yang saat ini diterapkan oleh Kota Denpasar terkait dengan keamanan *website* dan dokumen menggunakan sertifikat elektronik. Walaupun telah diterapkan untuk melindungi keamanan *website* dan dokumen, sistem persandian yang ada belum sepenuhnya dapat menjamin keamanan informasi di Kota Denpasar. Hal ini terjadi karena masih terbatasnya jumlah SDM yang dapat mengelola urusan persandian, dan juga belum adanya koordinasi yang baik antara urusan persandian tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi, pemerintah Kota Denpasar perlu mengintegrasikan teknologi informasi dalam berbagai aspek, termasuk administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), dan keuangan (*e-budgetting*). Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024 meningkat tiap tahunnya, yaitu dari 40 persen menjadi 60 persen.



Gambar 2. 239
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2024

N) Kebudayaan
1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat diketahui dari banyaknya jumlah upacara atau perhelatan yang menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya, seperti tarian, musik, seni rupa, kuliner, dan aktivitas budaya lainnya. Festival ini bertujuan untuk merayakan, mempromosikan, dan mempertahankan kekayaan seni dan budaya suatu wilayah, serta meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya yang dimiliki. Angka ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelestarian budaya di Kota Denpasar.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Denpasar mengalami fluktuasi. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 23 acara seni dan budaya, sedangkan jumlah terendah terjadi pada tahun 2020 sebanyak 4 acara seni dan budaya, karena dampak pandemi Covid-19.



Gambar 2. 240
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Denpasar Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Kebudayaan, 2025

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pelestarian cagar budaya adalah usaha yang dinamis dengan tujuan untuk merawat dan mempertahankan nilai dan keberadaan cagar budaya melalui penggunaan, pengembangan, dan perlindungan mereka. Kota Denpasar sangat erat dengan budaya Bali, sehingga keberadaan dan

pelestarian benda-benda bersejarah ini menjadi kunci penting untuk meneruskan warisan budaya kepada generasi muda.

Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Denpasar konsisten berada pada angka 100 persen. Pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya harus terus diupayakan dengan bekerja sama atau memanfaatkan potensi banyaknya ahli cagar budaya serta dibutuhkan peran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya, seperti melalui upaya sosialisasi.

3. Jumlah Sanggar Kesenian

Jumlah sanggar kesenian mengacu pada jumlah kelompok atau organisasi yang aktif dalam melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya di suatu wilayah. Sanggar kesenian sering kali menjadi tempat bagi individu dan kelompok untuk belajar, berlatih, dan mempertunjukkan beragam bentuk seni tradisional atau kontemporer, seperti tari, musik, seni rupa, dan lainnya. Jumlah sanggar kesenian di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat 260 unit sanggar kesenian dan cenderung meningkat hingga pada tahun 2024 jumlah sanggar kesenian bertambah secara signifikan menjadi 426 unit. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan signifikan terkait keaktifan dan keragaman budaya serta seni yang ada di Kota Denpasar.



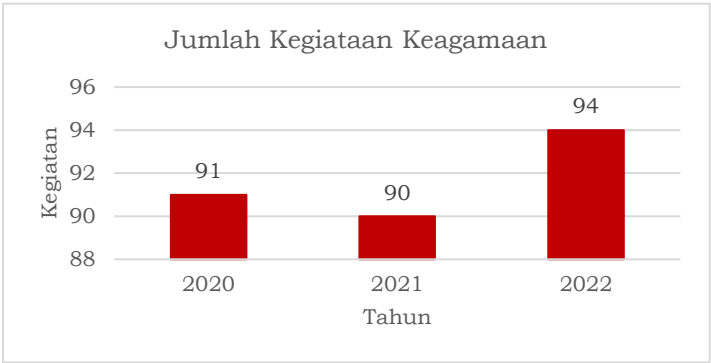
Gambar 2. 241
Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kebudayaan, 2025

4. Jumlah Desa Adat yang Aktif

Jumlah desa adat yang aktif merujuk pada jumlah desa atau komunitas adat yang masih secara aktif menjalankan tradisi, norma, dan nilai-nilai budaya adat mereka. Desa-desa adat ini memainkan peran penting dalam memelihara dan melestarikan warisan budaya tradisional serta meneruskan praktik-praktik adat kepada generasi berikutnya. Seluruh desa adat di Kota Denpasar telah menjadi desa adat yang aktif setiap tahunnya dari tahun 2020-2024. Desa adat yang aktif di Denpasar berjumlah 35 desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung program pemerintah. Hal ini mencerminkan adanya keanekaragaman budaya dan komitmen masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya mereka.

5. Jumlah Kegiatan Keagamaan

Jumlah kegiatan keagamaan mengacu pada beragam acara dan aktivitas yang terkait dengan praktik keagamaan di suatu wilayah. Ini mencakup ritual ibadah, upacara keagamaan, festival agama, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan aspek spiritual dan kepercayaan agama. Jumlah kegiatan keagamaan di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dari 91 kegiatan pada tahun 2020 dan angka tersebut turun menjadi 90 kegiatan di tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 94 kegiatan pada tahun 2022.



Gambar 2. 242
Jumlah Kegiatan Keagamaan di Kota Denpasar Tahun 2020-2022
Sumber: Dinas Kebudayaan, 2025

6. Jumlah Promosi Kebudayaan yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar

Promosi kebudayaan yang difasilitasi pemerintah merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung, mempromosikan, dan melestarikan kebudayaan lokal atau nasional. Hal ini melibatkan berbagai kegiatan seperti festival seni dan budaya, pameran seni, dukungan finansial untuk seniman dan budayawan, serta program-program yang mendorong kesadaran akan kearifan lokal dan tradisi budaya. Jumlah promosi kebudayaan yang difasilitasi pemerintah di Kota Denpasar terus mengalami fluktuasi. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 30 promosi, sedangkan jumlah terendah terjadi pada tahun 2020 sebanyak 4 promosi, karena dampak pandemi Covid-19.



Gambar 2. 243
Jumlah Promosi Kebudayaan yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kebudayaan, 2025

7. Lembaga Subak

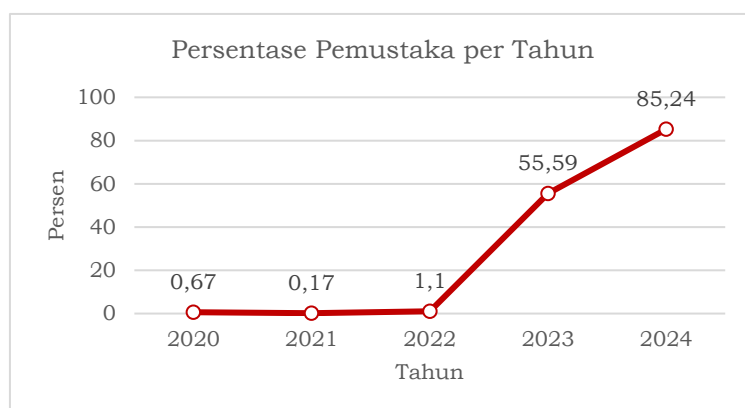
Lembaga subak adalah lembaga tradisional di Bali yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan air irigasi untuk pertanian sawah. Lembaga subak memiliki peran penting dalam menjaga keselarasan antara air, pertanian, dan lingkungan di Bali. Lembaga ini mengatur jadwal pengairan, menyelesaikan konflik yang terkait dengan penggunaan air, dan menjaga keseimbangan ekologi di sawah. Lembaga subak memainkan peran sentral dalam pelestarian warisan budaya pertanian di Bali dan telah menjadi model keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air di daerah ini.

Kota Denpasar memiliki 42 lembaga subak yang keseluruhannya beroperasi aktif mengolah pertanian di Kota Denpasar pada tahun 2020-2024. Kedepannya diharapkan seluruh lembaga subak tetap aktif dan mempertahankan keberadaan subak secara berkelanjutan. Pemanfaatan subak juga diharapkan menjadi destinasi wisata untuk berkontribusi dalam perekonomian masyarakat petani sekaligus melestarikan subak.

O) Perpustakaan

1. Persentase Pemustaka per Tahun

Pemustaka per tahun adalah ukuran yang mengacu pada jumlah individu atau pengunjung yang menggunakan layanan perpustakaan dalam satu tahun tertentu. Persentase pemustaka per tahun mengacu pada perbandingan jumlah pemustaka dalam satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk atau populasi yang berpotensi menggunakan perpustakaan dalam periode yang sama. Indikator ini menilai sejauh mana perpustakaan berhasil menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya dan layanan perpustakaan.



Gambar 2. 244

Persentase Pemustaka per Tahun di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, 2025

Persentase pemustaka per tahun di Kota Denpasar selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi. Persentase pemustaka tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 85,24 persen dan cenderung naik dari tahun 2023 sebesar 55,59 persen. Persentase pemustaka per tahun tinggi menunjukkan bahwa perpustakaan aktif digunakan oleh sebagian besar populasi yang berpotensi. Ini bisa menunjukkan efektivitas perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam hal literasi, pendidikan, informasi, dan hiburan. Namun, ketika persentase pemustaka per tahun rendah, dapat mengindikasikan bahwa perpustakaan perlu meningkatkan strategi promosi, mengembangkan koleksi yang lebih relevan, atau meningkatkan kualitas layanannya agar lebih menarik bagi masyarakat.

2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan mengacu pada total individu atau orang yang mengunjungi perpustakaan dalam jangka waktu tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Indikator ini membantu perpustakaan untuk mengidentifikasi popularitas dan keberhasilan perpustakaan dalam menarik pengunjung. Analisis tren jumlah pengunjung perpustakaan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas inisiatif promosi, program, atau perubahan yang diterapkan oleh perpustakaan.

Jumlah pengunjung perpustakaan terendah terjadi pada rentang tahun 2020-2021 akibat pembatasan berkegiatan pada Covid-19. Sedangkan pengunjung perpustakaan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 637.976 pengunjung. Ketika jumlah pengunjung tinggi, menunjukkan bahwa perpustakaan digunakan oleh masyarakat dan menarik minat luas. Namun, ketika jumlah pengunjung rendah, perpustakaan perlu meningkatkan daya tarik dan layanan mereka untuk menarik lebih banyak pengunjung.



Gambar 2. 245
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, 2025

3. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat merujuk pada jumlah individu yang bekerja di perpustakaan dan telah mendapatkan sertifikat atau kualifikasi tertentu dalam bidang mereka. Indikator ini dapat menilai kualitas sumber daya manusia di perpustakaan. Sertifikasi dapat mencakup berbagai aspek, termasuk manajemen perpustakaan, organisasi koleksi, teknologi informasi, layanan pelanggan, dan lain-lain.



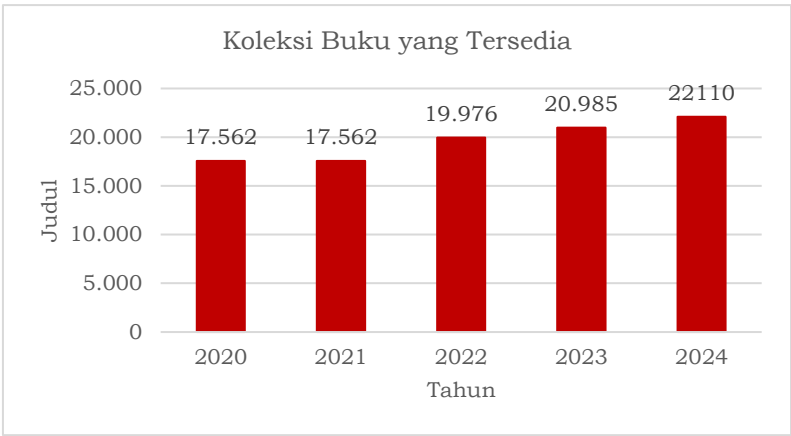
Gambar 2. 246
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Kota Denpasar Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, 2024

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat di Kota Denpasar selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 dan 2023, terdapat 8 staf yang memiliki sertifikat. Melacak jumlah staf dengan sertifikat dapat membantu perpustakaan untuk menjalankan peran penting dalam melayani masyarakat dan memberikan informasi yang akurat serta berkualitas. Dengan kualifikasi yang relevan, staf perpustakaan dapat membantu pengunjung perpustakaan mencari dan menggunakan sumber daya dengan lebih efektif.

4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah merujuk kepada jumlah dan variasi buku yang dapat ditemukan dalam perpustakaan daerah. Koleksi buku ini mencakup berbagai judul, genre, topik, dan format buku, seperti buku cetak, buku elektronik (*e-book*), majalah, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Jumlah dan kualitas koleksi buku yang tersedia dapat menjadi indikator kesehatan perpustakaan serta sejauh mana perpustakaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan minat masyarakat yang dilayani.



Gambar 2. 247
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

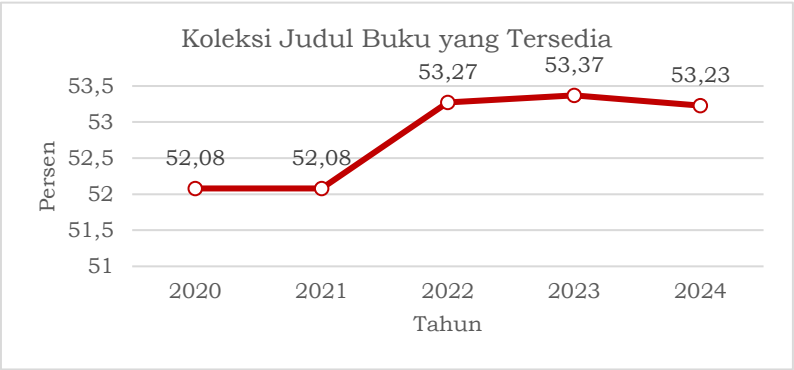
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, 2025

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Denpasar selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami

peningkatan. Sejak tahun 2020, koleksi buku yang tersedia sebanyak 17.562 buku hingga pada tahun 2024 koleksi buku yang tersedia telah mencapai 22.110 buku. Koleksi buku yang luas dan beragam adalah aset penting bagi perpustakaan daerah, karena memberikan akses kepada berbagai pengetahuan, informasi, dan hiburan.

5. Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah merujuk kepada jumlah dan variasi buku yang dapat ditemukan dalam perpustakaan daerah. Koleksi buku ini mencakup berbagai judul, genre, topik, dan format buku, seperti buku cetak, buku elektronik (*e-book*), majalah, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Jumlah dan kualitas koleksi buku yang tersedia dapat menjadi indikator kesehatan perpustakaan serta sejauh mana perpustakaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan minat masyarakat yang dilayani. Koleksi judul buku yang tersedia di Kota Denpasar selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi.

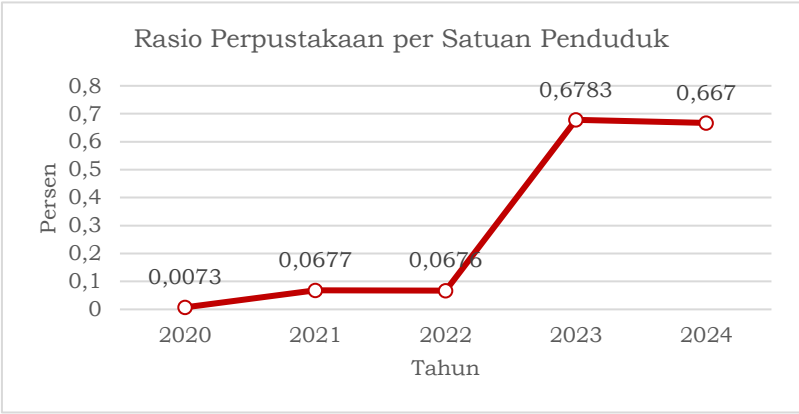


Gambar 2. 248
Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, 2025

6. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Rasio perpustakaan per satuan penduduk adalah indikator yang mengindikasikan sejauh mana akses pemustaka terhadap perpustakaan di suatu wilayah. Rasio ini mencerminkan perbandingan antara jumlah perpustakaan yang tersedia dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.



Gambar 2. 249
Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, 2025

Rasio perpustakaan per satuan penduduk di Kota Denpasar cenderung meningkat dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024. Peningkatan cukup signifikan pada rasio perpustakaan per satuan penduduk menjadi 0,6783 pada tahun 2023. Semakin tinggi rasio perpustakaan per satuan penduduk, semakin baik akses masyarakat terhadap sumber daya perpustakaan. Hal ini dapat mendukung pendidikan, penelitian, dan pembelajaran di komunitas setempat. Sebaliknya, jika rasio ini rendah, itu bisa menunjukkan bahwa akses terhadap perpustakaan terbatas dan mungkin perlu ditingkatkan.

7. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)

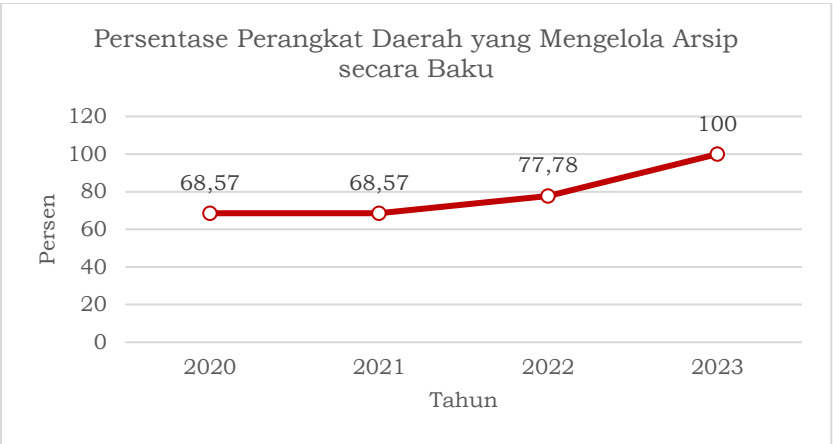
Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) adalah indikator yang mengindikasikan sejauh mana individu atau kelompok populasi tertentu memiliki minat dan kebiasaan membaca. TGM biasanya diukur dalam bentuk persentase atau angka. Tingkat Kegemaran Membaca mengacu pada perilaku membaca yang mencakup membaca buku, majalah, koran, artikel, dan literatur lainnya.

Pada tahun 2022, Tingkat Kegemaran Membaca di Kota Denpasar sebesar 69,02. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 71,92. Tingkat Kegemaran Membaca yang tinggi dapat mendukung perkembangan intelektual, pembelajaran sepanjang hidup, dan pertumbuhan pengetahuan. Pemerintah, lembaga pendidikan, perpustakaan, dan kelompok masyarakat sering mengukur TGM untuk memahami minat baca masyarakat dan merancang program-program yang dapat meningkatkannya. Tingkat Kegemaran Membaca yang tinggi dapat memiliki dampak positif pada pendidikan, budaya, dan perkembangan sosial.

P) Kearsipan

1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku adalah indikator yang mengindikasikan sejauh mana unit atau departemen pemerintah dalam suatu wilayah atau kota mengelola arsip mereka sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengelolaan arsip yang baku mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengarsipan, pemeliharaan, dan penggunaan arsip sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.



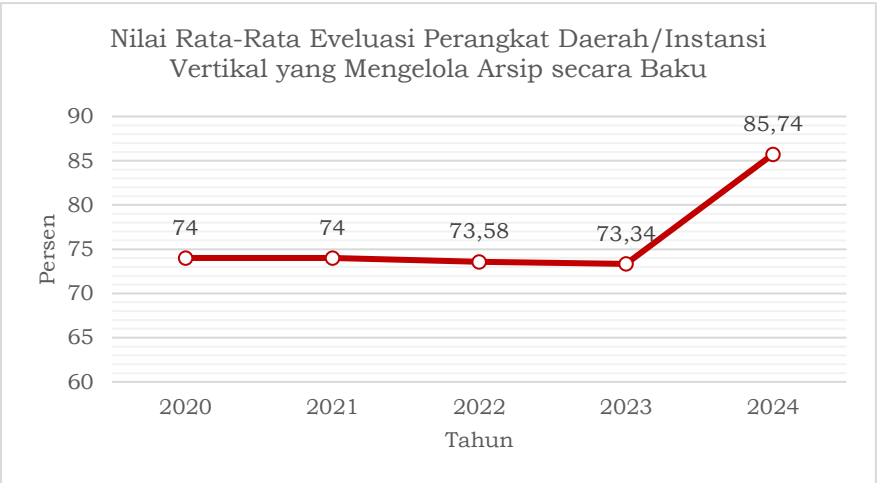
Gambar 2. 250
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota Denpasar Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, 2024

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Denpasar selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Persentase tersebut akhirnya mencapai angka 100% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa perangkat daerah Kota Denpasar telah menerapkan praktik pengelolaan arsip yang baik sehingga dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas informasi yang lebih baik. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dapat terus ditingkatkan karena berkontribusi pada perbaikan sistem administrasi dan tata kelola pemerintahan.

2. Nilai Rata-Rata Evaluasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal yang Mengelola Arsip secara Baku

Nilai rata-rata evaluasi perangkat daerah/instansi vertikal yang mengelola arsip secara baku adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana perangkat daerah atau instansi vertikal di suatu wilayah atau kota mematuhi standar dan pedoman dalam pengelolaan arsip. Evaluasi tersebut biasanya mencakup sejumlah parameter dan aspek yang dinilai, seperti pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan aksesibilitas arsip.



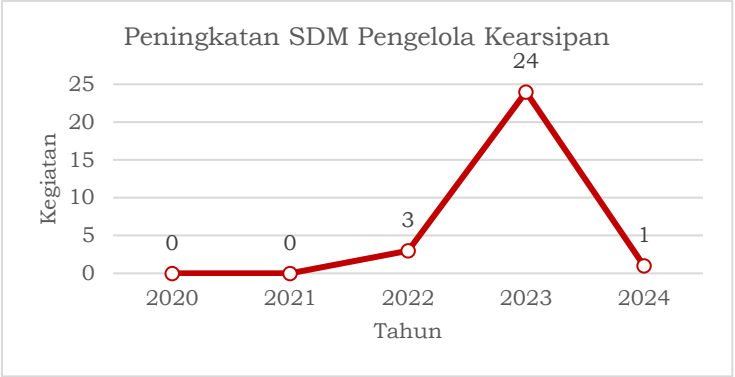
Gambar 2. 251
Nilai Rata-Rata Evaluasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, 2025

Nilai rata-rata evaluasi perangkat daerah/instansi vertikal yang mengelola arsip secara baku di Kota Denpasar selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dari 74 persen menjadi 73,58 persen. Capaian ini menggambarkan performa rata-rata perangkat daerah atau instansi vertikal di Kota Denpasar dalam menjalankan tugas pengelolaan arsip mereka. Capaian yang tinggi seperti yang terjadi pada tahun 2024 menandakan bahwa penerapan praktik pengelolaan arsip yang baku di perangkat daerah atau instansi vertikal di Kota Denpasar semakin baik.

3. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM pengelola kearsipan merujuk pada upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dan dokumen di berbagai perangkat daerah pemerintah atau instansi. Hal ini penting dalam menjaga integritas, aksesibilitas, dan keamanan informasi yang terdapat dalam arsip pemerintah. Dengan SDM yang terampil, perangkat daerah atau instansi dapat mengelola arsip mereka dengan lebih efisien, meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan informasi, dan memastikan bahwa data dan dokumen penting tersedia ketika dibutuhkan.



Gambar 2. 252
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, 2024

Peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kota Denpasar pada tahun 2022 terdapat 3 kegiatan. Pada tahun 2023, terjadi lonjakan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kota Denpasar menjadi 24 kegiatan yang dilaksanakan selama tahun tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan SDM pengelola kearsipan yang mencakup pelatihan dalam beberapa hal, seperti prinsip-prinsip dasar pengelolaan arsip, teknik pengarsipan, standar pengelolaan arsip, dan perkembangan teknologi terkait arsip. Dengan SDM yang terlatih dan terampil, pengelolaan arsip pemerintah dapat berjalan dengan lebih baik, mendukung tugas-tugas administrasi, perencanaan, serta akuntabilitas yang lebih baik.

3) Fokus Layanan Urusan Pilihan

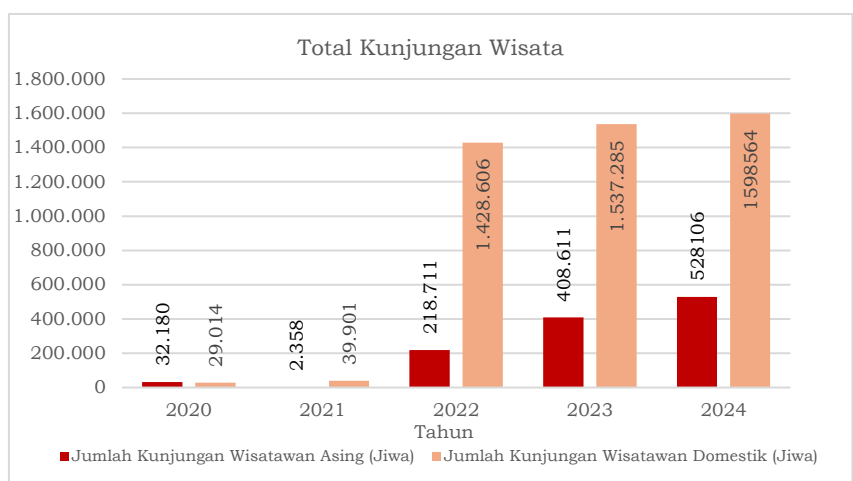
A) Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata merupakan kegiatan kunjungan ke tempat-tempat atau destinasi wisata baik di dalam dan/atau luar negeri. Tujuan dari kunjungan adalah untuk rekreasi, kebutuhan kesehatan, ibadah, dan menikmati keindahan alam, budaya, atau sejarah. Kunjungan wisatawan, baik asing maupun domestik, memiliki dampak penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Pada tahun 2019, tercatat 623.585 kunjungan wisatawan asing dan cenderung menurun hingga menjadi 528.106 jiwa wisatawan asing yang berkunjung pada tahun 2024. Di sisi lain, kunjungan wisatawan domestik mengalami peningkatan, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2024, yaitu sebanyak 1.598.564 kunjungan. Baik wisatawan asing maupun domestik mengalami penurunan drastis pada tahun 2020-2021 diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang banyak membatasi berbagai jenis kegiatan dan mobilitas antarkota maupun antarnegara.

Dampak kunjungan wisatawan, baik asing maupun domestik, sangat signifikan terhadap perekonomian daerah. Kunjungan wisatawan asing membawa devisa negara ke dalam ekonomi daerah, berkontribusi pada pertumbuhan sektor pariwisata, dan berdampak positif pada perekonomian lokal dan industri terkait, seperti perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal. Kedua jenis kunjungan ini membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan, promosi dan pengelolaan destinasi wisata dapat terus ditingkatkan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata.



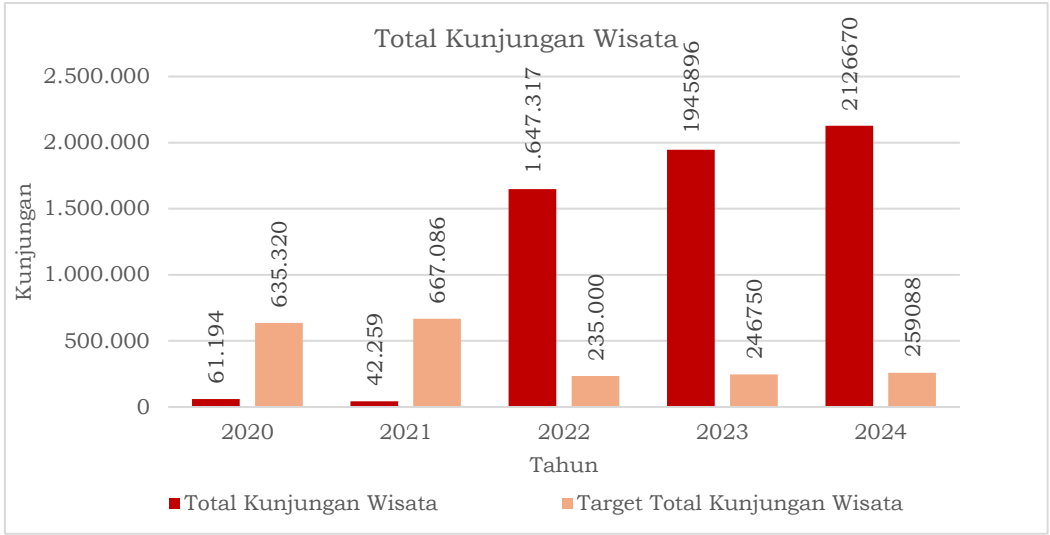
Gambar 2. 253

Grafik Jumlah Kunjungan Wisata Asing dan Domestik Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar (diolah), 2025

Selain itu, kunjungan wisata juga selalu melebihi target kunjungan yang telah ditetapkan. Pada beberapa tahun, persentase total kunjungan wisata bahkan melebihi 100%, menunjukkan daya tarik Kota Denpasar

sebagai destinasi wisata yang terus meningkat. Tren positif dalam total kunjungan wisata ini mengindikasikan bahwa Kota Denpasar adalah destinasi yang semakin diminati oleh wisatawan. Hal ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah serta membuka peluang-peluang baru dalam sektor pariwisata. Penjelasan tersebut digambarkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 254
Grafik Total Kunjungan Wisata Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar (diolah), 2025

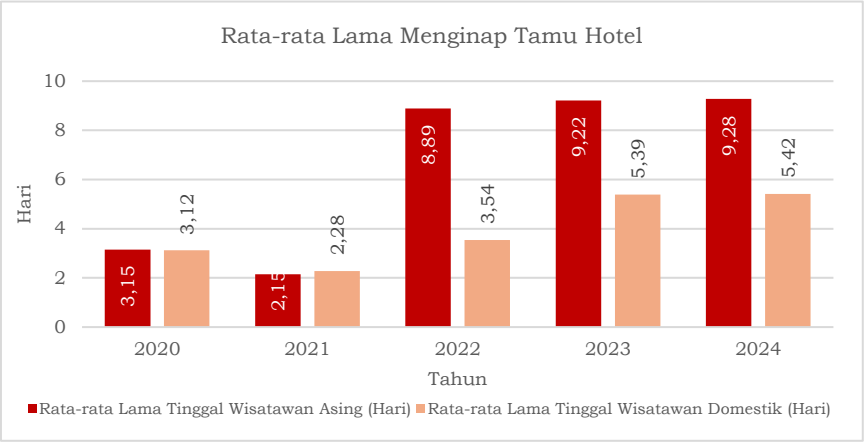
2. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

Rata-rata lama tinggal wisatawan adalah ukuran yang menggambarkan jumlah hari rata-rata yang dihabiskan oleh seorang wisatawan di suatu tempat, yang dilihat dari data lama menginap tamu hotel. Rata-rata lama tinggal wisatawan dikategorikan menjadi dua, yaitu rata-rata lama tinggal wisatawan asing dan rata-rata lama tinggal wisatawan domestik. Rata-rata lama tinggal wisatawan asing di Kota Denpasar bervariasi tergantung negara asal dan juga faktor lain seperti tujuan kunjungan dan kondisi global.

Dalam periode 2020 hingga 2024, rata-rata lama menginap wisatawan di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dengan tren cenderung meningkat. Untuk wisatawan asing, rata-rata lama tinggal bervariasi dari 2,15 hingga 9,28 hari selama periode tersebut, dengan titik tertinggi tercapai pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa wisatawan asing cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di Kota Denpasar. Perpanjangan lama tinggal wisatawan asing adalah indikator positif karena berkontribusi pada pendapatan lokal. Sementara itu, rata-rata lama tinggal wisatawan domestik berkisar antara 2,28 hingga 5,42 hari selama periode yang sama, dengan angka tertinggi juga tercapai pada tahun 2024. Secara umum, lama tinggal wisatawan domestik ini berfluktuasi meskipun dengan rentang yang rendah.

Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan, baik asing maupun domestik, berdampak positif pada perekonomian Kota Denpasar. Wisatawan yang tinggal lebih lama cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk

akomodasi, makanan, dan aktivitas lokal, yang kemudian meningkatkan pendapatan sektor pariwisata dan berdampak positif pada sektor ekonomi yang lebih luas.



Gambar 2. 255
Grafik Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Asing dan Domestik (Hari) Kota Denpasar Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar (diolah), 2025

3. Jumlah Sarana Kepariwisata

Jumlah sarana kepariwisataan merupakan objek daya tarik wisata sebagai pilihan untuk dikunjungi wisatawan. Jumlah sarana kepariwisataan dapat bervariasi tergantung pada lokasi, jenis sarana yang ada di wilayah tersebut, serta perkembangan industri pariwisata. Jumlah sarana kepariwisataan merupakan indikator penting dalam mengukur daya tarik suatu destinasi wisata.

Jumlah sarana kepariwisataan di Kota Denpasar menunjukkan tren fluktuatif dalam kurun tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, terdapat 2.084 unit dan menurun hingga menjadi 1.136 unit pada tahun 2023. Jumlah sarana kepariwisataan hanyalah satu bagian dari gambaran yang lengkap dan tidak mencerminkan kualitas sarana. Sarana yang memadai dan berkualitas tinggi dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan wisatawan. Dengan demikian, penting untuk terus memantau dan meningkatkan kualitas sarana kepariwisataan di Kota Denpasar guna menjaga daya tariknya sebagai destinasi wisata yang berkembang.



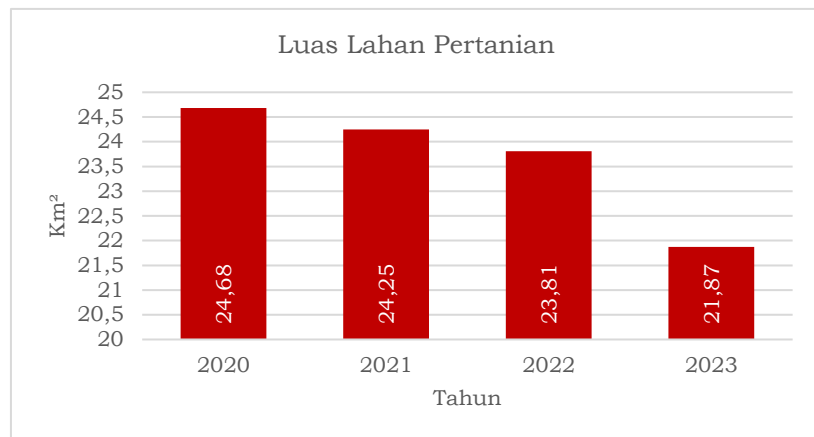
Gambar 2. 256
Jumlah Sarana Kepariwisata Kota Denpasar Tahun 2020–2023

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun, 2024

B) Pertanian

1. Luas Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kota Denpasar selama periode 2020-2023 menunjukkan tren yang menurun secara perlahan. Pada tahun 2020, luas lahan pertanian mencapai 24,68 km², dan selama beberapa tahun berikutnya, luas lahan ini mengalami penurunan yang konsisten. Hingga tahun 2023, luas lahan pertanian telah berkurang menjadi 21,87 km². Penurunan ini disebabkan oleh urbanisasi dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang pesat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan perkembangan kota, banyak lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan non-pertanian, seperti pemukiman, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Perubahan ini merupakan tantangan serius bagi pertanian di Kota Denpasar, terutama untuk mencukupi kebutuhan pangan lokal dan memastikan ketahanan pangan. Meskipun luas lahan pertanian mengalami penurunan, tetap ada peluang untuk memanfaatkan teknologi pertanian yang inovatif dan memaksimalkan penggunaan lahan yang tersedia dengan cara yang lebih efisien. Konsep pertanian perkotaan, seperti pertanian vertikal dan hidroponik, dapat menjadi solusi untuk memaksimalkan hasil panen dalam ruang terbatas.



Gambar 2. 257

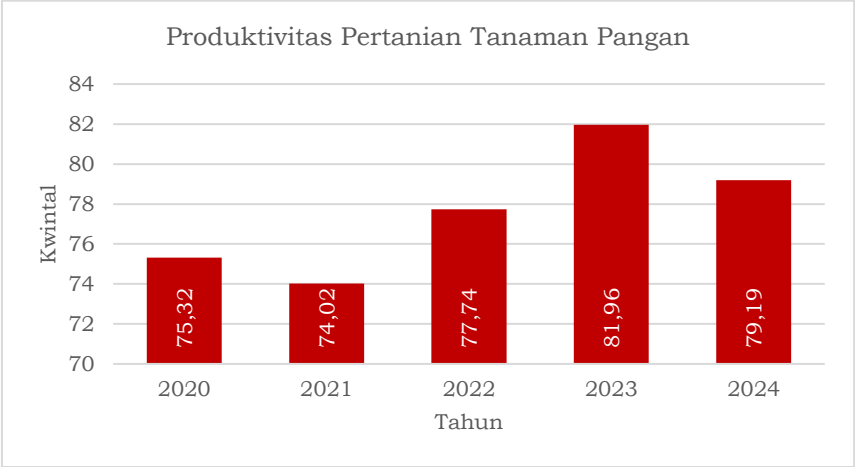
Grafik Luas Lahan Pertanian Kota Denpasar Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar (diolah), 2024

2. Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama

Produktivitas pertanian merupakan angka yang menunjukkan kemampuan lahan pertanian dalam memproduksi tanaman pangan utama wilayah tersebut. Angka tersebut didapatkan dari hasil jumlah produksi tanaman pertanian pangan dibagi luas areal lahan pertanian. Produktivitas pertanian tanaman pangan utama di Kota Denpasar menunjukkan tren yang cenderung meningkat sejak tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, produktivitas mencapai 75,32 kuintal per hektar dan terus meningkat hingga mencapai 79,19 kuintal per hektar pada tahun 2024. Meskipun luas lahan pertanian mengalami penurunan, produktivitas yang lebih tinggi merupakan indikator positif bahwa pertanian di Kota Denpasar dapat menjadi lebih efisien dalam menghasilkan hasil panen tanaman pangan utama.

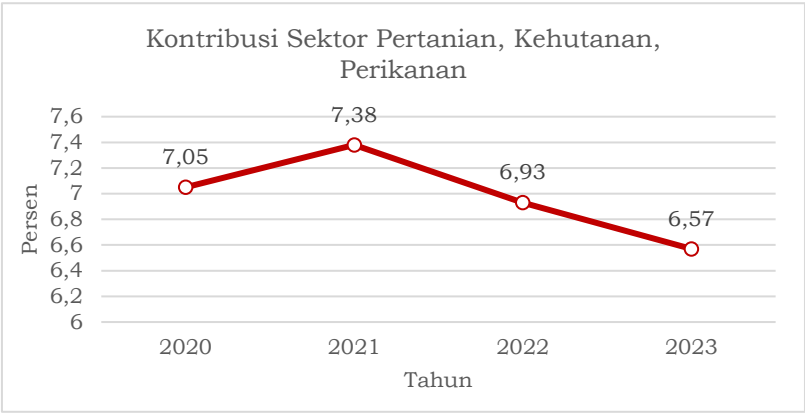
Produktivitas yang tinggi dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar kota.



Gambar 2. 258
Grafik Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar (diolah), 2025

3. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Denpasar menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini mencapai 7,05% dan mengalami peningkatan menjadi 7,38% pada tahun 2021. Pada tahun 2023, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menurun mencapai 6,57%. Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan sektor-sektor lain yang lebih cepat, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan sektor-sektor non-pertanian seperti pariwisata dan industri mungkin telah mengurangi andil sektor pertanian dalam perekonomian kota.



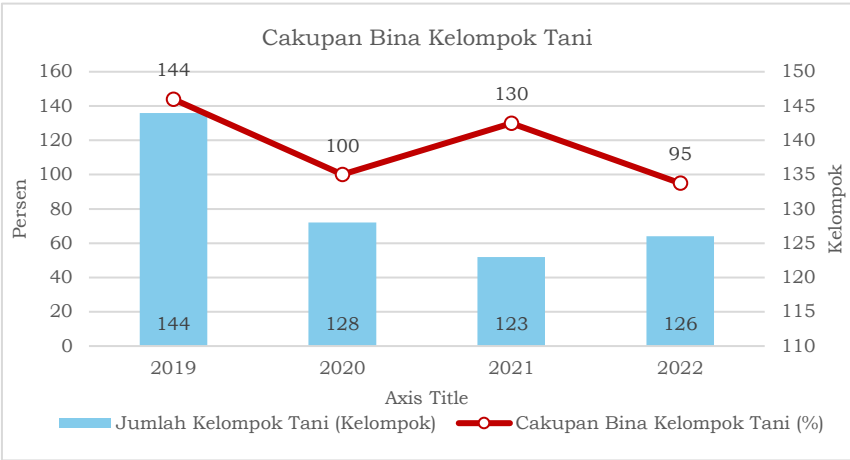
Gambar 2. 259
Grafik Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Kota Denpasar tahun 2020-2023
Sumber: BPS Kota Denpasar (diolah), 2025

4. Cakupan Bina Kelompok Tani

Bina Kelompok Tani (BKT) adalah program yang dirancang untuk memberdayakan petani melalui pembentukan dan pengembangan kelompok tani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan

kesejahteraan petani. Cakupan BKT mencakup berbagai aspek, mulai dari pembentukan kelompok tani, penyuluhan pertanian, hingga pemberian bantuan dari pemerintah. Kelompok tani terdiri dari petani, peternak, dan pekebun yang berada dalam satu lingkungan atau komoditas yang sama.

Cakupan bina kelompok tani di Kota Denpasar menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, cakupan ini mencapai 136%, yang kemudian cenderung menurun hingga menjadi 95% pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah kelompok tani pada tahun 2019 sebanyak 132 kelompok. Jumlah ini kemudian berfluktuasi hingga menjadi 126 kelompok pada tahun 2023. Peran kelompok tani dalam pengembangan pertanian dan ketahanan pangan di Kota Denpasar sangat penting. Peningkatan jumlah kelompok tani dapat membantu menggerakkan sektor pertanian, meningkatkan produktivitas, dan mendukung program-program pemerintah terkait pertanian. Penjelasan tersebut dirincikan dalam tabel di bawah ini.



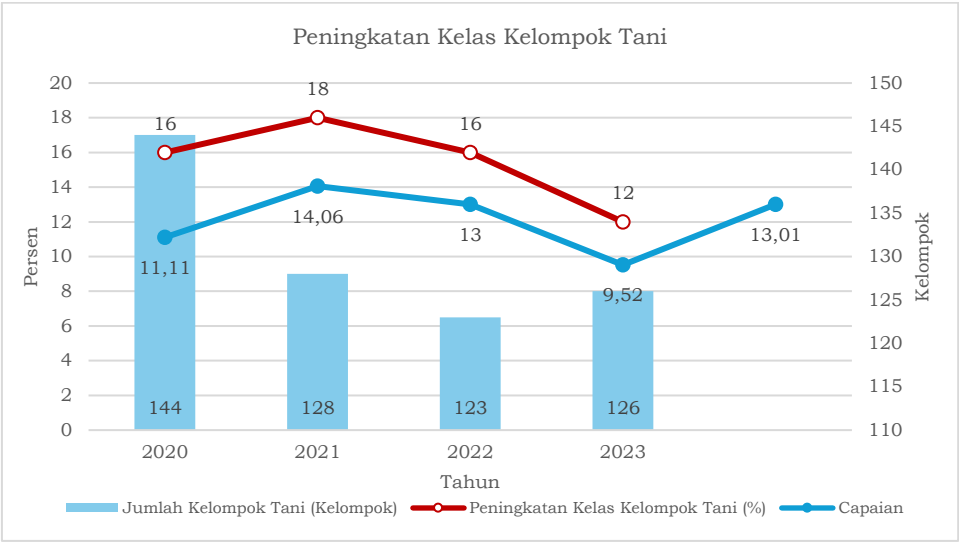
Gambar 2. 260
Grafik Cakupan Bina Kelompok Tani Kota Denpasar Tahun 2019–2023
Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar (diolah), 2024

5. Peningkatan Kelas Kelompok Tani

Kelas kelompok tani menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok yang dapat memudahkan pemberian pembinaan dari penyuluh pertanian. Peningkatan kelas kelompok tani dapat digunakan untuk melihat tingkat keberdayaan petani, sehingga semakin tinggi kelas kelompok tani, maka pengetahuan dan keterampilan petani akan lebih baik dalam menghadapi permasalahan dan dapat lebih aktif untuk bekerja sama mengembangkan usaha taninya. Kelas kelompok tani dibedakan menjadi empat sesuai kemampuannya, yaitu kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Menurut Peraturan-Peraturan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian No. 168 Tahun 2011, penilaian yang diberikan untuk setiap kelas didasarkan pada kelas belajar, wahana kerja sama, serta unit produksi.

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, persentase peningkatan kelas kelompok tani di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, peningkatan kelas

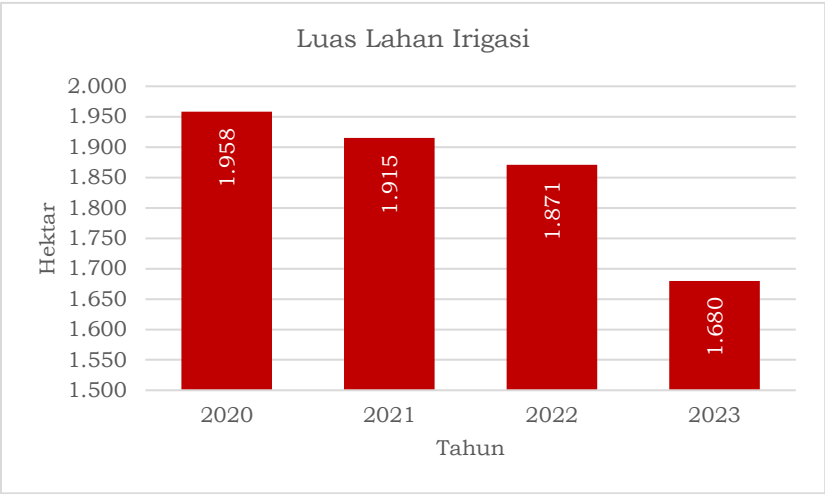
kelompok tani sebesar 11,11% dengan capaian 16%. Capaian dalam indikator ini menunjukkan persentase peningkatan kelas kelompok tani dari jumlah kelompok tani yang ada. Sementara itu, angka tersebut cenderung meningkat hingga peningkatan kelas kelompok tani menjadi hanya 13,01% pada tahun 2024. Peningkatan kelas kelompok tani dalam pengembangan SDM pertanian akan menghasilkan kelompok tani yang memiliki kemampuan untuk merencanakan usaha pertaniannya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki serta pemanfaatan teknologi yang dibutuhkan.



Gambar 2. 261
Grafik Cakupan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Kota Denpasar Tahun 2020 – 2024
Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar (diolah), 2025

6. Luas Lahan Irigasi

Luas lahan irigasi di Kota Denpasar mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, luas lahan irigasi mencapai 1.958 hektar, yang selanjutnya mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2023, luas lahan irigasi telah turun menjadi 1.680 hektar. Hal ini mencerminkan perubahan dalam pemanfaatan lahan dan infrastruktur irigasi di kota ini. Peningkatan kualitas dan efisiensi irigasi serta pemeliharaan infrastruktur irigasi yang baik sangat penting untuk mendukung produktivitas sektor pertanian di Kota Denpasar.



Gambar 2. 262
Grafik Luas Lahan Irigasi Kota Denpasar Tahun 2020-2023
Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar (diolah), 2025

7. **Penyuluh Lapangan dan Pembagian Kerjanya**

Jumlah penyuluh lapangan yang terlibat dalam sektor pertanian di Kota Denpasar pada periode 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, terdapat 15 orang penyuluh lapangan yang bertugas di bidang pertanian, kemudian mengalami fluktuasi hingga menjadi 18 orang pada tahun 2023. Penyuluh lapangan berperan penting dalam memberikan panduan, pengetahuan, dan bimbingan kepada para petani dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian di kota ini. Meskipun jumlah penyuluh lapangan mengalami fluktuasi, peran mereka tetap sangat relevan dalam mendukung sektor pertanian di Kota Denpasar.



Gambar 2. 263
Grafik Penyuluh Lapangan dan Pembagian Kerjanya di Kota Denpasar Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar (diolah), 2025

8. **Subsidi Pupuk**

Pemerintah Kota Denpasar memberikan subsidi pupuk untuk mendukung petani dan sektor pertanian secara keseluruhan dengan menyediakan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Subsidi pupuk membantu petani dalam mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan memastikan ketersediaan pupuk yang memadai untuk pertanian. Subsidi pupuk ini mencapai jumlah 1.0245,75 ton pada tahun 2020 dan mengalami fluktuasi hingga menurun menjadi 785,751 ton pada tahun 2023. Persentase subsidi pupuk ini mencerminkan pembiayaan pupuk disubsidi oleh pemerintah yang mengalami fluktuasi dalam periode yang sama. Pada tahun 2020, persentase subsidi pupuk sekitar 92,07% yang kemudian berfluktuasi dan turun menjadi 49% pada tahun 2023.

Tabel 2. 88
Subsidi Pupuk di Kota Denpasar Tahun 2020-2023

Uraian	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Subsidi pupuk	Ton	1.245,75	871,79	1.207,40	785,751
Persentase Subsidi pupuk	%	92,07	90,38	87,87	49,003

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar (diolah), 2024

C) **Kehutanan**

Kondisi kehutanan di Kota Denpasar tidak memiliki perubahan yang signifikan. Dalam kurun waktu 2011-2015, Kota Denpasar memiliki upaya dalam pemeliharaan lahan hutan yang ada, yaitu dengan rehabilitasi hutan

dan lahan sebesar satu hektar. Selain itu, kegiatan preventif juga dilakukan sebagai bentuk pengelolaan lahan hutan, seperti pengendalian kerusakan hutan dan lahan pada empat lokasi selama 2011-2015 dan koordinasi pengendalian kebakaran hutan setiap tahunnya. Sementara itu, penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional Daerah terus dilakukan dengan jumlah kegiatan yang konsisten pada setiap tahunnya. Uraian pada bidang kehutanan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. 89

Jumlah dan Luasan Pengelolaan Kehutanan di Kota Denpasar Tahun 2011-2015

Uraian	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Hektar	1	1	1	1	1
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Lokasi	4	4	4	4	4
Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	Kali	1	1	1	1	1
Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional Daerah	Kali	1	1	1	1	1

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2012-2022

D) Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Energi dan sumber daya mineral memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, salah satunya sebagai indikator dalam memberikan penilaian perumahan layak dengan adanya ketersediaan listrik. Selain itu, fungsi utama dari sumber daya energi adalah menyediakan pasokan listrik yang andal untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, dan industri. Ketersediaan daya listrik yang memadai sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran aktivitas sehari-hari, baik di sektor pendidikan, bisnis, maupun rumah tangga.

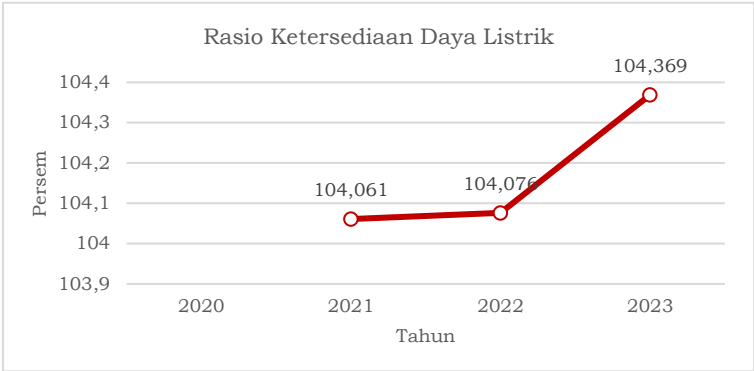
Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur di Kota Denpasar dapat dicerminkan dalam persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Selama periode 2020 hingga 2023, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus meningkat. Pada tahun 2020, persentase pengguna listrik mencapai 100% yang menandakan bahwa seluruh rumah tangga di Kota Denpasar telah mendapatkan akses listrik. Hal ini menunjukkan bahwa listrik telah menjadi komponen penting dalam kehidupan sehari-hari warga Kota Denpasar dan menggerakkan aktivitas sektor-sektor yang berkontribusi pada perkembangan daerah ini. Data yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2. 264
Grafik Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Denpasar Tahun 2020-2023
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2023

2. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin meningkat, ketersediaan daya listrik di Kota Denpasar juga terus ditingkatkan. Rasio ketersediaan daya listrik yang tinggi, mencapai di atas 100% selama periode 2020 hingga 2023, mengindikasikan bahwa kapasitas listrik yang tersedia melebihi kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan kemampuan Kota Denpasar yang dapat memenuhi kebutuhan listrik dengan jumlah produksi listrik telah melebihi jumlah penjualan listrik. Hal ini merupakan kondisi positif yang merepresentasikan kesiapan infrastruktur energi Kota Denpasar dalam menghadapi pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Dengan begitu, Kota Denpasar dapat terus menggerakkan sektor-sektor pembangunan dan memastikan layanan listrik yang andal dan ketersediaan daya listrik yang optimal.



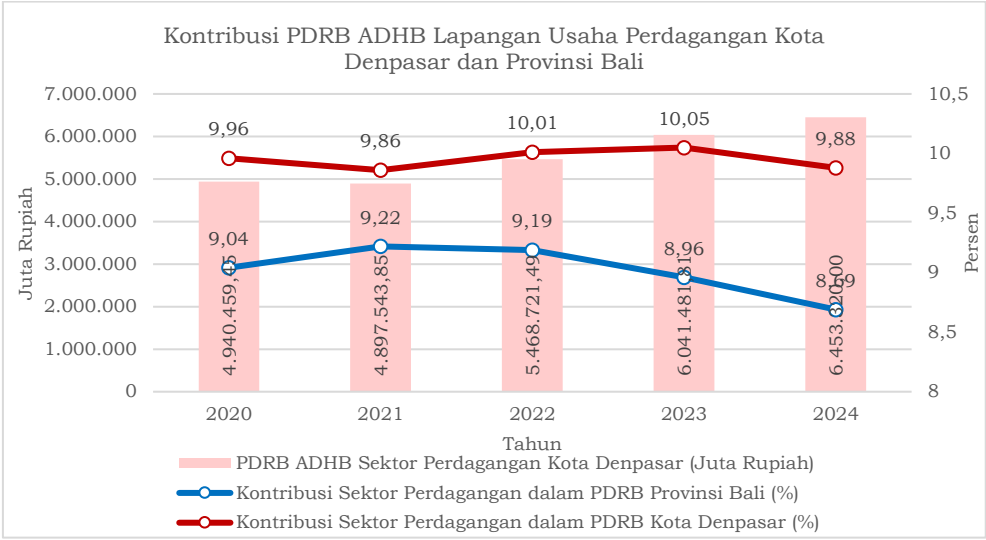
Gambar 2. 265
Grafik Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Denpasar Tahun 2020-2023
Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2023

E) Perdagangan

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Denpasar merupakan indikator penting dalam menilai peran sektor perdagangan dalam perekonomian wilayah. Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Kota Denpasar mengalami fluktuasi selama tahun 2020-2024, dengan laju tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 10,05%.

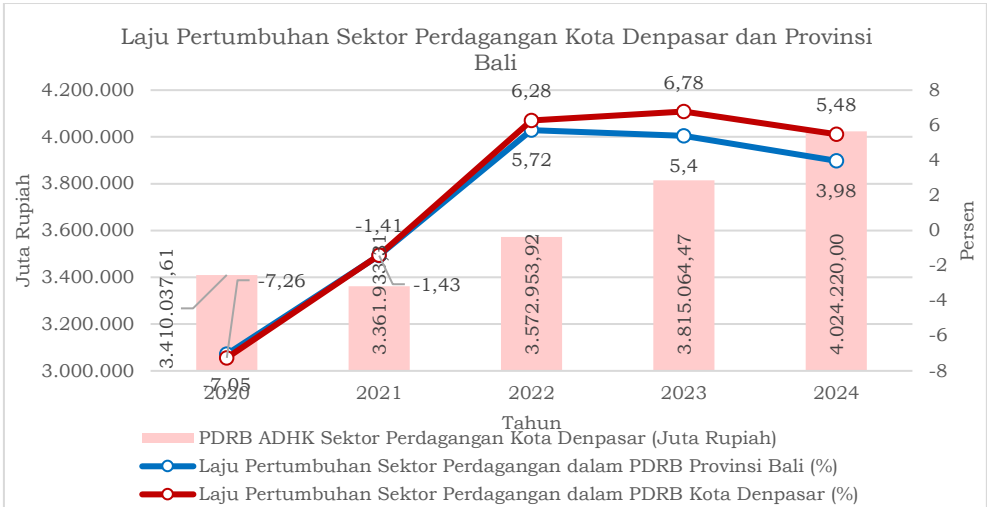
Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Kota Denpasar memiliki nilai yang cenderung lebih tinggi daripada kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Provinsi Bali sepanjang periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki peran yang relatif lebih besar dalam perekonomian Kota Denpasar dibandingkan dengan tingkat provinsi. Fluktuasi dalam kontribusi sektor perdagangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk perubahan dalam permintaan dan penawaran di pasar, perubahan kebijakan perdagangan, dan peristiwa eksternal seperti pandemi Covid-19.



Gambar 2. 266
Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar dan BPS Provinsi Bali, 2025

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK

Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan adalah indikator yang relevan dalam mengevaluasi perkembangan sektor perdagangan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan di Kota Denpasar menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024 yang mencapai puncak tertinggi pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 6,78%, dan puncak terendah pada tahun 2020 dengan pertumbuhan negatif sebesar -7.26% yang dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor perdagangan secara global. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan di Provinsi Bali juga mengalami fluktuasi, tetapi dengan laju pertumbuhan yang cenderung lebih rendah daripada Kota Denpasar. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif dapat menjadi indikasi pertumbuhan sektor perdagangan yang sehat dan berkontribusi positif terhadap PDRB.



Gambar 2. 267
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar dan BPS Provinsi Bali, 2025

3. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan

Penilaian nilai ekspor bersih perdagangan memiliki dampak penting dalam mengevaluasi performa ekonomi sebuah wilayah. Nilai ekspor bersih Kota Denpasar selama rentang waktu dari 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Puncak tertinggi dalam catatan nilai ekspor dan impor terlihat pada tahun 2022, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2023. Dinamika ini menunjukkan variasi yang signifikan dalam kegiatan ekspor kota. Nilai ekspor bersih perdagangan didapatkan dari total jumlah ekspor dan impor. Evaluasi ini mengindikasikan bahwa, sejak tahun 2021, ekspor bersih perdagangan mengalami penurunan meskipun sudah mulai terjadi peningkatan pasca pandemi Covid-19.



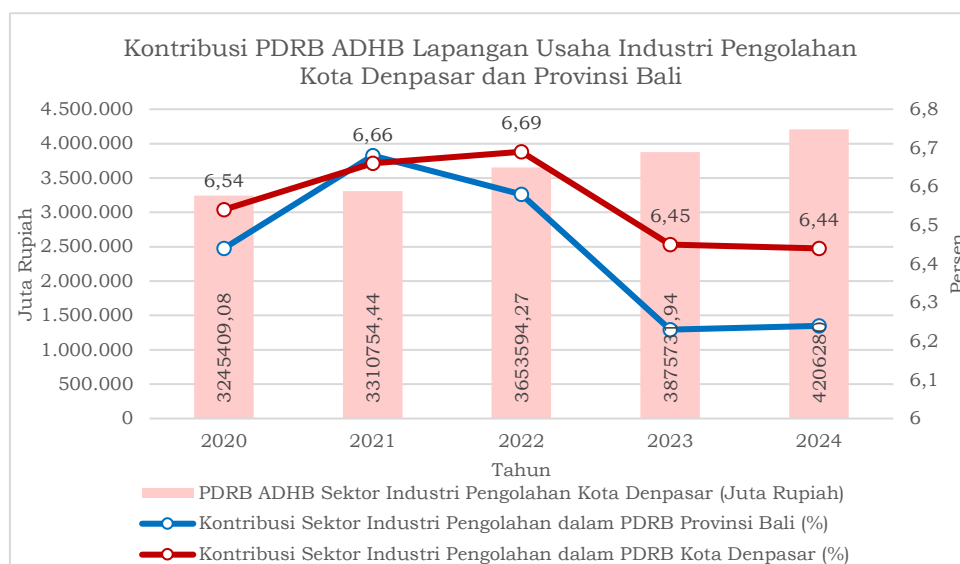
Gambar 2. 268
Grafik Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, 2025

F) Perindustrian

1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri dilihat berdasarkan kondisi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kontribusi sektor industri di Kota Denpasar mengalami fluktuasi selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sektor industri menyumbang sekitar 6,54% dari PDRB kota dan meningkat hingga mencapai 6,69% pada tahun 2022. Persentase tersebut turun hingga menjadi 6,44% pada tahun 2024. Meski demikian, PDRB ADHB sektor industri tahun 2024 mencapai angka tertingginya yaitu 4.206,28 miliar rupiah.

Secara umum, kontribusi sektor industri di Kota Denpasar tampak lebih besar daripada kontribusi sektor industri di Provinsi Bali dalam periode yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor industri, meskipun mengalami fluktuasi, masih memainkan peran penting dalam struktur ekonomi kota dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi wilayah dengan memfasilitasi kegiatan pengolahan yang membentuk dasar untuk pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.



Gambar 2. 269

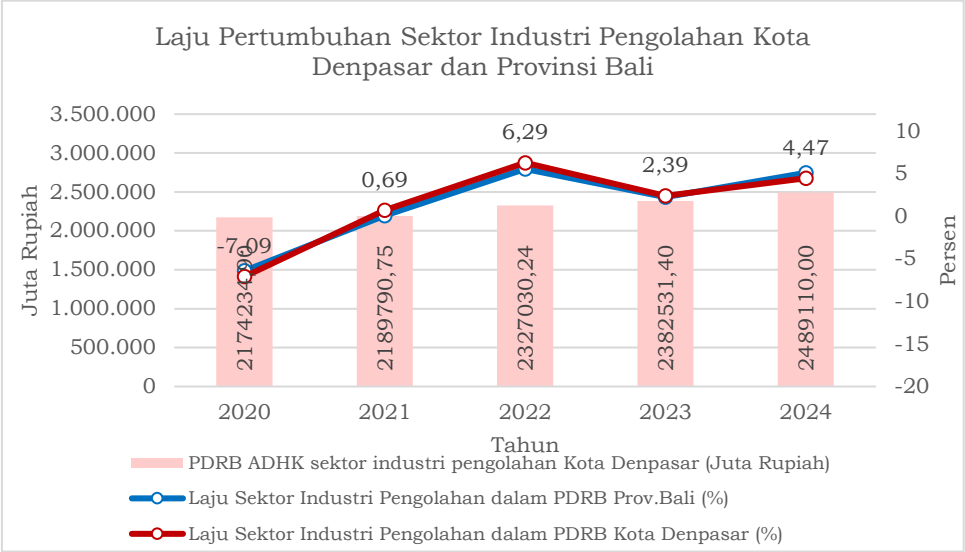
Persentase Kontribusi PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Denpasar dan BPS Provinsi Bali, 2025

2. Laju Peningkatan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kota Denpasar selama periode tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan sektor industri mencapai -7,09%, yang menunjukkan pertumbuhan negatif dalam kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Denpasar. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan sektor industri mencapai nilai tertinggi dengan persentase sebesar 6,29%. Angka tersebut sangat baik sebagai bentuk peningkatan yang signifikan setelah terjadi penurunan pertumbuhan akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Bali selama periode yang sama, terlihat bahwa laju

pertumbuhan sektor industri di Kota Denpasar memiliki alur fluktuasi yang serupa.

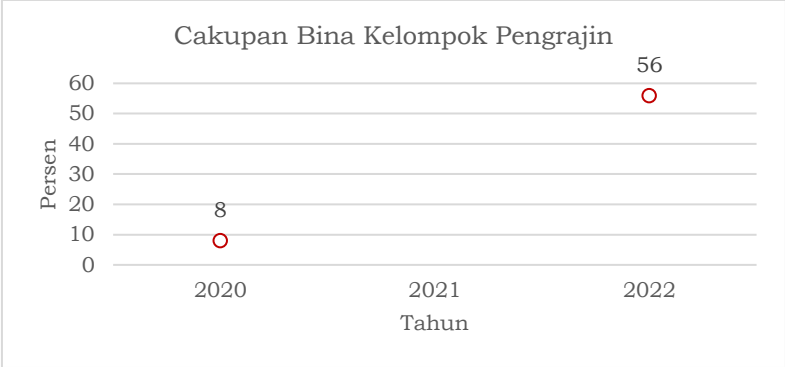


Gambar 2. 270
Laju PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

3. Cakupan Bina Pengrajin

Cakupan bina pengrajin bertujuan untuk membantu para anggota dalam meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan mereka melalui kerja sama dan akses ke berbagai sumber daya yang berkualitas. Cakupan bina kelompok pengrajin di Kota Denpasar adalah indikator yang relevan dalam sektor industri, terutama industri kerajinan.

Bina kelompok pengrajin penting untuk memberikan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan kepada para pengrajin, memfasilitasi perkembangan produk, peningkatan kualitas, pemasaran, dan aspek lain yang mendukung pertumbuhan industri pengrajin. Dengan peningkatan cakupan tersebut, industri pengrajin dapat lebih berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kota. Tren cakupan bina kelompok pengrajin selama periode tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan kenaikan. Kenaikan terjadi pada tahun 2020 ke tahun 2022, yaitu dari cakupan sebesar 8% turun menjadi 56%.



Gambar 2. 271
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kota Denpasar Tahun 2020-2022
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

G) Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Produksi perikanan mencakup dua aspek utama: perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Perikanan tangkap adalah kegiatan menangkap ikan dan sumber daya perikanan lainnya dari alam, seperti sungai, danau, laut, atau perairan lainnya. Kedua aspek produksi perikanan ini memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi di banyak negara, terutama yang memiliki akses ke perairan. Pemantauan dan pengelolaan yang baik dalam produksi perikanan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem perairan. Berikut adalah tabel produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kota Denpasar:

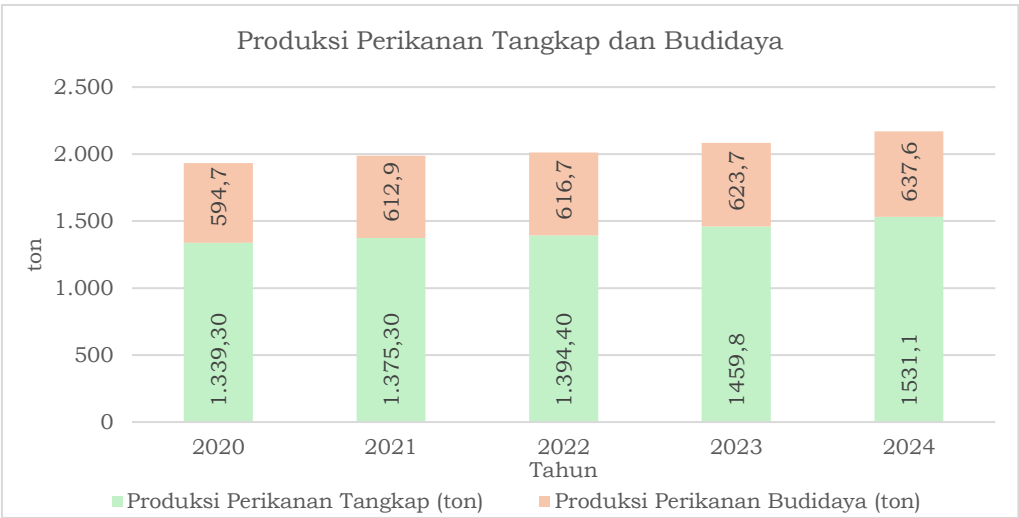
Tabel 2. 90

Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.339	1.375	1.394	1.459,8	1.531,1
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	595	613	617	623,7	637,6
Total Produksi Perikanan	Ton	1.934	1.988	2.010	2.083,5	2.168,7

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

Produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kota Denpasar selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Produksi perikanan tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 1.531,1 ton. Selaras dengan hal tersebut, produksi perikanan budidaya tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 637,6 ton. Dengan demikian, total produksi perikanan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 2.168 ton.



Gambar 2. 272

Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

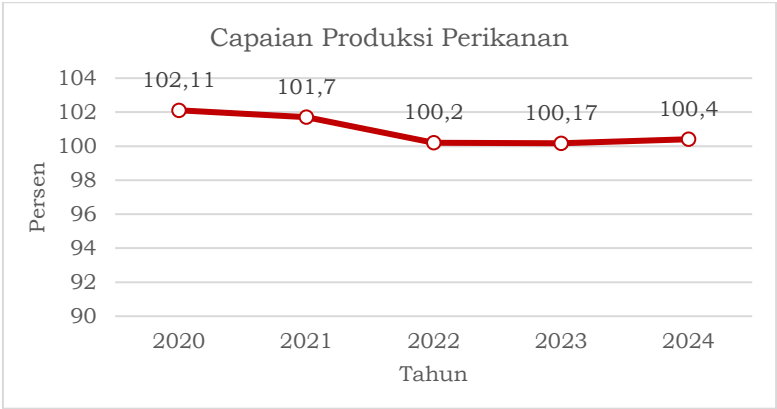
Jika dibandingkan dengan target produksi perikanan yang telah ditetapkan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar setiap tahunnya. Selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian produksi perikanan di Kota Denpasar selalu konsisten berada di atas 100

persen. Hal ini menandakan produksi perikanan di Kota Denpasar sudah berjalan optimal dengan pemanfaatan potensi perikanan yang lebih maksimal.

Tabel 2. 91
Capaian Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Total Produksi Perikanan	Ton	1.934	1.988	2.010	2.706,5	2.168,7
Jumlah Target Produksi Ikan Denpasar	Ton	1.894	1.955	2006	1.795	1.885
Capaian Produksi Perikanan	%	102	102	100	100	100

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025



Gambar 2. 273
Capaian Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, 2025

2. Konsumsi Ikan

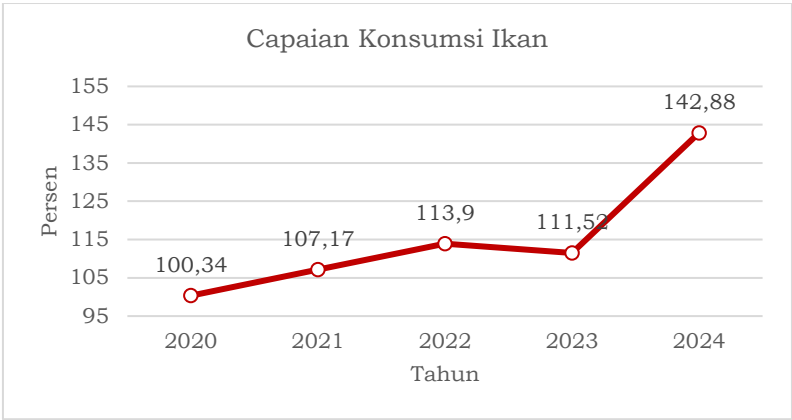
Konsumsi ikan merujuk pada jumlah ikan dan produk ikan yang dikonsumsi oleh individu atau populasi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Konsumsi ikan dapat berbeda-beda di seluruh wilayah tergantung pada faktor seperti budaya, aksesibilitas sumber daya perikanan, dan preferensi lokal. Monitoring konsumsi ikan adalah langkah penting dalam memahami asupan gizi dan kesehatan masyarakat. Berikut adalah tabel konsumsi ikan di Kota Denpasar. Berikut adalah tabel konsumsi ikan di Kota Denpasar:

Tabel 2. 92
Konsumsi Ikan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	35,92	38,58	41,82	53,58	53,58
Jumlah Target Konsumsi Ikan Daerah	Kg/kapita/tahun	35,8	36,0	36,7	37,5	37,5
Capaian Konsumsi Ikan	%	100,34	107,17	113,9	111,52	142,88

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

Capaian konsumsi ikan di Kota Denpasar selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu konsisten memenuhi target daerah dan berada di atas 100 persen dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 142,88%.



Gambar 2. 274
Capaian Konsumsi Ikan Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan merujuk pada program atau kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan dan membina kelompok nelayan. Program ini umumnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka, serta meningkatkan keberlanjutan sektor perikanan. Kegiatan dalam bina kelompok nelayan dapat mencakup pelatihan, pendidikan, pembinaan, pengembangan usaha, dan aspek-aspek lain yang relevan. Berikut adalah tabel kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan pemerintah daerah di Kota Denpasar:

Tabel 2. 93
Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Pembinaan Pemerintah Daerah di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan Pemda	Kelompok	22	24	24	26	28
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	100	100	100	100	100

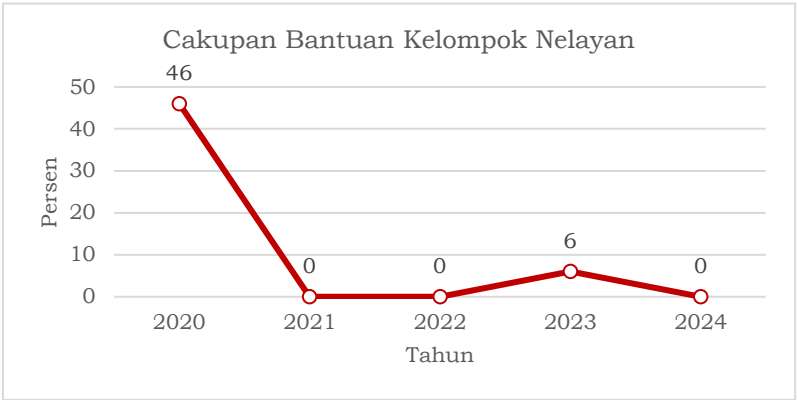
Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan pemerintah daerah Kota Denpasar cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024, yang semula sebanyak 22 kelompok, pada tahun 2024 menjadi 28 kelompok. Meski demikian, cakupan bina kelompok nelayan selalu konsisten berada di angka 100 persen tiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan bahwa program pengembangan nelayan dan sektor perikanan di Kota Denpasar masih berjalan optimal dan mencerminkan tingkat keterlibatan nelayan dalam program-program tersebut, yang pada gilirannya berdampak pada perbaikan kesejahteraan dan keberlanjutan sektor perikanan.

4. Cakupan Bantuan Kelompok Nelayan

Cakupan bantuan kelompok nelayan merujuk pada sejauh mana kelompok nelayan menerima bantuan dalam berbagai bentuk. Bantuan ini dapat mencakup bantuan finansial, bantuan peralatan, pelatihan, pendampingan, dan bantuan lainnya yang ditujukan untuk membantu

kelompok nelayan dalam meningkatkan usaha perikanan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan kelompok nelayan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, serta memperkuat sektor perikanan di suatu wilayah.



Gambar 2. 275
Cakupan Bantuan Kelompok Nelayan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

Cakupan bantuan kelompok nelayan di Kota Denpasar mengalami fluktuasi. Dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024, cakupan bantuan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 46%, sedangkan cakupan bantuan terendah terjadi pada tahun 2021, 2022, dan 2024 sebesar 0%. Hal ini menandakan belum semua kelompok nelayan mendapatkan bantuan pemerintah daerah Kota Denpasar, sehingga capaian bantuan masih belum optimal. Capaian ini menjadi bahan evaluasi efektivitas program-program pengembangan perikanan dan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Denpasar. Jika dilihat dari sisi kelompok nelayan, hal ini dapat mencerminkan sejauh mana kelompok nelayan memanfaatkan kesempatan bantuan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Denpasar.

5. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan

Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan merujuk pada sejauh mana program-program pembinaan dan pendampingan dilakukan terhadap kelompok yang terlibat dalam budidaya ikan. Program-program ini bertujuan untuk membantu kelompok pembudidaya ikan dalam meningkatkan produksi, kualitas, dan efisiensi usaha budidaya ikan mereka. Pendampingan ini dapat mencakup aspek teknik budidaya ikan, manajemen usaha, akses terhadap sumber daya, dan pengembangan pasar.

Tabel 2. 94
Kelompok Pembudidaya Ikan yang Dibina Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina Pemda	Kelompok	51	51	55	57	61
Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapatkan pembinaan pemerintah daerah Kota Denpasar mengalami fluktuasi dengan

kecenderungan meningkat selama rentang waktu 2020 hingga tahun 2024 dari 51 kelompok pembudidaya menjadi 61 kelompok pembudidaya ikan. Oleh karena itu, cakupan bina kelompok nelayan selalu konsisten berada di angka 100 persen tiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan sebagai keberhasilan program-program pembinaan dan pengembangan sektor perikanan budidaya, serta menggambarkan bahwa seluruh kelompok pembudidaya ikan dapat memanfaatkan kesempatan bantuan dan dukungan yang disediakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.

6. Cakupan Bantuan Kelompok Pembudidaya Ikan

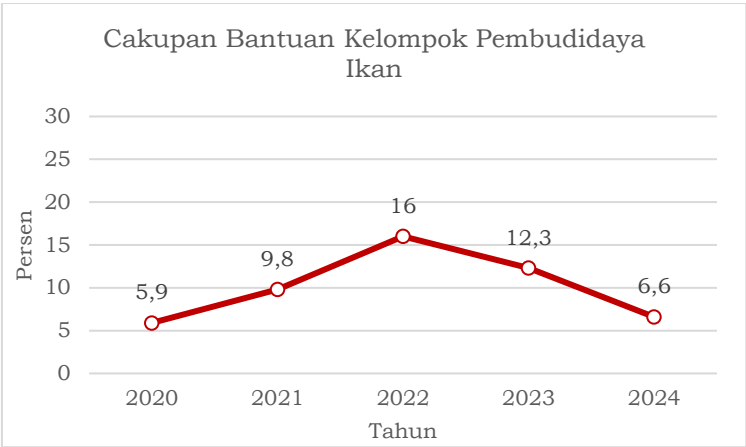
Cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan merujuk pada sejauh mana kelompok-kelompok yang terlibat dalam budidaya ikan menerima bantuan atau dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau lembaga lainnya. Bantuan ini dapat berbentuk pelatihan, pendampingan teknis, peralatan, modal usaha, atau akses ke sumber daya yang diperlukan dalam usaha budidaya ikan. Tujuannya untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok ini mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka dalam usaha budidaya ikan.

Tabel 2. 95
Kelompok Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan Pemda	Kelompok	3	5	5	7	4

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah Kota Denpasar mengalami fluktuasi selama rentang waktu 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 terdapat 3 kelompok yang mendapatkan bantuan. Angka tersebut berfluktuasi hingga menjadi 4 kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan pada tahun 2024. Di samping itu, cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan juga mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 16 persen dan cakupan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 5,9 persen. Hal ini dapat dijadikan evaluasi untuk memastikan bahwa bantuan dan dukungan yang disalurkan efektif dan mencapai sasaran yang ditentukan.



Gambar 2. 276
Capaian Bantuan Kelompok Pembudidaya Ikan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

7. Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan

Produksi ikan yang merupakan kontribusi dari hasil kelompok nelayan mengacu pada jumlah ikan yang diproduksi oleh kelompok nelayan atau masyarakat pesisir yang berkolaborasi dalam usaha penangkapan ikan. Kelompok nelayan ini bekerja sama dalam upaya menangkap dan menghasilkan ikan, dan kontribusi mereka dapat berupa produksi ikan tangkap dari perairan tertentu.

Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan Kota Denpasar mengalami peningkatan selama rentang waktu 2019 hingga tahun 2024 dengan jumlah terbanyak terjadi pada tahun 2024 sebanyak 1.487,30 ton. Selaras dengan hal tersebut, capaian produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan juga mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 hingga tahun 2024 sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok nelayan memberikan sumbangan penting dalam industri perikanan tangkap, sehingga evaluasi terhadap indikator ini dapat membantu dalam perencanaan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Tabel 2. 96
Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan Kota Denpasar Tahun 2020-2024

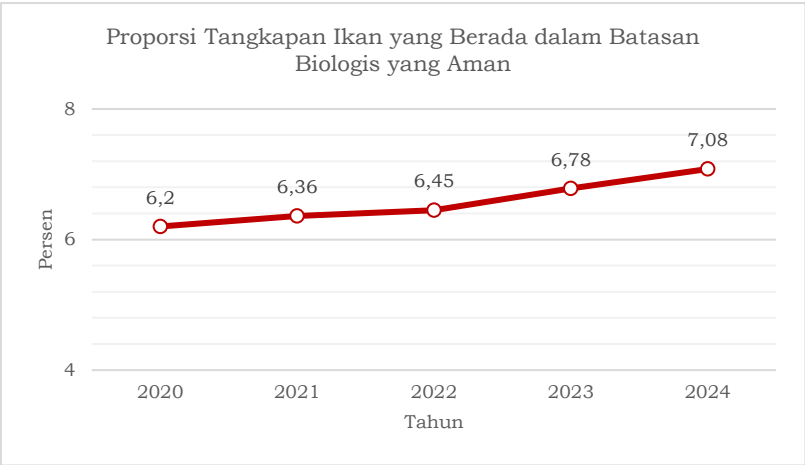
Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Ton	1.303,2	1.336,5	1.354	1.425,40	1.487,3
Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Persen	97,3	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2025

8. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman merujuk pada bagian dari total hasil tangkapan ikan yang mematuhi praktik dan batasan yang diberlakukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan dalam tahun yang sama atau 80 dari tangkapan maksimum lestari. Hal ini melibatkan pemantauan dan pengelolaan sumber

daya perikanan dengan memperhitungkan ukuran ikan, jumlah yang dapat ditangkap, dan praktik penangkapan lainnya untuk memastikan bahwa populasi ikan tetap berkelanjutan. Tujuan dari mengukur proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman adalah untuk memastikan bahwa aktivitas perikanan tidak mengancam ekosistem laut dan bahwa stok ikan tidak terkuras.



Gambar 2. 277
Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, 2023 dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, 2025

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024. Dari tahun 2020 proporsi tangkapan sebesar 6,03 persen dan pada tahun 2024 menjadi 7,08 persen. Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman secara umum telah memenuhi target Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar setiap tahunnya. Capaian ini harus dipertahankan dan ditingkatkan agar kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan berlangsung dalam jangka yang panjang.

9. Jumlah Kapal

Jumlah kapal merujuk pada jumlah kapal yang digunakan dalam sektor perikanan di suatu wilayah tertentu. Indikator ini dapat mencakup berbagai jenis kapal, seperti kapal motor, perahu motor tempel, dan perahu tanpa motor. Jumlah kapal merupakan indikator penting dalam mengukur skala dan intensitas aktivitas perikanan suatu wilayah, serta dapat digunakan untuk menganalisis potensi ekonomi dan dampak lingkungan dari sektor perikanan. Berikut adalah tabel jumlah kapal di Kota Denpasar.

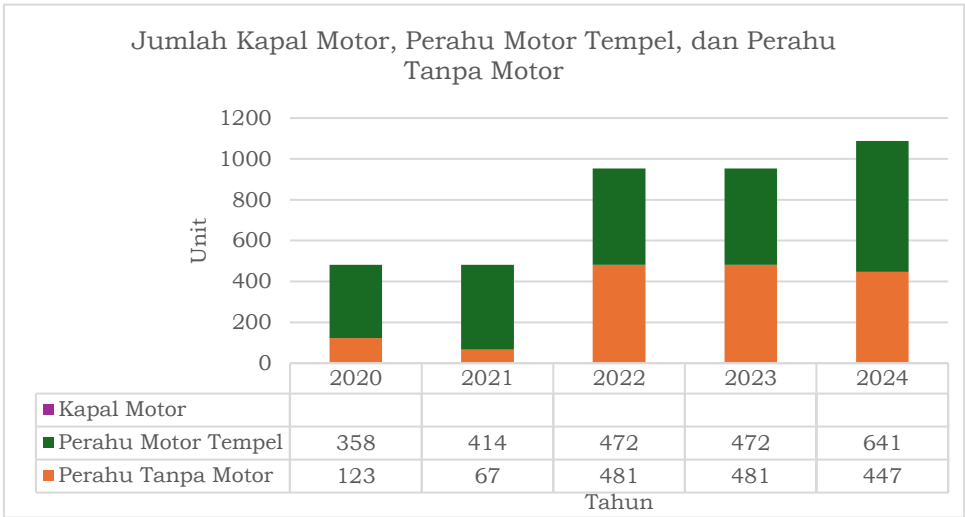
Tabel 2. 97
Jumlah Kapal di Kota Denpasar Tahun 2019-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perahu Tanpa Motor	Unit	123	67	481	481	447
Perahu Motor Tempel	Unit	358	414	472	472	641

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kapal Motor	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Kapal	Unit	481	481	953	953	1088

Sumber: BPS Kota Denpasar 2010-2022 (diolah), 2023 dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, 2025

Jenis kapal terbagi menjadi tiga, yaitu perahu tanpa motor, perahu motor tempel, dan kapal motor. Jumlah perahu tanpa motor di Kota Denpasar dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami fluktuasi hingga menjadi 447 unit pada tahun 2024. Jumlah perahu motor tempel di Kota Denpasar dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan dari tahun hingga menjadi 641 unit pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan skala dan intensitas aktivitas perikanan di Kota Denpasar cukup tinggi, sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola sumber daya perikanan, mendukung nelayan, dan mendorong keberlanjutan sektor perikanan.



Gambar 2. 278
Jumlah Kapal di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Denpasar 2010-2022 (diolah), 2023 dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, 2025

10. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap dan Budidaya

Jumlah rumah tangga perikanan tangkap dan budidaya bertujuan untuk mengukur berapa banyak rumah tangga yang terlibat dalam sektor perikanan, baik melalui penangkapan ikan maupun budidaya ikan di suatu wilayah atau kota tertentu. Indikator ini membantu dalam memahami sejauh mana sektor perikanan menjadi bagian penting dari kehidupan rumah tangga di suatu area.

Tabel 2. 98
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap	RT	604	601	604	604	610
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya	RT	48	48	54	77	77
Total Rumah Tangga Perikanan	RT	652	649	658	681	687

Sumber: BPS Kota Denpasar 2015-2018 (diolah), 2023 dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, 2024

Jumlah rumah tangga perikanan tangkap dan budidaya di Kota Denpasar mengalami fluktuasi selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024. Total rumah tangga perikanan tertinggi terdapat pada tahun 2024 sebanyak 687 rumah tangga. Hal ini menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian dan mata pencaharian masyarakat di Kota Denpasar, sehingga pemerintah daerah dan dinas terkait dapat merencanakan kebijakan dan program yang mendukung dan mempromosikan pertumbuhan sektor perikanan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga yang terlibat dalam sektor tersebut.

4) Fokus Layanan Urusan Penunjang

A) Perencanaan Pembangunan

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen strategis yang merumuskan visi, misi, dan arah pembangunan suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu yang panjang, mencakup periode 20 tahun ke depan. RPJPD merupakan panduan bagi pemerintah daerah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan proyek pembangunan yang bertujuan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Dalam RPJPD, berbagai aspek pembangunan seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan infrastruktur diintegrasikan secara komprehensif. Dokumen ini memiliki peran strategis dalam menciptakan perkembangan yang berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mengarahkan pertumbuhan dan transformasi wilayah. RPJPD Kota Denpasar disusun untuk periode tahun 2005 hingga tahun 2025 kemudian tahun 2025-2045 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melalui proses perencanaan, analisis data, serta pemetaan tantangan dan peluang yang dihadapi Kota Denpasar. Selain itu, ketersediaan dokumen ini juga diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah dalam membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi penduduknya sesuai fungsi substantifnya.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah sebuah dokumen perencanaan strategis yang menetapkan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu menengah, mencakup 5 tahun ke depan. RPJMD memiliki peran kunci dalam membimbing perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, serta proyek-proyek pembangunan di tingkat daerah, dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah tersebut setiap 5 tahun dan berpedoman terhadap RPJPD. Dengan adanya dokumen RPJMD tersebut diharapkan konsistensi arah pembangunan menjadi lebih terjaga secara berkelanjutan, sehingga pencapaian visi dan misi lebih optimal. Kota Denpasar telah memiliki RPJMD untuk periode 2021-2026, periode 2016-2021, periode 2011-2016, dan periode 2006-2011 yang berpedoman pada RPJPD Kota Denpasar 2005-2025. Ketersediaan RPJMD juga dapat berperan sebagai alat pengukur dan evaluasi untuk memantau kemajuan dan hasil pembangunan dalam jangka menengah di suatu daerah.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah salah satu instrumen perencanaan yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan di tingkat daerah, baik itu kabupaten, kota, maupun provinsi. RKPD merupakan dokumen perencanaan yang merinci program-program dan proyek-proyek yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran tertentu. Dokumen ini mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan infrastruktur. RKPD disusun berdasarkan arahan dan prioritas pembangunan yang telah diatur dalam dokumen perencanaan yang lebih besar, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Perda. Dokumen RKPD mencantumkan rincian anggaran, sumber pendanaan, target, dan indikator pencapaian untuk setiap program dan proyek yang direncanakan. Hal ini membantu pemerintah daerah dalam melakukan penganggaran yang tepat, mengukur kemajuan pembangunan, dan memastikan bahwa program dan proyek sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan. Kota Denpasar telah memiliki dokumen RKPD dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Ketersediaan dokumen RKPD tersebut merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap SKPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan mewujudkan visi dan misi yang telah tertulis.

4. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah sebuah dokumen perencanaan yang penting dalam mengatur penggunaan lahan dan tata ruang suatu wilayah atau daerah. Dokumen ini memiliki peran kunci dalam mengarahkan pembangunan, pertumbuhan kota, dan pengelolaan sumber daya alam dalam konteks pemanfaatan wilayah yang berkelanjutan. RTRW merinci bagaimana wilayah suatu daerah akan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti permukiman, pertanian, industri, transportasi, konservasi alam, dan lain sebagainya. Dokumen ini memperhitungkan perkembangan populasi, pertumbuhan ekonomi, serta berbagai aspek lingkungan dan sosial untuk menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan dalam penggunaan lahan. Proses penyusunan RTRW biasanya melibatkan pemerintah daerah, lembaga perencanaan, ahli tata ruang, dan melibatkan partisipasi publik dalam menentukan visi pembangunan dan penggunaan lahan yang diinginkan oleh masyarakat. RTRW dapat mencakup berbagai skala, mulai dari tingkat nasional, regional, hingga kota, yang berlaku selama 20 tahun. Kota Denpasar telah memiliki dokumen RTRW yang berlaku dari tahun 2021 hingga tahun 2041. Ketersediaan dokumen RTRW merupakan acuan untuk penggunaan lahan yang lebih terarah, menghindari konflik penggunaan lahan, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, RTRW juga membantu dalam memitigasi dampak perubahan iklim dan melindungi kawasan-kawasan yang memiliki nilai konservasi alam dan budaya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021.

5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah prinsip penting dalam perencanaan pembangunan di tingkat pemerintahan daerah. Konsistensi antara RPJMD dan RKPD menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa rencana pembangunan yang telah disusun pada tingkat yang lebih tinggi (RPJMD) benar-benar terwujud dalam aksi yang dilakukan pada tahun tertentu (RKPD). Dengan kata lain, program-program pembangunan tahunan yang dijalankan melalui RKPD harus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dengan mempertahankan konsistensi ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa upaya pembangunan di tingkat tahunan sesuai dengan strategi dan prioritas yang telah ditentukan dalam rencana jangka menengah. Konsistensi ini juga memungkinkan untuk mengukur kemajuan dan hasil yang dicapai dari tahun ke tahun dan memastikan bahwa sumber daya dan anggaran digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan pembangunan jangka menengah. Hal itu mengingat program di RPJMD merupakan prediksi dalam jangka waktu yang lebih panjang, sedangkan

merencanakan RKPD untuk tahun depan bersifat lebih eksplisit dan operasional dengan didukung oleh data yang nyata.

Capaian penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD pada Kota Denpasar telah mencapai target yang ditentukan yaitu dengan nilai 100% untuk tahun 2020-2024. Hal ini menandakan RPJMD diintegrasikan dengan baik ke dalam RKPD, sehingga diharapkan dapat membantu menciptakan keberlanjutan dan keterpaduan dalam perencanaan pembangunan daerah, yang akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Konsistensi Program RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah prinsip penting dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. APBD adalah anggaran tahunan yang mengatur sumber daya keuangan yang akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek yang telah disusun dalam RKPD. Konsistensi antara RKPD dan APBD sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dalam RKPD dapat terealisasi dengan memadai. Hal ini berarti alokasi anggaran harus sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD di Kota Denpasar selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 konsisten berada pada angka 100 persen. Hal ini menandakan konsistensi antara RKPD dan APBD dijaga dengan baik, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya dan anggaran digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Hal ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan di tingkat daerah.

7. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Kesesuaian antara rencana pembangunan dan RTRW sangat penting karena menciptakan koordinasi dan konsistensi dalam pengelolaan wilayah. Kesesuaian ini dihitung dari persentase program/kegiatan pembangunan dibagi pola dan struktur ruang dokumen RTRW.

Capaian kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di Kota Denpasar selama rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2022 konsisten berada pada angka 100 persen. Hal ini menandakan bahwa 62 program/kegiatan pembangunan terintegrasi dengan rencana pola dan struktur ruang yang terdapat di dalam RTRW Kota Denpasar 2011-2031. Hal tersebut menunjukkan terjaganya kesesuaian antara rencana pembangunan dengan RTRW sebagai langkah penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang terorganisir dan sejalan dengan prinsip-prinsip perencanaan tata ruang.

8. Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah bertanggung jawab dan transparan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, serta dapat mempertanggungjawabkan hasil-hasil kinerja mereka kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Konsep ini mendasari prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2. 99
Capaian SAKIP Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
Target	Nilai	A	A	BB	BB	BB

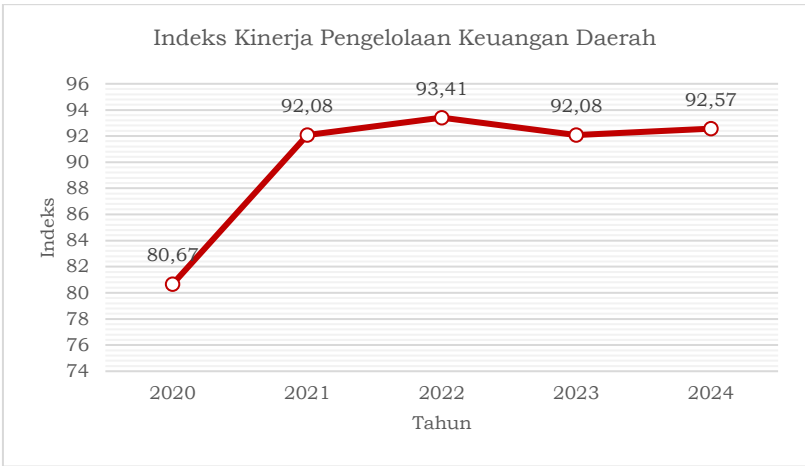
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023

Berdasarkan data di atas, capaian SAKIP Kota Denpasar selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 memiliki capaian yang konstan, meskipun belum memenuhi target level capaian. Sejak tahun 2022 hingga tahun 2024, capaian SAKIP Kota Denpasar berada di level BB. Dengan demikian, diharapkan capaian SAKIP Kota Denpasar dapat meningkat menjadi level A.

B) Keuangan

1. Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada periode tertentu.

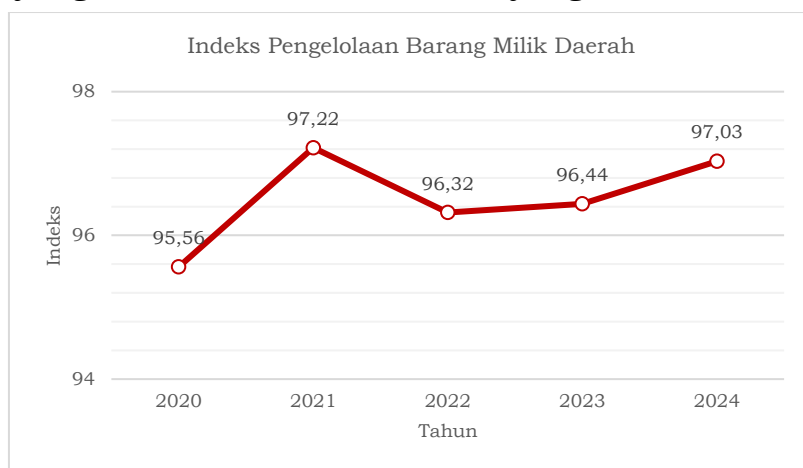


Gambar 2. 279
Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar 2020-2024
Sumber: Hasil Capaian Pembangunan Kota Denpasar 2020-2024, 2025

Kota Denpasar memiliki IKPD yang cenderung fluktuatif dengan tren meningkat di tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, IKPD Kota Denpasar menunjukan di angka 80,67 dan menjadi 92,57 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukan kualitas tata kelola keuangan oleh pemerintah Kota Denpasar mengalami peningkatan.

2. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu komponen penilaian dari reformasi birokrasi. Indikator ini mengukur keberhasilan dan mengevaluasi tata kelola aset daerah dalam mewujudkan pengelolaan yang akuntabel dan produktif, patuh pada peraturan, pengawasan yang efektif, serta administrasi yang handal.



Gambar 2. 280
Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Denpasar 2020-2024
Sumber: Hasil Capaian Pembangunan Kota Denpasar 2020-2024, 2025

Pada Kota Denpasar, indeks tersebut cenderung mengalami kondisi fluktuatif dengan tren meningkat di tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Denpasar memiliki nilai 95,56 kemudian mengalami kenaikan di tahun 2021 sekaligus menjadi nilai tertinggi dengan nilai 97,22. Indeks tersebut kemudian enurun menjadi 96,32 di tahun 2022 dan kemudian mengalami peningkatan di tahun 2024 dengan nilai 97,03.

3. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan merupakan sebuah penilaian yang sangat penting dalam menilai transparansi, akuntabilitas, dan kesehatan keuangan pemerintah daerah, seperti Kota Denpasar. Opini BPK mencerminkan sejauh mana laporan keuangan pemerintah tersebut telah mematuhi standar akuntansi dan tata kelola yang baik. Berdasarkan standar audit, terdapat empat jenis opini sesuai tingkat kewajarannya yang terbagi atas wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Berdasarkan kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, terdapat konsistensi dalam pemberian opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) oleh BPK. Opini WTP adalah opini tertinggi yang dapat diberikan oleh BPK, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan Kota Denpasar dinilai sangat baik dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Terus berlanjutnya opini WTP selama bertahun-tahun merupakan indikator positif bahwa tata kelola keuangan di Kota Denpasar

berada pada tingkat yang sangat baik dengan akuntabilitas yang maksimal, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Capaian predikat ini dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 100

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Denpasar Tahun 2020-2024

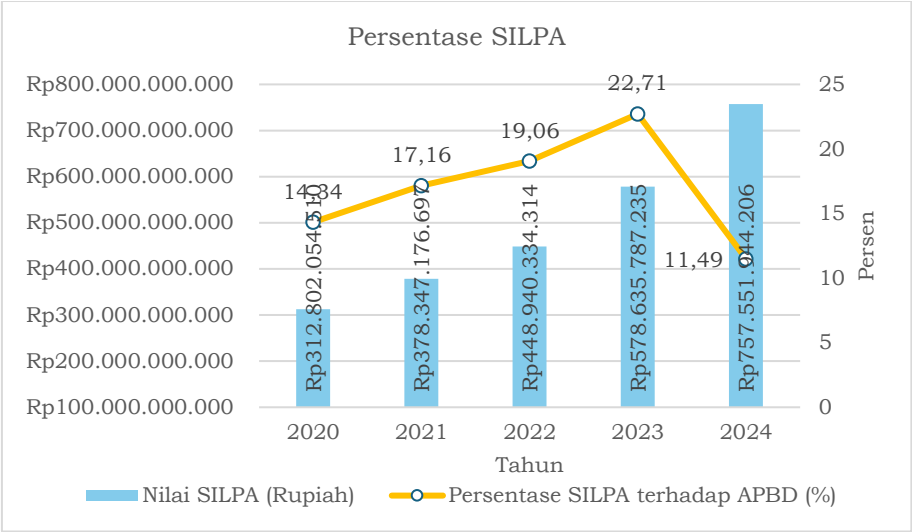
Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, 2025

4. Persentase SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, atau yang biasa disebut dengan SILPA, adalah salah satu indikator yang mencerminkan kesehatan keuangan daerah. SILPA menggambarkan selisih positif antara pendapatan dan belanja yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). SILPA meliputi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Data persentase SILPA terhadap APBD Kota Denpasar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi yang signifikan, dengan puncaknya mencapai 22,71% pada tahun 2023 dan terendah sebesar 11,49% pada tahun 2024 Sementara itu, nilai SILPA tertinggi berada di tahun 2024 dengan nilai RP757.661.944.206.

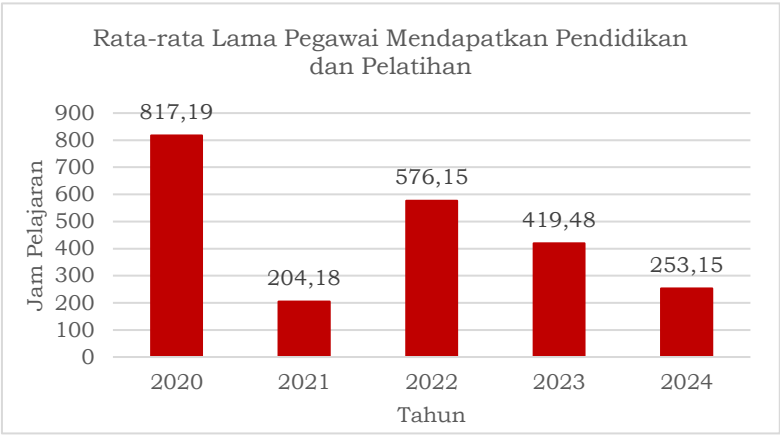
Nilai SILPA Kota Denpasar meningkat dari sekitar 237 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi lebih dari 757 miliar rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam mengelola anggaran daerah dengan efisien, serta potensi untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pembangunan dan proyek-proyek penting lainnya. Ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga keseimbangan anggaran yang sehat dan berkelanjutan, sehingga mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah tersebut. Meskipun demikian, nilai SILPA yang terus meningkat juga menandakan adanya penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran dan realisasi penggunaan dana yang tidak maksimal. Penjelasan yang dimaksud dirincikan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 2. 281
Grafik Persentase SILPA Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar (diolah), 2025

C) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
1. Kompetensi Kepegawaian Berdasarkan Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Bahasan kompetensi kepegawaian dalam konteks pengembangan sumber daya manusia menjadi penting dalam memahami berapa lama pegawai dalam suatu organisasi mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang disimbolkan dengan JP (jam pelajaran) mengalami fluktuasi dengan angka yang sangat variatif. Rata-rata lama pegawai dalam mendapat pendidikan dan pelatihan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 817,19 JP. Meski demikian, pada tahun 2021, terlihat penurunan signifikan menjadi hanya 204,18 jam. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penundaan maupun pembatalan kegiatan peningkatan kompetensi.



Gambar 2. 282
Grafik Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Denpasar, 2025

2. Kompetensi ASN

a) Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan formal merupakan komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk dalam sektor kepegawaian berupa kegiatan diklat teknis atau diklat yang diikuti oleh pegawai yang berkaitan dengan fungsi teknis seperti diklat perencanaan, diklat auditor, diklat PPNS, dan sebagainya.

Dalam periode tahun 2020 hingga 2024 di Kota Denpasar, terlihat bahwa persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat. Capaian terendah terdapat pada tahun 2022 dengan angka 0,63%. Sedangkan capaian tertinggi terdapat pada tahun 2024 yang meningkat secara signifikan menjadi 79,23%. Meski demikian, target yang diharapkan adalah ASN dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan formal secara keseluruhan atau mencapai angka 100%. Nilai yang rendah akan memengaruhi kualitas dan tingkat profesionalitas ASN di Kota Denpasar.



Gambar 2. 283

Grafik Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

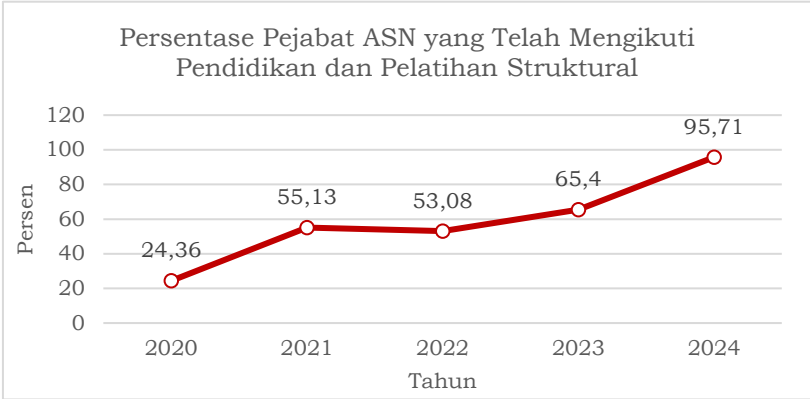
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Denpasar, 2025

b) Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Pendidikan dan pelatihan struktural yang diterima oleh pejabat ASN memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat secara struktural. Hal ini berperan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pada masing-masing instansi perangkat daerah. Persentase ini didapatkan dari perbandingan jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural dan jumlah total jabatan.

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural bersifat fluktuatif dengan angka terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 24,36%. Sementara itu, capaian tertinggi sebesar 95,71% terjadi pada tahun 2024. Nilai capaian ini selama kurun waktu tersebut belum mencapai target capaian di Kota Denpasar sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan usia yang diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan struktural, sedangkan pejabat pensiun dan promosi berjumlah lebih besar

dibandingkan pejabat struktural yang mengikuti diklat. Data yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.

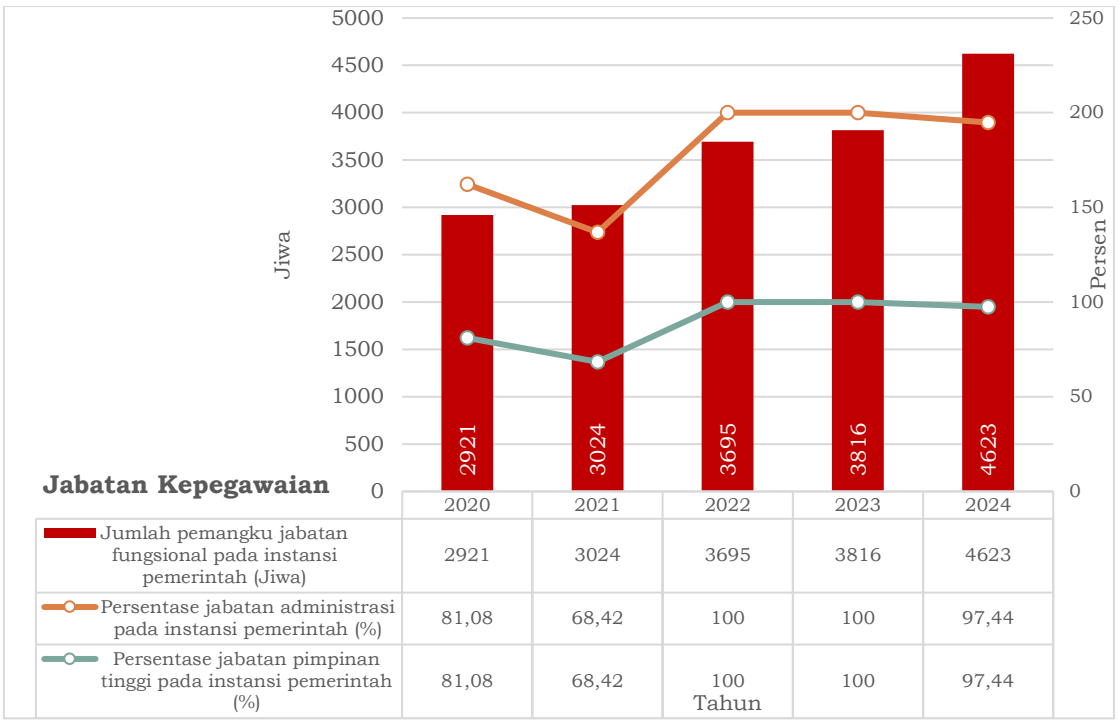


Gambar 2. 284
Grafik Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kota Denpasar Tahun 2020--2024
Sumber Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Denpasar, 2025

3. Jabatan Kepegawaian

Dalam upaya menjalankan fungsi pemerintahan dengan efektif, tata kelola kepegawaian menjadi elemen penting yang harus diperhatikan salah satunya dalam hal jabatan kepegawaian. Jabatan kepegawaian terbagi menjadi jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi pada instansi pemerintah, dan pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, persentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah bersifat fluktuatif, dengan nilai terendah pada tahun 2021 sebesar 68,42% dan tertinggi pada 2022 dan 2023, di mana capaiannya sudah ideal yaitu 100%. Sementara itu, persentase jabatan administrasi, mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Persentase tertinggi jabatan administrasi adalah 99,49% persen yang terjadi pada tahun 2023. Di sisi lain, jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah juga mengalami fluktuasi, dengan titik tertinggi mencapai 4.623 jiwa pada tahun 2024.



Gambar 2. 285
Grafik Jabatan Kepegawaian di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Denpasar, 2025

D) Penelitian dan Pengembangan

Pengembangan inovasi dan kemampuan penelitian dan pengembangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Persentase implementasi rencana kelitbangan sudah mencapai nilai puncak sebesar 85,71% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan upaya dalam menerapkan strategi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, hasil kelitbangan juga dimanfaatkan dengan baik, terutama pada tahun 2021 dengan tingkat pemanfaatan mencapai 100%, meskipun terdapat fluktuasi pada tahun-tahun sebelum dan setelahnya. Kota Denpasar juga berhasil dalam memfasilitasi penetapan inovasi daerah dan mengimplementasikan inovasi daerah dengan capaian 100% dari 2020 hingga tahun 2023.

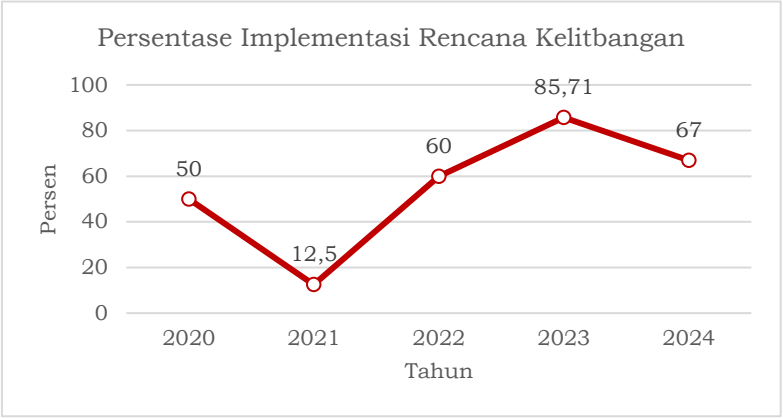
Tabel 2. 101
Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	50,00	12,50	60,00	85,71	67
Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kelitbangan	%	90,24	100,00	78,13	85,19	90,91
Persentase fasilitasi penetapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar, 2025

Implementasi kelitbangan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan manfaat dalam berjalannya sistem pemerintahan. Implementasi rencana kelitbangan dalam kurun waktu 2020-2024 belum mampu mencapai nilai 100% yang memiliki arti bahwa belum seluruh rencana terimplementasi. Selain itu, ditemukan bahwa pemanfaatan rekomendasi hasil kelitbangan memiliki fluktuasi dengan sebagian besar

capaian belum mencapai 100% atau hasil kelitbangan belum dimanfaatkan dengan sempurna. Dinamika peningkatan implementasi rencana kelitbangan dapat dilihat berdasarkan grafik di bawah ini.



Gambar 2. 286
Grafik Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar, 2025

E) Pengawasan

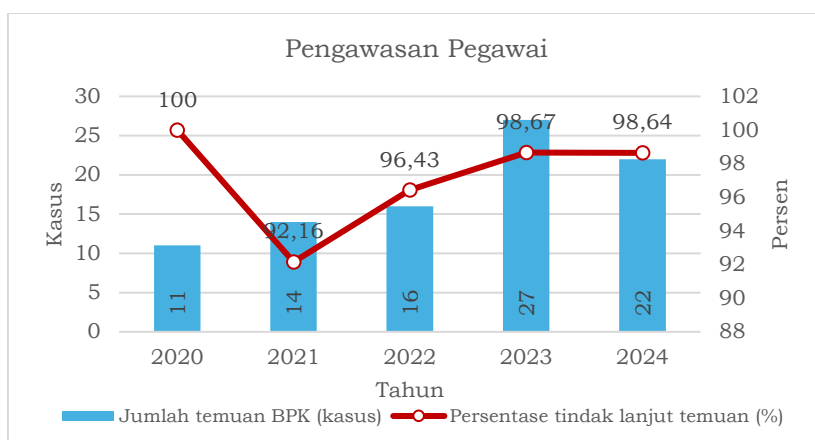
Pengawasan yang efektif adalah unsur penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah. Data pengawasan di Kota Denpasar mencerminkan tingkat kinerja yang kuat dalam menindaklanjuti temuan, dengan persentase yang tinggi, mencapai 100% pada tahun 2020. Pada tahun selanjutnya terjadi fluktuasi yang cenderung menurun dan mencapai nilai terendah pada tahun 2021 sebesar 92,16%. Meski demikian, persentase tindak lanjut temuan menunjukkan persentase tindak lanjut per tahun, bukan akumulasi. Realisasi data bisa berubah apabila temuan pada tahun-tahun sebelumnya ditindaklanjuti pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2. 102
Persentase Hasil Temuan Bidang Pengawasan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tindak lanjut temuan	%	100	92,16	96,43	98,67	98,64
Persentase pelanggaran pegawai	jiwa	13	6	5	30	-
Jumlah temuan BPK	Kasus	11	14	16	27	22

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2012-2033 dan Inspektorat Kota Denpasar, 2024

Hasil data pengawasan ini menunjukkan masih adanya pegawai yang melakukan pelanggaran dan temuan kasus serta penanganan yang belum dilakukan secara konsisten. Salah satunya dapat dilihat dengan peningkatan temuan kasus pada tahun 2024 yang mencapai 22 kasus dengan persentase tindak lanjut temuan 98,64%. Perbandingan temuan kasus dengan tindak lanjut temuan dapat dibandingkan dengan grafik di bawah ini.



Gambar 2. 287
Grafik Persentase Hasil Temuan Bidang Pengawasan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024 dan Inspektorat Kota Denpasar, 2025

F) Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan DPRD) memiliki peran sentral dalam mendukung kinerja wakil rakyat di DPRD Kota Denpasar. Dalam kerangka tugasnya yang melibatkan perencanaan, administrasi, dan pengaturan agenda anggota DPRD, Setwan DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kesekretariatan DPRD. Integrasi program-program kerja DPRD dengan dokumen RPJMD dan RKPD menjadi suatu tujuan penting untuk meningkatkan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian, program-program DPRD dapat terhindar dari tumpang tindih dengan program-program pemerintah daerah, serta mendukung efisiensi penggunaan dana. Integrasi pada setiap dokumen perencanaan ini diperlukan dalam memadukan perencanaan yang dikerjakan bersama sehingga dapat mencapai visi pembangunan yang tepat serta menciptakan kerangka kerja yang lebih solid, transparan, dan efisien.

Pengintegrasian program-program DPRD dalam dokumen perencanaan dan anggaran Setwan DPRD adalah langkah yang cerdas untuk memastikan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas legislasi, pembentukan peraturan daerah (Perda), dan fungsi anggaran. Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa program-program kerja DPRD telah tersusun, terintegrasi, dan terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan dan anggaran Setwan DPRD selama tahun 2020-2024. Rencana kerja dan kelengkapan selalu tersedia setiap tahunnya serta program kerja DPRD telah terintegrasi dengan dokumen lainnya seperti RPJM, RKPD, dan penganggaran daerah. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tugas-tugas legislatif dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Denpasar.

Tabel 2. 103
Kegiatan Sekretariat Dewan di Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

2.1.5 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Capaian kegiatan pemerintah Kota Denpasar menjadi lebih terukur dengan adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dengan adanya SPM ini, kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah menjadi lebih terukur yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 (3) dan Pasal 18 (2) terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memprioritaskan 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Adapun 6 Pelayanan Dasar dimaksud yaitu:

1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan SPM bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Bidang Sosial

Berdasarkan SPM bidang Sosial sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

3. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. Bidang Kesehatan

Berdasarkan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

5. Bidang Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Secara keseluruhan target SPM untuk Bidang Pendidikan telah mencapai standar.

6. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan SPM Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berikut adalah capaian SPM Kota Denpasar untuk tahun 2019-2023.

1. Bidang Pendidikan

Tabel 2. 104
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Bidang Urusan Pendidikan							
1.1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Persen	100	99,93	99,40	99,60	99,73
1.2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	98,31	98,66	95,96	96,49
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100	100	62,19	96	99,73

Sumber: Buku SPM Kota Denpasar 2020 dan 2021; RKPD Kota Denpasar Tahun 2023

2. Bidang Kesehatan

Tabel 2. 105
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
2	Bidang Urusan Kesehatan							
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	99,7	96,7	95,65	100	100
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	98,7	98,25	100	100
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	96	96	63,78	100	100
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	49,48	96,15	100	100
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	15,5	88,86	100	100
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	37,9	63,50	87,26	100	100
2.8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	15,54	8,8	52,75	100	100
2.9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang	Persen	44,21	50,35	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
		mendapatkan layanan kesehatan						
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	18,6	45,1	38,16	100	100
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	85	93,18	100	100	100
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	125,08	100	86,99	100	100

Sumber: Buku SPM Kota Denpasar 2020 dan 2021; RKPD Kota Denpasar Tahun 2023

3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2. 106
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum							
3.1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	54,98	54,41	52,90	95	100
3.2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	45,8	6,51	8,61	99,6	100

Sumber: Buku SPM Kota Denpasar 2020 dan 2021; RKPD Kota Denpasar Tahun 2023

4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2. 107
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat							
4.1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	-	100	100	100
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	-	-	100	100	Tidak Ada Bencana

Sumber: Buku SPM Kota Denpasar 2020 dan 2021; RKPD Kota Denpasar Tahun 2023

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. 108
Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
5	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Persen	84,01	100	100	100	100
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	0	100	96	100
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	Persen	100	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
		kesiapsiagaan terhadap bencana						
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100
5.5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	98,89	100

Sumber: Buku SPM Kota Denpasar 2020 dan 2021; RKPD Kota Denpasar Tahun 2023

6. Bidang Sosial

Tabel 2. 109
Capaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
6	Bidang Urusan Sosial							
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	97,33	97,33
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	92	92
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	92	92
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	-	100	94,67	94,67

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	100	88	88

Sumber: Buku SPM Kota Denpasar 2020 dan 2021; RKPD Kota Denpasar Tahun 2023

2.1.6 KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR

Kerja sama daerah merupakan strategi yang dilakukan antara daerah dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan mengatasi permasalahan suatu wilayah. Kerja sama ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam mencapai keberhasilan dalam kerja sama, diperlukan komitmen dari semua pihak, perencanaan yang matang, serta regulasi yang mendukung.

Dalam upaya mempercepat dan meningkatkan pembangunan, Kota Denpasar menjadi kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain pihak antar daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, maupun lembaga internasional yang mencakup sektor strategis yaitu infrastruktur, ekonomi, pariwisata, lingkungan, serta pelayanan publik. Bentuk kerja sama antar daerah oleh Kota Denpasar antara lain:

Tabel 2. 110
Daftar Kerja Sama Pemerintah Kota Denpasar

No	Pihak Pertama	Pihak Kedua	Bentuk Kerja Sama
1	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota Mossel Bay, Afrika Selatan	Pembentukan <i>Sister City</i> dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan penyediaan layanan publik dalam bidang:
2	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota Darwin, Australia	Budaya dan promosi pariwisata Pengembangan ekonomi kreatif Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
3	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kabupaten Gianyar	Kerja sama dengan fokus utama pada pariwisata (pemberdayaan ekonomi lokal) dan budaya (pelestarian budaya).
4	Pemerintah Provinsi Bali	Pemerintah Kabupaten Badung	Kerja sama Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Penet.
5		Pemerintah Kota Denpasar	
6	Pemerintah Kota Denpasar	PT. Pelindo Benoa	Kerja sama pengembangan pemanfaatan area kawasan Benoa untuk tujuan pariwisata dan perekonomian untuk mendukung Proyek Strategis Nasional.
7	Pemerintah Kota Denpasar	PT. Reciki Mantap Jaya	Kerja sama Pengelolaan Sampah melalui TPST dengan memanfaatkan aset Pemerintah Kota Denpasar.
8	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota Mossel Bay, Afrika Selatan	<i>Sister City</i> , meningkatkan penyediaan layanan publik, pengembangan ekonomi kreatif, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
9	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota Darwin	Promosi pariwisata dan budaya, pengembangan ekonomi kreatif, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
10	Pemerintah Kota Denpasar	PT Pelindo	Pengembangan Tanjung Benoa
11	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali	Kerjasama Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Penet
12	Pemerintah Kota Denpasar	PT Reciki Mantap Jaya	Pengelolaan Sampah
13	Pemerintah Kota Denpasar	BPJS Ketenagakerjaan	Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Denpasar
14	Pemerintah Kota Denpasar	Yayasan Sang Tunas	Pelatihan dan Pembinaan Pelaksanaan Pembelajaran serta Penerapan Komunikasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Taman Kanak-Kanak di Kota Denpasar
15	Pemerintah Kota Denpasar	Yayasan Dinamika Edukasi Dasar	Merdeka Belajar: Eksploratif, Kreatif, Integral Penguatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Guru Kelas Sekolah Dasar dengan Konsep Eksploratif, Kreatif, Integral (EKI)

No	Pihak Pertama	Pihak Kedua	Bentuk Kerja Sama
16	Pemerintah Kota Denpasar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak
17	Pemerintah Kota Denpasar	Institut Desain dan Bisnis Bali	Kerja Sama Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
18	Pemerintah Kota Denpasar	New Media College	Kerja Sama Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
19	Pemerintah Kota Denpasar	STMIK Primakara	Kerja Sama Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi
20	Pemerintah Kota Denpasar	Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A	Penyediaan dan Pemanfaatan Ruangan Dalam Gedung dan Sarana Prasarana / Fasilitas Pada Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar
21	Pemerintah Kota Denpasar	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar	Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Denpasar Tahun 2021-2026
22	Pemerintah Kota Denpasar	Kejaksaan Negeri Denpasar	Kerja Sama Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
23	Pemerintah Kota Denpasar	PT Telkom Indonesia	Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pernerdayaan Umkm Kota Denpasar
24	Pemerintah Kota Denpasar	Ombudsman Republik Indonesia	Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
25	Pemerintah Kota Denpasar	Akademi Kesehatan Bintang Persada	Kerja Sama Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi
26	Pemerintah Kota Denpasar	Yayasan Sprit Paramacitta	Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Orang Dengan Hiv/Aids (Odha) Di Kota Denpasar
27	Pemerintah Kota Denpasar	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar	Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Apbd Tahun Anggaran 2022
28	Pemerintah Kota Denpasar	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026
29	Pemerintah Kota Denpasar	STIMIK STIKOM Indonesia (STIKI)	Kerja Sama Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi
30	Pemerintah Kota Denpasar	PT Genta Internasional Nusantara	Tempat Pengelolaan Sampah Menjadi Renewable Energy Biocoal
31	Pemerintah Kota Denpasar	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar	Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
32	Pemerintah Kota Denpasar	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar	Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Apbd Tahun Anggaran 2021
33	Pemerintah Kota Denpasar	Pengelola Pasar Desa Kota Denpasar	Sinergi Program Pemberdayaan Pasar Rakyat Untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan
34	Pemerintah Kota Denpasar	PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Sinergi Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan Di Kota Denpasar
35	Pemerintah Kota Denpasar	IDI Cabang dan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia Cabang Kota Denpasar	Sinergi Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Di Kota Denpasar
36	Pemerintah Kota Denpasar	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISPOL) Wira Bhakti Denpasar	Kerja Sama Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi
37	Pemerintah Kota Denpasar	Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Bali	Pemanfaatan Bersama Data Dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan

No	Pihak Pertama	Pihak Kedua	Bentuk Kerja Sama
			Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kota Denpasar
38	Pemerintah Kota Denpasar	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Kerja Sama Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Pariwisata Kesehatan
39	Pemerintah Kota Denpasar	Kamar Dagang dan Industri Kota Denpasar	Sinergi Program Penguatan Ekonomi Inklusif Di Kota Denpasar
40	Pemerintah Kota Denpasar	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Denpasar	Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
41	Pemerintah Kota Denpasar	Yayasan Sosial McKisey	Kerjasama Peningkatan Manajemen Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
42	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali	Kerja Sama Sinergi Pembangunan Antar Daerah
43	Pemerintah Kota Denpasar	PT BPR Kita Centradana	Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kota Denpasar
44	Pemerintah Kota Denpasar	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Pengurus Daerah Bali	Dukungan Pencapaian Program Kesehatan Prioritas Menuju Denpasar Kota Sehat
45	Pemerintah Kota Denpasar	Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu	Sinergi Program Penguatan Ekonomi Inklusif Di Kota Denpasar
46	Pemerintah Kota Denpasar	Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Sinergi Integrasi Data Pbb P2 (Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan) Dan Bphtb (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Dengan Data Subjek Dan Objek Bidang Tanah Terdaftar Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar
47	Pemerintah Kota Denpasar	Yayasan Bina Ilmu Bali	Sinergi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
48	Pemerintah Kota Denpasar	PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar	Optimalisasi Program Jaminan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Serta Pegawai Asn Dan Non Asn Pemerintah Kota Denpasar
49	Pemerintah Kota Denpasar	PT Bali Turtle Island Development	Kerjasama Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Pariwisata
50	Pemerintah Kota Denpasar	Yayasan Literasi Anak Indonesia	Peningkatan Budaya Literasi Melalui Pengembangan Perpustakaan Ramah Anak Di Kota Denpasar
51	Pemerintah Kota Denpasar	Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Bali	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kota Denpasar
52	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota Surakarta	Kerja Sama Sinergi Pembangunan Antar Daerah
53	Pemerintah Kota Denpasar	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Penyimpanan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Penyediaan Dan Penggunaan Produk, Jasa Dan Layanan Perbankan
54	Pemerintah Kota Denpasar	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Denpasar	Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
55	Pemerintah Kota Denpasar	Yayasan Kepeng Artha Semesta (KEPENG.IO)	Eksplorasi Dan Adaptasi Teknologi Blockchain Di Kota Denpasar
56	Pemerintah Kota Denpasar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Wilayah 08	Pemanfaatan Fasilitas Jasa, Layanan Perbankan Dan Dukungan Program Smart City
57	Pemerintah Kota Denpasar	PT Indonesia Power Bali PGU	Kerjasama Pengelolaan Kebencanaan Dan Energi Berkelanjutan
58	Pemerintah Kota Denpasar	Universitas Mahasaraswati Denpasar	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
59	Pemerintah Kota Denpasar	Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

No	Pihak Pertama	Pihak Kedua	Bentuk Kerja Sama
60	Pemerintah Kota Denpasar	Pengadilan Agama Denpasar Kelas 1A	Layanan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Para Calon Pengantin Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Denpasar 1a
61	Pemerintah Kota Denpasar	Konsil Kedokteran Indonesia	Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi Dan Data Surat Izin Praktik Dokter Dan Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik Di Kota Denpasar
62	Pemerintah Kota Denpasar	PT Agro Eco Veda	Pelestarian Sumber Daya Alam Berkelanjutan
63	Pemerintah Kota Denpasar	Universitas Bali Internasional	Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi
64	Pemerintah Kota Denpasar	Kementerian Keuangan	Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara Stan Pada Instansi Pemerintah Daerah
65	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali	Distribusi Dan Pemasaran Pangan Serta Pengembangan Potensi Daerah
66	Pemerintah Kota Denpasar	Kementerian Agama Kota Denpasar	Percepatan Penertiban Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Yang Telah Melaksanakan Pencatatan Perkawinan Di Kua Kecamatan Di Kota Denpasar
67	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali	Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah
68	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	Kerja Sama Sinergi Pembangunan Antar Daerah
69	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	Kerja Sama Antar Daerah
70	Pemerintah Kota Denpasar	Universitas Ngurah Rai	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kota Denpasar
71	Pemerintah Kota Denpasar	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
72	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali	Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah
73	Pemerintah Kota Denpasar	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Bali	Pelindungan Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Di Kota Denpasar
74	Pemerintah Kota Denpasar	Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kota Denpasar
75	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota Yogyakarta	Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah
76	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Provinsi Bali	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Ayung Sarbagita Provinsi Bali
77	Pemerintah Kota Denpasar	Politeknik Internasional Bali	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Di Kota Denpasar
78	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali	Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah
79	Pemerintah Kota Denpasar	Yayasan Upaya Indonesia Damai (United in Diversity)	Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Daerah Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /SDGs Di Kota Denpasar
80	Pemerintah Kota Denpasar	PT Tokopedia	Sinergi Program Penguatan Ekonomi Inklusif Di Kota Denpasar
81	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Provinsi Bali	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanu
82	Pemerintah Kota Denpasar	PERUM LKBN	Pemanfaatan Dan Pengembangan Sumber Daya Bersama Melalui Teknologi Digital

No	Pihak Pertama	Pihak Kedua	Bentuk Kerja Sama
83	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kabupaten Klungkung	Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah
84	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Provinsi Bali	Perubahan Atas Kesepakatan Bersama Nomor : 075/02/Kb/B.Pem.Kesra/Iii/2020, Nomor : 415.4/16/Kb/Bks/2020 Tentang Pola Pembangunan Semesta Berencana Provinsi Bali Di Kota Denpasar
85	Pemerintah Kota Denpasar	Ikatan Alumni Universitas Udayana (IKAYANA)	Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Inovasi
86	Pemerintah Kota Denpasar	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar	Kerja Sama Penyiaran Program-Program Pemerintah Kota Denpasar di LPP RRI Denpasar
87	Pemerintah Kota Denpasar	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Denpasar	Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Denpasar
88	Pemerintah Kota Denpasar	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali	Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruangan Dalam Gedung Dan Sarana Prasarana /Fasilitas Pada Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar
89	Pemerintah Kota Denpasar	Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar	Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
90	Pemerintah Kota Denpasar	Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruangan Dalam Gedung Dan Sarana Prasarana /Fasilitas Pada Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar
91	Pemerintah Kota Denpasar	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Denpasar	Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruangan Dalam Gedung Dan Sarana Prasarana /Fasilitas Pada Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar
92	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali	Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah
93	Pemerintah Kota Denpasar	Kepolisian Resor Kota Denpasar	Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruangan Dalam Gedung Dan Sarana Prasarana /Fasilitas Pada Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar
94	Pemerintah Kota Denpasar	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Denpasar
95	Pemerintah Kota Denpasar	Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar	Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruangan Dalam Gedung Dan Sarana Prasarana /Fasilitas Pada Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar
96	Pemerintah Kota Denpasar	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Riset Penerapan Teknologi Pertanian Presisi Dan Produk Inovasi Milik Pt Pupuk Indonesia (Persero)
97	Pemerintah Kota Denpasar	Kementerian Keuangan RI	Penyediaan Fasilitas Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar
98	Pemerintah Kota Denpasar	Yayasan Kerta Praja	Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Hiv-Aids Di Kota Denpasar
99	Pemerintah Kota Denpasar	Universitas Udayana	Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Dan Penguatan Infrastruktur Daerah Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Di Kota Denpasar
100	Pemerintah Kota Denpasar	Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Denpasar
101	Pemerintah Kota Denpasar	Yayasan Tirta Kesar Maha Ugra	Pelestarian Lingkungan Dan Keanekaragaman Hayati Di Kota Denpasar
102	Pemerintah Kota Denpasar	Kementerian Agama Kota Denpasar	Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruangan Dalam Gedung Dan Sarana Prasarana /Fasilitas Pada Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar

No	Pihak Pertama	Pihak Kedua	Bentuk Kerja Sama
103	Pemerintah Kota Denpasar	Yayasan Bali Animal Welfare Association (BAWA)	Pengendalian Penyakit Rabies Di Kota Denpasar
104	Pemerintah Kota Denpasar	Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada	Kerja Sama Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi
105	Pemerintah Kota Denpasar	Ombudsman Republik Indonesia	Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
106	Pemerintah Kota Denpasar	PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Denpasar
107	Pemerintah Kota Denpasar	Badan Informasi Geospasial	Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial Di Kota Denpasar
108	Pemerintah Kota Denpasar	Universitas Warmadewa	Tridarma Perguruan Tinggi
109	Pemerintah Kota Denpasar	Universitas Pendidikan Nasional	Tridarma Perguruan Tinggi
110	Pemerintah Kota Denpasar	Universitas Hindu Indonesia	Tridarma Perguruan Tinggi
111	Pemerintah Kota Denpasar	Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia	Kerja Sama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular
112	Pemerintah Kota Denpasar	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar	Tridarma Perguruan Tinggi Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
113	Pemerintah Kota Denpasar	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Pelindungan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Di Wilayah Kota Denpasar
114	Pemerintah Kota Denpasar	Politeknik Kesehatan Kartini Bali	Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi
115	Pemerintah Kota Denpasar	Kementerian Agama Kota Denpasar	Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Denpasar
116	Pemerintah Kota Denpasar	Kemeterian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Bali	Sinergi Pengoperasian Dan Perawatan Jaringan Peralatan Dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien
117	Pemerintah Kota Denpasar	Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPI)	Pelayanan Ilmu Dan Profesi Psikologi dalam Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Mental Masyarakat Kota Denpasar
118	Pemerintah Kota Denpasar	Yayasan Bali Bersama Bisa	Pelayanan Kesehatan Mental di Kota Denpasar
119	Pemerintah Kota Denpasar	Politeknik Transportasi Darat Bali	Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi
120	Pemerintah Kota Denpasar	Kejaksaan Negeri Denpasar	Kerja Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
121	Pemerintah Kota Denpasar	Indonesia Infrastruktur Initiative	Kerjasama pembuatan DED <i>re-design</i> 5 ruang jalan di Kota Denpasar untuk mengatasi kemacetan dan penanganan keselamatan jalan perkotaan

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

2.1.7 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA DENPASAR

2.1.7.1 Struktur Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kota Denpasar berkedudukan sebagai penjabaran dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi Bali, dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, Program Pembangunan Tahunan Daerah, RDTR kota, dan acuan *sukreta* tata *Palemahan* Desa Adat, yang merupakan bagian dari *awig-awig* Desa Adat di seluruh wilayah kota. Penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman, dan

berkelanjutan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, berbasis budaya dan kota kreatif yang dilandasi Tri Hita Karana.

Berdasarkan RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041, kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Kota Denpasar terdiri atas:

- a. Pemantapan fungsi dan peran kota sebagai Ibukota Provinsi Bali dan kawasan perkotaan inti dari Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. Pengembangan sistem transportasi dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah;
- c. Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota secara merata dan berhierarki;
- d. Peningkatan aksesibilitas yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota;
- e. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota; dan
- f. Pengembangan Kota Kreatif berjati diri budaya Bali.

Sementara itu, rencana struktur ruang Kota Denpasar terdiri atas sistem pusat pelayanan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan.

- a. Sistem pusat pelayanan, terdiri atas:
 - 1) Pusat Pelayanan Kota
 - 2) Sub Pusat Pelayanan Kota
 - 3) Pusat Pelayanan Lingkungan
- b. Sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
 - 1) Sistem jaringan jalan
 - 2) Sistem jaringan kereta api
 - 3) Pelabuhan laut
- c. Sistem jaringan energi, terdiri atas:
 - 1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
 - 2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
- d. Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
 - 1) Jaringan tetap
 - 2) Jaringan bergerak
- e. Sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas:
 - 1) Sistem jaringan irigasi
 - 2) Sistem pengendalian banjir
 - 3) Bangunan sumber daya air
- f. Infrastruktur perkotaan, terdiri atas:
 - 1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 2) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
 - 3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- KAB. BADUNG**

KAB. GIANYAR

KOTA DENPASAR

SELAT BADUNG

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2021 - 2041

PETA STRUKTUR RUANG

SKALA : 1:27.500

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Datum Geoid: Datum Horizontal
Datum Vertikal: Datum WGS 1984
Geoid: EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Batas Administrasi

Struktur Ruang

Sistem Jaringan Energi

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Sanitasi

Infrastruktur Perhubungan

SUMBER DATA DAN TRIANGULASI PETA

1. Badan Geografi dan Informasi Geospasial (BIG) 1:25,000
2. Badan Geografi dan Informasi Geospasial (BIG) 1:50,000
3. Badan Geografi dan Informasi Geospasial (BIG) 1:100,000
4. Badan Geografi dan Informasi Geospasial (BIG) 1:200,000
5. Badan Geografi dan Informasi Geospasial (BIG) 1:500,000

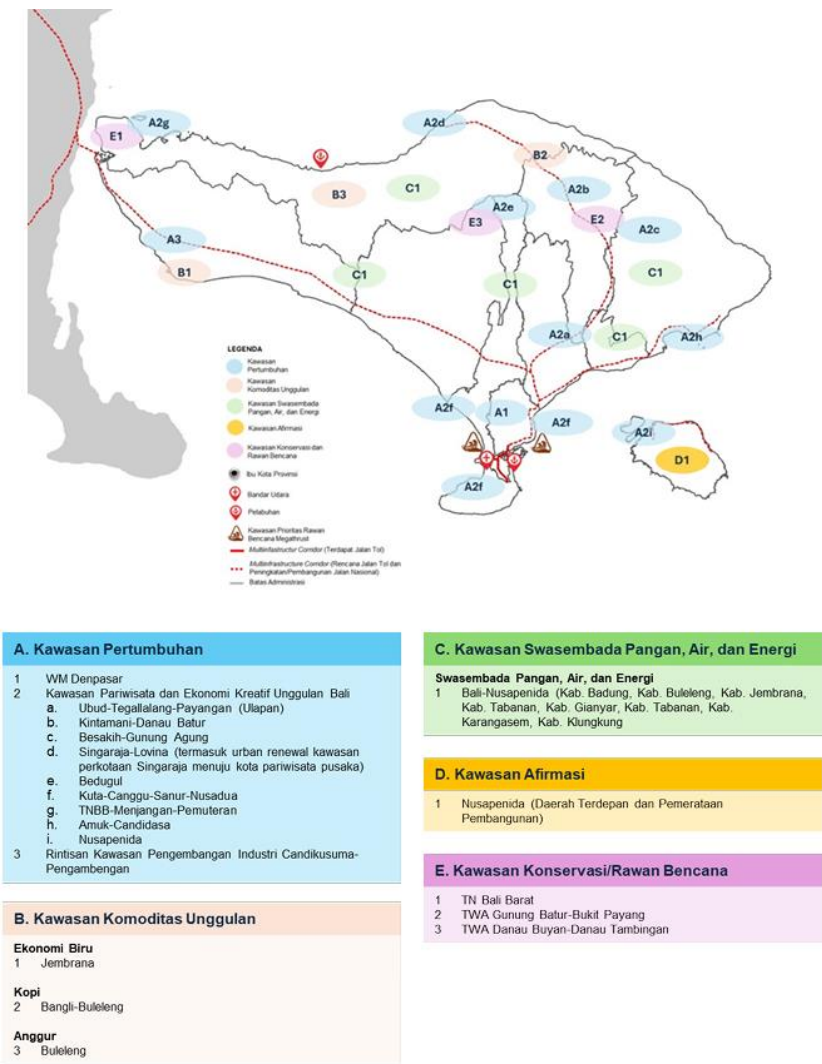
Mengetahui,
WALIKOTA DENPASAR

[Signature]
I GUSTI NGURAH JAYA LEGARA

2-273

2.1.7.2 Arah Pembangunan Infrastruktur Kota Denpasar dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan dokumen RPJMN 2025 – 2029, wilayah Bali-Nusa Tenggara pada tahun 2029 ditargetkan mampu tumbuh sebesar 8,4 persen. Hal tersebut utamanya didorong oleh aktivitas sektor jasa pariwisata melalui penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting dan kawasan pariwisata rintisan, seperti Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena, kawasan pariwisata rintisan di Pulau Sumba, dan Kawasan Pariwisata Ulapan Bali. *Highlight* lokasi prioritas pembangunan tahun 2025 – 2029 Wilayah Bali-Nusa Tenggara (khususnya Provinsi Bali) adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 289
Peta Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Bali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Berdasarkan peta arah pembangunan kewilayahan Provinsi Bali dalam dokumen RPJMN tahun 2025–2029, prioritas pembangunan yang mencakup wilayah Kota Denpasar adalah Kawasan Pertumbuhan. *Highlight* indikasi intervensi yang dilakukan pada Kawasan Pertumbuhan, khususnya dengan lokasi prioritas di Kota Denpasar dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 111
Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Bali (khususnya Kota Denpasar) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi (khusus yang memuat Kota Denpasar)
A1	WM Denpasar Kota Denpasar Kab. Badung Kab. Tabanan Kab. Gianyar	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan penataan WM Denpasar antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Denpasar - Penyusunan <i>masterplan</i> penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Penyusunan <i>metropolitan statistical area</i> • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan WM Denpasar, antara lain pengembangan BRT <i>dan sistem transit</i> • Pembangunan TPST Regional Sarbagita • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Denpasar • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Denpasar • Bali <i>Beach Conservation Project II</i> • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Denpasar (PHTC) • Pembangunan SPAM Regional Sarbagita • Pengembangan <i>World Class Research University</i> berbasis potensi wilayah pada Universitas Udayana, Institut Seni Indonesia Denpasar, dan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa • Pengembangan Pelabuhan Benoa (<i>BMTH Development Area 2</i>) • Pengembangan KEK Sanur • Pengembangan KEK Kura-Kura Bali • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi-Singapadu-Sanur-Benoa • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi-Canggu
A2	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali (Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali) Kota Denpasar Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Bangli Kab. Klungkung Kab. Karangasem	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan 6A Pariwisata pada <i>hotspot</i> pariwisata Bali, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Ubud-Tegallalang-Payangan (Ulapan) - Kintamani-Danau Batur - Besakih-Gunung Agung - Singaraja-Lovina (termasuk <i>urban renewal</i> kawasan perkotaan Singaraja menuju kota pariwisata pusaka) - Bedugul-Kuta-Canggu-Sanur-Nusadua - TNBB-Menjangan-Pemuteran - Amuk-Candidesa - Nusapenida • Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu-Ubud-Gianyar-Bangli-Kintamani-Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara-Singaraja

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi (khusus yang memuat Kota Denpasar)
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Baru/Bali Utara • Pengembangan kawasan pariwisata Uluwatu, termasuk perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Lingkar Uluwatu • Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung • Pengembangan Pelabuhan Gunaksa • Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan • Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Agung

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

2.1.8 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KOTA DENPASAR

A. Perumda Pasar Sewakadarma

Perumda Pasar Sewakadarma merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Denpasar yang berdiri pada 1 Agustus 1994 yang sebelumnya menjadi satu kesatuan dengan Kabupaten Badung sebelum terjadinya pembagian wilayah Badung dan Denpasar. Pendirian Perumda Pasar ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Tingkat II Denpasar. Perumda ini berperan dalam meningkatkan tata kelola pasar dan mendukung perekonomian lokal dan berwawasan budaya. Selain itu, pemerintah Kota Denpasar memberikan perluasan tugas untuk dapat mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan, logistik, perdagangan, dan fasilitas hunian terpadu.



Gambar 2. 290
Gambar Kegiatan Revitalisasi Pasar Suci Denpasar
 Sumber: Media Berita Online, 2025

Perumda Pasar Sewakadarma memiliki fungsi dan tugas pokok dalam membina, mengelola, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang perpasaran Kota Denpasar dengan total cakupan jumlah pasar yaitu 16 pasar tradisional. Dalam hal operasional, Perumda saat ini berfokus pada modernisasi pasar serta penataan pedagang dalam meningkatkan kenyamanan dan efisiensi belanja masyarakat terutama di pasar-pasar tradisional. Dengan hal ini, diharapkan Perumda Pasar Sewakadarma dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi bagi Kota Denpasar.

B. Perumda Bhukti Praja Sewakadarma

Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) yang berdiri pada tahun 2004 yang kemudian disempurnakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2019 merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada jasa dan pengelolaan aset daerah. Perumda Bhukti Praja Sewakadarma menjalankan unit usaha dalam bidang jasa berupa pengelolaan parkir, produksi dan perdagangan umum, serta pengelolaan aset daerah yang layak dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. Selain itu, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma berperan dalam memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.



Gambar 2. 291
Penataan Parkir oleh Juru Parkir BPS di Titik Parkir Kota Denpasar

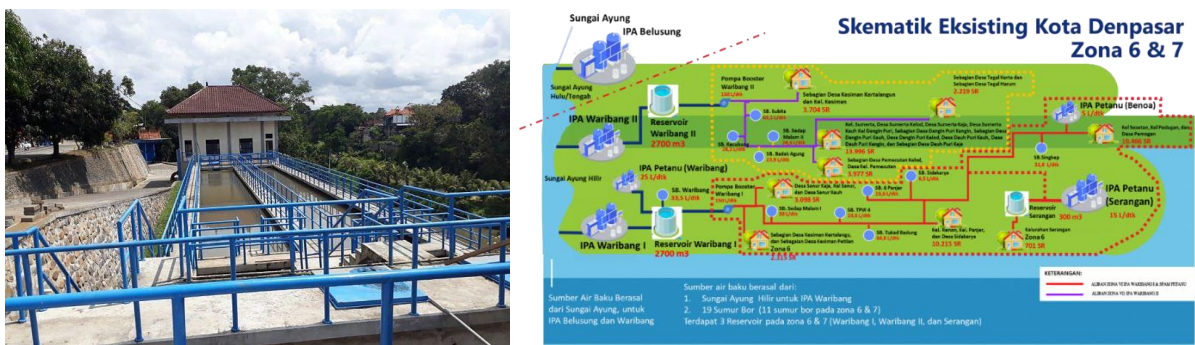
Sumber: Media Berita Online, 2025

Dalam hal ini, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur di Kota Denpasar, salah satunya yaitu dengan Perumda Pasar Sewakadarma terkait penarikan retribusi parkir di pasar tradisional. Pada tahun 2023, terdapat 620 titik parkir yang dikelola oleh Perumda Bhukti Praja Sewakadarma yang mencakup parkir di badan jalan dan pelataran dengan total 985 juru parkir dengan realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 6,65 miliar rupiah. Berbagai inovasi dan pengembangan perusahaan ini yaitu digitalisasi sistem administrasi dan manajemen aset dilakukan untuk transparansi dan optimalisasikan yang berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat, hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola kota yang lebih baik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma

Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdiri pada tahun 1995 dengan landasan hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar No 7 Tahun 2019 yang bergerak di bidang pelayanan air bersih dan merupakan penyedia layanan bersih utama di Kota Denpasar. Perumda ini bertanggung jawab dalam penyediaan, pengelolaan, dan distribusi air bersih untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Denpasar. Oleh karena itu, upaya ini diwujudkan melalui modernisasi infrastruktur,

peningkatan kapasitas produksi, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.



Gambar 2. 292
Pengairan PDAM Sewakadherma
Sumber: Sumber: Media Berita Online, dan Tim Teknis PDAM Sewakadherma 2025

Penyediaan air bersih oleh PDAM pada tahun 2024, tercapat terdapat 91.346 (51% dari total penduduk) pelanggan PDAM dengan kapasitas produksi air tersedia yaitu 1.268 liter per detik dan tingkat kebocoran air 30 persen. Kebutuhan air yang layak merupakan salah satu tantangan pemenuhan kebutuhan di Kota Denpasar. Perumda Tirta Sewakadarma melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan kebocoran air dalam jaringan distribusi. Dalam mewujudkan ketersediaan dan penyediaan air minum yang optimal, bentuk pengelolaan penyediaan air minum juga dapat dilakukan Perumda dengan kerjasama dengan berbagai bidang dan sektor, antara lain yang sedang berjalan saat ini adalah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Badung untuk Penyediaan SPAM Regional Penet dan pengembangan skema KPBU SPAM Denpasar dengan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai pelaksana fasilitas

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sebagai upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dapat dimulai dengan analisis pengelolaan keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meninjau gambaran kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan meninjau beberapa aspek salah satunya adalah dari rencana dan realisasi rencana keuangan tahunan pemerintah daerah berupa tren minimal 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisis ini nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan proyeksi dan alokasi keuangan 5 tahunan yang akan datang.

Gambaran keuangan daerah Kota Denpasar tahun 2020-2024 menjadi data dasar untuk merumuskan rencana pengelolaan keuangan lima tahun ke depan yaitu tahun 2025-2029. Adapun gambaran keuangan daerah yang tertuang dalam dokumen ini meliputi: 1) kinerja keuangan daerah; 2) perkembangan neraca daerah; serta 3) kerangka pendanaan. Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran keuangan daerah yang telah dilakui, sementara perkembangan neraca daerah merupakan gambaran keseimbangan penerimaan dan pengeluaran daerah, dan kerangka pendanaan merupakan rencana pemerintah daerah dalam menyusun program-program pembangunan daerah. Penentuan kerangka pendanaan didasarkan pada beberapa aspek salah satunya adalah arah kebijakan.

2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Kinerja keuangan daerah selama lima tahun terakhir dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Analisis dilakukan pada APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta neraca daerah yang terdiri dari aset dan utang daerah serta ekuitas dana.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki komponen terdiri dari: (1) Pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Maka dari itu, diperlukan analisis terhadap pelaksanaan semua komponen APBD tahun-tahun sebelumnya. Analisis ini ditujukan untuk memperoleh gambaran terkait kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa mendatang, dengan mempertimbangkan segala peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam konteks Kota Denpasar, APBD Kota Denpasar disusun menggunakan pendekatan kinerja yang diarahkan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mengutamakan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Realisasi APBD Kota Denpasar tercatat positif baik dalam pendapatan dan pembiayaan sejak tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan tercatat pada angka 12,95% pada 5 tahun terakhir. Seiras dengan hal tersebut, rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan tercatat positif dengan 33,22% per tahun. Kondisi ini sempat mengalami stagnansi pada tahun 2020-2021 disebabkan karena pandemi yang

mempengaruhi keuangan dan menyebabkan kontraksi pada tahun 2020 dan 2021. Secara lebih detail, rata-rata pertumbuhan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 112
Rata-Rata Pertumbuhan (%) Realisasi APBD Kota Denpasar Tahun 2020–2024

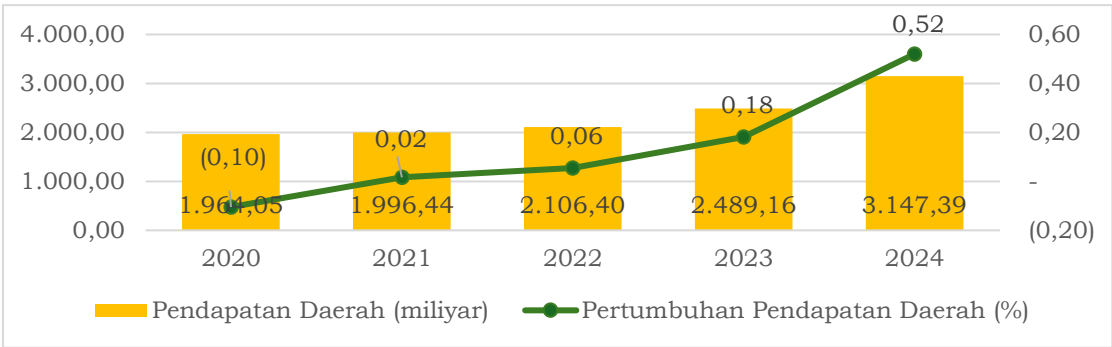
NO	URAIAN	REALISASI TAHUN (Miliar)					%
		2020	2021	2022	2023	2024	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1	PENDAPATAN	1.964,05	1.996,44	2.106,40	2.489,16	3.147,39	12,94%
	A. Pendapatan Asli Daerah	731,26	792,36	888,05	1.198,37	1.668,19	23,65%
	B. Pendapatan Transfer	1.120,46	1.115,07	1.202,73	1.271,50	1.458,04	6,94%
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	112,33	89,00	15,62	19,29	21,15	-17,51%
	JUMLAH PENDAPATAN	1.964,05	1.996,44	2.106,40	2.489,16	3.147,39	12,94%
2	BELANJA	1.884,55	1.925,70	2.024,80	2.323,89	2.866,45	11,36%
	A. Belanja Operasi	1.606,72	1.631,50	1.655,23	1.786,27	2.147,61	7,79%
	B. Belanja Modal	83,15	102,37	198,78	331,86	465,35	56,12%
	C. Belanja Tak Terduga	34,29	30,71	6,97	3,99	2,42	-42,49%
	D. Belanja Transfer	160,40	161,11	163,82	201,76	251,06	12,43%
	JUMLAH BELANJA	1.884,55	1.925,70	2.024,80	2.323,89	2.866,45	11,36%
	SURPLUS/DEFISIT	79,50	70,75	81,59	165,27	280,94	44,22%
3	PEMBIAYAAN	241,55	325,00	389,35	484,52	680,66	29,82%
	A. Penerimaan Pembiayaan	237,42	316,30	378,35	448,94	578,64	25,10%
	B. Pengeluaran Pembiayaan	4,12	8,70	11,00	35,58	102,02	136,91%
	JUMLAH PEMBIAYAAN	241,55	325,00	389,35	484,52	680,66	29,82%
	PEMBIAYAAN NETTO	233,30	307,60	367,35	413,36	476,61	19,77%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	312,80	378,35	448,94	578,64	757,55	24,86%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Audited, diolah, 2025

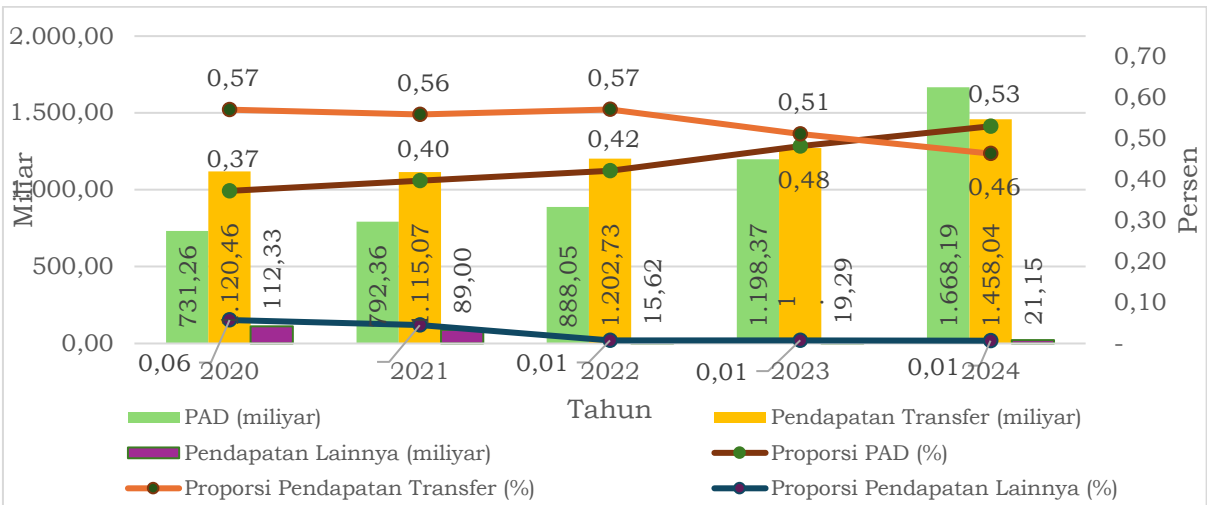
a. **Perkembangan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah merupakan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pendapatan daerah Kota Denpasar cenderung fluktuatif sejak tahun 2020 dengan jumlah tertinggi pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 3.147,89 M. Kenaikan ini dimulai sejak tahun 2021 di mana kebijakan larangan berkegiatan selama masa pandemi Covid-19 telah dicabut, ditinjau dari penurunan sejak tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan pada 2021, meskipun Kota Denpasar bergantung secara penuh pada pariwisata, APBD Kota Denpasar tidak berkontraksi secara signifikan.

Pendapatan daerah Kota Denpasar didominasi bersumber dari pendapatan transfer dengan proporsi rata-rata sekitar 53,47% dengan persentase tertinggi adalah sekitar 57,10% pada tahun 2022. Hal ini menjadi indikasi bahwa Kota Denpasar belum sepenuhnya dapat mandiri secara finansial sehingga perlu ada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pendapatan daerah di masa depan.



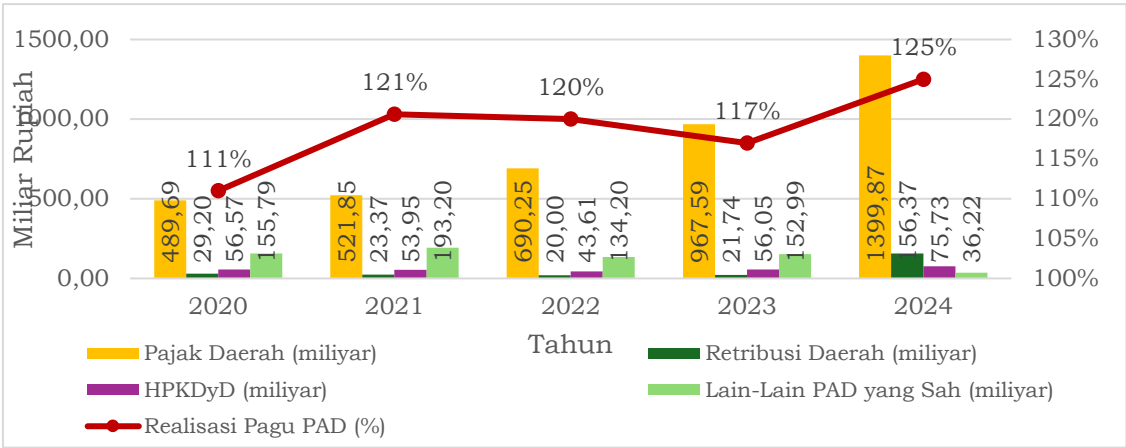
Gambar 2. 293
Jumlah Pendapatan dan Laju Pendapatan Daerah Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah, 2024



Gambar 2. 294
Komponen Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah, 2025

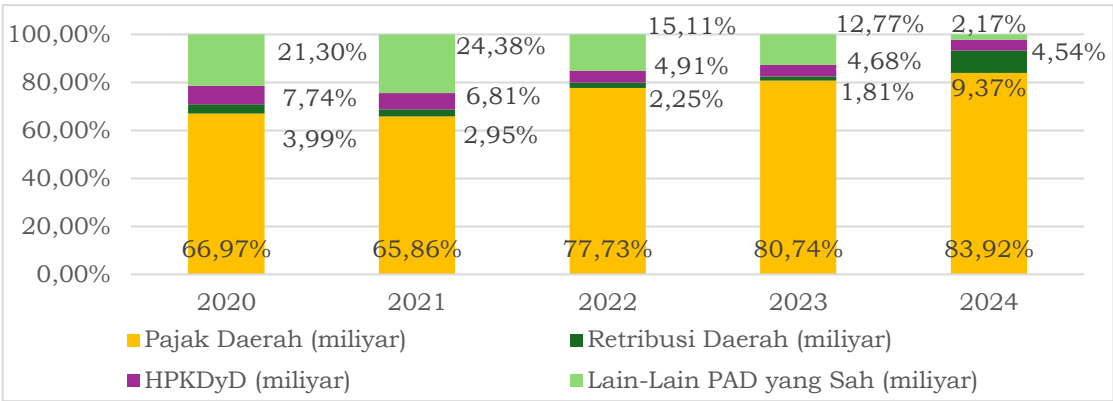
1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan grafik yang disajikan pada tabel di bawah, tren PAD Kota Denpasar menunjukkan pertumbuhan positif yang signifikan. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada 2020, PAD berhasil kembali meningkat pada tahun 2021 dan berhasil di atas 100 persen. Secara lebih detail, grafik PAD disajikan sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 2. 295
Realisasi PAD Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah, 2025

Pajak Daerah membentuk sebagian besar PAD Kota Denpasar selama 5 tahun terakhir dengan rata-rata persentase sebesar 75,04% dan prersentase terbesar 83,89% pada tahun 2024. Perkembangan proporsi pembentuk komponen PAD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

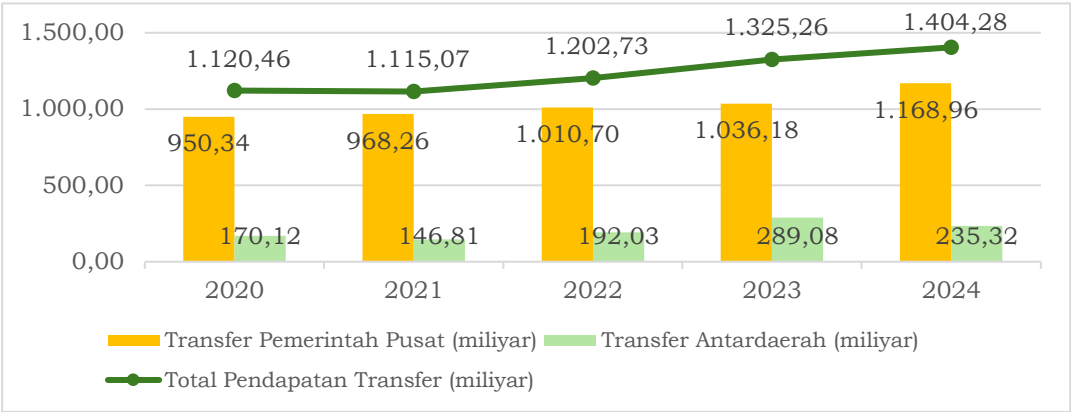


Gambar 2. 296
Proporsi Komponen Pembentuk PAD Kota Denpasar Tahun 2020–2024
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah, 2025

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan tranfer pemerintah daerah. Pendapatan tranfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dana insentif daerah, dan dana desa. Sementara itu, pendapatan transfer antardaerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan (umum dan khusus). Secara umum, pendapatan

transfer Kota Denpasar mengalami kenaikan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2021. Komponen pembentuk dana transfer Kota Denpasar didominasi oleh transfer pemerintah pusat. Secara lebih detail, pendapatan transfer Kota Denpasar disajikan pada grafik berikut.



Gambar 2. 297
Proporsi Komponen Pembentuk Pendapatan Transfer Kota Denpasar
Tahun 2020-2024

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah, 2025

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Tabel 2.93 dan Gambar 2.295, lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Denpasar menunjukkan bahwa sumber pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah didominasi dari pendapatan hibah pada tahun 2020, kemudian berubah menjadi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 2. 113
Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Denpasar
Tahun 2020-2024

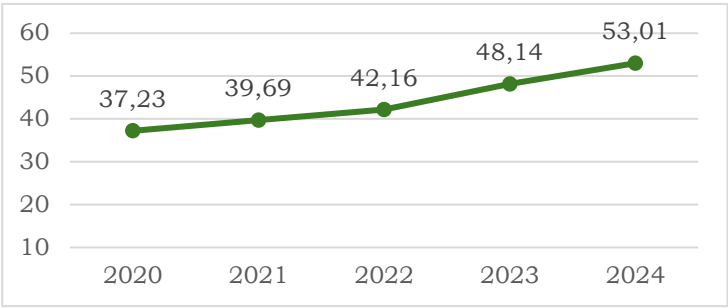
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	112,33	89,00	15,62	19,29	21,14
Pendapatan hibah	112,33	0,00	0,00	0,00	0,004
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	89,00	15,62	19,29	21,14

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah, 2025

4. Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan adalah ketangguhan kondisi keuangan daerah terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya. Berdasarkan Tabel 2.93 dan Gambar 2.295, PAD Kota Denpasar menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Sementara itu, apabila ditinjau dari perbandingan PAD terhadap pendapatan daerah, grafiknya cenderung menunjukkan tren kenaikan yang menunjukkan peningkatan kemandirian. Secara lebih detail, kemandirian keuangan Kota Denpasar

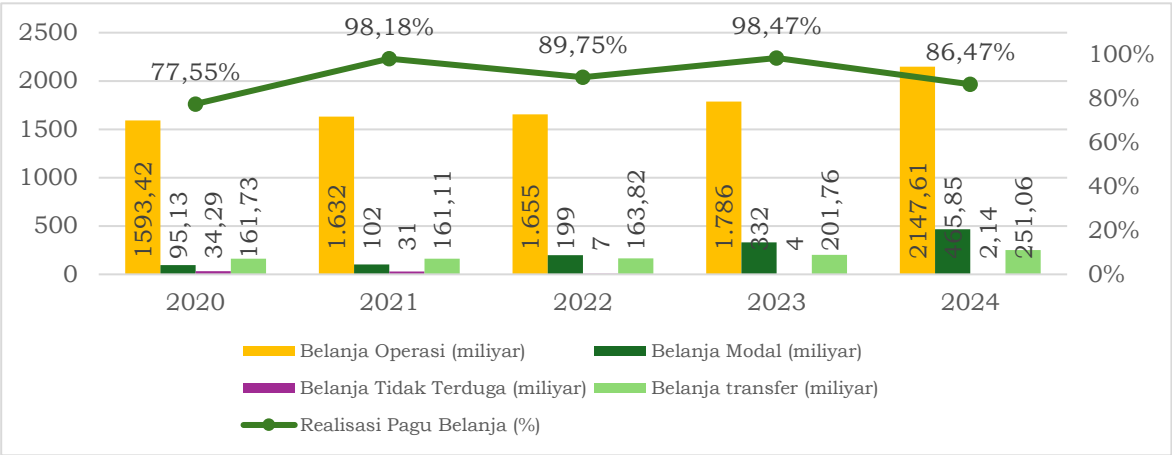
disajikan pada grafik berikut.



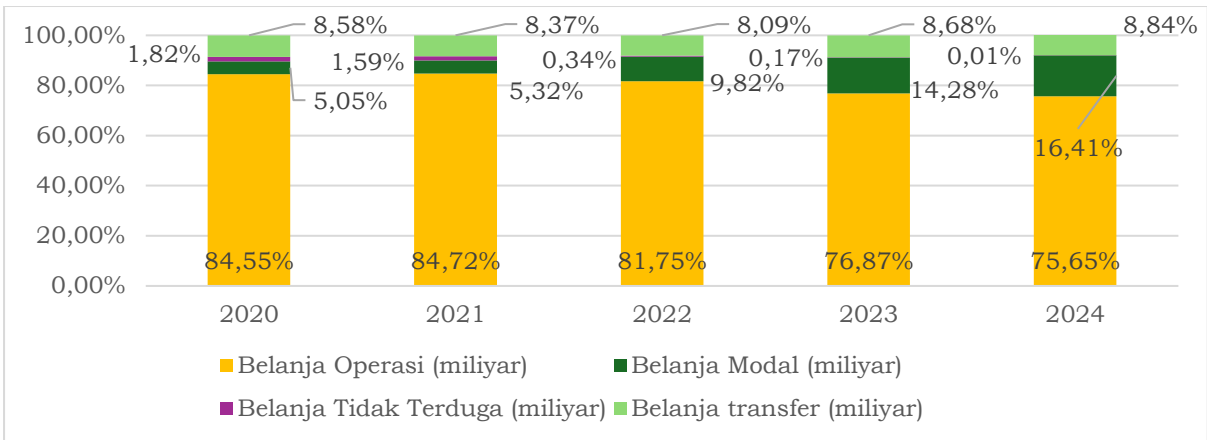
Gambar 2. 298
Kemandirian Keuangan Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah, 2024

b. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran daerah dalam bentuk uang dan pengeluaran lainnya yang diakui sebagai pengurang ekuitas sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Ditinjau dari **Tabel 2.93**, belanja daerah Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan. Sebagian besar belanja Kota Denpasar digunakan untuk belanja operasional. Artinya, sebagian besar APBD Kota Denpasar digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Sementara itu, ditinjau daerah perbandingan realisasi dan pagu belanja daerah, rata rata realisasi belanja berada pada 90,08%. Secara lebih detail, gambaran belanja daerah Kota Denpasar disajikan pada **Gambar 2.300** dan **Gambar 2.301** berikut.



Gambar 2. 299
Realisasi Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah, 2025



Gambar 2. 300
Proporsi Realisasi belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2020–2024
 Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah, 2025

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan/pengeluaran daerah yang perlu/akan dibayar/akan diterima kembali. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam lima tahun terakhir, total pembiayaan daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 114
Pembiayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pembiayaan Daerah	233,30	307,60	301,80	413,36	476,61
Penerimaan Pembiayaan Daerah	237,42	316,30	312,80	448,94	578,635
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,12	8,70	11,00	35,57	102,02
Surplus/Defisit	79,47	70,75	81,60	165,28	280,94
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	312,77	378,35	383,40	578,64	757,55

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah, 2025

2.2.1.2 Analisis Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang posisi keuangan pemerintah daerah, yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang terarah, efisien, dan efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Laporan neraca daerah memberikan informasi penting kepada *stakeholder* internal maupun eksternal (manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya), didalamnya adalah jenis akun riil dimana hasil operasional pada periode tersebut akan berpengaruh terhadap nilai neraca seperti besarnya aset, kewajiban yang harus dibayar

dan ekuitas yang dimiliki. Aset merupakan sumberdaya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik ekonomi maupun sosial. Aset Kota Denpasar didominasi oleh Aset Tetap, Investasi Jangka Panjang pada kepemilikan saham BUMD/BUMN dan Aset Lancar. Penambahan Aset Tetap di Pemerintah Daerah lebih difokuskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terhadap masyarakat, meskipun ada sebagian kecil yang sedang tidak digunakan dan belum digunakan sehingga masuk ke dalam Properti Investasi. Aset lancar merupakan aset yang paling likuid, namun pada pos ini didominasi oleh Piutang atas Pajak Daerah sehingga kemampuan atas penagihan serta tingkat keterbayaran piutang ini akan berdampak pada perhitungan rasio yang berdasarkan pada Aset Lancar. Kewajiban daerah lebih didominasi oleh hutang barang jasa di Rumah Sakit Daerah (BLUD) berupa obat dan habis pakai lainnya. Semuanya merupakan kewajiban jangka pendek yang akan dibayar/dilunasi pada tahun anggaran setelahnya.

Tabel 2. 115
Neraca Daerah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	ASET	6.297.773.657.358,76	6.530.564.814.533,84	6.641.125.477.758,75	7.083.787.060.304,58	7.747.199.326.400,92
	A. Aset Lancar	615.421.207.191,13	748.456.572.473,62	807.749.796.885,26	932.274.836.272,21	1.132.879.031.197,60
	B. Investasi Jangka Panjang	482.792.836.526,05	427.436.894.263,00	456.499.412.414,00	761.624.188.322,00	907.546.549.551,00
	C. Aset Tetap	5.154.840.516.342,83	5.311.385.831.079,47	5.329.674.512.779,52	5.336.674.774.298,54	5.615.643.612.483,52
	D. Aset Lainnya	44.719.097.298,75	43.285.516.717,75	47.201.755.679,97	46.800.761.411,83	84.717.633.168,80
	E. Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	6.412.500.000,00	6.412.500.000,00
	JUMLAH ASET	6.297.773.657.358,76	6.530.564.814.533,84	6.641.125.477.758,75	7.083.787.060.304,58	7.747.199.326.400,92
2	KEWAJIBAN	25.045.446.208,26	50.718.272.110,27	22.610.529.122,11	46.202.407.743,76	61.413.802.853,16
	A. Kewajiban Jangka Pendek	25.045.446.208,26	50.718.272.110,27	22.610.529.122,11	46.202.407.743,76	61.413.802.853,16
	B. Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	25.045.446.208,26	50.718.272.110,27	22.610.529.122,11	46.202.407.743,76	61.413.802.853,16
3	EKUITAS	6.272.728.211.150,50	6.479.846.542.423,57	6.618.514.948.636,64	7.037.584.652.560,82	7.685.785.523.547,76
	A. Ekuitas	6.272.728.211.150,50	6.479.846.542.423,57	6.618.514.948.636,64	7.037.584.652.560,82	7.685.785.523.547,76
	JUMLAH EKUITAS	6.272.728.211.150,50	6.479.846.542.423,57	6.618.514.948.636,64	7.037.584.652.560,82	7.685.785.523.547,76
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.297.773.657.358,76	6.530.564.814.533,84	6.641.125.477.758,75	7.083.787.060.304,58	7.747.199.326.400,92

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar, 2020-2024; diolah

A. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan diukur dalam satuan uang. Pada aset Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dan properti investasi.

Pada tahun 2024, total aset Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp 7,747 triliun dengan aset tetap menjadi komponen dominan (72,49%) senilai Rp 5,615 triliun. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan dikurangi akumulasi penyusutan. Pertumbuhan aset tetap mencerminkan kemampuan pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan infrastruktur serta nilai aset fisik daerah.

Investasi jangka panjang pada setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai Rp 907,55 miliar atau sebanyak 11,71% dari komponen aset Pemerintah Kota Denpasar di tahun 2024 yang berasal dari investasi jangka panjang permanen. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal.

Aset lancar tercatat mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp 1,132 triliun atau 14,62% dari komponen aset di tahun 2024. Peningkatan aset lancar menunjukkan pengelolaan kas dan penerimaan daerah yang positif. Komponen utamanya meliputi kas atau setara kas, piutang, beban dibayar di muka, serta persediaan. Kenaikan terbesar terjadi pada elemen kas dan setara kas menunjukkan likuiditas daerah yang meningkat.

Pada aset lainnya terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 sehingga menjadi Rp 84,717 miliar atau 1,09% dari komponen aset. Kenaikan terbesar terjadi pada aset lain-lain yang meningkat sebesar 160,75% di tahun 2023-2024.

Kondisi aset menunjukkan kecenderungan tumbuh positif terutama pada kas, investasi jangka panjang, dan aset tetap.

B. Kewajiban

Kewajiban merupakan semua utang atau beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya. Kewajiban ini timbul antara lain, akibat penerimaan dana dari pihak ketiga, perjanjian kerja dengan penyedia barang dan jasa, maupun kewajiban administratif lainnya, termasuk kewajiban yang berkaitan dengan hak pegawai, masyarakat, atau entitas lainnya. Pada akuntansi pemerintahan, kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Berdasarkan neraca tahun 2024, total kewajiban Pemerintah Kota Denpasar ternilai sebesar Rp 61,413 miliar. Nilai kewajiban tersebut seluruhnya berasal dari kewajiban jangka pendek dan tidak terdapat

kewajiban jangka panjang yang tercatat. Hal ini menunjukkan belum terdapat ketergantungan pada pembiayaan jangka panjang yang dapat membebani fiskal di masa depan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari pendapatan diterima di muka, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Utang belanja mendominasi dari komponen kewajiban jangka pendek yang mencerminkan utang belanja terhadap pihak ketiga atas transaksi barang dan jasa yang belum dibayarkan sebesar Rp 54,874 miliar.

Secara keseluruhan, kewajiban Kota Denpasar menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2024 dari Rp 25,045 miliar menjadi Rp 61,413 miliar. Secara nominal kewajiban yang cenderung kecil dibandingkan total aset yang mencapai Rp 7,747 triliun dan masih berada dalam porsi wajar terhadap aset tetapi kewajiban ini tetap perlu dimonitor dan dikelola dengan cermat agar tetap menjaga stabilitas fiskal. Belum adanya kewajiban jangka panjang juga menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal masih konservatif dan kondisi kebijakan fiskal yang hati-hati dalam mengelola risiko pembiayaan jangka panjang.

C. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan hak residual pemerintah atas aset yang dimiliki setelah dikurangi seluruh kewajiban dan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah. Nilai tersebut berasal dari akumulasi surplus anggaran dan pembentukan aset daerah dari waktu ke waktu. Ekuitas Pemerintah Kota Denpasar di tahun 2024 memiliki nilai sebesar Rp 7,685 triliun dan meningkat konsisten dari tahun 2020. Hal ini menandakan adanya keberlanjutan surplus pada keuangan daerah.

Nilai aset, kewajiban, dan ekuitas pada neraca keuangan Kota Denpasar menunjukkan kondisi keuangan dengan pertumbuhan aset yang meningkat dengan kewajiban yang terkendali dengan dominasi pada kewajiban jangka pendek. Ekuitas daerah yang terus meningkat mencerminkan pengelolaan keuangan yang mendukung keberlanjutan fiskal daerah.

Kemudian, analisis rasio keuangan Kota Denpasar dilakukan untuk mengetahui rasio likuiditas yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan rasio solvabilitas yang menggambarkan kemampuan jangka panjang. Analisis rasio keuangan terdiri dari rasio lancar (*current ratio*) yang merupakan perbandingan antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, rasio total hutang terhadap total aset (*debt ratio*) yang dihitung dari jumlah seluruh kewajiban dan jumlah seluruh aset, serta rasio total hutang terhadap total ekuitas (*debt to equity ratio*) yang dihitung dari jumlah seluruh kewajiban dan jumlah ekuitas. Perhitungan tersebut dapat dijabarkan pada tabel dibawah.

Tabel 2. 116
Analisis Rasio Keuangan Kota Denpasar 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar	24,57	14,76	35,72	20,18	18,45
Rasio Solvabilitas					
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,0040	0,0078	0,0034	0,0065	0,0079
Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas	0,0040	0,0078	0,0034	0,0066	0,0080

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar, 2020-2024; diolah

Berdasarkan tabel tersebut, rasio lancar tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan nilai aset yang lebih tinggi dari nilai kewajiban yang ditunjukkan dengan angka rasio lancar yang positif pada periode tersebut dengan nilai 18,45 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan kemampuan keuangan daerah yang tinggi dalam membayar kewajibannya. Dalam rasio keuangan, rasio lancar termasuk dalam rasio likuiditas (*liquidity ratio*) yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Kemudian, rasio hutang terhadap total aset menunjukkan nilai yang sangat rendah sebesar 0,0079 di tahun 2024 mengindikasikan bagian aset yang digunakan untuk membayar kewajiban juga kecil. Rasio hutang terhadap ekuitas juga menunjukkan nilai yang sangat rendah sebesar 0,0080 di tahun 2024. Nilai rasio total hutang terhadap total aset dan total ekuitas memiliki nilai yang hampir sama. Hal tersebut disebabkan nilai aset dan ekuitas memiliki besaran yang hampir sama. Dalam rasio keuangan, rasio tersebut termasuk dalam rasio solvabilitas yang mengukur kemampuan keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Penyusunan kerangka pendanaan bertujuan untuk mengidentifikasi kapasitas riil keuangan daerah untuk alokasi pendanaan program pendanaan tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan Kota Denpasar dilakukan berdasarkan hasil proyeksi keuangan daerah berdasarkan skenario rasional pada setiap aspek yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini dan 5 tahun yang sudah dilewati.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali secara trend bernilai rata-rata sebesar 6,00% (yoy). Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan terjaga pada kisaran 2,5% (yoy). Berdasarkan pertimbangan tersebut, arah kebijakan proyeksi APBD Kota Denpasar dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut.

1. Mendorong Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tren PAD Kota Denpasar menunjukkan pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir, meskipun sempat terhambat oleh pandemi Covid-19. Hal ini mencerminkan ketangguhan fiskal yang dimiliki Kota Denpasar. Oleh karena itu, kebijakan diarahkan untuk terus memperkuat sumber-sumber PAD melalui langkah-langkah berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah melalui digitalisasi sistem dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.
- b. Mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah melalui pengembangan aplikasi, penerapan transaksi nontunai (e-ticketing), serta penataan ulang sistem pemungutan retribusi guna mengatasi tren penurunan dalam lima tahun terakhir.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak serta retribusi daerah, termasuk peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.
- d. Mendorong pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai tren lima tahun terakhir.

2. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan transfer.

Pendapatan transfer diharapkan meningkat sejalan dengan tren pertumbuhan pendapatan nasional dan laju inflasi. Pemerintah daerah akan menjaga kinerja pelaksanaan program dan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan alokasi transfer dari pemerintah pusat.

3. Mengendalikan belanja daerah berdasarkan prioritas

Kebijakan belanja diarahkan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran melalui pembagian prioritas sebagai berikut:

- a. Prioritas I: Pengeluaran wajib dan mengikat, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- b. Prioritas II: Belanja yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta penurunan ketimpangan pembangunan.
- c. Prioritas III: Belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

4. Mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Dalam hal terjadi defisit anggaran, kekurangan tersebut akan diatasi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya dan penerimaan pembiayaan lainnya seperti Pinjaman Daerah. Selanjutnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan diupayakan untuk mendekati Rp0,00 guna mencerminkan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Tabel 2. 117
Proyeksi Keuangan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025–2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	REALISASI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1	PENDAPATAN	3.147.885.007.524	3.333.621.689.938	3.430.550.318.989	3.529.821.480.686	3.641.714.041.753	3.772.719.369.848
	A. Pendapatan Asli Daerah	1.668.699.005.391	2.099.643.180.664	2.199.509.962.298	2.315.115.159.252	2.442.343.541.314	2.587.641.504.139
	B. Pendapatan Transfer	1.458.044.839.972	1.233.978.509.274	1.231.040.356.691	1.214.706.321.434	1.199.370.500.439	1.185.077.865.709
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	21.141.162.161	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	3.147.885.007.524	3.333.621.689.938	3.430.550.318.989	3.529.821.480.686	3.641.714.041.753	3.772.719.369.848
2	BELANJA	2.866.944.850.553	3.802.913.856.638	3.884.938.876.503	3.978.763.377.980	4.079.504.686.099	4.187.984.994.987
	A. Belanja Operasi	2.147.613.065.659	2.742.846.719.016	2.764.782.743.357	2.787.655.274.490	2.811.487.649.516	2.836.304.049.428
	B. Belanja Modal	465.852.299.900	643.544.989.719	696.637.451.371	754.110.041.109	816.324.119.500	883.670.859.359
	C. Belanja Tak Terduga	2.415.538.991	2.500.000.000	2.161.750.000	1.869.265.225	1.616.353.640	1.397.660.993
	D. Belanja Transfer	251.063.946.003	414.022.147.903	421.356.931.775	435.128.797.156	450.076.563.443	466.612.425.207
	JUMLAH BELANJA	2.866.944.850.553	3.802.913.856.638	3.884.938.876.503	3.978.763.377.980	4.079.504.686.099	4.187.984.994.987
	SURPLUS/DEFISIT	280.940.156.971	-469.292.166.700	-454.388.557.514	-448.941.897.294	-437.790.644.346	-415.265.625.139
3	PEMBIAYAAN	680.659.787.235	669.292.166.700	654.388.557.514	648.941.897.294	637.790.644.346	615.265.625.139
	A. Penerimaan	578.635.787.235	569.292.166.700	554.388.557.514	548.941.897.294	537.790.644.346	515.265.625.139
	B. Pengeluaran	102.024.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN	680.659.787.235	669.292.166.700	654.388.557.514	648.941.897.294	637.790.644.346	615.265.625.139
	PEMBIAYAAN NETTO	476.611.787.235	469.292.166.700	454.388.557.514	448.941.897.294	437.790.644.346	415.265.625.139

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

2.2.3 Pendanaan Inovatif dalam Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi serta fiskal. Dalam konteks Indonesia, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat dan keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam mendanai proyek-proyek pembangunan strategis. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengeksplorasi pendekatan-pendekatan pendanaan yang lebih inovatif, yang dikenal sebagai *creative financing*.

Creative financing merujuk pada serangkaian mekanisme pembiayaan non-tradisional yang dirancang untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan pembangunan melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan instrumen pasar keuangan, serta partisipasi publik dan swasta secara lebih aktif. Pendekatan ini berpotensi memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mempercepat realisasi tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD.

2.2.3.1 Konsep dan Prinsip *Creative Financing*

Dalam literatur pembangunan, *creative financing* diartikan sebagai pendekatan pembiayaan yang memanfaatkan skema, instrumen, dan sumber daya di luar kerangka konvensional APBN/APBD. Hal ini mencakup penggabungan sumber daya publik dan swasta, instrumen pasar modal, serta penggunaan teknologi keuangan (*fintech*) untuk menghimpun dana masyarakat. *Creative financing* bukan semata-mata inovasi finansial, melainkan strategi yang berorientasi pada *leveraging aset* dan potensi fiskal untuk memperluas dampak pembangunan.

Tiga prinsip utama dalam pendekatan ini adalah:

1. ***diversifikasi sumber pendanaan***: memperluas pilihan pembiayaan di luar pembiayaan pemerintah tradisional;
2. ***mitigasi risiko fiskal***: menyalurkan beban risiko secara adil antara pemerintah dan mitra pembiayaan, dan
3. ***efisiensi dan akuntabilitas***: menjamin bahwa pembiayaan alternatif tetap dalam kerangka transparansi dan tata kelola yang baik.

Model-Model *creative financing* dalam Konteks Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah antara lain:

1. Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU merupakan bentuk *public-private partnership* (PPP) yang telah menjadi bagian dari strategi nasional dalam pembiayaan infrastruktur, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 38 Tahun 2015. Skema ini memungkinkan sektor swasta untuk berperan dalam pembiayaan,

pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur publik dengan prinsip pembagian risiko dan keuntungan.

2. Penerbitan Sukuk Daerah

Sukuk atau obligasi syariah merupakan instrumen pembiayaan berbasis aset (*asset-backed securities*) yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah pusat telah sukses menerbitkan sukuk negara, termasuk untuk proyek infrastruktur melalui skema *project-based* sukuk. Inovasi ini berpotensi direplikasi di tingkat daerah.

3. *Green Bonds*

Green bonds adalah obligasi yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Green Sukuk dan keberhasilan ini membuka peluang untuk replikasi di tingkat lokal.

4. *Crowdfunding* untuk Pembangunan Sosial

Crowdfunding adalah metode pengumpulan dana dari publik melalui platform digital. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi atau berkolaborasi dengan platform *crowdfunding* untuk mendanai proyek-proyek berdampak langsung, seperti pembangunan fasilitas publik atau program beasiswa.

Tabel 2. 118
Analisis Perbandingan Pemanfaatan *Creative Financing*

	KPBU (PPP)	Sukuk Daerah	Green Bonds	Crowdfunding
Jenis Proyek yang Sesuai	Infrastruktur publik skala besar: jalan, jembatan, air minum, sanitasi, transportasi	Proyek dengan nilai keagamaan/sosial, pembangunan pasar, rumah sakit, sekolah	Proyek ramah lingkungan: energi terbarukan, pengelolaan sampah, transportasi publik rendah emisi	Proyek kecil atau komunitas: fasilitas umum, UMKM, pendidikan, pelestarian budaya
Karakteristik Utama	Jangka panjang Berkas pengembalian investasi (<i>user charge/tariff</i> atau <i>availability payment</i>) Melibatkan investor swasta	Berkas aset (<i>underlying asset</i>) Mengacu pada prinsip syariah Diterbitkan oleh pemda dengan persetujuan pusat dan ojk	Mengacu pada standar lingkungan (<i>green taxonomy</i>) Dapat diterbitkan daerah jika memenuhi persyaratan teknis dan regulatif	Platform daring berbasis kontribusi publik Bersifat sosial atau investasi mikro
Kelebihan	Mengurangi beban APBD langsung Transfer risiko kepada mitra swasta Meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek	Menarik investor berbasis syariah Potensi meningkatkan inklusi keuangan syariah daerah Dapat memperkuat citra dan nilai religius daerah	Akses pada pasar keuangan berwawasan lingkungan Dapat menarik investor esg Mendukung target pembangunan rendah karbon	Pelibatan masyarakat secara langsung Transparan dan cepat dihimpun Cocok untuk proyek bernilai kecil-menengah
Tantangan Implementasi	Proses persiapan kompleks dan panjang Membutuhkan sdm dan kajian kelayakan yang kuat Resiko hukum dan kontraktual	Regulasi ketat dan teknis kompleks Terbatasnya sdm yang memahami sukuk Harus ada aset yang jelas sebagai dasar penerbitan	Harus memenuhi verifikasi "green" Perlu pelaporan berkelanjutan Proyek harus benar-benar ramah lingkungan	Tidak cocok untuk proyek berskala besar Daya tarik terbatas jika tidak dikomunikasikan dengan baik Perlu platform legal dan akuntabel

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

2.2.3.2 Peluang dan Tantangan Implementasi Skema *Creative Financing*

A. Peluang Implementasi

1. Diversifikasi Sumber Pendanaan Pembangunan

Salah satu pilar utama dalam strategi pembiayaan pembangunan daerah adalah diversifikasi sumber pendanaan. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan alokasi belanja rutin dalam APBD sering kali membatasi ruang fiskal daerah untuk melakukan investasi publik yang bersifat strategis dan jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu secara proaktif mengeksplorasi alternatif pendanaan di luar skema konvensional, seperti melalui kemitraan dengan sektor swasta, pemanfaatan aset daerah, atau penerbitan surat utang daerah. Diversifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas fiskal dan memperluas cakupan pembiayaan pembangunan tanpa membebani anggaran secara langsung

Penerapan pendekatan *blended finance*, yang mengombinasikan dana publik dan swasta, juga memberikan peluang strategis untuk memanfaatkan potensi dana filantropi, pembiayaan berbasis hasil (*results-based financing*), maupun pendanaan dari lembaga keuangan internasional. Di sisi lain, pengembangan ekosistem keuangan daerah, termasuk pasar obligasi daerah dan pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan lokal, menjadi prasyarat penting dalam mendorong diversifikasi sumber dana yang efektif dan berkelanjutan. Strategi ini akan memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dasar, layanan publik, dan program strategis lainnya.

2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Proyek

Tata kelola proyek pembangunan yang efektif merupakan fondasi bagi keberhasilan pemanfaatan skema pembiayaan inovatif. Skema seperti Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, maupun pembiayaan hijau memerlukan kepastian hukum, transparansi proses, serta akuntabilitas yang tinggi dalam setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem pengelolaan proyek menjadi urgensi yang tidak terelakkan apabila pemerintah daerah ingin menjadi aktor yang kredibel di mata investor dan mitra pembangunan.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan studi kelayakan, analisis risiko, dan manajemen kontrak menjadi aspek krusial. Selain itu, penyusunan daftar proyek prioritas (*project pipeline*) yang

terstruktur dan terbuka akan meningkatkan daya tarik investasi serta mempermudah proses matching dengan skema pembiayaan yang sesuai. Dalam jangka panjang, perbaikan tata kelola proyek tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan, tetapi juga memperkuat daya saing daerah sebagai destinasi investasi pembangunan yang berkelanjutan.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

Pendekatan pembiayaan pembangunan yang inovatif menuntut adanya pergeseran paradigma dari model sentralistik menuju pendekatan kolaboratif. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha bukan hanya relevan dalam konteks sosial-politik, melainkan juga memiliki dimensi ekonomi dan keuangan yang signifikan. Melalui skema seperti *crowdfunding*, *community bonds*, atau program *corporate social responsibility* (CSR) yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat menghimpun dana sekaligus memperkuat rasa kepemilikan publik terhadap program pembangunan.

Peningkatan partisipasi juga memperkuat prinsip inklusivitas dalam pembangunan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan legitimasi kebijakan publik. Melibatkan pelaku usaha lokal dalam proyek pembangunan daerah melalui model kolaboratif, baik sebagai penyedia jasa, mitra investasi, maupun konsultan teknis, juga dapat mempercepat alih teknologi dan penguatan kapasitas ekonomi lokal. Di era digital, platform partisipatif berbasis teknologi informasi juga membuka ruang baru untuk pelibatan warga secara real-time dalam proses perencanaan dan penganggaran.

4. Dukungan Kebijakan Nasional dan Regulasi

Keberhasilan implementasi pembiayaan inovatif di tingkat daerah sangat ditentukan oleh kerangka kebijakan dan regulasi nasional yang mendukung. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah menginisiasi berbagai langkah strategis, seperti pembentukan Komite KPBU, penerbitan Peraturan Presiden terkait pembiayaan infrastruktur non-APBN, serta penguatan kerangka hukum penerbitan obligasi daerah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengembangkan panduan penerbitan green bonds dan mendorong penguatan regulasi pasar modal daerah.

Namun, di sisi lain, masih terdapat sejumlah tantangan seperti ketidakterpaduan antar-regulasi, keterbatasan panduan teknis, serta

lambatnya proses sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting, termasuk dalam bentuk penyediaan asistensi teknis, *capacity building*, serta insentif fiskal yang mendorong keberanian daerah untuk berinovasi. Harmonisasi regulasi dan penciptaan ekosistem hukum yang kondusif akan mempercepat penetrasi instrumen *creative financing* dalam kerangka pembangunan daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

B. Tantangan

1. Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan mendasar dalam penerapan skema pembiayaan inovatif di daerah adalah terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM). Banyak pemerintah daerah masih menghadapi kekurangan dalam hal keahlian teknis yang diperlukan untuk merancang, mengevaluasi, dan mengelola skema pembiayaan alternatif seperti Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, maupun instrumen pasar modal lainnya. Keterbatasan ini mencakup pemahaman atas analisis kelayakan finansial, manajemen risiko, serta pemrosesan dokumen hukum dan kontrak kompleks.

Selain itu, kelembagaan di tingkat daerah sering belum memiliki unit khusus atau struktur organisasi yang secara permanen mengelola portofolio pembiayaan non-konvensional. Ketiadaan unit semacam ini membuat proses koordinasi internal menjadi tidak efisien dan memperlambat pengambilan keputusan. Tanpa adanya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM secara sistematis, sulit bagi daerah untuk menjadi mitra yang kredibel dan kompetitif di mata investor maupun lembaga pembiayaan, sehingga berpotensi menghambat realisasi proyek pembangunan strategis yang berbasis *creative financing*.

2. Keterbatasan Aset dan Proyek Layak Finansial

Salah satu prasyarat dalam menarik pembiayaan kreatif adalah keberadaan proyek yang secara finansial layak (*bankable*) dan dapat menarik minat investor atau mitra pembiayaan. Namun, banyak daerah menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan menyiapkan proyek-proyek pembangunan yang memenuhi standar kelayakan tersebut. Faktor-faktor seperti skala proyek yang kecil, ketidakpastian pendapatan, atau model bisnis yang belum jelas sering kali menjadi penghalang dalam mengakses skema pembiayaan alternatif.

Di sisi lain, aset milik pemerintah daerah yang berpotensi dimonetisasi atau dijadikan jaminan proyek sering kali belum terinventarisasi secara sistematis, atau menghadapi kendala hukum dan administrasi dalam pemanfaatannya. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam mengembangkan skema seperti *land value capture*, pemanfaatan aset melalui *securitization*, atau penggunaan barang milik daerah sebagai kontribusi non-tunai dalam KPBU. Tanpa pengelolaan aset yang aktif dan strategis, upaya diversifikasi pendanaan melalui mekanisme kreatif akan sulit diwujudkan secara optimal.

3. Kepastian Hukum dan Regulasi Teknis

Kerangka hukum dan regulasi yang mendukung merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi *creative financing*. Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait pembiayaan alternatif, seperti Peraturan Presiden tentang KPBU dan regulasi OJK tentang penerbitan obligasi daerah, namun di tingkat teknis masih terdapat celah regulatif yang menjadi hambatan. Ketidakjelasan prosedur, tumpang tindih kewenangan antar-instansi, serta kurangnya panduan teknis sering menciptakan ketidakpastian dalam proses perencanaan dan implementasi proyek.

Ketiadaan standar operasional baku untuk skema pembiayaan baru juga menimbulkan risiko hukum bagi pejabat daerah yang mengambil keputusan. Dalam banyak kasus, keraguan terhadap perlindungan hukum menghambat inisiatif-inisiatif inovatif, meskipun proyek tersebut potensial secara ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya harmonisasi regulasi dan pembentukan sistem pendampingan hukum yang memadai, agar iklim kelembagaan di daerah lebih kondusif terhadap inovasi dalam pembiayaan pembangunan.

4. Tantangan Sosial dan Politik

Di samping aspek teknis dan kelembagaan, tantangan sosial dan politik juga mempengaruhi kelancaran implementasi skema *creative financing*. Persepsi publik terhadap kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta atau penggunaan dana publik untuk proyek berisiko sering kali bersifat skeptis. Ketika komunikasi publik tidak dilakukan secara efektif, potensi resistensi sosial meningkat, terutama jika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau tidak melihat manfaat langsung dari proyek yang didanai.

Secara politik, dinamika dalam lembaga legislatif daerah juga dapat menjadi faktor penghambat, khususnya apabila terdapat ketidaksepahaman atau resistensi terhadap pendekatan baru dalam pembiayaan pembangunan. Proses persetujuan proyek yang melibatkan modal swasta atau instrumen utang, seperti obligasi daerah, sering kali menghadapi perdebatan panjang yang tidak selalu berbasis pada analisis ekonomi, melainkan pertimbangan politis jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang transparan dan pendekatan partisipatif yang inklusif agar resistensi sosial-politik dapat diminimalkan dan legitimasi proyek dapat ditingkatkan.

2.2.3.3 Arah Kebijakan dalam RPJMD: Rekomendasi Strategis terkait *Creative Financing*

1. Penguatan Perencanaan dan Identifikasi Proyek Potensial

Langkah awal yang fundamental dalam penerapan skema *creative financing* adalah penguatan sistem perencanaan pembangunan yang mampu mengidentifikasi proyek-proyek potensial dengan kelayakan finansial dan sosial yang tinggi. Proyek semacam ini harus disusun secara sistematis dalam bentuk *project pipeline* yang dapat dijadikan acuan bagi calon investor dan mitra pembiayaan. Penguatan perencanaan ini tidak hanya menyangkut aspek teknokratik, tetapi juga memerlukan integrasi antara proses perencanaan fiskal dan strategi pembiayaan non-konvensional.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme evaluasi kelayakan proyek tidak hanya dari sisi manfaat sosial (*social return*), tetapi juga dari aspek keekonomian dan kelayakan komersial (*bankability*). Dalam praktiknya, proyek-proyek prioritas pembangunan seperti infrastruktur transportasi, energi terbarukan, pengelolaan air bersih, pembangunan dan pengelolaan APJ (Alat Penerangan Jalan), Pembangunan Infrastruktur Fisik dan sanitasi sering kali memiliki potensi untuk dikembangkan melalui skema pembiayaan alternatif. Dengan perencanaan yang matang dan berbasis data, potensi ini dapat dioptimalkan untuk mengurangi beban anggaran dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.

2. Pembentukan Unit Teknis Pendanaan Alternatif

Untuk mendukung implementasi *creative financing* secara terstruktur dan berkelanjutan, perlu dibentuk unit khusus di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas menangani perencanaan, negosiasi, dan pengelolaan pendanaan alternatif. Unit ini berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas perangkat daerah dan sekaligus menjadi *clearing house* bagi proyek-proyek

yang potensial untuk dibiayai melalui skema non-APBD. Di beberapa negara, keberadaan *Project Development Facility* (PDF) atau *Public-Private Partnership Unit* (PPPU) telah terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan proyek kreatif secara signifikan.

Unit ini juga diharapkan memiliki kewenangan teknis dan administratif untuk melakukan evaluasi dokumen kelayakan, memfasilitasi penyusunan skema pembiayaan, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan calon mitra pembiayaan, baik dari sektor swasta, lembaga donor, maupun pasar modal. Dalam jangka panjang, unit ini dapat memainkan peran strategis sebagai katalisator bagi pengembangan ekosistem *creative financing* yang lebih mapan dan profesional di tingkat daerah.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah

Keberhasilan implementasi kebijakan pendanaan inovatif sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi reformasi pembiayaan pembangunan. Aparatur daerah perlu dibekali dengan kompetensi teknis yang memadai dalam aspek perencanaan proyek, analisis keuangan, manajemen risiko, serta pemahaman atas kerangka hukum dan regulasi pembiayaan alternatif.

Kegiatan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan tematik, lokakarya terpadu, pertukaran pengetahuan antar-daerah (*peer learning*), maupun pendampingan langsung oleh lembaga teknis atau mitra pembangunan. Selain itu, sinergi dengan perguruan tinggi, asosiasi profesional, dan lembaga riset juga dapat dimanfaatkan untuk menyediakan basis pengetahuan yang kuat dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan program *creative financing* secara kredibel dan berkelanjutan.

4. Membangun Kolaborasi Multipihak

Pendekatan *creative financing* pada hakikatnya bersandar pada kolaborasi antar-aktor pembangunan. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam membiayai dan mengelola proyek-proyek berskala besar, terutama yang memerlukan pembiayaan jangka panjang dan kompleksitas teknis tinggi. Oleh karena itu, membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal menjadi krusial dalam menciptakan tata kelola kolaboratif yang produktif.

Kolaborasi multipihak juga menciptakan ruang bagi inovasi sosial dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Di sisi lain, keterlibatan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan akan memperkuat legitimasi dan memperbesar kemungkinan keberhasilan proyek. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi ruang dialog, membentuk forum kemitraan pembangunan, atau meluncurkan program partisipatif yang mendorong kontribusi nyata dari berbagai pihak dalam kerangka pembiayaan inovatif.

5. Peningkatan Akuntabilitas dan Tata Kelola

Creative financing membawa peluang besar, namun juga menuntut standar tata kelola yang lebih tinggi. Mengingat sebagian skema pembiayaan alternatif bersifat jangka panjang, kompleks, dan melibatkan aktor non-pemerintah, maka transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahapan menjadi sangat penting. Kegagalan dalam mengelola proyek dengan baik dapat berimplikasi pada risiko fiskal dan reputasi yang signifikan bagi pemerintah daerah.

Untuk itu, sistem pengawasan internal perlu diperkuat, termasuk dalam aspek audit proyek, pengendalian mutu, serta pelaporan kinerja secara berkala. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip *value for money* (VfM) dan *good governance* harus dijadikan acuan dalam pemilihan mitra, penentuan skema pembiayaan, hingga penilaian dampak pembangunan. Keterbukaan informasi kepada publik dan pelibatan masyarakat dalam pemantauan proyek juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan keberlanjutan inisiatif *creative financing* di tingkat daerah.

Creative financing bukan sekadar pendekatan teknis dalam pembiayaan pembangunan, melainkan strategi komprehensif yang memadukan inovasi kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta optimalisasi aset dan potensi daerah. Dalam konteks penyusunan RPJMD Kota Denpasar, penerapan pendekatan ini menjadi instrumen penting untuk mempercepat capaian pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Melalui pemanfaatan berbagai skema pembiayaan inovatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sukuk daerah, green bond, serta crowdfunding pembangunan, Pemerintah Kota Denpasar memiliki peluang besar untuk memperkuat kapasitas pendanaan, memperluas ruang fiskal, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola pembangunan.

Dalam konteks implementasi di Kota Denpasar, peluang penerapan skema *creative financing* dapat diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Misalnya, pengelolaan Alat Penerangan Jalan (APJ) dapat dijejaki melalui skema KPBU untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi beban pembiayaan daerah. Selain itu, pembangunan Rumah Sakit Daerah dapat dikembangkan melalui kerja sama investasi jangka panjang guna memperluas akses dan kualitas layanan kesehatan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Potensi *creative financing* juga dapat diterapkan pada penataan sistem air minum dan jaringan air bersih, yang membutuhkan dukungan investasi besar untuk menjamin keberlanjutan pasokan dan pelayanan. Lebih jauh, penataan infrastruktur fisik kota seperti pembangunan dukting kabel bawah tanah dapat menjadi contoh nyata penerapan KPBU dalam memperindah wajah kota, meningkatkan keselamatan, dan menciptakan tata ruang yang lebih efisien.

Keberhasilan penerapan pendekatan ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, dukungan regulasi yang adaptif, serta komitmen politik terhadap inovasi pembiayaan publik. Dengan mengintegrasikan kerangka pendanaan kreatif ke dalam RPJMD, Pemerintah Kota Denpasar dapat membangun fondasi pembangunan jangka menengah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat posisi Denpasar sebagai kota yang progresif dan adaptif terhadap tantangan pembiayaan pembangunan modern.

2.2.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan tercermin dalam kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan ini akan mencerminkan perkembangan dan proporsi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Semakin baik pengelolaan keuangan, maka akan mendorong tercapainya transparansi keuangan, optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan pemanfaatan potensi pembiayaan daerah. Tercapainya aspek-aspek tersebut akan mendorong terciptanya kelembagaan keuangan yang bisa mewujudkan perkembangan daerah ke arah yang lebih baik.

2.2.4.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menggambarkan realisasi per pos belanja daerah. Analisis proporsi penggunaan anggaran terbagi dua, yaitu

(a) proporsi belanja pegawai dan (b) belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran pengelolaan keuangan daerah pada masa lalu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 masih menggunakan istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung, di mana belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, serta belanja pemungutan pajak daerah. Sementara itu belanja langsung diantaranya terdiri dari belanja honorarium PNS; beasiswa pendidikan PNS; kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS; makan dan minuman pegawai; pakaian dinas dan pakaian khusus; perjalanan dinas serta belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll).

Meskipun demikian, istilah belanja langsung dan belanja tidak langsung sudah tidak digunakan lagi setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Klasifikasi belanja daerah dibagi menjadi:

- 1) **Belanja Operasi**, meliputi pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dengan komponen meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja ini bersifat rutin dan diperlukan untuk menjaga keberlangsungan operasional pemerintahan.
- 2) **Belanja Modal**, meliputi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan). Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aset daerah dan memberikan manfaat jangka panjang. Contohnya: belanja untuk pengadaan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan.
- 3) **Belanja Tidak Terduga**, yaitu belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi berulang, seperti penanggulangan bencana alam atau keadaan darurat lainnya.
- 4) **Belanja Transfer**, yaitu pengeluaran uang atau hak dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain, pemerintah desa, dan/atau pihak ketiga yang bersifat wajib dan tidak mendapatkan imbalan langsung. Contoh: bantuan keuangan kepada desa.

Analisis pengeluaran yang wajib dan mengikat dilakukan terhadap pengeluaran yang tidak dapat dihindari dalam satu tahun anggaran, yaitu wajib dibayar setiap tahun dan tidak dapat ditunda. Pengeluaran prioritas utama merupakan pengeluaran terkait keberlangsungan pelayanan dasar prioritas, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2. 119
Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Denpasar Tahun 2020-2024

	Uraian	Tahun Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Belanja operasi	1.091,84	1.217,76	1.120,99	1.298,82	1.463,21
1	Belanja penerimaan pegawai, anggota dan pimpinan DPRD, dan kepala daerah	747,92	821,98	821,02	806,74	996,72
2	Belanja hibah	105,70	200,57	125,32	164,57	205,19
3	Belanja bantuan sosial	42,20	3,39	3,86	4,06	7,82
4	Belanja tidak terduga	34,29	30,71	6,97	3,99	2,41
5	Belanja bagi hasil	47,72	47,90	59,22	201,76	111,80
6	Belanja bantuan keuangan	114,01	113,21	104,60	117,70	139,27
	Pengeluaran Pembiayaan	4,12	8,70	11,00	35,57	102,02
1	Penyertaan modal daerah	4,12	8,70	11,00	35,57	102,02
2	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.095,96	1.226,46	1.131,99	1.252,27	1.667,25

Sumber: *djpk.kemenkeu.go.id*, diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Denpasar cenderung fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023-2024 terjadi peningkatan yang signifikan.

2.2.4.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menggambarkan pengaruh kebijakan pembiayaan daerah sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hasil analisis pembiayaan mendasari penentuan kebijakan pembiayaan daerah berikutnya untuk menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan terdiri dari analisis sumber penutup defisit riil, realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA).

A) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis sumber penutup defisit riil menggambarkan kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran pada masa lalu. Berdasarkan tabel di bawah, APBD Kota Denpasar mengalami defisit pada tahun 2019 sebesar 85,93M. Akan tetapi, defisit ini berhasil diatasi oleh penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel 2. 120
Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Denpasar Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi pendapatan daerah	1.964,04	1.996,44	2.106,41	2.489,16	3.147,88
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja daerah	1.884,57	1.925,69	2.024,81	2.323,88	2.866,94

No.	Uraian	Tahun Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	Pengeluaran pembiayaan daerah	4,12	8,70	11,00	35,58	102,02
	Defisit Riil	75,35	62,05	70,60	129,7	178,74
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:					
1.	SiLPA tahun sebelumnya	237,42	312,80	378,35	448,94	578,63
2.	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	237,42	312,80	378,35	448,94	578,63
	SiLPA	312,77	374,85	448,95	578,63	757,55

Sumber: *djpk.kemenkeu.go.id*, diolah, 2025

B) Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis SiLPA menggambarkan komposisi SiLPA pada tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai dasar identifikasi kinerja APBD tahun sebelumnya dan pertimbangan pengambilan keputusan di tahun mendatang. Sumber SiLPA terdiri dari pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; sisa penghemantan belanja atau akibat lainnya; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan kegiatan lanjutan. Kota Denpasar memiliki realisasi SiLPA yang tumbuh pesat setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan SiLPA adalah 48% dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 121%.

C) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis SILPA menggambarkan SILPA secara riil yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis SILPA dihitung berdasarkan selisih antara kas dan setara kas neraca daerah dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan. Kota Denpasar tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan sehingga SiLPA Kota Denpasar bersumber dari kas dan setara kas neraca daerah.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan

Permasalahan dirumuskan berdasarkan uraian masalah pada dokumen RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045, KLHS RPJMD 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029. Permasalahan tersebut berupa pernyataan tentang kesenjangan antara hasil yang dicapai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya, masalah ini dijabarkan berdasarkan aspek, fokus, atau bidang urusan untuk menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis.

2.3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi tidak hanya menawarkan peluang untuk pembangunan daerah, tetapi juga dapat menjadi tantangan dan hambatan. Oleh karena itu, aspek-aspek ini harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

A) Geografi

Kota Denpasar kerap mengalami bencana banjir terutama pada akhir tahun, yang disebabkan oleh faktor geografis, curah hujan tinggi, rendahnya area resapan, serta kurangnya infrastruktur penunjang. Meskipun banjir yang terjadi tidak menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa, bencana tersebut cukup mengganggu aktivitas lalu lintas, kawasan pariwisata, dan perkantoran. Selain banjir, Kota Denpasar juga rentan terhadap ancaman bencana tsunami dan gempa bumi karena letaknya berada di Zona *Megathrust*. Sementara itu, upaya mitigasi risiko bencana di Kota Denpasar masih belum optimal untuk menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi. Perlu dilakukan inovasi upaya mitigasi jangka panjang agar orientasi penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada penanganan kedaruratan, melalui sinergisme antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B) Demografi

Permasalahan kependudukan yang mungkin terjadi akibat kegagalan pemanfaatan bonus demografi adalah *aging population* dan terlampauinya *carrying capacity* yang disebabkan oleh gagalnya pengendalian jumlah penduduk. Analisis demografi penduduk Kota Denpasar menunjukkan bahwa pada tahun 2026, piramida stasionari Kota Denpasar bergerak menuju piramida konstruktif yang diindikasikan dengan LPP Kota Denpasar dan Provinsi Bali yang terus menurun. *Aging population* akan menjadi masalah karena berkurangnya jumlah masyarakat produktif dan akan mengganggu perekonomian kota. Selain itu, masyarakat usia produktif sudah memasuki usia non produktif yang artinya akan meningkatkan rasio ketergantungan. Sementara itu, ancaman terlampauinya *carrying capacity* kota akibat belum optimalnya pengendalian jumlah penduduk dapat meningkatkan kepadatan penduduk, yang dapat memicu permasalahan lingkungan, sosial, hingga ekonomi.

2.3.1.2 Aspek dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Permasalahan dirumuskan berupa tantangan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Setiap indikator TPB yang diproyeksikan tidak mencapai target nasional dan/atau target global, indikator yang diproyeksikan mencapai target tetapi kecenderungannya tidak

membaik, dan indikator yang belum dilaksanakan sebagaimana hasil analisis pencapaian TPB dilakukan perumusan permasalahan yang menjadi tantangan dalam pencapaiannya. Permasalahan dan tantangan pencapaian indikator TPB dirumuskan sebagaimana pada **Tabel 2.119** berikut.

Tabel 2. 121		
Permasalahan Pelaksanaan dan Pencapaian Indikator TPB di Kota Denpasar		
No	Indikator	Permasalahan/Tantangan
1	Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun	
1.3.1b	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Literasi tentang pentingnya mengikuti Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di kalangan pekerja masih rendah Mereka yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan tidak mengetahui manfaat program jaminan sosial, seperti jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja Sebagian pekerja merasa bahwa penghasilannya tidak cukup untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan ada kebutuhan yang lebih penting. Ketaatan perusahaan untuk mengikutkan pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih rendah
1.3.1d	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial	Akurasi penargetan, fragmentasi program, dan alokasi pengeluaran untuk perlindungan sosial yang rendah atau kurang memadai. Struktur tata kelola terdesentralisasi menimbulkan tantangan dalam mengkoordinasikan dan memberikan layanan perlindungan sosial secara seragam di berbagai wilayah. Belum terintegrasinya bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi
1.4.1c	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS	Perubahan paradigma kependudukan dimana pembatasan jumlah anak kurang menjadi prioritas dalam keluarga.
1.4.1g	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Belum tertibnya batas usia anak minimal 7 tahun memasuki SD/MI/ sederajat sehingga jumlah siswa umur 7-12 tahun di SD/MI/ sederajat lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk umur 7-12 tahun dan bahkan lebih kecil dari jumlah siswa SD/MI/ sederajat.
1.4.1h	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat masih rendah dan cenderung menurun	Belum tertibnya batas usia anak minimal 13 tahun memasuki SMP/MTs/ sederajat sehingga jumlah siswa umur 13-15 tahun di SD/MI/ sederajat lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk umur 13-15 tahun dan bahkan lebih kecil dari jumlah siswa SMP/MTs/ sederajat.
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana	Pembangunan Sistem Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat belum merata Tingkat pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana belum merata
2	Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Masih terdapat keterbatasan akses secara ekonomi bagi sebagian individu/ rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup
2.2.2b	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Kesadaran ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif belum merata Faktor sosial ekonomi dimana tuntutan pekerjaan dan karier menyebabkan ibu tidak mempunyai waktu yang memadai dalam pengasuhan dan menyusui bayi
2.2.2c	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan	Pengetahuan individu/ rumah tangga tentang pola konsumsi dengan energi yang cukup belum merata Tingkat keanekaragaman pangan masih rendah Pemanfaatan sumber pangan lokal semakin menurun Perubahan pola konsumsi mengarah pada kegemaran terhadap makanan instan cenderung meningkat Ketersediaan ikan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat masih terbatas
2.4.1*	Penetapan kawasan pertanian pangan	Pemerintah daerah belum menemukan skema yang tepat tentang insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan

No	Indikator	Permasalahan/Tantangan
	berkelanjutan belum dilaksanakan	Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3	Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	
3.1.1*	Angka Kematian Ibu	Masalah kesehatan yang mempengaruhi proses kehamilan, persalinan maupun masa nifas (penyebab non obstetric) masih dominan, disamping karena perdarahan, hipertensi, dan infeksi Kesadaran gizi ibu hamil masih belum merata Masih ditemukan kasus di mana perempuan yang melahirkan sudah dalam keadaan darurat sehingga tidak tertolong nyawanya. Berbagai faktor risiko yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil yaitu kondisi pada saat hamil ibu mengalami berbagai penyulit seperti hipertensi, perdarahan, anemia, diabetes, infeksi, penyakit jantung dan lain-lain.
3.2.1*	Angka Kematian Balita	Kesadaran gizi ibu hamil masih merata, sebagai salah satu faktor bayi lahir berat badan rendah. Gangguan kesehatan pada balita seperti pneumonia, penyakit bawaan, diare, dan komplikasi neonatal, dan infeksi lainnya
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal	Infeksi dan sepsis yang meningkat pada kelahiran prematur. Masih tingginya kasus asfiksia yaitu suatu kondisi kegagalan pernapasan secara spontan di saat bayi baru lahir atau sesaat setelah lahir.
3.2.2a	Angka Kematian Bayi	Kesadaran gizi ibu hamil masih merata, sebagai salah satu faktor bayi lahir berat badan rendah. Pneumonia, penyakit bawaan, diare, dan komplikasi neonatal Pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya pemberian perawatan antenatal serta perawatan bayi baru lahir belum merata, dan deteksi secara dini masalah kesehatan secara umum yang menyertai kehamilan belum optimal Gangguan kesehatan pada bayi seperti pneumonia dan infeksi lainnya, dan adanya gangguan perinatal yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.
3.3.1a	Angka infeksi baru HIV	Kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS belum merata Kota Denpasar sebagai destinasi pariwisata internasional tergolong rawan terhadap penyebaran HIV
3.3.2a	Insiden Tuberkulosis	Belum optimalnya pelibatan dan kontribusi fasyankes dalam jejaring layanan tuberkulosis dan pelaporan tuberkulosis Indikator tuberkulosis belum menjadi indikator utama dalam penilaian mutu akreditasi di fasyankes Belum optimalnya pelaporan tuberkulosis dari fasyankes khususnya fasyankes swasta.
3.4.1b	Prevalensi tekanan darah tinggi	Perilaku dan pola hidup sehat di kalangan masyarakat belum optimal Tekanan (stress) di kalangan masyarakat cenderung meningkat
3.4.1c	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Perilaku dan pola makan yang tidak sehat Anak-anak kurang bergerak dan olahraga Kebiasaan jajan di luar atau tren makanan dan minuman tinggi kalori
	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba bagi kesehatan belum merata Kota Denpasar sebagai destinasi pariwisata internasional tergolong rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	Perubahan paradigma kependudukan dimana pembatasan jumlah anak kurang menjadi prioritas dalam keluarga. Kampanye keluarga berencana cenderung menurun dan tidak menjadi kebijakan prioritas pemerintah daerah

No	Indikator	Permasalahan/Tantangan
3.7.1a	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS	Perubahan paradigma kependudukan dimana pembatasan jumlah anak kurang menjadi prioritas dalam keluarga. Kampanye keluarga berencana cenderung menurun dan tidak menjadi kebijakan prioritas pemerintah daerah
3.7.1b	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang cara modern	Perubahan paradigma kependudukan dimana pembatasan jumlah anak kurang menjadi prioritas dalam keluarga. Kampanye keluarga berencana cenderung menurun dan tidak menjadi kebijakan prioritas pemerintah daerah
3.8.1a	Unmet need pelayanan Kesehatan	Masih terdapat penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tidak berobat karena faktor biaya berobat, tidak ada biaya transportasi dan tidak ada pendamping berobat
4	Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja pada tingkat akhir SD dan tingkat akhir SMP yang mencapai kemampuan minimum dalam membaca dan matematika	Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis kompetensi belum optimal
4.1.1c	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ sederajat	Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan belum merata Belum tertibnya implementasi persyaratan memasuki SMP/MTs/ sederajat berdasarkan batas usia minimal 13 tahun
4.2.2a	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini masih rendah dan menurun	Pemahaman orang tua tentang pentingnya PAUD sejak umur 3 sampai 6 tahun belum merata Faktor ekonomi yang mempengaruhi kesanggupan memasukkan anak ke PAUD sejak umur 3 sampai 6 tahun
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi	Penduduk umur 5 tahun keatas lebih mementingkan penggunaan gadget daripada komputer Bimbingan orang tua pentingnya penguasaan komputer sejak usia dini belum optimal
4.c.1*	Persentase guru bersertifikat pendidik	Masih tingginya jumlah guru honorer nonsertifikasi pendidikan yang menyebabkan beban pendidikan profesi guru (PPG) semakin besar Input guru bersertifikasi pendidik masih minim dan belum sepenuhnya mengisi kekosongan guru di setiap daerah. Belum terbentuknya ekosistem guru yang profesional dan mandiri di setiap daerah
5	Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan	
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan	Tingginya dilema perempuan saat akan melaporkan kasus kekerasan yang dialami diperburuk dengan relasi kuasa antara perempuan dengan pelaku yang cenderung timpang. Hambatan struktural dimana sejumlah lembaga layanan atau mekanisme pelaporan belum responsif terhadap kasus yang dialami korban atau dilaporkan.
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan	Tingginya dilema perempuan saat akan melaporkan kasus kekerasan yang dialami diperburuk dengan relasi kuasa antara perempuan dengan pelaku yang cenderung timpang. Hambatan struktural dimana sejumlah lembaga layanan atau mekanisme pelaporan belum responsif terhadap kasus yang dialami korban atau dilaporkan.
5.2.2a	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Masih rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan Kurangnya informasi mengenai prosedur atau mekanisme memperoleh layanan komprehensif Kesempatan yang sangat minim bagi perempuan dalam mengungkapkan kekerasan yang dialaminya dalam proses hukum maupun layanan korban Keterbatasan lembaga layanan korban kekerasan
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Partai politik masih kurang aktif mendorong calon legislatif dari kalangan perempuan di anggotanya. Masih kurangnya pendidikan politik bagi perempuan. Belum optimalnya pemberdayaan (<i>empowering</i>) perempuan di bidang elektoral

No	Indikator	Permasalahan/Tantangan
5.6.1a	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Pengetahuan mengenai pemilihan alat kontrasepsi yang cocok dan aman dipakai belum merata. Belum optimalnya pelaksanaan Komunikasi-Informasi-Edukasi, pergerakan dan pendampingan untuk menurunkan angka putus pakai (<i>drop out</i>) kontrasepsi
6	Tujuan 7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, berkelanjutan dan modern bagi semua	
7.1.2a	Infrastruktur jaringan gas untuk rumah tangga belum terbangun	Posisi Bali terletak jauh dari sumber pasokan gas Kurang menariknya skema jaringan mandiri sehingga masih sangat bergantung pada APBN untuk pembangunan infrastrukturnya, sementara kemampuan keuangan pemerintah masih menjadi kendala pengembangan jaringan gas
7.2.1*	Bauran energi terbarukan masih rendah	Kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) masih rendah Sumber EBT mapan sangat terbatas Ketersediaan lahan untuk pengembangan PLTS skala besar terbatas Kebijakan penggunaan energi listrik dari PLTS secara mandiri oleh masyarakat dan industri masih dibatasi
7.3.1*	Intensitas energi primer masih tinggi	Masih tingginya penggunaan energi primer terutama di sektor energi dan transportasi. Penggunaan energi sekunder, seperti energi listrik masih rendah
7	Tujuan 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua	
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	Pendayagunaan potensi ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal belum optimal dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih terbatas, tidak merata, kurang terpadu, dan kurang akselerasi. Ketidakseimbangan struktur ekonomi antarsektor (ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata sangat dominan), sementara integrasi pengembangan produk-produk industri kecil dan kerajinan termasuk industri kreatif ke dalam industri pariwisata belum optimal. Usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dan ekonomi kreatif yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal. Pengembangan industri dan hilirisasi produk-produk pertanian dalam arti luas dan perikanan belum optimal dan kurang didukung dengan penerapan teknologi tepat guna dan inovasi untuk mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah yang produktif dan bernilai tambah tinggi, berdaya saing tinggi dan kompetitif.
8.1.1a	PDRB per kapita	
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	Kurangnya pekerjaan berkualitas yaitu pekerjaan yang produktivitas tenaga kerjanya dari yang menengah sampai tinggi yang disebabkan karena sektor jasa yang lebih mendominasi. Rata-rata tingkat pendidikan angkatan kerja masih rendah Masih rendahnya tingkat keterampilan, penguasaan iptek, dan inovasi
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian	Pertumbuhan angkatan tenaga kerja baru yang lebih tinggi dari ketersediaan lapangan kerja formal Arus migrasi desa-kota yang cukup besar tidak semuanya terserap di sektor formal, mengakibatkan sektor informal lebih dipilih oleh para migran yang tidak dapat masuk ke sektor formal Sektor informal mudah dimasuki oleh banyak orang karena tidak memerlukan tingkat keahlian atau spesifikasi pendidikan yang tinggi dan modal yang diperlukan relatif kecil
8.3.1a	Persentase tenaga kerja formal	Persaingan lapangan kerja formal semakin ketat Penurunan penciptaan lapangan kerja formal karena perubahan struktur ekonomi. Industri manufaktur yang menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja formal, kini mengalami stagnasi. Sebaliknya, sektor jasa yang cenderung lebih informal mengalami pertumbuhan pesat.

No	Indikator	Permasalahan/Tantangan
		<p>Peraturan yang rumit dan biaya tinggi untuk menggaji pekerja formal mendorong perusahaan untuk lebih memilih tenaga kerja kontrak atau outsourcing yang sering kali termasuk dalam kategori informal.</p> <p>Kurangnya keselarasan antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri</p> <p>Era digital juga membawa tantangan tersendiri, banyak pekerjaan formal yang digantikan oleh otomatisasi dan teknologi. Sementara itu, pekerjaan baru yang muncul lebih bersifat sementara dan informal</p>
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	<p>Ketersediaan lapangan pekerjaan kurang merata menurut wilayah</p> <p>Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja</p> <p>Ketidakberhasilan sektor industri karena pola investasi yang ada cenderung padat modal. Hal itu menyebabkan semakin kecil terjadinya penyerapan tenaga kerja</p> <p>Angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja</p> <p>Perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dan pendidikan dari para pencari kerja.</p> <p>Tidak ada kecocokkan upah, karena tidak semua perusahaan mampu dan bersedia mempekerjakan seorang pelamar dengan tingkat upah yang diminta pelamar.</p> <p>Tidak memiliki kemauan wirausaha.</p> <p>Masih terdapat orang yang tidak punya kemauan kerja dan memiliki kemauan wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja.</p>
8.5.2a	Tingkat pengangguran setengah	<p>Seseorang bekerja tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya</p> <p>Terbatasnya permintaan pekerjaan di pasar tenaga kerja.</p> <p>Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ketidakstabilan ekonomi sehingga perusahaan cenderung mengurangi mengurangi jam kerja. Akibatnya, pekerja yang masih bekerja di perusahaan tersebut akan mengalami setengah menganggur.</p> <p>Peningkatan otomatisasi dan penggunaan mesin dalam proses produksi sehingga mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Hal ini mengakibatkan sebagian pekerja hanya bekerja dalam kapasitas yang lebih rendah</p> <p>Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang relevan atau tidak memiliki pendidikan yang memadai, mereka dapat mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Akibatnya, mereka hanya mendapatkan pekerjaan dengan kapasitas yang lebih rendah dari yang sebenarnya</p>
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	<p>Terbatasnya lapangan pekerjaan bagi penduduk usia muda yang tidak sekolah atau baru menamatkan pendidikan menengah dan perguruan tinggi</p> <p>Belum sinkronnya dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja sehingga Sebagian penduduk usia muda yang baru menyelesaikan pendidikan tidak dapat langsung memasuki dunia kerja</p> <p>Terbatasnya akses terhadap pelatihan tenaga kerja</p>
8.8.1a	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	<p>Komitmen penerapan kebijakan K3 pada perusahaan masih rendah</p> <p>Kurang optimalnya dukungan dari pemerintah dalam penerapan K3 pada perusahaan</p>
8	Tujuan 9. Membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	
9.1.1a	Kondisi kemantapan jalan kota	<p>Pemeliharaan jalan belum optimal</p> <p>Sistem drainase jalan yang tidak baik</p>

No	Indikator	Permasalahan/Tantangan
		Peningkatan beban yang melebihi beban rencana sehingga umur rencana jalan tidak tercapai
9.1.2*	Jumlah penumpang transportasi umum	Ketertarikan penggunaan transportasi umum masih rendah Moda transportasi publik beserta rutenya masih terbatas
9.2.1*	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB masih rendah	Penumbuhan industri baru masih rendah Pengembangan industri dan hilirisasi produk-produk pertanian dalam arti luas dan perikanan belum optimal Produktivitas industri pengolahan masih rendah
9.2.1a	Laju pertumbuhan industri pengolahan masih rendah dan cenderung menurun	Sentra-sentra IKM belum terbina secara optimal Akses permodalan usaha bagi IKM masih terbatas Integrasi pengembangan produk-produk industri kecil dan kerajinan ke dalam industri pariwisata belum optimal
9.2.1b	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri masih rendah	Penerapan teknologi tepat guna dan inovasi untuk mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah belum optimal Daya saing produk-produk industri kecil masih rendah sehingga tidak kompetitif
9	Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	
17.1.1*	Total pendapatan daerah sebagai proporsi terhadap PDRB masih rendah dan cenderung menurun	Potensi pendapatan daerah termasuk pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi) belum tergali secara optimal karena kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan dan potensi daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang relatif rendah, masih ada kelemahan pada sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, serta kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya.
17.1.1a	Rasio penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB masih rendah dan cenderung menurun	
10	Tujuan 6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	
6.1.1a	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum perpipaan	Kapasitas penyediaan air bersih melalui perpipaan masih terbatas dan belum merata Masih tingginya kebocoran air dalam distribusi Pengembangan jaringan perpipaan lebih lambat dari pertambahan rumah tangga Eksternalitas negatif pariwisata dalam penyediaan air publik (<i>public water supply</i>)
6.1.1b	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri	Sumber air baku dari air permukaan sangat terbatas Tingginya biaya pemeliharaan dan operasional prasarana air baku karena masih lemahnya manajemen pengolahan air dan distribusi air
6.2.1f	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Jaringan pelayanan sistem pengelolaan air limbah terpusat (DSDP) masih terbatas Pada wilayah yang tersedia jaringan, peningkatan jumlah sambungan rumah layanan IPAL masih kecil karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan sistem pengelolaan air limbah terpusat.
6.3.2a	Kualitas air permukaan sebagai sumber air baku berdasarkan baku mutu air kelas II	Meningkatnya beban pencemaran sumber-sumber air permukaan yang berasal dari kegiatan domestik, industri, dan pertanian
6.4.1b	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri belum dilaksanakan	Komitmen pemerintah dalam memberikan insentif untuk penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri belum menjadi prioritas
11	Tujuan 11. Mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	
11.2.1a	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Ketertarikan penggunaan transportasi umum masih rendah Moda transportasi publik beserta rutenya masih terbatas
11.5.2a	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Pembangunan Sistem Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat belum merata Tingkat pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana belum merata Penerapan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan belum optimal
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Pemerintah daerah belum memprioritaskan penyediaan dukungan kebijakan dan regulasi daerah tentang penanggulangan bencana yang selaras dengan strategi

No	Indikator	Permasalahan/Tantangan
		penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana nasional
12	Tujuan 12. Menjamin konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	
12.4.2a	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan	Sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 belum tersedia memadai Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah B3 Lemahnya monitoring dan pembinaan pengelolaan limbah B3 terhadap usaha/ kegiatan yang memperoleh izin lingkungan
12.5.1a	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber di desa/kelurahan dan desa adat belum efektif Daur ulang sampah secara produktif belum terbangun termasuk fasilitas TPS-3R belum merata Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum merata sementara timbulan sampah semakin meningkat Kesadaran masyarakat dan pelaku industri dalam pengelolaan sampah belum merata Pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai belum optimal dan merata Kampanye pengelolaan sampah kurang merata di seluruh masyarakat
12.6.1a	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Kesadaran kalangan pelaku usaha tentang pentingnya penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 dalam sistem manajemen lingkungan masih rendah Sosialisasi tentang pentingnya penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 dalam sistem manajemen lingkungan belum optimal
12.7.1a	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Kesadaran masyarakat dan kalangan pelaku usaha tentang pentingnya penggunaan produk ramah lingkungan yang terregister masih rendah Sosialisasi tentang pentingnya penggunaan produk ramah lingkungan yang terregister belum optimal
12.8.1a	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Pemahaman pejabat publik tentang pentingnya penerapan Standar Pelayanan Masyarakat dan teregister masih rendah
13	Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	Pembangunan Sistem Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat belum merata Tingkat pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana belum merata Penerapan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan belum optimal
14	Tujuan 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya maritim, laut, dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan	
14.4.1*	Produksi Perikanan Tangkap	Pelaku usaha perikanan tangkap cenderung menurun Fenomena global dimana telah terjadi penurunan stok ikan di alam Input produksi (bahan bakar dan logistik) dalam industri perikanan tangkap semakin tinggi
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/kebijakan/regulasi/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk nelayan skala kecil	Pentingnya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan skala kecil yang diwujudkan dalam regulasi daerah belum menjadi prioritas daerah
14.b.1b	Jumlah nelayan yang terlindungi	Belum tersedianya kerangka kebijakan dan regulasi di daerah bagi perlindungan nelayan secara komprehensif Pengetahuan nelayan tentang pentingnya mendapatkan/memiliki KUSUKA belum merata
15	Tujuan 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	
15.1.1a	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	Keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan hutan Tingginya alih fungsi lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun karena meningkatnya kebutuhan lahan seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi

No	Indikator	Permasalahan/Tantangan
15.9.1a	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Penyusunan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati belum menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan program pengelolaan keanekaragaman hayati
16	Tujuan 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	
16.1.1a	Jumlah kasus kejahatan	Kota Denpasar sebagai sasaran urbanisasi menghadapi dinamika sosial dan kependudukan yang tinggi, diantaranya memunculkan tindak kriminal. Kesadaran hukum di kalangan masyarakat belum merata Ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi sering kali menjadi pemicu terjadinya tindak kriminalitas Kurangnya pendidikan sehingga seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai atau layak yang dapat menyebabkan frustrasi dan keputusan yang pada akhirnya mendorong individu untuk terlibat dalam tindak kriminalitas. Sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat cenderung melemah. Lingkungan yang tidak aman dan tidak terawat sering kali menjadi tempat berkembangnya kegiatan kriminal Pengaruh media yang kuat dalam membentuk pandangan dan perilaku masyarakat. Konten-konten yang mengandung kekerasan, pornografi, atau kejahatan dapat mempengaruhi perilaku individu, terutama remaja yang rentan terhadap pengaruh luar.
16.2.1a	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh	Masih adanya anggapan yang membenarkan pola asuh dengan kekerasan Adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dimana anak menjadi korbannya Kurangnya kepedulian masyarakat saat ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan orangtuanya
16.2.1b	Kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan cenderung meningkat	Ketidakharmonisan hubungan di rumah, hubungan di dunia pendidikan, dan hubungan di lingkungan sekitar tempat tinggal cenderung meningkat Buruknya komunikasi antar orangtua disinyalir berperan besar terhadap ada atau tidaknya kekerasan terhadap anak Faktor ekonomi juga berperan besar dalam keharmonisan rumah tangga. Bila ekonomi terganggu, maka ada kemungkinan anak-anak yang menjadi pelampiasan. Permainan atau gambar juga turut memiliki andil besar dalam kekerasan terhadap anak.
16.2.3a	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Meningkatnya penyalahgunaan relasi di keluarga dan sekolah yang menyebabkan anak mengalami kekerasan seksual Penyalahgunaan informasi dan teknologi yang dapat memicu meningkatnya kekerasan seksual pada anak
16.9.1a	Kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah masih rendah	Pendataan kepemilikan akta lahir oleh Perangkat Daerah terkait belum memilah untuk penduduk 40% berpendapatan bawah masih rendah

Sumber: Bappeda Kota Denpasar, 2024

2.3.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan suatu daerah. Kesejahteraan masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dari sisi ekonomi, secara umum PDRB Kota Denpasar sudah berada di atas rata-rata PDRB Provinsi Bali dan PDRB nasional pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi sektor lapangan usaha sudah cukup baik terhadap nilai PDRB di Kota Denpasar. Hal tersebut harus dipertahankan supaya kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi dapat tetap terjaga dan berkelanjutan.

Dari sisi sosial, Indeks Pembangunan Manusia yang dimiliki oleh Kota Denpasar secara garis besar sudah berada di atas rata-rata Provinsi Bali. Hal tersebut juga didukung dengan rata-rata lama sekolah Kota Denpasar yang memiliki nilai jauh lebih tinggi dari rata-rata lama sekolah Provinsi Bali dan Nasional pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal ini harus diperhatikan karena pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapasitas untuk berdaya saing.

2.3.1.4 Aspek Daya Saing

Daya saing menunjukkan kemampuan Kota Denpasar dalam bersaing dengan daerah lainnya. Dari sisi ekonomi, Kota Denpasar menghadapi masalah terkait ketidakstabilan ekonomi makro, terbatasnya akses pasar, kurang memadainya alokasi sumber daya, belum optimalnya pemanfaatan kontribusi perdagangan (ekspor dan impor) terhadap peningkatan pendapatan daerah, dan belum optimalnya perbaikan faktor-faktor ekonomi makro dan mikro. Dari sisi sumber daya manusia, kurang tersedianya tenaga kerja yang terampil dan kurangnya kualitas kesehatan masyarakat menurunkan daya saing Kota Denpasar. Dari sisi fasilitas/infrastruktur wilayah, penyediaan layanan infrastruktur masih belum optimal di Kota Denpasar. Dari sisi iklim investasi, daya saing Kota Denpasar pun relatif rendah karena kurangnya investasi untuk infrastruktur dan pelatihan keterampilan serta tingginya angka kriminalitas yang menurunkan kunjungan wisata, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3.1.5 Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pelayanan umum berkaitan erat dengan penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan berpengaruh besar dalam pelayanan umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap masalah yang dihadapi sebagaimana tercantum pada **Tabel 2.122** yang diuraikan menurut bidang urusan pemerintahan.

Tabel 2. 122
Permasalahan Pelayanan Umum Kota Denpasar

No	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
Aspek Geografi			
1	Geografi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat ancaman bencana banjir tahunan • Terdapat potensi tsunami dan gempa bumi dalam kategori bahaya • Belum optimalnya upaya mitigasi risiko bencana 	Terdapat potensi ancaman bencana
Aspek Demografi			
1	Demografi	Ancaman terlampauinya <i>carrying capacity</i> kota akibat belum optimalnya pengendalian jumlah penduduk	Kegagalan pemanfaatan bonus demografi
Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan fiskal yang masih memiliki ketergantungan yang lebih besar pada sumber anggaran pusat dibandingkan anggaran daerah • Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) selalu berada di bawah 50% 	Belum optimalnya kapasitas keuangan pemerintah daerah
		<ul style="list-style-type: none"> • SDM di usia produktif belum optimal membangun ekosistem ekonomi kreatif yang disebabkan terbatasnya sumber daya lainnya • Ketimpangan kontribusi sektor-sektor yang membentuk PDRB 	Perlambatan pertumbuhan ekonomi
		<ul style="list-style-type: none"> • Ketidaksetaraan dalam kualitas tenaga kerja dapat menghasilkan ketimpangan upah dan pendapatan • Ketimpangan kesempatan pekerjaan yang memengaruhi distribusi pendapatan • Kebijakan ekonomi dan sosial yang belum optimal mengatasi ketidaksetaraan dan mengedepankan keadilan sosial • Pembangunan infrastruktur yang belum merata dalam memberikan masyarakat akses yang memadai ke fasilitas dan peluang ekonomi • Belum optimalnya penggunaan teknologi dan informasi dalam mendukung kegiatan-kegiatan perekonomian 	Tingginya ketimpangan pendapatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah penduduk miskin • Tekanan biaya hidup yang semakin tinggi • Terdapat ketimpangan pendapatan • Belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar baik secara kuantitas maupun kualitas 	Kesejahteraan Sosial Belum Optimal

No	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
2	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata lama sekolah Kota Denpasar ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakatnya berpotensi tidak dapat bersaing di dunia kerja karena tidak memiliki keahlian dan kompetensi yang diharapkan, serta tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan 	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kualitas pendidikan
3	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran masyarakat terkait gaya hidup sehat Kurangnya paham literasi masyarakat terkait kesehatan mengenai berbagai layanan dan upaya peningkatan kualitas kesehatan 	Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan
		<ul style="list-style-type: none"> Ancaman penyakit stunting dan angka kematian ibu dan/atau bayi Ancaman penyakit menular seperti HIV/AIDS Ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti covid dan virus lainnya 	Terdapat ancaman berbagai penyakit menular dan tidak menular
4	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi Bali dan selalu lebih rendah dibandingkan capaian rata-rata Provinsi Bali Keterampilan tenaga kerja terbatas dan belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri, mengakibatkan kualitas angkatan kerja menjadi tidak optimal Ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia 	Rendahnya partisipasi angkatan kerja dan tingginya angka pengangguran terbuka
		<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kualitas sumber daya manusia Rendahnya kualitas kesempatan kerja Belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan 	Rendahnya produktivitas tenaga kerja
		<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya penduduk usia produktif atau jumlah angkatan kerja Meningkatnya angka penduduk usia lanjut 	Ancaman Penurunan Angkatan Kerja pada Masa Mendatang
5	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Lemahnya hukum karena rendahnya kualitas kelembagaan Kurangnya data terkait kesenian dan pelaku seni Belum optimalnya pengembangan potensi budaya Belum optimalnya pemberdayaan lembaga-lembaga tradisional 	Belum optimalnya pengelolaan warisan budaya
6	Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan 	Belum optimalnya pengelolaan kepemudaan dan keolahragaan
Aspek Pelayanan Umum: Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar			
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan 	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana,

No	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> Tidak meratanya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar kompetensinya 	prasarana, dan SDM pengajar kependidikan
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Belum meratanya keahlian kompetisi SDM Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan Tingginya kejadian penyakit menular dan tidak menular Belum optimalnya kesehatan keluarga Belum optimalnya kualitas pelayanan dan pemerataan kuantitas kesehatan Beberapa indikator Kinerja SPM Bidang kesehatan belum tercapai 	Belum optimalnya kualitas SDM dan layanan kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya jalan kondisi baik Belum optimalnya kesiapan pelaku jasa konstruksi yang berdaya saing dan tertib penyelenggaraan konstruksi Belum optimalnya bangunan gedung dan prasarana yang memenuhi standar teknis 	Belum optimalnya kondisi jalan, kesiapan jasa konstruksi, dan bangunan gedung
		<ul style="list-style-type: none"> Kondisi pelayanan air minum layak perpipaan di Kota Denpasar baru mencapai 47 persen. Kurangnya investasi dalam infrastruktur air minum perpipaan, sehingga jangkauan layanan belum menjangkau seluruh wilayah secara penuh Kurangnya pemeliharaan infrastruktur air minum perpipaan menyebabkan penurunan kualitas dan efisiensi sistem perpipaan dalam pelayanan air minum layak perpipaan 	Belum optimalnya kualitas pelayanan air minum layak perpipaan
		<ul style="list-style-type: none"> Kondisi penyediaan akses air minum untuk rumah tangga belum optimal dan belum menyeluruh. Krisis air bersih pada kawasan pesisir. Terjadinya eksploitasi air bawah tanah dan pencemaran air laut oleh sampah turut menyebabkan penurunan kualitas air pada kawasan pesisir. 	Belum optimalnya penyediaan air bersih
			Belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana sumber daya air
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase drainase dalam kondisi baik atau tidak tersumbat belum mencapai 100 persen Kapasitas drainase yang tidak memadai untuk menampung volume air ketika curah hujan tinggi (Sumber: RP2P Kota Denpasar 2025-2029)) Kurangnya pemeliharaan saluran drainase dari endapan sampah/lumpur sehingga menyebabkan sedimentasi dan penyempitan saluran air terutama pada sistem drainase utama (Tukat Badung, Tukad Mati, Tukad Niti Mandala, Tukad Pamongan, dan Tukad Ayung). (Sumber: RP2P Kota Denpasar 2025-2029) 	Belum optimalnya kondisi drainase perkotaan

No	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> • Penataan sistem drainase yang kurang baik • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan drainase 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi yang layak disebabkan minimnya pengetahuan kepala keluarga terkait sanitasi yang baik. 	Belum optimalnya kondisi sanitasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat alih fungsi lahan perkotaan yang dinamis (lahan hijau menjadi permukiman dan bangunan komersial) • Ketersediaan RTH berada dibawah jumlah standar minimal yang ditetapkan (20% dari total luas kota) • Kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan RTH publik • Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana pola ruang 	Belum tercapainya target ketersediaan RTH publik
		Belum meratanya persebaran pusat ekonomi	Tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya lahan dan tingginya harga lahan di Kota Denpasar • Minimnya dana bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Kota Denpasar • Minimnya data rumah sehat dan layak huni yang terupdate • Masih terdapatnya kawasan kumuh di Kota Denpasar • Luasnya kawasan permukiman kumuh di lahan sewa yang dibangun penyewa 	Belum tercapainya target permukiman kumuh sebesar 0 persen
		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya data kuantitas dan kualitas PSU di Kota Denpasar • Belum optimalnya pengelolaan taman-taman dan sarana sosial budaya • Belum ada koordinasi mekanisme untuk penyerahan fasos dan fasum 	Belum optimalnya pengelolaan PSU di Perumahan
		<ul style="list-style-type: none"> • Kurang efektifnya tindakan penegakan Perda yang secara teratur dilakukan oleh Satpol PP • Belum adanya sistem informasi Perda terintegrasi antar perangkat daerah, jumlah dan kualitas penegak Perda yang masih kurang seperti Satpol PP dan Linmas • Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang masih kurang • Kurangnya SDM dalam penegakan Perda secara kuantitas dan kualitas maupun secara wawasan dan keterampilan 	Belum optimalnya penanganan pelanggaran perda
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang tidak bertanggung jawab (hoax) • Belum optimalnya pemerintah daerah dalam mengondisikan kunjungan wisatawan asing dan pendatang • Kurangnya SDM dalam menangani pelanggaran atau gangguan dikarenakan kurang optimalnya pembinaan dan manajemen SDM di lingkungan Satpol PP" 	Belum optimalnya penanganan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

No	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan bencana lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana • Belum optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana • Kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencegahan mengurangi resiko bencana • Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga peranan pemerintah lebih dominan dalam penanganan kebencanaan. • Aspek sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas masih kurang memadai 	Belum optimalnya penanggulangan bencana
6	Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang politik, sehingga peranan pemerintah lebih dominan • Kurangnya pendidikan politik • Media informasi politik yang kurang seimbang dan mendidik • Transparansi pemerintah, budaya politik identitas atau sentimen etnis yang membuat partisipasi politik masyarakat lebih emosional daripada rasional • Kurangnya ruang partisipasi yang memadai bagi masyarakat • Ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada • Kurangnya literasi politik dan informasi yang tidak seimbang dapat membuat masyarakat kurang tertarik atau mampu untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik 	Belum optimalnya partisipasi politik
		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu dan berita hoax • Masyarakat pendatang yang tidak dibekali keterampilan dan pengetahuan budaya • Kurangnya pendidikan dan manajemen SDM di lingkungan Badan Kesbangpol • Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penertiban dan penanganan kriminalitas maupun yang berujung pada konflik sosial dan SARA 	Belum optimalnya penanganan konflik sosial dan SARA serta kriminalitas
7	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat ancaman terkait kemiskinan, baik itu struktural ataupun budaya • Terdapat kasus masyarakat yang menutupi kepemilikan materi agar dapat dikategorikan sebagai PPKS • Belum optimalnya pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait PPKS • Meningkatnya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) tiap tahunnya • Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta scarring effect akibat pandemi Covid-19 	Kualitas pencegahan dan pelaksanaan penanganan permasalahan sosial belum optimal
Aspek Pelayanan Umum: Fokus Layanan Urusan Wajib Nondasar			

No	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
1	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelatihan bagi tenaga kerja • Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengangguran • Lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) masih banyak yang belum terakreditasi 	Kompetensi dan Sertifikasi SDM Rendah
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya layanan publik dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja di sektor yang sesuai dengan kompetensinya • Rendahnya kerja sama antara sektor pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menghambat penempatan kerja secara efisien • Terbatasnya akses terhadap informasi tentang peluang kerja dan persyaratan yang diperlukan • Melambatnya pertumbuhan ekonomi dan usaha baru • Rendahnya penyerapan tenaga kerja 	Penyerapan Tenaga Kerja Belum Ideal
		<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpastian pemberian jaminan hak dan perlindungan tenaga kerja karena rendahnya pemahaman aturan ketenagakerjaan • Sistem pengelolaan tenaga kerja yang masih terbatas seperti pendataan ketenagakerjaan dan pemantauan/pengawasan 	Belum optimalnya jaminan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya angka pengangguran • Kurangnya kesadaran pencari kerja atas manfaat pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja dan melapor kembali ke Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar setelah diterima bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah • Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi dan bersertifikasi • Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya <i>mismatch</i> antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri 	Tingginya angka pengangguran Kota Denpasar dibandingkan Provinsi Bali
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi dan partisipasi perempuan cenderung rendah • Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar tertinggi hanya menyentuh 67,21 pada tahun 2022 (di bawah provinsi (72,29 pada tahun 2022) dan nasional (76,59 pada tahun 2022) • Kurang optimalnya peran Kelembagaan PUG dalam pelaksanaan 	Belum optimalnya kesetaraan gender
		<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Denpasar pada tahun 2022 hanya menyentuh angka 52,94% • Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2022 juga menunjukkan nilai 28,05% setelah mengalami penurunan dari tahun 2021 (37,40%) • Rendahnya pelaporan secara langsung oleh masyarakat karena rasa takut akibat tidak adanya peraturan yang ditegakkan 	Belum Optimalnya penegakan penanganan kasus kekerasan

No	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman masyarakat terkait teknis penanganan akibat kurangnya sosialisasi dan penanganan untuk meningkatkan rasa aman Kurang optimalnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran Responsif Gender di Kota Denpasar Belum tersedianya data terpilah <p>Rendahnya partisipasi perempuan dalam mengemukakan pendapat, kepemimpinan dan peran perempuan dalam jabatan politik dan publik serta keterwakilan perempuan di lembaga legislatif</p>	
3	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan makanan yang cukup dan bergizi bagi penduduk Pasokan pangan cenderung rendah karena keterbatasan lahan pertanian, ada alih fungsi lahan, kesuburan tanah menurun perubahan iklim, sarana prasarana belum optimal, permodelan petani terbatas, minat anak muda untuk bertani sangat kurang, ketersediaan air menurun, dan masalah rantai pasokan pangan Harga pangan tidak stabil yang memengaruhi aksesibilitas pangan bagi masyarakat Rendahnya cadangan pangan karena kebijakan dan intervensi pemerintah yang belum memadai, terutama dalam hal penyediaan pangan 	Ketahanan Pangan belum Stabil
		<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya tingkat inovasi dalam pengolahan pangan dan kurangnya upaya dalam meningkatkan kualitas produk pangan Keamanan mutu pangan yang masih rendah Rendahnya kualitas pangan yang berkaitan dengan faktor-faktor seperti ketidakpatuhan terhadap standar keamanan pangan, penanganan dan penyimpanan yang kurang tepat, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian mutu Rendahnya ketersediaan fasilitas dan perkembangan dalam pengolahan pangan Kurangnya investasi dalam fasilitas pengolahan pangan Mutu dan keamanan pangan belum memenuhi standar Penanganan panen dan pasca panen belum optimal Fluktuasi harga Akses pasar lemah 	Mutu Pangan belum Optimal
		<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kelembagaan Petani Belum optimalnya kualitas SDM Petani dan Petugas (Kemampuan dan ketrampilan SDM pertanian (petani dan penyuluh) masih kurang). Belum optimalnya kelembagaan penyuluh Belum Optimalnya koordinasi dengan instansi/Stakeholder terkait Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan PD 	Belum optimalnya sistem penunjang pertanian

No	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
4	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan pertanahan dan aset daerah yang masih terbatas (ketidakjelasan status kepemilikan, konflik tanah, perbedaan regulasi) • Kurangnya optimalnya koordinasi antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar dengan BPN dan BPKD mengenai pendataan pertanahan dan aset daerah • Belum optimalnya pemanfaatan dan penggunaan tanah kosong aset daerah • Dapat timbul ancaman seperti ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah, batas-batas, dan legalitas kepemilikan, pencurian aset publik, tertundanya pembangunan infrastruktur, pengembangan lahan yang tidak terkendali, bahkan ketidakstabilan ekonomi dan investasi serta kerusakan lingkungan 	Belum Optimalnya Tata Kelola Pertanahan dan Aset Daerah
5	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas lingkungan hidup yang kurang baik (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Denpasar yang termasuk dalam kategori “Kurang Baik” dan masih berada di bawah level nasional) • Kualitas air yang buruk ditandai dengan Indeks Kualitas Air yang tergolong “Waspada”, disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan mutu air dan pengelolaan air limbah • Kualitas tutupan lahan yang menurun ditandai dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang terus menurun disebabkan oleh pesatnya pembangunan yang mengancam peruntukan lahan konservasi dan rehabilitasi • Belum optimalnya sosialisasi dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat 	Belum optimalnya pengawasan pencemaran lingkungan hidup
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelayanan limbah domestik/rumah tangga dan pengelolaan limbah cair • Kurangnya jaringan perpipaan dalam mengimbangi kebutuhan yang timbul dari pertumbuhan populasi penduduk • Keterbatasan sumber daya anggaran dalam mengakomodasi perubahan atau pertumbuhan yang tidak terduga dari pola permukiman yang ada • Terbatasnya area pelayanan pengelolaan limbah cair oleh DSDP karena kurang optimalnya sumber daya dalam perencanaan dan koordinasi • Peningkatan jumlah timbulan sampah dan limbah B3 	Pengelolaan Limbah yang Belum Optimal
		<ul style="list-style-type: none"> • Tutupnya TPA Suwung karena kelebihan kapasitas • Belum optimalnya penanganan pengelolaan sampah melalui TPS 3R dan TPST • Rendahnya swakelola sampah dan daur ulang sampah dari tingkat lingkungan • Kurangnya sarana pengangkutan sampah yang dimiliki, kurangnya petugas kebersihan, dan (adanya lahan/tanah untuk digunakan sebagai Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)) 	Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Sampah
		<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri 	Terjadinya degradasi lingkungan

No	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk pendatang (migran) yang masuk di Kota Denpasar menimbulkan berbagai permasalahan pendataan kependudukan non-Kota Denpasar baik itu WNI dan WNA yang menetap non permanen (hasil FGD) Masih rendahnya penduduk Kota Denpasar untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan Masih rendahnya pemahaman penduduk Kota Denpasar terhadap manfaat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari segi kompetensi maupun kuantitas merupakan kendala dalam upaya menuju pelayanan prima kependudukan. 	Migrasi Penduduk tidak Terkendali
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga Belum optimalnya kualitas dan kapabilitas pelayanan pemerintah desa Menurunnya swadaya masyarakat dan keaktifan operasional badan usaha milik desa Belum tersinerginya gerakan pemberdayaan masyarakat antar hierarki pemerintahan 	Kurangnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya peran serta lembaga dalam program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga Rendahnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (menurunnya rasio akseptor KB) Terbatasnya jumlah pengelolaan pusat pelayanan keluarga sejahtera 	Belum optimalnya pengendalian penduduk
9	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya persentase layanan angkutan darat Meningkatnya rasio kepemilikan kendaraan pribadi Adanya kemacetan akibat hambatan di ruas jalan serta lalu lintas regional yang berkumpul melewati Kota Denpasar Adanya ketidakseimbangan spasial dan rute yang memengaruhi jumlah armada dan frekuensi operasi angkutan umum darat Kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur (terminal dan halte) dan tarif angkutan umum Belum terintegrasinya antar sektor transportasi umum 	Belum optimalnya pelayanan angkutan umum darat
		<ul style="list-style-type: none"> Angka pelanggaran lalu lintas yang masih tinggi Kesadaran masyarakat berlalu lintas yang tertib masih rendah 	Meningkatnya angka kecelakaan berkendara
		<ul style="list-style-type: none"> Arus penumpang angkutan laut mengalami fluktuasi Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung, yaitu pelabuhan/dermaga pelayaran dan pengumpan lokal, termasuk kualitas pelayanannya Kurang terdatanya kapasitas dan permintaan sehingga ketersediaan armada laut tidak sesuai dengan kebutuhan 	Belum optimalnya pelayanan angkutan umum laut

No	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya ruas jalan yang rusak Kurang tersedianya perlengkapan jalan Kurangnya pemeliharaan rutin jalan Tingginya penggunaan jalan oleh kendaraan berat Tidak memadainya desain jalan dengan beban lalu lintas Kurangnya pengelolaan lalu lintas sehingga terdapat keausan dan kerusakan struktural 	Rendahnya kualitas jaringan jalan
10	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Kurang terintegrasinya Portal Satu Data Kurangnya peran serta perangkat daerah dalam menyetorkan data Kurang tersedianya data dan informasi publik yang berkualitas Kurangnya personel yang berkompeten di bidang teknologi informasi Rendahnya kualitas layanan komunikasi dan informasi Kurangnya investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi 	Belum optimalnya transformasi digital dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> Adanya koperasi yang tidak aktif Terbatasnya perkembangan koperasi berbasis pertanian, pariwisata, dan UMKM Terbatasnya akses pasar, bantuan modal, dan pengolahan produk UMKM Kurangnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya pelaku koperasi dan UMKM Terbatasnya jumlah dan kualitas lembaga pengembangan bisnis 	Rendahnya kualitas dan daya saing koperasi, usaha kecil, dan menengah
12	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya peta dan informasi potensi serta rencana induk investasi yang jelas Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal serta penilai teknis bangunan dan usaha Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung layanan Kurang tertibnya administrasi perizinan Rumitnya birokrasi perizinan Kurangnya inovasi terhadap promosi wisata pasca pandemi 	Belum optimalnya percepatan realisasi investasi daerah
13	Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Kurangnya dukungan sarana prasarana dan pembinaan olahraga Belum optimalnya sinergitas pemerintah, pengusaha, dan masyarakat 	Rendahnya dukungan terhadap kepemudaan dan olahraga
14	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya peran serta perangkat daerah untuk memasukkan data ke sistem data terintegrasi karena keterbatasan jumlah personel yang berkompeten di bidang teknologi informasi 	Belum optimalnya ketersediaan data terintegrasi
15	Persandian	<ul style="list-style-type: none"> Belum terjaminnya keamanan data Sedikitnya jumlah personel yang terampil di bidang persandian 	Lemahnya penyelenggaraan persandian

No	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya koordinasi dengan Pemerintah dalam pengelolaan persandian 	
16	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemanfaatan dan dokumentasi metadata kesenian dan warisan budaya Kurangnya kesadaran, kerja sama, dan kolaborasi berbagai pihak dalam pelestarian budaya Belum optimalnya pelestarian naskah kuno dan bahan pustaka kunci Kurang optimalnya pemanfaatan potensi budaya subak Kurangnya promosi budaya lokal ke luar daerah dan luar negeri dalam rangka penguatan budaya lokal dan peningkatan wawasan Kurangnya pengakuan terhadap pelaku seni 	Belum optimalnya pelestarian dan promosi budaya
17	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> Sedikitnya kunjungan perpustakaan Kurang tersedianya sarana prasarana kearsipan Rendahnya minat dan budaya baca masyarakat Kurangnya minat dan pemahaman aparat untuk menjadi pustakawan Terbatasnya ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan kearsipan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi perpustakaan 	Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan
18	Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya jumlah sumber daya manusia pengelola arsip Kurang tersedianya sarana prasarana kearsipan Kurangnya minat dan pemahaman aparat untuk menjadi arsiparis Terbatasnya ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan kearsipan Belum optimalnya perencanaan dan manajemen kearsipan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arsip 	Belum optimalnya pengelolaan arsip
Aspek Pelayanan Umum: Fokus Layanan Urusan Pilihan			
1	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kualitas sarana prasarana pendukung dan sistem pengelolaan kepariwisataan Belum memadainya sistem informasi wisata Kurangnya pembinaan dan kemitraan terhadap pelaku usaha wisata Kurangnya peran serta masyarakat, lembaga tradisional, dan lembaga nonpemerintah Belum optimalnya pengembangan industri pariwisata Rumitnya birokrasi perizinan usaha industri wisata Belum optimalnya pelaksanaan <i>event</i> pariwisata Belum optimalnya pengembangan dan pemasaran destinasi wisata, terutama berbasis teknologi informasi Kurangnya destinasi wisata baru Belum optimalnya pengembangan <i>green tourism</i> (natural dan ramah lingkungan) 	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata

No	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya forum komunitas wisata • Rendahnya pengawasan kepatuhan pelaku usaha yang melaksanakan standar usaha risiko rendah • Kurangnya kapasitas dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata 	
2	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya akses modal dan pemasaran produk pertanian • Kurangnya jumlah dan mutu produk pertanian dan hasil olahannya • Adanya fluktuasi harga • Kurangnya penerapan teknologi pertanian • Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pendukung • Belum optimalnya pembinaan kelompok tani • Menurunnya luas dan kesuburan lahan tanam akibat alih fungsi lahan • Adanya dampak perubahan iklim • Belum optimalnya penanganan panen dan pascapanen • Belum optimalnya kelembagaan petani dan penyuluh • Kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait • Kurangnya kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian 	Rendahnya daya saing produk pertanian dan hasil olahannya
3	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Lambatnya pertumbuhan bisnis dan produksi • Rendahnya kualitas pelaku usaha dalam manajemen perusahaan dan mengelola keuangan • Rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendukung, seperti gudang, akses kredit, dan pinjaman modal • Belum optimalnya jejaring pemasaran • Belum terpenuhinya standardisasi saran distribusi perdagangan dan peningkatan nilai ekspor • Belum optimalnya pengawasan kepatuhan terhadap peraturan • Kurangnya koordinasi pengendalian harga bahan pokok 	Rendahnya daya saing perdagangan
4	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya inovasi dan kreasi produk, minimnya kerja sama, terbatasnya akses pasar, dan kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha industri • Kurangnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia di bidang industri • Kurangnya koordinasi antar instansi dalam pembinaan mutu, promosi, kerja sama, dan kemitraan terhadap pelaku usaha industri • Belum optimalnya penyelenggaraan sistem informasi industri nasional • Belum optimalnya pembinaan industri untuk produk unggulan dan potensi ekspor 	Rendahnya daya saing industri kecil menengah

No	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
5	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemberdayaan serta pemberian bantuan modal dan bibit unggul untuk kelompok nelayan dan pembudidaya ikan dari sisi jumlah dan distribusi Kurangnya kualitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya, terutama di lahan sempit Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan para nelayan dan pembudidaya ikan Terbatasnya akses para nelayan dan pembudidaya ikan ke pasar Kurangnya penyediaan sarana prasarana produksi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan Kurangnya penyerapan, penerapan, dan akses teknologi perikanan Perlunya penanggulangan kemiskinan pekerja sektor perikanan dan masyarakat pesisir lainnya 	Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya perikanan
Aspek Pelayanan Umum: Fokus Layanan Urusan Penunjang			
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Kurang selarasnya rencana pembangunan dengan penganggaran Belum optimalnya penjabaran konsistensi program di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 	Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan
2	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya sisa lebih pembiayaan anggaran berkisar 10–20% (2010–2020) yang menunjukkan perbedaan antara rencana dengan realisasi anggaran Belum optimalnya penggunaan anggaran yang diindikasikan dari rendahnya daya serap pagu belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kurangnya kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan Kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran serta kurangnya dukungan sarana prasarana pengelolaan arsip yang menyebabkan hilangnya data dan informasi strategis 	Belum optimalnya penyerapan anggaran dan pengelolaan keuangan
3	Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya penguasaan teknologi oleh pegawai Menurunnya rata-rata waktu pelatihan pegawai (18,2 jam pada tahun 2020) Belum optimalnya partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan formal (meningkat signifikan dari 0,6% [2014] menjadi 13% [2020], tetapi masih jauh di bawah 100%) Menurunnya partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan struktural dari 67% (2016) menjadi 64% (2020) 	Belum optimalnya pengembangan kompetensi pegawai
4	Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di berbagai bidang Lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari sisi anggaran yang hanya mencapai 0,28% dari PDRB pada tahun 2020 Rendahnya inovasi di bidang pariwisata serta rendahnya penggunaan teknologi pengembangan pangan dan administrasi pemerintah 	Belum optimalnya kapasitas dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

No	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
5	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya tindak lanjut terhadap hasil temuan berbagai pengawasan dan audit (tindak lanjut terhadap hasil temuan pada tahun 2015–2019 masih belum mencapai 100% dan lebih dari 30% hasil temuan masih belum ditangani dengan baik pada tahun 2018–2019) • Kurangnya jumlah dan kualitas pegawai • Kurangnya kedisiplinan pegawai 	Belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan
Aspek Daya Saing Daerah			
1	Daya Saing Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penyediaan layanan infrastruktur • Ketidakstabilan ekonomi makro • Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat • Kurangnya keterampilan tenaga kerja • Kurang memadainya pasar • Kurang memadainya alokasi sumber daya • Kurangnya investasi dalam infrastruktur dan pelatihan keterampilan • Kurangnya upaya perluasan akses pasar dan perbaikan faktor-faktor ekonomi makro dan mikro • Kurang maksimalnya pemanfaatan kontribusi besar dari lapangan usaha kegiatan perdagangan (ekspor dan impor) terhadap peningkatan pendapatan daerah • Tingginya tingkat kriminalitas yang menurunkan kunjungan wisata serta mengganggu pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah 	Belum optimalnya daya saing daerah

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

2.3.2 Isu Strategis

2.3.2.1 Isu Strategis Global dan Nasional

A) Megatren 2045

Visi Indonesia 2045 telah dirancang sebagai respons terhadap tren perkembangan global yang terjadi hingga pertengahan abad ke-21. Tren-tren tersebut mencakup beberapa aspek yang signifikan, antara lain:

1) Tren Demografi Dunia

Pada tahun 2045, proyeksinya adalah bahwa penduduk dunia akan mencapai 9,45 miliar orang, meningkat sebesar 2,1 miliar dari tahun 2015. Lebih dari separuh pertumbuhan populasi ini akan terjadi di kawasan Afrika dan penduduk Asia masih akan menyumbang mayoritas, yaitu sekitar 55 persen. Tren demografi ini akan mendorong urbanisasi, migrasi manusia, dan pertumbuhan jumlah penduduk usia lanjut.

2) Urbanisasi Global

Diperkirakan bahwa pada tahun 2045, sekitar 65 persen penduduk dunia akan tinggal di perkotaan, dengan pertumbuhan terbesar (95 persen) terjadi di negara-negara berkembang. Pembangunan perkotaan dianggap memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup penduduk.

3) Peranan Negara Berkembang

Output ekonomi negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan mencapai 71 persen dari total *output* dunia, dengan Asia menjadi pendorong utama, berkontribusi sekitar 54 persen. Investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, serta reformasi struktural dan iklim usaha akan memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan, dan kompetitif.

4) Perdagangan Nasional

Hingga tahun 2045, diperkirakan perdagangan global akan tumbuh sekitar 3,4 persen setiap tahun. Negara-negara berkembang akan menjadi poros perdagangan dan investasi dunia, dengan pertumbuhan sekitar 6 persen setiap tahun. Perdagangan intra-Asia akan meningkat, dan investasi asing langsung di antara negara-negara berkembang akan terus berkembang.

5) Keuangan Internasional

Prediksi menunjukkan bahwa dominasi mata uang dunia akan bergeser dari dolar AS menjadi multi mata uang. Aset keuangan di negara-negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan melebihi aset negara-negara maju. Cina diharapkan akan menjadi salah satu penyumbang utama dalam pembiayaan pembangunan di masa depan.

6) Kelas Pendapatan Menengah

Pada tahun 2050, diperkirakan jumlah kelas menengah dan kelas atas akan mencapai lebih dari 84 persen atau sekitar 8,1 miliar orang. Asia dan Amerika Latin diperkirakan akan memiliki jumlah terbesar dalam kategori kelas menengah dan kelas atas.

7) Persaingan Sumber Daya Alam

Pertumbuhan ekonomi di Asia dan penambahan penduduk di Afrika akan memicu persaingan dalam pengelolaan sumber daya alam. Meskipun teknologi akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, ketersediaan sumber daya diperkirakan akan kesulitan memenuhi permintaan yang terus meningkat.

8) Perubahan Iklim

Pemanasan global semakin meningkat baik melalui kejadian ekstrem maupun perubahan iklim jangka panjang. Tanpa upaya signifikan dalam menurunkan emisi, suhu rata-rata global diperkirakan akan naik sekitar 3 hingga 3,5 derajat celsius pada akhir abad ke-21.

9) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi di masa depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan pengobatan, energi terbarukan, perangkat *wearable*, otomatisasi dan robotika, serta kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

10) Perubahan Geopolitik

Geopolitik global terus berubah dengan meningkatnya peran Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah, serta munculnya kelas baru dan kelompok penentu.

Kota Denpasar, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mampu merespons sepuluh tren mega-global yang ada dengan memanfaatkan peluang yang muncul dalam pengembangan aspek sosial dan ekonomi di wilayahnya. Kota Denpasar juga perlu mempertimbangkan dengan cermat keterbatasan-keterbatasan yang timbul dari kondisi fisik dan sosial dasarnya. Keberadaan Kota Denpasar dalam konteks geo-spasial yang rentan akan bencana banjir, tsunami, gelombang ekstrem dan abrasi pantai, intrusi air laut, kebakaran, gempa bumi, serta cuaca ekstrem. Hal ini mengharuskan kita untuk mendalami faktor-faktor lingkungan geo-fisik dan ekosistem ketika mengelola sumber daya yang tersedia di wilayah ini. Dengan demikian, kita dapat meminimalisasi risiko-risiko yang melekat dalam kehidupan di Kota Denpasar. Hal ini mencerminkan pentingnya penanganan berbasis risiko yang holistik dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan dan pengelolaan sumber daya di Kota Denpasar, dengan mempertimbangkan konteks geografis dan lingkungan yang unik, serta memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi, sejalan dengan pencapaian agenda nasional menuju “Indonesia Emas” 2045.

B) SDGs

Berikut merupakan status pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Bali (localisedsds, t.t.).

- Penurunan angka kemiskinan sebesar 0,28% dari 4,53% (2022) menjadi 4,25% (2023) (Yolanda, 2023);
- Penurunan jumlah penduduk miskin dari 205.360 orang (2022) menjadi 193.780 orang (2023) (Yolanda, 2023);
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 0,40% dari 84,03 (2020) menjadi 84,37 (2021);
- Angka harapan lama sekolah meningkat sedikit dari 13,40 (2021) menjadi 13,48 (2022). Sementara itu, Kota Denpasar juga mengalami peningkatan dari 14,09 (2021) menjadi 14,10 (2022);
- Angka melek huruf mengalami peningkatan dari 95% (2021) menjadi 95,53%, begitu pun dengan Kota Denpasar dari 99,30% (2021) menjadi 99,38% (2022);
- Akses sanitasi mengalami sedikit penurunan dari 95,95 (2021) menjadi 95,94 (2022);
- Cakupan Akses perumahan terjangkau dan layak meningkat dari 2,03 (2020) menjadi 4,74 (2021).

Strategi Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam menyelaraskan RPJMD dengan indikator-indikator SDGs adalah:

1) TPB 8, 12, 14: Wisata Hijau dan Berkelanjutan/*Green Sustainable Tourism*

Pemerintah Bali telah menerapkan konsep '*Green Sustainable Tourism*' berdasarkan prinsip Tri Hita Karana. Dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata, pemerintah sangat memperhatikan kebudayaan lokal yang mendorong usaha ekonomi kreatif warga setempat agar meningkatkan pendapatan. Prinsip Tri Hita Karana juga telah mengubah cara pandang terhadap pariwisata yang sebelumnya merusak alam menjadi pariwisata yang peduli lingkungan.

2) TPB 2, 12: SIPADU Bali Menghasilkan Pupuk Organik Bermutu

Provinsi Bali menerapkan konsep inovatif yang disebut SIPADU (Sistem Pertanian Terpadu) yang menekankan pengembangan pupuk organik berkualitas sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produksi pangan yang berkualitas. Program ini mencerminkan tekad Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan produksi pangan yang bermutu dan kuantitasnya serta menjadikan Bali sebagai pulau organik.

3) TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Gerakan Bali Bersih adalah komitmen Gubernur Bali, I Wayan Koster, untuk menjaga lingkungan alam dan udara dengan tujuan mempertahankan keharmonisan alam Bali. Program berlandaskan visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali', yang artinya pelestarian alam Bali dan isinya. Melalui gerakan ini, pemerintah dan masyarakat bekerja sama membersihkan sampah plastik

dan non-organik. Gerakan ini berhasil menghilangkan puluhan ribu kilogram sampah non-organik di Bali.

C) Bonus Demografi

Bonus Demografi di Indonesia diawali pada tahun 2015 dan diperkirakan akan mengalami periode puncak pada tahun 2020 – 2035. Kualitas SDM merupakan faktor penentu keberhasilan pemanfaatan bonus demografi. Dalam hal ini, penduduk usia produktif berkontribusi besar dalam penyediaan tenaga kerja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi apabila didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, kompetensi, serta daya saing di era globalisasi. Apabila kondisi ini tidak terdukung, maka melimpahnya penduduk usia kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan justru akan meningkatkan tingkat pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, hingga menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

Berdasarkan analisis perangkat daerah Kota Denpasar, Kota Denpasar akan mengalami periode puncak pada tahun 2026. Hal ini mengindikasikan bahwa sejak tahun 2024 hingga 2026, Kota Denpasar memiliki 2 tahun sisa untuk memanfaatkan bonus demografi. Pasca tahun tersebut, tingkat kelahiran akan menurun dan mengakibatkan persentase penduduk usia 0 - 14 tahun berkurang. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran, kuantitas dan kualitas SDM yang tidak seimbang, adanya *aging population* yang menyebabkan tingginya angka ketergantungan, penurunan tajam kelahiran, dan menurunnya kemampuan pembangunan ekonomi karena berkurangnya penduduk usia produktif. Dihadapkan dengan kondisi ini, dapat dikatakan bahwa Kota Denpasar perlu berfokus dalam peningkatan kualitas sarana prasarana dan pelayanan bagi masyarakat usia non-produktif serta penyediaan lapangan kerja yang dapat memberikan pendapatan bagi penduduk usia produktif untuk menanggung usia non-produktif.

D) Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses penggunaan teknologi digital yang mengubah cara kerja, interaksi, hingga kegiatan manusia. Melalui digitalisasi, efisiensi dan produktivitas, aksesibilitas, hingga kualitas dan keamanan informasi dapat ditingkatkan (Kurniawan & Aruan, 2021). Paradigma digital telah bergerak maju dengan sangat pesat dan mengubah paradigma ekonomi dan masyarakat di kancah global. Transformasi Ekonomi Digital menjadi salah satu agenda prioritas global yang berkaitan dengan Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Indonesia memimpin *Digital Economy Working Grup* (DEWG) dengan membawa tiga isu prioritas bersama yaitu *Connectivity and Post-Covid Recovery* (Konektivitas dan Pemulihan Pasca Pandemi), *Digitalisasi Literacy* dan *Digital Talent* (Literasi Digital dan Keterampilan Digital), serta *Cross-*

Border Data Flow/Data Free Flow with Trust (Arus Data Lintas Batas Negara/Arus bebas Data secara Terpercaya).

Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia melakukan fokus transformasi digital pada 10 sektor prioritas untuk mempercepat terwujudnya infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital yaitu sektor transportasi dan pariwisata digital, perdagangan digital, jasa keuangan digital, media dan hiburan digital, pertanian dan perikanan digital, *real estate* dan perkotaan digital, pendidikan digital, kesehatan digital, digitalisasi perindustrian, serta digitalisasi pemerintahan (Indonesia.go.id, 2021). Sayangnya, masih terdapat beberapa hambatan untuk mencapai digitalisasi di Indonesia. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- 1) Rendahnya literasi digital di mana masih terdapat masyarakat yang kekurangan kemampuan dan *skill* untuk berpartisipasi dalam digitalisasi ekonomi (Binekasri, 2022)
- 2) Infrastruktur yang tidak merata di mana masih terdapat wilayah terutama wilayah rural yang belum mendapatkan akses memadai terhadap koneksi internet (Binekasri, 2022)
- 3) Keterbatasan akses terhadap teknologi di mana dalam mengimplementasikan teknologi digital, 40% UMKM memiliki akses terbatas pada teknologi, 30% UMKM kurang pemahaman terkait mandat digitalisasi, dan 30% UMKM mengalami keterbatasan sumber daya (Wibowo, 2023)
- 4) Keamanan data dan ancaman *cyber* di mana perusahaan di Indonesia belum menerapkan *cybersecurity* secara serius padahal berdasarkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serangan *cyber* pada tahun 2020 empat kali lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Tsel Enterprise, 2021)
- 5) Minimnya Keahlian Digital SDM di Indonesia yang dibuktikan dengan *Workday Digital Agility Index* sebanyak 68% perusahaan di ASEAN tidak memiliki pemahaman digital menyeluruh dan perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan bahwa 50% karyawan tidak memiliki keahlian yang baik (Tsel Enterprise, 2021).

Selain beberapa hal tersebut, ketidakpastian lingkungan ekonomi hingga kemauan masyarakat untuk beralih menggunakan teknologi digital berpengaruh sangat penting dalam tercapainya digitalisasi. Dalam menghadapi kondisi ini, pemerintah perlu memastikan bahwa berbagai *stakeholder* bekerja sama dalam menciptakan lingkungan kerja digital yang mendukung melalui investasi dalam infrastruktur, dukungan dan pelatihan digital, dan menawarkan insentif untuk bisnis yang mengadaptasi solusi digital.

E) Net Zero Emission

Net zero emission atau nol emisi karbon merupakan suatu kondisi dengan emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer sama atau tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap bumi, sehingga tidak ada akumulasi gas rumah kaca di atmosfer (Kementerian ESDM RI, 2022). Hal ini merupakan salah satu tujuan penting dalam mengatasi perubahan iklim dunia. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan transisi menuju penggunaan sistem energi bersih untuk mencapai keseimbangan antara kegiatan manusia dan dampak yang ditimbulkan kepada alam.

Program *Net Zero Emission*, yang diperkenalkan setelah *Paris Climate Agreement* 2015, berfokus pada penurunan emisi gas rumah kaca dengan cara meningkatkan penggunaan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mengadopsi kendaraan listrik, meningkatkan efisiensi energi di rumah tangga dan industri, serta mengaplikasikan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Dengan komitmen pada prinsip-prinsip ini, Indonesia dan negara-negara lain bertujuan untuk mencapai kondisi nol emisi sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya pada lingkungan.

Sebagai hasil dari Persetujuan Paris akan perubahan iklim tersebut, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi baik dengan usaha sendiri maupun bersama dukungan internasional (Simamora, 2021). Saat ini, dominasi sumber energi di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil yang berhubungan dengan rendahnya target pengembangan energi terbarukan bertentangan dengan tren penurunan harga energi terbarukan. Ancaman perubahan menjadi hal yang krusial, terutama dalam hal mitigasi yang dapat dilakukan oleh masing-masing daerah. Hal ini juga bersamaan dengan kenaikan suhu bumi yang naik sebesar 1,5 derajat Celsius. Dekarbonisasi dalam mencapai *net zero emission* ini dapat dilakukan dengan memenuhi energi terbarukan, elektrifikasi, penurunan energi fosil, dan penggunaan bahan bersih pada berbagai sektor seperti pembangkit listrik, transportasi, dan industri.

Berkaitan dengan program *net zero emission*, terdapat pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang masuk ke dalam agenda RPJMN 2020-2024 sebagai agenda prioritas yang memiliki target dan strategi yang jelas (Medrilzam, 2021). Lokasi prioritas aksi tekanan iklim di Indonesia terbagi menjadi empat sektor sebagai berikut.

- 1) Sektor Kelautan dan Pesisir : lokasi Super Prioritas terbanyak berada di wilayah Sumatera (di pesisir barat) dan wilayah pesisir yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim yaitu Pulau Jawa-Bali, Sumatera, dan Sulawesi;
- 2) Sektor Air : lokasi ini tersebar di hampir seluruh Pulau Jawa-Bali, Nusa Tenggara, dan di beberapa wilayah lainnya;

- 3) Sektor Pertanian : lahan pertanian sebagian besar terdapat di Pulau Jawa-Bali, Sumatera, dan Sulawesi;
- 4) Sektor Kesehatan : Sebaran kasus DBD di Pulau Jawa-Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, sebaran kasus malaria di Pulau Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku, dan sebaran kasus pneumonia di Pulau Jawa-Bali.

F) Green Economy Indeks

Green Economy Index (GEI) atau Indeks Ekonomi Hijau adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah negara atau wilayah telah mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau, mencakup evaluasi berbagai faktor, termasuk efisiensi sumber daya, penggunaan energi terbarukan, keberlanjutan lingkungan, dan dampak ekonomi pada lingkungan. GEI memberikan pandangan tentang sejauh mana suatu negara menjalankan praktik ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Bappenas, 2022). GEI disebutkan dalam dokumen konferensi internasional *United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCSD) di Rio de Janeiro dengan ekonomi hijau sebagai alat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. GEI Indonesia terdiri dari 15 indikator yang mencakup tiga pilar mencerminkan pembangunan ekonomi hijau, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi meliputi enam indikator, yaitu intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial terdiri dari empat indikator, yaitu tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, pilar lingkungan mencakup lima indikator, yaitu tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan.

Di Indonesia, prinsip-prinsip GEI mulai diintegrasikan dalam beberapa program dan kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut tercantum ke dalam beberapa dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta strategi-strategi nasional yang mengacu pada pembangunan berkelanjutan dan penerapan ekonomi hijau. Ekonomi hijau juga merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia yang ditetapkan oleh Bappenas untuk mencapai visi Indonesia 2045. Upaya-upaya ini termasuk pengembangan energi terbarukan, pelestarian lingkungan, peningkatan efisiensi sumber daya, dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, Indonesia juga telah mengadopsi konsep ekonomi sirkular dan upaya untuk memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan.

Penting untuk diingat bahwa GEI merupakan alat yang membantu dalam mengukur progres pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan interaksi antara ekonomi dan lingkungan. Dengan

menerapkan prinsip-prinsip GEI, Indonesia berusaha untuk mengurangi jejak lingkungan sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

Penerapan ekonomi hijau ini juga berkenaan dengan skenario pembangunan rendah karbon yang berkaitan dengan penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi secara jangka panjang karena dampak negatif eksternalitas, keterbatasan sumber energi fosil, dan pengaruh jangka panjang dampak pandemi covid-19 terhadap ekonomi (Medrilzam, 2021). Perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global maupun nasional. Salah satu perhitungan yang dilakukan Bappenas, potensi kehilangan ekonomi di Indonesia akibat perubahan iklim dapat mencapai Rp115 triliun pada tahun 2024 tanpa adanya intervensi pada pengelolaan perubahan iklim dibandingkan adanya intervensi dengan kerugian yang lebih kecil yaitu sebesar Rp57 triliun.

G) Transisi Energi Berkelanjutan

Energi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, penggunaan energi fosil yang menghasilkan polusi telah menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global yang paling mendesak saat ini. Perubahan iklim disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida, terbentuk dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan suhu bumi meningkat. Hal ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan laut, dan kepunahan berbagai jenis flora dan fauna.

Maka dari itu, transisi energi berkelanjutan menjadi penting untuk dilakukan. Transisi energi berkelanjutan adalah proses perubahan dari penggunaan energi fosil yang berpolusi ke penggunaan energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan. Penggunaan energi terbarukan, seperti energi matahari, angin, dan air dapat membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Transisi ini penting untuk dilakukan karena selain dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, upaya ini juga dapat mencegah dampak yang lebih besar dari perubahan iklim.

Pada G20 Indonesia tahun 2022, isu transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu prioritas pembahasan. Sebagai salah satu dari tiga pilar utama Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, forum transisi energi dalam format *Energy Transitions Working Group* (ETWG) berfokus kepada tiga prioritas, yaitu, akses, teknologi, dan pendanaan. Dengan tiga prioritas tersebut, Indonesia sebagai presidensi G20 mendorong upaya kolektif dunia untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mempercepat transisi energi

global, sekaligus memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan dan transisi yang berkeadilan.

Negara-negara anggota G20 merupakan kontributor utama permintaan energi global, dengan pangsa sekitar 75%. Oleh karena itu, negara-negara G20 memiliki tanggung jawab besar dan peran strategis dalam mendorong pemanfaatan energi bersih. ETWG (*Energy Transitions Working Group*) berfokus pada pembahasan tiga aspek utama transisi energi berkelanjutan, yaitu keamanan energi, akses energi, dan efisiensi energi. Selain itu, ETWG juga membahas transisi ke sistem energi rendah karbon, yang mencakup investasi dan inovasi dalam teknologi energi bersih dan efisien. Dalam KTT G20 Bali, para pemimpin negara anggota G20 menyepakati deklarasi bersama mengenai transisi energi berkelanjutan. Deklarasi ini mencakup komitmen untuk:

- 1) Mengintensifkan upaya untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2050.
- 2) Meningkatkan investasi dalam energi terbarukan dan teknologi bersih.
- 3) Meningkatkan akses ke energi bersih dan terjangkau.

Begitu pula dengan Indonesia yang diperkirakan memiliki potensi EBT cukup melimpah lebih dari 3.000 GW yang bersumber dari tenaga surya, angin, hidro, panas bumi, bio energi, dan energi laut. Potensi dan teknologi EBT tersebut juga merupakan modal utama untuk melaksanakan strategi transisi energi menuju *Net Zero Emission* pada 2060. Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung transisi energi berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga angin (PLTA).
- 2) Mengurangi dan menghapus penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
- 3) Meningkatkan produksi biodiesel
- 4) Mendorong penggunaan kendaraan listrik.
- 5) Penerapan pajak karbon dengan tarif sebesar Rp 30 per kg karbon CO₂e.
- 6) Penerapan *Carbon Capture, Utilization and Storage* (CCUS) untuk mengurangi dan menangkap emisi karbon dari proses industri dan pembangkit listrik.

Transisi energi berkelanjutan merupakan tantangan yang besar, tetapi juga merupakan peluang untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan kerja sama yang erat dari seluruh negara di dunia, transisi energi berkelanjutan dapat diwujudkan dan kita dapat melindungi bumi untuk generasi mendatang.

H) Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses perubahan yang mendasar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Transformasi ini didorong oleh perkembangan teknologi digital yang pesat, yang mengubah berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita berkomunikasi, belajar, hingga berbisnis. Transformasi digital penting untuk dilakukan untuk menjawab tantangan global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa tantangan global yang dapat diatasi dengan transformasi digital antara lain:

- 1) Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19: Transformasi digital dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan mendorong digitalisasi berbagai sektor, seperti perdagangan, keuangan, dan pariwisata.
- 2) Perubahan iklim: Transformasi digital dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah perubahan iklim dengan mendorong penggunaan teknologi digital yang hemat energi dan ramah lingkungan.
- 3) Pembangunan berkelanjutan: Transformasi digital dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan mendorong inklusi, pemberdayaan, dan keadilan sosial.

Pada G20 Indonesia Tahun 2022, isu transformasi digital menjadi salah satu prioritas pembahasan. Indonesia sebagai presidensi G20 mendorong upaya kolektif dunia untuk mempercepat transformasi digital. Dimulai dari *Digital Economy Working Group* (DEWG) yang sudah berjalan hingga pengembangan *startup* potensial melalui *Digital Innovation Network*. Isu transformasi digital ini juga memiliki tiga fokus yang terdiri dari kesetaraan akses digital, literasi digital, dan lingkungan digital yang aman.

Ekonomi digital sebagai pilar ketahanan di masa pandemi menjadi kunci masa depan ekonomi global. Pada masa pandemi, sektor ini menyumbang 15,5 persen PDB global dan membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasok global. Dalam KTT G20 Bali, para pemimpin negara anggota G20 menyepakati deklarasi bersama mengenai transformasi digital. Deklarasi ini mencakup komitmen untuk:

- 1) Meningkatkan konektivitas digital dan infrastruktur digital yang inklusif, aman, dan terpercaya.
- 2) Meningkatkan keterampilan dan literasi digital untuk semua orang.
- 3) Mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mengatasi tantangan global, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung transformasi digital. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- 1) Meluncurkan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi untuk meningkatkan keterampilan dan literasi digital masyarakat.

- 2) Membangun infrastruktur digital yang inklusif dan terjangkau, termasuk penyediaan akses internet di pelosok daerah.
- 3) Mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Transformasi digital merupakan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai tantangan global. Dengan kerja sama yang erat dari seluruh negara di dunia, transformasi digital dapat diwujudkan dan kita dapat membangun masa depan yang lebih baik.

I) Arsitektur Kesehatan Global

Arsitektur kesehatan global merupakan kerangka kerja yang mengatur kerja sama internasional di bidang kesehatan. Kerangka kerja ini penting untuk memastikan bahwa semua orang di dunia memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan bahwa arsitektur kesehatan global perlu diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan global. Pandemi ini telah menyebabkan lebih dari 6 juta kematian dan kerugian ekonomi yang besar. Selain itu, kesehatan global juga terancam oleh dampak ketegangan geopolitik yang mempengaruhi ketahanan pangan global, karena secara tidak langsung akan menyebabkan kenaikan harga jika distribusi bahan pangan terhambat.

Pada G20 Indonesia tahun 2022, isu arsitektur kesehatan global menjadi salah satu prioritas pembahasan, selain transisi energi berkelanjutan dan transformasi digital. Indonesia sebagai presidensi G20 mendorong upaya kolektif dunia untuk memperkuat arsitektur kesehatan global. Ada beberapa alasan mengapa penguatan arsitektur kesehatan global sangat penting, antara lain:

- 1) Meningkatkan ketahanan terhadap pandemi: pandemi Covid-19 telah menunjukkan bahwa dunia tidak siap menghadapi pandemi global. Penguatan arsitektur kesehatan global dapat membantu dunia untuk meningkatkan ketahanan terhadap pandemi di masa depan.
- 2) Meningkatkan akses ke layanan kesehatan: Masih banyak orang di dunia yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Penguatan arsitektur kesehatan global dapat membantu meningkatkan akses ke layanan kesehatan bagi semua orang.
- 3) Mendorong inovasi teknologi kesehatan: Teknologi kesehatan baru dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mengurangi biaya kesehatan. Penguatan arsitektur kesehatan global dapat membantu mendorong inovasi teknologi kesehatan.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan tajam dalam perjalanan internasional, dengan kehilangan pendapatan pariwisata global diperkirakan mencapai US\$1,3 triliun pada tahun 2020. Konflik Rusia-

Ukraina telah memperburuk situasi, dengan hilangnya pendapatan pariwisata diperkirakan mencapai US\$14 miliar pada tahun 2022. Kedua peristiwa ini telah menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan kesehatan global. Sebagai Presidensi G20 2022, Indonesia percaya bahwa G20 dapat mempermainkan peran penting dalam memperkuat sistem kesehatan global yang lebih inklusif dan responsif terhadap krisis. Dalam KTT G20 Bali, para pemimpin negara anggota G20 menyepakati deklarasi bersama mengenai arsitektur kesehatan global. Komitmen ini merupakan langkah positif dalam upaya memperkuat arsitektur kesehatan global. Deklarasi ini mencakup komitmen untuk:

- 1) Memperkuat sistem kesehatan global, termasuk sistem kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi.
- 2) Meningkatkan akses ke vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan.
- 3) Mendorong penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan baru.

Sementara itu, Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung penguatan arsitektur kesehatan global, antara lain:

- 1) Memimpin inisiatif pembentukan Dana Intermediasi Finansial (FIF) untuk mendukung pembiayaan kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi.
- 2) Mendorong pembentukan *Financial Health Platform* untuk meningkatkan akses ke pembiayaan kesehatan.
- 3) Meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional di bidang kesehatan.

Penguatan arsitektur kesehatan global merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian dan kerja sama dari seluruh dunia. Dengan kerja sama yang erat, kita dapat memperkuat arsitektur kesehatan global dan melindungi kesehatan masyarakat dunia.

2.3.2.2 Arah Pembangunan Tahun 2025 – 2029

A) Prioritas Pembangunan Nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2025 – 2029

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional Pembangunan jangka menengah. Prioritas Pembangunan Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Di dalam tiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Tabel 2. 123
Prioritas Nasional dan Isu Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

No.	Prioritas Nasional – Asta Cita	Isu Pembangunan
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Memperkokoh Ideologi Pancasila Memperkokoh Demokrasi Hak Asasi Manusia
2		Sistem Pertahanan dan Keamanan

No.	Prioritas Nasional – Asta Cita	Isu Pembangunan
	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Pangan Swasembada Energi Swasembada Air Ekonomi Syariah Ekonomi Digital Ekonomi Hijau Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Infrastruktur Berkelanjutan Pendalaman Sektor Keuangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan Produktivitas UMKM dan Koperasi Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Kesehatan Keluarga, Perempuan, Anak, dan Pemuda Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Hilirisasi dan Industrialisasi Konektivitas <i>Backbone</i> dan Logistik Ekonomi Domestik dan Global
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kemiskinan Perumahan dan Permukiman Perdesaan Perkotaan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi Politik Reformasi Hukum Reformasi Birokrasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Pencegahan dan Pemberantasan Judi dan Penyelundupan Produktivitas BUMN Optimalisasi Pendapatan Negara Pengendalian Inflasi
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Keagamaan Kebudayaan Pembangunan Berketahanan Iklim Pengelolaan Risiko Bencana

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

B) Arahan Pembangunan Wilayah Bali berdasarkan RPJMN Tahun 2025 – 2029

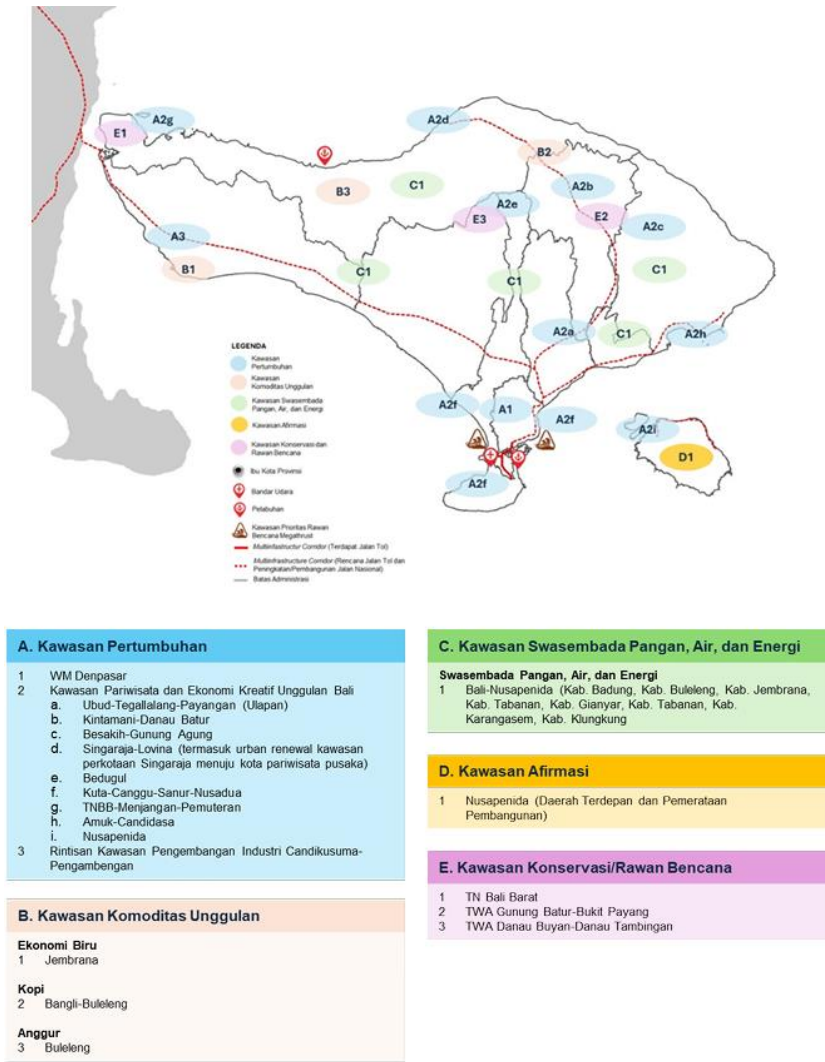
Berdasarkan dokumen RPJMN Tahun 2025 – 2029, identifikasi isu kewilayahan untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2025 – 2029 antara lain:

- 1) Perekonomian Wilayah Bali-Nusra mengalami perlambatan.
- 2) TPT seluruh provinsi telah lebih rendah dari capaian nasional, namun tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi.
- 3) Masih terdapat kesenjangan antarwilayah di Provinsi NTB dan NTT.
- 4) Provinsi NTB dan NTT masih memiliki IPM di bawah nasional.
- 5) Rendahnya kualitas SDM disebabkan oleh tingginya prevalensi *stunting*, rendahnya cakupan penemuan kasus TBC, dan prevalensi penyakit menular lainnya yang masih tinggi.
- 6) Kesejahteraan Bali lebih baik dibandingkan Wilayah Nusa Tenggara dengan kondisi kemiskinan yang masih tinggi.

- 7) Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki indeks risiko bencana kategori sedang, namun terdapat potensi bencana karena dilewati beberapa patahan sesar.
- 8) Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan.

Sementara itu, wilayah Bali-Nusa Tenggara pada tahun 2029 ditargetkan mampu tumbuh sebesar 8,4 persen. Hal tersebut utamanya didorong oleh aktivitas sektor jasa pariwisata melalui penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting dan kawasan pariwisata rintisan, seperti Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramen, kawasan pariwisata rintisan di Pulau Sumba, dan Kawasan Pariwisata Uluwatu Bali. Selain itu, perekonomian Bali-Nusa Tenggara didorong peningkatan nilai tambah sektor primer melalui percepatan hilirisasi industri tembaga serta penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas unggulan agrikultur. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perkotaan akan memberikan dampak nilai tambah terhadap perekonomian dalam mendukung operasionalisasi pengembangan potensi daerah.

Secara umum, arah pembangunan wilayah Bali-Nusa Tenggara dirumuskan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden 2029: Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 Persen, sehingga wilayah Bali-Nusa Tenggara diarahkan untuk memiliki pertumbuhan ekonomi wilayah sebesar 8,4% pada tahun 2029. Di sisi lain, untuk mencapai Visi Presiden 2029: Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM, wilayah Bali-Nusa Tenggara diarahkan untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 7,02% - 8,02% dan IMM 0,48 - 0,641. *Highlight* lokasi prioritas pembangunan tahun 2025 - 2029 Wilayah Bali-Nusa Tenggara (khususnya Provinsi Bali) adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 301
Peta Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Bali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
 Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Berdasarkan peta arah pembangunan kewilayahan Provinsi Bali dalam dokumen RPJMN tahun 2025 – 2029, prioritas pembangunan yang mencakup wilayah Kota Denpasar adalah Kawasan Pertumbuhan. *Highlight* indikasi intervensi yang dilakukan pada Kawasan Pertumbuhan, khususnya dengan lokasi prioritas di Kota Denpasar dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 124
Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Bali (khususnya terkait Kota Denpasar) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

No.	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi (khusus yang memuat Kota Denpasar)
A1	WM Denpasar Kota Denpasar Kab. Badung Kab. Tabanan Kab. Gianyar	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan penataan WM Denpasar antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Denpasar Penyusunan <i>masterplan</i> penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi (khusus yang memuat Kota Denpasar)
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan <i>metropolitan statistical area</i> • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan WM Denpasar, antara lain pengembangan BRT dan sistem transit • Pembangunan TPST Regional Sarbagita • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Denpasar • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Denpasar • Bali <i>Beach Conservation Project II</i> • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Denpasar (PHTC) • Pembangunan SPAM Regional Sarbagita • Pengembangan <i>World Class Research University</i> berbasis potensi wilayah pada Universitas Udayana, Institut Seni Indonesia Denpasar, dan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa • Pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH <i>Development Area 2</i>) • Pengembangan KEK Sanur • Pengembangan KEK Kura-Kura Bali • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi-Singapadu-Sanur-Benoa • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi-Canggu
A2	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali (Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali) Kota Denpasar Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Bangli Kab. Klungkung Kab. Karangasem	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan 6A Pariwisata pada <i>hotspot</i> pariwisata Bali, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Ubud-Tegallalang-Payangan (Ulapan) - Kintamani-Danau Batur - Besakih-Gunung Agung - Singaraja-Lovina (termasuk <i>urban renewal</i> kawasan perkotaan Singaraja menuju kota pariwisata pusaka) - Bedugul-Kuta-Canggu-Sanur-Nusadua - TNBB-Menjangan-Pemuteran - Amuk-Candidesa - Nusapenida • Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu-Ubud-Gianyar-Bangli-Kintamani-Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara-Singaraja • Pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Baru/Bali Utara • Pengembangan kawasan pariwisata Ulapan, termasuk perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Lingkar Ulapan • Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung • Pengembangan Pelabuhan Gunaksa • Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan • Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Agung
	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman megathrust dan tsunami di Kawasan Perkotaan WM Denpasar.

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi (khusus yang memuat Kota Denpasar)
	Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini ◦ Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas ◦ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ◦ Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah ◦ Revitalisasi pendidikan nonformal ◦ Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Penurunan kematian ibu dan anak ◦ Pencegahan dan Penurunan stunting ◦ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ◦ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Penuntasan TBC ◦ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ◦ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui <ul style="list-style-type: none"> ◦ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ◦ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ◦ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan ◦ Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ◦ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-time ◦ Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi Digital, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Perluasan infrastruktur digital

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi (khusus yang memuat Kota Denpasar)
		<ul style="list-style-type: none"> o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital o Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintah digital, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> o Penguatan tata kelola dan infrastuktur pemerintahan digital o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN o Digitalisasi layanan publik prioritas o Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Bali, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), o Penanggulangan judi dan penyelundupan; o Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN); o Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; o Penguatan dan pengawasan dan penindakan imigrasi; • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Bali, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> o Pelindungan dan pelestarian warisan budaya; o Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan o Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

C) Sasaran Pembangunan Provinsi Bali

Sasaran Pembangunan Provinsi Bali telah tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang bersifat imperatif atau mutlak untuk digunakan sebagai sumber sasaran utama pembangunan. Sasaran Pembangunan Provinsi Bali dalam RPJMN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 125
Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

No	Indikator Makro Ekonomi	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	7,5	8,5
2	PDRB per Kapita	Rp Juta	72,7	110,9
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	1,4	1,4
4	Tingkat Kemiskinan	%	3,57-3,93	1,79-2,79
5	Rasio Gini	Angka	0,355-0,359	0,331-0,335
6	Indeks Modal Manusia	Angka	0,61	0,64
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	5,36	26,88
8	IKLH Daerah	Angka	76,19	76,89
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,87-2,35	1,63-2,17

Sumber : Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029

Pencapaian Sasaran Pembangunan Provinsi Bali tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari kontribusi kabupaten/kota sebagai entitas pelaksana

pembangunan di tingkat lokal meskipun dalam RPJMN telah diamanatkan indikasi intervensi pembangunan yang dapat membantu Provinsi Bali mencapai sasaran pembangunan tersebut. Oleh karena itu, sasaran pembangunan Provinsi Bali tersebut perlu dipetakan dan dijabarkan ke dalam target masing-masing kabupaten/kota dengan menyesuaikan pada karakteristik wilayah, dan kontribusinya terhadap Provinsi Bali.

Pemetaan ini penting dilakukan untuk beberapa alasan strategis:

1. Mendorong sinergi pembangunan pusat-daerah, agar perencanaan pembangunan kabupaten/kota berjalan selaras dengan arah dan target pembangunan provinsi maupun nasional.
2. Menjamin distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif, terutama untuk wilayah-wilayah dengan ketimpangan struktural yang masih tinggi.
3. Meningkatkan efektivitas intervensi pembangunan, melalui identifikasi kontribusi sektoral dan spasial masing-masing kabupaten/kota terhadap agregat indikator makro Provinsi Bali.
4. Menjadi dasar perumusan strategi kewilayahan dan pengembangan proyek prioritas pada level daerah, sehingga program yang disusun memiliki orientasi hasil (outcome-based).
5. Mendukung penguatan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan berbasis wilayah, agar dapat mengukur capaian pembangunan secara lebih objektif dan terukur hingga level tapak.

Penetapan target sasaran pembangunan kabupaten/kota didasarkan pada kontribusi kabupaten/kota kepada Provinsi Bali. Semakin tinggi kontribusinya bagi Provinsi Bali, maka target yang diarahkan turut semakin tinggi. Seperti misalnya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagai kontributor tertinggi bagi PDRB Provinsi Bali sehingga kedua wilayah ini mengemban amanat target Laju Pertumbuhan Ekonomi paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya.

Adapun sasaran pembangunan kabupaten/kota yang dapat mendukung terwujudnya Sasaran Pembangunan Provinsi Bali sesuai dengan amanat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.125. Pada Tabel 2.125 tersebut Sasaran Pembangunan ditetapkan untuk tahun 2026-2030 sesuai tahun implementasi dari RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 serta RPJMD Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 126
Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 dan 2030

Tahun	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	LPE	Tingkat Kemiskinan	Gini Rasio	IPM	TPT
2026	Bali	5,60-6,30	3,00-3,50	0,340-0,345	78,94	1,77-2,30
	Jembrana	5,20-5,90	4,09-4,34	0,310	79,76	2,28
	Tabanan	5,10-5,70	3,65-3,85	0,299	78,58	1,93
	Badung	6,00-6,80	2,10-2,45	0,270	84,11	1,62
	Gianyar	5,60-6,40	3,09-3,60	0,200	81,62	1,79
	Klungkung	5,30-6,00	4,22-4,47	0,290	76,26	1,17
	Bangli	4,90-5,50	3,98-4,23	0,301	74,11	0,72

	Karangasem	4,70-5,30	4,95-5,20	0,281	71,75	1,55
	Buleleng	5,20-5,90	4,84-5,09	0,296	75,53	2,03
	Denpasar	5,90-6,60	2,52-2,94	0,340	85,69	1,49
2030	Bali	8,25-8,75	1,50-2,50	0,330-0,334	79,56	1,50-2,00
	Jembrana	6,90-7,40	3,70-3,95	0,300	81,86	1,80
	Tabanan	6,00-6,50	2,50-2,75	0,295	79,93	1,63
	Badung	8,75-9,00	1,05-1,75	0,257	84,43	1,39
	Gianyar	8,35-8,85	1,54-2,57	0,160	84,78	1,47
	Klungkung	7,00-7,50	2,56-2,81	0,240	78,54	1,01
	Bangli	7,50-8,00	3,20-3,45	0,298	77,10	0,58
	Karangasem	6,05-6,55	3,75-4,00	0,277	71,87	1,51
	Buleleng	6,10-6,60	3,98-4,23	0,292	77,52	1,97
	Denpasar	8,75-9,00	1,26-2,10	0,330	86,31	0,94

Sebagai catatan, seluruh sasaran pembangunan Provinsi Bali serta Kabupaten/Kota tersebut di atas dapat tercapai dengan syarat kondisi:

1. Seluruh *highlight* indikasi intervensi pembangunan Provinsi Bali serta Kabupaten/Kota yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dapat terlaksana/terrealisasi.
2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali dapat dilaksanakan.
3. Sasaran pembangunan tersebut dapat disesuaikan atau dilakukan perubahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan berdasarkan evaluasi atas capaian tahun sebelumnya.

D) Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali

Pembangunan Bali dengan Visi: “*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana *menuju* Bali Era Baru yang tertuang pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, telah mewujudkan pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama: Alam, *Krama*, dan Kebudayaan, yang ditandai dengan pencapaian pembangunan, meliputi:

1. Bali Era Baru: Pelindungan Kawasan Suci Besakih
2. Bali Era Baru: Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan Terlindungi
3. Bali Era Baru: Memuliakan Keluhuran Warisan Budaya Bali
4. Bali Era Baru: Memuliakan Aksara Bali
5. Bali Era Baru: Bulan Bahasa Bali
6. Bali Era Baru: Hari Penggunaan Busana Adat Bali
7. Bali Era Baru: Penguatan Desa Adat
8. Bali Era Baru: Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali
9. Bali Era Baru: *Tata-Titi* Kehidupan berbasis Kearifan Lokal *Sad Kerthi*
10. Bali Era Baru: SDM Bali Unggul
11. Bali Era Baru: Bulan Bung Karno
12. Bali Era Baru: Kawasan Pusat Kebudayaan Bali
13. Bali Era Baru: *Jantra* Tradisi Bali
14. Bali Era Baru: Festival Seni Bali Jani
15. Bali Era Baru: Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut Terlindungi
16. Bali Era Baru: Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai
17. Bali Era Baru: Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan
18. Bali Era Baru: Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih

19. Bali Era Baru: Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai
20. Bali Era Baru: Ekonomi *Kerthi* Bali
21. Bali Era Baru: Perekonomian Adat Bali
22. Bali Era Baru: Bali Pulau Organik
23. Bali Era Baru: Pelestarian Tanaman Endemik Bali
24. Bali Era Baru: *Gumitir* Bali *Sudamala*
25. Bali Era Baru: Berpihak Produk Lokal Bali
26. Bali Era Baru: Pengakuan Karya Cipta Bali
27. Bali Era Baru: Harkat Arak Bali
28. Bali Era Baru: Cita Rasa Garam Bali
29. Bali Era Baru: Pesona Endek Bali
30. Bali Era Baru: Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali
31. Bali Era Baru: Kartu Bali Sejahtera
32. Bali Era Baru: Pariwisata Budaya, Berkualitas, dan Bermartabat
33. Bali Era Baru: Bali Pulau Digital/Bali *Smart Island*
34. Bali Era Baru: Bali Digital Festival
35. Bali Era Baru: *Keyboard* Aksara Bali
36. Bali Era Baru: Turyapada Tower KBS 6.0 *Kerthi* Bali
37. Bali Era Baru: Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali
38. Bali Era Baru: SIPANDU BERADAT
39. Bali Era Baru: *Shortcut* Singaraja-Mengwitani
40. Bali Era Baru: Pelabuhan Segitiga Sanur-Sampalan-Bias Munjul
41. Bali Era Baru: Bali *Maritime Tourism* Hub
42. Bali Era Baru: Tol Jagat *Kerthi* Bali
43. Bali Era Baru: Keseimbangan Pembangunan antar Wilayah Bali
44. Bali Era Baru: Bali *Good Governance*

Ke-44 Tonggak penanda peradaban Bali Era Baru tersebut, beberapa diantaranya berupa pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Bali yang sudah bisa dirasakan manfaat dan dampaknya, namun ada pula yang belum selesai pengerjaannya dan perlu untuk dilanjutkan.

Pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Bali pada periode RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, berorientasi pada melanjutkan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pada capaian RPJMD sebelumnya, pembangunan baru, dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur Provinsi Bali secara keseluruhan. Untuk itu pemerintah Provinsi Bali menetapkan indikasi rencana pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Bali, dengan lokasi di kabupaten/kota se-Bali dengan indikasi pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali, APBD Kabupaten/Kota serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, yang disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2. 127
Daftar Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali Tahun 2025-2030

No	Lokasi	Kegiatan	
1.	Kabupaten Badung	1	Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi
		2	Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi-Singapadu-Sanur-Benoa
		3	Pembangunan Jalan Tol Mengwi-Canggu

No	Lokasi	Kegiatan	
		4	Pembangunan Kawasan TOD dan pengembangan Angkutan Massal
		5	Pembangunan dan Penataan Transportasi Kota: Pembangunan Kuta <i>Circulator</i> , Pembangunan Sarana Prasarana <i>Water Taxi</i>
		6	Pembangunan <i>Subway</i> Bali
		7	Pembangunan Jalan Baru Gatot Subroto Barat-Canggu, Denpasar-Badung
		8	Pembangunan Jalan Baru <i>Underpass</i> Jimbaran
		9	Pembangunan Jembatan Baru, Bongkasa-Payangan (Badung-Gianyar)
		10	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Luhur Uluwatu
		11	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Pucak Mangu
		12	Perlindungan Tukad Ayung
		13	SPAM Ayung
2.	Kabupaten Bangli	1	Pembangunan Pusat Olahraga Provinsi Bali
		2	Penataan Kawasan Kintamani Batur
		3	Perlindungan Danau Batur
		4	Pembangunan/Penataan Jalan Batur-Besakih
		5	Pembangunan Gedung Parkir di Kawasan Pura Batur
		6	Pembangunan Akses Jalan Buleleng-Besakih (tanpa melewati Kawasan Batur)
		7	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Batur
3.	Kabupaten Buleleng	1	Pembangunan konektivitas Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem (Pembangunan Jalan Berina, Karangasem-Buleleng)
		2	Pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Sangsit
		3	Pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Celukan Bawang
		4	Pembangunan <i>Shortcut</i> Mengwitani-Singaraja
		5	Pembangunan Kawasan Industri Maritim dan Perkapalan Bembong
		6	Pembangunan dan Penataan Kawasan Lovina
		7	Pembangunan dan Penataan Kawasan Pelabuhan Buleleng
		8	Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Letkol Wisnu
		9	Pembangunan Bandara Baru
		10	Perlindungan Danau Tamblingan dan Danau Buyan
4.	Kabupaten Gianyar	1	Pembangunan dan Penataan Kawasan Ubud-Tegallalang-Payangan (ULAPAN): b. Pembangunan Parkir, Penataan Akses Jalan, c. Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Intra-Ulapan, d. Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Ubud <i>Circulator</i>

No	Lokasi	Kegiatan	
		2	Pembangunan Kawasan TOD dan pengembangan Angkutan Massal
		3	Pembangunan Jembatan Baru Payangan, Gianyar-Bongkasa, Badung
		4	Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi-Singapadu-Sanur-Benoa
		5	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Pusering Jagat
		6	SPAM Ayung
		7	SPAM Unda
5.	Kabupaten Jembrana	1	Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi
		2	Penataan Kawasan Rambut Siwi
		3	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
		4	Hilirisasi Kelapa
6.	Kabupaten Karangasem	1	Pembangunan Jalan Sang Hyang Ambu-konektivitas Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem
		2	Pembangunan Jalan Berina, konektivitas Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng
		3	Pembangunan/Penataan Jalan Batur-Besakih
		4	Penataan Kawasan Suci Pura Agung Besakih
		5	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Lempuyang Luhur
		6	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Andakasa
		7	Pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Amed
7.	Kabupaten Klungkung	1	Pembangunan konektivitas Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem (Pembangunan Jalan Sang Hyang Ambu, Karangasem-Klungkung)
		2	Pembangunan Pelabuhan Kusamba
		3	Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB)
		4	Pembangunan Pelabuhan Gunaksa sebagai Kawasan Terpadu Pelabuhan di Pusat Kebudayaan Bali (PKB)
		5	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Kentel Gumi
		6	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Goa Lawah
		7	Pembangunan dan Penataan Kawasan Nusa Penida: a. Pembangunan Jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan, b. Pembangunan Jalan Lingkar Nusa Penida, c. Pembangunan Pengaman Pantai, d. Hilirisasi Rumput Laut, Penataan Kawasan, e. Pembangunan Infrastruktur Energi, f. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi, g. Peningkatan Layanan Air Minum/Air Bersih, h. Peningkatan Layanan Limbah dan Drainase
		8	SPAM Unda
8.	Kabupaten Tabanan	1	Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi
		2	Penataan Kawasan Jatiluwih
		3	Perlindungan Danau Beratan

No	Lokasi	Kegiatan	
		4	Penataan Kawasan Bedugul dan sekitarnya
		5	Pembangunan Pusat Penyosohan Gabah
		6	Pembangunan Pabrik Pakan Ternak
		7	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Batukaru
9.	Kota Denpasar	1	Pembangunan dan Penataan Akses Jalan dan Parkir di Sanur
		2	Pembangunan Gedung Parkir di Sanur
		3	Pembangunan dan Penataan Akses Jalan Matahari Terbit-Padangalak-Kawasan KEK
		4	Pembangunan Kawasan TOD dan pengembangan Angkutan Massal Perkotaan
		5	Pembangunan Jalan Baru Gatot Subroto Barat-Canggu, Denpasar-Badung
		6	Perlindungan Tukad Ayung
		7	Pembangunan Jalan Baru <i>Sunset Road</i> -Mahedradatta
		8	Pembangunan <i>Underpass</i> Ahmad Yani
		9	Pembangunan <i>Underpass</i> Tohpati
		10	Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi-Singapadu-Sanur-Benoa
		11	Hilirisasi Rumput Laut
		12	SPAM Ayung
		13	SPAM Unda
		14	Program pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan
		15	Proyek Infrastruktur Terminal LNG

Daftar rencana pembangunan infrastruktur strategis daerah di atas merupakan daftar indikatif yang dapat diubah berdasarkan evaluasi atau ketentuan perundang-undangan.

Di samping rencana pembangunan infrastruktur dimaksud, juga direncanakan Pembangunan infrastruktur umum yang berlokasi di kabupaten/kota se-Bali antara lain:

- 1) Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas Jalan serta Pemenuhan Faskes dan Alat Kelengkapan Jalan.
- 2) Penanganan Sampah.
- 3) Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas TPS3R, TPST, dan TPA.
- 4) Peningkatan Layanan Air Minum dan Limbah.
- 5) Peningkatan Ketangguhan Bencana.
- 6) Penanganan Terpadu Bencana Banjir.
- 7) Perlindungan Laut, Sungai dan Mata Air.
- 8) Penanganan Kualitas Rumah dan Kawasan Kumuh.
- 9) Penataan Kawasan, Destinasi/Objek Wisata

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

A) Isu Strategis Wilayah Jawa-Bali Berdasarkan RPJMN Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan evaluasi paruh waktu RPJMN Tahun 2020 – 2024, terdapat beberapa agenda pembangunan yang dinilai memiliki indikator dengan kinerja stagnan/menurun/moderat. Agenda pembangunan tersebut antara lain:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Di sisi lain, menurut evaluasi pembangunan daerah, kinerja makro daerah untuk wilayah Jawa-Bali ditinjau dari ketercapaian terhadap target RKP dan RKPD, indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka memiliki capaian $\geq 90\%$ dari target, serta indikator tingkat kemiskinan memiliki capaian antara $\geq 60\%$ dan $< 90\%$ dari target. Sementara itu, isu strategis kewilayahan yang dirumuskan untuk wilayah Jawa-Bali antara lain:

- 1) Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan.
- 2) Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa.
- 3) Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.
- 5) Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
- 6) Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi Covid-19.

B) Isu Strategis Provinsi Bali Berdasarkan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 – 2045

Isu strategis Provinsi Bali yang termuat dalam RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 – 2045 menggambarkan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis Provinsi Bali secara makro dirumuskan untuk 20 tahun ke depan berdasarkan pemetaan permasalahan daerah yang telah dilakukan. Permasalahan pembangunan dalam RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025—2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Berdasarkan pemetaan masalah yang telah dilakukan, didapatkan tujuh isu sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
- 2) Rentannya ketahanan perekonomian Bali.
- 3) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.
- 4) Ancaman stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat.
- 5) Tergerusnya tradisi, seni, adat, dan budaya.
- 6) Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
- 7) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pembangunan.

2.3.2.4 Isu Strategis Daerah

A) Isu Strategis KLHS RPJMD 2025-2029

Berdasarkan analisis kondisi pencapaian indikator TPB, karakteristik wilayah, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, isu strategis dari dokumen perencanaan yang ada maka direkomendasikan isu strategis yang diprioritaskan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Denpasar serta permasalahan yang merupakan tantangan pelaksanaan dan pencapaian TPB sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial belum optimal.

Permasalahan atau tantangan penyelenggaraan perlindungan sosial meliputi belum terintegrasinya bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Begitu juga atensi bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan dalam penguatan social ekonomi inklusi belum optimal. Penguatan perlindungan sosial untuk memastikan terpenuhinya bantuan social bagi keluarga penerima manfaat juga belum optimal. Khusus terhadap penyelenggaraan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan dihadapkan pada permasalahan belum sepenuhnya dipahami tentang pentingnya atau manfaat kepesertaan jaminan sosial tersebut di kalangan pekerja. Di sisi lain sebagian pekerja merasa bahwa penghasilannya tidak cukup untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan ada kebutuhan yang lebih penting. Ketaatan perusahaan untuk mengikutkan pekerjaanya dalam Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih rendah.

2. Belum optimalnya kecukupan dan kualitas konsumsi pangan.

Permasalahan dalam memenuhi kecukupan pangan bagi semua penduduk secara merata antara lain masih terdapat keterbatasan akses secara ekonomi bagi sebagian individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup. Pengetahuan individu/rumah tangga tentang pola konsumsi dengan energi yang cukup juga belum merata. Dari aspek penyediaan pangan, permasalahan utama meliputi daya dukung energi bahan pangan yang rendah ditambah dengan tingginya alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah. Sementara itu, ketergantungan terhadap beras sebagai pangan utama masih tinggi. Sedangkan dari aspek kualitas konsumsi pangan dihadapkan pada permasalahan antara lain tingkat keanekaragaman pangan masih rendah, pemanfaatan sumber pangan lokal yang berkualitas semakin menurun, literasi individu/rumah tangga tentang pola konsumsi dengan energi yang cukup juga belum merata, termasuk kesadaran konsumsi ikan, dan ditambah dengan perubahan pola konsumsi pangan mengarah pada kegemaran terhadap makanan instan.

3. Belum optimalnya kualitas kesehatan.

Pembangunan kesehatan di Kota Denpasar paling maju dibandingkan kabupaten lainnya di Bali yang ditopang oleh fasilitas dan sumber daya kesehatan yang sangat memadai. Semua penduduk ber-KTP Kota Denpasar juga telah tercakup dalam jaminan kesehatan nasional. Namun demikian masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan di masa depan. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Neonatal cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa penyebabnya antara lain masalah kesehatan yang mempengaruhi proses kehamilan, persalinan maupun masa nifas (penyebab non obstetric) masih dominan, disamping karena perdarahan, hipertensi, dan infeksi, kesadaran gizi ibu hamil belum merata, kelainan perinatal kehamilan berisiko tinggi seperti asfiksia, pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya pemberian perawatan antenatal serta perawatan bayi baru lahir belum merata, dan deteksi dini masalah kesehatan secara umum yang menyertai kehamilan belum optimal. Begitu juga Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Bayi walaupun sudah sangat rendah akan tetapi cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penyebabnya antara lain kesadaran gizi ibu hamil masih merata, sebagai salah satu faktor bayi lahir berat badan rendah, gangguan kesehatan pada balita seperti pneumonia dan infeksi lainnya, dan adanya gangguan perinatal yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin. Permasalahan lainnya yaitu prevalensi HIV pada penduduk dewasa masih tinggi, penyalahgunaan narkoba, tingginya insiden tuberkulosis, prevalensi tekanan darah tinggi, dan obesitas. Kota Denpasar sebagai destinasi pariwisata internasional tergolong rawan terhadap penyebaran HIV, sementara itu kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS belum

merata. Begitu juga Kota Denpasar rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba bagi kesehatan belum merata. Insiden Tuberkulosis di Kota Denpasar tergolong tinggi yang mengindikasikan belum optimalnya pelibatan dan kontribusi fasyankes dalam jejaring layanan tuberkulosis dan pelaporan tuberkulosis. Prevalensi tekanan darah tinggi juga masih tinggi dan cenderung meningkat dimana masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa dirinya menderita hipertensi sehingga tidak mencari pelayanan dan masih banyak penderita hipertensi yang belum terdeteksi. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun masih tinggi, penyebabnya antara lain karena kesadaran masyarakat tentang pola makan dan pola hidup sehat belum merata dimana pola makan tidak sehat dan kegemaran konsumsi makanan berkalori tinggi semakin meningkat. Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan juga masih rendah dan cenderung menurun di Kota Denpasar.

4. Mutu dan pemerataan pendidikan belum optimal.

Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan ke depan meliputi, tingkat pemerataan pendidikan berdasarkan Angka Partisipasi Kasar PAUD yang disebabkan karena pemahaman orang tua tentang pentingnya PAUD belum merata, terdapat pula faktor ekonomi yang mempengaruhi kesanggupan memasukkan anak ke PAUD. Angka Partisipasi Kasar SD/ sederajat dan SMP/ sederajat juga masih rendah dan cenderung menurun. Hal ini menunjukkan akselerasi pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun kurang merata di semua lapisan masyarakat. Pembangunan pendidikan ke depannya tidak hanya menghadapi tantangan peningkatan akses pendidikan akan tetapi juga menyangkut mutu pendidikan. Beberapa permasalahannya meliputi kompetensi guru yang masih rendah diindikasikan oleh persentase guru bersertifikat pendidik masih rendah, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran yang didukung oleh infrastruktur internet belum merata, masih banyak sekolah yang belum memiliki layanan internet memadai, dan masih rendahnya keterampilan TIK di kalangan remaja. Disamping sekolah, bimbingan orang tua tentang pentingnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi sejak usia dini sangatlah penting.

5. Resilensi dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim belum optimal.

Dari aspek kebencanaan, Kota Denpasar dihadapkan pada permasalahan tinggi dan beragamnya ancaman bencana (bencana alam, bencana geologi, bencana meteorologi. Sementara itu kerentanan demografi, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana masih tinggi serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana belum optimal yang disebabkan karena pembangunan Sistem Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat belum merata. Secara kelembagaan, kapasitas daerah melalui dukungan kebijakan dan regulasi

daerah tentang penanggulangan bencana belum memadai. Pemerintah daerah belum mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah termasuk adaptasi terhadap **perubahan** iklim yang selaras dengan strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana nasional serta penerapan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan belum optimal.

6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi.

Beberapa permasalahan dan tantangan ke depan yang dihadapi terkait dengan pembangunan bidang ekonomi meliputi pendayagunaan potensi ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal belum optimal dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih terbatas, tidak merata, kurang terpadu, dan kurang akselerasi. Ketidakseimbangan struktur ekonomi antarsektor (ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata sangat dominan), sementara integrasi pengembangan produk-produk industri kecil dan kerajinan termasuk industri kreatif ke dalam industri pariwisata belum optimal. Di sisi lain usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dan ekonomi kreatif yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal. Begitu juga pengembangan industri dan hilirisasi produk-produk pertanian dalam arti luas dan perikanan belum optimal dan kurang didukung dengan penerapan teknologi tepat guna dan inovasi untuk mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah yang produktif dan bernilai tambah tinggi, berdaya saing tinggi dan kompetitif. Di sisi lain pendapatan daerah sebagai dukungan permodalan dan infrastruktur ekonomi serta sebagai mesin penggerak ekonomi masih rendah. Disamping sumber pendapatan asli daerah yang sangat terbatas mengingat Kota Denpasar tidak memiliki sumber daya alam sebagai Dana Bagi Hasil bagi daerah, penggalan potensi pendapatan asli daerah juga belum optimal. Rendahnya pendapatan daerah berimplikasi pada lemahnya dukungan pembiayaan terhadap pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

7. Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja.

Beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi rata-rata tingkat pendidikan angkatan kerja masih rendah, persaingan lapangan kerja formal semakin ketat, seseorang bekerja tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, terbatasnya lapangan pekerjaan bagi penduduk usia muda yang tidak sekolah atau baru menamatkan pendidikan menengah dan perguruan tinggi, belum sinkronnya dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja sehingga sebagian penduduk usia muda yang baru menyelesaikan pendidikan tidak dapat langsung memasuki dunia kerja, dan terbatasnya akses terhadap pelatihan tenaga kerja.

8. Kinerja penerapan ekonomi hijau masih rendah.

Beberapa permasalahannya meliputi masih tingginya pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil sehingga sumbangan emisi CO₂ di sektor energi masih tinggi. Energi sebagai penyumbang terbesar emisi GRK disebabkan karena penggunaan energi fosil untuk transportasi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kendaraan bermotor. Sementara itu penggunaan energi bersih dihadapkan pada permasalahan belum terbangunnya infrastruktur jaringan gas sebagai sumber energi bersih dan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) masih rendah karena terbatasnya sumber EBT mapan dan ketersediaan lahan untuk pengembangan PLTS skala besar terbatas.

9. Kualitas lingkungan hidup masih rendah.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dihadapkan pada beberapa permasalahan meliputi persampahan, kualitas tutupan lahan yang rendah, pencemaran perairan, dan pelestarian keanekaragaman hayati yang belum optimal. Permasalahan persampahan meliputi implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber di desa/kelurahan dan desa adat belum efektif, daur ulang sampah secara produktif belum terbangun termasuk fasilitas TPS-3R belum merata, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum merata sementara timbunan sampah semakin meningkat, kesadaran masyarakat dan pelaku industri dalam pengelolaan sampah belum merata, pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai belum optimal dan merata, kampanye pengelolaan sampah kurang merata di seluruh masyarakat, dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pengelolaan limbah B3 masih rendah. Peningkatan kualitas lahan dihadapkan pada permasalahan keterbatasan ketersediaan cadangan lahan yang dapat dikembangkan menjadi lahan bervegetasi/ruang terbuka hijau dan tingginya alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun. Beban pencemaran perairan masih tinggi dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan yang bersumber dari kegiatan domestik, pertanian, dan industri menyebabkan kualitas air semakin menurun. Sedangkan pelestarian keanekaragaman hayati belum didukung rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai pedoman bagi semua pihak dalam perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian keanekaragaman hayati khususnya plasma nutfah lokal masih rendah, sumber daya genetik tumbuhan dan hewan lokal belum terdata/teinventarisasi secara lengkap, serta pengurangan habitat keanekaragaman yang disebabkan alih fungsi semakin meningkat.

10. Keterbatasan daya dukung air untuk pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber-sumber air yang dapat diakses oleh rumah tangga, proporsi lahan terbuka semakin menyusut yang menyebabkan infiltrasi air ke dalam tanah semakin

berkurang yang menyebabkan air tanah semakin terkuras, pencemaran air permukaan menyebabkan berkurangnya potensi pemanfaatan air permukaan, dan eksternalitas negatif pariwisata dalam penyediaan air publik (*public water supply*).

11. Sarana dan prasarana wilayah belum memadai.

Permasalahan di bidang sarana dan prasarana transportasi meliputi tingkat kemantapan jalan belum optimal disebabkan karena kemampuan keuangan pemerintah daerah masih menjadi kendala untuk peningkatan kualitas jalan dibandingkan dengan laju kerusakannya dan pengguna moda transportasi umum di perkotaan masih rendah disebabkan karena ketertarikan penggunaan transportasi umum masih rendah dan moda transportasi publik beserta rutenya masih terbatas. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan juga belum memadai meliputi sarana dan prasarana pengelolaan sampah, infrastruktur IPAL skala kota dan kawasan belum merata jaringannya, dan kapasitas infrastruktur penyediaan air bersih oleh pemerintah masih terbatas serta jaringan perpipaan air bersih belum merata di seluruh wilayah.

B) Isu Strategis Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Sosial

Sumber daya manusia yang berdaya saing merupakan modal utama pembangunan, karena penduduk memainkan peran ganda sebagai subjek dan objek pembangunan. Dalam hal ini, daya saing sumber daya manusia digambarkan melalui kualitas layanan pendidikan, kualitas layanan kesehatan, daya saing sumber daya manusia, profil demografi, serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

a) Kualitas Layanan Pendidikan

Kualitas layanan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia dengan menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang relevan. Peningkatan kualitas layanan pendidikan merupakan investasi masa depan. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah, meratakan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar kompetensinya, serta meningkatkan sarana prasarana pendidikan yang belum terpenuhi dan belum sesuai standar. Kualitas layanan pendidikan yang unggul mempersiapkan individu untuk bersaing secara global dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

b) Kualitas Layanan Kesehatan

Kualitas layanan kesehatan yang baik adalah modal penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing. Layanan kesehatan yang optimal memastikan individu dalam masyarakat tetap sehat,

produktif, dan mampu berkontribusi secara maksimal dalam berbagai sektor kehidupan. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat dilakukan melalui pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat terkait gaya hidup sehat, serta meningkatkan paham iterasi masyarakat terkait kesehatan.

c) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan daya saing SDM dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi, optimalisasi penyerapan tenaga kerja, serta perbaikan jaminan dan perlindungan tenaga kerja. Dukungan terhadap kepemudaan dan olahraga harus ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pengangguran, sekaligus mengatasi ancaman penurunan angkatan kerja di masa depan. Peningkatan daya saing ini akan berdampak positif pada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

d) Profil Demografi

Dengan memanfaatkan potensi angkatan kerja muda yang melimpah dan memastikan penyebaran tenaga kerja yang seimbang, produktivitas dan kesejahteraan akan meningkat, serta efisiensi ekonomi lokal dapat terjaga. Strategi yang tepat dalam memanfaatkan bonus demografi dan mengendalikan migrasi akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan daya saing SDM yang tinggi.

e) Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan membangun kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan melibatkannya dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, keputusan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi yang ada. Pelibatan masyarakat akan meningkatkan rasa kepemilikan, transparansi, dan kolaborasi antarsektor untuk menciptakan pembangunan inklusif yang optimal.

2. Perekonomian dan Daya Saing Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi erat kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan daya saing daerah. Perekonomian dan daya saing daerah menjadi modal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mendukung terciptanya Kota Denpasar yang lebih maju melalui pengembangan kemandirian dan ketangguhan ekonomi daerah menggunakan potensi yang dimiliki.

a) Daya Saing Ekonomi Daerah

Peningkatan daya saing ekonomi daerah perlu mendapatkan dukungan dari optimalisasi alokasi pendanaan sesuai dengan kapasitas keuangan pemerintah daerah. Salah satu ancaman yang dapat menghambat

pertumbuhan daya saing ekonomi daerah adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan masih tingginya ketimpangan pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki makna bahwa pendapatan dan sumber daya daerah meningkat secara selaras akan membantu peningkatan daya saing daerah sehingga mampu mendorong inovasi pada berbagai bidang ekonomi dan investasi.

b) **Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber-Sumber Ekonomi Lokal**

Dalam pendayagunaan dan pengembangan sumber-sumber ekonomi lokal, terdapat berbagai ancaman yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu tantangannya adalah kurangnya kemandirian dalam manajemen sumber daya ekonomi untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan, termasuk pengembangan sumber-sumber ekonomi lokal. Secara umum, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta membantu mewujudkan ketangguhan daerah dan ketahanan pangan. Pendayagunaan dan pengembangan ekonomi dengan sumber-sumber lokal dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta daya saing daerah, yang dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha, optimalisasi hilirisasi produk, percepatan digitalisasi, serta pengembangan akses pasar yang lebih luas.

c) **Sinergi Pembangunan Antarwilayah (SARBAGITA)**

Secara kewilayahan, SARBAGITA atau Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan adalah kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan utama di Provinsi Bali dan merupakan kawasan strategis nasional yang memiliki fungsi yang saling terhubung dan berkaitan. Kota Denpasar sebagai kawasan perkotaan inti memiliki peran sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dana layanan di Provinsi Bali.

Dukungan antar wilayah dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, sehingga perlunya kolaborasi dan koordinasi antar kabupaten/kota agar dapat memberikan dampak berganda terhadap ekonomi dan pembangunan wilayah. Hal ini dapat diupayakan melalui kerjasama dan koordinasi untuk pengintegrasian sistem infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, dan sebagainya. Sinergi ini dapat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh bagi seluruh kawasan SARBAGITA.

3. Penyediaan Layanan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Penyediaan layanan infrastruktur dan lingkungan hidup merupakan aspek krusial dalam mengembangkan suatu wilayah. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan faktor lingkungan hidup agar pembangunan tidak merusak ekosistem dan sumber daya

lingkungan untuk mewujudkan Kota Denpasar yang inklusif dan berkelanjutan.

a) Pembangunan dan Penataan Ruang Berbasis Budaya dan Lingkungan

Pembangunan dan penataan ruang sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek hidup masyarakat. Kondisi jumlah kependudukan yang meningkat akibat adanya urbanisasi dan kegiatan ekonomi berdampak pada tingginya konversi lahan serta meningkatnya luas permukiman kumuh. Perlunya pembangunan dan penataan ruang yang optimal akan mendorong terwujudnya ruang yang aman dan nyaman untuk makhluk hidup maupun lingkungan. Maka dari itu, perlu berbagai upaya untuk mendorong terwujudnya penataan ruang yang efektif. Upaya ini dilakukan dalam bentuk optimalisasi perwujudan hingga pengawasan struktur dan pola ruang dalam memenuhi sarana prasarana dasar dan mendorong pemerataan pembangunan wilayah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b) Pengawasan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup berpengaruh signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan kata lain, peningkatan kualitas lingkungan hidup akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Untuk itu, pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup perlu dioptimalkan melalui pengetatan pemberian dan pengawasan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas lahan yang terdegradasi, pengelolaan limbah dan yang efektif, dan peningkatan pengelolaan dan pendauran ulang sampah.

c) Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan dasar pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Komitmen ini akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup berupa pengelolaan sampah, sumber daya alam, ruang terbuka hijau, serta pengendalian perencanaan, dapat mengurangi tekanan akibat meningkatnya kuantitas kegiatan ekonomi yang diproyeksikan akan meningkat seiring terjadinya urbanisasi. Selain itu, mitigasi terhadap perubahan iklim juga perlu dipertimbangkan mengingat Kota Denpasar merupakan wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim mengingat wilayahnya memiliki kawasan pesisir. Mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, serta penggunaan prinsip pembangunan rendah karbon dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

d) Pengembangan Transportasi Berkelanjutan dan *Smart Mobility*

Kota Denpasar sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, dan pariwisata dengan memiliki kebutuhan mobilitas yang tinggi dan dinamis. Kondisi mobilisasi kendaraan yang berasal dari berbagai wilayah dan meningkatnya

jumlah kendaraan pribadi akan berpotensi mengakibatkan meningkatnya keparahan kemacetan yang akan terjadi di masa depan. Selain itu, belum optimalnya keberadaan transportasi publik disebabkan budaya masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan transportasi umum perlu menjadi perhatian khusus. Transformasi dalam sistem transportasi perlu dalam mewujudkan keberlanjutan pembangunan Kota Denpasar.

Transformasi sistem transportasi menuju sistem yang berkelanjutan dan *smart mobility* dilakukan untuk mengatasi permasalahan transportasi yang kompleks dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan perencanaan transportasi secara holistik. *Smart mobility* diterapkan dalam mendukung operasional pengembangan transportasi publik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sekaligus dapat turut menyelesaikan permasalahan kemacetan yang ada di Kota Denpasar. Penerapan *smart mobility* mencakup sistem manajemen lalu lintas cerdas, integrasi transportasi publik, pelayanan transportasi *real-time*, serta pengembangan kendaraan ramah lingkungan dengan infrastruktur pendukung. Selain diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kondisi kemacetan dan transportasi publik di Kota Denpasar, pengembangan transportasi berkelanjutan dan *smart mobility* dapat menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan di masa depan yang lebih modern dan ramah lingkungan melalui upaya mendorong efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan peningkatan kenyamanan dan keamanan penggunaan transportasi.

4. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan termasuk aspek penting dalam pembangunan karena pemerintah merupakan aktor utama dalam mewujudkan *Good Governance*. Peningkatan tata kelola pemerintahan dilakukan melalui percepatan transformasi digital, pengintegrasian data dan informasi sektoral, pengintegrasian perencanaan pembangunan sektoral, pengoptimalan penyelenggaraan persandian dan pengelolaan arsip, penyederhanaan birokrasi dan prosedur pelayanan publik, peningkatan kualitas dan integritas aparatur sipil negara, pengoptimalan penyerapan dan penggunaan anggaran, pengoptimalan pemanfaatan aset, pengoptimalan pemanfaatan hasil riset, pengoptimalan partisipasi politik masyarakat, dan penanganan konflik dan kriminalitas secara efektif.

Reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan dilakukan untuk menyempurnakan sistem pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan dapat memberikan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang prima salah satunya ditopang melalui digitalisasi pelayanan publik. Pelayanan

publik berbasis digital juga akan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam mewujudkan *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan, Kota Denpasar telah berinisiasi mengembangkan *Smart City*. Keberadaan *smart city* perlu didukung dengan ekosistem *smart city* yang berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan kualitas dari infrastruktur digital, penguatan literasi digital masyarakat, serta integrasi kuat antarinstansi dalam mendukung hal tersebut. Perluasan jangkauan layanan digital juga menjadi aspek penting dalam mendukung lingkungan pemajuan layanan publik digital mengingat masih adanya kesenjangan digital yang signifikan di berbagai segmen masyarakat dan kondisi penetrasi internet di Provinsi Bali yang belum menyeluruh di Provinsi Bali (RP2P Kota Denpasar Tahun 2025-2029). Selain itu keamanan siber dan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur TIK juga turut menjadi perhatian khusus dalam mewujudkan keamanan digital.

5. Keamanan dan Ketahanan Daerah

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Terjaminnya keamanan juga berhubungan dengan percepatan realisasi investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain kriminalitas, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, serta ketahanan daerah berkaitan pula dengan ancaman bencana dan pangan.

6. Pelestarian Budaya yang Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan

Budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam pengembangan suatu kota, termasuk Kota Denpasar. Kota Denpasar memiliki beragam objek wisata dan budaya yang menjadi daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara. Supaya Kota Denpasar tetap bersaing dan berkembang, sumber daya manusia di Kota Denpasar perlu memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya yang unik. Hal ini dapat dilakukan melalui inovasi, adaptasi, dan keberlanjutan dalam sektor pariwisata dan budaya.

Pengembangan budaya yang berkelanjutan juga melibatkan pengembangan atraksi budaya dan masyarakat sekitar tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Dalam hal ini, sumber daya manusia perlu memiliki pemahaman yang baik tentang budaya lokal dan kemampuan untuk mengembangkannya secara inovatif. Misalnya, dengan menciptakan pertunjukan seni yang baru dan unik, atau menggabungkan elemen budaya tradisional dengan teknologi modern. Selain itu, sumber daya manusia di Kota Denpasar juga perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam industri pariwisata dan budaya. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan destinasi wisata dan budaya Kota Denpasar.

Pentingnya keberlanjutan budaya akan berimbas terhadap sektor pariwisata. Hal ini dapat dilakukan melalui pengelolaan yang baik terhadap lingkungan, pelestarian warisan budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, budaya di Kota Denpasar dapat terus berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan melalui pariwisata, sambil tetap mempertahankan identitas budaya yang unik dan khas.

Tabel 2. 128
Penyelarasan permasalahan, isu strategis daerah, dan Misi RPJMD Kota Denpasar 2025 – 2029

POTENSI DAERAH	DATA PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH	MISI RPJMD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029
- Indeks Pembangunan Manusia 2024: 85,22 (di atas Provinsi dan Nasional)	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2024: 69,71 (lebih rendah dari Provinsi) - Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan cenderung menurun: 62% (2022) - Tingkat Pengangguran Terbuka 2024: 2,11% (paling tinggi dari kab. lain di Bali, dan lebih tinggi dari Prov. Bali) - Persentase Organisasi Pemuda Aktif 2022: 89,05 (tahun 2020 mencapai 100%)	Rendahnya daya saing sumber daya manusia	Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Sosial	Misi 1: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan
- Indeks Pembangunan Literasi Membaca 2022: 92,49% - Angka Melek Huruf (99,47%); HLS (14,11 tahun); RLS (11,53 tahun) tahun 2023 di atas provinsi dan nasional - Angka Kelulusan untuk semua jenjang sudah 100%	- Angka Putus Sekolah tingkat SMP meningkat dari 0,002 (2022) menjadi 0,012 (2023) - Masih tingginya jumlah guru honorer nonsertifikasi pendidikan yang menyebabkan beban pendidikan profesi guru (PPG) semakin besar - Cakupan PAUD tergolong rendah: 20,15% (2023)	Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan		
- Angka Harapan Hidup Denpasar (2023): 75,59 tahun (di atas nasional dan provinsi) - Cakupan kunjungan ibu hamil, pelayanan nifas, sudah mencapai 100% (2023)	- Angka kematian bayi meningkat dari 3,8 (2022) menjadi 6,62 (2023) - Angka Kematian Ibu masih tinggi: 49,64 (2023) - Prevalensi Balita Gizi Kurang: 0,5 (2023), meningkat sejak 2019 - <i>Non Polio AFP Rate</i> Per 100.000 Penduduk Usia <15 Tahun meningkat dari 1,3 (2022) menjadi 7,7 (2023) - Angka Kejadian Malaria: 0,02 (2023), menjadi yang tertinggi sejak 2014	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan kesehatan		

POTENSI DAERAH	DATA PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH	MISI RPJMD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kunjungan Wisatawan secara signifikan dari 42.259 (2021) menjadi 1.647.317 (2022) - Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi yang tertinggi pada 2023: 23,84% - Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 2023: 6,31 (paling tinggi di antara kab/kota Prov. Bali) 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Gini 2023: 0,342 (tertinggi kedua di Prov. Bali) - Ketidakseimbangan struktur ekonomi antarsektor (ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata sangat dominan) 	Rendahnya daya saing ekonomi daerah	Perekonomian dan Daya Saing Daerah	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah mengalami penurunan pada 2022: 29,749 (tahun 2021 sebanyak 32.226) - Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2022: 4,19% (tahun 2019 mencapai 9,26%) - Pengembangan industri dan hilirisasi produk-produk pertanian dalam arti luas dan perikanan belum optimal - Integrasi pengembangan produk-produk industri kecil dan kerajinan ke dalam industri pariwisata belum optimal 	Belum optimalnya pendayagunaan dan pengembangan sumber-sumber ekonomi lokal		
- IRB Kota Denpasar memiliki tren menurun 108 (2019) menjadi 96,18 (2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi geospasial yang menjadikan tingginya kerentanan dan beragamnya ancaman bencana (tsunami, banjir, gempa bumi, intrusi air, kebakaran, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, dan abrasi pantai) - Upaya mitigasi risiko bencana di Kota Denpasar masih belum optimal karena pembangunan Sistem Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat belum merata 	Belum optimalnya penanganan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Keamanan dan Ketahanan Daerah	Misi 2: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana

POTENSI DAERAH	DATA PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH	MISI RPJMD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029
<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketentraman dan ketertiban di Kota Denpasar meningkat; [87,5(2019);100(2023)] - Persentase tindak pidana yang diselesaikan mengalami tren kenaikan 2019-2022 (88,95;102,71) 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase jumlah tindak pidana yang dilaporkan tertinggi di Provinsi Bali tahun 2022 (28,31) 			
<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Demokrasi mengalami kenaikan 68,63 di tahun (2019) menjadi 85,53(2023) - Indeks SPBE memiliki predikat sangat baik dan mengalami peningkatan 3,33 (2019) menjadi 3,8 (2023) 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Inovasi Daerah belum mencapai target (59,17 di tahun 2023, masih dalam predikat baik) 	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Misi 3: Kejujuran dan Spirit <i>Sewakadarma</i> sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)
<ul style="list-style-type: none"> - Tren proporsi panjang jalan dengan kondisi baik mengalami peningkatan [64,03(2019)-74,47(2023)] 	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota menurun dari 486,08(2021) menjadi 450,12(2023) - Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menurun 1631(2019) menjadi 1360(2023) - Kondisi jalan dengan kualitas baik masih jauh dari 100% (74,47 di tahun 2023) - Rendahnya presentase rumah tinggal bersanitasi IPAL DSDP & komunal 9,24% di tahun 2023 - Belum tercapainya target rasio angka rumah layak huni di tahun 2022(25) [target tahun 2026 (27,14%)] - Belum tercapainya target drainase dalam kondisi baik/tidak tersumbat sebesar 99,86 (2023) [target 100] - Belum tercapainya target irigasi kab/kota dalam 	Belum optimalnya pembangunan dan penataan ruang	Penyediaan Layanan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Misi 4: Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Kesisinambungan Pembangunan Berbasis <i>Tri Hita Karana</i>

POTENSI DAERAH	DATA PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH	MISI RPJMD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029
	<p>kondisi baik sebesar 99,96 (2023) [target 100]</p> <p>- Menurunnya rasio jaringan irigasi 14,98 (2019) menjadi 11,52 (2023) [dibawah target 2026, 23,56%]</p> <p>- Menurunnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan) 56,43 (2020) menjadi 53,21 (2023) [Belum mencapai target 100%]</p> <p>- Persentase area kawasan kumuh 0,65% tahun 2020 [target (0%)]</p> <p>- Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani belum mencapai target 0% kawasan kumuh (tertangani 0,84% tahun 2023)</p> <p>-Rasio RTH per satuan luas wilayah HPL/HGB menurun [3,02 (2017) menjadi 2,26 (2019)], meskipun target RTH publik sudah memenuhi target (20%)</p>			
- Meningkatnya tren penumpang angkutan umum laut (2022-2023)	<p>- Menurunnya penumpang angkutan darat 734.878 (2022) menjadi 556.575 (2023)</p> <p>-Jumlah uji KIR kendaraan menurun (52.826 tahun 2019 menjadi 28.190 tahun 2023)</p> <p>- Jumlah jalan kurang memadai [rasio panjang jalan menurun 0,0004 (2019) mejadi 0,0003 (2023)]</p>	Rendahnya kualitas jaringan jalan dan pelayanan angkutan umum		
- Tren IKLH mengalami peningkatan dari 51,22 (2019) menjadi 58,78 (2023)	<p>- IKLH masih pada predikat "kurang baik", [58,78(2023)] dan masih berada dibawah angka nasional (72,54)</p> <p>- Kualitas tutupan lahan predikat waspada (29,11</p>	Belum optimalnya pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup		

POTENSI DAERAH	DATA PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH	MISI RPJMD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029
	th 2023) karena pesatnya pembangunan - Penurunan persentase timbulan sampah yang tertangani 93,5 (2019) menjadi 81,6 (2022)			
- Kota Denpasar berada pada posisi pertama dengan Indeks Desa Membangun tertinggi di Provinsi Bali dan Indonesia: 0,9388 (2023) - Tahun 2016 - 2023 terdapat 35 desa adat yang aktif.	- Indeks Pemberdayaan Gender masih di bawah provinsi dan nasional: 69,22 (2023)	Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Sosial	Misi 5: Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali
- Kota Denpasar memiliki kekayaan budaya Bali yang kuat dan berkelanjutan, didukung oleh keberadaan desa adat, banjar, sekaa seni, seniman, serta aktivitas seni budaya dan upacara adat yang berlangsung secara rutin. - Denpasar berperan sebagai pusat seni dan budaya Bali dengan potensi pengembangan budaya berbasis ekonomi kreatif, pariwisata budaya, dan pemanfaatan teknologi digital.	- Kurangnya data terkait kesenian dan pelaku seni. - Belum optimalnya pengembangan potensi budaya. - Belum optimalnya pemanfaatan dan dokumentasi metadata kesenian dan warisan budaya. - Kurangnya kesadaran, kerja sama, dan kolaborasi berbagai pihak dalam pelestarian budaya. - Belum optimalnya pelestarian naskah kuno dan bahan pustaka kunci. - Kurangnya pengakuan terhadap pelaku seni.	Belum optimalnya pelestarian warisan budaya	Pelestarian Budaya yang Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan	Misi 5: Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali

Sumber : Analisis Penyusun, 2025

Tabel 2. 129
Penyusunan Isu Strategis Daerah Kota Denpasar 2025 – 2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS					ISU STRATEGIS DAERAH
			ISU GLOBAL		ISU NASIONAL		ISU REGIONAL	
			Megatrend 2045	Isu Strategis Internasional	Isu dan Tantangan RPJPN	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Daerah Bali	
- Indeks Pembangunan Manusia 2024: 85,22 (di atas Provinsi dan Nasional)	Rendahnya daya saing sumber daya manusia	- Penyelenggaraan perlindungan sosial belum optimal - Mutu dan pemerataan pendidikan belum optimal - Belum optimalnya kualitas kesehatan	- Perkembangan demografi global	- Perubahan Teknologi	- Kualitas SDM yang makin rendah	- Pendidikan Berkualitas yang Merata - Kesehatan untuk Semua	- Rendahnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Sosial
- Indeks Pembangunan Literasi Membaca 2022: 92,49% - Angka Melek Huruf (99,47%); HLS (14,11 tahun); RLS (11,53 tahun) tahun 2023 di atas provinsi dan nasional - Angka Kelulusan untuk semua jenjang sudah 100%	Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan	- Mutu dan pemerataan pendidikan belum optimal	- Perkembangan demografi global - Perkembangan teknologi		- IPTEKIN dan riset lemah - Kualitas SDM yang makin rendah - Infrastruktur dan literasi digital rendah	- Pendidikan Berkualitas yang Merata	- Rendahnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia - Infrastruktur Daerah Belum Merata	
- Angka Harapan Hidup Denpasar (2023): 75,59 tahun (di atas nasional dan provinsi) - Cakupan kunjungan ibu hamil, pelayanan nifas, sudah mencapai 100% (2023)	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan kesehatan	- Belum optimalnya kualitas kesehatan	- Perkembangan demografi global - Perkembangan teknologi		- Kualitas SDM yang makin rendah - Infrastruktur dan literasi digital rendah	- Kesehatan untuk Semua		

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS					ISU STRATEGIS DAERAH
			ISU GLOBAL		ISU NASIONAL		ISU REGIONAL	
			Megatrend 2045	Isu Strategis Internasional	Isu dan Tantangan RPJPN	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Daerah Bali	
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kunjungan Wisatawan secara signifikan dari 42.259 (2021) menjadi 1.647.317 (2022) - Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi yang tertinggi pada 2023: 23,84% - Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 2023: 6,31 (paling tinggi di antara kab/kota Prov. Bali) 	Rendahnya daya saing ekonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi - Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja - Kinerja penerapan ekonomi hijau masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan konstelasi perdagangan global - Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam - Pertumbuhan kelas menengah (<i>middle class</i>) 	- Perdagangan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas rendah - Deindustrialisasi dini - Pariwisata di bawah potensinya - Ekonomi laut belum optimal - Kontribusi UMKM dan koperasi kecil - Integrasi domestik terbatas - Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa 	- Penerapan Ekonomi Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - Perekonomian Daerah yang Belum Terkelola dengan Baik - Kuatnya Pariwisata dan Kebudayaan - Berkembangnya Dinamisme Bisnis 	Perekonomian dan Daya Saing Daerah
	Belum optimalnya pendayagunaan dan pengembangan sumber-sumber ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan konstelasi perdagangan global 		<ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas rendah - Pariwisata di bawah potensinya - Kontribusi UMKM dan koperasi kecil 			
- IRB Kota Denpasar memiliki tren menurun 108 (2019) menjadi 96,18 (2023)	Belum optimalnya penanganan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Resiliensi dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim belum optimal - Belum optimalnya kecukupan dan kualitas konsumsi pangan 	- Perubahan iklim	- Perubahan Iklim dan Peningkatan Risiko Bencana	- Kepastian dan penegakan hukum masih lemah	- Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Memuaskan - Melemahnya Ketersediaan Pangan - Kuatnya Pariwisata dan Kebudayaan 	Keamanan dan Ketahanan Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS					ISU STRATEGIS DAERAH
			ISU GLOBAL		ISU NASIONAL		ISU REGIONAL	
			Megatrend 2045	Isu Strategis Internasional	Isu dan Tantangan RPJPN	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Daerah Bali	
- Persentase ketertarikan dan ketertiban di Kota Denpasar meningkat; [87,5(2019);100(2023)] - Persentase tindak pidana yang diselesaikan mengalami tren kenaikan 2019-2022 (88,95;102,71)		- Penyelenggaraan perlindungan sosial belum optimal	- Perkembangan demografi global					
- Indeks Demokrasi mengalami kenaikan 68,63 di tahun (2019) menjadi 85,53(2023) - Indeks SPBE memiliki predikat sangat baik dan mengalami peningkatan 3,33 (2019) menjadi 3,8 (2023)	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan	-	- Dinamika geopolitik dan geoekonomi global - Perkembangan teknologi - Pergeseran tata kelola keuangan global	- Perubahan Geopolitik	- Tata kelola pemerintahan belum optimal - Demokratisasi belum optimal - Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	- Regulasi Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	- Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Memuaskan - Komitmen dalam Menjamin Pemerintahan yang Inovatif	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
- Tren proporsi panjang jalan dengan kondisi baik mengalami peningkatan [64,03(2019)-74,47(2023)]	Belum optimalnya pembangunan dan penataan ruang	- Keterbatasan daya dukung air untuk pembangunan - Sarana dan prasarana wilayah belum memadai	- Peningkatan urbanisasi dunia	- Urbanisasi Dunia	- Infrastruktur dan literasi digital rendah - Pembangunan belum berkelanjutan - Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	- Lingkungan Hidup Berkualitas	- Infrastruktur Daerah Belum Merata - Pengelolaan Sampah dan Emisi Karbon Masih Rendah	Penyediaan Layanan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
- Meningkatnya tren penumpang angkutan umum laut (2022-2023)	Rendahnya kualitas jaringan jalan dan pelayanan angkutan umum	- Sarana dan prasarana wilayah belum memadai						
- Tren IKLH mengalami peningkatan dari 51,22 (2019) menjadi 58,78 (2023)	Belum optimalnya pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup	- Kualitas lingkungan hidup masih rendah	- Peningkatan urbanisasi dunia - Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam - Perubahan iklim	- Perubahan Iklim dan Peningkatan Risiko Bencana			- Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS					ISU STRATEGIS DAERAH
			ISU GLOBAL		ISU NASIONAL		ISU REGIONAL	
			Megatrend 2045	Isu Strategis Internasional	Isu dan Tantangan RPJPN	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Daerah Bali	
<ul style="list-style-type: none"> - Kota Denpasar berada pada posisi pertama dengan Indeks Desa Membangun tertinggi di Provinsi Bali dan Indonesia: 0,9388 (2023) - Tahun 2016 - 2023 terdapat 35 desa adat yang aktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan perlindungan sosial belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan demografi global - Pertumbuhan kelas menengah (<i>middle class</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas SDM yang makin rendah - Tata kelola pemerintahan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Berkualitas yang Merata - Regulasi Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia - Komitmen dalam Menjamin Pemerintahan yang Inovatif - Kuatnya Pariwisata dan Kebudayaan - Komitmen dalam Meningkatkan Keterampilan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Sosial
<ul style="list-style-type: none"> - Kota Denpasar memiliki kekayaan budaya Bali yang kuat dan berkelanjutan, didukung oleh keberadaan desa adat, banjar, sekaa seni, seniman, serta aktivitas seni budaya dan upacara adat yang berlangsung secara rutin. - Denpasar berperan sebagai pusat seni dan budaya Bali dengan potensi pengembangan budaya berbasis ekonomi kreatif, pariwisata budaya, dan pemanfaatan teknologi digital. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelestarian warisan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan perlindungan sosial belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan demografi global - Pertumbuhan kelas menengah (<i>middle class</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas SDM yang makin rendah - Pembangunan belum berkelanjutan - Pariwisata di bawah potensinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Berkualitas yang Merata 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuatnya Pariwisata dan Kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelestarian Budaya yang Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan

Sumber: RPJPN 2025 – 2045; Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Denpasar 2025 – 2029; dan Analisis Penyusun, 2025

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 VISI DAN MISI

3.1.1.1 VISI

Visi merupakan gambaran arah pembangunan dan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang (2025–2029) yang diwujudkan ke dalam misi. Visi dan misi RPJMD Kota Denpasar 2025–2029 merupakan penjabaran lima tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar 2025–2045. Berdasarkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka visi pembangunan Kota Denpasar dalam RPJMD Tahun 2025–2029 adalah:

***“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU
BERLANDASKAN NILAI-NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”***

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Denpasar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Denpasar saling bekerja sama dalam mewujudkan visi tersebut. Visi pembangunan tersebut perlu diuraikan menjadi pokok-pokok visi untuk memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik, dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi. Dalam mengembangkan penjelasan visi harus merujuk sasaran pokok RPJPD Kota Denpasar periode keempat untuk menghasilkan penjelasan visi yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD.

Visi RPJMD Kota Denpasar 2025–2029 dimaknai sebagai “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” dengan pelaksanaan pola pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”. *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui pola pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru mengandung makna bahwa “menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* menuju kehidupan *krama* dan *gumi* Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945”.

Frasa “*Berlandaskan Nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” pada visi

pembangunan Kota Denpasar mengandung makna bahwa arah pembangunan daerah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal Bali yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), manusia dengan sesama (*Pawongan*), serta manusia dengan alam (*Palemahan*). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral, etika, dan spiritual dalam setiap kebijakan dan inovasi pembangunan daerah, sehingga kemajuan yang dicapai senantiasa berakar pada budaya, karakter, dan jati diri masyarakat Bali. Selain itu, frasa ini juga mencerminkan bahwa visi pembangunan Kota Denpasar selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali yang berlandaskan konsep *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, sehingga pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berlangsung secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah Bali.

Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai “Denpasar kota hidup”, yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk mendorong inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk mendorong dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk mendorong kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan; dinamika kultur bersandar pada keseimbangan; dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Adapun kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar akan menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius.

Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul. Untuk mewujudkan visi tersebut, disertai dengan implementasi industri kreatif berbasis budaya secara sistematis, partisipatif, demokratis, humanis, dan berkelanjutan (*sustainable*), *Purradhipa Bhara Bhawana* yang diartikan Kewajiban Pemerintah meningkatkan Kemakmuran Rakyat menjadi slogan bersama menuju Denpasar maju.

Makna Krama (manusia) Bali sebagai kreator diharapkan tetap dijaga dan mampu memahami konsep pembangunan secara utuh dan operasional, tentang kota kreatif, industri kreatif, ekonomi kreatif, dan kebudayaan Bali yang cocok dengan kontekstual masyarakat Denpasar. Adapun sains tekno-

ekonomi sebagai energi kebudayaan untuk mendorong inovasi dan kreativitas yang menjadi unggulan kompetitif dalam rangka menata keberadaan, perkembangan, dan persebaran unsur-unsur budaya sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan.

Lingkungan sebagai habitat kebudayaan mesti terjaga berkelanjutan pada kondisi kontekstual tentang beragam unsur kebudayaan dalam habitat urban. Sementara itu, organisasi sosial tradisional sebagai wadah kebudayaan didesain tetap mampu mengimbangi semakin terbukanya beragam peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara tradisi, ekonomi, teknologi, dan sains. Agama sebagai roh dan jiwa kebudayaan yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial diposisikan menjadi inti dan titik tumpu perkembangan masyarakat.



Gambar 3. 1
Penyelarasan Visi RPJMD Kota Denpasar dengan Visi RPJMN, dan RPJPD Kota Denpasar

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

3.1.1.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya- upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi.

Visi pembangunan Kota Denpasar tahun 2025–2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

- Misi 1: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan
- Misi 2: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana
- Misi 3: Kejujuran dan *Spirit Sewakadarma* sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

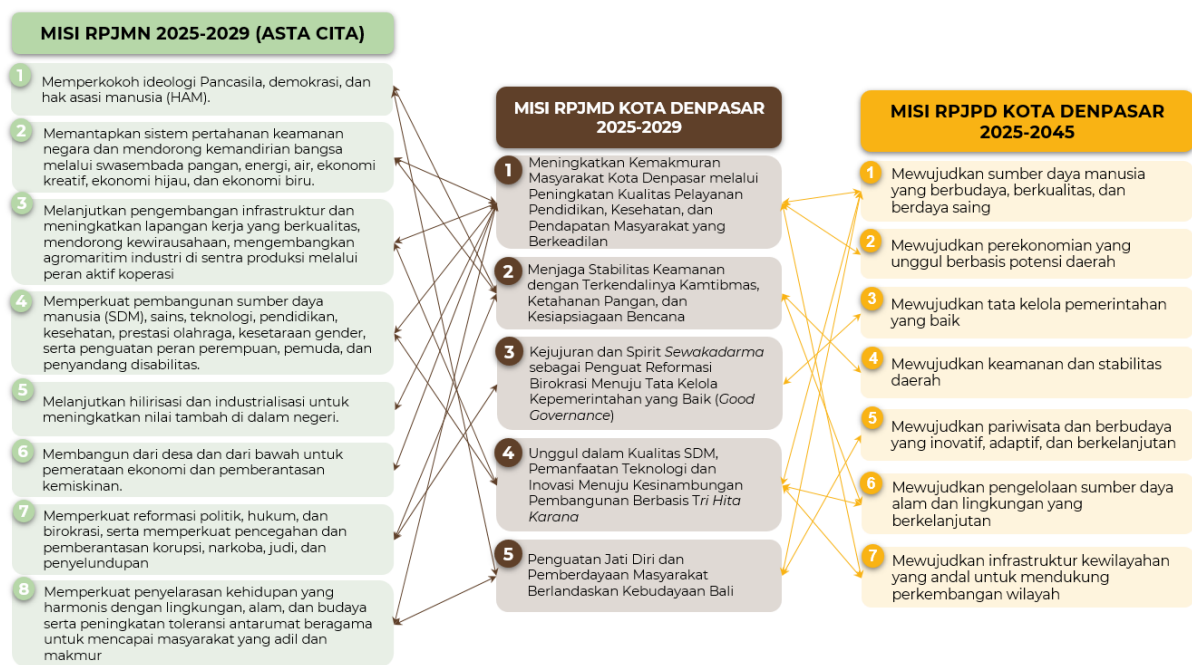
Misi 4: Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana

Misi 5: Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali

Tabel 3. 1
Penjelasan Misi RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029

Misi	Penjelasan Misi
Misi1: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	Masyarakat Denpasar makmur dimaknai sebagai membangun manusia yang sehat; pintar; untuk dapat bekerja, menerima pendapatan dan berkecukupan. Makmur juga dimaknai masyarakat tidak miskin, memiliki rumah layak huni, dengan pembinaan ekonomi lokal berbasis budaya.
Misi 2: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana	Mewujudkan ketertiban masyarakat dan keamanan bersama, mengupayakan ketahanan pangan dan keselamatan dari bencana. Urban farming didukung dengan ketersediaan sumber air dan integrasi beberapa pelayanan dasar merupakan bentuk upaya ketahanan pangan Denpasar.
Misi 3: Kejujuran dan Spirit <i>Sewakadarma</i> sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Tata kelola pemerintahan diwujudkan dengan memelihara <i>spirit sewakadharma</i> (melayani adalah kewajiban) sebagai bentuk reformasi birokrasi. Bentuk upaya menyelenggarakan pembinaan potensi PAD, efisiensi, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, dengan membina jiwa korsa dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana pemerintahan.
Misi 4: Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Kesisambungan Pembangunan Berbasis <i>Tri Hita Karana</i>	Mewujudkan kualitas prima SDM, membina daya saing daerah, melaksanakan penghargaan pemerintah, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis <i>Tri Hita Karana</i> .
Misi 5: Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali	Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Denpasar yang berkarakter dan bermoral. Upaya memelihara dan mengaktualisasikan warisan budaya, membina kegiatan ekspresi budaya, serta memasarkan kebudayaan untuk mewujudkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber: Analisis Penyusun, 2025



Gambar 3. 2
Penyelarasan Misi RPJMD Kota Denpasar dengan Misi RPJMN, dan RPJPD Kota Denpasar

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Keselarasan misi RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dengan misi RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3. 2
Penyelarasan Misi RPJMD Kota Denpasar 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Bali 2025-2029

VISI RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029	VISI RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029
“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam BALI ERA BARU	“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”
MISI 4: Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.	MISI 1: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan
MISI 7: Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.	
MISI 10: Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggisecara nasional dan internasional	
MISI 13: Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali.	
MISI 14: Membangun dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali.	
MISI 15: Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.	

<p>VISI RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029</p> <p>“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam BALI ERA BARU</p>	<p>VISI RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029</p> <p>“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”</p>
<p>17: MISI Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.</p>	
<p>MISI 12: Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan Krama Bali.</p>	<p>MISI 2: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana</p>
<p>MISI 21: Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.</p>	
<p>MISI 22: Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah</p>	
<p>MISI 5: Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.</p>	
<p>MISI 6: Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.</p>	<p>MISI 3: Kejujuran dan Spirit <i>Sewakadarma</i> sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)</p>
<p>MISI 9: Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali</p>	
<p>MISI 16: Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.</p>	
<p>MISI 18: Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan</p>	
<p>MISI 19: Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.</p>	
<p>MISI 20: Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih</p>	
<p>MISI 1: Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala -Sakala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi</p>	
<p>MISI 2: Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan</p>	
	<p>MISI 5: Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali</p>

<p>VISI RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029</p> <p>“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam BALI ERA BARU</p>	<p>VISI RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029</p> <p>“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”</p>
<p>Krama Bali yang meliputi Parahyangan , Pawongan , dan Palemahan</p>	
<p>MISI 3: Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali, serta pelestarian pelaku Kebudayaan Bali.</p>	
<p>MISI 8: Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Widyalaya dan Pasraman di Desa Adat.</p>	

Sumber: Dokumen Bahan Musrenbang RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029, hasil analisis 2025

3.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan yang berisi hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Sementara itu, sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai dasar untuk menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sebagai sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah yang telah disusun, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Denpasar tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan

Tujuan : Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar

- Sasaran :
- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan
 - 2) Meningkatnya kualitas kesehatan
 - 3) Meningkatnya pendapatan masyarakat
 - 4) Berkurangnya kemiskinan

2. Misi 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana

Tujuan : Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kota Denpasar

Sasaran : 1) Terkendalinya keamanan dan ketertiban umum
2) Meningkatnya ketahanan pangan
3) Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana

3. Misi 3 : Kejujuran dan *Spirit Sewakadarma* sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran : 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

4. Misi 4 : Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis *Tri Hita Karana*

Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Daerah

Sasaran : 1) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi daerah
2) Berkurangnya pengangguran

Tujuan : Meningkatnya Keseimbangan Pembangunan yang Berbasis *Tri Hita Karana*

Sasaran: 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

5. Misi 5 : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali

Tujuan : Meningkatnya Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya Bali

Sasaran : 1) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan

Tabel 3. 3
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2026 – 2030

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1 Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	85,11	85,53	85,69	85,84	86	86,16	86,31
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,55	5,65	5,9 - 6,6	7,0 - 8,0	8,0 - 8,5	8,5 - 9,0	8,75- 9,00
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,777	0,778	0,779	0,78	0,782	0,783	0,784
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,01	76,25	76,49	76,73	76,97	77,21	77,45
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB per Kapita	Ribu Rupiah/ Kapita	86.425,33	87.203,94	88.761,15	89.695,48	90.474,08	91.408,41	92.187,02
					93.432,79	94.990,00	95.924,33	96.702,94	97.637,26	98.260,15
	Berkurangnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	2,59	2,47	2,35	2,25	2,14	2,04	1,95
Misi 2 Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalnya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana	Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kota Denpasar	Indeks Stabilitas Keamanan	Indeks	87,17	83,67	85,20	86,67	88,17	89,70	91,17
	Terkendalnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Indeks Trantibumlinmas	Indeks	75	78,17	81,33	84,25	87,17	90,09	92,75
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	96,37	82,75	85,23	87,79	90,42	93,13	95,92
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	90,13	90,1	89,05	87,98	86,92	85,88	84,85
Misi 3 Kejujuran dan Spirit <i>Sewakadarma</i> sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82,05	82,10	82,15	82,20	82,25	82,30	82,35
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks PEMDI	Indeks	N/A	N/A	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
		Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,66	4,66	4,72	4,78	4,84	4,9	4,96

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kepemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP	Nilai	76,92	78,35	80,01	81,21	82,43	83,67	84,92
		Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Misi 4 Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Kesenambungan Pembangunan Berbasis <i>Tri Hita Karana</i>	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,16	4,25	4,35	4,45	4,55	4,65	4,75
	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	indeks	71,17 (sangat inovatif)	72 (sangat inovatif)	73 (sangat inovatif)	74 (sangat inovatif)	75 (sangat inovatif)	76 (sangat inovatif)	77 (sangat inovatif)
	Berkurangnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,11	1,62 - 2,1	1,49 - 1,96	1,36-1,82	1,23-1,68	1,1 - 1,54	0,94 - 1,4
	Meningkatnya keseimbangan pembangunan yang berbasis Tri Hita Karana	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	83,12	84	85	86	87	87,5	88
	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektifitas antar wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	73,3	75,23	76,73	78,23	79,73	81,23	82,73
		persentase kinerja jalan	persen	N/A	68%	68%	69,33%	69,33%	70,66%	70,66%
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	61,14	64,93	65,15	65,36	65,57	65,78	65,99
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	54,2	48	49	50	51	53	54
Misi 5 Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali	Meningkatnya Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya Bali	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	70,01	72,51	73,01	74,03	75,08	76,13	77,2
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat	peningkatan swadaya masyarakat	milyar rupiah	93,694	2,811	2,895	2,982	3,071	3,164	3,259
	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Persentase peningkatan pemajuan kebudayaan	Persen	43,7	45,58	50,87	56,15	61,44	66,73	72,01

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Visi pembangunan Kota Denpasar dapat dicapai dengan efektif dan efisien apabila didukung oleh strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan secara komprehensif. Rumusan strategi diwujudkan dalam bentuk pernyataan yang menjelaskan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan RPJMD, strategi dapat berfungsi sebagai peta jalan bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Strategi memegang peran penting untuk memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, strategi menjadi wawasan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola setiap program dan kegiatan dengan menyusun langkah serta tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan, strategi dijabarkan ke dalam serangkaian arah kebijakan dan berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan bentuk konkret dari upaya pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan. arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Secara komprehensif, strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Arah kebijakan membantu merasionalkan pilihan strategi sehingga dapat menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Berikut merupakan keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029.

Tabel 3. 4

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029

VISI: "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali"			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan			
Meningkatnya kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan
			Pemenuhan kebutuhan sarpras yang optimal
		Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan	Meningkatkan pembinaan dan review kurikulum sekolah
			Bimtek dan Sertifikasi bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
	2. Meningkatnya kualitas kesehatan	Meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam rangka mencegah penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam rangka mencegah penyakit menular dan tidak menular
		Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Menjalin kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
		Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan Puskesmas dan Rumah Sakit
			Meningkatkan kompetensi Tenaga Kesehatan
			Standarisasi industri kesehatan, makanan dan minuman
	3. Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
			Mendorong penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM
			Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM
		Mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif	Menguatkan ekosistem ekonomi kreatif
		Mendorong tumbuhnya investasi di daerah	Menguatkan iklim investasi
		Mendorong tumbuhnya sektor pariwisata	Menguatkan potensi pariwisata berbasis budaya

VISI: "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali"					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
		Mendorong peningkatan ekspor	Menyelenggarakan promosi produk ekspor		
			Mengembangkan produk ekspor unggulan		
			Meningkatkan kualitas produk ekspor unggulan		
		Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan sektor perdagangan	Meningkatkan daya saing industri melalui pemantapan Industri Kecil Menengah (IKM)		
			Meningkatkan promosi perdagangan dan meningkatkan kualitas strategi promosi		
			Meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor ekonomi lokal		
			Meningkatkan kemitraan dan jaringan pemasaran		
		4. Berkurangnya kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran Masyarakat miskin	Pemenuhan bantuan, jaminan dan rehabilitasi sosial	
	Pemenuhan insfrastruktur layak bagi masyarakat miskin.				
	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin		Meningkatkan akses terhadap pekerjaan dan peluang usaha		
			Meningkatkan keterampilan (vokasi dan pelatihan)		
			Memperkuat jaring pengaman sosial dan perlindungan sosial		
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal		
	Penguatan data kemiskinan		Meningkatkan Integrasi dan sinkronisasi data (satu data kemiskinan) dan Satu Data Indonesia (SDI)		
			Meningkatkan akurasi dan validitas data		
			Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan petugas pendata dan verifikator serta peningkatan kapasitas analis data dan pemanfaatan tenaga ahli yang berkompeten		
	MISI 2: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana				
				Meningkatkan kesiapan pelaksana penegakan perda	Meningkatkan penanganan setiap pelanggaran perda
					Meningkatkan penegakan produk hukum daerah

VISI: "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali"			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	1. Terkendalinya keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan perda	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
		Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga dalam pencegahan kriminalitas	Meningkatkan peran lembaga adat dan masyarakat dalam pencegahan kriminalitas
	2. Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam	Menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan
			Manjamin kemananan pangan masyarakat
			Mengoptimalkan produksi pertanian dan perikanan untuk ketahanan pangan
	3. Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana, aparat, dan masyarakat dalam persiapan menghadapi bencana	Menyediakan regulasi, sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana
			Meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
			Meningkatkan kampung tangguh bencana
			Meningkatkan peran serta multistakeholder dalam penanganan bencana
	MISI 3: Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan pelayanan publik secara prima	Meningkatkan efektifitas pelayanan publik di perangkat daerah
			Meningkatkan pengelolaan indikator pelayanan publik yang berkualitas
			Peningkatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
		Meningkatkan literasi digital	Membangun platform terintegrasi untuk layanan pemerintah
			Optimalisasi komunikasi Publik Pemerintah
			Meningkatkan sistem keamanan cyber melalui insfrastruktur dan proteksi data digital
			Mendorong Tranformasi Digital pelayanan publik

VISI: "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali"			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
			Meningkatkan profesionalitas ASN berdasarkan sistem merit
		Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
			Meningkatkan administrasi pengelolaan aset daerah
			Mengoptimalkan potensi PAD
MISI 4: Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Kestinambungan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana			
Meningkatnya daya saing daerah	1. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi dan Inovasi	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam segala Bidang	Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta dan masyarakat
			Meningkatkan fungsi pusat-pusat inovasi digital dan inkubator bisnis
		Membangun iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya inovasi	Meningkatkan pengembangan inovasi pemerintah
			Mendorong tumbuhnya inovasi masyarakat
	2. Berkurangnya Pengangguran	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja pengembangan kewirausahaan	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja
			Penguatan kapasitas SDM dan Ekosistem Kewirausahaan
			Perluasan Akses Pembiayaan dan Kemitraan Usaha
Meningkatnya keseimbangan pembangunan yang berbasis Tri Hita Karana	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Meningkatkan kehandalan insfrastruktur	Meningkatkan kualitas jaringan jalan
			Meningkatkan kapasitas dan operasional pemeliharaan drainase
			Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
			Mengurangi permukiman kumuh
			Meningkatkan sistem jaringan sanitasi bagi masyarakat
			Meningkatkan akses air minum yang layak bagi masyarakat
			Meningkatkan Insfrastruktur PSU pendukung Kawasan Permukiman
			Mengurangi permukiman kumuh

VISI: "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali"			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penataan Perumahan dan kawasan Permukiman secara komprehensif	Meningkatkan insfrastruktur pendukung pada fasos fasum perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup
			Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengelolaan persampahan oleh seluruh pihak
			Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
MISI 5: Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali			
Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
			Peningkatan keterlibatan aktif lembaga kemasyarakatan dan adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
			Optimalisasi fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan secara berkelanjutan dan terukur
	2. Meningkatnya Pemajuan kebudayaan	Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap budaya Bali	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesenian dan budaya
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesenian dan budaya
			Memperkuat literasi budaya
		Meningkatkan pelestarian budaya	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan warisan Budaya
			Meningkatkan kapasitas lembaga kebudayaan
			Memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kebudayaan

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Tahap pertama periodesisasi RPJP Kota Denpasar 2025-2045 merupakan bagian siklus perencanaan lima tahun RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029. Fokus utama pembangunan pada tahap pertama yaitu penguatan landasan pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang adil, merata, dan sesuai sasaran, mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penyesuaian terhadap perubahan iklim, serta menggalakkan pemerataan layanan publik yang berkualitas dan transparansi informasi.



Gambar 3. 3
Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar
Sumber: Dokumen RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Fokus arah kebijakan pembangunan jangka panjang pada periode pertama (2025-2029) sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Penahapan Pembangunan Periode Pertama RPJPD Kota Denpasar

VISI	MISI	Periode I (2025-2029)
Terwujudnya Kota Denpasar yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berkualitas, dan berdaya saing	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk peningkatan kualitas SDM
		a) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat b) Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan c) Peningkatan literasi masyarakat d) Peningkatan peran keluarga dalam pembangunan e) Peningkatan partisipasi perempuan dan perlindungan anak f) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan
	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang unggul berbasis potensi daerah	Penguatan produktivitas sektor ekonomi potensial
		a) Peningkatan tata kelola pemerintahan dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif b) Penyederhanaan proses perizinan dan pembiayaan bagi pelaku usaha Peningkatan infrastruktur dasar di sektor ekonomi potensial, termasuk jaringan transportasi, penyediaan energi, dan fasilitas pendukung lainnya

VISI	MISI	Periode I (2025-2029)
		<p>a) Peningkatan peran dunia pendidikan dan dunia usaha dalam mendorong potensi ekonomi daerah</p> <p>b) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses ke pendidikan vokasional</p> <p>a) Pengembangan program pelatihan dan pendidikan keterampilan sesuai kebutuhan sektor ekonomi potensial</p> <p>b) Peningkatan kualifikasi dan produktivitas tenaga kerja</p> <p>a) Peningkatan peran kebijakan/regulasi pembentukan koperasi dan UMKM</p> <p>b) Peningkatan peran kebijakan pada fokus aksesibilitas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja</p> <p>Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi potensial dan penekanan pada daerah yang belum terjangkau</p> <p>Peningkatan keterampilan dan kapasitas pelaku usaha mengenai iklim berinvestasi dan kemampuan berinovasi</p> <p>Penyederhanaan regulasi untuk kemudahan pelaku investasi dan pemberdayaan ekonomi lokasi sebagai daya tarik daerah</p> <p>Penetapan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon, termasuk dukungan pada industri ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan</p> <p>Penguatan efisiensi distribusi dan logistik kebutuhan pangan pokok untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan</p>
	Misi 3: Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah	<p>Penguatan keamanan dan stabilitas daerah</p> <p>a) Penguatan kapasitas kelembagaan sesuai dengan fungsinya</p> <p>b) Penguatan regulasi terkait keamanan wilayah</p> <p>c) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan</p>
	Misi 4: Mewujudkan infrastruktur kewilayahan yang andal untuk mendukung perkembangan wilayah	<p>Penguatan kapasitas dan pelayanan sarana prasarana wilayah</p> <p>a) Peningkatan kualitas, kuantitas, dan daya saing pelayanan sarana prasarana wilayah secara merata</p> <p>b) Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana wilayah</p> <p>Peningkatan integrasi perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan sarana prasarana wilayah</p> <p>Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sarana prasarana wilayah</p>
	Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	<p>Peningkatan fungsi lingkungan hidup</p> <p>Peningkatan pembangunan infrastruktur hijau yang mendukung fungsi lingkungan hidup, restorasi ekosistem, dan pemanfaatan sumber daya</p> <p>Peningkatan kemampuan dan pendidikan resiliensi bencana serta sistem deteksi dini dan lingkungan hidup ke dalam kurikulum pendidikan</p> <p>a) Peningkatan infrastruktur pengelolaan limbah dan sampah yang ramah lingkungan</p> <p>b) Peningkatan pembangunan unsur infrastruktur hijau dan biru</p> <p>Peningkatan pendidikan dan sosialisasi dalam mendorong kebiasaan hidup berkelanjutan</p>

VISI	MISI	Periode I (2025-2029)
		Peningkatan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung Bali Hijau
		Pengembangan kebijakan dan regulasi untuk mendorong investasi dan penelitian dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT
	Misi 6: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penguatan kelembagaan dan digitalisasi pelayanan publik
		a) Peningkatan pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi serta penguatan kapasitas kelembagaan tata kelola pemerintah
		b) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha
		c) Peningkatan kualitas aparatur daerah dengan memperbaiki prosedur tetap dalam mendukung profesionalisme kerja dan memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi kerja
		a) Peningkatan kemandirian keuangan daerah
		b) Pengoptimalan sinergi antara kebijakan fiskal nasional dengan pelaksanaan APBD
		Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi
		a) Peningkatan sinergitas dan koordinasi seluruh perangkat daerah
		b) Peningkatan harmonisasi hubungan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan (stakeholders)
	Misi 7: Mewujudkan pariwisata dan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan	Penguatan kelembagaan budaya
		a) Perwujudan suasana belajar dan pengembangan potensi dalam bidang seni, budaya, dan olahraga
		b) Peningkatan perlindungan dan pembinaan lembaga adat dan upaya mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat
		c) Peningkatan pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya
		d) Peningkatan budaya literasi melalui peningkatan sarana prasarana pemberdayaan kecakapan masyarakat dalam memperoleh, menguji kesahihan untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan

Sementara itu, arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah sebagai dasar penyusunan program, diwujudkan melalui tahapan pembangunan sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Penahapan Pembangunan RPJMD Kota Denpasar

MISI	TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Misi 1 Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan,	Peningkatan aksesibilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat, serta penguatan Potensi dan	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta	Pengembangan inovasi dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta transformasi digital dalam pengembangan	Optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui kolaborasi dengan prinsip inklusif, serta optimalisasi pengembangan	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM dan peningkatan daya saing ekonomi

MISI	TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Kesehatan, dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	peningkatan kapasitas pelaku usaha	ekonomi lokal untuk meningkatkan jejaring pemasaran	ekonomi lokal dan ekonomi kreatif	
Misi 2 Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan upaya penegakan Perda, penyediaan infrastruktur dasar untuk penguatan cadangan pangan yang beragam, dan penyediaan sarpras kebencanaan	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelayanan publik dan perlindungan masyarakat, serta pengembangan inovasi dalam peningkatan ketahanan pangan dan mitigasi bencana	Transformasi digital dalam menjaga stabilitas keamanan dan upaya perlindungan masyarakat, serta peningkatan kemandirian pangan dan upaya mitigasi bencana	Optimalisasi stabilitas keamanan bagi masyarakat, stabilitas pasokan dan harga pangan, serta pelayanan tanggap darurat terkait kebencanaan.	Mewujudkan stabilitas keamanan, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana
Misi 3 Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Penguatan kapasitas SDM aparatur dan infrastruktur dasar terhadap pelayanan publik	Peningkatan profesionalitas kinerja dan pengelolaan SDM perangkat daerah	Pengembangan inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi dalam mewujudkan birokrasi yang efektif	Optimalisasi inovasi tata kelola kelembagaan, pelayanan publik, dan pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan integritas dan pelayanan publik yang prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Misi 4 Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Kestinambungan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana	Pemenuhan layanan infrastruktur jalan, air minum, dan jaringan utilitas terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur jalan, air minum, dan jaringan utilitas terpadu.	Optimalisasi sisten Insfrastruktur dan perluasan cakupan layanan	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui insfrastruktur berkelanjutan.	Mewujudkan kualitas SDM unggul, pembangunan berkelanjutan berbasis Tri Hita Karana, serta ekosistem inovasi yang mendorong daya saing ekonomi daerah.
	Penguataan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pemanfaatan teknologi <i>waste to enrgy</i>	Pengembangan teknologi pengolahan sampah untuk mendukung pemanfaatan <i>waste to energy</i>	Optimalisasi system pengolahan sampah, perluasan cakupan pengelolaan, dan penguatan regulasi serta kelembagaan.	Penguatan pengelolaan sampah terintegrasi dengan teknologi <i>waste to energy</i>	

MISI	TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Penguatan literasi digital dan pembentukan pusat inovasi digital	Peningkatan kompetensi digital dan kecakapan tenaga kerja melalui pembinaan, pelatihan, dan mekanisme link and match	Pengembangan riset dan inovasi daerah dengan mendorong fungsi pusat-pusat inovasi digital	Optimalisasi transformasi digital dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing daerah	
Misi 5 Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali	Pelestarian budaya dan penguatan kapasitas tata kelola kelembagaan adat sebagai kekuatan penggerak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelestarian budaya dan pemantapan kapasitas tata kelola kelembagaan adat sebagai kekuatan penggerak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelestarian budaya dan pengembangan inovasi untuk penguatan budaya, serta optimalisasi tata kelola kelembagaan budaya	Pelestarian budaya dan optimalisasi pembangunan kebudayaan melalui inovasi dan kreativitas masyarakat	Mewujudkan jati diri masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

3.2.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Perumusan prioritas program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program unggulan yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Denpasar menetapkan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas pembiayaan yang wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Program unggulan tersebut dijabarkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Pada misi pertama, yaitu “Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan”, terdapat beberapa program unggulan Kepala Daerah yang selaras dengan bidang prioritas kedua Provinsi Bali yaitu Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan. Program tersebut meliputi program pengelolaan pendidikan yang diwujudkan melalui pembangunan fasilitas pendidikan baru (satu sekolah SMP Negeri); peningkatan kualitas sekolah; penciptaan sekolah ramah bagi kelompok rentan; serta pemberian subsidi pendidikan bagi siswa di sekolah swasta dan pemberian bantuan

biaya pendidikan S1 bagi siswa kurang mampu dan berprestasi. Perwujudan misi pertama juga didukung dengan program unggulan berupa program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan *sportcenter* (Lapangan Kompyang Sujana).

Selain bidang pendidikan dan olahraga, misi pertama juga memiliki program unggulan berupa program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang akan diwujudkan melalui kegiatan pembangunan fasilitas kesehatan berupa gedung Puskesmas baru; peningkatan kualitas layanan Puskesmas Pembantu, dan pengembangan kualitas RSUD berstandar Internasional.

Misi kedua yaitu “Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana”, memiliki program unggulan berupa program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang keduanya diwujudkan melalui kegiatan pemasangan CCTV untuk mendukung kenyamanan dan keamanan lingkungan, serta sebagai upaya pengawasan lalu lintas dalam monitoring kemacetan. Misi ini juga memiliki program unggulan berupa program pembentukan tim reaksi cepat tanggap yang terintegrasi di setiap kecamatan. Di sisi lain, untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan, terdapat program unggulan berupa program insentif pajak untuk lahan produksi pangan dan ternak, sawah ekowisata, dan sawah murni.

Pada misi ketiga, terkait “Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”, memiliki program unggulan berupa program pengelolaan aplikasi informatika dan program pengembangan SDM. Program pengelolaan aplikasi informatika diwujudkan dalam bentuk kegiatan berupa optimalisasi mal pelayanan publik digital dan peningkatan potensi pendapatan asli daerah berbasis digital. Sedangkan untuk program pengembangan SDM diwujudkan dengan mendorong perangkat daerah sebagai Zona Integritas, WBK, dan WBBM.

Pada misi keempat, terkait “Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Kestinambungan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana”, memiliki beberapa program unggulan yaitu program pelatihan kerja dan produktivitas yang diwujudkan melalui kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta *link and match* kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja; program riset dan inovasi daerah diwujudkan melalui kegiatan pemberian insentif untuk pengembangan inovasi; program pengembangan sumber daya ekonomi kreatif diwujudkan melalui kegiatan optimalisasi Graha Yowana Suci dan mengembangkan kawasan ekonomi kreatif; program penyelenggaraan lalu lintas jalan (LLAJ) diwujudkan melalui kegiatan pembangunan APJ hemat energi; program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) diwujudkan melalui kegiatan pembangunann

sarana utilitas terpadu (*ducting cable*); program pengelolaan persampahan diwujudkan melalui kegiatan pengelolaan sampah pada pusat daur ulang (PDU) menjadi produk yang lebih bernilai guna seperti tas belanja atau paving block, pembentukan kelompok kerja pengelolaan lingkungan di setiap desa/kelurahan, serta memperbanyak Teba modern; program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dengan mendorong pemanfaatan teknologi khususnya terkait teknologi pengelolaan sampah menjadi energi (*Waste to Energy*); program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan menyiapkan infrastruktur air siap minum; serta program penyelenggaraan jalan melalui kegiatan pembangunan *Underpass* untuk mengurangi kemacetan, pembangunan jalan baru yang menghubungkan Pelabuhan Sanur dengan *By Pass* Ida Bagus Mantra, serta memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap.

Pada misi kelima, terkait “Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali”, memiliki program unggulan berupa program pengembangan kebudayaan yang diwujudkan melalui kegiatan penguatan eksistensi Pasraman, melanjutkan insentif Desa Adat, Banjar Adat, Subak, Pangliman, dan Klian Adat/Banjar, serta melanjutkan festival-festival budaya.

Program unggulan tersebut juga selaras dengan keenam bidang prioritas Provinsi Bali untuk menjaga dan meningkatkan kualitas alam, manusia, dan kebudayaan Bali sebagai berikut:

- Bidang Prioritas 1: Adat, Tradisi, Seni Budaya serta Kearifan Lokal, selaras dengan program unggulan sebagai berikut:
 1. Melanjutkan Insentif Desa Adat, Banjar Adat, Subak, Pangliman, Klian Adat/Banjar;
 2. Memperkuat Eksistensi Pasraman;
 3. Melanjutkan Festival-Festival Budaya.
- Bidang Prioritas 2: Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, selaras dengan program unggulan sebagai berikut:
 1. Menambah 1 (Satu) SMPN Baru
 2. Mendorong Peningkatan Kualitas Sekolah
 3. Mewujudkan Sekolah Ramah Kelompok Rentan
 4. Subsidi Pendidikan Bagi Siswa Bersekolah di Sekolah Swasta
 5. Beasiswa Menempuh Pendidikan Hingga S1 Bagi Warga Miskin dan Siswa Berprestasi
 6. Pembangunan Sportcenter (Lapangan Buyung)
 7. Membangun Gedung Puskesmas Baru
 8. Meningkatkan Kualitas Layanan Puskesmas Pembantu
 9. Mengembangkan RSUD Wangaya Berstandar Internasional
 10. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja

11. *Link and Match* Kompetensi dengan Kebutuhan Dunia Kerja
- Bidang Prioritas 3: Transformasi Perekonomian dengan Ekonomi Kerthi Bali, selaras dengan program unggulan sebagai berikut:
 1. Insentif Pajak untuk Lahan Produksi Pangan dan Ternak, Sawah Ekowisata, Sawah Murni
 2. Optimalisasi Graha Yowana Suci dan Mengembangkan Kawasan Ekonomi Kreatif
 3. Memberikan insentif untuk pengembangan inovasi bagi peneliti muda
 - Bidang Prioritas 4: Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara, serta Transportasi, selaras dengan program unggulan sebagai berikut:
 1. Membangun APJ Hemat Energi
 2. Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Ducting Kabel)
 3. Memastikan Infrastruktur Jalan Kondisi Mantap
 4. Membangun Underpass untuk Mengurai Kemacetan
 5. Pembangunan Jalan Baru menghubungkan Pelabuhan Sanur dengan *By Pass* Ida Bagus Mantra
 6. Menyiapkan Infrastruktur Air Siap Minum
 - Bidang Prioritas 5: Lingkungan, Kehutanan, dan Energi, selaras dengan program unggulan sebagai berikut:
 1. Pengelolaan Sampah Plastik dengan Output menjadi barang yang lebih bernilai guna.
 2. Pembentukan Pokja Pengelolaan Lingkungan di Setiap Desa/Kelurahan dan Memperbanyak Teba Modern
 3. Mendorong Pemanfaatan Teknologi dalam pengelolaan sampah khususnya teknologi *waste to energy*.
 - Bidang Prioritas 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali, selaras selaras dengan program unggulan sebagai berikut:
 1. Pemasangan CCTV untuk Mendukung Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan serta Monitoring Kemacetan
 2. Insentif bagi Pemuka Agama, Sabha Upadesa
 3. Pembentukan Tim Reaksi Cepat Terintegrasi di Setiap Kecamatan
 4. Optimalisasi mal pelayanan publik digital
 5. Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah berbasis digital
 6. Mendorong Perangkat Daerah sebagai zona integritas, WBK, dan WBBM
 7. Penggunaan 1 aplikasi untuk seluruh layanan public.

Tabel 3. 7
Program Prioritas Pembangunan Kota Denpasar

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Perangkat Daerah
Misi 1: Meningkatkan KeMAKMURan Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar					Indeks Pembangunan Manusia; Laju Pertumbuhan Ekonomi;	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun (%); Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (%); Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun (%); Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun (%)	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya pengembangan bahasa dan sastra pada Satuan Pendidikan	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	DINAS KESEHATAN
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	DINAS KESEHATAN
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	DINAS KESEHATAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Perangkat Daerah
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB per Kapita	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	DINAS KESEHATAN
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing (Jiwa); Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik (Jiwa)	DINAS PARIWISATA
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Jangkuan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Parwisata (%)	DINAS PARIWISATA
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	DINAS PARIWISATA
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Jumlah pengawasan terhadap pelaku usaha dalam rangka tertib niaga (Pelaku Usaha)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah pemantauan distribusi dan harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting (Laporan)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Jumlah omset pedagang pasar (Rp)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Ekspor bersih perdagangan (Rp)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Nilai realisasi investasi sektor industri (Rp)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Peta Lokasi Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh investor (Kecamatan)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya promosi penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah investor di Kota Denpasar (%)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) tepat waktu dan sesuai standar (%)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi (%)	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha (%)	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase peningkatan SDM Koperasi yang berkompeten (%)	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas (%)	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan rata-rata omset IKM/UKM yang difasilitasi (%)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Berkurangnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pengembangan Potensi (%)	DINAS SOSIAL
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS (%)	DINAS SOSIAL
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Pemenuhan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)	DINAS SOSIAL
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya Rumah Layak Huni di Kota Denpasar	Persentase Rumah Layak Huni (%)	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Misi 2: Menenaga Stabilitas KeAMANan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana	Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kota Denpasar					Indeks Stabilitas Keamanan	
		Terkendalinya Keamanan dan Ketertiban Umum	Indeks Trantibumlinmas	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	KECAMATAN
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perwali	Persentase Kasus Pelanggaran Perda/Perwali yang diselesaikan (%); Persentase Kasus Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang diselesaikan (%); Persentase peningkatan kapasitas Sat.Pol PP (%); Persentase Laporan gangguan trantibum yang dilaksanakan SatLinmas (%)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Konflik Sosial yang Terfasilitasi (%)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi Masyarakat (Kkal/Kapita/Hari); Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari); Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari) (%); Konsumsi protein (gram/kapita/hari)" (%)	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi (%)	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	Produktivitas Semangka (Kw/ha); Produktivitas Kangkung (Kw/ha); Produktivitas Cabai (Kw/ha); Produktivitas Bayam (Kw/ha); Kelahiran Sapi (Ekor); Produktivitas Jagung (Kw/ha); Kelahiran Babi (Ekor); Produktivitas Sayur Hijau (Kw/ha); Produktivitas Bawang Merah (Kw/ha); Produktivitas Padi (Kw/ha);	DINAS PERTANIAN
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya prasarana pertanian yang berkondisi baik	Prosentase Prasarana Pertanian yang dikendalikan dan dimanfaatkan (%)	DINAS PERTANIAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan (%)	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Meningkatkan penanganan bencana pada saat pasca bencana; Meningkatkan penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase); Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase); Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan penanganan bencana (%)	DINAS SOSIAL
Misi 3: KeJUJURan dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Baik					Indeks Reformasi Birokrasi	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks PEMDI	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya Kolaborasi, Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Kota Denpasar	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar (%)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi (%)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Indeks Pelayanan Publik	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun (%); Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%); Persentase Kepemilikan Akta Perceraian (%); Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan (%)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Dukcapil	Hasil Penilaian Kepuasan Publik Dukcapil oleh KemenPANRB (Predikat)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan tepat waktu (%)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder (%)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	KECAMATAN
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas	Nilai SAKIP; Opini BPK;	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Perangkat Daerah
		kinerja birokrasi		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat (%); Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD (%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar (%); Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah (%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN melalui Manajemen Talenta	Nilai Aspek Pengadaan (Indeks); Nilai Aspek Pengembangan Karir (Indeks); Nilai Aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin (Indeks); Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan (Indeks); Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan (Indeks); Nilai Aspek promosi dan Mutasi (Indeks); Nilai Aspek sistem informasi (Indeks); Nilai Dimensi Disiplin (Indeks); Nilai Dimensi Kinerja (Indeks);	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN	Nilai Dimensi Kompetensi (Indeks); Nilai Dimensi Kualifikasi (Indeks)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	SEKRETARIAT DAERAH
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase terlaksananya kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan (%)	SEKRETARIAT DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (Nilai)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangannya	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (%)	INSPEKTORAT
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Asistensi dan Pendampingan Perangkat Daerah (%)	INSPEKTORAT
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan; Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase); Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase); Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase);	SEKRETARIAT DPRD

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Perangkat Daerah
Misi 4: UNGGUL dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Kesenambungan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana	Meningkatnya Daya Saing Daerah					Indeks Daya Saing Daerah	
		Meningkatnya pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
				PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	DINAS PARIWISATA
		Berkurangnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi (%)	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Akses Lapangan Kerja	Persentase Kesempatan/Lowongan Kerja yang Terpenuhi (%)	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	Meningkatnya Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana					Indeks Tri Hita Karana	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektifitas antar wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Sungai Berfungsi Normal	Persentase panjang sungai berfungsi normal (%)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis (%)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah (%)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal (%)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum (%)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi (%)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase pelaksanaan SPM yang mendapatkan rumah layak huni (%)	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang tertata (%)	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Tertatanya PSU Permukiman di Kota Denpasar	Persentase PSU Pendukung Fungsi Hunian yang tertata (%)	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Perangkat Daerah
			Persentase kinerja jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan (LF) (%)	DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kualitas air (%); Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan (%); Persentase peningkatan kualitas udara (%)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH Publik dalam kondisi baik (%)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Volume Sampah yang Terkurangi Melalui 3R (%); Persentase Volume Sampah yang Tertangani (%)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat (%)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana persampahan yang memadai	Persentase Sarana Persampahan yang Memadai (%)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Misi 5: Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan KeBUDAYAan Bali	Meningkatkan Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya Bali					Indek Pembangunan Kebudayaan	
		Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat	peningkatan swadaya masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Persentase peningkatan pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	DINAS KEBUDAYAAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Presentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	DINAS KEBUDAYAAN
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	DINAS KEBUDAYAAN
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase); Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	DINAS KEBUDAYAAN

Smber: Analisis Penyusun, 2025

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah merupakan instrumen untuk mencapai sasaran RPJMD dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta visi misi kepala daerah terpilih. Program pembangunan Kota Denpasar disusun dengan memperhatikan kapasitas riil fiskal sebagaimana disajikan dalam bab sebelumnya. Pagu indikatif dalam dokumen RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan program tahunan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Selama lima tahun ke depan, pembangunan Kota Denpasar dilaksanakan melalui program-program yang disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan serta indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 4. 1
Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Denpasar Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					769.590.672.842		779.743.236.371		787.656.361.055		788.259.296.337		788.769.692.595	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					429.409.514.339		431.424.716.050		437.349.762.135		437.527.433.714		437.639.423.563	
Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	429.409.514.339	100	431.424.716.050	100	437.349.762.135	100	437.527.433.714	100	437.639.423.563	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					340.154.046.503		347.349.373.350		349.247.328.175		349.573.557.929		349.863.138.794	
Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun (%)	99,12	99,14	99,31	340.154.046.503	99,37	347.349.373.350	99,43	349.247.328.175	99,50	349.573.557.929	99,56	349.863.138.794	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun (%)	98,49	98,51	98,75		98,84		98,93		99,01		99,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (%)	60,49	61,50	76,83		79,87		82,91		85,87		88,84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun (%)	15,08	15,10	23,28		27,38		31,48		35,58		39,68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					0,000		89.552.393		94.598.252		99.989.443		105.752.025	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	0,000	100	89.552.393	100	94.598.252	100	99.989.443	100	105.752.025	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					0,000		12.800.000		14.080.000		15.488.000		17.036.800	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0	0,927	0,930	0,000	0,935	12.800.000	0,940	14.080.000	0,945	15.488.000	0,950	17.036.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					27.112.000		24.052.953		23.576.705		23.109.885		22.652.310	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Berizin (%)	83	83	83	27.112.000	83	24.052.953	83	23.576.705	83	23.109.885	83	22.652.310	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					0,000		842.741.625		927.015.788		1.019.717.366		1.121.689.103	
Meningkatnya pengembangan bahasa dan sastra pada Satuan Pendidikan	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	100	100	100	0,000	100	842.741.625	100	927.015.788	100	1.019.717.366	100	1.121.689.103	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					601.888.121.866		645.044.101.969		550.142.580.832		561.203.247.939		566.227.569.618	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					373.461.261.266		374.388.092.880		377.786.571.743		388.508.989.038		391.626.581.811	
Meningkatnya layanan kesekretariatan	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan (%)	100	100	100	373.461.261.266	100	374.388.092.880	100	377.786.571.743	100	388.508.989.038	100	391.626.581.811	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					224.596.781.850		266.525.930.339		168.075.930.339		168.264.180.151		170.020.909.057	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	96,66	100	100	224.596.781.850	100	266.525.930.339	100	168.075.930.339	100	168.264.180.151	100	170.020.909.057	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.025.167.250		1.125.167.250		1.175.167.250		1.225.167.250		1.275.167.250	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100%	100%	100%	1.025.167.250	100%	1.125.167.250	100%	1.175.167.250	100%	1.225.167.250	100%	1.275.167.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					701.799.900		801.799.900		851.799.900		901.799.900		951.799.900	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	93,64	100	100	701.799.900	100	801.799.900	100	851.799.900	100	901.799.900	100	951.799.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.103.111.600		2.203.111.600		2.253.111.600		2.303.111.600		2.353.111.600	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	83,41	100	100	2.103.111.600	100	2.203.111.600	100	2.253.111.600	100	2.303.111.600	100	2.353.111.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					428.566.985.271		445.428.537.683		459.177.658.311		429.201.120.139		426.274.708.960	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					87.083.741.287		83.153.741.287		80.853.741.287		80.653.741.287		86.299.503.177	
Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi, Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	87.083.741.287	100	83.153.741.287	100	80.853.741.287	100	80.653.741.287	100	86.299.503.177	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					5.094.191.704		4.638.481.323		4.666.256.660		4.666.256.660		4.694.031.997	
Persentase Panjang Sungai Berfungsi Normal	Persentase panjang sungai berfungsi normal (%)	86,00	86,00	86,50	5.094.191.704	87,00	4.638.481.323	87,50	4.666.256.660	88,00	4.666.256.660	88,50	4.694.031.997	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.315.198.000		2.346.919.421		2.628.549.281		2.943.975.231		3.259.400.276	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum (%)	53,35	53,49	53,61	2.315.198.000	53,75	2.346.919.421	53,89	2.628.549.281	54,03	2.943.975.231	54,17	3.259.400.276	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					1.130.728.000		1.266.415.000		1.418.384.800		1.588.590.000		1.779.220.800	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase sarana persampahan yang memadai	Persentase Sarana Persampahan yang Memadai (%)	18,6	0	58,13	1.130.728.000	60,46	1.266.415.000	62,79	1.418.384.800	65,11	1.588.590.000	67,44	1.779.220.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.111.045.000		1.126.268.186		1.261.420.369		1.286.648.776		1.441.046.168	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah (%)	9,29	9,33	9,37	1.111.045.000	9,41	1.126.268.186	9,45	1.261.420.369	9,49	1.286.648.776	9,53	1.441.046.168	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					24.999.972.390		22.802.586.406		23.135.735.610		23.311.077.296		18.726.012.180	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal (%)	85,00	85,00	85,70	24.999.972.390	86,30	22.802.586.406	86,90	23.135.735.610	87,50	23.311.077.296	88,10	18.726.012.180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					4.033.946.000		41.363.139.264		49.635.767.116		13.401.657.121		1.910.549.502	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis (%)	100	100	100	4.033.946.000	100	41.363.139.264	100	49.635.767.116	100	13.401.657.121	100	1.910.549.502	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					132.520.000		8.544.830		12.817.246		14.739.833		17.461.374	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis (%)	100	100	100	132.520.000	100	8.544.830	100	12.817.246	100	14.739.833	100	17.461.374	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					300.616.577.890		286.696.188.150		294.035.610.567		299.916.322.778		306.612.969.568	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	62,97	90,22	90,72	300.616.577.890	91,22	286.696.188.150	91,72	294.035.610.567	92,22	299.916.322.778	92,72	306.612.969.568	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					209.736.000		282.646.767		327.072.869		269.364.291		286.123.968	
Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi (%)	25	50	50	209.736.000	55	282.646.767	60	327.072.869	65	269.364.291	70	286.123.968	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.839.329.000		1.743.607.049		1.202.302.506		1.148.746.866		1.248.389.950	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	0	97,8	98,07	1.839.329.000	98,34	1.743.607.049	98,61	1.202.302.506	98,88	1.148.746.866	0	1.248.389.950	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					156.447.939.908		142.289.990.459		156.106.094.505		171.833.156.954		188.838.096.697	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.138.510.158		18.435.635.259		20.159.198.785		22.210.118.662		24.371.430.876	
Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	18.138.510.158	100	18.435.635.259	100	20.159.198.785	100	22.210.118.662	100	24.371.430.876	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					381.350.000		1.046.350.000		996.350.000		1.046.350.000		1.056.417.500	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase pelaksanaan SPM yang mendapatkan rumah layak huni (%)	100	100	100	381.350.000	100	1.046.350.000	100	996.350.000	100	1.046.350.000	100	1.056.417.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					106.000.000		333.200.000		228.260.000		382.174.000		396.282.600	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang tertata (%)	0,184	0,144	0,140	106.000.000	0,092	333.200.000	0,068	228.260.000	0,035	382.174.000	0	396.282.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					2.493.672.000		2.386.419.200		2.625.061.120		2.887.567.232		3.176.323.955	
Meningkatnya Rumah Layak Huni di Kota Denpasar	Persentase Rumah Layak Huni (%)	99,85	99,87	99,89	2.493.672.000	99,90	2.386.419.200	99,92	2.625.061.120	99,93	2.887.567.232	99,95	3.176.323.955	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					135.328.407.750		120.088.386.000		132.097.224.600		145.306.947.060		159.837.641.766	
Tertatanya PSU Permukiman di Kota Denpasar	Presentase PSU Pendukung Fungsi Hunian yang tertata (%)	100	90	90	135.328.407.750	90	120.088.386.000	90	132.097.224.600	90	145.306.947.060	90	159.837.641.766	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					99.401.976.726		89.090.582.496		101.997.943.384		104.798.147.280		106.388.733.083	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					74.383.048.986		73.322.204.954		85.642.973.292		87.902.839.625		88.254.450.982	
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	18.272.356.200	100	19.345.387.588	100	20.552.915.339	100	21.844.799.950	100	21.232.866.317	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	32.246.541.758	100	30.566.212.352	100	35.151.144.205	100	40.423.815.836	100	42.495.010.248	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	23.864.151.028	100	23.410.605.014	100	29.938.913.748	100	25.634.223.839	100	24.526.574.417	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					951.676.000		990.556.158		1.139.139.582		1.310.010.519		1.506.512.097	
Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perwali	Persentase Kasus Pelanggaran Perda/Perwali yang diselesaikan (%)	93,84	93,85	94,84	951.676.000	95,34	990.556.158	95,84	1.139.139.582	96,34	1.310.010.519	96,84	1.506.512.097	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Kasus Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase peningkatan kapasitas Sat.Pol PP (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Laporan gangguan transtibum yang dilaksanakan SatLinmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					5.449.550.570		6.881.737.773		7.195.396.761		7.629.493.970		8.393.233.149	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)		100	100	2.172.089.500	100	2.871.737.773	100	2.995.000.000	100	3.439.493.970	100	3.663.233.149	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)		100	100	193.915.000	100	2.295.000.000	100	2.280.000.000	100	2.130.000.000	100	2.520.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)		100	100	3.083.546.070	100	1.715.000.000	100	1.920.396.761	100	2.060.000.000	100	2.210.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN					18.617.701.170		7.896.083.611		8.020.433.749		7.955.803.166		8.234.536.855	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
NON KEBAKARAN														
Meningkatnya layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100	100	100	18.617.701.170	100	7.896.083.611	100	8.020.433.749	100	7.955.803.166	100	8.234.536.855	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					19.952.396.073		19.792.063.627		21.518.643.190		23.673.561.442		24.378.618.532	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.446.086.073		17.354.385.419		18.999.424.292		20.899.366.721		21.317.354.055	
Terpenuhinya Pemenuhan layanan Kesekretariat	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatian (%)	100	100	100	17.446.086.073	100	17.354.385.419	100	18.999.424.292	100	20.899.366.721	100	21.317.354.055	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					622.172.000		678.156.212		741.368.345		818.559.112		902.703.214	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pengembangan Potensi (%)	100	100	100	622.172.000	100	678.156.212	100	741.368.345	100	818.559.112	100	902.703.214	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.503.998.000		1.381.054.662		1.519.160.128		1.671.076.141		1.838.183.755	
Meningkatnya Pemenuhan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	1.503.998.000	100	1.381.054.662	100	1.519.160.128	100	1.671.076.141	100	1.838.183.755	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					316.690.000		315.296.522		184.752.472		203.227.719		223.550.491	
Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS (%)	100	100	100	316.690.000	100	315.296.522	100	184.752.472	100	203.227.719	100	223.550.491	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					63.450.000		63.170.812		73.937.953		81.331.749		96.827.017	
Meningkatnya Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan penanganan bencana (%)	100	100	100	63.450.000	100	63.170.812	100	73.937.953	100	81.331.749	100	96.827.017	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					13.108.855.291		13.002.079.830		14.648.238.214		15.969.729.365		16.529.065.309	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.411.755.191		11.361.051.437		12.497.156.581		13.746.397.420		14.076.310.958	
Meningkatnya Layanan Kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	11.411.755.191	100	11.361.051.437	100	12.497.156.581	100	13.746.397.420	100	14.076.310.958	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					90.000.000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	0	0	100	90.000.000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					287.592.600		327.326.901		395.285.865		464.267.250		534.373.301	
Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi (%)	95	100	100	287.592.600	100	327.326.901	100	395.285.865	100	464.267.250	100	534.373.301	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					817.027.500		813.432.471		1.205.499.845		1.153.739.179		1.252.164.505	
Meningkatnya Akses Lapangan Kerja	Persentase Kesempatan/Lowongan Kerja yang Terpenuhi (%)	65	65,05	65,10	817.027.500	65,15	813.432.471	65,20	1.205.499.845	65,25	1.153.739.179	65,30	1.252.164.505	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					502.480.000		500.269.021		550.295.923		605.325.516		666.216.545	
Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	0	0	10,10	502.480.000	10,20	500.269.021	10,30	550.295.923	10,40	605.325.516	10,50	666.216.545	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					17.200.473.439		20.049.059.335		23.475.164.600		25.681.875.901		28.222.204.880	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					15.871.650.689		17.388.599.484		18.990.727.245		20.753.067.781		22.805.434.844	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	15.871.650.689	100	17.388.599.484	100	18.990.727.245	100	20.753.067.781	100	22.805.434.844	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					149.394.000		440.172.667		1.352.100.833		1.487.310.917		1.636.042.008	
Tercapainya Persentase Anggaran Responsif Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	23,05	23,15	23,95	149.394.000	24,00	440.172.667	24,05	1.352.100.833	24,15	1.487.310.917	24,55	1.636.042.008	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	60,5	61,26	62,02		62,78		63,54		64,3		65,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					181.309.000		817.219.020		898.940.922		988.835.014		1.087.718.516	
Meningkatnya Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	181.309.000	100	817.219.020	100	898.940.922	100	988.835.014	100	1.087.718.516	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					32.611.000		70.151.062		771.661.680		848.827.848		933.710.633	
Tercapainya Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang Berspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang Berspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar (%)	6,90	6,90	6,90	32.611.000	6,90	70.151.062	9,30	771.661.680	9,30	848.827.848	9,30	933.710.633	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					62.335.000		335.250.823		368.775.916		405.653.508		446.218.858	
Meningkatkan Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan kebijakan	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan kebijakan (%)	30	30	30	62.335.000	50	335.250.823	60	368.775.916	75	405.653.508	75	446.218.858	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					759.424.500		756.082.124		831.691.225		914.860.347		1.006.346.382	
Tercapainya Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	800	800	800	759.424.500	900	756.082.124	900	831.691.225	1.000	914.860.347	1.000	1.006.346.382	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					143.749.250		241.584.155		261.266.779		283.320.486		306.733.639	
Tercapainya Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	143.749.250	100	241.584.155	100	261.266.779	100	283.320.486	100	306.733.639	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					681.852.900		663.096.370		739.577.679		827.407.679		934.857.122	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					354.109.500		341.032.066		382.369.286		438.863.487		506.380.946	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi Masyarakat (Kkal/Kapita/Hari)	3.969	3.969	3.970	354.109.500	3.971	341.032.066	3.972	382.369.286	3.973	438.863.487	3.974	506.380.946	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari)	175,00	175,00	175,20		175,25		175,30		175,35		175,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari) (%)	2.199	2.199	2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Konsumsi protein (gram/kapita/hari)* (%)	69	69	57		57		57		57		57		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					253.398.000		251.347.166		278.005.199		300.854.941		335.129.554	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan (%)	100	100	100	253.398.000	100	251.347.166	100	278.005.199	100	300.854.941	100	335.129.554	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					74.345.400		70.717.138		79.203.194		87.689.251		93.346.622	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi (%)	90	90	93	74.345.400	93	70.717.138	94	79.203.194	95	87.689.251	95	93.346.622	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN					2.735.294.000		297.806.542		327.587.196		360.345.916		396.380.507	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BIDANG PERTANAHAN														
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					132.400.000		155.232.000		170.755.200		187.830.720		206.613.792	
Persentase Sengketa Tanah Garapan yang terfasilitasi	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang terfasilitasi (%)	100	100	100	132.400.000	100	155.232.000	100	170.755.200	100	187.830.720	100	206.613.792	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					2.602.894.000		142.574.542		156.831.996		172.515.196		189.766.715	
Meningkatnya tanah fasos fasum pemerintah Kota Denpasar bersertifikat	Persentase tanah fasos fasum pemerintah kota denpasar bersertifikat (%)	81,95	85	91,15	2.602.894.000	93,36	142.574.542	95,58	156.831.996	97,78	172.515.196	100	189.766.715	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					198.834.814.653		197.961.752.784		205.008.097.462		214.504.435.056		221.772.986.021	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					117.479.147.653		116.961.967.966		118.599.435.518		130.459.693.520		132.025.209.842	
Meningkatnya pemenuhan layanan kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	117.479.147.653	100	116.961.967.966	100	118.599.435.518	100	130.459.693.520	100	132.025.209.842	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					71.500.000		71.267.307		77.182.493		486.410.505		93.262.180	
Meningkatnya ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar (%)	100	100	100	71.500.000	100	71.267.307	100	77.182.493	100	486.410.505	100	93.262.180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					2.700.665.000		2.689.014.733		2.957.760.860		3.253.692.293		3.579.139.193	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kualitas air (%)	3	4	4	2.700.665.000	4	2.689.014.733	4	2.957.760.860	4	3.253.692.293	4	3.579.139.193	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase peningkatan kualitas udara (%)	3	4	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan (%)	1	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					10.333.140.000		10.287.696.520		11.316.608.418		12.448.174.429		13.444.028.383	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH Publik dalam kondisi baik (%)	75	75	76	10.333.140.000	77	10.287.696.520	78	11.316.608.418	79	12.448.174.429	80	13.444.028.383	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					158.716.000		159.108.659		175.474.121		192.748.776		211.841.815	
Meningkatnya pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat (%)	100	100	100	158.716.000	100	159.108.659	100	175.474.121	100	192.748.776	100	211.841.815	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					227.320.000		226.500.240		249.060.025		273.424.593		300.496.334	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar (%)	78	80	82	227.320.000	84	226.500.240	86	249.060.025	88	273.424.593	90	300.496.334	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					317.849.000		316.535.284		347.934.227		382.727.649		420.915.552	
meningkatkan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup (%)	2	2	3	317.849.000	3	316.535.284	3	347.934.227	3	382.727.649	3	420.915.552	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					67.546.477.000		67.249.662.075		71.284.641.800		67.007.563.291		71.698.092.722	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Volume Sampah yang Terkurangi Melalui 3R (%)	17,03	0,04	0,05	67.546.477.000	0,06	67.249.662.075	0,07	71.284.641.800	0,08	67.007.563.291	0,09	71.698.092.722	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Volume Sampah yang Tertangani (%)	79,93	14,34	15,00		15,50		16,00		50,00		55,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					28.596.361.040		28.540.935.684		31.362.675.998		32.613.089.782		34.117.546.731	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.176.914.040		21.177.147.710		23.285.520.991		23.751.231.410		24.392.514.658	
Persentase Pemenuhan Layanan Keseekretariatan	Persentase Pemenuhan Layanan Keseekretariatan (%)	100	100	100	21.176.914.040	100	21.177.147.710	100	23.285.520.991	100	23.751.231.410	100	24.392.514.658	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					92.875.000		92.466.000		101.712.972		111.884.269		123.072.696	
Masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	Persentase Perekaman KTP-EI (%)	99,65	99,92	99,93	92.875.000	99,94	92.466.000	99,95	101.712.972	99,96	111.884.269	99,97	123.072.696	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan (IKD) (%)	4,37	4,40	4,43		4,46		4,49		4,52		4,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	80,32	82	83		84		85		86		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					7.016.075.000		6.985.203.338		7.683.723.672		8.452.096.040		9.297.305.644	
Masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0- 18 Tahun (%)	99,38	99,50	99,60	7.016.075.000	99,65	6.985.203.338	99,70	7.683.723.672	99,75	8.452.096.040	99,80	9.297.305.644	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					310.497.000		286.118.636		291.718.363		297.878.063		304.653.733	
Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Dukcapil	Hasil Penilaian Kepuasan Publik Dukcapil oleh KemenPANRB (Predikat)	A	A	A	310.497.000	A	286.118.636	A	291.718.363	A	297.878.063	A	304.653.733	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					15.527.629.872		22.094.131.310		17.533.094.650		19.839.499.995		21.952.453.943	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.072.311.872		11.338.776.835		12.887.269.982		14.728.126.440		15.022.688.969	
Terpenuhinya pemenuhan layanan kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	11.072.311.872	100	11.338.776.835	100	12.887.269.982	100	14.728.126.440	100	15.022.688.969	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					17.796.000		19.328.395		22.549.794		25.771.193		28.992.592	
Meningkatnya kerja sama desa	Presentase Peningkatan Kerjasama Desa (%)			3	17.796.000	4	19.328.395	5	22.549.794	6	25.771.193	7	28.992.592	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.086.793.000		7.400.040.732		953.690.992		1.049.060.091		2.460.575.884	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100	1.086.793.000	100	7.400.040.732	100	953.690.992	100	1.049.060.091	100	2.460.575.884	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pemerintahan desa														Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					3.350.729.000		3.335.985.348		3.669.583.882		4.036.542.271		4.440.196.498	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100	3.350.729.000	100	3.335.985.348	100	3.669.583.882	100	4.036.542.271	100	4.440.196.498	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4.411.674.950		6.862.821.645		7.491.138.194		7.890.057.478		8.169.922.334	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					26.025.000		479.148.000		482.062.800		485.269.080		488.795.988	
Meningkatnya ASFR 15-19 tahun	ASFR 15-19 tahun (%)	8,9	8,5	8,1	26.025.000	7,7	479.148.000	7,3	482.062.800	7	485.269.080	6,7	488.795.988	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					214.374.000		2.245.270.100		2.488.266.960		2.596.063.505		2.714.639.706	
Tercapainya Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalanve Rate/ MPCR)	Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalanve Rate/ MPCR) (Angka)	52,7	53,5	54,3	214.374.000	55,1	2.245.270.100	55,9	2.488.266.960	56,7	2.596.063.505	57,5	2.714.639.706	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					4.171.275.950		4.138.403.545		4.520.808.434		4.808.724.893		4.966.486.640	
Tercapainya Persentase Keluarga yang Mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase Keluarga yang Mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	16	16	16	4.171.275.950	16	4.138.403.545	16	4.520.808.434	16	4.808.724.893	16	4.966.486.640	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					128.463.236.198		160.651.077.313		171.593.778.794		183.662.389.486		193.928.628.437	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					64.536.841.052		71.461.084.806		75.607.193.286		79.567.912.615		83.424.703.879	
Tersediannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	64.536.841.052	100	71.461.084.806	100	75.607.193.286	100	79.567.912.615	100	83.424.703.879	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					63.100.555.146		86.573.081.947		93.107.983.892		100.928.015.094		107.020.816.603	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan (LF) (%)	32	46	48	63.100.555.146	50	86.573.081.947	52	93.107.983.892	54	100.928.015.094	56	107.020.816.603	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					825.840.000		2.616.910.560		2.878.601.616		3.166.461.777		3.483.107.955	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar (%)	78	78	80	825.840.000	80	2.616.910.560	80	2.878.601.616	80	3.166.461.777	80	3.483.107.955	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					21.309.059.150		21.279.918.770		23.358.187.228		25.299.124.247		25.908.664.523	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.433.450.150		15.365.540.920		16.902.095.012		18.592.304.513		18.964.150.603	
Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan (%)	100	100	100	15.433.450.150	100	15.365.540.920	100	16.902.095.012	100	18.592.304.513	100	18.964.150.603	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.387.990.000		1.381.882.660		1.520.070.926		1.672.078.018		1.839.285.820	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah	0	80	82	1.387.990.000	84	1.381.882.660	86	1.520.070.926	88	1.672.078.018	90	1.839.285.820	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	daerah (%)													
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					4.487.619.000		4.532.495.190		4.936.021.290		5.034.741.716		5.105.228.100	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi (%)	80	80	80	4.487.619.000	85	4.532.495.190	90	4.936.021.290	95	5.034.741.716	100	5.105.228.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					16.167.424.202		15.625.639.785		15.810.855.147		16.272.723.829		16.777.089.136	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.658.612.442		11.457.193.515		11.457.193.515		11.457.193.515		11.457.193.515	
Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	12.658.612.442	100	11.457.193.515	100	11.457.193.515	100	11.457.193.515	100	11.457.193.515	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					779.215.000		909.297.567		1.018.413.275		1.140.622.868		1.277.497.612	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	40,70	42	43	779.215.000	43,5	909.297.567	44	1.018.413.275	44,5	1.140.622.868	45	1.277.497.612	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					88.675.000		88.284.818		97.113.300		106.824.630		117.506.910	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas (%)	36,38	38,48	45	88.675.000	45	88.284.818	48	97.113.300	51	106.824.630	54	117.506.910	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					338.875.000		327.160.150		347.607.660		388.502.678		427.352.946	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase peningkatan SDM Koperasi yang berkompeten (%)	0	2	2	338.875.000	2	327.160.150	2	347.607.660	2	388.502.678	2	427.352.946	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					546.448.000		648.012.180		475.266.687		522.793.356		575.072.692	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi (%)	4,2	4,7	5,2	546.448.000	5,7	648.012.180	6,2	475.266.687	6,7	522.793.356	7,2	575.072.692	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.069.609.760		1.353.813.032		1.489.194.335		1.638.113.769		1.801.925.146	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	0	0	1	1.069.609.760	1	1.353.813.032	1	1.489.194.335	1	1.638.113.769	1	1.801.925.146	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					685.989.000		841.878.523		926.066.375		1.018.673.013		1.120.540.315	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha (%)	0	0	1	685.989.000	1	841.878.523	1	926.066.375	1	1.018.673.013	1	1.120.540.315	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					30.783.117.216		29.096.339.837		31.821.340.584		34.549.951.686		34.592.515.429	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.706.125.216		27.866.955.638		30.582.522.458		33.204.449.042		33.247.012.785	
Meningkatnya layanan kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	29.706.125.216	100	27.866.955.638	100	30.582.522.458	100	33.204.449.042	100	33.247.012.785	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					146.422.000		301.971.695		221.634.305		240.608.463		240.608.463	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Peta Lokasi Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh investor (Kecamatan)	4	4	4	146.422.000	4	301.971.695	4	221.634.305	4	240.608.463	4	240.608.463	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					328.714.000		348.765.841		384.017.442		416.268.907		416.268.907	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya promosi penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah investor di Kota Denpasar (%)	2	2	2	328.714.000	2	348.765.841	2	384.017.442	2	416.268.907	2	416.268.907	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					48.136.000		45.502.287		46.538.571		47.669.062		47.669.062	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan tepat waktu (%)	98,64	98,65	98,70	48.136.000	98,75	45.502.287	98,77	46.538.571	98,79	47.669.062	98,80	47.669.062	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					138.920.000		129.280.715		142.377.781		156.319.819		156.319.819	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) tepat waktu dan sesuai standar (%)	13,84	20	20	138.920.000	20	129.280.715	20	142.377.781	20	156.319.819	20	156.319.819	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					414.800.000		403.863.661		444.250.027		484.636.393		484.636.393	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder (%)	100	100	100	414.800.000	100	403.863.661	100	444.250.027	100	484.636.393	100	484.636.393	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					37.454.997.400		37.335.024.488		41.105.740.177		45.246.864.799		48.928.426.797	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					378.464.000		486.014.548		631.696.749		779.812.078		930.603.845	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan (%)	0	18	20	378.464.000	22,22	486.014.548	25	631.696.749	29,09	779.812.078	29,09	930.603.845	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					35.914.033.400		35.735.079.634		39.294.725.413		43.218.508.739		46.675.989.438	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan/atau Nasional (%)	0	74	77	35.914.033.400	79	35.735.079.634	81	39.294.725.413	83	43.218.508.739	85	46.675.989.438	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.162.500.000		1.113.930.306		1.179.318.015		1.248.543.982		1.321.833.514	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Prestasi Pramuka Pada Tingkat Provinsi dan/ Nasional (%)	0	79,50	80	1.162.500.000	80,50	1.113.930.306	81	1.179.318.015	81,50	1.248.543.982	82	1.321.833.514	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					134.154.000		133.563.705		146.920.075		161.612.083		177.773.291	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					134.154.000		133.563.705		146.920.075		161.612.083		177.773.291	
Tercapainya Kolaborasi, Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Kota Denpasar	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	70	70	75	134.154.000	80	133.563.705	85	146.920.075	90	161.612.083	100	177.773.291	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					292.198.000		306.807.900		322.148.295		338.255.710		355.168.495	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					292.198.000		306.807.900		322.148.295		338.255.710		355.168.495	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar (%)	60	60	62	292.198.000	64	306.807.900	66	322.148.295	68	338.255.710	70	355.168.495	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					76.364.141.978		76.038.690.058		83.272.606.646		91.208.802.018		99.916.360.440	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.781.794.978		16.602.638.578		18.151.615.055		19.849.437.577		21.710.968.187	
Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	16.781.794.978	100	16.602.638.578	100	18.151.615.055	100	19.849.437.577	100	21.710.968.187	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					57.954.222.000		57.490.605.857		63.017.008.041		69.080.835.802		75.734.563.097	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	100	100	20	57.954.222.000	40	57.490.605.857	60	63.017.008.041	80	69.080.835.802	100	75.734.563.097	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					0,000		472.936.000		484.759.400		496.878.385		509.300.345	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Presentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	0	0	0	0,000	25	472.936.000	50	484.759.400	75	496.878.385	100	509.300.345	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					1.228.005.000		1.222.601.615		1.344.861.776		1.479.347.953		1.627.282.749	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi seiarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	100	100	20	1.228.005.000	40	1.222.601.615	60	1.344.861.776	80	1.479.347.953	100	1.627.282.749	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					400.120.000		249.908.008		274.362.374		302.302.301		334.246.062	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	100%	100%	20%	400.120.000	40%	249.908.008	60%	274.362.374	80%	302.302.301	100%	334.246.062	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100%	100%	20%		40%		60%		80%		100%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					16.436.443.508		19.201.833.930		19.333.854.143		19.603.703.750		20.287.214.739	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.935.632.508		15.704.184.730		15.525.787.886		15.469.745.878		15.779.140.795	
Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan (%)	100	100	100	14.935.632.508	100	15.704.184.730	100	15.525.787.886	100	15.469.745.878	100	15.779.140.795	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.377.983.000		3.033.898.145		3.297.940.096		3.572.819.095		3.930.101.004	
Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) (Nilai)	83,38	55-55	51-56	1.377.983.000	52-57	3.033.898.145	53-58	3.297.940.096	54-59	3.572.819.095	55-60	3.930.101.004	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					122.828.000		463.751.055		510.126.161		561.138.777		577.972.940	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	0	20	122.828.000	20	463.751.055	20	510.126.161	20	561.138.777	20	577.972.940	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					269.269.100		378.698.727		425.870.766		487.062.178		494.277.987	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					256.536.100		365.822.468		411.706.882		471.481.905		477.139.688	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	55,15	0	80	256.536.100	80,10	365.822.468	80,20	411.706.882	80,30	471.481.905	80,40	477.139.688	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					12.733.000		12.876.259		14.163.884		15.580.273		17.138.299	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Jumlah Arsip Yang Terlindungi dan Terselamatkan (Arsip)	0	3.150	3.200	12.733.000	3.250	12.876.259	3.300	14.163.884	3.350	15.580.273	3.400	17.138.299	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					15.871.559.174		14.542.894.090		14.713.468.569		14.885.291.954		15.042.624.205	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.209.995.474		12.861.336.007		12.861.336.007		12.861.336.007		12.861.336.007	
Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	14.209.995.474	100	12.861.336.007	100	12.861.336.007	100	12.861.336.007	100	12.861.336.007	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					489.814.000		475.556.308		525.093.423		581.235.487		627.470.128	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.531	1.610	1.644	489.814.000	1.678	475.556.308	1.711	525.093.423	1.746	581.235.487	1.780	627.470.128	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					562.936.700		629.427.241		708.984.422		779.037.543		840.358.934	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	637,60	645	660	562.936.700	674	629.427.241	688	708.984.422	701	779.037.543	715	840.358.934	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					608.813.000		576.574.534		618.054.717		663.682.917		713.459.136	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	55,72	56,00	57,95	608.813.000	59,13	576.574.534	60,32	618.054.717	61,52	663.682.917	62,75	713.459.136	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					37.259.455.864		40.927.263.278		45.286.971.453		52.073.653.174		58.644.014.623	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.427.324.764		24.400.097.259		28.723.099.359		34.044.137.359		38.663.774.585	
Terpenuhinya pemenuhan layanan kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	23.427.324.764	100	24.400.097.259	100	28.723.099.359	100	34.044.137.359	100	38.663.774.585	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.460.909.000		3.833.078.236		3.405.961.677		3.296.325.779		3.505.902.455	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing (Jiwa)			543.949	1.460.909.000	560.268	3.833.078.236	577.076	3.405.961.677	594.388	3.296.325.779	612.220	3.505.902.455	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik (Jiwa)			1.646.521		1.695.917		1.746.794		1.799.198		1.853.174		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					6.260.375.100		6.260.121.329		6.886.133.462		7.574.746.807		8.332.221.488	
Meningkatnya Jangkuan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Parwisata (%)			55,13	6.260.375.100	57,88	6.260.121.329	60,78	6.886.133.462	60,8	7.574.746.807	67	8.332.221.488	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					4.655.903.000		4.853.738.760		5.267.269.815		5.805.970.600		6.394.550.195	
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)			0,09	4.655.903.000	0,12	4.853.738.760	0,15	5.267.269.815	0,20	5.805.970.600	0,26	6.394.550.195	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.454.944.000		1.580.227.694		1.004.507.140		1.352.472.629		1.747.565.900	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)			25,31	1.454.944.000	29,73	1.580.227.694	34,16	1.004.507.140	38,59	1.352.472.629	43,01	1.747.565.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					25.693.704.070		25.366.406.353		27.605.017.685		30.063.710.381		32.765.047.399	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.337.267.080		18.109.115.666		19.765.485.801		21.579.765.877		23.567.360.535	
Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100,00	100,00	100,00	18.337.267.080	100,00	18.109.115.666	100,00	19.765.485.801	100,00	21.579.765.877	100,00	23.567.360.535	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.643.274.000		1.663.042.923		1.860.394.461		2.082.140.224		2.331.415.990	
Meningkatnya Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	Produktivitas Padi (Kw/ha)	79,19	71,90	79,21	1.643.274.000	79,22	1.663.042.923	79,24	1.860.394.461	79,25	2.082.140.224	79,40	2.331.415.990	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Jagung (Kw/ha)	0,00	89,47	89,47		99,41		110,90		112,24		113,60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Bawang Merah (Kw/ha)	205,13	205,13	205,87		206,48		207,10		207,72		208,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Cabai (Kw/ha)	37,43	37,43	46,23		46,46		46,69		46,93		47,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Sayur Hijau (Kw/ha)	176,45	178,22	178,40		181,10		183,85		186,63		189,46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Kangkung (Kw/ha)	152,34	155,32	156,87		160,07		163,34		166,68		170,09		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Bayam (Kw/ha)	57,62	57,70	58,27		59,58		60,92		62,28		63,68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Semangka (Kw/ha)	333,43	301,15	341,96		347,14		352,40		357,74		363,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Kelahiran Sapi (Ekor)	1.582,00	1.800,00	900,00		910,00		920,00		940,00		960,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Kelahiran Babi (Ekor)	0,00	5.000,00	5.000,00		5.200,00		5.400,00		5.600,00		5.800,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.924.613.900		3.727.023.433		3.920.378.722		4.131.198.027		4.361.227.751	
Meningkatnya prasarana pertanian yang berkondisi baik	Prosentase Prasarana Pertanian yang dikendalikan dan dimanfaatkan (%)	100,00	100,00	100,00	3.924.613.900	100,00	3.727.023.433	100,00	3.920.378.722	100,00	4.131.198.027	100,00	4.361.227.751	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.048.431.590		1.043.818.372		1.148.200.186		1.263.020.205		1.389.322.226	
Menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (%)	-37,00	5,00	5,00	1.048.431.590	5,00	1.043.818.372	5,00	1.148.200.186	5,00	1.263.020.205	5,00	1.389.322.226	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					173.362.000		180.448.304		207.511.562		238.638.069		274.433.836	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulungan bencana pertanian	Persentase Serangan Organisme Penggangu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional (Tanaman Pangan) (%)	2,50	2,50	2,50	173.362.000	2,50	180.448.304	2,50	207.511.562	2,50	238.638.069	2,50	274.433.836	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Serangan Organisme Penggangu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional (Hortikultura) (%)	5,00	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					0,000		80.866.000		86.652.710		92.517.981		98.469.779	
Meningkatnya rekomendasi Izin Usaha Pertanian	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian yang difasilitasi (%)	100,00	100,00	100,00	0,000	100,00	80.866.000	100,00	86.652.710	100,00	92.517.981	100,00	98.469.779	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					566.755.500		562.091.655		616.394.243		676.429.998		742.817.282	
Meningkatnya kapasitas SDM pertanian	Persentase Peningkatan Skor Kelas Kelompok Tani (%)	10,00	10,00	10,00	566.755.500	10,00	562.091.655	10,00	616.394.243	10,00	676.429.998	10,00	742.817.282	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.127.383.984		2.003.496.202		2.225.342.968		2.476.000.270		2.633.012.052	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					17.047.000		16.971.991		18.669.190		20.536.109		22.589.720	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam perolehan perijinan berusaha sektor perdagangan (%)	40	40	40	17.047.000	10	16.971.991	10	18.669.190	10	20.536.109	10	22.589.720	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					26.350.000		28.985.000		31.883.500		35.071.850		38.579.000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Jumlah omset pedagang pasar (Rp)	82,92	87,80	1.000.000.000	26.350.000	1.020.000.000	28.985.000	1.040.400.000	31.883.500	1.061.208.000	35.071.850	1.082.432.160	38.579.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					222.868.000		221.887.351		244.076.086		268.483.695		271.168.532	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah pemantauan distribusi dan harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting (Laporan)	77,33	77,33	160	222.868.000	160	221.887.351	160	244.076.086	160	268.483.695	160	271.168.532	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					966.752.000		944.798.897		1.039.278.787		1.143.206.666		1.154.638.733	
Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Ekspor bersih perdagangan (Rp)	2.447.211.081.700	2.384.062.113.417	2.407.902.734.551	966.752.000	2.456.060.789.242	944.798.897	2.505.182.005.027	1.039.278.787	2.555.285.645.128	1.143.206.666	2.606.391.358.030	1.154.638.733	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					154.318.984		151.633.668		160.551.758		170.049.393		180.168.914	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Jumlah pengawasan terhadap pelaku usaha dalam rangka tertib niaga (Pelaku Usaha)	100	96	96	154.318.984	96	151.633.668	96	160.551.758	96	170.049.393	96	180.168.914	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					740.048.000		639.219.295		730.883.647		838.652.557		965.867.153	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan rata-rata omset IKM/UKM yang difasilitasi (%)	0,78	0,94	0,50	740.048.000	0,50	639.219.295	0,50	730.883.647	0,50	838.652.557	0,50	965.867.153	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					17.124.192.102		17.746.946.571		20.273.085.295		23.164.538.089		23.644.997.266	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.532.995.102		17.113.295.382		19.575.629.723		22.396.848.218		22.799.991.486	
Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	16.532.995.102	100	17.113.295.382	100	19.575.629.723	100	22.396.848.218	100	22.799.991.486	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					551.580.000		591.738.000		652.912.800		720.202.980		794.223.278	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Nilai realisasi investasi sektor industri (Rp)	0	0	83.214.137.760	551.580.000	86.542.703.270,40	591.738.000	90.004.411.401	652.912.800	93.604.587.857,26	720.202.980	97.348.771.371,56	794.223.278	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					27.695.000		29.827.838		31.007.178		32.327.026		33.803.454	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait. (IKM)	93	90	90	27.695.000	150	29.827.838	150	31.007.178	175	32.327.026	175	33.803.454	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					11.922.000		12.085.351		13.535.594		15.159.865		16.979.048	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Data informasi industri yang lengkap dan terkini (%)	90	90	9	11.922.000		12.085.351		13.535.594		15.159.865		16.979.048	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					159.166.458.648		159.411.086.587		165.369.849.696		172.350.475.346		179.286.709.365	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					121.867.787.248		123.868.547.341		126.463.485.507		128.940.303.156		131.520.225.575	
Terlaksananya pemenuhan layanan kesekretariatan dan Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Bidang Administrasi Umum	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	96,28	100	100	121.867.787.248	100	123.868.547.341	100	126.463.485.507	100	128.940.303.156	100	131.520.225.575	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Administrasi Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					36.148.393.250		34.074.114.061		37.646.524.675		41.701.514.374		46.242.135.933	
Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	100	100	36.148.393.250	100	34.074.114.061	100	37.646.524.675	100	41.701.514.374	100	46.242.135.933	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.150.278.150		1.468.425.185		1.259.839.514		1.708.657.816		1.524.347.857	
Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase terlaksananya kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan (%)	100	100	100	1.150.278.150	100	1.468.425.185	100	1.259.839.514	100	1.708.657.816	100	1.524.347.857	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					104.823.901.692		104.738.689.963		115.687.078.476		121.089.735.274		128.682.023.786	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					65.619.995.692		64.452.956.325		69.945.106.920		71.413.954.165		72.842.233.248	
Terlaksananya pemenuhan layanan kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	99,58	100	100	65.619.995.692	100	64.452.956.325	100	69.945.106.920	100	71.413.954.165	100	72.842.233.248	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					39.203.906.000		40.285.733.638		45.741.971.556		49.675.781.109		55.839.790.538	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	0	0	0	3.158.186.528	100	3.245.590.219	100	3.685.171.528	100	4.132.136.565	100	4.683.612.394	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	0	0	0		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	0	0	36.045.719.472	100	37.040.143.419	100	42.056.800.028	100	45.543.644.544	100	51.156.178.144	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					14.849.737.004		14.947.197.712		16.070.361.108		17.283.377.576		18.593.435.360	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.226.716.504		12.774.831.372		13.796.817.882		14.900.563.313		16.092.608.378	
Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	12.226.716.504	100	12.774.831.372	100	13.796.817.882	100	14.900.563.313	100	16.092.608.378	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.255.089.000		1.839.354.929		1.940.531.815		2.049.802.852		2.167.815.571	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat (%)	100	100	100	2.255.089.000	100	1.839.354.929	100	1.940.531.815	100	2.049.802.852	100	2.167.815.571	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					367.931.500		333.011.411		333.011.411		333.011.411		333.011.411	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar (%)	100	100	100	367.931.500	100	333.011.411	100	333.011.411	100	333.011.411	100	333.011.411	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					501.823.596.870		509.894.179.784		557.129.036.770		571.822.891.721		579.975.300.911	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					76.472.606.173		78.571.910.818		83.179.283.758		84.243.573.227		82.781.080.962	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	18.139.010.552	100	18.265.983.626	100	21.190.679.152	100	22.201.108.457	100	20.264.512.240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	85,92	100	100	58.333.595.621	100	60.305.927.192	100	61.988.604.606	100	62.042.464.770	100	62.516.568.722	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					418.234.914.903		424.090.203.712		466.420.183.670		479.879.062.735		489.270.065.329	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	92,57	94,79	95,07	418.234.914.903	95,23	424.090.203.712	95,39	466.420.183.670	95,49	479.879.062.735	96,46	489.270.065.329	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.033.857.000		1.978.010.308		2.128.913.888		2.294.907.826		2.477.501.158	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (Nilai)	0	0	3,30	2.033.857.000	3,35	1.978.010.308	3,40	2.128.913.888	3,45	2.294.907.826	3,50	2.477.501.158	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					5.082.218.794		5.254.054.946		5.400.655.454		5.405.347.933		5.446.653.462	
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	43	43	43	5.082.218.794		5.254.054.946		5.400.655.454		5.405.347.933		5.446.653.462	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					17.437.345.954		16.863.413.210		18.018.742.181		18.458.444.153		19.740.009.629	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.913.933.954		15.393.403.920		16.448.351.399		16.777.318.427		17.936.488.165	
Terpenuhinya pemenuhan layanan kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	15.913.933.954	100	15.393.403.920	100	16.448.351.399	100	16.777.318.427	100	17.936.488.165	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.523.412.000		1.470.009.290		1.570.390.782		1.681.125.726		1.803.521.464	
Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN melalui Manajemen Talenta	Nilai Aspek Pengadaan (Indeks)	40	40	40	1.523.412.000	40	1.470.009.290	40	1.570.390.782	40	1.681.125.726	40	1.803.521.464	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Aspek Pengembangan Karir (Indeks)	112,50	112,50	127,50		127,50		127,50		127,50		127,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin (Indeks)	40	40	37,5		40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan (Indeks)	40	40	40		40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan (Indeks)	16	16	16		16		16		16		16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Aspek promosi dan Mutasi (Indeks)	40	40	35		35		35		35		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Aspek sistem informasi (Indeks)	22	22	22		22		22		22		22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Dimensi Disiplin (Indeks)	5	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Dimensi Kinerja (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					12.262.442.000		12.061.217.737		13.108.962.751		14.249.511.743		14.563.001.002	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					12.262.442.000		12.061.217.737		13.108.962.751		14.249.511.743		14.563.001.002	
Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN	Nilai Dimensi Kompetensi (Indeks)	31,76	31,76	32,2	12.262.442.000	32,3	12.061.217.737	32,32	13.108.962.751	32,5	14.249.511.743	32,8	14.563.001.002	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Nilai Dimensi Kualifikasi (Indeks)	21,37	21,37	22,5		22,58		23		23,15		23,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					10.801.728.400		10.339.148.336		10.887.660.777		11.526.095.530		11.707.106.836	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.033.801.400		9.473.197.680		9.891.152.446		10.237.342.782		10.452.326.980	
Meningkatnya pemenuhan layanan kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	10.033.801.400	100	9.473.197.680	100	9.891.152.446	100	10.237.342.782	100	10.452.326.980	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					357.997.000		488.344.108		583.235.617		840.137.019		767.885.235	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)		100	100	357.997.000	100	488.344.108	100	583.235.617	100	840.137.019	100	767.885.235	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					409.930.000		377.606.548		413.272.714		448.615.729		486.894.621	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)		100	100	409.930.000	100	377.606.548	100	413.272.714	100	448.615.729	100	486.894.621	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					37.183.196.062		37.692.568.273		38.771.735.161		43.424.251.453		48.635.069.607	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					33.973.910.562		34.439.319.513		35.128.105.903		39.343.396.038		44.064.520.895	
Meningkatkan pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	33.973.910.562	100	34.439.319.513	100	35.128.105.903	100	39.343.396.038	100	44.064.520.895	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					851.966.500		863.639.875		967.276.660		1.083.349.859		1.213.351.842	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangannya	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (%)	99,36	95	95	851.966.500	95	863.639.875	95	967.276.660	95	1.083.349.859	95	1.213.351.842	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2.357.319.000		2.389.608.885		2.676.352.598		2.997.505.556		3.357.196.870	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Asistensi dan Pendampingan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.357.319.000	100	2.389.608.885	100	2.676.352.598	100	2.997.505.556	100	3.357.196.870	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					138.279.501.663		122.721.906.689		143.093.551.815		145.520.727.834		150.495.431.744	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					106.904.571.329		91.208.016.117		109.442.087.764		110.116.604.443		111.893.649.652	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	23.973.051.093	100	19.617.740.202	100	20.107.554.330	100	20.335.398.342	100	20.915.787.240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	23.387.867.670	100	24.102.069.521	100	24.584.110.911	100	24.707.031.465	100	25.274.207.482	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan (%)	100	100	100	28.726.684.544	100	12.906.381.572	100	29.476.961.204	100	29.624.346.011	100	29.440.038.028	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan (%)	100	100	100	30.816.968.022	100	34.581.824.822	100	35.273.461.319	100	35.449.828.625	100	36.263.616.902	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.542.057.175		1.634.427.702		1.765.528.036		1.942.080.840		2.136.288.924	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat (Nilai)	93,16	93,16	93,20	446.864.000	93,24	308.990.162	93,28	324.439.670	93,32	356.883.637	93,36	392.572.001	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat (Nilai)	100	100	90	295.008.175	90,50	375.005.592	91	412.506.151	91,50	453.756.766	92	499.132.443	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat (Nilai)	97,14	97,16	97,18	320.991.000	97,20	337.858.558	97,22	354.751.486	97,24	390.226.635	97,26	429.249.298	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat (Nilai)	93,88	93,88	93,90	479.194.000	94,00	612.573.390	94,10	673.830.729	94,20	741.213.802	94,30	815.335.182	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					25.388.415.479		25.520.960.378		27.309.508.397		28.682.394.022		31.223.950.864	
Persentase Pemenuhan Pemberdayaan Masyarakat dan Perkembangan Desa dan Kelurahan sesuai dengan Potensinya	Tingkat persentase partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan daerah (%)	100	100	100	5.358.551.440	100	5.067.298.649	100	5.833.163.582	100	6.132.231.967	100	6.845.455.163	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
persentase tingkat partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan daerah	Tingkat persentase partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan daerah (%)	100	100	100	3.917.478.500	100	3.870.136.603	100	4.063.643.431	100	4.266.825.602	100	4.266.825.602	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	Tingkat persentase partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan daerah (%)	100	100	100	6.777.404.339	100	6.300.965.179	100	6.616.013.438	100	6.946.814.110	100	7.641.495.522	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	Tingkat persentase partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan daerah (%)	100	100	100	9.334.981.200	100	10.282.559.947	100	10.796.687.946	100	11.336.522.343	100	12.470.174.577	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.369.256.530		3.288.032.371		3.452.433.990		3.621.935.092		3.984.128.602	
Persentase Tingkat Ketentraman dan Keteriban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Keteriban Umum (%)	100	100	100	649.230.800	100	687.245.610	100	721.607.891	100	757.688.286	100	833.457.114	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Tingkat Ketentraman dan Keteriban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Keteriban Umum (%)	100	100	100	1.192.277.000	100	1.075.352.326	100	1.129.119.942	100	1.185.575.939	100	1.304.133.534	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Tingkat Ketentraman dan Keteriban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Keteriban Umum (%)	100	100	100	1.322.054.730	100	1.376.834.557	100	1.445.676.285	100	1.517.960.099	100	1.669.756.108	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Tingkat Ketentraman dan Keteriban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Keteriban Umum (%)	100	100	100	205.694.000	100	148.599.878	100	156.029.872	100	160.710.768	100	176.781.846	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					963.540.150		959.300.445		1.007.265.468		1.037.483.431		1.125.160.697	
Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan (%)	100	100	100	108.492.000	100	90.670.220	100	95.203.731	100	98.059.842	100	107.865.826	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan (%)	100	100	100	349.813.150	100	321.835.375	100	337.927.144	100	348.064.958	100	382.871.454	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan (%)	100	100	100	205.694.000	100	148.599.878	100	156.029.872	100	160.710.768	100	160.710.768	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Kewenangan Pemerintah yang Dilaksanakan di Kecamatan	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan (%)	100	100	100	299.541.000	100	398.194.972	100	418.104.721	100	430.647.863	100	473.712.649	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					111.661.000		111.169.676		116.728.160		120.230.006		132.253.005	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik (Desa)	8	8	8	39.196.000	8	31.986.557	8	33.585.885	8	34.593.461	8	38.052.808	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan (%)	100	100	100	17.625.000	100	19.258.987	100	20.221.936	100	20.828.594	100	22.911.453	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan (%)	100	100	100	22.155.000	100	24.208.956	100	25.419.404	100	26.181.987	100	28.800.185	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Desa yang Dapat Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan (%)	100	100	100	32.685.000	100	35.715.176	100	37.500.935	100	38.625.964	100	42.488.559	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					23.661.563.568		24.774.671.100		26.146.356.150		27.630.520.553		29.238.255.596	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.123.948.868		11.573.018.050		12.165.360.915		12.792.248.915		13.456.979.915	
Persentase pemenuhan penunjang kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	100	11.123.948.868	100	11.573.018.050	100	12.165.360.915	100	12.792.248.915	100	13.456.979.915	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					6.547.081.200		7.020.760.200		7.541.807.100		8.114.958.690		8.745.425.439	
Meningkatnya Pemahaman Kesatuan dan Persatuan Bangsa	Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (%)	0	0	75	6.547.081.200	75	7.020.760.200	75	7.541.807.100	75	8.114.958.690	75	8.745.425.439	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.748.781.000		1.752.865.100		1.757.357.610		1.762.299.371		1.767.735.308	
Meningkatnya Pemahaman Politik	Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Politik (%)	0	0	75	40.841.000	75	44.925.100	75	49.417.610	75	54.359.371	75	59.795.308	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Stabilitas Politik	Persentase Capaian Rencana Aksi Peningkatan Stabilitas Politik di Kota Denpasar (%)	0	0	100	1.707.940.000	100	1.707.940.000	100	1.707.940.000	100	1.707.940.000	100	1.707.940.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					543.046.500		548.451.150		603.296.265		663.625.891		729.988.480	
Meningkatnya Ketahanan EKOSOSBUD, SARA & ORMAS	Persentase Capaian Rencana Pemberdayaan Ketahanan EKOSOSBUD, Agama, SARA dan ORMAS di Kota Denpasar (%)	0	0	100	543.046.500	100	548.451.150	100	603.296.265	100	663.625.891	100	729.988.480	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.938.840.000		1.943.724.000		1.949.096.400		1.955.006.040		1.961.506.644	
Meningkatnya Pemahaman dan Kerukunan Umat Beragama	Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Kerukunan Umat Beragama (%)	0	0	75	1.890.000.000	75	1.890.000.000	75	1.890.000.000	75	1.890.000.000	75	1.890.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya Pembinaan dan Pencegahan Penggunaan Narkotika	Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Pembinaan, Pencegahan dan Bahaya Narkotika (%)	0	0	75	48.840.000	75	53.724.000	75	59.096.400	75	65.006.040	75	71.506.644	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.759.866.000		1.935.852.600		2.129.437.860		2.342.381.646		2.576.619.810	
Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Konflik Sosial yang Terfasilitasi (%)	0	0	100	1.759.866.000	100	1.935.852.600	100	2.129.437.860	100	2.342.381.646	100	2.576.619.810	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sumber: SIPD Kepmendagri 900.1.15.5-3406-24; Hasil Evaluasi RPJMD Kota Denpasar 2021- 2026; Analisis Penyusun, 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan gambaran target atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2025–2029. Penilaian terhadap kinerja ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah telah berada pada jalur yang tepat, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diukur melalui dua instrumen utama, yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Kedua instrumen ini berfungsi untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah secara makro, sedangkan IKD berperan sebagai alat ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah secara lebih spesifik.

Penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan melalui proses seleksi yang ketat dengan mempertimbangkan relevansi terhadap visi dan misi kepala daerah, kesesuaian dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta ketersediaan data yang dapat dipertanggungjawabkan. IKU yang dipilih merupakan indikator yang mampu menggambarkan secara komprehensif hasil pembangunan daerah, utamanya tercapainya sasaran prioritas pembangunan. Dengan demikian, IKU menjadi cerminan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Sementara itu, Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Daerah. Melalui IKD, pemerintah Kota Denpasar dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban umum, serta bidang lainnya yang menjadi kewenangan daerah. IKD juga berperan sebagai dasar dalam penilaian kinerja antarperangkat daerah, sekaligus alat untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025–2029, baik IKU maupun IKD disusun dengan pendekatan *result-based management* (manajemen berbasis hasil). Pendekatan ini menekankan pentingnya keterkaitan antara input, output, outcome, dan dampak dari setiap program dan kegiatan pembangunan. Penentuan target IKU dan IKD dilakukan secara terukur,

realistis, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting capaian tahun sebelumnya.

Target IKU dan IKD dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2025–2029 ditetapkan untuk periode lima tahun pelaksanaan RPJMD, yaitu tahun 2025 hingga 2029, serta dilanjutkan dengan target tahun 2030 sebagai tahun transisi. Tahun 2030 merupakan tahun penghubung antara akhir periode RPJMD ini dengan awal periode RPJMD berikutnya, di mana pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah pada periode pemerintahan selanjutnya. Penetapan target hingga tahun 2030 dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah serta menjaga keberlanjutan arah kebijakan strategis yang telah dirintis dalam periode ini.

Dalam pelaksanaannya, capaian terhadap IKU dan IKD akan dievaluasi secara periodik melalui mekanisme pelaporan kinerja tahunan pemerintah daerah yang disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) dan dievaluasi secara berjenjang. Evaluasi ini menjadi dasar dalam menentukan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta bahan perbaikan kebijakan untuk tahun-tahun berikutnya. Selain itu, hasil pengukuran kinerja juga akan menjadi rujukan dalam penentuan target selanjutnya bila dirasa perlu dengan melihat kondisi tiap tahunnya.

Melalui penyusunan IKU dan IKD yang terukur, konsisten, dan berbasis data, Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk memperkuat sistem pengelolaan kinerja yang berorientasi pada hasil. Upaya ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan tidak hanya mencerminkan capaian administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.

Sub bab ini merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa seluruh arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, terukur, serta mampu memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat Kota Denpasar. Pencapaian target IKU dan IKD bukanlah tujuan akhir semata, melainkan cerminan dari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menuju Denpasar sebagai Kota Cerdas, Maju, dan Berbudaya.

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun

2025-2029 sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, yang diperoleh dari indikator sasaran daerah.

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar Tahun 2025 – 2030

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target						Devinisi Operasional	Produses	Formula
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	85,11	85,53	85,69	85,84	86	86,16	86,31	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Rendah: IPM < 60, Sedang: 60 <= IPM < 70, Tinggi: 70 <= IPM < 80, Sangat tinggi: IPM >= 80.	BPS	IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran.
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,55	5,65	5,9 - 6,6	7,0 - 8,0	8,0 - 8,5	8,5 - 9,0	8,75 - 9,00	Laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu menggunakan persentase. Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu	BPS	$r = \frac{(\text{PDRB}_{t+1} \times 100)}{(\text{PDRB}_t - 1)} - 100$ r = Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun t Yit = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal) Yi(t-1) = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target						Devinisi Operasional	Produses	Formula
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Indeks Pendidikan	Indeks	0,777	0,778	0,779	0,78	0,782	0,783	0,784	Ukuran capaian pembangunan di bidang pendidikan yang mencerminkan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) penduduk.	BPS	Formula: Indeks Pendidikan=(Indeks HLS+Indeks RLS)/2
Usia Harapan Hidup	Tahun	76,01	76,25	76,49	76,73	76,97	77,21	77,45	Rata-rata perkiraan umur yang akan dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan mempertimbangkan tingkat mortalitas pada setiap kelompok umur.	BPS	
PDRB per Kapita	Ribu Rupiah/ Kapita	86.425,33	87.203,94	88.761,15	89.695,48	90.474,08	91.408,41	92.187,02	Nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun.	BPS	PDRB per Kapita=PDRB Atas Dasar Harga Berlaku / Jumlah Penduduk
			93.432,79	94.990,00	95.924,33	96.702,94	97.637,26	98.260,15			
Tingkat Kemiskinan	Persen	2,59	2,47	2,35	2,25	2,14	2,04	1,95	Ukuran capaian pembangunan di bidang pendidikan yang mencerminkan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) penduduk.	BPS	Formula: Indeks Pendidikan=(Indeks HLS+Indeks RLS)/2
Indeks Stabilitas Keamanan	Indeks	87,17	83,67	85,20	86,67	88,17	89,70	91,17	Merupakan Indikator Komposit sebagai parameter stabilitas Kota Denpasar	Bappeda	(indeks trantibumlinmas + Indeks Ketahanan Pangan + Indeks Resiko Bencana (IRBI)) / 3
Indeks Trantibumlinmas	Indeks	75	78,17	81,33	84,25	87,17	90,09	92,75	Indeks Trantibumlinmas adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat terciptanya kondisi aman, tertib, dan terlindunginya masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/Perkada, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Semakin tinggi nilai indeks, semakin	SatpolPP	

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target						Devinisi Operasional	Produses	Formula
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
									baik kondisi Trantibumlinmas.		
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	96,37	82,75	85,23	87,79	90,42	93,13	95,92	suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah, baik itu tingkat nasional, regional, maupun lokal	Badan Pangan Nasional	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$
Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	90,13	90,1	89,05	87,98	86,92	85,88	84,85	<p>Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat ukur untuk mengevaluasi tingkat risiko bencana di suatu wilayah, dengan mengukur potensi dampak negatif berdasarkan kerentanan dan kapasitas suatu daerah. IRBI dihitung berdasarkan dua komponen utama: bahaya dan kerentanan, serta kapasitas suatu wilayah.</p> <p>Bahaya: Merujuk pada probabilitas atau kemungkinan terjadinya bencana (misalnya, gempa bumi, banjir, kekeringan, dll.).</p> <p>Kerentanan: Tingkat kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu wilayah.</p> <p>Kapasitas: Kemampuan suatu wilayah untuk menanggulangi bencana, yang dicerminkan melalui indikator ketahanan daerah dan stakeholder terkait.</p> <p>IRBI dikeluarkan oleh BNPB setiap tahunnya melalui alamat :https://inarisk.bnpb.go.id/</p>	BPPB	<p>Indesk Resiko bencana Indonesia (IRBI) dihitung berdasarkan rumus</p> <p>Risk = Hazard x (Vulnerability/Capacity)</p> <p>dimana Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerencanaan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya,ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4)Penangan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan</p>

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target						Devinisi Operasional	Produses	Formula
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
											bencana.
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82,05	82,10	82,15	82,20	82,25	82,30	82,35		MenPAN RB	
Indeks PEMDI	Indeks	N/A	N/A	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	Pergeseran fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan (hulu), ke kinerja, mplementasi, dampak, dan kepuasan pengguna (hilir). Terdiri dari aspek tata Kelola dan Manjemen, Penyelenggara, Data, Keamanan Siber, Teknologi Digital, Keterpaduan layanan Digital Pemerintah, dan Kepuasan Penggunaan Layanan Digital Pemerintah.Mengukur tingkat kematangan skala 0-5.	Menpan RB	
Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,66	N/A	4,72	4,78	4,84	4,9	4,96	Ukuran tingkat kualitas pelayanan publik berdasarkan persepsi dan observasi terhadap unit pelayanan. Meliputi 7 unsur penilaian: persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk layanan, kompetensi pelaksana, dan pengaduan.	MenPAN RRB	
Nilai SAKIP	Nilai	76,92	78,35	80,01	81,21	82,43	83,67	84,92	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian hasil. Skor dari evaluasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi akuntabilitas Kinerja	MenPAN RB	
Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Pernyataan profesional pemeriksa (BPK) mengenai kewajaran laporan keuangan pemerintah berdasarkan empat kriteria utama. Tidak berbentuk formula numerik, tetapi kategorikal: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian); WDP (Wajar Dengan Pengecualian); TMP (Tidak Menyatakan Pendapat); TW (Tidak Wajar)	BPK	

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target						Devinisi Operasional	Produses	Formula
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,16	4,25	4,35	4,45	4,55	4,65	4,75			
Indeks Inovasi Daerah	indeks	71,17 (sangat inovatif)	72 (sangat inovatif)	73 (sangat inovatif)	74 (sangat inovatif)	75 (sangat inovatif)	76 (sangat inovatif)	77 (sangat inovatif)	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri - Indeks inovasi daerah didasarkan dua aspek yaitu terdiri dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah (SPD) dan inovasi daerah (SID). - Aspek penyelenggraan pemerintah daerah dirangkum dalam 15 indikator SPD yaitu : Visi dan Misi dalam RPJMD, APBD tepat waktu dan pengalokasian mandatory spending, Kualitas peningkatan perizinan, Jumlah pendapatan perkapita, Penurunan tingkat pengangguran terbuka, Jumlah peningkatan investasi, Jumlah peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai capaian Lakip, Penurunan Angka Kemiskinan, Nilai IPM, Penghargaan bagi inovator, Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi, Roadmap SIDA atau RIPJ PID, Fasilitasi atas Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah - Aspek inovasi daerah dirangkum dalam 20 indikator SID yang terdiri dari : Regulasi, Ketersediaan SDM, Dukungan anggaran, Alat Kerja, Bimtek inovasi, Integrasi dalam RKPD, aktor inovasi, pelaksana inovasi, jejaring inovasi, sosialisasi, pedoman teknis, kemudahan 	BRIDA	<p>IID=(SKOR TOTAL /250) x 100 SKOR TOTAL = SPD + SID SPD = JUMLAH SKROR YANG DIPEROLEH PADA 15 INDIKATOR SATUAN PEMERINTAH DAERAH SID = RATA-RATA SKOR KEMATANGAN INOVASI + SKOR INDIKATOR JUMLAH INOVASI SKOR INDIKATOR JUMLAH INOVASI = 0.38 X JUMLAH INOVASI YANG DIKIRIM. CATATAN : SKOR MAKSIMAL INDIKATOR JUMLAH INOVASI ADALAH 76 DAN INDIKATOR JUMLAH INOVASI HANYA DIHITUNG JIKA SUDAH TERDAPAT INOVASI PADA 3 ATAU LEBIH URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</p>

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target						Devinisi Operasional	Produses	Formula
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
									informasi, kemudahan proses, penyelesaian pengaduan, integrasi layanan, replikasi, kecepatan penciptaan, kemanfaatan, monitoring dan evaluasi, kualitas inovasi dan jumlah inovasi		
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,11	1,62 - 2,1	1,49 - 1,96	1.36-1,82	1,23-1,68	1,1 - 1,54	0,94 -1,4	Persentase jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja.	BPS	
Indeks Tri Hita Karana	Indeks	83,12	84	85	86	87	87,5	88		Bappeda	
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	73,3	75,23	76,73	78,23	79,73	81,23	82,73	Indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur publik seperti jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi.	PUPR	$(50\% \times ((50\% \times ((50\% \times \text{Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap}) + (50\% \times \text{Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik}))) + (30\% \times \text{Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan}) + (20\% \times \text{Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal}))) + (20\% \times ((10\% \times \text{Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah}) + (10\% \times \text{Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum}))) + (10\% \times \text{Persentase Panjang jaringan irigasi berfungsi normal})$
Persentase kinerja jalan	persen	N/A	68%	68%	69,33%	69,33%	70,66%	70,66%	Rasio Volume Kendaraan Dengan Kapasitas Jalan, Sesuai Dengan Permenhub 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	$\text{Kinerja Jalan V/C rasio} < 0,7 / \text{Total ruas jalan yang di ukur} \times 100\%$
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	61,14	64,93	65,15	65,36	65,57	65,78	65,99	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari	DLHK	$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target						Devinisi Operasional	Produses	Formula
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
									Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.		
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	54,2	48	49	50	51	53	54	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat IKPS adalah suatu ukuran kinerja pengelolaan sampah di kabupaten/kota yang mencakup indikator kebijakan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, penganggaran, sosialisasi dan pemahaman, acceptability dan implementasi, capaian terhadap target dan kapasitas, efisiensi anggaran, Kota Bersih, serta Indeks Kualitas Air (IKA)	DLHK	Perhitungan sesuai hasil input data pada platform SIPSN dari KLH RI
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	70,01	72,51	73,01	74,03	75,08	76,13	77,2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan kebudayaan. IPK memberikan gambaran tentang bagaimana kebudayaan dikelola, dilestarikan, dan dikembangkan dalam suatu masyarakat. Indeks Pembangunan Kebudayaan terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Dimensi tersebut mencakup Dimensi Ekonomi Budaya (satu indikator), Dimensi Pendidikan (enam indikator), Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (delapan indikator), Dimensi Warisan Budaya (enam indikator), Dimensi Ekspresi Budaya (empat indikator), Dimensi Budaya Literasi (tiga indikator), dan Dimensi Gender (tiga indikator).	Disbud/Bappeda, BPS	Perhitungan menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) dan K-Means Cluster Analysis Release Data IPK tingkat nasional dan provinsi dapat dilihat pada laman: https://ipk.kemenbud.go.id/

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target						Devinisi Operasional	Produses	Formula
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
peningkatan swadaya masyarakat	milyar rupiah	93,694	2,811	2,895	2,982	3,071	3,164	3,259	bentuk partisipasi masyarakat dalam serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu secara mandiri mengelola potensi dan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam pembangunan desa. Laporan merupakan rekap dari desa/lurah yang disampaikan pertriwulan melalui DPMD.	DPMD	Laporan merupakan rekap dari desa/lurah yang disampaikan pertriwulan melalui DPMD. Untuk target tahunan diformulasi sebagai peningkatan 3% dari tahun sebelumnya: (peningkatan 3% tiap tahun)
Persentase peningkatan pemajuan kebudayaan	Persen	43,7	45,58	50,87	56,15	61,44	66,73	72,01	Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tetang Pemajuan Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Persentase peningkatan pemajuan kebudayaan dihitung dengan melihat peningkatan upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap 10 Objek Pemajuan Kebudayaan + 1 Cagar Budaya di Kota Denpasar 10 OPK: Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional	Dinas Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pemajuan Kebudayaan: (Jumlah pelindungan OPK/25 x 100%) + (Jumlah pengembangan OPK /25 x 100%) + (Jumlah pemanfaatan OPK/25 x 100%) + (Jumlah pembinaan OPK/25 x 100%) Capaian pelindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan diperoleh dengan rumus: Pelindungan: (Jumlah pendataan OPK/11 x 3,48) + (Jumlah rekonstruksi OPK/11 x 3,48) + (Jumlah konservasi OPK/11 x 3,48) + (Jumlah revitalisasi OPK/11 x 3,48) + (Jumlah penyediaan sarana prasarana untuk pelindungan OPK 11 x 3,48) + (Jumlah dokumentasi OPK/11 x 3,48) + (Jumlah penetapan cagar budaya/1 x 0,32) + (Jumlah Penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya/1 x 0,32) + (Jumlah penyusunan regulasi

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target						Devinisi Operasional	Produses	Formula
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
											OPK/11 x 3,48) Pengembangan: (Jumlah penelitian dan kajian OPK/11 x 8,33) + (Jumlah pengembangan kreatif OPK/11 x 8,33) + (Jumlah sarana dan prasarana pengembangan OPK/11 x 8,33) Pemanfaatan: (Jumlah ruang publik untuk pemanfaatan OPK/11 x 6,25) + (Jumlah edukasi dan promosi OPK/11 x 6,25) + (Jumlah kegiatan OPK yang dapat meningkatkan ekonomi/11 x 6,25) + (Jumlah pemberian informasi OPK/11 x 6,25) Pembinaan: (Jumlah peningkatan kapasitas SDM OPK/11 x 8,33) + (Jumlah apresiasi budaya yang diberikan kepada pelaku OPK/11 x 8,33) + (Jumlah jaminan sosial pelaku OPK/11 x 8,33)

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

4.2.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Indikator Kinerja Daerah adalah Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan untuk menilai capaian pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD berfungsi sebagai alat ukur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh, yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci, yang bersama-sama menggambarkan hasil dari pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025–2029.

Indikator makro pembangunan mencerminkan gambaran umum capaian pembangunan daerah dalam skala agregat, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks gini, serta indikator lingkungan dan sosial lainnya yang menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah. Indikator ini memberikan gambaran komprehensif tentang arah, kualitas, dan keberlanjutan pembangunan Kota Denpasar.

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang secara langsung menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. IKK disusun berdasarkan hasil identifikasi urusan wajib dan pilihan, yang meliputi bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, lingkungan hidup, serta pariwisata dan kebudayaan. Melalui indikator kinerja kunci, pemerintah daerah dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan, menilai kinerja perangkat daerah, serta mengukur kontribusi setiap urusan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sebagai instrumen evaluatif, Indikator Kinerja Daerah memiliki peran strategis dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih. IKD disusun untuk menilai kinerja pembangunan daerah dari empat aspek utama, yaitu:

Aspek Geografi dan Demografi, yang mencakup kondisi dan dinamika wilayah, kependudukan, serta karakteristik spasial yang berpengaruh terhadap arah pembangunan daerah.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang menggambarkan tingkat kualitas hidup masyarakat, meliputi indikator sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang mencerminkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Aspek Daya Saing Daerah, yang menilai kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan inovasi berbasis kearifan lokal.

Aspek Pelayanan Umum, yang menilai efektivitas dan kualitas penyelenggaraan layanan publik serta tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keempat aspek tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan pembangunan Kota Denpasar, baik dari sisi potensi wilayah, kondisi sosial ekonomi, kapasitas daya saing, maupun kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, IKD menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan hasil pembangunan lintas sektor serta memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Melalui penerapan Indikator Kinerja Daerah yang terukur, konsisten, dan berbasis data, Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang berorientasi pada hasil (result-based management). IKD tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dengan pengelolaan IKD yang baik, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan Kota Denpasar semakin adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan menuju Denpasar sebagai Kota Cerdas, Maju, dan Berbudaya

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	61,14	64,93	65,15	65,36	65,57	65,78	65,99
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	90,13	90,1	89,05	87,98	86,92	85,88	84,85
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	-	48	49	50	51	52	53
4	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	96,37	82,75	85,23	87,79	90,42	93,13	95,92
5	Jumlah Penduduk	Jiwa	755.560	762.490	769.160	775.580	781.730	787.630	793.260
6	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,76	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81
7	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	2.548,33	2.741,02	2.951,27	3.178,27	3.421,90	3.681,93	3.964,65
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	9,29	9,33	9,37	9,41	9,45	9,49	9,53
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	93,59	93,69	93,98	94,27	94,57	94,86	95,15
10	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak	%	53,21	53,49	53,61	53,75	53,89	54,03	54,17
11	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	100	10	12	14	16	18	20
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,96	0,91	0,88	0,83	0,79	0,75	0,71
13	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	17	18	19	20	21	22	23
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	85,11	85,53	85,69	85,84	86	86,16	86,31
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,55	5.65-5.9	5.9-6.6	7-8	8-8.5	8.5-9	8.75-9
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,11	1.62-2.1	1.49-1.96	1.36-1.82	1.23-1.68	1.1-1.54	0.94-1.4
4	Persentase Peningkatan Pemajuan Kebudayaan	%	43,7	45,58	50,87	56,15	61,44	66,73	72,01

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	76,01	76,25	76,49	76,73	76,97	77,21	77,45
6	Indeks Pendidikan	Indeks	0,777	0,778	0,779	0,78	0,782	0,783	0,784
7	Peningkatan Swadaya Masyarakat (Miliar)	Rp	93,694	2,811	2,895	2,982	3,071	3,164	3,259
8	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	Rp	86.425,33	87203.94- 93432.79	88761.15-94990	89695.48- 95924.33	90474.08- 96702.94	91408.41- 97637.26	92187.02- 98260.15
9	Tingkat Kemiskinan	(%)	2,59	2,47	2,35	2,25	2,14	2,04	1,95
10	Nilai Tukar Petani (NTP)		108,83	109,10	109,24	109,37	109,51	109,65	109,78
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,71	70,59	71,04	71,49	71,94	72,39	72,85
12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,200	0,198	0,196	0,194	0,192	0,190	0,190
13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,53	11,59	11,62	11,65	11,68	11,71	11,74
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,77	96,89	97,01	97,13	97,25	97,37	97,48
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,13	14,14	14,14	14,15	14,15	14,15	14,16
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	52	52,52	53,04	53,57	54,10	54,64	55,18
17	Rasio Gini	Indeks	0,3413	0,335	0,332	0,327	0,325	0,323	0,322
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	77,95	79,00	79,53	80,07	80,61	81,15	81,7
19	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	72,56	73,76	74,96	76,16	77,36	78,56	79,76
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	60,50	61,26	62,02	62,78	63,54	64,30	65,05
21	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	123,3	120	119,5	119	118,5	118	117,5
22	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	10,56	10	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5
23	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,31	6,40	6,45	6,49	6,54	6,59	6,63
24	Total Fertility Rate (TFR)	%	1,87	1,88	1,9	1,91	1,93	1,94	1,95
25	Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	97,15	96,92	96,80	96,69	96,57	96,46	96,35
26	Rasio Ekspor Dan Impor Terhadap PDRB	Rasio	0,0582	0,0670	0,0719	0,0772	0,0828	0,0889	0,0954

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
27	Angka Melek Huruf	%	99,47	99,55	99,59	99,63	99,67	99,71	99,75
28	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persentase	4,80	4,80	4,30	3,80	3,30	2,80	2,30
29	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	23	23,04	23,08	23,12	23,16	23,2	23,24
30	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	68.63:63.63	69.2:70.2	70.2:71.2	71.2:72.1	72.1:73	73:73.9	73.9:74.7
31	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat	%	103,68	104,28	104,58	104,88	105,19	105,49	105,80
III ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	70,01	72,51	73,01	74,03	75,08	76,13	77,2
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82,05	82,10	82,15	82,20	82,25	82,30	82,35
3	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	83,12	84	85	86	87	87,5	88
4	Indeks Inovasi Daerah	Angka	71,17	72	73	74	75	76	77
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	73,3	75,23	76,73	78,23	79,73	81,23	82,73
6	Persentase Kinerja Jalan	%	-	68	68	69,33	69,33	70,66	70,66
7	Rasio Permukiman Layak Huni	%	99,66	99,74	100	100	100	100	100
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	-	26,85	28,15	29,45	30,75	32,05	33,35
9	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,252	0,251	0,249	0,247	0,246	0,244	0,243
10	Persentase Area Kawasan Kumuh [Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh]	%	0,184	0,144	0	0	0	0	0
11	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	-	-	-	-	-	-	-
12	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	71,17	0	79,51	82,5	85,6	88,82	92,17
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	-	-	-	-	-	-	-
14	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	-	-	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
15	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	%	99,85	99,87	99,89	99,90	99,92	99,94	99,95
16	Persentase Desa Mandiri	%	100	100	100	100	100	100	100
17	Garis Kemiskinan	*	820.512	882.140	914.668	948.396	983.367	1.019.629	1.057.227
18	Angka Ketergantungan	%	37,81	37,27	37,01	36,74	36,48	36,22	35,96
19	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	2.586.144,58	2.637.836,87	2.690.593,60	2.744.405,48	2.799.293,59	2.855.279,46	2.912.385,05
20	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	20.511,99	-	-	-	-	-	-
21	Tingkat Inflasi	(%)	2,54	2,63	2,68	2,72	2,77	2,82	2,87
22	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	37,81	37,27	37,01	36,74	36,48	36,22	35,96
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	-	-	-	-	-	-	-
24	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	29.749,00	30.867,00	31.441,00	32.026,00	32.622,00	33.229,00	33.847,00
IV ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Stabilitas Keamanan	Indeks	87,17	83,67	85,20	86,67	88,17	89,70	91,17
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,16	4,25	4,35	4,45	4,55	4,65	4,75
3	Nilai SAKIP	Nilai	76,92	78,35	80,01	81,21	82,43	83,67	84,92
4	Indeks Trantibumlinmas	Indeks	75	78,17	81,33	84,25	87,17	90,09	92,75
5	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Indeks PEMDI (pemerintahan Digital)	Indeks	-	-	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
7	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,66	4,66	4,72	4,78	4,84	4,9	4,96
8	Indeks SPBE	Indeks	3,96	3,98	4	4,02	4,04	4,06	4,08
V INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/Sederajat/Paket B	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	75,55	60,30	63,20	66,10	69,00	71,90	74,80
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	%	99,18	99,24	99,31	99,37	99,43	99,50	99,56
4	Iklim Keamanan SMP	Nilai	75,94	76,10	77,60	79,10	80,60	82,10	83,60
5	Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
6	Angka Kelulusan SMP/Sederajat	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Angka Numerasi SMP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
8	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	78,43	75,48	76,48	77,48	78,48	79,48	80,48
9	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/Sederajat/Paket A	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Angka Literasi SD	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
11	Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	70,64	72,19	73,69	75,19	76,69	78,19	79,69
12	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini	%	77,91	78,01	78,06	78,10	78,15	78,20	78,25
13	Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	Nilai	93,78	85,21	86,31	87,41	88,51	89,61	90,71
14	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	%	98,49	98,67	98,75	98,84	98,93	99,01	99,10
15	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi B PAUD	Sekolah	273	100	100	100	100	100	100
16	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	57,82	62,92	65,42	67,92	70,42	72,92	75,42
17	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi B SMP	Sekolah	47	71	72	72	72	72	72
18	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar SMP/MTs	Rasio	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
19	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun	%	60,49	73,79	76,83	79,87	82,91	85,87	88,84
20	Angka Kelulusan SD/Sederajat	%	100	100	100	100	100	100	100
21	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat	%	98,83	99,15	99,31	99,46	99,62	99,78	99,94
22	Iklim Keamanan SD	Nilai	75,48	77,55	78,45	79,35	80,25	81,15	82,05
23	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun	%	17,95	19,18	23,28	27,38	31,48	35,58	39,68
24	Angka Numerasi SD	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
25	Proporsi guru dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma Empat (D-IV) SD	%	80,89	97,12	97,62	98,12	98,62	99,12	99,62
26	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	62,78	65,45	67,85	70,25	72,65	75,05	77,45
27	Rasio guru/murid sekolah	Rasio	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	pendidikan dasar SD/MI								
28	Angka Putus Sekolah SD/Sederajat	%	0,007	0,0006	0,0004	0,0003	0,0003	0,0002	0,0001
29	Proporsi guru dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma Empat (D-IV) SMP	%	72,75	93,15	93,65	94,15	94,65	95,15	95,65
30	Proporsi guru dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma Empat (D-IV) PAUD	%	79,03	81,19	81,69	82,19	82,69	83,19	83,69
31	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi B SD	Sekolah	135	222	224	226	228	230	230
32	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	77,09	76,10	77,10	78,10	79,10	80,10	81,10
33	Kondisi Bangunan Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik dan Rusak Ringan	%	867	867	1.017	1.167	1.317	1.467	1.617
34	Kondisi Bangunan Ruang Kelas SMP/MTs dalam Kondisi Baik dan Rusak Ringan	%	370	370	380	390	400	410	420
35	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat	%	82,25	83,71	84,45	85,20	85,96	86,72	87,49
36	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	88,50	71,72	74,22	76,72	79,22	81,72	84,22
37	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/Sederajat	%	0,27	0,29	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33
38	Angka Literasi SMP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
39	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat	%	90,68	91,36	91,71	92,05	92,40	92,74	93,09
40	Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat	%	0,008	0,007	0,006	0,005	0,004	0,003	0,002
41	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/Sederajat	%	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
AB 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
2	Pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	orang dengan risiko terinfeksi HIV								
3	Persentase balita gizi buruk yang mendapat tatalaksana	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan puskesmas pembantu	%	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14
5	Lulus Akreditasi	*	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna
6	Angka kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0,027	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
7	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 Kelahiran	11,97	11,97	11,94	11,91	11,88	11,85	11,82
8	Persentase Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS)	%	98,12	90	92	94	96	100	100
9	Persentase bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	%	79,2	79	81	83	84	85	85
10	Persentase pemenuhan SDM dan operasional rumah sakit	%	0	90	91	91	95	95	95
11	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan PHBS	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)	%	81,5	90	90	90	90	90	90
13	Persentase Praktik Inisiasi Menyusu Dini	%	74,29	75	76	77	78	79	80
14	Persentase fasyankes yang memenuhi standar INM	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase penggunaan obat rasional (POR)	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Kasus PD3I Mendapatkan penanganan	%	100	100	100	100	100	100	100
17	Cakupan Penemuan Kasus Pneumonia Balita	%	123,4	40	40	40	40	40	40

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
18	Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Cakupan puskesmas	%	275	275	300	300	300	300	300
20	Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	75	75	80	85	90	95	100
22	Persentase Puskesmas dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Baik	%	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
25	Persentase kegawatdaruratan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
26	Ketersediaan Obat Dan Vaksin	%	100	95	95	95	95	95	95
27	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
28	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
29	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
30	Persentase Institusi Pendidikan yang Melaksanakan PHBS	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
31	Cakupan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI)	%	100	100	100	100	100	100	100
32	Penurunan Angka Kematian Dengue	%	0	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
33	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Nilai	88,66	89,16	89,20	89,30	89,40	89,50	89,60
34	Persentase pemberian obat pencegahan masal (POPM) cacingan pada anak usia 6-23 bulan (BADUTA)	%	0	99,57	99,57	99,57	99,57	99,57	99,57
35	Persentase Puskesmas dengan SDMk sesuai standar	%	72,7	72,7	73	74	75	80	85
36	Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	83,41	83,46	83,51	83,56	83,61	83,66	83,71
37	Persentase Fasyankes Memenuhi Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
38	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
39	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100
40	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
41	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	10,4	10,4	10,4	8,9	8,9	8,9	7,4
42	Persentase Pemeriksaan Kehamilan (ANC) 6 kali Selama Masa Kehamilan	%	104,9	80	82	85	88	90	90
43	Persentase Pemberian	%	0	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 6-23 bulan (baduta) yang diare								
44	Persentase pemberian obat cacing pada anak BALITA	%	99,57	99,57	99,57	99,57	99,57	99,57	99,57
45	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100
46	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART	%	81,7	90	90	90	90	90	90
47	Persentase BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	%	0	65	70	75	80	85	85
48	Indeks Capaian SPM Bidang Kesehatan	*	100	100	100	100	100	100	100
49	Persentase kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat	%	99,24	90	90	90	90	90	90
50	Persentase remaja putri yang konsumsi TTD	%	83,15	90	92	94	96	98	98
51	Persentase Pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam setelah 6 bulan	%	94	94	94	94	95	95	95
52	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	93,64	94	94	94	95	95	95
53	Persentase terpenuhinya alat kesehatan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	%	64	64	64	65	65	66	66
54	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
55	Persentase Stimulasi dan Pemantauan Perkembangan pada BALITA	%	101,3	95	96	97	98	99	100
56	Persentase Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan yang diare	%	100	100	100	100	100	100	100
57	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk (Per 100.000 Penduduk)	Rasio	1,46	1,46	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
58	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
59	Persentase BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	0	50	55	60	65	70	70
60	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	90	90	90	90	90	90	90
61	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	100	100	100	100	100	100
62	Persentase BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	%	100	100	100	100	100	100	100
63	Persentase krisis kebencanaan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
64	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	100
65	Persentase capaian survei kepuasan masyarakat	%	88,67	100	100	100	100	100	100
66	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
67	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	sesuai standar								
68	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
69	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	99	99	99	99	99	99	99
70	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
71	Persentase Tempat Kerja yang Melaksanakan PHBS	%	85	85	85	85	86	86	86
72	Persentase BADUTA mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap	%	95	95	95	95	95	95	95
73	Persentase tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi	%	100	100	100	100	100	100	100
74	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
75	Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	%	100	100	100	100	100	100	100
76	Persentase balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	%	93,65	65	70	75	80	85	90
77	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	74,1	74,1	83,8	83,8	93,5	93,5	100
78	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	0	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
79	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	-	55	60	65	70	75	80
80	Persentase Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	%	91,42	84	85	86	88	90	90
81	Persentase remaja putri yang diskriminasi anemia	%	38,28	75	77	80	83	85	87

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
82	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana serta pembekalan farmasi rumah sakit	%	0	80	85	90	90	95	95
83	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1000 Penduduk	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
84	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
85	Cakupan kepesertaan JKN	%	99,74	100	100	100	100	100	100
86	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 Kelahiran	8,36	8	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5
87	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	2	2	2	2	2	2	2
88	Persentase Tempat Umum yang Melaksanakan PHBS	%	85	85	85	85	86	86	86
89	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100	100	100	100	100	100
90	Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Prosentase Ketataan Terhadap RTRW	%	99,86	97,80	98,07	98,34	98,61	98,88	99,15
2	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	85	86,5	88	89,5	91	92,5	94
3	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	jiwa/km	1.795,00	1.827,80	1.860,60	1.893,40	1.926,20	1.959,00	1.991,80
4	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	89,29	90,19	90,69	91,19	91,69	92,19	92,69
5	Persentase Irigasi Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik	%	86	87	89	91	93	95	97
6	Rasio Jaringan Irigasi	%	15,30	16,04	16,50	17,00	17,25	17,50	17,75
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	99,85	99,87	99,89	99,90	99,92	99,93	99,95

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Presentase PSU Pendukung Fungsi Hunian yang tertata	%	100	90	90	90	90	90	90
3	Persentase pelaksanaan SPM yang mendapatkan rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	-	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	99,1	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menit	10,03	12	10	9,5	9	8,5	8,5
7	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Anak Terlantar di Luar Panti								
2	Persentase Cakupan Layanan Pengajuan Jaminan Kesehatan PBI	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Cakupan Layanan Penanganan dan Pelayanan Proses Rehabilitasi Rumah Berdaya	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Cakupan Layanan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Cakupan Layanan Penanganan Tuna Sosial Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Cakupan Layanan Bantuan Alat Bantu Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja	%	65	65,05	65,10	65,15	65,20	65,25	65,30

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	yang Terserap								
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	0	10	10,10	10,20	10,30	10,40	10,50
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	60,50	61,26	62,02	62,78	63,54	64,30	65,05
2	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak	Predikat	KLA Tingkat Utama	KLA Tingkat Utama	KLA Tingkat Utama	KLA	KLA	KLA	KLA
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Ketersediaan Sampel Pangan yang Aman Dikonsumsi	%	-	-	93	93	94	95	95
2	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (PPH Ketersediaan)	Skor	96,21	96,22	96,25	96,30	96,35	96,40	96,44
3	Ketersediaan Protein	Gram/Kapita/Hari	175,10	175,10	175,20	175,25	175,30	175,35	175,40
4	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH Konsumsi)	Skor	90,92	93,60	93,61	93,62	93,63	93,64	93,65
5	Ketersediaan Energi Masyarakat	Kkal/Kapita/Hari	3.969	3.969	3.970	3.971	3.972	3.973	3.974
6	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,92	93,60	93,61	93,62	93,63	93,64	93,65
7	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan di Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
8	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	60	60	60	60	60	60	60
9	Ketersediaan Pangan Utama kg/jiwa	*	296,09	296,09	297,10	297,15	297,20	297,25	297,30
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	terfasilitasi								
2	Persentase tanah fasos fasum pemerintah kota Denpasar bersertifikat	%	81,95	85	91,15	93,36	95,58	97,78	100
AK 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Persentase cakupan area pelayanan (hasil penyapuan di ruas jalan, sampah pelanggaran dan sampah dari TPS ke TPA)	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	%	79,93	14,31	15,00	15,50	16,50	50,00	55,00
3	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat terkait Persetujuan Lingkungan dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Kota	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Volume Sampah yang Dikelola	%	96,96	14,34	15,05	15,56	16,07	50,08	55,09
5	Persentase Volume Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	17,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
6	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang Diberikan	Buah	9	10	11	12	13	14	15
7	Dokumen KLHS untuk K/R/P tingkat kota	%	2	-	-	-	-	2	-
8	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara	Indeks	86,75	77,79	78,09	78,39	78,69	78,99	79,29
10	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	29,08	39,88	39,95	40,02	40,09	40,16	40,23
11	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	52,22	65,68	65,88	66,08	66,28	66,48	66,68
12	Pembinaan dan	%	64	65	70	75	80	85	90

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	4,37	4,40	4,43	4,46	4,49	4,52	4,55
2	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perekaman KTP-EI	%	99,65	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	80,32	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00
5	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Pelayanan Publik Dukcapil	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
7	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	%	99,38	99,50	99,60	99,65	99,70	99,75	99,80
8	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	100	100	100	100	100	100	100
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase LPM Berprestasi	%	-	9	9	9	9	9	9
3	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	4	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
4	Persentase Desa yang memiliki Program Pemanfaatan Pekarangan untuk Peningkatan Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1
6	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1
8	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	ASFR 15-19 tahun	%	8,9	8,5	8,1	7,7	7,3	7	6,7
2	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	29,6	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
3	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	63,9	64,8	65,7	66,5	67,3	68,1	68,9
4	Calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	%	36,57	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	52,7	53,5	54,3	55,1	55,9	56,7	57,5
6	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	72,8	73,43	74,06	74,69	75,32	75,95	76,58
7	Pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan dalam 42 hari pascapersalinan	%	80	95	100	100	100	100	100
8	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	92,00
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,96	0,91	0,88	0,83	0,79	0,75	0,71
10	Unmeetned	%	15,72	15,22	14,72	14,22	13,72	13,22	12,72

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
11	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	74,6	74,9	75,2	75,4	75,7	75,9	76,2
12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	53	53,56	54,12	54,68	55,24	55,8	56,36
13	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	91,9	92,5	93,1	93,6	94,1	94,5	94,9
14	Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	15,8	15,4	15	14,6	14,2	13,8	13,4
AO 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Persentase Rata - Rata Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Umum	%	67	69	71	73	75	77	78
2	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Unit	26.043	26.303	26.566	26.832	27.100	27.371	27.645
3	Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan Dalam Keadaan Baik	%	44	50	55	60	65	70	75
AP 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100
AQ 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	40,70	42	43	43,5	44	44,5	45
2	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	1	1	1	1	1	1	1

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	67,88	2	5	5	5	5	5
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Jumlah Atlet Berprestasi	Jiwa	1.745	1.600	1.616	1.632	1.648	1.664	1.680
2	Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang Olahraga (Cabor)	33	34	34	34	34	34	34
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100
4	jumlah perolehan medali emas pada event olahraga tingkat provinsi, nasional, dan internasional	Medali	322	328	334	340	346	352	358
5	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	%	0	18	20	22,22	25	29,09	30
6	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	100	100	100	100	100	100	100
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	85	85	90	95	100	100	100
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	%	60	60	70	80	90	100	100
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Jumlah Sanggar Kesenian	Unit	426	436	446	456	476	486	496
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Lembaga Subak	Lembaga	42	42	42	42	42	42	42
4	Jumlah Desa Adat yang Aktif	Lembaga Desa dan Desa Adat	35	35	35	35	35	35	35
5	Penyelenggaraan Festival	Kegiatan	18	21	22	24	26	28	30

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Seni dan Budaya								
6	Jumlah Promosi Kebudayaan yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar	Kegiatan	23	26	28	29	31	33	35
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	%	0,6670	0,6670	0,6670	0,6670	0,6670	0,6670	0,6670
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buah	41.535	42.335	43.203	44.073	44.945	45.821	46.701
3	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	22.110	22.510	22.944	23.379	23.815	24.253	24.693
4	Persentase Pemustaka per Tahun	%	85,24	85,25	85,26	85,27	85,28	85,29	85,30
5	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	%	53,23	53,17	53,11	53,05	52,99	52,93	52,87
6	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	83,38	55-55	51-56	52-57	53-58	54-59	55-60
7	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Jiwa	637.976	650.735	663.750	677.025	690.565	704.377	718.465
8	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	Orang	8	36	72	108	144	183	183
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks (Skala 0-100)	76,11	30-35	31-36	32-37	33-38	34-39	35-40
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kali	1	1	1	1	1	1	1
2	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai Rata-Rata Evaluasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal yang Mengelola Arsip secara Baku	%	85,74	85,75	85,76	85,77	85,78	85,79	85,80
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok	20	20	20	20	20	20	20

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	yang mendapatkan pembinaan Pemda								
2	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	%	68,57	68,57	69,27	69,22	69,15	69,14	69,11
4	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina Pemda	Kelompok	57	30	30	30	30	30	30
5	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan Pemda	Kelompok	7	5	5	5	5	5	5
6	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	637,6	630	660	674	688	701	715
7	Cakupan Bantuan Kelompok Pembudidaya Ikan	%	100	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
8	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	2.168,70	2.255	2.304	2.352,00	2.399,00	2.447,00	2.495,00
9	Jumlah Konsumsi Ikan (Angka Konsumsi Ikan)	Kg/KAP/TH	53,58	53,58	57,95	59,13	60,32	61,52	62,75
10	Capaian Konsumsi Ikan	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Perahu Motor Tempel	Unit	326	326	326	326	326	326	326
12	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Perahu Tanpa Motor	Unit	10	10	10	10	10	10	10
14	Cakupan Bantuan Kelompok Nelayan	%	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
15	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Ton	1.478,30	1.511,46	1.596,00	1.628,00	1.659,00	1.692,00	1.724,00
16	Capaian Produksi Perikanan	%	100	100	100	100	100	100	100
17	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	%	7,08	1,21	1,23	1,26	1,28	1,30	1,33
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Kontribusi sektor pariwisata	%	-	26,85	28,15	29,45	30,75	32,05	33,35

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	terhadap PDRB pariwisata harga berlaku								
2	Rata-rata pengeluaran wisatawan domestik	Rp	1.422.026	1.422.026	1.465.000	1.509.000	1.554.000	1.600.000	1.648.000
3	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Domestik	Hari	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
4	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Asing	Hari	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28
5	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	%	-	-	3	3	3	3	3
6	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik	%	-	-	3	3	3	3	3
7	Rata-rata pengeluaran wisatawan asing	Rp	2.242.540	2.289.219	2.358.000	2.429.000	2.501.000	2.576.000	2.654.000
BA 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Populasi Ternak (Sapi)	Ekor	1.858	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
2	Populasi Ternak (Kambing)	Ekor	503	600	650	700	750	800	850
3	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	40,65	42	43	44	46	48	50
4	Produksi sektor pertanian (Bawang Merah)	Ton	101	143,68	143,96	144,25	144,54	144,83	145,12
5	Produktivitas Jagung	Kw/ha	0	89,47	89,47	99,41	110,90	112,24	113,60
6	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional (Hortikultura)	%	5	5	5	5	5	5	5
7	Jumlah Kelompok Tani	Kelompok	123	128	133	138	143	148	153
8	Produksi sektor pertanian (Cabai)	Ton	27	46	46,23	46,46	46,69	46,93	47,16
9	Produksi sektor pertanian (Sayur Hijau)	Ton	2.667	2.699,14	2.699,17	2.712,66	2.726,23	2.739,86	2.753,56
10	Persentase Peningkatan Skor Kelas Kelompok Tani	%	13,01	15	15	15	15	15	15
11	Produktivitas Padi	Kw/ha	79,19	71,90	79,21	79,22	79,24	79,25	79,4
12	Produksi sektor pertanian (Padi)	Ton	24.085,37	22.406,87	22.419,19	22.431,52	22.443,86	22.456,21	22.461,76
13	Produktivitas Kangkung	Kw/ha	152,34	155,32	156,87	160,07	163,34	166,68	170,09
14	Kelahiran Sapi	Ekor	1.582	1.800	900	910	920	940	960

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
15	Kelahiran Babi	Ekor	0	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
16	Populasi Ternak (Ayam Buras)	Ekor	23.776	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
17	Produktivitas Sayur Hijau	Kw/ha	176,45	178,22	178,40	181,10	183,85	186,63	189,46
18	Produktivitas Bayam	Kw/ha	57,62	57,70	58,27	59,58	60,92	62,28	63,68
19	Produksi sektor pertanian (Bayam)	Ton	622	622,29	623,41	624,66	625,91	627,16	628,42
20	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional (Tanaman Pangan)	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
21	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	%	50	75	78	80	85	85	85
22	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	%	10	15	20	25	30	35	50
23	Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	1	1	1	1	1	1	1
24	Produksi sektor pertanian (Jagung)	Ton	9	3.535,84	3.542,9	3.550,0	3.557,1	3.564,2	3.571,3
25	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persentase Peningkatan/Penguatan Kelas Kelompok Tani)	%	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5
26	Produksi sektor pertanian (Semangka)	Ton	3.653	3.667,95	3.686,29	3.704,72	3.723,24	3.741,86	3.760,57
27	Produksi Daging	Ton	409,83	413,28	434,39	438,74	443,56	448,89	454,72
28	Produksi sektor pertanian (Kangkung)	Ton	4.839	4.494,07	4.570,88	4.570,97	4.571,06	4.571,15	4.571,25
29	Produktivitas Semangka	Kw/ha	333,43	301,15	341,96	347,14	352,40	357,74	363,16
30	Produktivitas Bawang Merah	Kw/ha	205,13	205,13	205,87	206,48	207,10	207,72	208,35
31	Produktivitas Cabai	Kw/ha	37,43	37,43	46,23	46,46	46,69	46,93	47,16
BB	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	PDRB ADHB Sektor	Rp	4.206,28	6.888,27	7.434,51	7.978,72	8.587,50	9.223,83	9.922,07

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Perdagangan (Juta Rupiah)								
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB	%	9,88	9,84	9,75	9,62	9,56	9,48	9,39
3	Jumlah Ekspor (Juta Rupiah)	Rp	2.586.144,58	2.637.836,87	2.690.593,60	2.744.405,48	2.799.293,59	2.855.279,46	2.912.385,05
4	PDRB ADHK Sektor Perdagangan (Juta Rupiah)	Rp	4.024,22	4.163,46	4.336,24	4.493,21	4.669,80	4.846,78	5.034,35
5	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	%	5,5	3,83	5,02	5,02	4,86	4,68	4,90
6	Jumlah Impor (Juta Rupiah)	Rp	138.903,50	141.681,56	144.515,20	147.405,50	150.353,61	153.360,68	156.427,90
7	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta Rupiah)	Rp	2.447.211.081.700	2.384.062.113.417	2.407.902.734.551	2.456.060.789.242	2.505.182.005.027	2.555.285.645.128	2.606.391.358.030
BC 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Laju Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	%	4,47	3,46	4,15	3,62	3,93	3,79	3,87
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB	%	6,44	6,41	6,35	6,27	6,23	6,18	6,12
3	Pertumbuhan Industri	%	25,67	21	21,20	21,50	21,80	21,90	22
4	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan (juta rupiah)	Rp	4.206,28	4.489,78	4.845,82	5.200,54	5.597,34	6.012,10	6.467,22
5	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp	2.489,11	2.575,23	2.682,11	2.779,20	2.888,42	2.997,89	3.113,91
6	Cakupan Bina Pengrajin	%	10	54	54	54	54	54	54
7	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB	%	6,44	6,41	6,35	6,27	6,23	6,18	6,12
BD 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Nilai LKJIP Sekretariat Daerah	Nilai	82,85	80.01-90.00	80.01-90.00	80.01-90.00	80.01-90.00	80.01-90.00	80.01-90.00
3	Persentase Fasilitas Penataan Organisasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Yang Dapat Ditindak Lanjuti								
5	Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah Kerjasama Daerah yang Difasilitasi	Dokumen	28	28	28	28	28	28	28
7	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase laporan administrasi Pembangunan yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
BE	4.02 - SEKRETARIAT DPRD								
1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	99,96	100	100	100	100	100	100
BF	5.01 - PERENCANAAN								
1	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	RPJMD dengan Renstra PD								
5	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
6	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
BG 5.02 - KEUANGAN									
1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	26,43	28,13	29,83	31,53	33,23	34,93	36,63
2	Persentase Belanja Pendidikan	%	24,43	25,45	26,46	25,82	25,19	24,55	23,92
3	Persentase Belanja Kesehatan	%	17,78	22	19,96	19,45	18,94	18,43	17,93
4	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	48,14	49,62	50,37	51,14	51,91	52,70	53,50
5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	10	10	10	10	10	10	10
6	Penetapan APBD	Ketetapan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
BH 5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah	Jiwa	4.916	6.760	6.400	6.200	6.000	5.800	5.600
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	13,55	14,25	14,75	15,00	15,25	15,50	15,75
3	Persentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	%	97,44	100	100	100	100	100	100
4	Persentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah	%	94,19	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
BI 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase ASN yang	%	79,23	2,17	2,19	2,23	2,50	2,57	2,60

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal								
2	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (JP)	*	253,13	253,37	253,57	253,67	253,69	253,87	254,17
3	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	85,71	100	100	100	100	100	100
4	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	66,61	61,01	61,62	62,24	62,85	63,48	64,10
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	34,42	42,60	50,01	62,44	70,02	82,54	90,05
BJ	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase Inovasi Daerah Yang Ditetapkan	%	-	91	92	93	94	95	96
2	Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kelitbangan	%	90,91	91	92	93	94	95	96
3	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	67	75	75	75	75	75	75
4	Persentase Kekayaan Intelektual yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
BK	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH								
1	Persentase pelaksanaan program kerja pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	*	3,000	3,005	3,010	3,015	3,020	3,025	3,030
3	Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Berkadar Pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Perangkat	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Daerah dengan nilai SAKIP meningkat								
BL	7.01 - KECAMATAN								
1	Persentase Urusan Perangkat Daerah yang Terlaksana dengan Baik di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Urusan Perangkat Daerah yang Terlaksana dengan Baik di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	93,16	93,16	93,20	93,24	93,28	93,32	93,36
4	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	97,14	97,16	97,18	97,20	97,22	97,24	97,26
5	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	100	100	90	90,50	91	91,50	92
6	Persentase Layanan yang Sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik	Desa	8	8	8	8	8	8	8
8	Persentase Urusan Perangkat Daerah yang Terlaksana dengan Baik di Tingkat Kecamatan	%	0	0	100	100	100	100	100
9	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik	Desa	0	0	4	4	4	4	4
10	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik	Desa	8	8	8	8	8	8	8
11	Persentase Layanan yang Sesuai dengan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Kewenangan dan Standar Pelayanan								
12	Persentase Layanan yang Sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan	%	0	0	100	100	100	100	100
BM	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Menurunnya Konflik IPOLEKSOSBUD dan SARA	%	7,14	7,69	8,33	9,09	10	11,11	12,5
2	Persentase Capaian Rencana Aksi Peningkatan Stabilitas Politik di Kota Denpasar	%	0	0	100	100	100	100	100
3	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Politik	%	0	0	75	75	75	75	75
5	Persentase Capaian Rencana Pemberdayaan Ketahanan EKOSOSBUD, Agama, SARA dan ORMAS di Kota Denpasar	%	0	0	100	100	100	100	100
6	Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Kerukunan Umat Beragama	%	0	0	75	75	75	75	75
7	Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Pembinaan, Pencegahan dan Bahaya Narkoba	%	0	0	75	75	75	75	75
8	Persentase Konflik Sosial yang Terfasilitasi	%	0	0	100	100	100	100	100
9	Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	%	0	0	75	75	75	75	75
10	Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	7,14	7,69	8,33	9,09	10	11,11	11,11

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Denpasar untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran tahap pertama RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045. Dokumen RPJMD ini berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah serta memuat tujuan, strategi, arah kebijakan, program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen RPJMD ini juga menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan lainnya dan harus dilaksanakan secara konsisten oleh penyelenggara pemerintahan.

5.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kota Denpasar agar melaksanakan program-program yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, masyarakat, dan dunia usaha;
2. Walikota berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dengan mengerahkan seluruh kekuatan dan potensi daerah yang ada dan menjamin konsistensi antara RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
3. Perangkat Daerah Kota Denpasar berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja);
4. Walikota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.2. PEDOMAN TRANSISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan. RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 ini juga akan menjadi pedoman bagi pemerintahan selanjutnya. Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diharapkan berbagai program pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD ini telah

dilaksanakan secara konsisten oleh perangkat daerah. Hasil pembangunan tahap ini kiranya dapat menjadi dasar bagi kesinambungan program pembangunan daerah Kota Denpasar selanjutnya.

Wakil Kota Denpasar

I Gusti Ngurah Jaya Negara